SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sartono Kartodirdjo
Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

VI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1975

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sartono Kartodirdjo
Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

VI

PERPUSTAKAAN
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala
NO INDUK 959 (6)
TGL. 12-3-83

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1975

Sejarah Nasional Indonesia

Jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia
Jilid II Jaman Kuno (1 M ± 1500 M).
Jilid III Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (± 1500 ± 1800)
Jilid IV Abad Kesembilanbelas (± 1800 – 1900)
Jilid V Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900 1942).
Jilid VI Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (± 1942 – 1970).

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

VI

JAMAN JEPANG
DAN
JAMAN
REPUBLIK INDONESIA

Editor :

Nugroho Notosusanto

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1975

TEAM REDAKSI

Ketua	:	Nugroho Notosusanto
Anggota	:	Ariwiadi
		Emilia B. Wiesmar
		M. Marbcen
		Rokhmani Santoso
		Saleh As'ad Djamhari

P R A K A T A

Jilid VI yang merupakan bagian terakhir buku Sejarah Nasional Indonesia ini mengandung masalah-masalah khusus yang menyangkut sifat periodenya yang lazim disebut *contemporary history* atau sejarah sejaman. Periode yang di dalam masyarakat secara populer disebut Jaman Jepang dan Jaman Kemerdekaan ini masih sempat dialami oleh sebagian besar orang Indonesia yang sekarang masih hidup. Pastilah bahwa mereka itu semuanya masing-masing mempunyai pengalaman pribadi atau setidak-tidaknya kesan pribadi mengenai peristiwa-peristiwa dalam periode ini.

Karena itulah bagian terakhir ini kiranya bagian yang paling sulit mensejarahkannya. Setiap penulisan sejarah terdiri atas dua komponen: komponen *fakta* dan komponen *interpretasi*. Untuk menetapkan fakta-fakta dalam periode terakhir ini dituntut taraf *accuracy* atau kecermatan yang tinggi sampai ke detail, justru karena begitu banyak pelakunya masih hidup. *Seleksi* terhadap fakta-fakta yang kesemuanya sudah teruji sesuai dengan syarat-syarat metode sejarah, juga merupakan persoalan yang menyangkut subyektivitas sejarawan. Kita selalu dapat berbantah mengenai fakta mana yang cukup penting untuk dimasukkan ke dalam teks dan fakta mana yang terpaksa harus dikesampingkan karena pembatasan tempat yang tersedia. Sebab jelas kiranya, bahwa tidak semua fakta sejarah mungkin dimasukkan ke dalam sebuah buku sejarah, karena terbatasnya tempat. Memang demikianlah hakekatnya: sejarah-sebagai-kisah pasti jauh lebih sedikit – hanya sekelumit – daripada sejarah-sebagai-aktualitas.

Adapun interpretasi-sejarah, sudah jelas adalah subyektif. Para pelakunya saja, masing-masing, akan menanggapi peristiwa yang dialaminya secara subyektif; demikian pula para sejarawan yang harus mengkisahkannya. Dan subyektivitas itu tidak selalu karena kesengajaan, melainkan karena perspektif yang berbeda-beda.

Persoalan pokok lain yang harus kami pecahkan dalam menyusun sejarah sejaman Indonesia ini yalah mengenai taraf ke-sejaman-an atau *contemporaneity* yang dapat kita capai dalam buku Sejarah Nasional ini. Sampai seberapa dekat ke jaman kita sendiri sejarah itu boleh kita tuliskan? Anggapan konvensionil

mengatakan: seluruh Jaman Jepang dan pasti Jaman Kemerdekaan masih belum dapat disebut sejarah, karena dialami oleh banyak orang yang masih hidup. Dengan ukuran "pelaku masih hidup" ini bahkan periode sebelumnya, yang disejarahkan di dalam Jilid V, yang meliputi sejarah Pergerakan Nasional yang begitu pentingnya bagi kehidupan nasional kita, juga dapat dianggap "masih belum sejarah".

Buku ini sejak semula bertolak dari kebutuhan nyata rakyat Indonesia dewasa ini, dan sejak semula memang tidak mau terikat kepada pandangan-pandangan konvensionil. Kebutuhan masyarakat kita dewasa ini yalah, antara lain, pengertian atau wawasan mengenai pengalaman nasional kita yang pada tiga dasawarsa yang belakangan ini berkembang begitu cepat. Setidak-tidaknya buku ini, khususnya jilid terakhirnya, harus dapat memberikan *orientasi* kepada masyarakat kita mengenai posisinya yang sekarang. Kami menilai Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pengalaman yang paling penting dan paling relevan bagi rakyat kita dalam rangka kehidupan nasionalnya. Mengingat, bahwa sebagai textbook perguruan tinggi, buku ini terutama akan dipakai oleh mahasiswa generasi muda yang lahir sesudah Proklamasi, bahkan sesudah Perang Kemerdekaan, maka jelas kiranya, bahwa ujung Sejarah Nasional ini harus ditarik sedekat-dekatnya ke jaman kita. Dalam hal itu kami memutuskan untuk bersikap tidak tanggung-tanggung, dan mengakhiri periode terakhir ini pada saat dimasukinya Jaman Pembangunan ini yang juga dikenal dengan Jaman Orde Baru.

Adapun Jilid VI ini kami bagi atas tiga bab: pertama adalah bab *Tinjauan Menyeluruh* yang menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam periode ini secara prosesuil; sedangkan bab kedua dan ketiga yang masing-masing membahas *Jaman Jepang* dan *Jaman Republik Indonesia* mencoba memberikan penggambaran strukturil. Berlainan dengan periode-periode yang lampau, terutama sebelum abad ke 20, aspek prosesuil daripada sejarah sangat menonjol, justru karena perkembangan yang cepat yang untuk sebagian besar masih dialami oleh kita yang hidup pada masakini. Karena itu kami rasa perlu memberikan satu bab khusus untuk penyajian secara prosesuil.

Pada akhirnya kami ingin menutup prakata ini dengan suatu catatan mengenai subyektivitas-sejarah yang di atas telah di-

singgung. Justru karena kebanyakan pelaku sejarah periode ini masih hidup, pastilah bahwa kadar *emosi* di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa maupun tokoh-tokohnya, sangat tinggi. Banyak peristiwa dan tokoh yang termasuk jenis *kontroversiil*. Segalanya itu bertambah intensitasnya dengan tindakan menarik ujung kisah-sejarah periode ini sedekat-dekatnya ke jaman kita sekarang ini. Kiranya peristiwa-peristiwa yang baru terjadi ibaratnya "kemarin" atau "kemarin dulu" masih hangat dalam pandangan dan perasaan kita masing-masing. Kesemuanya itu cukup memberikan alasan bagi sejarawan yang "mencari amannya" untuk menghindarkan periode yang begitu muttakhir.

Kami memilih sikap untuk tidak melarikan diri dari kesulitan dengan alasan yang termaktub di atas . Kami tetap menyajikan kisah-sejarah sampai ke periode muttakhir dan mencoba memberikan interpretasi yang sejauh mungkin seimbang dan layak. Namun, kami juga menyadari, bahwa interpretasi itu tidak mungkin memuaskan semua pihak secara penuh. Sebagai sejarawan profesionil kami menyadari, bahwa memang di sanalah letak limitasi disiplin sejarah. Namun, kami tetap berharap, agar-supaya kombinasi antara fakta dan interpretasi yang kami sajikan di sini akan dapat memenuhi keperluan masyarakat Indonesia dewasa ini untuk mengenali dirinya sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya, sehingga dengan suatu proses penyesuaian yang kritis senantiasa menyempurnakan kemampuan sarana-sarananya guna mengsukseskan Pembangunan Nasional. Semoga masalampau kita yang muttakhir dapat menyinari masadepan yang sedang kita jangkau!

Akhir 1974. NUGROHO NOTOSUSANTO

DAFTARISI

BAB. I. TINJAUAN MENYELURUH Halaman

A. JAMAN JEPANG

1. Tentara Jepang masuk ke Indonesia 1
2. Usaha menanamkan kekuasaan 5
3. Usaha mempertahankan kekuasaan 11
4. Janji kemerdekaan serta Dokuritsu Junbi Cosakai dan badan-badan lainnya 15
5. Menjelang Proklamasi 21

B. PERIODE PERANG KEMERDEKAAN

1. Perjuangan awal 29
2. Melawan aksi militer Belanda yang pertama 47
3. Menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia 54
4. Melawan aksi militer Belanda yang kedua dan menuju Pengakuan Kedaulatan 59

C. PERIODE DEMOKRASI LIBERAL

1. Periode sebelum pemilihan umum 1 72
2. Periode sejak pemilihan umum 1 92

D. PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Kembali ke Undang-undang Dasar '45 100
2. Kekuatan-kekuatan politik dalam konstelasi Demokrasi Terpimpin. 105
3. Keadaan ekonomi selama Demokrasi Terpimpin 109
4. Politik luar negeri selama Demokrasi Terpimpin 110
5. Pembebasan Irian Jaya 111
6. Konfrontasi terhadap Malaysia dan ke luar dari Perserikatan Bnagsa-Bangsa 115
7. Gerakan 30 September (G.30.S/PKI) 119

BAB. II. JAMAN JEPANG

A. PERUBAHAN SOSIAL DAN MOBILITAS SOSIAL

1. Mobilitas sosial kaum muda 125
2. Mobilitas sosial golongan-golongan lain 132

B EKONOMI PERANG

1. Penguasaan dan pengawasan kegiatan ekonomi 140
2. Keuangan, perdagangan dan produksi 144

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN POLITIK

1. Struktur pemerintahan 151
2. Kehidupan politik 157

D. PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI SOSIAL

1. Pendidikan 170
2. Komunikasi sosial 174

BAB. III. REPUBLIK INDONESIA

A. PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI SOSIAL

1. Stratifikasi sosial dan mobilitas vertikal 187
2. Mobilitas horisontal 193

B. PERKEMBANGAN EKONOMI

1. Pemikiran mengenai ekonomi Indonesia 207
2. Pelaksanaan daripada pemikiran ekonomi Indonesia 215

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN POLITIK

1. Struktur pemerintahan 237
2. Kehidupan politik 247

D. PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI SOSIAL

1. Pendidikan 263
2. Perkembangan bahasa Indonesia 284
3. Perkembangan seni 294
4. Media komunikasi massa 305

E. HUBUNGAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

1. Situasi dunia setelah Perang Dunia II 318
2. Politik bebas-aktif dalam prinsip 322
3. Politik bebas-aktif dalam praktek 329

F. PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL DAN DWIFUNGSI ABRI

1. Pertahanan-Keamanan Nasional Indonesia 337
2. Dwifungsi ABRI 340

BAB I

TINJAUAN MENYELURUH

A. JAMAN JEPANG

1. Tentara Jepang Masuk ke Indonesia

Didalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia, telah meletuskan suatu perang di Pasifik. Pada tanggal 8 Desember 1941 secara tiba-tiba Jepang menyerang dan membom Pearl Harbor yakni pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik. Lima jam setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang.

Kemudian Jepang bergerak ke Selatan dan menyerang Indonesia, pada tanggal 10 Januari 1942 tentaranya telah sampai di Tarakan, Kalimantan Timur [1], dan Komandan Belanda dipulau itu menyerahkan diri pada tanggal 13 Januari 1942.[2] Seminggu kemudian pada tanggal 20 Januari 1942[3], Balikpapan yang merupakan sumber minyak berhasil diduduki pula oleh Jepang. Setelah pada tanggal 2 Pebruari 1942[4] Pontianak jatuh menyusullah pada tanggal 10 Pebruari 1942 Martapura.[5] Dengan berhasil direbutnya lapangan terbang, maka dengan mudah pula Banjarmasin diduduki pada malam hari itu juga.[6]

Dalam gerakannya ke Indonesia, pada tanggal 14 Pebruari 1942 diturunkan pasukan payung di Palembang. Dua hari kemudian, yakni pada tanggal 16 Pebruari 1942 Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki.[7] Dengan jatuhnya Palembang itu terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang. Didalam menghadapi ofensif Jepang, dibentuklah suatu komando oleh pihak Serikat, yakni yang disebut *ABDACOM (American British Dutch Australian Command)* yang markas besarnya ada di Lembang, dekat Bandung. Letnan Jenderal H. Ter Poorten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda *(KNIL)*. Pada akhir Pebruari 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starken-

---

1 *Soeara Madjelis Islam A'laa Indonesia*, 15 Januari :1943, hal. 18.
2 *Pandji Poestaka*, 1 April 1942, hal. 29.
3 *I b i d.*
4 *Soeara Madjelis Islam A'laa Indonesia*, 15 Januari 1943, hal.18.
5 *Asia Raya*, 3 Juni 1942.
6 *I b i d.*
7 *Soeara Madjelis Islam A'laa Indonesia* 15 Januari 1943, hal.

borgh Stachouwer telah pindah ke Bandung disertai oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Pada masa itu Hotel Homan dan Preanger penuh dengan pejabat-pejabat tinggi yang mengungsi dari Batavia.

Adapun kekuatan Hindia Belanda di Jawa waktu itu seluruhnya berjumlah sekitar 40.000 orang (4 Divisi), diantaranya terdapat pasukan-pasukan Inggris, Amerika dan Australia. Sedangkan kekuatan invasi Jepang di Jawa adalah jauh lebih besar, yakni seluruhnya terdiri dari kira-kira 6 sampai 8 divisi dan jumlahnya meliputi 100 sampai 120 ribu orang.[8]

Sedangkan kekuatan Jepang yang khusus dipergunakan untuk merebut pulau Jawa berada dibawah komando Tentara Keenambelas yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitosyi Imamura. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentaranya berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah).[9]

Setelah pendaratan itu ibukota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan sebagai "kota terbuka" yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Dengan jatuhnya kota Batavia ketangan tentara pendudukan Jepang, maka segera diusahakan untuk menduduki Buitenzorg (Bogor) guna menghindarkan kemungkinan larinya tentara *KNIL* ketempat tersebut didalam rangka gerak mundurnya kearah Bandung. Maka pada tanggal 5 Maret 1942 Buitenzorg berhasil diduduki oleh Kolonel Nasu.

Dalam rangka usaha menyerbu kota Bandung, Jenderal Imamura telah mengerahkan suatu detasemen yang dipimpin oleh Kolonel Tosyinari Syoji dengan kekuatan 5.000 orang.[10] yang didaratkan di Eretan, sebelah barat Cirebon. Pada tanggal 1 Maret 1942 Kolonel Syoji telah berhasil menduduki Subang. Pada hari itu juga mereka menyerang lapangan terbang Kalijati dan tentara Hindia Belanda berhasil diusir dari lapangan terbang tersebut.[11]

Keesokan harinya Tentara Hindia Belanda berusaha merebut

---

8 Lt. ter Zee KMR. H V Quispel *Nederlandsch Indië in den Tweede Wereld Oorlog*, London, 1945 hal. 215.

9 *I b i d*, hal 215.

10 C.van Hoogenband & L. Schotborgh (Kolonel van het KNIL) *(Nederlandsch Indië Contra Japan)*, deel VI 's Gravenhage, 1961 hal. 85-6,

11 "Djatoehnja Soebang: Tentara Belanda menjerang doea kali, tapi tak berhasil". *Asia Raja*, 28 Mei 1942.

Subang kembali. tetapi ternyata mereka tidak berhasil. Serangan-balasan kedua atas Subang dicoba pada tanggal 3 Maret 1942 dan sekali lagi tentara Hindia Belanda dipukul mundur.[12] Bahkan dalam rangka konsolidasi, tentara Jepang menggunakan pejabat-pejabat setempat untuk membantu mereka. Pada tanggal 3 Maret 1942 diangkatlah 11 orang menjadi pengurus "Badan Perantaraan dan Propaganda Balatentara Nippon Subang" yang diketuai oleh O. Sutaatmadja.[13] Pada tanggal 4 Maret 1942 tentara Hindia Belanda mengadakan serangan lagi dalam usaha untuk merebut Kalijati. Disamping mengalami kegagalan kembali. dalam serangan ini ratusan prajurit Belanda menjadi korban.[14]

Dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai itu. Kolonel Syoji akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan Hindia Belanda hanya terbatas sekali dan memusatkan pertahanannya di pegunungan Priangan. Karena itu rencananya ialah menyerang pertahanan tersebut dari udara.

Pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang bergerak dari Kalijati untuk menyerbu Bandung. Mula-mula digempurnya pertahanan di Ciater, sehingga tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang dan menjadikan kota tersebut sebagai pertahanan yang terakhir. Tetapi tempat inipun tak berhasil dipertahankan sehingga pada tanggal 7 Maret 1942 petang hari dikuasai oleh tentara Jepang.[15]

Gerakan operasi dari Detasemen Syoji itu telah mengakibatkan memburuknya posisi tentara *KNIL* dalam pertempuran di Jawa Barat, sehingga kapitulasi pasukan-pasukan yang dikonsentrasi di sekitar Bandung dalam beberapa hari dapat menjadi kemungkinan yang serius. Pada tanggal 6 Maret 1942 keluarlah perintah dari Panglima Besar *KNIL*, Letnan Jenderal Ter Poorten kepada Komandan di Bandung. Mayor Jenderal J, J Pesman tentang tidak dibolehkannya mengadakan pertempuran di Bandung.[16]

Baik Jenderal Ter Poorten maupun Gubernur Jenderal Tjarda van

---

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 Mengenai Gerakan Operasi Detasemen Syoji ini lihat dalam C. van Hoogenband & L. Schotborg , *et.al.*, *op. cit.* hal. 89-92.

16 *Ibid*, hal. 156.

Starkenborgh kedua-duanya berpendapat bahwa Bandung pada saat itu telah penuh sesak dengan penduduk sipil. wanita dan anak-anak. sehingga perlu dicegah pertempuran-pertempuran di kota itu.

Tak lama sesudah berhasil didudukinya posisi tentara *KNIL* di Lembang. maka pada tanggal 7 Maret 1942 pada petang harinya datanglah utusan Jenderal Pesman yakni Kapten Geharz ke Lembang dengan permintaan untuk berunding mengenai gencatan senjata. Pada kesempatan itu Kolonel Syoji memerintahkan agar Jenderal Pesman sudah harus berada digedung Isola (sekarang IKIP Bandung) pada keesokan harinya jam 08.30. Sementara itu pula Kolonel Syoji menghubungi Jenderal Imamura yang memerintahkan kepada bawahannya itu untuk mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh. Dan melalui Kolonel Syoji itu pula Jenderal Imamura ingin mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Tjarda pada tanggal 8 Maret 1942 pagi di Subang. Atas anjuran Jenderal Ter Poorten permintaan tersebut ditolak, sehingga dikeluarkan ancaman dari pihak Jepang bahwa "Bandung dengan seluruh penduduknya akan dibom dari udara". Ancaman tersebut telah merubah keputusan Gubernur Jenderal Tjarda dan ia menyatakan kesediaannya untuk pergi ke Subang.

Suatu perundingan yang berakhir dengan penyerahan tentara Hindia Belanda tanpa syarat kepada tentara Jepang berlangsung bukan di Subang, melainkan di Kalijati. Jenderal Imamura beserta staf tiba di lapangan terbang Kalijati pada tanggal 7 Maret 1942 jam 16.00 untuk selanjutnya berhadapan dengan musuh yang terdiri dari Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Ter Poorten serta beberapa pejabat tinggi militer serta seorang perwira penterjemah. Hasil pembicaraan antara kedua belah pihak adalah kapitulasi tanpa syarat daripada seluruh angkatan perang Serikat di Indonesia yang diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten.

Selanjutnya mengenai penyerahan tanpa syarat itu Jenderal Ter Poorten diperintahkan untuk mengumumkannya sendiri kepada pasukan-pasukannya melalui radio. yang ternyata kemudian dibacakan oleh Kepala Stafnya. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, senjata-senjata harus sudah diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat sebelum jam 12.00 tanggal 8 Maret 1942.

2. *Usaha menanamkan kekuasaan.*

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda. atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang dibawah pimpinan Letnan Jenderal H. Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu berakhirlah Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan jaman Hindia Belanda dimana hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada jaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yakni:

1. Tentara Keenambelas di pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia (kemudian dinamakan Jakarta);
2. Tentara Keduapuluhlima di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi;
3. Armada Selatan Kedua di Kalimantan. Sulawesi, Nusa Tenggara. Maluku dan Irian Barat. dengan pusatnya di Makasar.

Dengan berhasil didudukinya Indonesia oleh tentara Jepang. maka mula-mula diadakan pemerintahan pendudukan militer di pulau Jawa yang sifatnya adalah sementara. sesuai dengan Undang-undang No. 1 pasal 1, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, pada tanggal 7 Maret 1942. yang antara lain berbunyi sebagai berikut: Balatentara Nippon melangsungkan Pemerintahan Militer untuk sementara waktu didaerah yang ditempatinya. agar supaya mendatangkan keamanan yang sentausa dengan segera.[17]

Tugas memulihkan ketertiban dan keamanan serta menanamkan kekuasaan yang sementara lowong itu diserahkan kepada suatu pemerintahan militer yang disebut *Gunseibu*. yang masing-masing meliputi Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung. Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. dan Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Disamping itu dibentuk dua daerah istimewa *(kōci)* Surakarta dan Yogyakarta.

Setiap *Gunseibu* didukung oleh para komandan setempat yang disamping bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan.

---

17 Lt. ter Zee KMR. H.V. Quispel. *op. cit.* hal. 234 - 235

juga memecat para pegawai bangsa Belanda serta membentuk pemerintahan setempat. Tetapi usaha untuk membentuk pemerintahan setempat ternyata tidak dapat berjalan lancar. Jepang mengalami kekurangan staf pegawainya, yang sebenarnya telah dikirim tetapi kapalnya kena terpedo Sekutu [18], sehingga dengan demikian terpaksa diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Di Jawa Barat misalnya, yang mendampingi Gubernur Kolonel Matsui untuk sementara waktu bukanlah seorang bangsa Jepang, melainkan seorang Indonesia, yaitu R. Pandu Suradiningrat. Dalam jabatannya sebagai wakil Gubernur ia dibantu oleh Atik Suardi. Demikian pula halnya dikota "Batavia" seorang bangsa Indonesia bernama H.Dahlan Abdullah untuk sementara waktu telah diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah. Dan jabatan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko.

Di Jawa Tengah sama halnya dengan di Jawa Barat jabatan seorang Gubernur ditangan orang Jepang yakni Letnan Kolonel Taga. Didalam tugasnya itu ia didampingi oleh pegawai tinggi bangsa Indonesia, seperti Rd. Muhamad Chalil yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Salaman menjabat sebagai Residen.[19]

Dengan diangkatnya pegawai-pegawai Indonesia, maka pada tanggal 1 April 1942 pemerintah militer Jepang mengeluarkan undang-undang tentang peraturan gaji pegawai negeri dan lokal. Untuk sementara waktu gaji bagi pegawai-pegawai bangsa Indonesia yang dahulu dibawah f.100,– sebulan akan tetap dibayarkan seperti sediakala. Tetapi bagi mereka yang dahulu gajinya melebihi f. 100,– akan dibayar menurut aturan tersebut dibawah ini sebagai berikut :

No.	Banyaknya gaji dahulu sebulan	Potongan %	Banyak gaji sekarang sebulan
1.	f. 100 – 150	5%	f. 100
2.	f. 151 – 200	7.5%	f. 141
3.	f. 201 – 250	10%	f. 184
4.	f. 251 – 300	12%	f. 224
5.	f. 301 – 400	15%	f. 239
6.	f. 401 – 500	18%	f. 263
7.	f. lebih dari 500	20%	f. 409 [20]

18 M.A Azis. *Japan's Colonialism and Indonesia*, The Hague, 1955 hal.158.
19 *Asia Raya*, 11 Mei 1942.
20 *Pandji Poestaka*, No. 3, 25 April 1943, hal 105.

Berdasarkan pada peraturan gaji yang tercantum diatas jelaslah bahwa pegawai-pegawai Indonesia yang gajinya melebihi dari f.100.– terkena potongan yang cukup besar. Disamping itu ditetapkan pula untuk tidak memberikan gaji kepada pegawai Indonesia melebihi dari f.500,–.

Peraturan lainnya yang sifatnya meng "Jepangkan Indonesia" untuk kemudian disebar-luaskan kepada penduduk setempat antara lain seperti yang dimuat dalam Undang-undang No.4, yakni bahwa hanya bendera *kokki* Jepang yang boleh dipasang pada hari-hari besar. Dan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah lagu *Kimigayo*.

Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942, waktu (jam) Jepanglah yang harus dipakai. Perbedaan antara waktu Jepang (waktu Tokyo) dan Jawa adalah 90 menit. Waktu tersebut adalah untuk mengganti waktu Jawa pada jaman Hindia Belanda, yang sama dengan WIB. Mulai tanggal 29 April 1942 tarikh yang harus dipakai yalah tarikh *Sumera* dan tahunnya adalah tahun 2602. Demikian pula sejak saat itu rakyat Indonesia diwajibkan merayakan hari raya *Tencōsetu* setiap tahunnya, yakni hari lahirnya Kaisar Hirohito.

Dalam soal keuangan, menurut Undang-undang No. 2 tertanggal 8 Maret 1942 ditetapkan bahwa untuk kepentingan jual-beli dan pembayaran lainnya, mata-uang yang berlaku yalah uang rupiah Hindia Belanda. Pemakaian mata-uang lain dilarang keras.[21]

Pada bulan Agustus 1942 usaha pemerintah militer Jepang meningkat dengan dikeluarkannya Undang-undang No.27 (tentang aturan pemerintahan daerah) dan Undang-undang No.28 (tentang aturan pemerintahan *Syū* dan *Tokubetsu Syi*,[22] yang menunjukkan berakhirnya nama pemerintahan sementara. Kedua undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan daripada struktur pemerintahan setelah datangnya tenaga pemerintahan sipil Jepang di pulau Jawa. Mereka mulai dikerjakan pada badan-badan pemerintahan guna melaksanakan tujuan reorganisasi Jepang yang hendak menjadikan pulau Jawa sebagai sumber kekayaan perangnya di Asia Tenggara.[23] Untuk itu seluruh

21 Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, *Tata Negara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang: Dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942*, Yogyakarta, 1952, hal.14 - 15.

22 *Pemandangan*, 16 Maret 1942.

23 *Asia Raya*, 1 Maret 1943.

pulau Jawa dan Madura. kecuali kedua *kōci* Surakarta dan Yogyakarta dibagi atas *syū, syi, gun, son* dan *ku*.[24] Dengan demikian provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dihapuskan.[25] Sebagai gantinya pada tanggal 8 Agustus 1942 dibentuk daerah pemerintahan *Syū*. Jumlahnya 17 di pulau Jawa, yang diperintah oleh seorang *Syūcōkan*. Kekuasaannya sama dengan gubernur, tetapi daerah kekuasaannya sama dengan keresidenan. Pelantikan yang secara resmi diadakan pada bulan September 1942 menandakan mulai disingkirkannya pegawai-pegawai Indonesia yang pernah untuk sementara waktu ditempatkan pada kedudukan yang tinggi.

Demikian pula halnya dengan H. Dachlan Abdullah. Kedudukannya sebagai kepala pemerintahan kota Batavia telah diganti oleh seorang pejabat Jepang yang menjabat sebagai *Batavia Tokubetsu Syicō* (Pemimpin Kota Istimewa Batavia). Kedudukannya itu adalah sehubungan dengan pasal 5 Undang-undang No. 27 yang memungkinkan dibentuknya suatu daerah swatantra lain yang dinamakan *Tokubetsu Syi* (Kotapraja Istimewa). Yang dianggap memenuhi syarat adalah kotapraja Batavia dan pada tanggal 8 Agustus 1942 ditetapkan sebagai *Tokubetsu Syi*.

Di Sumatra pemerintahan militer Jepang membentuk 10 keresidenan *(syū)*, yang terdiri atas *bunsyū* (sub keresidenan), *gun* dan *son*. Jabatan tertinggi dipegang oleh orang Jepang.[26] Dan kesepuluh *Syū* yang dibentuk itu adalah: Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bangkahulu, Jambi, Palembang, Lampung dan Bangka-Biliton.[27]

Disamping pemerintahan militer *(gunsei)* oleh Angkatan Darat, maka suatu pemerintahan telah pula dibentuk oleh Armada Selatan Kedua dengan nama *Minseifu* dan berpusat di Makasar. Kantornya yang disebut *minseibu* terdapat di tiga tempat, yakni di Kalimantan, Sulawesi dan Seram. Daerah

---

24 *Syū* = residensi dahulu; *Gun* = district; *Syi* = daerah Stadsgemeente dahulu; *Ken* = daerah regentschap dahulu; *Ku* = desa, Lihat Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, *op.cit.*, hal. 22 - 23.

25 *Pandji Poestaka*, No. 23, 13 September 1942, hal. 828.

26 George S.Kanahele, The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence. A thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for the degree of Doctor of Philosophy, 1967, bab IV, alinea 9.

27 Lihat Berkas Dokumentasi Mr. Achmad Subardjo tentang Jaman Jepang, hal. 42.

bawahannya meliputi *Syū*, *ken*, *bunken* (sub-kabupaten), *gun* dan *son*. Sama halnya dengan di pulau Jawa dan Sumatra, maka tak lama setelah pendaratan tentara Jepang, bangsa Indonesia untuk sementara mendapat jabatan-jabatan yang tinggi. Setelah bulan Agustus 1942 jabatan yang disediakan untuk bangsa kita hanya meliputi *guncō* dan *soncō*. Sedangkan jabatan sebagai walikota di Makasar, Menado, Banjarmasin dan Pontianak di duduki oleh bangsa Jepang.[28]

Didalam usaha untuk mempersatukan semua orang Asia yang pro Jepang, telah dibentuk Pergerakan Tiga A oleh Kantor Propaganda tidak lama setelah pendaratan tentara Jepang di Jawa. Dengan semboyan dan semangat Tiga A. yang berbunyi "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia", pemerintah militer Jepang berusaha untuk menanamkan tekad penduduk agar berdiri sepenuhnya di belakang pemerintah tentara Jepang. Seorang propagandis Jepang bernama Hitosyi Syimizu turut aktif menyebar luaskan slogan tersebut dan untuk keperluan propaganda pada akhir bulan April 1942 berhasil diterbitkan harian *Asia Raya*.

Tetapi Gerakan Tiga A tersebut tidak berlangsung lama, kiranya karena organisasi itu dibentuk oleh pejabat-pejabat sipil dalam bagian Propaganda tanpa dukungan pejabat-pejabat militer, yang memandang gerakan itu dengan curiga [29]

Pemerintah militer Jepang memerlukan dukungan penduduk dan untuk itu diperlukan kerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia lainnya.

Sementara itu Drs .Moh. Hatta dan Sjahrir yang merupakan tokoh-tokoh nasionalis dibebaskan kembali sebagai tahanan politik pemerintah Hindia Belanda. Mula-mula pada awal pendudukan, Hatta menunjukkan sikap anti-fasis dan pernah menulis suatu artikel yang menyatakan dukungannya terhadap Sekutu.[30] Tetapi sikapnya itu tak lama kemudian berubah. Dalam suatu pertemuan dengan pejabat Staf Tentara Keenambelas di pulau Jawa, Hatta menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama

---

28 G.S.Kanahele, *op.cit.*, bab IV, alinea 8 dan 9.

29 Harry. J. Benda *The Crescent and the Rising Sun. Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, The Hague and Bandung, 1958, hal.112. 237 catatan 54.

30 *Bung Hatta mengabdi pada tjita-tjita perdjuangan bangsa*, Jakarta 1972. hal. 27-28.

dengan pihak Jepang. Dan kerjasama yang disepakati Drs. Moh. Hatta hanyalah sebagai penasehat, tidak sebagai pegawai.[31]

Dari pihak Jepang, pentingnya kerjasama dengan golongan nasionalis tidak hanya terbatas pada usaha untuk mempermudah hubungan dengan masyarakat setempat dan menganjurkan agar bersatu dan berdiri sepenuhnya dibelakang Jepang melawan Sekutu, tetapi juga untuk memperlancar pekerjaan *Gunseibu*. Pegawai *gunseibu* yang berjumlah sekitar 300 orang yang datang bersama-sama dengan tentara Jepang di Jawa tidak semuanya merupakan pegawai pemerintahan; lagi pula jumlah ini terasa sangat kurang di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya.[32] Meskipun kekurangan jumlah pegawai itu dapat diatasi dengan ditempatkannya personil militer dan personil sipil tingkat rendah, tetapi jumlah tersebut belumlah mencukupi. Dan jalan satu-satunya untuk mengatasinya ialah membuka kesempatan bagi golongan nasionalis untuk turut aktif dalam pemerintahan *Gunsei*.

Kerjasama dengan pemerintahan *gunsei* meningkat dengan munculnya tokoh nasionalis Ir. Sukarno. Kerjasama itu pertama kali diputuskannya dalam suatu pertemuan dengan Komandan Jepang di Bukittinggi dengan suatu jaminan bahwa Pemerintah Militer Jepang tak akan menghalangi usaha Ir. Sukarno untuk membina Kemerdekaan Indonesia.[33] Dalam pertemuan antara Moh. Hatta dengan Sukarno keduanya mengambil keputusan bersejarah untuk mengesampingkan perselisihan pahamnya dari jaman Partindo dan PNI–Baru dan bersatu memimpin rakyat Indonesia dalam masa yang sulit itu.[34] Persatuan antara keduanya kemudian dikenal sebagai Dwi-tunggal.

Kerjasama Ir.Sukarno dengan pihak Jepang dimulai dalam suatu Komisi Menyelidiki Adat-Istiadat dan Tata Negara, yang dibentuk oleh *Gunsei* pada tanggal 8 November 1942.[35] Keanggotaan Komisi terdiri atas 13 orang Jepang serta pemimpin politik dan sosial bangsa Indonesia, seperti Drs. Moh. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Abikusno Tjokrosujoso, K.H.Mas

---

31 *Ibid*, hal. 29-31.
32 G.Kanahele, *op.cit*, bab III, alinea 16.
33 Cindy Adams, *Sukarno. An Autobiography: As told to Cindy Adams*, Indianapolis, Kansas City, New York, 1965, hal. 160 - 162
34 J.D.Legge, *Sukarno: A Political Biography*, London, 1972, hal. 154.
35 *Asia Raya*, 9 November 2602 (1942).

Mansur, Ki Hadjar Dewantara, Prof. Husein Djajadiningrat, Dr. R.Ng. Poerbatjaraka, Prof. Dr.Mr. Supomo. Kemudian empat orang nasionalis Indonesia yang dianggap paling terkemuka, yang dikenal dengan nama Empat Serangkai, yakni Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H.Mas Mansur dan Ki Hadjar Dewantara mendapat kepercayaan untuk memimpin suatu gerakan yang dikenal dengan nama Poesat Tenaga Rakyat (Poetera) yang pembentukannya diresmikan pada tanggal 9 Maret 1943. Menurut sesuatu dugaan, pembentukan Poetera adalah atas usul kaum nasionalis Indonesia yang diwakili oleh Sukarno.[36] Sebaliknya pihak Jepang hanya dapat menyetujui pembentukan Poetera setelah mempertimbangkannya masak-masak dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa Poetera dapat mempersatukan rakyat guna mengabdi sepenuhnya kepada usaha-usaha perang yang diduga akan lebih memuncak dan semakin mendekati pulau Jawa. Pada upacara pembukaan kantor pusat *Poetera* pada tanggal 16 April 1943, *Sōmubucō* (Kepala Departemen Urusan Umum) Moichiro Yamamoto menegaskan tentang tugas para pemimpin Poetera, sebagai berikut: mengerahkan segala tenaga dan kekuatan rakyat untuk memberi bantuan kepada usaha-usaha untuk mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Dan satu-satunya kewajiban yang dipikulkan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, adalah melaksanakan maksud dan tujuan pemerintah militer Jepang.[37] Dengan demikian pemerintah militer dapat menggunakan tenaga pemimpin-pemimpin Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya sesuai dengan garis-kebijaksanaannya. Sebaliknya pemimpin-pemimpin Indonesia mencoba untuk menggunakan semua sarana Jepang guna tetap memperjuangkan Kemerdekaan.

3. Usaha mempertahankan kekuasaan

Perang Pasifik semakin hari semakin melemahkan tentara Jepang. Keadaan itu merubah sikap Jepang terhadap negeri-negeri yang didudukinya. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat setempat sepenuhnya guna menahan ofensif Serikat yang semakin dahsyat. Maka berdasarkan keputusan Sidang Parlemen ke-82 di Tokyo, dikemukakan oleh Perdana Menteri Tojo

36 G.S. Kanahele. *op.cit*, bab IV, Alinea 32

37 *Asia Raya*, 9 Maret 2603 (1943).

didalam pidatonya di lapangan Ikada (di belakang stasiun Gambir), Jakarta pada tanggal 7 Juli 1943 tentang adanya kesempatan untuk "turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara". Menyusullah pada tanggal 1 Agustus 1943 pengumuman *Saikō Syikikan* (Panglima Tertinggi Tentara Keenambelas) tentang garis-garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan negara yang dijanjikan itu, yakni meliputi badan-badan pertimbangan di daerah dan di pusat serta jabatan-jabatan tinggi untuk orang-orang Indonesia dan juga penunjukan orang-orang Indonesia sebagai penasehat pada Pemerintah Militer.

Pengangkatan orang-orang Indonesia untuk kedudukan tinggi tersebut mulai dengan pengangkatan Prof. Husein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 1943 Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio masing-masing sebagai Jakarta dan Bojonegoro *Syūcōkan*. Pengangkatan 7 penasehat bangsa Indonesia pada Pemerintah Militer dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut *Sanyo* yang dipilih untuk 6 macam *bu* (Departemen) : Ir. Sukarno untuk *Sōmubu* (Departemen Urusan Umum); Mr.Suwandi dan dr. Abdul Rasjid untuk *Naimubu* (Departemen Urusan Dalam negeri); Prof. Dr.Mr.Supomo untuk *Syihobu* (Departemen Kehakiman); Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk *Kōtsubu* (Departemen Lalu-lintas); Mr. Muh. Yamin untuk *Sendenbu* (Departemen Propaganda) dan Prawoto Sumodilogo untuk *Sangyobu* (Departemen Ekonomi).[38]

Mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Pusat *(Cūo-Sangi In)*, dimuat dalam *Osamu Seirei*, No.36/1943, yang dikeluarkan oleh *Saikō Syikikan*.. Sedangkan mengenai Badan Pertimbangan di Keresidenan dan Kotapraja Istimewa *(Syū dan Tokubetsu Syi Sangi Kai)*. dimuat dalam *Osamu Seirei* No. 37/1943 untuk kemudian dijelaskan dalam Osamu *Kanrei* No. 8/1943. *Osamu Kanrei*. tersebut merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan* (Kepala Pemerintah Militer yang dijabat oleh Kepala Staf Tentara) untuk pelaksanaan *Osamu Seirei*.[39] *Cūo Sangi In* atau Badan Pertimbangan Pusat adalah suatu Badan yang tugasnya mengajukan usul kepada Pemerintah

---

38 *Kan Pō*, 10 Oktober 2603 (1943).
39 *Kan Pō*, 10 November 2603 (1943)

serta menjawab pertanyaan Pemerintah mengenai soal-soal politik dan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Balatentara. Duapuluhtiga orang anggotanya diangkat oleh *Saikō Syikikan*. Delapanbelas merupakan utusan dari tiap keresidenan dan kotapraja Jakarta Raya serta dua orang utusan dari D'aerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Dengan demikian jumlah seluruhnya anggotanya adalah empatpuluh tiga orang.

Sidang *Cūō Sangi In* yang pertama berlangsung pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 1943, dimana dibentuk empat *bunkakai* (bagian), yang telah menjawab pertanyaan *Saikō Syikikan* tentang cara-cara apa yang sebaiknya dilakukan guna mencapai kemenangan didalam perang. Karena *Gunseikan* dan pembesar-pembesar tentara Jepang lainnya turut menghadiri serta mengawasi jalannya sidang, maka jawaban sidang tak lepas dari kehendak pemerintah, yakni supaya seluruh potensi kerja dan produksi dikerahkan guna kepentingan perang.[40]

Pemerintah, Militer Jepang mulai pula memikirkan pengerahan pemuda-pemuda Indonesia guna membantu usaha pertahanan mereka. Sejak kekalahan armada-armadanya di dekat Midway dan di sekitar kepulauan Solomon, Jepang mulai beralih kepada strategi defensif dimana wilayah Indonesia menjadi front depan.[41] Maka diselenggarakanlah latihan-latihan militer bagi pemuda-pemuda Indonesia.

Seinen Dōjō di Tanggerang merupakan tempat latihan pemuda yang pertama, yang telah memberikan latihan militer penuh kepada kurang lebih 50 pemuda Indonesia.. Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi paramiliter, diantaranya yang terpenting yalah *Keibodan* (Barisan Bantu Polisi) dan *Seinendan* (Barisan Pemuda).

Pemuda-pemuda dalam barisan-barisan tersebut mendapat latihan militer elementer dengan senjata-senjata tiruan yang terbuat dari kayu. Demikian pula dilakukan pengerahan tenaga *heiho* (pembantu prajurit), yang semula merupakan tenaga pekerja kasar tetapi kemudian dikerahkan untuk tugas-tugas bersenjata.[42]

Sesuai dengan tuntutan perang yang makin mendesak, pemerintah militer Jepang tidak saja membatasi diri pada

40 *Pandji Poestaka*, November 1943, hal. 93.

41 Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan Tentara Peta Blitar Melawan Jepang, 14 Februari 1945*. Jakarta, 1968. hal.7.

42 *I b i d*. hal.8

pembentukan barisan para-militer, tetapi kemudian meluas dengan membentuk organisasi militer yang dikenal dengan nama Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Peta) *(Boei Giyugun)*. Riwayat pembentukannya dimulai dengan usul R. Gatot Mangkupraja melalui suratnya yang ditujukan kepada *Gunseikan* pada tanggal 7 September 1943 yang antara lain meminta supaya bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang, tidak saja di belakang garis-perang tetapi juga di medan-perang.

Pada tanggal 3 Oktober 1943 Panglima Tentara Keenambelas yang kedua, Letnan Jenderal Kumakici Harada memaklumkan *Osamu Seirei* No.44 yang mengatur pembentukan Peta. Dalam bulan itu juga dilatih puluhan calon perwira Indonesia di *Jawa Bōei Giyugun Kanbu Renseitai* (Korps Latihan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, Jawa).[43] Pembentukan Giyugun di Sumatra juga berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan dengan Peta di pulau Jawa. Pada tanggal 9 November 1943, *Syūcōkan Aceh* di depan umum di balaikota memberikan uraian tentang maksud pembentukan *Giyūgun*. Dan pada tanggal 22 November diresmikanlah pembentukan *Giyūgun* di Aceh dan beberapa daerah di Sumatra.

Menghadapi kekuatan Serikat, Jepang berusaha menjadikan seluruh daerah yang didudukinya sebagai rangkaian pertahanan yang kompak, dimana seluruh penduduk dengan bahan yang ada di daerahnya dikerahkan. Pengerahan penduduk itu tidak hanya terdiri dari penduduk asli, tetapi juga berlaku untuk semua golongan yang diikutsertakan di dalam usaha perang melawan Serikat. Demikianlah pada tanggal 8 Januari 1944 Jepang memperkenalkan sistim baru, yaitu sistim yang disebut, *tonarigumi* (rukun tetangga), suatu sistim yang dimaksudkan untuk memperketat pengendalian terhadap penduduk. *Tonarigumi* membagi seluruh pulau Jawa dalam bagian-bagian kecil yang masing-masing terdiri dari 10-20 rumahtangga; beberapa *tonarigumi* dikelompokkan ke dalam *ku* (desa atau bagian kota).[44]

Karena perang semakin mendesak Jepang, maka kewajiban yang harus dilakukan *tonarigumi* secara aktif antara lain adalah mengadakan latihan bersama-sama tentang pencegahan bahaya

43 Nugroho Notosusanto, "Instansi jang melaksanakan pembentukan tentara Peta", *Majalah Ilmu ilmu Sastra Indonesia*, II, No.2, 1964.

44 *Kan Pō*, 25 Januari 1944, hal. 19.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

udara, kebakaran, pemberantasan mata-mata musuh dan penyampaian ikhtiar pemerintah militer kepada penduduk, menganjurkan penambahan hasil bumi dan berbakti kepada pemerintah militer pada bidang lain.[45]

Setelah sistim baru ini berjalan dengan lancar. pemerintah militer Jepang kemudian membentuk suatu organisasi yang meliputi semua usaha *tonarigumi*, yakni organisasi yang berlainan sifatnya dengan Poetera, antara lain karena meliputi seluruh penduduk Asia lainnya dan orang-orang peranakan. Organisasi tersebut bernama *Djawa Hōkōkai* yang pembentukannya diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. Pemimpin tertinggi adalah *Gunseikan* sedangkan Ir. Sukarno hanya menjabat sebagai *Komon* (penasehat).[46]

Jika-*tonarigumi* menonjolkan sifat gotong-royongnya, maka di dalam *Djawa Hōkōkai* yang ditonjolkan adalah sifat berbakti, maka semua badan yang ada yang bersifat kebaktian kepada Jepang, dilebur kedalam *Djawa Hōkōkai*, sedangkan Poetera sendiri dinyatakan bubar. *Fujinkai* (Perkumpulan kaum wanita). Masjumi, *Kakyō Sokai* (perhimpunan cina), *Taiku Kai* (perkumpulan Olahraga), *Keimin Bunka Syidōsyō* (himpunan kebudayaan) merupakan badan-badan yang dilebur kedalam *Djawa Hōkōkai*.

4. *Janji Kemerdekaan serta Dokuritsu Jumbi Cōsakai dan badan-badan lainnya.*

Pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa *Teikoku Gikai* (Parlemen Jepang) ke-85 di tokyo, Perdana Menteri Koiso (pengganti Perdana Menteri Tojo) mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak dikemudian hari.[47] Apa yang sebenarnya menyebabkan dikeluarkannya pernyataan tersebut adalah karena semakin terjepitnya angkatan perang Jepang. Dalam bulan Juli 1944, kepulauan Saipan yang letaknya strategis, jatuh ketangan Ameri-

---

45 *Djawa Baroe*, No.3, thn. 1944, hal.7.
46 *Asia Raya*. 19 Maret 1944.
47 *Pandji Poestaka*. 15 September 1944, hal. 561.

ka yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang.[48]

Situasi Jepang semakin buruk didalam bulan Agustus 1944. Terbukti bahwa moral masyarakat mulai mundur. produksi perang merosot, yang mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi, ditambah dengan timbulnya soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah besar kapal-angkut dan kapal-perang.

Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya kabinet P.M.Tōjō pada tanggal 17 Juli 1944 dan diangkatnya Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Salah-satu langkah yang diambilnya guna mempertahankan pengaruh Jepang diantara penduduk negeri-negeri yang didudukinya yalah dengan cara mengeluarkan pernyataan "Janji Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari". Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bahwa Serikat akan disambut oleh penduduk, tidak sebagai pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu ke negara merdeka. [49]

Dalam tahun 1944 dengan jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya angkatan perang Jepang dari Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall oleh angkatan perang Serikat, maka seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam dan berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Kemudian Jepang menghadapi serangan Serikat atas kota-kota Ambon, Makasar. Menado dan Surabaya; bahkan tentara Serikat telah pula mendarat di pelabuhan kota minyak seperti Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis itu, pemerintah militer Jepang di Jawa dibawah pimpinan *Saikō Syikikan* Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945, telah mengumumkan pembentukan suatu Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan disingkat menjadi Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan *(Dokuritsu Junbi Cōsakai).* Tindakan itu merupakan langkah konkrit pertama bagi terpenuhinya janji Koiso tentang "Kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari". Maksud tujuannya yalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi. tata pemerintahan dan lain-lainnya. yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia

48 Prof.Dr.I.J.Brugmans. *et.al., Nederlandsch Indië onder Japanse Bezetting: Gegevens en Documenten over de Jaren 1942-1945.* Franeker, 1960, hal. 65.

49 Brugmans, *Op. Cit.*, 68.

merdeka. Susunan pengurusnya terdiri dari sebuah badan perundingan dan kantor tatausaha. Badan Perundingan terdiri dari seorang *Kaicō* (Ketua), 2 orang *Fuku Kaicō* (Ketua muda), 60 orang *Iin* (anggota), termasuk 4 orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang golongan peranakan Belanda.

Terdapat pula 7 orang anggota Jepang, yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang tetapi mereka tidak mempunyai hak suara. [50] Pengangkatannya diumumkan pada tanggal 29 April 1945, dimana yang diangkat sebagai *Kaicō* bukanlah Ir. Sukarno yang saat itu dikenal sebagai pemimpin nasional utama, tetapi dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Pengangkatan itu disetujui oleh Ir.Sukarno yang menganggap bahwa kedudukannya sebagai seorang anggota biasa dalam badan tersebut akan lebih mempunyai kemungkinan besar untuk turut aktif didalam perundingan. [51] Sedangkan sebagai *Fuku Kaicō* pertama dijabat oleh orang Jepang yakni *Syūcōkan* Cirebon dan R. Surowo *(Syūcōkan Kedu)* sebagai *Fuku Kaicō* kedua. R.P. Suroso diangkat pula sebagai kepala sekretariat *Dokuritsu Junbi Cōsakai* dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. A G Pringgodigdo. [52]

Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, bertempat di gedung *Cūō Sangi In*. Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang bermarkas besar di Singapura) dan Letnan Jenderal Nagano. (Panglima Tentara Keenambelas di Jawa) menghadiri sidang tersebut. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera *Hinomaru* oleh Mr.A.G. Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usahanya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Mr. Muh. Yamin dan Ir. Sukarno terdapat diantara para pembicara, yang telah mengucapkan pidato penting, yang dianggap telah mengusulkan kelima dasar filsafat

---

50 Pengumuman *Saikō Syikikan* pada hari perayaan Jawa Baru yang ketiga, *Kan Pō*, No. 62, 10 Maret 1945.

51 Lihat George S.Kanahele, *op.cit.*, bab IX, alinea 14.

52 *Kan Pō*, No. 67 25 Mei 1945, *Asia Raya*, 5 Juni 1945.

negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.[53] Yang dianggap pertama kali merumuskan *materi* Pancasila, ialah Mr.Muh. Yamin, yang pada tanggal 29 Mei 1945 di dalam pidatonya mengemukakan lima Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat [54]

Tiga hari kemudian, yakni pada tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan nama *Lahirnya Pancasila*, dimana *materi* dan *nama* Pancasila sekaligus dicetuskan didalam pidato.[55]
Materi Pancasila yang dikemukakannya adalah sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, atau peri kemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima dasar itu atas "petunjuk seorang teman ahli bahasa" oleh Ir. Sukarno dinamakannya Pancasila.[56]

Sesudah sidang pertama itu, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota *Dokuritsu Junbi Cōsakai* yaitu Ir. Sukarno. Drs.Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr.Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wachid Hasjim, H.Agus Salim dan Abikusno Tjokrosuyoso telah membentuk suatu panitia kecil yang menghasilkan suatu dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta, sesuai dengan penamaan oleh Mr.Muh.Yamin.

53 Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pantjasila yang Otentik*, Jakarta, 1972 hal 15-16.
54 Prof.Mr. Hadji Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, cet 2, 1971, hal. 83-107*
55 *I b i d*, hal.61 - 81.
56 *I b i d*, hal.78.

Perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan pada sidang tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 dimana telah dibahas rencana undang-undang dasar melalui suatu Panitya Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar beranggotakan tujuh orang yakni Prof.Dr.Mr.Supomo, Mr.Wongsonegoro, Mr.Achmad Subardjo, Mr.A.A. Maramis, Mr.R.P.Singgih, H.Agus Salim, dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia lain yang terdiri dari Prof. Dr Mr. Supomo, H.Agus Salim, dan Prof.Dr.P.A. Husein Djajadiningrat. Di dalam merumuskan undang-undang dasar. panitia tersebut menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep perumusannya yang mengandung pula perumusan dasar filsafat negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Pembukaan beserta batang-tubuh Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 disyahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, [57] yakni suatu badan yang pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pihak Jepang, dibentuk sebagai ganti *Dokuritsu Junbi Cōsakai* tetapi yang kemudian ditambah sendiri anggota-anggotanya oleh pihak Indonesia lepas dari pengendalian Jepang.

Sebelum Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dibentuk dan bersidang di Bandung pada tanggal 16 Mei 1945 telah diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa, yang penyelenggaraannya disponsori oleh Angkatan Moeda Indonesia. Adapun Angkatan Moeda Indonesia rupa-rupanya dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun 1944, tetapi kemudian menjadi suatu gerakan pemuda yang anti-Jepang. [58] Oleh para pemimpin Angkatan Moeda Indonesia di dalam kongres yang dihadiri oleh lebih dari 100 pemuda terdiri dari utusan-utusan pemuda. pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa. antara lain Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Tjokroaminoto dan Harsono Tjokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa *Ika Daigaku* Jakarta. dianjurkan agar-supaya para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan bukan sebagai hadiah Jepang. Pertemuan berada dalam suasana militan dan nasionalistis. dimana hanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya

---

57 Nugroho Notosusanto, *op,cit.*, hal. 9 - 26

58 Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, cet III, 1964, hal 76-77.

tanpa lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dan dilakukan pengibaran bendera Merah Putih, tanpa didampingi oleh bendera Jepang.[59]

Setelah 3 hari lamanya kongres berjalan, akhirnya dicapai dua resolusi sebagai berikut: pertama semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan dibawah satu pimpinan nasional saja dan kedua, dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

Tetapi, sebagaimana yang diberitahukan oleh pers resmi, ternyata kongrespun menyatakan dukungan sepenuhnya dan kerjasama erat dengan Jepang seperti usaha mencapai kemenangan terakhir.[60] Pernyataan tersebut tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir, seperti utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Sukarni, Harsono Tjokroaminoto dan Chairul Saleh. Mereka bertekad untuk tidak mengambil bagian dalam gerakan Angkatan Moeda Indonesia dan bermaksud untuk menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal.

Sebagai imbangannya, pada tanggal 3 Juli 1945 diadakan suatu pertemuan rahasia di Jakarta diantaranya sejumlah 100 pemuda yang membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh B.M. Diah, dengan para anggotanya Sukarni, Sudiro, Sjarif Thayeb, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Chairul Saleh, F. Gultom, Supeno dan Asmara Hadi. Pertemuan rahasia diadakan lagi pada tanggal 15 Juni 1945, yang menghasilkan dibentuknya Gerakan Angkatan Baroe Indonesia,[61] yang kegiatannya sebagian besar digerakkan oleh para pemuda dari Asrama Menteng 31.

Tujuan daripada gerakan tersebut tercantum didalam surat-kabar *Asia Raya* pertengahan bulan Juni 1945, yang menunjukkan sifat daripada gerakan tersebut yang lebih radikal sebagai berikut: pertama mencapai persatuan kompak diantara seluruh golongan masyarakat Indonesia, kedua menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat, ketiga, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan keempat mempersatukan Indonesia bahu-membahu dengan Jepang, tetapi jika perlu gerakan itu bermaksud untuk "mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri".[62]

59 Wawancara dengan Diamal Ali di Jakarta, 14 April 1972.
60 *Asia Raya*, 24 Mei 1945.
61 Sudiro, *Pengalaman saja sekitar 17 Agustus '45*, Jakarta, 1972, hal. 11-16
62 *Op. Cit*, hal. 9-15.

Golongan pemuda yang tergabung dalam Angkatan Baroe Indonesia didalam perkembangan selanjutnya dapat mengemukakan pendapat-pendapatnya yang mempengaruhi usaha pembentukan negara Indonesia. Para pemuda seperti Chairul Saleh, Sukarni, B.M.Diah, Asmara Hadi, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Sudiro, Supeno, Adam Malik, S.K. Trimurti, Sutomo dan Pandu Kartawiguna telah diikutsertakan didalam suatu gerakan yang disebut Gerakan Rakyat Baroe. Gerakan tersebut diperkenankan pembentukannya oleh *Saikō Syikikan* yang baru, Letnan Jenderal Y.Nagano didalam suatu pertemuan pada tanggal 2 Juli 1945. Gerakan Rakyat Baroe disusun berdasarkan hasil sidang *Cūō Sangi In* ke 8 yang mengusulkan pendirian suatu gerakan untuk mengobar-ngobarkan semangat cinta kepada tanahair dan semangat perang. Susunan pengurus pusat gerakan tersebut terdiri dari 80 orang. Disamping anggotanya terdiri atas penduduk asli Indonesia dan bangsa Jepang. juga terdapat golongan Cina, golongan Arab dan golongan Peranakan Eropa.

Sedangkan pengangkatan wakil-wakil golongan pemuda didalamnya dimaksudkan oleh pemerintah Jepang untuk menguasai kegiatan-kegiatan mereka. *Sōmubucō* Mayor Jenderal Nisyimura menegaskan bahwa setiap organisasi pemuda yang tergabung di dalamnya harus tunduk sepenuhnya kepada *Gunseibu* (Pemerintah Militer Jepang) dan merekapun harus pula bekerja di bawah kekuasaan petugas-petugas pemerintah yang berhubungan erat dengan ahli-ahli Jepang. Dengan demikian berarti kebebasan bergerak para pemuda dibatasi, hingga timbullah rasa tidak puas. Akhirnya tatkala Gerakan Rakyat Baroe diresmikan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 1945, dimana dua organisasi besar, yaitu Jawa *Hōkōkai* dan Masjumi digabungkan menjadi satu didalamnya, tidak seorangpun dari tokoh- golongan pemuda yang radikal, seperti Chairul Saleh, Sukarni, Harsono Tjokroaminoto dan Asmara Hadi yang bersedia menduduki kursi yang telah disediakan untuk mereka. Maka nampaklah bahwa perselisihan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang cara melaksanakan berdirinya negara Indonesia Merdeka, semakin tajam.[63]

5. *Menjelang Proklamasi.*

Memuncaknya perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan

63 *Kan Pō*, No.70 (10 Juli, 1945), hal.19

Indonesia nampak digiatkan oleh bangsa Indonesia dari golongan tua maupun dari golongan muda. Kedua-duanya sependapat bahwa kemerdekaan Indoensia harus segera diproklamasikan, hanya caranya mengemukakan dan melaksanakan pendapat itulah yang berbeda. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politiknya berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya dengan jalan bekerjasama dengan Jepang. Mereka menggantungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Iinkai). Peresmian pembentukan badan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945, sesuai dengan dekrit Marsekal Terauci, Panglima Tentara Umum Selatan yang membawahkan Indonesia. [64]

Para anggota didalam Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu digerakkan oleh pemerintah sedangkan mereka diizinkan melakukan segala sesuatunya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri; tetapi di dalam melakukan kewajibannya itu mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. [65]

1. Kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat *Hakkō-Iciu;*

Dengan diumumkannya pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, maka pada saat yang sama *Dokuritsu Junbi Cōsakai* dibubarkan. Kepada para anggota PPKI *Gunseikan* Jenderal Yamamoto mengucapkan terimakasihnya dan menegaskan kepada mereka bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI

---

64 Willard H.Elsbree, *Japan's role in Southeast Asian Nationalist Movements: 1940 to 1945*. 1953, hal.94.

65 Pengumuman *Gunseikan* Jenderal Yamamoto. lihat *Kan Pō*, No.72. 10 Agustus 1945. hal. 12.

itu tidak dipilih oleh pejabat dilingkungan Tentara Keenambelas saja, akan tetapi oleh Marsekal Terauci sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Untuk pengangkatan itu Marsekal Terauci memanggil tiga tokoh Pergerakan Nasional, terdiri dari Ir.Sukarno, Drs.Moh.Hatta, dan dr.Radjiman Wediodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju ke markas besar Terauci di Vietnam Selatan. Dalam suatu pertemuan di Dalath (Vietnam Selatan) pada tanggal 12 Agustus 1945 Marsekal Terauci menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa Pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia, melainkan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat. [66]

Duapuluh-satu anggota telah dipilih, tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa, tetapi juga dari berbagai pulau dan suku seperti berikut: 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatra, 2 wakil dari Sulawesi, seorang wakil dari Maluku, seorang wakil dari Kalimantan, seorang wakil dari Sunda Kecil dan seorang wakil golongan penduduk Cina. [67]

Yang ditunjuk sebagai ketua dalam PPKI ialah Ir.Sukarno, sedangkan Drs. Moh.Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Sebagai penasehatnya ditunjuk Mr.Ahmad Subardjo. Kemudian PPKI ditambah dengan enam anggota lagi tanpa seizin pihak Jepang; anggota-anggota itu adalah Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr.Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri dan Ahmad Subardjo. Dan pada saat ketiga tokoh PPKI, yakni Ir.Sukarno, Drs.Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus

---

66 Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta, 1969, hal. 18-19. Lihat juga Brugmans, *op. cit.*, 594-595.

67 Anggota PPKI, dari Jawa: Ir.Sukarno, Drs.Moh.Hatta, dr.Radjiman Wediodiningrat, Oto Iskandardinata, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Surjohamidjojo, M.Sutardjo Kartohadikusumo, R.P.Suroso, Prof.Mr.Dr.Supomo, Abdul Kadir, Purubojo, dari Sumatra: dr.Amir, Mr.Teuku Moh. Hasan, Mr.Abdul Abas: dari Sulawesi: Dr.G.S.S.J.Ratu Langie, Andi Pangeran; dari Kalimantan: A.A. Hamidhan, dari Sunda Kecil: Mr.Gusti Ktut Pudja; dari Maluku: Mr.J.Latuharhary; golongan Tionghoa: Dra. Yap Tjwan Bing, lihat Prof.Mr.Hadji Muh Yamin, *op.cit.*, hal. 399.

1945, ternyata Jepang saat itu menghadapi pemboman Serikat atas Hirosyima dan Nagasaki, sedangkan Uni Sovyet menyatakan perang terhadap Jepang dengan cara melakukan penyerbuannya ke Mancuria. Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Proklamasi Kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini Ir. Sukarno dan Drs. Moh.Hatta berpendapat bahwa soal Kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang toh sudah kalah. Kini kita menghadapi Sekutu yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi.[68] Mereka ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan didalam rapat Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. yang menetapkan waktu berkumpulnya para anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan waktu diadakannya sidang PPKI yang pertama pada keesokan harinya.[69]

Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda. yang menganggap PPKI adalah badan Jepang dan tidak menyetujui lahirnya proklamasi Kemerdekaan secara apa yang telah dijanjikan oleh Marsekal Terauci dalam pertemuan di Dalath.
Sebaliknya golongan muda menghendaki terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari pemerintah Jepang.

Sutan Sjahrir termasuk tokoh yang pertama yang mendesak diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Sukarno dan Drs.Moh.Hatta tanpa menunggu janji Jepang yang dikatakannya sebagai tipu muslihat belaka. Karena ia mendengarkan radio yang tidak disegel oleh pemerintah militer Jepang, ia mengetahui, bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Desakan tersebut dilakukannya dalam suatu pertemuan dengan Drs. Moh. Hatta pada tanggal 15 Agustus 1945, tak lama sesudah kembali dari Dalath. Tetapi Ir.Sukarno dan Drs.Moh.Hatta masih mencari kebenaran berita tentang penyerahan Jepang secara resmi dan

---

68 Rekaman dialog antara Drs. Moh.Hatta dengan Mr. Ahmad Subardjo di Bern pada tahun 1960.

69 Pengumuman Balatentara tentang "Pembentoekan Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia" *Asia Raya*, 14 Agustus 1945.

tetap ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi pada rapat Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia.[70]

Tindakan selanjutnya diambil oleh golongan pemuda yang terlebih dahulu mengadakan suatu perundingan di salahsatu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 1945, jam 20.00. Diantara hadirin nampak Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subiānto, Margono, disamping Wikana dan Armansjah dari golongan *Kaigun*. Keputusan rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang antaranya menegaskan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan kerajaan lain. Maka diputuskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang dan sebaliknya mengharapkan diadakannya perundingan dengan Ir. Sukarno dan Drs.Moh.Hatta agar-supaya mereka turut menyatakan proklamasi.[71]

Keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada saat yang sama yakni jam 22.00 di rumah kediaman Ir. Sukarno, Pegangsaan Timur (sekarang jalan Proklamasi) 56, Jakarta. Tuntutan Wikana agar Proklamasi dinyatakan oleh Ir. Sukarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu Ir. Sukarno menjadi marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut : "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung-jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok".[72]

Suasana hangat itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya seperti Drs.Moh.Hatta, Dr.Buntaran, dr.Samsi, Mr.Ahmad Subardjo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Nampak adanya perbedaan pendapat, dimana golongan pemuda tetap mendesak agar besok tanggal 16 Agustus 1945 dinyatakan Proklamasi, sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu.

---

70 S. Nishijima, et.al., *op.cit.*, hal.487.Mohammad Hatta, *op.cit.*, 26-27.

71 Adam Malik, *op.cit.*, hal.35.

72 Wawancara dengan Bapak Mr. Ahmad Subardjo, Jakarta tanggal 14. November 1967.

Perpustakaan
Direktorat Pembinaan dan
Pembinaan Pendidikan
Sejarah dan Nilai-nilai

Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan pemuda kepada tindakan berikutnya, yakni mengamankan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok. Tindakannya berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada jam 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini 71, Jakarta (sekarang Toko Kue Maison Benny). Rapat selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang pernah berapat di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, Dr. Muwardi dari Bārisan Pelopor, *Syodancō* Singgih dari *Daidan* PETA Jakarta *Syū*. Keputusan itu adalah sebagai berikut :

"Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Ir. Sukarno dan Drs.Moh. Hatta akan diamankan ke luar kota, dimana Peta telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi dinyatakan. Sebab jika mereka berada di Jakarta. mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh kekuatan Jepang untuk menghalang-halangi berlangsungnya proklamasi Kemerdekaan.[73] Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 06.00 (waktu Tokyo) atau jam 04.30 waktu Jawa jaman Jepang, atau jam 04.00 WIB terjadi peristiwa pengamanan Ir. Sukarno dan Drs. Moh Hatta ke luar kota menuju Rengasdengklok di sebelah utara Karawang. Maksud daripada pengamanan yang dilaksanakan oleh Sukarni dan Jusuf Kunto dari golongan pemuda itu adalah untuk menjauhkan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta dari segala pengaruh Jepang.

Juga oleh Sukarni dijelaskan agar di Rengasdengklok ini dua tokoh menyatakan Proklamasi Kemerdekaan atas nama seluruh rakyat. karena keadaan sudah mendesak dan suasanapun sudah memuncak. Jika tidak dilaksanakan, maka pemberontakan melawan setiap penghalang kemerdekaan akan terjadi. Maka oleh karena itu atas nama segenap rakyat, mereka menuntut supaya kedua tokoh turut melaksanakan Proklamasi. Jika tidak, maka segala akibatnya terutama yang mengenai keselamatan diri mereka. tidak akan dapat ditanggung lagi oleh mereka.

Sementara itu di Jakarta, Chairul Saleh cs. telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan di Jakarta. Tetapi rencana untuk merebut kota Jakarta tidak berhasil disusun karena tiadanya dukungan positif dari Peta seluruhnya. Sedangkan sikap

---

[73] S.Nishijima, et. al., *op.cit.*, hal. 498.

kedua tokoh Ir.Sukarno dan Drs.Moh. Hatta di Rengasdengklok tidak berubah. Karena itu Jusuf Kunto diutus ke Jakarta untuk melaporkan dan merundingkan dengan kelompok-kelompok yang ada disana. Tetapi yang ditemui hanyalah golongan *Kaigun*. terutama Mr.Ahmad Subardjo.

Antara Mr.Ahmad Subardjo dengan Wikana kemudian terdapat kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta, dimana Laksamana Maeda bersedia akan menjamin keselamatan selama mereka berada di rumahnya. Karena itu Jusuf Kunto hari itu juga membawa Mr. Ahmad Subardjo bersama Sudiro (Mbah) ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno dan Hatta. Rombongan tiba pada jam 17.30 WIB. Di Rengasdengklok antara golongan tua dan golongan muda tidak terjadi perundingan, hanya telah diberi jaminan oleh Ahmad Subardjo dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya selambat-lambatnya jam 12.00.

Dengan jaminan tersebut Komandan Kompi Peta setempat *Cudanco* Subeno melepaskan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.[74] Sesampainya di Jakarta pada jam 23.00 WIB rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jl. Bondjol No. 1 (sekarang tempat kediaman resmi Duta Besar Inggris) setelah Sukarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dulu. Di tempat inilah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun. Sebelumnya Sukarno dan Hatta telah menemui *Sõmubucõ*, Mayor Jenderal Nisyimura untuk menjajagi sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan. Dengan segan-segan Nisyimura mengikatkan diri untuk tidak menghalang-halangi proklamasi, asal tidak ada tindakan yang anti Jepang.

Para pemuka Indonesia yang hadir dalam peristiwa perumusan teks proklamasi berkumpul dalam dua ruangan yakni "ruangan makan" dan serambi depan. Mereka yang merumuskan melakukannya didalam "ruangan makan", yakni Ir.Sukarno, Drs. Moh.Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo. Pada saat itu Ir. Sukarno. memegang pena dan menulis teks Proklamasi yang terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama yang berbunyi: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia".

---

74 Mr. Ahmad Subardjo Djoeoadisurjo, *Lahirnja Republik Indonesia*, Jakarta, 1972, hal 94.

adalah merupakan kalimat yang dikutip oleh Mr. Ahmad Subardjo dari Piagam Jakarta yang antara lain berbunyi sebagai berikut: "Atas berkat Rahmat Allah maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya".
Kemudian Drs. Moh. Hatta menyempurnakan teks Proklamasi dengan kalimat kedua yang berbunyi sebagai berikut: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". [75]
Demikianlah perumusan teks Proklamasi dilakukan bersama-sama oleh Ir.Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo didalam "ruangan makan" dari rumah Laksamana Maeda. Turut serta menyaksikan perumusan tersebut yalah Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Diah dan Sudiro (Mbah). [76]

Setelah selesai, teks Proklamasi dibacakan di hadapan pemuka-pemuka yang sebagian besar adalah anggota-anggota PPKI dan mereka itu semuanya menunggu didalam "serambi muka" yang biasanya dipergunakan untuk menerima tamu oleh Laksamana Maeda. [77] Disinilah teks Proklamasi dimusyawarahkan. Pada waktu itu timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani. Yang memberi komentar adalah Chairul Saleh yang tidak setuju bila teks itu ditandatangani oleh anggota-anggota PPKI, karena menurut anggapannya badan itu bentukan Pemerintah Jepang yang anggota-anggotanya diangkat oleh Jepang pada waktu itu. Muncullah Sukarni, dan sebagai jalan keluar ia mengusulkan agar teks Proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Ir.Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ternyata usulnya itu di setujui oleh semua yang hadir. Maka teks Proklamasi selanjutnya diserahkan kepada Sajuti Melik untuk diketik. Olehnya terhadap beberapa kata dari versi terakhir itu diadakan perubahan-perubahan, yaitu kata "tempoh" menjadi "tempo", "wakil bangsa Indonesia" dirubah menjadi "Atas nama

---

75 Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *op.cit*, 108-109.

76 Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pantjasila jang Otentik*, 1971, hal. 10.

77 Yang berada dalam ruangan besar antara lain sbb.: Mr. Iwa Kusuma Sumantri, M.Sutardjo Kartohadikusumo, dr. Radjiman Wediodingrat, K.H.Wachid Hasjim, KH Dewantara, Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Dr.Mr.Supomo, Dr. Buntaran Martoatmodjo, Harsono Tjokroaminoto, Dr. Sam Ratu Langie, dr. Samsi, Oto Iskandardinata, Mr. Teuku Hasan, Hamidhan, A.A. Rivai, Andi Pangeran, Andi Sultan Daeng Radja, Chairul Saleh, Semaun Bakri; periksa Komodor H.M. Kamal, Kolonel Drs. Nugroho Notosusanto dkk., *op.cit.*, hal.13 - 14.

Bangsa Indonesia"; barulah versi terakhir yang telah diketik itu ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, yang saat ini dikenal sebagai naskah otentik. [78]

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 12.00 (waktu Tokyo) atau jam 10.30 waktu Jawa jaman Jepang, atau jam 10.00 WIB, teks Proklamasi dibacakan oleh Ir. Sukarno dengan didampingi oleh Moh. Hatta di tempat kediamannya di jalan Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi) No. 56, Jakarta. Dengan Proklamasi itu tercapailah Indonesia merdeka yang susunan negaranya diatur dengan undang-undang dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-undang Dasar 1945.

B. PERIODE PERANG KEMERDEKAAN

1. Perjuangan awal

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali di Gedung Kesenian Jakarta. Pada hari pertama sidang ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketata-negaraan serta landasan politik bagi Indonesia merdeka. Keputusan keputusan itu adalah:

a. mengesahkan Undang-undang Dasar Negara.
b. memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni Ir.Sukarno dan Drs.Moh.Hatta.
c. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.[79]

Pada hari berikutnya sidang PPKI diteruskan. Sidang hari kedua ini menghasilkan keputusan dibentuknya 12 departemen, dan sekaligus menunjuk para pemimpin departemen (menteri) serta menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia (RI). Wilayah RI dibagi atas delapan provinsi yang juga sekaligus ditunjuk gubernurnya. Tentang tentara kebangsaan sidang memutuskan agar segera dibentuk.[80] Pada sidang hari ketiga ternyata PPKI memutuskan lain mengenai tentara kebangsaan ini.

---

78 Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 11-13.

79 *Tjahaja*, 19 Agustus 1945, Mr.Muh. Yamin, *Naskah persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, 1969, hal. 399 dst.

80 *Tjahaja*, 21 Agustus 1945, Mr.Muh Yamin, *ibid*.

Pada tanggal 23 Agustus Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya tiga badan baru yaitu: Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ini akan bertugas sebagai penjaga keamanan umum.[81] di daerah-daerah dibawah koordinasi KNI daerah; pimpinan pusat BKR tidak diadakan. Pidato Presiden Sukarno tersebut mendapat sambutan dua macam dari pemuda-pemuda seluruh Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Pada umumnya timbul kekecewaan bahwa Pemerintah tidak segera membentuk sebuah tentara nasional. Tetapi sebagian besar pemuda terutama yang ex-anggota Peta, *KNIL* dan *Heiho*, artinya pemuda-pemuda yang sudah mempunyai pengalaman militer, memutuskan untuk membentuk BKR di daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan BKR itu sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangannya. Sebagian lagi dari para pemuda Indonesia yakni yang pada jaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok politik, tidak puas dengan BKR. Setelah usul mereka mengenai pembentukan tentara nasional ditolak oleh Presiden dan Wakil Presiden,[82] mereka menempuh jalan lain. Mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah Komite van Aksi, yang bermarkas di Jalan Menteng 31 di bawah pimpinan Adam Malik, Sukarni, M. Nitimihardjo, dll. Badan-badan perjuangan yang bernaung dibawah Komite van Aksi adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).[83]

Pembentukan badan-badan perjuangan ini tidak terbatas di Jawa melainkan juga di Sumatra. Di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) dibawah pimpinan Sjamaun Gaharu dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) dibawah pimpinan A.Hasjmi.[84] Di Sumatra Utara dibentuk Pemuda Republik Indonesia Andalas. Pemuda Andalas di Sumatra Barat. Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.[85] Sedangkan Barisan Pelopor pada bulan September telah menyatakan diri bernaung di bawah KNI.[86]

---

81 *Tjahaja*, 23 Agustus 1945.

82 Adam Malik. *Riwajat dan Perdjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945*, Jakarta, 1962 hal. 66 - 67.

83 Adam Malik, *op cit*, hal. 71-72

84 *Semangat Merdeka*, 27 Oktober 1945.

85 *Soeara Merdeka*, 21 Nopember 1945.

86 *Tjahaja*, 10 September 1945.

BKR dan bada-badan perjuangan yang dibentuk oleh pemuda inilah yang memelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang; mereka juga berusaha merebut senjata dan seringkali terjadi pertempuran-pertempuran dengan pihak Jepang. Disamping itu pimpinan Tentara Keenambelas Jepang di Jawa tidak pernah mau mengakui adanya Republik Indonesia, karena adanya perintah dari pihak Serikat agar tetap memelihara *status-quo* sejak tanggal 15 Agustus 1945 tatkala Jepang menyerah. Masalah baru bagi para pemuda dalam melaksanakan perebutan kekuasaan ini adalah kedatangan pasukan Serikat. Pasukan Serikat yang datang ke Indonesia ini dibawah Komando Asia Tenggara *(Southeast Asia Command)* di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira Serikat yang pertama kali datang ke Indonesia, yakni pada tanggal 19 September 1945, adalah Mayor Greenhalgh yang terjun dengan payung di lapangan-udara Kemayoran. Tugas Greenhalgh adalah untuk mempersiapkan pembentukan markas besar Serikat di Jakarta. Kedatangan Greenhalgh kemudian disusul oleh kapal penjelajah *Cumberland* yang mendaratkan pasukannya dibawah pimpinan Laksamana Muda W.R. Patterson. Pasukan Serikat yang bertugas di Indonesia ini merupakan komando khusus dari *SEAC* yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI)* yang mempunyai tiga divisi dibawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas daripada *AFNEI* di Indonesia adalah melaksanakan perintah Gabungan Kepala Staf Serikat yang diberikan kepada *SEAC*, diantaranya yalah:

1. menerima penyerahan dari tangan Jepang.
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat.
3. melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5. menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan Serikat. [87]

Kedatangan pasukan-pasukan Serikat ini disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa

87 *Independent*. 29 Desember 1945.

pasukan Serikat/Inggris ini datang membawa orang-orang *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)* yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali Hindia Belanda, sikap pihak Indonesia berubah menjadi minimal curiga, maximal bermusuhan.

Situasi dengan cepat merosot menjadi buruk sekali, setelah *NICA* mempersenjatai kembali orang orang *KNIL* yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang *NICA* dan *KNIL* di Jakarta, Surabaya, Bandung, telah memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi. Agaknya Christison telah memperhitungkan bahwa usaha pasukan-pasukan Serikat tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Karenanya Christison berunding dengan pemerintah RI dan mengakui *de facto* Repoeblik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. [88] Dan sejak adanya pengakuan *de facto* terhadap pemerintah RI dan Panglima *AFNEI* itu, masuknya pasukan Serikat ke wilayah RI di terima dengan terbuka oleh pejabat-pejabat RI, karena menghormati tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pasukan-pasukan Serikat dan karena penegasan Christison bahwa ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia. Namun kenyataannya adalah lain: di kota-kota yang didatangi oleh pasukan Serikat seringkali terjadi insiden-insiden bahkan pertempuran-pertempuran dengan pihak RI. Hal ini disebabkan karena pasukan-pasukan Serikat/Inggris itu tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia, baik pemimpin-pemimpin daerah maupun pimpinan nasional kita. Seperti yang terjadi di kota Jakarta sendiri, beberapa orang anggota pimpinan nasional diteror bahkan meningkat sampai kepada percobaan pembunuhan. Di Surabaya, Magelang, Ambarawa, Semarang, Medan pecah pertempuran-pertempuran antara pasukan-pasukan Serikat dengan pemuda-pemuda Indonesia.

Pemerintah RI rupanya menginsafi, bahwa hanya dengan Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk secara lokal tidak dapat diadakan perlawanan secara sentral, sehingga tidak akan mungkin mengamankan perjuangan. Pemerintah kemudian memanggil pensiunan Mayor *KNIL* Oerip Soemohardjo untuk diserahi tugas menyusun tentara nasional. Dan pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah, yang menyatakan berdirinya tentara

---

88 Osman Raliby. *Sedjarah Hari Pahlawan*, Jakarta 1952, hal. 25.

nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Supriyadi, seorang tokoh pemberontak Tentara Pembela Tanah Air (Peta) terhadap Jepang di Blitar, dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat *ad interim* diangkat Moh. Suliyoadikusumo seorang bekas *daidancō* Peta. Dengan Maklumat Pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Besar Umum oleh Oerip Soemohardjo. Markas Besar Umum TKR berkedudukan di Yogyakarta. Di pulau Jawa terbentuk 10 divisi dan di Sumatra 6 divisi. Kekuatan-kekuatan tersebut masih ditambah dengan puluhan badan perjuangan dari golongan pemuda.[89] Sementara itu perlawanan rakyat terhadap pasukan Serikat meningkat, khususnya pada akhir 1945. Pihak Serikat merasa kewalahan dan Jenderal Christison menyatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatannya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban terutama di Jawa Barat karena daerah ini dianggap sebagai tempat merajalelanya terorisme.

Pemimpin-pemimpin Indonesia dianggap tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan untuk menguasai keadaan. Sudah tentu pernyataan ini mendapat sambutan hangat dari panglima angkatan perang Belanda Laksamana Helfrich yang memerintahkan kepada pasukannya untuk membantu pasukan Jenderal Christison melaksanakan tugas di Jawa Barat.[90] Dalam hal ini pemerintah Indonesia sekali lagi memperingatkan pasukan Serikat, akan tugas-tugasnya yang semata-mata adalah melucuti dan mengembalikan tawanan Jepang, dan tidak berhak mencampuri masalah-masalah politik. Masalah politik adalah semata-mata masalah Indonesia dan Belanda. Masalah yang dihadapi oleh pasukan Indonesia dan Serikat adalah sama yakni menegakkan keamanan dan ketertiban. Tidak amannya dan tidak tertibnya keadaan, disebabkan karena teror pihak gerombolan *NICA*. Dan perbuatan ini ditentang oleh rakyat Indonesia.[91]

Di bidang politik pada bulan November 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat politik. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa Pemerintah menginginkan pengakuan terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dari Serikat maupun Belanda sendiri. Pemerintah RI bersedia membayar semua hu-

---

89 *Soeara Moeda*, 21 Nopember 1945, Mereka mengadakan Kongres di Yogyakarta. pada 10-11 Nopember 1945.

90 *Evening News*, 28 Desember 1945.

91 *I b i d*,

tang-hutang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II dan berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai oleh Pemerintah. Bersamaan dengan ini dikeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan.[92] Sebagai realisasi daripada Maklumat Pemerintah tersebut kabinet presidensiil yang dipimpin oleh Presiden sendiri diganti dengan kabinet ministeriil. Sebagai perdana menteri ditunjuk Sutan Sjahrir. Pemerintah Baru ini (Kabinet Sjahrir I) segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia.[93] dan pemerintah Belanda diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr.H.J. van Mook. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam awal perundingan itu van Mook menyampaikan statement politik pemerintah Belanda yang terdiri atas 6 fasal yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah:

1. Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* berbentuk federasi yang memiliki *self-government didalam lingkungan kerajaan Nederland.*
2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sedang untuk urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda.
3. Sebelum dibentuknya *commonwealth* akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.
4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB[94]

Pihak Indonesia dalam perundingan itu belum memberikan usul balasannya, sementara suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap kabinet Sjahrir.[95] Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat

---

92 *Berita Repoeblik Indonesia,* No. 1 th. I, 17 Nopember 1945, hal.3.

93 *Soeara Moeda,* 17 Februari 1946.

94 Regerings Voorlichtings Dienst, *Indonesia's Toekomst,* Batavia, 1946, hal 13-15.

95 Persatuan Perjuangan dibentuk pada 4 - 5 Januari 1946 di Surakarta atas prakarsa Tan Malaka. (*Lasjkar,* 7 Januari 1946). Semula bernama *Volksfront.* Pada tanggal 15-16 Januari 1946 dibentuk badan tetap bernama Persatuan Perjuangan (PP). Minimum Program PP adalah menolak perundingan tanpa dasar pengakuan kemerdekaan 100%. PP diikuti oleh semua organisasi massa bahkan BP KNIP menyambut lahirnya PP, periksa *Berita Repoeblik Indonesia,* No. 7, Tahun II, 1 Februari 1946, hal. 56.

dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari - 2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijaksanaan Sjahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat itu kabinet Sjahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Tetapi kemudian Presiden menunjuk kembali Sutan Sjahrir sebagai formatur kabinet dan kemudian ia menjabat lagi sebagai perdana menteri (Kabinet Sjahrir II). Kabinet Sjahrir kedua terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946. Kabinet ini menyusun usul balasan pemerintah RI, yang terdiri atas 12 fasal antara lain:

1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
2. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungjawab pemerintah RI.
3. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
4. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
6. Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan fihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.[96]

Usul balasan ini disampaikan kepada van Mook, akan tetapi pihak Belanda tidak dapat menerima baik usul balasan permintah RI tersebut, meskipun pihak Republik sudah memberikan konsesi-konsesi yang oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri sukar diterima.

Dengan bercermin kepada persetujuan yang pada tanggal 6 Maret 1946 di capai antara Vietnam dengan Perancis, dimana Republik Vietnam akan merupakan negara bebas didalam lingkungan *Federation Indo-Chinoise*, Van Mook mengajukan usul

96 Dr.H.J. van Mook, *Indonesie, Nederland en de Wereld, Amsterdam*, 1949, hal. 123-124.

pribadi untuk mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembentukan negara federal yang bebas dalam rangka Kerajaan Belanda. Wakil semua bagian Hindia Belanda dan wakil golongan minoritas akan berkumpul untuk menetapkan struktur negara Indonesia yang akan datang itu. Selanjutnya pasukan-pasukan Belanda akan mendarat untuk menggantikan tentara Serikat.[97] Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir memberikan jawaban yang disertai naskah persetujuan dalam bentuk traktat yang isi pokoknya adalah:

1. Supaya pemerintah Belanda mengakui RI *de facto* atas Jawa dan Sumatra.
2. Supaya Belanda dan RI bekerjasama membentuk RIS.
3. Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curaçao, menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Dengan usul balasan pemerintah RI tersebut maka kedua belah pihak dianggap telah saling mendekati, karena itu perundingan perlu ditingkatkan.. Perundingan di Jakarta antara Sutan Sjahrir dan van Mook dengan disaksikan oleh Archibald Clark Kerr berakhir. Hasil perundingan oleh van Mook akan diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Dengan perantaraan Clark Kerr sekali lagi kedua pemerintah mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Negeri Belanda). Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. [98]

Delegasi RI berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April 1946 bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Kerr. Delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini adalah Dr.van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Royen, Prof. van Asbeck, Sultan Hamid, Suryo Santoso. Di dalam perundingan itu ternyata fihak Belanda menolak rancangan hasil pertemuan Sjahrir-van Mook-Clark Kerr, terutama mengenai usul Clark Kerr tentang pengakuan *de facto* atas Republik Indonsia di Jawa dan Sumatra. Pihak Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan

97 Alastair M. Taylor, *Indonesian Independence and the United Nations*, London, 1960, hal.20-21.

98 Drs. Susanto Tirtoprodjo SH, *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia* Jakarta, 1963, hal. 19.

de facto atas Jawa dan Madura saja, itupun dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Serikat. Dan Republik Indonesia yang dimaksud itu harus tetap menjadi bagian dari kerajaan Nederland. Demikian juga campurtangan Republik dalam menentukan perwakilan daerah-daerah di luar daerah Republik, ditolak pula.

Perundingan yang berlangsung selama 10 hari itu (14-25 April 1946) telah gagal. Untuk sementara waktu hubungan Indonesia-Belanda terputus. Tetapi pada tanggal 2 Mei 1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahnya yang terdiri atas tiga pokok:

1. Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran *(gemeenebest)* Indonesia yang berbentuk federasi (serikat).
2. Persemakmuran Indonesia Serikat disatu pihak dengan Nederland, Suriname dan Curaçao dilain pihak akan merupakan bagian-bagian dari Kerajaan Belanda.
3. Pemerintah Belanda akan mengakui *de facto* kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatra, dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda.

Usul Belanda itu pada tanggal 17 Juni ditolak oleh Pemerintah RI karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Adapun isi usul balasan Pemerintah RI adalah:

1. Republik Indonesia berkuasa *de facto* atas Jawa, Madura, Sumatra, ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda.
2. Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal ini *gemeenebest, rijksverband,* koloni, *trusteeship-territory* atau federasi *à la* Viet Nam) dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia sedangkan Pemerintah Republik tidak akan menambah pasukannya.
3. Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan *(overgang-periode)* dibawah kedaulatan Belanda. [99]

Usul balasan pihak Indonesia ditolak oleh Belanda. Sementara itu

---

99 Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Lukisan Revolusi Rakjat Indonesia*, Yogyakarta, 1949, hal. 354 dst.

didalam negeri terjadi krisis politik. Dengan jatuhnya Kabinet Sjahrir I, sebenarnya Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka yang ditunjuk sebagai formatur Kabinet. Tetapi Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Sjahrir (Partai Sosialis) sebagai formatur Kabinet. Persatuan Perjuangan tetap meneruskan oposisinya terhadap Kabinet Sjahrir sekalipun program kabinet baru itu merupakan kompromi pendapat antara Persatuan Perjuangan dengan haluan politik semula Pemerintah. Program kabinet baru itu tidak memuaskan golongan Tan Malaka dan kawan-kawannya. Karena itu Pemerintah mencurigai tindakan Tan Malaka dan kawan-kawannya yang menginginkan kedudukan pemimpin pemerintahan. Pada akhir bulan Maret beberapa tokoh politik, khususnya dari Persatuan Perjuangan ditangkap. Menurut keterangan Pemerintah tujuan penangkapan adalah untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat daripada tindakan pemimpin-pemimpin politik itu, karena terdapat bukti-bukti bahwa mereka akan mengacaukan, melemahkan dan memecah persatuan. Mereka tidak melakukan oposisi yang sehat dan loyal melainkan hendak melemahkan pemerintah. Ada indikasi kuat bahwa mereka akan merubah susunan negara diluar undang-undang.[100] Mereka yang ditangkap adalah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosuyoso, Sayuti Melik, Chairul Saleh dan Muh. Yamin.[101]

Karena usul balasan ditolak, pemerintah RI tetap membulakan tekad mengerahkan tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang diselenggarakan untuk menyempurnakan kesatuan komando[102]

Pada awal bulan Juni di Solo terjadi pergolakan, dimana rakyat Solo menuntut dilenyapkannya : pemerintahan kesunanan.[103] Daerah Istimewa Surakarta dinyatakan menjadi daerah RI, yang berbentuk karesidenan. Untuk mencegah segala kemung-

---

100 *Kedaulatan Rakjat*, 1 April 1946. Pengumuman Pemerintah sebagai penjelasan daripada Pengumuman Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1946.

101 *Ibid.*

102 Wawancara pers Perdana Menteri Sutan Sjahrir, *Kedaulatan Rakjat*, 27 Mei 1946.

103 Pergolakan Rakyat atau "revolusi sosial" terhadap raja-raja terjadi juga pada bulan Maret 1946 di Sumatera Timur. Banyak keluarga raja-raja yang terbunuh. Karena itu segera TRI Daerah Sumatra mengambil alih pemerintahan disana, *Suluh Merdeka*,. 5 Maret 1946. Di Solo tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan; mungkin akibat campur tangan Presiden.

kinan terjadinya kekacauan didalam negeri. Presiden Sukarno pada tanggal 6 Juni 1946 mengesahkan Undang-undang Keadaan Bahaya atau Undang-undang No. 6 tahun 1946. Sehubungan dengan keadaan di daerah Solo itu Presiden mengumumkan keadaan bahaya untuk daerah Kesunanan dan Mangkunegaran.[104] Pergolakan di Solo semakin meluas menjadi pergolakan politik. Pengikut Tan Malaka tetap berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Sjahrir dengan cara lain. Sehari kemudian diumumkan keadaan bahaya untuk Jawa dan Madura. Oleh Presiden kemudian dibentuk Dewan Militer yang dipimpin sendiri oleh Presiden sehubungan dengan keadaan bahaya. Juga kesatuan komando Angkatan Perang ditegaskan dimana Panglima Besar Soedirman ditetapkan sebagai Pemimpin Angkatan Darat. Laut dan Udara.[105] Selanjutnya Presiden pada tanggal 28 Juni 1946 menyatakan Negara (seluruh Indonesia) dalam keadaan bahaya. berhubung dengan adanya peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir dari tempat penginapannya di Solo. Penculikan dilakukan oleh pasukan pengikut Tan Malaka. pada malam tanggal 27/28 Juni 1946. Perdana Menteri Sjahrir diculik bersama-sama Mayor Jenderal Sudibjo. Menteri Kemakmuran dr. Darmasetiawan. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. dan Gaos.[106] Sehubungan dengan peristiwa itu Presiden Sukarno menyerukan kepada penculik untuk segera mengembalikan Perdana Menteri Sjahrir dan kawan-kawannya. Sehari setelah seruan Presiden itu. penculik mengembalikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dalam keadaan selamat. Ketika terjadi peristiwa penculikan itu. Presiden dengan disetujui oleh kabinet mengambil-alih pimpinan pemerintahan. untuk mengisi kekosongan karena nasib Perdana Menteri belum diketahui.[107] Lanjutan daripada peristiwa penculikan itu. pada tanggal 3 Juli 1946 Mr. Ahmad Subardjo. Mr. Iwa Kusumasumantri disertai oleh Mayor Jenderal (sekarang Kolonel Polisi Purnawirawan) Sudarsono. Panglima Divisi X Yogyakarta. mencoba memaksa Presiden. agar Presiden menandatangani konsep susunan pimpinan pemerintahan baru. Yang mereka kehendaki adalah pimpinan pemerintahan agar diserahkan kepada pengikut Tan Malaka. Karena Presiden tidak dapat digertak.

---

104 *Berita Repoeblik Indonesia*. No. 18-19 th. II Agustus 1946. hal. 203.
105 *Kedaulatan Rakjat*. 28 Juni 1946.
106 *Kedaulatan Rakjat*. 1 Juli 1946.
107 *Berita Repoeblik Indonesia*. No. 18-19. Th.II Agustus 1946. hal. 206.

maka usaha perebutan kekuasaan itu gagal. Menurut keterangan Pemerintah mereka telah mencoba mempengaruhi dan mencari simpati dari partai-partai politik, dan memulai kegiatannya sejak tanggal 31 Oktober 1945.[108]

Sekalipun beberapa hari kemudian Sjahrir telah dikembalikan, berhubung dengan kenyataan bahwa Presiden telah mengambil-alih pimpinan pemerintahan Sjahrir tidak segera kembali menjabat perdana menteri. Karena selama menjadi perdana menteri ia merangkap sebagai menteri luar negeri, sesudah ia kembali, Presiden menetapkan Sjahrir tetap sebagai menteri luar negeri. Sesudah keadaan normal kembali, pada tanggal 14 Agustus, baru Presiden menunjuk Sjahrir kembali sebagai formatur kabinet.[109]

Sementara itu pihak Belanda melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan konperensi di Malino, dengan tujuan untuk membentuk "negara-negara" di daerah-daerah yang baru diterima dari Inggris. "Negara-negara" itu kelak dijadikan imbangan terhadap RI, untuk memaksa RI agar menerima bentuk federasi sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah Belanda. Kecuali Konperensi Malino, juga diselenggarakan konferensi di Pangkalpinang khusus untuk golongan minoritas. Konperensi Malino diadakan pada tanggal 15 - 25 Juli 1946 dan Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946. Tekanan militer dilakukan oleh Belanda dengan jalan terus menerus mengirimkan pasukannya ke Indonesia. Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasa baiknya untuk menjadi perantara antara dua negara yang bersengketa ini. Pemerintah Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Pada bulan Agustus 1946 Lord Killearn datang ke Indonesia dan menemui menteri luar negeri Sjahrir. Pokok pembicaraan Sjahrir-Killearn adalah tiga hal. Pertama: masalah gerakan militer dan gencatan senjata. Untuk ini akan dikirim perwira Tentara Republik Indonesia (TRI) yang akan membahas detail teknis dengan Markas Besar Serikat di Jakarta. Kedua : mengenai masalah *RAPWI* (Relief of Allied Prisoners of War and Internees). Sjahrir juga menjanjikan akan mengirim perwira TRI yang ditugaskan untuk membahas masalah tersebut. Ketiga :

---

108 Usaha Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan dan juga kegiatan Tan Malaka untuk mendapatkan "wasiat politik" dari Sukarno-Hatta.

109 *Op. cit.*, 15 Agustus 1946.

adalah masalah golongan minoritas. Indonesia berjanji akan tetap melindungi golongan minoritas.[110]

Sebagai realisasi daripada pertemuan Sjahrir-Lord Killearn pada tanggal 17 September. dikirim delegasi TRI dalam rangka membicarakan gencatan senjata. Delegasi dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibjo beserta 6 anggota, antara lain Komodor S. Suryadarma, Kolonel M. Simbolon dan Kolonel T.B. Simatupang pang.[111] Dalam perundingan dengan Serikat ini delegasi Indonesia mengajukan Nota 5 fasal yang meliputi :

1. Gencatan senjata secara total di darat, laut dan udara.
2. penghentian pemasukan pasukan Belanda ke Indonesia.
3. jaminan dari Serikat bahwa Serikat tidak akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada pihak Belanda.
4. pembukaan atau kebebasan memakai jalan di darat, laut dan udara oleh pihak RI.
5. penyingkiran orang Jepang baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia.[112]

Nota utusan militer Indonesia ditolak oleh Serikat.[113] Untuk sementara waktu perundingan mengalami kegagalan.

Sementara itu Sutan Sjahrir yang ditunjuk menjadi formatir berhasil menyusun kabinetnya. Pada 2 Oktober 1946 kabinet Sjahrir III dilantik. Kabinet ini melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda. Kemudian perundingan gencatan senjata diteruskan. Setelah berunding selama 5 hari (9-14 Oktober 1946) akhirnya dicapai persetujuan sebagai berikut:

1. Delegasi Indonesia Inggris dan Belanda setuju mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan militer pada waktu kini dan atas dasar kekuatan militer.
2. Disetujui pembentukan Komisi Gencatan Senjata yang bertugas untuk menimbang dan memutuskan pelaksanaan gencatan senjata dan pengaduan terhadap pelanggarnya.
3. Komisi ini bekerja sampai 30 Nopember 1946. Susunan Komisi Gencatan Senjata adalah: Mr.Wright, Mayor Jenderal E.C. Mansergh, Kolonel Laut Cooper, Air Commodore Stevens, Mayor Jenderal Formann (Inggris),

110 *Kedaulatan Rakjat*, 20 Agustus 1946.
111 *Ibid*, 16 September 1946.
112 *Ibid*, 25 September 1946.
113 *Ibid*, 1 Oktober 1946.

dr.Sudarsono. Jenderal Soedirman, Laksamana Muda M. Nazir, Komodor (Marsekal Pertama) Surjadarma (Indonesia) dan Dr. Idenburgh, Letnan Jenderal Spoor, Laksamana Pinke. Mayor Jenderal Kengen (Belanda).

4. Disetujui bersama membentuk sub-komisi teknis yang terdiri atas para kepala staf militer Inggris, Indonesia dan Belanda. Tugas sub-komisi ini adalah untuk selekasnya memberi perintah penghentian tembak-menembak, menyusun instruksi untuk pedoman pelaksanaan gencatan senjata. membentuk badan arbitrase. dll.[114]

Pembicaraan masalah gencatan senjata tersebut baru dalam tingkat politik dan baru tercapai persetujuan prinsip.[115] Karena itu Panglima Besar Soedirman dalam pidato radionya menegaskan bahwa dalam masalah gencatan senjata ini belum ada perintah penghentian tembak-menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan. Sesuai dengan persetujuan itu pada akhir November dan awal Desember diadakan perundingan-perundingan antara Belanda dan Indonesia untuk menetapkan garis demarkasi.

Perundingan itu dihadiri oleh anggota Komisi Gencatan Senjata dari kedua belah pihak, tetapi tidak menghasilkan sesuatu keputusan Sesudah Kabinet Sjahrir dilantik, mulai lagi dilaksanakan perundingan dengan Belanda, dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Anggota-anggota delegasi tiga orang yaitu. Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo dan dr. A K Gani, disertai dengan anggota-anggota cadangan Mr. Amir Sjarifudin, dr. Sudarsono dan dr. J. Leimena. Dasar pokok perundingan adalah program politik pemerintah, yang terdiri atas:

- berunding atas dasar pengakuan Negara Republik Indonesia. merdeka 100%.
- mempersiapkan rakyat dan negara disegala lapangan. politik, militer, ekonomi, sosial untuk mempertahankan RI [116]

Sedang pihak Belanda menyusun Komisi Jenderal yang ditugaskan untuk berunding dengan Indonesia. Komisi Jenderal dipim-

114 *Kedaulatan Rakjat*, 16 Oktober 1946.
115 *Ibid*, 18 Oktober 1946.
116 *Kedaulatan Rakjat*, 7 Oktober 1946.

pin oleh Prof. Schermerhorn. Anggota-anggotanya adalah Mr. Dr. Prof. F. de Boer dan H.J. van Mook.

Perundingan dimulai pada tanggal 7 Oktober di Jakarta.[117] Dalam perundingan ini komisi Jenderal mengajukan usul-usul yang tidak dapat diterima oleh pemerintah RI. Usulnya yalah jika pemerintah RI tidak dapat menerima masa peralihan, diusulkan agar RI mau menerima kedudukan sebagai negara bagian. Usul lainnya adalah : Komisi Jenderal menuntut agar RI memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga benar-benar RI menguasai keadaan daerah yang dikuasainya. Pihak RI menyatakan bahwa alam pikiran Komisi Jenderal masih diliputi oleh *rijks eenheidsgedachte* (gagasan kesatuan kerajaan Belanda), sehingga menuntut RI tetap dalam lingkungan Belanda. Hal inilah yang menjadi sebab untuk sementara perundingan mengalami penundaan. Kemudian pihak RI kembali mengajukan usul mengenai pengembalian hak-hak milik swasta Belanda. Karena tawaran ini dianggap menguntungkan, maka Komisi Jenderal menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintahnya.

Akhirnya perundingan diteruskan dan diadakan di Linggajati pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 fasal. Naskah ini kemudian diparaf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah antara lain: —

- Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara, berdasarkan federasi, dinamai Negara Indonesia Serikat.
- Pemerintah RIS akan tetap bekerjasama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda.[118]

Setelah naskah diparaf, timbul pelbagai macam tanggapan dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan kontra naskah persetujuan itu. Mengenai masalah ini, Sutan Sjahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima, agar kita dapat mempergunakan tenaga 75 juta rakyat dengan lebih rasionil. Naskah persetujuan bukanlah untuk ditafsirkan, sehingga menimbulkan anggapan seolah-olah merupakan surat wasiat yang menentukan hidup-mati dan tidak dapat diubah-ubah. Naskah

---

117 *Ibid.*
118 Lihat lampiran 3.

sekedar alat untuk mencari jalan baru bagi perjuangan kita dimasa yang mendatang dan sebagai batu loncatan guna mencapai tujuan, yaitu memperbaiki kedudukan politik. Hal ini dapat memberikan harapan kepada rakyat, untuk menunjukkan jalan yang baik, yang tidak semata-mata berupa status juridis tetapi kedudukan politik.[119]

Beberapa partai politik menyatakan menentang, diantaranya Masjumi. Masjumi berdasarkan keputusan Pengurus Besarnya tanggal 4 Desember 1946 menyatakan menolak naskah persetujuan. Partai-partai lain yang menolak adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Barisan Banteng, Partai Rakyat Jelata, yang mendukung PKI, Pesindo, BTI, Lasjkar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Dewan Pusat Kongres Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah persetujuan. Hal ini karena Kongres Pemuda adalah badan federatif, demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka. Golongan yang menolak bergabung didalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri dari partai serta organisasi tersebut diatas.[120] Pertentangan pendapat mengenai pro dan kontra naskah berlangsung terus. Untuk mengambil jalan tengah dalam pertentangan ini pemerintah berusaha untuk segera menyelesaikannya. Pada bulan Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Peraturan Presiden No. 6 ini berisi tentang pembebasan para pejabat negara untuk melakukan tugas sebagai anggota KNI, seruan kepada partai-partai politik besar untuk memilih calon-calonnya sejumlah dua kali lipat jumlah hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil daerah diluar Jawa dan Madura.[121]

Peraturan Presiden ini juga mendapat tentangan keras dari dua partai politik besar yaitu PNI dan Masjumi. Kedua partai ini berpendapat bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sah, karena setelah ada kabinet, Presiden tidak boleh melakukan tindakan

---

119 *Soeara Merdeka*, 3 Desember 1946.

120 *Ibid*, 12 Desember 1946 dan 14 Desember 1946.

121 *Soeara Merdeka*, 4 Januari 1947.

yang *wetgevend*.[122] Juga dalam membuat peraturan itu Badan Pekerja KNIP tidak diajak berunding. Hal ini dianggap pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat.[123] Namun partai pemerintah khususnya Partai Sosialis menyatakan bahwa peraturan Presiden tersebut yang berdasarkan hak prerogatif Presiden adalah sah. Sedang Badan Pekerja KNIP juga menentang keras peraturan tersebut. Di dalam sidang sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat Presiden menolak tuduhan dari golongan penentang peraturan ini. Dinyatakan bahwa dengan penembahan anggota baru, susunan KNIP menjadi sempurna dan meliputi perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Presiden mempersilahkan sidang untuk mempertimbangkan keputusan Badan Pekerja yang menentang peraturan presiden tersebut.[124] Akhirnya sidang menerima peraturan presiden tersebut dan pada tanggal 28 Pebruari 1947 dilantik sejumlah 232 anggota baru KNIP.[125] Dengan penambahan suara itu pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi naskah Persetujuan Linggajati. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 naskah Persetujuan ditandatangani oleh delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing.

Sekalipun naskah Persetujuan telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan tafsir mengenai beberapa fasal persetujuan, menjadi pangkal perselisihan. Apalagi pihak Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan bersama pada tanggal 12 Februari 1947, seminggu sebelum naskah ditandatangani. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal menyampaikan nota kepada Pemerintah RI melalui misi Idenburgh. Nota tersebut harus dijawab oleh Pemerintah RI dalam tempo 2 minggu.[126] Isi nota tersebut adalah:

1. Membentuk pemerintahan peralihan bersama.
2. Garis demiliterisasi hendaklah diadakan dan pengacauan-pengacauan di daerah yang bergabung dalam konperensi Malino, seperti: NIT, Kalimantan, Bali dsb. harus dihentikan.

---

122 *I b i d*, 15 Januari 1947.
123 *I b i d*, 4 Januari 1947.
124 Parada Harahap, *Saat Bersedjarah*, Jakarta, 1951 hal. 20.
125 Parada Harahap, *ibid*, hal.45; *op.cit.*, 14 Pebruari 1947.
126 *Merdeka*, 30 Mei 1947.

3. Sehubungan dengan tugas tentara, harus diadakan perundingan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk ini perlu sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara kerajaan Belanda tinggal di Indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan yang modern.
4. Pekerjaan bersama dalam waktu yang singkat, dapat dijamin dengan pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luarnegeri.
5. Tentang masalah perekonomian: hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama.[127]

Pada tanggal 8 Juni 1947 Pemerintah RI menyampaikan nota balasan yang terdiri atas empat pokok:

- masalah pemerintahan peralihan/politik.
- masalah militer.
- masalah ekonomi.
- dan masalah-masalah lainnya.

Dalam masalah politik pemerintah menyatakan bersedia mengakui negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan Linggajati. Status Borneo dibicarakan bersama RI–Belanda. RI tetap diakui sebagaimana termaktub dalam Linggajati. Dalam bidang militer pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi dengan menyerahkan penjagaan zone bebas militer itu kepada Polisi. Peta demarkasi dikembalikan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak diundurkan dari daerah demarkasi ke kota garnisun masing-masing. Mengenai penyelenggaraan fasal 16 tentang pertahanan Indonesia Serikat, adalah urusan Indonesia Serikat sendiri sebagai kewajiban nasional dan dasarnya harus dilakukan oleh Tentara Nasional sendiri. *Gendarmerie* bersama ditolak.[128] Meskipun demikian konsesi Sjahrir dianggap terlalu jauh, sehingga partainya sendiri melepaskan dukungannya, apalagi partai-partai lain. Akhirnya kabinet Sjahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.[129] Sebagai akibat perbedaan pendapat di dalam Partai Sosialis, Sjahrir dan kawan-kawannya keluar dan membentuk Partai Sosialis Indonesia. (PSI).

---

127 *Bahtera*, No.7 th.I, 15 Juni 1947, hal12.
128 *Merdeka*, 10 Juni 1947.
129 *Nasional*, 27 Juni 1947.

2. Melawan aksi militer Belanda yang pertama.

Di bidang perjuangan bersenjata, sejak pemerintah menyatakan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945 yang ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi adalah Supriyadi. Supriyadi adalah tokoh pemberontak terhadap Jepang di Blitar pada bulan Pebruari 1945. Ternyata Supriyadi tidak pernah tampil kemuka dan belum pernah menduduki posnya. Di kalangan TKR terasa adanya kekosongan pimpinan tertinggi yang tenaganya sangat dibutuhkan. Karena itu pada bulan November 1945 diadakan musyawarah TKR yang dihadiri oleh para panglima divisi dan komandan resimen dari seluruh Jawa dan Sumatra.[130] Dalam permusyawaratan itu yang terpilih sebagai pengganti Supriyadi ialah Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V, Banyumas.

Pada tanggal 18 Desember 1945 Presiden mengumumkan pengangkatan Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.[131] Setelah diangkatnya Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar, maka nama Tentera Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).[132] Pada tanggal 23 Februari 1946 Pemerintah mengeluarkan penetapan presiden tentang Panitya Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Panitya bertugas untuk menyusun peraturan mengenai bentuk kementerian pertahanan dan bentuk, kekuatan serta organisasi tentara, serta kedudukan laskar atau badan-badan perjuángan. Panitya menyelesaikan tugasnya pada tanggal 17 Mei 1946, membagi tugas dan menghasilkan keputusan yang disetujui oleh Presiden. Dibawah Menteri Pertahanan terdapat Markas Tertinggi, dan Direktorat Jenderal bagian Militer. Sebagai Panglima Besar ditunjuk Jenderal Soedirman dan sebagai Kepala Markas Besar umum Letnan Jenderal Urip Soemohardjo. Jumlah divisi diperkecil. Di Jawa yang semula pada 10 divisi dikurangi menjadi 7 divisi, sedang di Sumatera semula 6 divisi menjadi 4 divisi. Mengenai badan perjuangan setelah dibentuknya Dewan Pertahanan Negara dikeluarkan Peraturan No. 19. Peraturan ini

---

130 Djenderal Major T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, Jakarta, 1960, hal. 198 - 199.

131 *Tentara Keamanan Rakjat*, No.1 Th.I, 10 Januari 1946, hal.2.

132 *Ibid*, no.3 th.I, tanggal 10 Pebruari 1946, hal.1.

menvatakan bahwa semua badan-badan perjuangan dibawah satu biro, dalam Kementerian Pertahanan yaitu Biro Perjuangan. Peraturan itu kemudian ditegaskan kembali oleh Maklumat Menteri Pertahanan 4 Oktober 1946, tentang pembentukan Dewan Kelasykaran Pusat dan Dewan Kelasykaran Daerah yang dipimpin oleh Biro Perjuangan.[133] Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang memutuskan untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mempersatukan Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan lasykar menjadi satu organisasi tentara. Pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah Panitia yang dipimpin oleh Presiden sendiri, dengan dibantu oleh tiga orang wakil ketua yakni: Wakil Presiden, Menteri Pertahanan dan Panglima Besar dengan anggota-anggota terdiri dari Kepala Staf Umum MBT, dan para pimpinan badan-badan perjuangan. Hasil kerja Panitia adalah Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni telah disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI. Mula-mula TNI mempunyai pimpinan kolektif sebagai pimpinan tertinggi. Kepala Pucuk Pimpinan TNI adalah Panglima Besar Soedirman. Dan nama TNI ini memuaskan semua pihak, baik dari kalangan TRI maupun pelbagai lasykar, yang tetap menganggap dirinya bukan sebagai alat negara semata-mata melainkan sebagai pejuang nasional. Nama TRI dianggap sebagai sebutan untuk alat negara, tetapi TNI adalah alat bangsa Indonesia.[134] Penetapan Presiden tersebut baru dalam perobahan nama saja, susunan organisasi TNI masih berlaku susunan lama. Belum sempat disusun, aksi militer Belanda I sudah di mulai. Adapun alat keamanan negara lainnya adalah Kepolisian Negara. Kepolisian Negara semula di bawah Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi pada tanggal 26 Juni 1946 dikeluarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD tahun 1946 dimana Jawatan Kepolisian Negara dikeluarkan dari Kementerian tersebut dan berdiri sebagai Jawatan sendiri di bawah Perdana Menteri.[135]

Sementara itu pada tanggal 21 Juli 1947 jam 00.00 Belanda memulai aksi militernya. Dalam waktu yang singkat Belanda berhasil menerobos pertahanan TNI. Kekuatan TNI dengan organisasinya dan peralatannya yang sederhana tidak dapat

133 *Reglmen Tentara Perdjoeangan*, no. 1. th.I, Pebruari 1947, hal. 6.
134 Jenderal A.H.Nasution, *Tentara Nasional Indonesia II*, Jakarta 1968, hal. 84 - 87.
135 *Berita Repoeblik Indonesia*, No.18-19 th. II, Agustus 1946. hal. 215.

menghambat pukulan musuh yang serba modern persenjataannya. Sebenarnya pihak kita telah bersiap-siap untuk menyambut serangan Belanda apabila sewaktu-waktu pihak Belanda melanggar *cease-fire*. Persiapan itu adalah rencana bumi hangus yang pelaksanaannya menunggu komando Panglima Besar.[136]

Agresi Belanda ini menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia. Pada tanggal 30 Juli 1947 Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar pembicaraan Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima dan pada tanggal 31 Juli dimasukkan sebagai acara pembicaraan Dewan Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk komisi konsuler, yang anggota-anggotanya terdiri daripada konsul jenderal yang ada di Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh konsul jenderal Amerika Dr. Walter Foote dan beranggotakan konsul jenderal Cina, konsul jenderal Belgia, konsul jenderal Perancis, konsul jenderal Inggris, dan konsul jenderal Australia.[137] Komisi konsuler ini kemudian diperkuat dengan personalia militer Amerika Serikat dan Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Komisi Konsuler menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus pasukan Belanda mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan pasukan-pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Perintah penghentian tembak-menembak tidak memuaskan. Belum ada tindakan yang praktis untuk menyelesaikan masalah penghentian tembak-menembak untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh.[138]

Dewan Keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat, bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan ini dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik. Indonesia dan Belanda dipersilahkan masing-masing memilih satu negara yang dipercaya untuk mengawasi penghentian tembak-menembak.

---

136 Jenderal A.H. Nasution, *op.cit*, hal. 90.

137 *Merdeka*, 15 Oktober 1947.

138 *Merdeka*, 11 Oktober 1947.

Dua negara yang terpilih oleh Indonesia dan Belanda dipersilahkan memilih satu negara untuk ikut serta sebagai anggota komisi. Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota Komisi. Belanda memilih Belgia dan kedua negara yang terpilih ini memilih Amerika Serikat. Australia diwakili oleh Richard Kirby. Belgia oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Dr.Frank Graham. Komisi PBB ini di Indonesia dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam masalah militer, KTN mengambil inisiatif tetapi dalam masalah politik KTN hanya memberikan saran dan usul. tidak mempunyai hak untuk memutuskan persoalan politik. KTN mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947. Setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua pemerintah, akhirnya disepakati untuk kembali kemeja perundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat berunding. tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap bahwa Jakarta tidak ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif, akibat aksi militer.[139] Republik menginginkan pada suatu tempat di luar daerah pendudukan Belanda. KTN mengambil jalan tengah dan mengusulkan agar kedua belah pihak menerima tempat perundingan diatas sebuah kapal yang disediakan atas perantaraan KTN. Kemudian Belanda menghendaki masalah militer diselesaikan dulu, baru berunding soal politik.

Sebelum itu sebetulnya sudah dibentuk komisi untuk melaksanakan gencatan senjata yang disebut komisi Teknis. Anggota-anggota Komisi Teknis dari pihak Republik dibawah pimpinan Menteri Kesehatan dr. Leimena. Anggota-anggotanya adalah Mr. Abdul Madjid, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Bustomi.[140] Komisi Teknis pihak Belanda dipimpin oleh van Vredenburgh dengan anggota-anggota: Mayor Jenderal Buurman van Vreden, Kolonel Drost, Mr.Zulkarnaen, Letnan Kolonel Suryo Santoso. Dr. Stuyt dan Dr J.P. Koets.[141] Didalam perundingan Komisi Teknis yang telah dilakukan. usul mengenai daerah bebas militer dianggap kurang praktis dan Belanda tetap menuntut dipertahankannya garis van Mook yakni

---

139 *Ibid.* 22 Oktober 1947.

140 *Op. cit.* 3 Nopember 1947. Kolonel.M. Simbolon dan Letnan Kolonel Bustomi dari Sumatra.

141 *Min Pao*, 18 Nopember 1947.

suatu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk pasukan Belanda yang maju sesudah perintah Dewan Keamanan untuk menghentikan tembak-menembak. Kemudian mereka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingannya di Kaliurang, yang berisi: dilarang melakukan sabotase, intimidasi, pembalasan dendam, dan tindakan yang semacam terhadap orang-orang, golongan dan harta-benda kedua belah pihak.

Sejak jatuhnya Kabinet Sjahrir III, Presiden menunjuk Mr. Amir Sjarifuddin untuk menyusun kabinet baru. Setelah Amir berhasil menyusun kabinet baru, mulailah disusun delegasi untuk menghadapi perundingan dengan Belanda. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin sendiri, dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Wakil Ketua.

Anggota-anggota terdiri dari: dr.Tjoa Siek Ien, Sutan Sjahrir, H.A. Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan masing-masing Ir. Djuanda dan Setiadjid, serta 32 orang penasehat.[142] Delegasi Belanda dipimpin oleh R.Abdul Kadir Widjojoatmodjo, dengan Mr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya terdiri dari Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch.R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Mr Adjie Pangeran Kartanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A H Ophuysen, A Th Baud sebagai sekretaris![143]

Perundingan yang diselenggarakan diatas kapal-angkut pasukan milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS *Renville* dibuka resmi pada tanggal 8 Desember 1948 dibawah pimpinan Herremans, wakil Belgia didalam KTN [144] Sementara itu perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu. Hal ini disebabkan karena Belanda menolak saran KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Pihak Belanda tidak mau merundingkan soal-soal politik selama masalah gencatan senjata belum beres.[145] Karena macetnya perundingan, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan keterangan mengenai sebab-sebab kemacetan tersebut. Dinyatakannya bahwa pihak Belanda hanya menyetujui hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kecepatan gerakan pasukan Belanda menunjukkan keinginan untuk menduduki daerah seluas mungkin dengan mengadakan "pembersihan" berdasarkan kedudukan mereka yang terdepan.

---

142 *Merdeka*, 29 Oktober 1947.
143 *Kedaulatan Rakjat*, 9 Nopember 1947.
144 *Merdeka*, 9 Nopember 1947.
145 *Ibid*, 11 Desember 1947.

Namun situasi pada tanggal 4 Agustus 1947 menunjukkan bahwa pihak Belanda hanya menduduki kota-kota saja, di luar kota TNI dan pemerintah RI tetap utuh dan aktif. Garis depan RI adalah kantong-kantong di belakang kedudukan Belanda yang terdepan. Untuk mengatasi kemacetan perundingan ini KTN mengajukan usul baru, supaya masing-masing pihak berunding dulu dengan KTN. Kedua belah pihak setuju dan dan diadakan perundingan pendahuluan dengan KTN. Dari hasil perundingan itu KTN menyimpulkan bahwa persetujuan Linggajati dapat dijadikan dasar perundingan. Namun terdapat kesulitan yakni mengenai gencatan senjata. Karena Belanda tetap menekankan tuntutannya pada garis demarkasi van Mook, sedang pihak Republik menolak Wakil Australia mengusulkan diadakan daerah demiliterisasi yang diawasi oleh Polisi. Pasukan masing-masing diundurkan sejauh 10 km. Kemudian KTN mengajukan usul politik yang didasarkan atas persetujuan Linggajati, yaitu :

a. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
b. Kerjasama Indonesia-Belanda
c. Suatu negara yang berdaulat atas dasar federasi
d. Uni antara Negara Indonesia Serikat dan bagian lain kerajaan Nederland.

Sebagai balasan usul KTN pihak Belanda mengajukan 12 prinsip politik disampaikan kepada pihak Indonesia. Prinsip Belanda adalah: pengurangan pasukan, menghidupkan kegiatan ekonomi. Tetapi dalam usul itu tidak disebutkan masalah penarikan tentara Belanda. Belanda menyatakan bahwa hal itu adalah usaha yang terakhir, apabila ditolak, Belanda tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, dan RI diberi waktu 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari bahwa hal ini akan sangat berbahaya. Dr. Graham menambah 6 prinsip tambahan untuk mencapai penyelesaian politik. Karena prinsip ini disampaikan kepada pemerintah RI oleh KTN, Pemerintah RI mendapat jaminan KTN, bahwa kekuasaan Republik akan tidak berkurang selama peralihan sampai diserahkannya kedaulatan Belanda kepada negara federal Indoensia. RI menerima prinsip KTN itu karena dalam fasal 4 dari 6 prinsip itu dinyatakan bahwa antara enam bulan sampai satu tahun sesudah ditandatangani persetujuan politik, akan diadakan plebisit diseluruh Indonesia dibawah pengawasan KTN, untuk menentukan apakah mereka berhasrat bergabung dengan

Republik Indonesia atau tidak. Pihak Belanda juga berjanji akan menerima prinsip yang diajukan oleh KTN apabila pihak RI menyetujuinya sampai batas waktu 9 Januari 1948. Akhirnya pada tanggal 17 Januari kedua belah pihak bertemu kembali diatas kapal *Renville* untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah distujui bersama dengan disaksikan oleh KTN.

Sementera perundingan berlangsung, pihak Belanda berusaha terus untuk membentuk negara-negara boneka. Konferensi Jawa Barat II diselenggarakan di Bandung pada 16 - 19 Desember untuk menentukan status Jawa Barat. Konferensi ini mendapat tantangan dari rakyat Jawa Barat sendiri. Rakyat menyatakan bahwa Jawa Barat adalah bagian dari RI dan status Jawa Barat tak dapat dipisahkan dengan RI. [146] Disamping itu juga dibentuk Komite Indonesia Serikat sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Beel pada 19 Desember 1947 dan pembentukan negara Sumatera Timur. [147]

Pada saat perundingan berlangsung diadakan pula reshuffle kabinet Amir Sjarifuddin. Dalam pengumumannya tanggal 12 Nopember 1947, dinyatakan bahwa partai Islam mendapat 10 kursi, PNI 7 kursi dan Partai Sosialis 7 kursi. [147] Tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat kabinetnya dalam rangka menghadapi perundingan dengan Belanda. Sekalipun kabinet Amir ini merupakan kabinet koalisi yang kuat, namun setelah Kabinet Amir menerima persetujuan Renville, kembali partai-partai politik menentangnya. Masjumi yang merupakan pendukung kabinet, menarik kembali menteri-menterinya. Tindakan ini diambil, karena Masjumi berpendapat bahwa Amir Sjarifuddin menerima begitu saja ultimatum Belanda atas 12 prinsip politik dan 6 tambahan dari KTN. Tindakan Masjumi didukung oleh PNI. Sebagai hasil dari pada sidang Dewan Partai tanggal 18 Januari 1948 PNI menuntut supaya kabinet Amir menyerahkan mandatnya kepada Presiden. PNI menolak persetujuan Renville karena persetujuan itu tidak menjamin dengan tegas akan

---

146 *Merdeka*, 22 Desember 1947.

147 *Ibid*

147 Hasil reshuffle kabinet tanggal 12 Nopember 1947 adalah Partai Sosialis 7 kursi, Masjumi 5 kursi, PNI 7 kursi, PSII 5, PBI, PKI, Partai Katolik, Parkindo, Badan Konggres Pemuda masing-masing 1 kursi, golongan tak berpartai 3 kursi. Jumlah 37 kursi. *Merdeka*, 13 Nopember 1947

kelanjutan dan kedudukan Republik. Kabinet Amir yang hanya didukung oleh Sayap Kiri tidak berhasil dipertahankan. Dan pada 23 Januari Amir Sjarifuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.

3. Menumpas Pemberontakan Partai Komunis Indonesia

Sesudah jatuhnya Kabinet Amir, Presiden menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru, Hatta mencoba membentuk kabinet koalisi dengan mengikutsertakan semua partai dalam kabinetnya untuk menggalang persatuan nasional. Hatta menawarkan 3 kursi tanpa pertefolio kepada Sayap Kiri. Tetapi Sayap Kiri menuntut sedikitnya 4 kursi termasuk jabatan Menteri Pertahanan. Permintaan ini tidak dapat disetujui dan Hatta menyusun kabinetnya tanpa Sayap Kiri. Pada tanggal 31 Januari 1948 susunan kabinet baru diumumkan, dengan Moh. Hatta sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Kabinet didukung oleh partai-partai Masjumi, PNI, Partai Katolik dan Parkindo. Satu-satunya anggota Sayap Kiri yang duduk di dalam kabinet adalah Supeno sebagai perseorangan. Ia menjabat menteri pembangunan dan pemuda. Kabinet Hatta memiliki program yang terdiri atas 4 pokok:

1. pelaksanaan persetujuan Renville dan selanjutnya perundingan dengan dasar yang telah dicapai.
2. mempercepat dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS)
3. melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri.
4. pembangunan

Untuk meneruskan perundingan dengan Belanda tentang pelaksanaan Renville Pemerintah Hatta menunjuk Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Mr Roem berkisar di sekitar 4 masalah politik yaitu soal pemerintahan federal, Uni Indonesia-Belanda, pemerintah peralihan dan sidang konstituante. Sebagai pendahuluan Perdana Menteri mengadakan pembicaraan dengan Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Hasil pembicaraan pendahuluan ini meliputi masalah plebisit, kedudukan RI dan penyerahan kekuasaan RI kepada pemerintah sementara. Jumlah negara-negara bagian tidak boleh lebih dari ketentuan-ketentuan didalam Linggajati, yaitu RI, Negara Indonesia Timur dan Borneo. Selama adanya pemerin-

tahan peralihan, RI harus diakui *de facto* dan hubungan dengan luar negeri selama masa peralihan tetap terpelihara agar tidak terjadi kekosongan. Hal ini dapat diselesaikan dengan pasal 1 Keterangan Tambahan KTN *(six additional principles).* Pembicaraan diteruskan di Kaliurang. Pihak Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo dan Husein Djajadiningrat. Namun pembicaraan ini juga mengalami kegagalan karena perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan plebisit. Setelah tiga minggu melakukan perundingan tidak berhasil, wakil Amerika Serikat dalam KTN mengajukan usul kompromi sebagai berikut:

- di daerah-daerah Jawa, Madura dan Sumatra dibentuk distrik-distrik pemilihan yang akan memilih anggota-anggota konstituante.
- dan sidang konstituante yang menentukan apakah daerah-daerah (Pasundan, Sumatra Selatan, Sumatra Timur, Madura) menghendaki masuk Republik Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara. [148]

Pemerintah RI sekali lagi menegaskan bahwa RI belum pernah menolak plebisit. RI berpendapat plebisit harus dilaksanakan di daerah-daerah yang dipersengketakan. Untuk keperluan plebisit ini tentara RI yang menjadi tulangpunggung pertahanan gerilya akan mengosongkan daerah-daerah kantong gerilya. Plebisit harus diadakan di Jawa, Madura dan Sumatra. Sementara itu tersiar kabar bahwa pemerintah RI dengan melalui dutabesarnya di Praha, Suripno, telah mengadakan perundingan dengan Uni Sovyet dan negara-negara blok Timur lainnya untuk saling mengadakan pertukaran konsul masing-masing. Berita ini sangat berpengaruh, bagi usaha untuk meneruskan perundingan. Karena itu Pemerintah Belanda mengirimkan *aide memoire* kepada pemerintah RI mengenai dua hal yakni:

> "meminta kepada RI supaya melaksanakan hal-hal yang telah disetujui dalam naskah Linggajati, yakni pengakuan kedaulatan Belanda di seluruh Indoensia pada masa peralihan. Yang kedua sampai dimana mengenai hubungan luar negeri yang dilakukan oleh RI, terutama hubungan dengan Uni Sovyet "

148 *Merdeka*, 5 Mei 1948.

Pada tanggal 10 Juni 1948 pemerintah RI mengirimkan jawabannya melalui ketua delegasinya Mr. Moh. Roem. Isi jawaban pemerintah RI adalah: "mengenai peng kuan kedaulatan Belanda di seluruh Indonesia, RI bersedia mer alankannya dan memasrahkan kekuasaan kepada Negara Indone ia Serikat (NIS). Sebelum NIS dibentuk, kedudukan RI tetap seperti sekarang. Tentang perjanjian persahabatan dengan Uni Sovyet, karena belum diratifikasi oleh KNIP maka perjanjian it belum dianggap berlaku. [149]

Sementara perundingan sedang berlangsung, kabinet Hatta dirongrong oleh kegiatan-kegiatan politik dari Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Sjari uddin. Kegiatan politik FDR dibarengi dengan usaha-usaha un uk memancing-mancing bentrokan dengan golongan lawan olitiknya. Pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh yang berada d bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karun Delanggu (Klaten). Lima hari kemudian terjadi bentrokan antara sekelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) organisasi tani Masjumi, yang menentang mogok.[150] Peristiwa tersebut menjalar menjadi pembicaraan didalam sidang KNIP. Tiga mosi telah diajukan, namun tidak ada keputusan yang pasti apakah mengutuk atau mendukung. FDR juga melakukan kegiatan di Sumatra. Rapat-rapat besar diadakan di Bukittinggi, Solok, Batusangkar, Sawahlunto, yang dipimpin oleh Abdul Karim. Sasaran golongan ini adalah kebijaksanaan kabinet Hatta. FDR menghendaki agar diadakan reshuffle kabinet dengan bentuk kabinet parlementer. Sebagai reaksi dari pernyataan-pernyataan FDR, Partai Nasional Indonesia (PNI) menyatakan setuju reshuffle akan tetapi Hatta harus tetap memegang pimpinan, berhubung dengan gawatnya situasi negara. Sekelompok politisi lainnya, yaitu para pengikut Tan Malaka membentuk Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) dibawah pimpinan Dr. Muwardi (Ketua), Sjamsu Harya Udaya (Wakil Ketua) dan Chairul Saleh (Sekretaris). Gerakan baru ini bertujuan untuk mengimbangi FDR karena itu menuntut kepada pemerintah agar membebaskan para pemimpin yang sealiran dengan mereka yang ditahan oleh pemerintah, seperti Tan Malaka, Sukarni, Abikusno.[151] Kegiatan politik

149 *Merdeka*, 10 dan 11 Juni 1948.
150 *Ibid*, 12 Juli 1948.
151 *Ibid*.

GRR belum sejauh gerakan FDR, namun mereka menentang FDR. Bersamaan dengan kegiatan FDR, pada bulan Agustus 1948 tiba kembali di Indoensia seorang tokoh kawakan PKI yang telah bermukim di Moskwa sejak tahun 1926, yakni Musso. Kedatangan Musso ternyata membawa garis baru bagi kaum komunis. Partai yang berhaluan komunis yakni Partai Sosialis. Partai Buruh pada akhir bulan Agustus 1948 berfusi dengan PKI. Mengenai tujuan fusi ini Amir sebagai pemimpin Partai Sosialis menyatakan bahwa yang menjadi dasar daripada fusi ini adalah perubahan keadaan politik Internasional sesudah perang dunia kedua. Partai Sosialis insaf bahwa politik kerjasama dengan imperialis harus diputuskan sesudah hancurnya fasisme, diganti dengan politik anti imperialis di bawah pimpinan kaum komunis.[152]

Pada bulan Agustus itu juga Musso muncul kembali sebagai tokoh politik. Ia mengadakan pembaharuan struktur organisasi Politbiro PKI. Didalam Sekretariat Umum antara lain duduk Musso sedangkan Amir Sjarifuddin menjabat sekretaris urusan pertahanan.[153]

Dibidang politik Musso mengecam kebijaksanaan pemerintah dan strategi perjuangan pemerintah. Ia menganggap revolusi Indoensia bersifat defensif, karena itu ia akan menemui kegagalan. Ia menyarankan agar dibentuk Front Nasional.[154] Didalam salahsatu wawancara pers ia menyatakan bahwa didalam tahap perjuangan demokrasi baru, masih digunakan segenap aliran, tetapi pada suatu waktu mereka harus disingkirkan karena hanya orang-orang PKI yang dapat menyelesaikan revolusi.[155] Kampanye politik Musso semakin ditingkatkan dengan mengadakan rapat-rapat raksasa. Dalam rapat raksasa di Madiun, Musso menuduh pemerintah Hatta membawa negaranya kepada penjajahan baru dengan bentuk lain. Iapun menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima instruksi-instruksi dari Moskwa.[156]

Kabinet Hatta sekalipun mendapat serangan yang tajam dari kaum komunis, tetap melaksanakan programnya yang ketiga yaitu rasionalisasi Angkatan Perang. Didepan sidang KNIP tanggal 1 September 1948 Hatta menyatakan bahwa selama 7 bulan

152 *Merdeka*, 1 September 1948.
153 *Ibid*, 2 September 1948.
154 *Ibid*, 16 Agustus 1948.
155 *Ibid*, 9 September 1948.
156 *Ibid*, 15 September 1948.

mengalami kesukaran-kesukaran psykhologis untuk melaksanakan rasionalisasi. Rasionalisasi harus berjalan terus betapapun sulitnya. Tujuan rasionalisasi adalah untuk perbaikan, karena itulah satu-satunya jalan untuk memerangi inflasi yang membahayakan kehidupan rakyat.[157] Rasionalisasi dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin, yakni:

- melepaskan mereka dengan sukarela untuk meninggalkan tentara bagi mereka yang ingin kembali ke pekerjaan semula.
- menyerahkan penampungan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
- mengembalikan 100.000 orang ke dalam masyarakat desa.[158]

Masalah rasionalisasi ini mendapat tantangan hebat dari Musso dan FDR-nya, karena akan mengenai banyak diantara kader-kader bersenjatanya. Namun ofensif politik dari Musso cs. tidak menggoyahkan kedudukan Kabinet Hatta, karena dukungan dua partai politik besar PNI dan Masyumi, beberapa kelompok pemuda seperti BPRI, dan organisasi yang tergabung di dalam Badan Perjuangan Seberang (KRIS, IPK, PIM, GRISK) yang dipimpin oleh Latuharhary.[159]

Pertentangan politik ini meningkat menjadi insiden bersenjata di Solo. Insiden antara simpatisan FDR/PKI dengan lawan-lawan politiknya serta juga dengan TNI. Setelah terjadi insiden-insiden bersenjata di Solo, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh tokoh-tokoh PKI diproklamasikan berdirinya Republik Sovyet Indonesia. Maka pecahlah Pemberontakan PKI di Madiun. Kolonel Djokosuyono diangkat sebagai "Gubernur Militer" Madiun.[160] Dan Letnan Kolonel Dahlan, Komandan Brigade 29 menjadi "Komandan Komando Pertempuran" Madiun. Pihak pemberontak menguasai kota Madiun dan radio Gelora Pemuda. Dalam pidato radionya di Madiun, Djokosuyono menyatakan bahwa bagian yang terpenting daripada revolusi adalah membersihkan tentara Republik Indonesia dari golongan

157 *Merdeka*, 15 September 1948.
158 *Ibid*, 10 September 1948.
159 *Ibid*, 16 September 1948.
160 *Ibid*, 20 September 1948.

reaksioner dan kolonial. Ia menuduh TNI melakukan kampanye terhadap kelompok pasukan revolusioner di Solo. Dan kemudian Musso juga menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Sukarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris dan hendak menjual tanahair kepada kaum kapitalis. [161] Padahal Persetujuan Renville yang mereka gugat adalah hasil tokoh PKI sendiri, yakni Amir Sjarifuddin selama menjadi perdana menteri. Sedang Suripno menyatakan bahwa pemberontakan di Madiun adalah gerakan pembersihan terhadap kaum reaksioner.

Dengan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan untuk menumpasnya. Dengan gerakan Operasi Militer I yang dilancarkan oleh Angkatan Perang, maka pada tanggal 30 September 1948 jam 16.15 kota Madiun berhasil direbut kembali. [162] Dua bulan kemudian operasi-operasi penumpasan dinyatakan selesai. Sayang sekali belum sempat oknum-oknum yang terlibat diadili. Belanda sudah menyerang kembali sehingga banyak diantara mereka lolos.

4. Melawan aksi militer Belanda yang kedua dan menuju Pengakuan Kedaulatan.

Sesudah pemberontakan PKI berhasil ditumpas kedudukan PKI dalam KNIP menjadi beku, sekalipun tidak ada pernyataan yang tegas tentang pembubaran PKI. Dengan hancurnya lawan politik mereka, golongan GRR mengadakan move politik. Muh. Yamin, yang pada waktu itu termasuk golongan Tan Malaka dan menamakan golongan mereka sebagai "orang-orang proklamasi" menganjurkan kepada pemerintah agar dibentuk pemerintahan yang berdasarkan *"triple platform"* yaitu kabinet yang kekuatannya terdiri atas tiga golongan, yakni golongan agama, nasionalis dan sosialis. Menurut Yamin pembentukan pemerintah berdasarkan tiga dasar tersebut bertujuan untuk memperoleh tenaga rakyat. [163] Kemudian GRR mengadakan konsolidasi. Dan pada tanggal 3 Oktober 1948 GRR dengan partai-partai yang sehaluan menyatakan fusi. Partai yang berfusi adalah Partai Rakyat, Partai

---

161 *Merdeka*, 21 September 1948.
162 *Ibid.*, 2 Oktober 1948.
163 *Ibid.*, 30 September 1948.

Rakyat Djelata. Partai Buruh Merdeka, Angkatan Comunis Muda (ACOMA) dan Wanita Rakyat menjadi Partai Murba.[164] Kegiatan partai politik setelah pemberontakan PKI, menurun dan untuk sementara waktu oposisi terhadap kabinet Hatta mereda.

Karena tidak ada persesuaian pendapat, perundingan dengan Belanda mengalami kemacetan lagi. Pendapat umum dipihak Indonesia merasa kecewa terhadap KTN. KTN dianggap lebih banyak sebagai wasit daripada sebagai perantara dalam perjuangan diplomatik Indonesia-Belanda.[165] Jalan keluar untuk mengatasi kemacetan itu sebenarnya telah dirintis oleh usul Du Bois-Critchley yakni wakil Amerika Serikat dan Australia didalam KTN. Sementara itu wakil Amerika Serikat dipanggil kembali oleh pemerintahnya, dan digantikan oleh Merle Cochran. Cochran mengajukan usul baru untuk mengatasi kemacetan itu. Usul itu pada dasarnya tidak berbeda dari usul Du Bois, hanya Cochran mendahulukan pembentukan pemerintahan *interim* daripada pembentukan konstituante sebagaimana yang diusulkan oleh Du Bois–Critchley.[166]

Jalan buntu untuk berunding masih belum dapat ditembus. Pihak RI tetap berpegang pada usul Du Bois - Critchley dan beranggapan bahwa perundingan baru dapat dimulai setelah pihak Belanda menjamin imunitas diplomasi pihak Indonesia. Sebaliknya pihak Belanda menuduh bahwa keadaan militer di Jawa semakin buruk, dan jumlah pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan pihak Republik semakin meningkat.[167] Tanpa melalui KTN, PM Hatta mengadakan pendekatan politis baru dengan Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Kedua belah pihak mengadakan perundingan langsung dengan KTN sebagai saksi. Pada tanggal 27 November 1948 delegasi Belanda datang ke Indonesia, yang terdiri dari Menteri Seberang Lautan Mr. E.M.J.A. Sassen, Menteri Luarnegeri D.U. Stikker, dan Wakil Pemerintah Agung Belanda L. Neher.[168] Perundingan dilangsungkan di Kaliurang antara PM Hatta dan delegasi Belanda secara langsung tanpa pengawasan KTN. Perundingan ini tidak berhasil memperteinukan pendapat yang prinsipiil bertentangan. PM Hatta me-

---

164 *Merdeka*, 5 Oktober 1948.
165 *Ibid*, 10 Agustus 1948.
166 *Ibid*, 9 Agustus 1948.
167 *Ibid*, 16 September 1948.
168 *Pelita Rakjat*, 29 November 1948.

nyatakan bahwa sebab terhentinya perundingan yalah karena perselisihan masalah prinsip. Setelah gagalnya perundingan pada tanggal 9 Desember 1948 pemerintah RI mengirimkan nota kepada KTN mengenai pendirian RI:

1. pemerintah RI telah mengalah sedapat-sedapatnya untuk mendekati pendirian Belanda.
2. petunjuk yang diberikan kepada Menteri Belanda terbatas pada penjajagan apakah pada dasarnya RI menerima baik syarat-syarat yang diajukan Belanda, sehingga tidak merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian lewat perundingan.
3. pemerintah Belanda terbukti pada tahun 1948 akan membentuk pemerintah interim tanpa RI, tanpa berunding dengan RI dibawah pengawasan KTN terlebih dahulu.

Dua hari kemudian, tanggal 11 Desember 1948, KTN juga menerima nota dari pemerintah Belanda, yang isinya:

1. Dalam perundingan di Kaliurang terbukti RI tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya, karena itu tidak dapat diharapkan kerjasama yang sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran persetujuan gencatan senjata.
2. pendirian RI terhadap Wakil Tinggi Mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara dimasa peralihan, bertentangan dengan kedaulatan Belanda sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian pertama pokok-pokok azasi persetujuan Renville, yang berarti berlangsungnya suatu keadaan yang tak dapat dipertahankan, dimana ada dua tentara saling berhadapan di bawah pimpinan yang terpisah.
3. Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan menyebabkan tidak ada harganya RI menerima naskah persetujuan yang direncanakan oleh KTN dan Amerika Serikat pada tanggal 10 September sebagai dasar perundingan.
4. Pemerintah Belanda harus bertindak melaksanakan keputusan pembentukan pemerintahan *interim* yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah Federal.

Sebagai penutup dari nota tersebut Pemerintah Belanda menyatakan bahwa perundingan dibawah KTN tidak berfaedah karena

pada hakekatnya RI tidak mau mengakui adanya perjanjian gencatan senjata dan persetujuan Renville. [169]

Beberapa hari setelah perundingan mengalami jalan buntu. Belanda melakukan aksi militernya terhadap RI. Yogyakarta. ibukota RI berhasil direbut dan diduduki. Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah pembesar Negara 'tidak menyingkir dan ditawan oleh tentara Belanda. Tetapi sebelumnya, Pemerintah telah memberikan mandat kepada Menteri Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dalam pada itu meskipun sakit keras. Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Jenderal Soedirman, mengundurkan diri ke luar ibukota Yogyakarta dan memimpin perang gerilya secara total terhadap tentara Belanda. Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada tanggal 24 Januari 1949. Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua anggota yakni:

a. hentikan permusuhan.
b. bebaskan Presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
c. memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indoensia sejak 19 Desember 1948. [170]

Sementara itu TNI dalam waktu kurang lebih satu bulan sudah selesai dengan konsolidasinya dan sudah mulai memberikan pukulan-pukulan kepada tentara Belanda. Pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi Belanda: kawat-kawat telepon diputuskan, jalan kereta-api di rusak dan bahkan konvoi-konvoi Belanda di siang hari diserang. Karena itu pihak Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah didudukinya. Dengan demikian *man-power* -nya habis terpaku pada ribuan pos kecil di seluruh daerah Republik yang kini merupakan satu medan gerilya yang luas. Setelah pasukan-pasukannya tersebar di luar kota-kota yang didudukinya, TNI mulai menyerang kota-kota itu sendiri. Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel (sekarang Presiden) Soeharto dengan berhasil didudukinya kota itu selama

169 *Pelita Rakjat.* 15 Desember 1948.
170 *ibid.*, 27 Desember 1948.

enam jam, dengan terang-benderang membuktikan kepada dunia bahwa TNI jauh daripada hancur, bahkan masih mempunyai kemampuan memukul. Juga jelas dari laporan-laporan yang masuk, bahwa inisiatif sudah beralih dari pihak tentara Belanda ke pihak TNI. Kini TNI-lah pihak yang menyerang dan pihak Belanda yang bertahan.

Jalan buntu di bidang militer dibarengi dengan ancaman-Amerika-Serikat untuk mencabut bantuan Marshall Plan, akhirnya memaksa Belanda untuk menerima KMB yang bermuara kepada pengakuan kedaulatan sesuatu negara Indonesia terhadap wilayah bekas Hindia-Belanda. Pada bulan pertama tahun 1949, karena didesak oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Supomo, salah seorang anggota delegasi RI dalam perundingan lanjutan Renville. untuk berunding. [171] Undangan diterima dan merupakan pertemuan yang pertama sejak tanggal 19 Desember 1948. Pertemuan Dr. Drees dengan pemimpin-pemimpin Indonesia itu tidak diumumkan. [172] Pertemuan yang sama diadakan pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)* yang terdiri atas Mr. Djumhana serta Dr. Ateng. dengan Presiden Sukarno serta Wakil Presiden Moh.Hatta. *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* adalah musyawarah antara "negara-negara bagian" bikinan Belanda. Hasil pertemuan itu tidak pernah diumumkan. [173] Tetapi Mr.Moh. Roem pemimpin delegasi Republik kemudian menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO dengan syarat diawasi oleh Komisi PBB apabila telah mencapai tingkatan formil. [174] Tetapi jelas dari perkembangan selanjutnya bahwa telah terjadi pendekatan antara RI dan BFO. Pada tanggal 13 Pebruari Wakil Presiden Moh.Hatta secara resmi menyatakan pendapatnya, bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan syarat dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB. [175] Keinginan Wakil Presiden Moh. Hatta ini kemudian disetujui dan didukung oleh BFO.

---

171 *Merdeka*, 14 Januari 1949.
172 *Ibid*, 19 Januari 1949
173 *Ibid*, 24 Januari 1949.
174 *Ibid*, 10 Februari 1949.
175 *Ibid*, 14 Februari 1949.

Berdasarkan kenyataan dan penjajagan politis oleh pihak Belanda bahwa pada dasarnya pemimpin-pemimpin RI bersedia berunding, maka pada tanggal 26 Februari 1949 mereka mengumumkan niatnya akan melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 12 Maret 1949, guna membicarakan masalah Indonesia dan merundingkan syarat-syarat penyerahan kedaulatan, serta pembentukan Uni Indonesia - Belanda. Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota untuk menemui Ir. Sukarno yang bersama beberapa pembesar RI lainnya ditawan di Bangka. guna menyampaikan maksud pemerintah Belanda. Dr.Koets pergi ke Bangka pada tanggal 28 Februari 1948. Kedatangannya di Bangka ini juga untuk menjelaskan maksud pemerintah Belanda dan mengundang Ir. Sukarno untuk menghadiri KMB di Den Haag. Isi penjelasan yang disampaikan kepada Ir. Sukarno adalah:

1. pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag. guna membahas penyerahan kedaulatan yang dipercepat.
2. penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah pengakuan kedaulatan.
3. tentang pengembalian pemerintah RI ke Yogya, dinyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan. [175]

Pada tanggal 3 Maret 1949 Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO, dan menegaskan akan perlunya kedudukan pemerintah RI dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selesai pertemuan itu pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1949. Presiden Sukarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota, yang berisi penolakan menghadiri KMB kecuali dengan syarat yaitu:

- pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk memulai perundingan,
- kedudukan dan kewajiban Komisi PBB untuk Indonesia dalam membantu melaksanakan resolusi PBB tidak akan terganggu. [176]

Đari pihak BFO dikeluarkan pernyataan yang berisi pemberitahuan bahwa BFO tetap pada pendirian semula, yakni:

175 *Merdeka*, 8 Maret 1949
176 *Ibid*, 8 Maret 1949.

— supaya pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta.
— komisi PBB untuk Indonesia agar membantu melaksanakan resolusi.
— RI memerintahkan gencatan senjata. [177]

Dari pihak Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 dikirimkan kawat kepada pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa Komisi PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak. Komisi PBB akan memberikan bantuan terhadap:

1. tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 paragraf 1 dan 2. yakni menghentikan aksi militer oleh Belanda dan pengembalian pemimpin RI ke Yogyakarta.
2. menetapkan tanggal dan waktu serta syarat untuk mengadakan KMB di Den Haag agar dapat diselenggarakan selekasnya. [178]

Dengan adanya petunjuk dari Dewan Keamanan dan adanya pendekatan politis antara pihak RI dan Belanda. maka pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan RI–Belanda. Perundingan diadakan di Hotel *Des Indes* Jakarta dibawah pimpinan Merle Cochran. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh Roem sebagai ketua dan Mr Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah: dr. Leimena. Ir. Djuanda. Prof.Mr.Dr. Supomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H. van Royen, dengan anggota-anggotanya: Mr.N. S Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J. J. van der Velde. dan 4 orang penasehat. [179]

Merle Cochran yang memimpin perundingan ini sekali lagi menyatakan bahwa perundingan tersebut diselenggarakan atas inisiatif pihak PBB sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 29 Januari 1949. Delegasi RI dalam pidatonya mengemukakan pendirian RI yakni menuntut bahwa perundingan ini lebih dahulu menyetujui pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta.

177 *Merdeka*, 14 Maret 1949.
178 *Ibid*, 19 April 1949.
179 *Ibid*,

Dengan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, baru terbuka kemungkinan bagi delegasinya untuk mengambil keputusan bagi soal-soal lainnya.[180] Delegasi Belanda bersedia mendahulukan perundingan mengenai syarat-syarat untuk kemungkinan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, tetapi tiap kewajiban yang mengikat yang mungkin timbul dalam perundingan harus ditunda sampai tercapainya persetujuan tentang perintah penghentian perang gerilya dan membuat perjanjian mengenai waktu dan syarat KMB di Den Haag.[181] Sesudah perundingan pertama ini jalannya perundingan sangat lamban dan masing-masing pihak berpegang pada pendiriannya. Sementara itu Mr Sjafruddin Prawiranegara, Pemimpin Pemerintah Darurat RI menyatakan setuju terhadap pernyataan Mr.Moh. Roem dalam perundingan menghadapi delegasi Belanda. Sebenarnya yang dituntut oleh RI bukanlah pengembalian Sukarno – Hatta ke Yogyakarta, akan tetapi pengembalian pemerintah RI disertai dengan pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap status RI yang mempunyai daerah kekuasaan tertentu. Sebab pihak Belanda secara terus-menerus membuat "negara" di wilayah RI yang diakui de fakto dalam persetujuan Linggajati. Kalau politik membuat negara-negara boneka diteruskan, maka pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta tidak mengandung pengakuan terhadap status yang tertentu, sehingga apabila Belanda memberikan pengakuan, maka pengakuan itu tidak mempunyai harga.[182]

Karena perundingan berjalan sangat lamban, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 24 April Drs. Moh Hatta datang ke Jakarta. Pihak RI menempuh cara lain, yakni mengadakan perundingan informil dan langsung dengan pihak Belanda disaksikan oleh Merle Cochran. Pada tanggal 25 April diadakan pertemuan informil pertama antara Drs. Moh. Hatta dengan ketua delegasi Belanda Dr van Royen.[183] Hasil pertemuan ini tidak diumumkan, namun Hatta menyatakan bahwa pertemuan informil itu untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda.[184] Perundingan yang semacam itu, juga dilakukan oleh ketua delegasi RI dengan ketua delegasi Belanda

---

180 *Merdeka*, 18 April 1949
181 *Ibid*, 18 April 1949
182 *Ibid*, 23 April 1949
183 *Ibid*, 26 April 1949
184 *Ibid*, 27 April 1949

sebanyak dua kali, yakni tanggal 28 April dan 4. 5 Mei 1949.[185] Kiranya perundingan ini dapat memberikan harapan untuk tercapainya persetujuan, karena itu komisi PBB bersikap menunggu matangnya perundingan informil ini.[186] Pada dasarnya pemerintah Belanda telah setuju tentang pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. dengan syarat harus dibarengi dengan perintah penghentian perang 'gerilya. Masalah ini dapat diatasi. tetapi masalah yang lainnya adalah mengenai luasnya daerah kekuasaan RI. Petunjuk dari Bangka kepada delegasi RI menghendaki dilaksanakan resolusi Dewan Keamanan dan pengembalian daerah RI (menurut persetujuan Renville) secara berangsur-angsur. Petunjuk dari Bangka lebih menekankan pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta sekalipun hanya memiliki daerah seluas lima mil persegi sebagai langkah permulaan.[187] Tetapi delegasi RI menganggap bahwa wilayah lima mil persegi adalah sangat berbahaya bagi keamanan. Delegasi RI menuntut daerah seluas Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk lapangan terbang Maguwo dan batas selatan Samudra Indonesia. Pihak Belanda sebaliknya menafsirkan resolusi Dewan Keamanan tentang pengembalian Pemerintah RI ke kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya, adalah seluas lima mil persegi; mereka juga menolak menyerahkan lapangan udara Maguwo. (sekarang lapangan Udara Adisutjipto).

Berkat usaha keras dari Merle Cochran, anggota Komisi PBB dari Amerika Serikat. pada tanggal 7 Mei 1949 telah tercapai persetujuan. Pada jam 17.00 dibacakan pernyataan kedua delegasi dalam sidang formil yang diselenggarakan oleh Komisi PBB. Pernyataan ketua delegasi RI atasnama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, menyatakan kesanggupan mereka sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 serta petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan:

1. pengeluaran perintah kepada "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya.
2. kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.

---

185 *Merdeka*, 25 April dan 6 Mei 1949
186 *Ibid*, 29 April 1949.
187 *Ibid*, 4 Mei 1949

3. turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.[188]

Selanjutnya ketua delegasi Belanda Dr. van Royen membacakan pernyataannya yang berisi antara lain:

1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan satu panitia bersama dibawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan untuk:
   a. mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya pemerintah RI.
   b. mempelajari dan memberikan nasehat tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi keresidenan Yogyakarta.
3. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan poli.. yang tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.
4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat
5. Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Pada konferensi tersebut diadakan pembicaraan tentang bagaimana cara-cara mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat.[189]

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen, Pemerintah Darurat RI di Sumatra memerintahkan kepada Sulatan Hamengku Buwono IX untuk mengambil-alih pemerintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta[190]. Partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik

---

188 *Merdeka*, 6 Mei 1949.
189 *Merdeka*, 15 Mei 1949.
190 *Ibid*, 20 Mei 1949.

tercapainya persetujuan Roem-Royen adalah Masjumi. (Mr. Roem adalah pemimpin Masjumi), Dr. Sukiman selaku ketua umum Masjumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh delegasi RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan RI. [191] Sedang Mr. Suyono Hadinoto, ketua umum Partai Nasional Indonesia (PNI) menyatakan bahwa persetujuan Roem-Royen merupakan suatu langkah ke arah tercapainya penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia [192] . Akhirnya kedua partai ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa persetujuan Roem-Royen sekalipun masih kurang memuaskan, tetapi merupakan langkah kearah penyelesaian pertikaian Indonesia - Belanda [193] . Pihak Angkatan Perang sebaliknya menyambut adanya persetujuan itu dengan perasaan curiga [194] . Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 memperingatkan kepada para komandan kesatuan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Pernyataan yang sama untuk mempertegas Amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Territorium Jawa Kolonel A.H Nasution pada tanggal 5 Mei 1949. Pernyataan itu mengetengahkan bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanyalah merupakan taktik perjuangan, dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan militer [195] . Pada pokoknya dari kalangan Angkatan Perang tidak terdapat kepercayaan akan berhasilnya perundingan karena menurut pengalaman dengan Linggajati, Renville dan lain-lain, perundingan atau persetujuan dengan Belanda dianggap selalu merugikan perjuangan.

Sebagai tindak-lanjut daripada persetujuan Roem-Royen pada tanggal 22 Juni diadakan perundingan formil antara RI. BFO dan Belanda dibawah pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley. Hasil perundingan adalah:

---

191 *Merdeka*, 27 Mei 1949.

192 *Ibid*, 30 Mei 1949.

193 Djendral Major T.B. Simatupang. *op,cit.*, hal.129 dan hal. 141-143.

194 Markas Besar Angkatan Darat, *Himpunan Instruksi Pemerintah Militer dari Panglima Tentara dan Territorium 'Djawa 1948-1949*, Jakarta, t. th. hal. 117 (stencil)

1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan. Pada tanggal 24 Juni 1949 keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh Tentara Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu.
2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
3. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag.

Hasil permusyawaratan yang dicapai ini akan dicantumkan dalam sebuah memorandum. [196] Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 jam 20.30, diadakan sidang kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu Mr.Sjafruddin mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh Hatta. Dalam sidang kabinet diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan. [197]

Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta. perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang akan dibahas dalam perundingan itu ialah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19-22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang disebut Konferensi antar-Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan, bahwa politik *divide et impera* Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari Republik Indonesia. akhirnya mengalami kegagalan. Pada Konferensi antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogya itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dikepalai seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden.
3. Akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.

Di bidang militer juga telah tercapai persetujuan:

---

196 *Indonesia*, 23 Juni 1949
197 *Ibid*, 15 Juli 1949

1. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
2. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan diben-tuk oleh pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI), bersama-sama dengan bangsa Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB dan Territoriale Bataljons.
3. Pada permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merang-kap sebagai Panglima Besar APRIS.[198]

Konferensi antar-Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949, dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas masalah pelaksanaaan daripada pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang ber-tugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar-Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Supomo, dr.J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, Mr. Sumardi. Sedang delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai pada tanggal 2 Nopember 1949. Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang bersidang pada tanggal 6 Desember 1949 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 1949, berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Sukarno. Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949 dan pada tanggal 17 Desember (keesokan harinya) Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh.Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya pada

198 Jenderal Mayor T.B. Simatupang, *op.cit*, hal.223 - 224.

tanggal 23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani akte pengakuan kedaulatan.[199] dari pemerintah Belanda. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan. Di Nederland bertempat di Ruang Takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan terhadap RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dalam suatu upacara, bersama-sama membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan. Maka secara formil Belanda mengakui Kemerdekaan Indoensia dan mengakui kedaulatan penuh sesuatu negara Indoensia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Irian Jaya). Dengan demikian berakhirlah secara resmi Perang Kemerdekaan Indonesia.

C. PERIODE DEMOKRASI LIBERAL

1. Periode sebelum Pemilihan Umum I.

Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ini terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Diantara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah yang terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur. Sebagai kepala negara RIS pertama terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden, sedangkan Drs. Moh.Hatta diangkat sebagai perdana menteri dari kabinet RIS yang pertama. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini adalah antara lain Sultan Hamengku Buwono

---

199 Kita memakai istilah Pengakuan Kedaulatan dan bukan istilah resminya "penyerahan kedaulatan", karena kita beranggapan, bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia sebagai organisasi politik Bangsa Indonesia *telah* memiliki kedaulatan atas seluruh Indonesia. RIS adalah penerus dari pada RI sebagai pemegang kedaulatan atas seluruh Indonesia. Karena itu Belanda pada hakekatnya mengakui kedaulatan yang sudah ada di pihak Indonesia itu.

IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Supomo, dr. Leimena. Arnold Mononutu, Anak Agung Gde Agung, Ir. Herling Laoh, Sultan Hamid II dan lain-lain.[200]

Kabinet ini merupakan "zaken-kabinet" (yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya) dan bukan kabinet koalisi bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Anggota-anggota kabinet ini sebagian besar pendukung Negara Kesatuan RI dan hanya 2 orang yang mendukung sistim federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung.[201] Sehingga gerakan untuk membubarkan negara federal dan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Lebih-lebih karena dasar pembentukan negara federal itu sangat lemah; tidak ada ikatan ideologi yang kuat atau tujuan kenegaraan yang jelas. Menurut kenyataan negara federal ini adalah ciptaan Belanda dan bukan kehendak rakyat negara-negara bagian itu. Pada umumnya rakyat merasakan bahwa pembentukan negara bagian federal ini hanyalah sebagai alat Belanda untuk tetap berkuasa di Indonesia Negara-negara bagian federal itu juga tidak mempunyai kekuatan militer sendiri yang dapat dipakai untuk mempertahankan negerinya. Kekuatan militer yang ada hanyalah pasukan-pasukan Belanda yang terdiri dari pasukan *KL (Koninklijk Leger)* : Tentara Kerajaan) dan *KNIL (Koninklijk Nederlands – Indische Leger)* : Tentara Kerajaan Hindia Belanda).

Kabinet RIS dibawah pimpinan Hatta memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu RIS menjelma menjadi negara kesatuan Republik Indoensia (RI). Pada Pada masa RIS ini tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan juga oleh rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut akan kehilangan hak-haknya bila Belanda meninggalkan Indonesia.[202]

Yang pertama yalah yang dikenal dengan gerakan "Angkatan Perang Ratu Adil" (APRA) dibawah pimpinan Kapten

---

200 Kementerian Penerangan RI, *Kabinet kabinet RI*, Jakarta, 1957.

201 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, New York, 1962, hal. 47.

202 Daska Prijadi, *Gerakan Operasi Militer II; Penumpasan "APRA" Westerling Bandung*, Jakarta, 1965.

Raymond ("Turk") Westerling. Gerakan ini didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Salahsatu landasan bagi gerakannya adalah kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda maupun oleh Jepang mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai dan rakyat akan makmur dan sejahtera. Tujuan APRA ialah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. Sedang pada konferensi antar Indonesia di Yogya telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional.

Gerakan APRA yang terdiri dari kurang lebih 800 orang diantaranya kira-kira 300 anggota KL bersenjata lengkap menyerang kota Bandung pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950. Sejak tanggal 22 Januari sebetulnya pimpinan Divisi Siliwangi telah mensinyalir adanya suatu gerakan dari sekelompok orang bersenjata di luar kota Bandung. Tetapi rupanya Westerling menjalankan taktik gerak cepat sebab pagi-pagi buta keesokan harinya mereka telah memasuki kota Bandung dan secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang dapat mereka jumpai. Gerombolan APRA juga berhasil menduduki staf Divisi Siliwangi setelah membunuh hampir seluruh regu jaga yang hanya berjumlah 15 orang serta seorang perwira menengah, sedang jumlah gerombolan penyerbu lebih dari 150 orang. Hanya 3 orang yang berhasil selamat karena dapat meloloskan diri dari pengepungan.

Dalam gerakan APRA di kota Bandung ini lebih dari 79 anggota APRIS tewas dan juga banyak rakyat biasa yang menjadi korban. Pemerintah RIS segera mengirimkan balabantuan ke Bandung. Di Jakarta juga segera diadakan perundingan antara Drs. Moh. Hatta sebagai wakil pemerintah RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya adalah Mayor Jenderal Engels komandan KL di Bandung berhasil mendesak Westerling untuk meninggalkan Bandung dan gerombolan APRA pada sore itu juga meninggalkan kota Bandung. Setelah meninggalkan Bandung gerombolan APRA menyebar ke berbagai tempat dan terus dikejar oleh APRIS dan dengan bantuan rakyat gerombolan tersebut berhasil dilumpuhkan.

Selain ke Bandung sebenarnya gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Disini Westerling mengadakan kerjasama dengan Sultan Hamid, yang menjadi menteri negara tanpa portofolio didalam kabinet RIS. Menurut rencananya gerombolan APRA ini akan menyerang gedung kabinet dimana pada hari itu akan diadakan sidang kabinet. Mereka akan menculik semua menteri dan membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel T.B. Simatupang. [203] Tetapi berkat kesiagaan APRIS usaha APRA di Jakarta juga mengalami kegagalan. Walaupun demikian Westerling dengan gerombolan APRA-nya masih terus mencoba untuk melaksanakan tujuannya. Tapi usahanya itu sia-sia. Pada tanggal 22 Februari 1950 Westerling meninggalkan Indonesia menuju Malaya dengan pesawatterbang Belanda. Dengan perginya Westerling para pengikutnya menjadi bubar.

Dengan kegagalan gerakan APRA ini, di negara-negara bagian RIS perasaan anti-federal semakin meningkat. Usaha untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pusat RIS semakin keras. Pada tanggal 30 Januari 1950, R.A.A. Wiranata-kusumah, Wali Negara Pasundan mengundurkan diri, dan tanggal 8 Pebruari pemerintah Hatta mengangkat Sewaka sebagai penggantinya dan menjabat sebagai komisaris RIS di Pasundan. Gerakan untuk melaksanakan ide kesatuan juga meluas ke daerah-daerah lain. Misalnya pemerintah Sumatera Selatan memutuskan pada tanggal 10 Pebruari akan menyerahkan kekuasaan pada pemerintah RIS. Pada dasarnya penyerahan kekuasaan itu tidak pada pemerintah RIS, tapi pada pemerintah RI. [204] karena yang menerima penyerahan kekuasaan pada tanggal 29 Desember 1949 adalah wakil-wakil dari pemerintah RI yaitu di Den Haag dari Ratu Juliana kepada Drs. Moh. Hatta, di Jakarta dari Komisaris Tinggi Belanda Lovink kepada Sultan Hamengku Buwono IX.

Rongrongan kedua yang dialami RIS adalah dari petualangan yang dijalankan oleh Kapten Andi Azis di Makasar (Ujung Pandang). [205] Motif dari pemberontakan ini adalah sikap

---

203 Persadja, *Proces Peristiwa Sultan Hamid II*, Jakarta, 1955, hal. 54-60.

204 G.Mc.T. Kahin, *op. cit.*, hal. 455.

205 Rochmani Santoso, *Bom waktu Kolonialis Belanda meledak di Makasar*, Jakarta, 1965.

menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Kapten Andi Azis adalah perwira *KNIL* yang baru diterima kedalam APRIS. Pada tanggal 30 Maret 1950. ia bersama-sama dengan pasukan *KNIL* yang berada dibawah komandonya menggabungkan diri kedalam APRIS dihadapan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, Panglima Tentara dan Territorium Indonesia Timur. Pada waktu itu keadaan Makasar sendiri tidak tenang, sebab rakyat yang anti-federal mengadakan demontrasi sebagai desakan agar NIT secepatnya bergabung dengan RI. Sedangkan sebagian lain dari mereka yang setuju pada sistim federal juga mengadakan demonstrasi. sehingga ketegangan semakin bertambah. Disamping itu pada tanggal 5 April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makasar untuk menjaga keamanan disitu. Kesatuan TNI/APRIS ini dibawah pimpinan Mayor Worang, diangkut dengan 2 buah kapal dan sudah berlabuh di luar pelabuhan Makasar. Berita ini menghawatirkan para anggota bekas *KNIL* yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri Pasukan Bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Abdul Azis. [206]

Pagi-pagi buta sekitar jam 05.00 pagi Andi Azis dengan pasukannya menyerang markas TNI di Makasar. Pertempuran tak dapat dihindarkan. Tapi karena pasukan APRIS jumlahnya jauh lebih sedikit dari gerombolan penyerbu, maka dalam waktu singkat kota Makasar berhasil dikuasai gerombolan penyerbu itu. Beberapa orang prajurit TNI jatuh menjadi korban dan beberapa orang perwira termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta ditawan.

Pada tanggal 5 April Perdana Menteri NIT Ir. P.D. Diapari mengundurkan diri karena tidak menyetujui tindakan Andi Azis. Pemerintah kemudian dipegang oleh kabinet baru yang pro RI dibawah pimpinan Mr. Putuhena dan pada tanggal 21 April, Wali Negara NIT, Sukawati mengumumkan bahwa NIT bersedia lebur kedalam negara kesatuan Indonesia bila RI juga bersedia melakukan tindakan yang sama. Selain itu Pemerintah Pusat RIS mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April yang menginstruksikan agar Andi Azis dalam waktu 4 X 24 jam datang melaporkan diri ke Jakarta, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

206 Herbert Feith, *op.cit.*, hal. 67

Dan juga diperintahkan agar pasukannya dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan dan semua tawanan dilepaskan. Andi Azis terlambat melaporkan diri ke Jakarta, dan karenanya ditangkap sebagai pemberontak untuk kemudian diadili. Pada waktu yang bersamaan dikirimkan sebuah pasukan expedisi ke Sulawesi dibawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang.

Sementara itu Batalyon Worang yang belum jadi mendarat di Makasar meneruskan perjalanannya ke Jeneponto dan mendarat disitu dengan dikawal oleh korvet *Banteng* dan *Hang Tuah*. Pasukan Worang kemudian mulai bergerak kearah Makasar dan pada tanggal 21 April berhasil memasuki Makasar tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan pemberontak. Andi Azis sendiri pada tanggal 15 April telah berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati.

Pada tanggal 26 April pasukan expedisi dibawah Kol. A.E.Kawilarang sampai di Sulawesi Selatan. Maka dengan demikian keadaan Makasar aman kembali. Tetapi keamanan itu tidak berlangsung lama sebab di Makasar masih ada pasukan *KL* dan *KNIL*. Pasukan *KL–KNIL* ini sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS/TNI. Pada tanggal 15 Mei terjadi bentrokan senjata antara APRIS/TNI dengan KL–KNIL. Tetapi pada sore harinya dapat dihentikan setelah *KL–KNIL* menyadari akan kuatnya pertahanan APRIS/TNI. Walaupun demikian bentrokan-bentrokan bersenjata masih juga terjadi sampai akhirnya pada tanggal 8 Agustus pihak *KL–NIL* minta berunding dan perundingan diadakan antara Jenderal Scheffelaar dari *KL–KNIL* dengan Kolonel Kawilarang. Hasil perundingan ini ialah bahwa kedua pihak setuju dihentikannya tembak-menembak dan dalam waktu dua hari pasukan *KL–KNIL* akan meninggalkan Makasar.

Dengan adanya persetujuan itu, keamanan di Makasar pulih kembali dan semangat untuk bergabung dalam suatu negara kesatuan juga semakin meningkat. Dalam pada itu Hatta menyadari bahwa usaha pembentukan suatu negara kesatuan Indonesia harus secepatnya diadakan. Tidak perlu lagi menunggu terbentuknya Dewan Konstituante yang akan merancang undang-undang dasar baru.

Cobaan terakhir yang dihadapi pemerintah RIS dan berlanjut sampai kemasa RI adalah gerakan mempertahankan sistim federal dengan membentuk negara sendiri yang disebut "Repu-

blik Maluku Selatan" (RMS). Pendiri RMS ialah Mr.Dr. Christian Robert Steven Soumokil bekas Jaksa Agung NIT. [207]

Soumokil sebenarnya sudah terlibat dalam petualangan Andi Azis di Makasar, tapi karena usaha Andi Azis menemui kegagalan, maka dia mengalihkan usahanya ke Maluku Seiatan dengan Ambon sebagai pusatnya. Pada waktu itu keadaan di Ambon sedang kacau karena ternyata banyak anggota bekas *KNIL* yang ingin bergabung dengan TNI. Hal ini sangat tidak menyenangkan Belanda karena bila banyak anggota *KNIL* bergabung kepada TNI maka RI akan menjadi lebih kuat. Untuk mencegah hal tersebut, Belanda mulai menghasut dan menyebarkan desas-desus yang buruk tentang TNI dan RI. Dinyatakan didalam desas-desus itu bahwa jika mereka masuk TNI, mereka akan dipaksa masuk agama Islam. Keadaan ini menguntungkan Soumokil dan pada tanggal 25 April 1950 ia memproklamasikan berdirinya "Republik Maluku Selatan" (RMS).

Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah ini dengan damai yaitu dengan jalan mengirimkan dr. Leimena. Tapi missi damai ini ditolak oleh Soumokil, bahkan mereka meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari dunia luar, terutama dari Negeri Belanda, Amerika Serikat dan Komisi PBB untuk Indonesia. [208] Karena itu maka pemerintah RIS terpaksa menumpas petualangan Soumokil itu dengan kekuatan senjata.

Pada tanggal 14 Juli pagi, pasukan expedisi APRIS sebanyak 850 dibawah pimpinan orang Kolonel Kawilarang mendarat di Laha, pulau Buru. Dengan susah-payah karena belum mengenal medannya, TNI berhasil merebut pos-pos penting di pulau Buru. Komandan pasukan RMS menyerah dan menghadap Kol. Kawilarang. Setelah pulau Buru dikuasai, pasukan APRIS/TNI menuju ke Seram. Pendaratan dilakukan di Seram Barat pada tanggal 19 Juli 1950 dan dengan mudah Seram Barat dapat dikuasai oleh APRIS/TNI pada hari itu juga. Dari sini gerakan pasukan APRIS/TNI dilanjutkan ke bagian lain pulau Seram. Rupanya RMS bermaksud memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di pulau Seram dan Ambon. Operasi pasukan APRIS/TNI mengalami kesulitan sehingga baru pada bulan Desember 1950 setelah menderita banyak korban pantai Utara Seram dan seluruh

---

207 Soe Hok Gie, *Kisah penumpasan "RMS" (Gerakan Operasi Militer IV)*,. Jakarta, 1965.

208 Herbert Feith, *op.cit.*, hal. 70

pulau Ambon dapat dikuasai. Dan ketika RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dilebur dan menjadi negara kesatuan RI, petualangan RMS belum dapat ditumpas seluruhnya.

Selain menghadapi dan menyelesaikan soal-soal perongrongan terhadap RIS, Kabinet Hatta juga harus menyelesaikan banyak masalah lain yang menyangkut soal ekonomi, sosial dan hubungan luar negeri. Masalah-masalah yang timbul ini merupakan beban yang berat bagi suatu negara baru yang lahir dengan suatu suatu Perang Kemerdekaan. Sebagai akibat perang, banyak prasarana yang hancur dan keadaan ekonomi pada umumnya buruk. Pemerintah harus menghadapi inflasi dan defisit dalam anggaran belanjanya. Semuanya ini harus segera ditanggulangi, sebab rakyat sudah lama menderita akibat penjajahan dan perang. Untuk mengatasi inflasi ini pemerintah menjalankan suatu tindakan dalam bidang keuangan yang drastis yaitu mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden keatas dipotong menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengahnya. Walaupun banyak pemilik uang yang terkena oleh peraturan ini tapi pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Disamping soal keuangan ini, perekonomian juga dapat diperbaiki, karena dengan meletusnya Perang Korea, perdagangan ke luar negeri meningkat, terutama untuk bahan mentah seperti karet. Sehingga export Indonesia meningkat dan pendapatan negara juga bertambah.

Selain soal ekonomi, pemerintah juga harus menyelesaikan soal di bidang kepegawaian dan di bidang militer. Sebagai akibat selesainya perang, jumlah pasukan harus dikurangi karena akan menjadi beban bagi keuangan negara. Mereka ini perlu mendapat penampungan bila diadakan rasionalisasi. Menghadapi masalah ini pemerintah mencoba membuat usaha-usaha pembangunan untuk mereka yang terkena rasionalisasi dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya dalam pusat-pusat pendidikan yang memberi pendidikan keahlian untuk memberi mereka kesempatan menempuh karier baru. Juga dilakukan usaha transmigrasi dengan wadah Corps Tjadangan Nasional (CTN). Walaupun demikian masalah ini belum seluruhnya dapat diselesaikan.

Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif, walaupun hubungan diplomatik masih lebih banyak dengan negara-negara barat daripada dengan negara komunis. Hubungan

dengan negeri Belanda diperbaiki karena diharapkan Belanda akan menyerahkan Irian Jaya kembali ke Indonesia paling lambat satu tahun setelah KMB.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan baru yang diberi nama Republik Indonesia. Persiapan untuk membentuk negara kesatuan ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. sebab di dalam negara-negara federal kehendak untuk bersatu sudah lama timbul[209] Resminya negara kesatuan yang baru merupakan kelanjutan dari RIS yang mengalami perubahan undang-undang dasar. Tetapi oleh kebanyakan orang Indonesia negara kesatuan baru itu merupakan kelanjutan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Persetujuan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang lebih 2 bulan bekerja, panitia gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian setelah diadakan perubahan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima; baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani rancangan UUD tersebut.

UUD 1950 ini mengandung unsur-unsur dari UUD–RI maupun dari UUD–RIS. Menurut UUD 1950 kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, kabinet dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan Undang-Undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden juga dapat mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan. Tetapi walaupun demikian, kabinet, baik secara keseluruhan maupun secara perseorangan, masih bertanggungjawab pada DPR dan DPR mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individuil.

Dalam negara kesatuan RI ini, Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi. Dari tahun 1950 sampai tahun 1955 terdapat 4 buah kabinet yang memerintah sehingga rata-rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-turut ialah Kabinet Natsir (September

209 Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, hal. 326 - 327

1950 – Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 – Juli 1955). Dari sini tampak bahwa dengan dijalankannya demokrasi parlementer bentuk Eropa Barat, khususnya Belanda, dimana kedaulatan rakyat disalurkan melalui sistim banyak partai, kestabilan Negara sukar didapat. Sebab Parlemen dapat menjatuhkan kabinet bila partai oposisi dalam Parlemen kuat. Bahkan pernah terjadi partai-pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri! Karena tiap-tiap kabinet tidak berumur panjang, maka program-programnya tidak sempat dijalankan sebagaimana diharapkan. Hal ini sudah tentu menimbulkan banyak masalah baik dibidang politik, sosial-ekonomi maupun keamanan. Banyak urusan Negara yang terkatung-katung atau terbengkelai.

Kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951 adalah kabinet koalisi walaupun PNI sebagai partai kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta. Salahsatu sebab PNI menolak turut dalam kabinet ini ialah karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Inti kabinet ini dari Masyumi, tetapi juga terdapat anggota-anggota yang non-partai. Banyak anggota-anggotanya yang terkenal dalam masyarakat dan mempunyai keahlian di bidangnya, sehingga kabinet ini termasuk yang kuat juga formasinya. Tokoh-tokoh terkenal diantaranya ialah Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Assaat bekas Pejabat Presiden RI, Ir. Djuanda dan Sumitro Djojohadikusumo. Diantara program-programnya yang penting ialah.[210]

1. menggiatkan usaha mendapat keamanan dan ketenteraman.
2. mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyrakat.
4. memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
5. mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi

---

210 Naskah riwayat hidup Ir. H.Djuanda Kartawidjaja, (Arsip Kabinet Perdana Menteri).

rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.

Pada masa ini keamanan belum seluruhnya dapat dicapai. Petualangan yang dilakukan oleh kaum separatis maupun oleh golongan extrim masih berlangsung. Diantaranya Dr. Soumokil dengan RMS-nya belum dapat ditumpas. Rongrongan terhadap keamanan Negara selain oleh RMS, juga oleh gerombolan "Darul Islam" (DI) yang membentuk "Negara Islam Indonesia" (NII).

Kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan DI ini meliputi daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Aceh.[211] Walaupun dasarnya dan tujuannya sama tapi gerombolan DI di daerah-daerah itu mempunyai faktor-faktor penyebab dan pimpinan yang berbeda. DI Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Gerakan ini dimulai ketika Jawa Barat kosong sebagai akibat dari Perjanjian Renville pada tahun 1948, yang mengharuskan kuranglebih 35.000 pasukan TNI ditarik mundur kedaerah RI. Tapi anggota-anggota Hisbullah dan Sabilillah tidak menaati perintah untuk mundur dan mereka tetap di Jawa Barat sehingga mereka dapat berkuasa. Mereka kemudian bergabung dan menamakan diri "Darul Islam" (DI) dan pada tanggal 4 Agustus 1949 mereka membentuk "Negara Islam Indonesia". Ketika TNI kembali ke Jawa Barat, mereka mendapat perlawanan dari DI dan sejak itu mulailah pemerintah mengadakan operasi penumpasan terhadap gerombolan tersebut. Usaha ini makan waktu yang lama karena banyak faktor-faktor penghambatnya, diantaranya adalah kerjasama dengan golongan subversif asing (Belanda) yang juga bertujuan menggulingkan pemerintah RI. Mereka mendapat bantuan perlengkapan dan senjata dari kaum subversif itu.[212]

Tidak sedikit penderitaan yang ditanggung rakyat Jawa Barat karena gerombolan DI ini melakukan teror terhadap rakyat. Untuk kebutuhan hidup mereka merampok rakyat, terutama

---

211 Anne Marie The, *Darah tersimbah-di Jawa Barat*, Jakarta, 1965; Jusmar Basri, *Gerakan Operasi Militer VI* (untuk menumpas DI/TII di Jawa Tengah), Jakarta, 1965; Zainabun Harahap, *Operasi-operasi Militer Menumpas Kahar Muzakkar*, Jakarta 1965; dan Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII*. Penyelesaian peristiwa Aceh, Jakarta 1965.

212 Anne Marie The, *op.cit.*, hal.6; Kementerian Penerangan, *Keterangan Pemerintah tentang Peristiwa Pengeluaran Schmidt;* Kementerian Penerangan, *Subversive Activities in Indonesia: The Jungschläger and Schmidt affairs.*

rakyat yang tinggal di pelosok-pelosok pegunungan. Tetapi mulai tahun 1960, Kodam VI/Siliwangi mulai melancarkan operasi penghancuran secara intensif. Dengan bantuan rakyat dalam operasi pagar betis, pada tahun 1962 gerombolan DI akhirnya dapat dihancurkan dan S.M.Kartosuwirjo ditangkap untuk kemudian diadili dan dipidana mati.

Gerakan DI di Jawa Tengah, berbeda dengan gerakan DI Jawa Barat, meskipun secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan DI Jawa Barat. Unsur penyebab timbulnya gerakan DI Jawa Tengah adalah Majelis Islam dibawah Amir Fatah di daerah Tegal-Brebes. Gerakan Umat Islam pimpinan Moh.Mahfudh Abdul Rachman (kyahi Sumolangu) di daerah Kebumen dan pemberontak Batalyon 423 dan 426 TNI yang melakukan desersi.

Gerakan ini juga bermaksud hendak membentuk NII dan bergabung dengan NII Kartosuwirjo di Jawa Barat. Gerakan DI yang pada mulanya sudah mulai terdesak oleh TNI pada tahun 1952 mulai kuat kembali karena memberontaknya Batalyon 423 dan 426. Berhubung dengan itu pemerintah membentuk pasukan baru yang disebut Banteng Raiders. Dengan pasukan baru ini segera dilakukan serangkaian operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara (GBN). Akhirnya dengan dilancarkannya Operasi Guntur pada tahun 1954 gerombolan dapat dihancurkan dan sisanya tercerai-berai.

Di Aceh rongrongan terhadap pemerintah dilakukan oleh Tengku Daud Beureueh dengan pengikutnya. Faktor penyebabnya adalah rasa kekhawatiran akan kehilangan kedudukan dan perasaan kecewa karena diturunkannya kedudukan Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan dibawah provinsi Sumatra Utara. Tengku Daud Beureueh yang tadinya menjabat sebagai Gubernur militer Daerah Istimewa Aceh merasa kurang puas dan menganggap turun kekuasaannya ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan status Aceh sebagai karesidenan dan bukan provinsi lagi. Pada tanggal 21 September 1953 Tengku Daud Beureueh mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan negara bagian dari NII dibawah Imam Kartosuwirjo. Segera setelah itu diadakan gerakan serentak untuk menguasai kota-kota yang ada di Aceh.[213] Mereka juga

213 Ariwiadi, *op.cit.*, hal.3

mempengaruhi rakyat dengan jalan propaganda dan fitnah yang memburukkan pemerintah RI. Untuk menghadapinya Pemerintah terpaksa memakai kekuatan senjata dan operasi militer mulai dijalankan terhadap mereka. Sedikit demi sedikit gerombolan didesak dari kota-kota yang didudukinya. Selain itu TNI juga harus memberikan penerangan kepada rakyat untuk menghilangkan salah paham dan mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini perlu dijalankan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terulangnya kembali peristiwa seperti yang lalu. Akhirnya antara tanggal 17 s/d 28 Desember 1962 diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diadakan atas inisiatif Kolonel Jasin, Pangdam I dan didukung oleh tokoh-tokoh pemerintahan daerah dan rakyat, sehingga pemberontakan dapat diakhiri dengan cara musyawarah.

Di Sulawesi Selatan gerakan DI dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Gerakan ini banyak memakan waktu, tenaga dan biaya pemerintah, karena gerakan yang dimulai pada tahun 1951, baru benar-benar diselesaikan pada tahun 1965. Hal ini disebabkan terutama karena gerombolan dapat memanfaatkan keadaan medan dan lebih mengenal sifat rakyat setempat. Rasa kesukuan yang ditanamkan oleh gerombolan berakar di hati rakyat. Sebab utama pemberontakan ini sebenarnya yalah ambisi Kahar Muzakkar untuk mendapat kedudukan pimpinan dalam APRIS. Selama Perang Kemerdekaan ia berjuang di Jawa. Setelah perang selesai ia pindah ke daerah asalnya dan memimpin laskar-laskar gerilya di Sulawesi Selatan yang kemudian bergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah diusahakan untuk menyalurkan mereka, sebab tidak semuanya memenuhi syarat untuk menjadi anggota TNI. Kahar Muzakkar menuntut agar semua anggota KGSS dimasukkan kedalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Pemerintah hanya akan menerima anggota KGSS yang lulus dalam penyaringan, sedangkan Kahar sendiri sudah diberi pangkat acting Letnan Kolonel, dan menerima perlengkapan bagi anggota-anggota KGSS yang dianggap memenuhi syarat untuk masuk tentara. Tetapi uluran tangan pemerintah ini tidak diterima: pada bulan Agustus 1951 ia melarikan diri ke hutan dengan membawa perlengkapan dan senjata yang didapatnya. Dan pada tahun 1952 ia menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan adalah bagian dari NII dibawah

Kartosuwirjo. Sejak itu ia mulai meningkatkan kegiatannya dengan jalan menteror rakyat. Pemerintah segera melancarkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Operasi ini berlangsung lama sekali dan mendapat kesukaran, sehingga baru pada bulan Februari tahun 1965, Kahar Muzakkar dapat disergap dan ditembak mati dan gerakannya ditumpas habis.

Selain soal keamanan yang menjadi beban Pemerintah yalah soal pengembalian Irian Jaya ke tangan Indonesia. Belanda rupanya tidak bermaksud untuk mengembalikan Irian Jaya kepada Indonesia.

Perundingan soal Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda dimulai pada tanggal 4 Desember 1950 semasa kabinet Natsir. Tetapi perundingan ini menemui jalan buntu sebab masing-masing pihak tidak beranjak dari pendiriannya. Hal ini menimbulkan mosi tidak percaya dari Parlemen terhadap kabinet. Krisis menjadi lebih mendalam dengan adanya mosi Hadikusumo (PNI) tentang pencabutan PP no.39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima baik oleh Parlemen sehingga menyebabkan kabinet Natsir jatuh.[214] Pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

Presiden Sukarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Ia berusaha membentuk kabinet koalisi PNI–Masjumi sebab kedua partai ini merupakan partai yang terkuat dalam DPR saat itu. Tetapi usaha Mr. Sartono menemui kegagalan dan pada tanggal 18 April 1951 ia mengembalikan tugasnya kepada Presiden. Presiden Sukarno pada hari itu juga menunjuk 2 orang formateur baru yaitu Sidik Djojosukarto (PNI) dan dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masjumi) untuk membentuk kabinet koalisi atas dasar nasional yang luas dalam waktu 5 hari. Akhirnya setelah diadakan perundingan baru pada tanggal 26 April diumumkan susunan kabinet yang baru.

Program kabinet ini diantaranya yang penting ialah soal:

1. Keamanan: akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

---

214 "The Resignation of the Natsir Cabinet," *Indonesia Affairs*, vol. I, no.3, March 1951.

2. Sosial ekonomi: mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.
3. mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
4. politik luar negeri: menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat kedalam wilayah RI secepatnya. [215]

Kabinet ini juga tidak berusia lama karena banyak soal yang mendapat tentangan dalam parlemen maupun dari Masjumi dan PNI sendiri. Yang menjadi lantaran bagi jatuhnya kabinet Sukiman yalah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat pada Indonesia atas dasar *Mutual Security Act* 1951 (MSA).

Persetujuan ini ditafsirkan bahwa Indonesia telah memasuki blok Barat (AS), yang berarti bertentangan dengan program kabinet yaitu politik luar negeri bebas-aktif. Dengan jatuhnya kabinet Sukiman ini sudah barang tentu program kabinet yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan.

Dengan jatuhnya kabinet Sukiman kembali Indonesia mengalami krisis pemerintahan. Dalam masa 2 tahun negara kesatuan RI terbentuk menggantikan RIS, kabinet sudah berganti 2 kali. Jadi satu kabinet hanya memerintah kira-kira 1 tahun lamanya. Dalam waktu yang hanya 1 tahun itu sudah tentu program kabinet yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Salahsatu faktor penyebab bagi jatuhnya kabinet-kabinet itu yalah karena dijalankannya demokrasi parlementer dimana kabinet dapat berjalan kalau mendapat dukungan mayoritas suara dalam parlemen. Padahal pada waktu itu didalam parlemen Indonesia terdapat lebih dari 10 buah partai dan beberapa fraksi, dan mayoritas anggota dipegang oleh Masjumi dan PNI. [216] Sehingga untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat perlu dukungan dari kedua partai terbesar itu. Padahal sering terjadi ketidak-serasian antara kedua partai tersebut. Ditambah lagi dalam kedua partai itu sendiri terdapat kelompok-kelompok yang kadang-kadang saling bertentangan, misalnya dalam Masyumi

---

215 Naskah Riwayat Hidup H. Djuanda Kartawidjaja, (Arsip Kabinet Perdana Menteri)

216 Miriam S. Budiardjo, *Evolution toward Parliamentary Government in Indonesia: : Parties and Parliament.* Georgetown Univ. 1955, hal.121.

terdapat kelompok Moh. Natsir dan kelompok dr. Sukiman, sedang dalam PNI terdapat kelompok "tua" dari Mr. Sartono dan kelompok muda dari Mr. Suyono Hadinoto.

Untuk mengatasi keadaan yang demikian itu, yaitu sering dan mudahnya kabinet dijatuhkan oleh Parlemen, disarankan agar sebaiknya dibentuk "zakenkabinet" yang beranggotakan tenaga-tenaga ahli pada bidangnya. Hal ini dapat mencegah timbulnya tentangan-tentangan dari partai-partai yang menjadi oposisi. Tetapi ada anggapan lain, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Jusuf Wibisono dari kelompok Sukiman dalam Masjumi. Ia berpendapat bahwa *zakenkabinet* bersifat extra-parlementer dan menurut dr. Sukiman kabinet koalisi dapat saja menjadi dasar dari stabilitas politik.[217]

Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Sukarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masjumi) sebagai formatur. Dasar yang diminta oleh Presiden untuk kabinet yang baru ini ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari Parlemen. Usaha kedua formatur tersebut untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan sususnan kabinetnya.

Program kabinet ini terutama ditujukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk Konstituante, DPR serta DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat dan keamanan. Sedang program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia Belanda dan pengembalian Irian Jaya ke Indonesia serta menjalankan politik bebas-aktif menuju perdamaian dunia.[218] Wilopo dengan kabinetnya berusaha untuk melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kesukaran-kesukaran yang dihadapi tidaklah sedikit. Diantaran kesukaran-kesukaran yang harus diselesaikan yalah timbulnya provinsialisme dan bahkan separatisme. Juga di beberapa tempat di Sumatra dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap Pusat

217 Herbert Feith, *ibid*, hal. 226.

218 Kementerian Penerangan, *Keterangan dan Jawaban Pemerintah atas Program Kabinet Wilopo*, Jakarta, 1952.

Alasan yang terutama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat kedaerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan pada Pusat dari hasil export misalnya lebih besar dari yang dikembalikan oleh Pusat kepada daerah. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah. Timbul perkumpulan-perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperti, Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Makasar. Keadaan ini sudah tentu akan membahayakan kehidupan negara kesatuan dan merupakan langkah mundur dari Sumpah Pemuda 1928.

Selain soal kedaerahan dan kesukuan, pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul soal dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan nama "Peristiwa 17 Oktober" [219] Pada hari itu terjadi demonstrasi dari rakyat yang menuntut agar Parlemen dibubarkan. Sebetulnya kejadian pada tanggal 17 Oktober ini mempunyai faktor-faktor penyebab di masa-masa sebelumnya. Sebagai akibat dari selesainya Perang Kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak persoalan, antaranya:

1. keadaan politik yang labil dengan sistim demokrasi liberal model Eropa Barat;
2. keadaan sosial-ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi yang semakin luas;
3. persoalan pembebasan Irian Jaya yang tidak cepat selesai;
4. Kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan, misalnya pertentangan antar dan intern partai-partai dan pergolakan intern dalam ABRI. [220]

Pada waktu itu pimpinan ABRI, khususnya Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sedang mengusahakan untuk mengkonsolidasi dan memajukan TNI. TNI yang terdiri atas pejuang-pejuang yang bermodalkan semangat dan masih diikat oleh loyalitas pribadi, akan ditingkatkan menjadi angkatan perang yang lebih tinggi mutu teknis militernya lagi pula diikat oleh disiplin yang

---

219 T.B. Simatupang, "Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 16-21 Oktober 1972; A.H. Nasution, "Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 9 November 1972.

220 A.H. Nasution, *ibid*, *Sinar Harapan*, 9 November 1972.

melembaga. Jika usaha itu berhasil, Angkatan Perang akan menjadi sesuatu kekuatan sosial-politik yang kompak yang dapat mengimbangi kekuasaan partai-partai politik dan golongan politik pada umumnya. Karena itu diusahakan melalui pion-pion kaum politik didalam tubuh Angkatan Perang untuk mencegah upaya itu. Langkah-langkah mulai diambil melalui seorang perwira senior. Kolonel Bambang Supeno mendatangi panglima-panglima daerah dan mengajak mereka untuk menandatangani pernyataan agar Presiden mengganti Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD.[221] Pada tanggal 12 Juli 1952 diadakan pertemuan perwira-perwira pimpinan Angkatan Darat dari Pusat dan daerah dan mereka kebanyakan tidak menyetujui cara yang ditempuh oleh Kolonel Bambang Supeno itu karena merusak solidaritas intern Angkatan Perang. Keesokan harinya Kolonel Bambang Supeno menulis surat langsung kepada Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Parlemen menyatakan bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan terhadap atasannya. Parlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi yang menuntut agar diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. [222]

Kalangan militer menganggap sikap DPR Sementara itu tidak wajar dan dirasakan sebagai intervensi langsung dalam soal intern AD. Apalagi terdapat kenyataan bahwa kuranglebih separoh anggota DPR–S itu berasal dari "negara-negara" bentukan Belanda sehingga tidak memiliki riwayat perjuangan dalam Perang Kemerdekaan yang merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi di kalangan Angkatan Perang. Diputuskan oleh Pimpinan Angkatan Darat untuk mendesak Presiden supaya membekukan Parlemen dan untuk sementara Sukarno-Hatta kembali memegang pimpinan nasional. Presiden menolak desakan itu dan berkata akan menyelidiki dahulu keinginan rakyat di luar Jakarta dan akan mendesak pemerintah untuk mempercepat pemilihan umum. Terjadilah perpecahan didalam tubuh Angkatan Darat yang memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengatasinya. Baik KSAP maupun KSAD berhenti. KSAP Mayor Jenderal T.B. SIMATUPANG jabatannya dihapuskan sedangkan KSAD Kolonel A.H Nasution mengajukan permintaan berhenti. Pemerintah pada tanggal 22 Nopember 1952 mengeluarkan keterangan bahwa

---

221 T.B. Simatupang, *op. cit. Sinar Harapan* 16 - 21 Oktober 1972

pada tanggal 17 Oktober tidak terjadi *coup* atau percobaan *coup*. Walaupun demikian peristiwa ini mulai menggoyahkan kabinet.

Kedudukan kabinet yang sudah goyah itu semakin goyang karena soal tanah di Sumatra Timur yang terkenal dengan nama Peristiwa Tanjung Morawa.[222] Peristiwa ini terjadi karena Pemerintah, sesuai dengan apa yang diputuskan dalam persetujuan KMB, mengizinkan pengusaha asing kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Sebetulnya Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menteri dalam negeri kabinet Sukiman pada tahun 1951 sudah mengadakan kompromi sebagai dasar penyelesaian masalah pengusaha perkebunan asing. Kabinet Wilopo kemudian melaksanakannya. Pada tanggal 16 Maret 1953 polisi dengan kekerasan mengusir penduduk liar dari tanah garapannya yang sejak lama sudah ditinggalkan oleh pengusaha perkebunan. Penduduk yang dihasut oleh kader-kader Partai Komunis Indonesia menolak untuk pergi. Sebagai akibat terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosionil baik dari pers maupun dalam Parlemen. Mosi tidak percaya dilancarkan dan akibatnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet kembali demisioner dan Indonesia mengalami krisis pemerintahan lagi.

Setelah mengalami masa krisis yang agak lama (58 hari) akhirnya kabinet baru terbentuk dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum I dan terkenal dengan nama Kabinet Ali I atau kabinet Ali-Wongso. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953. Dalam kabinet ini Masyumi sebagai partai kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta dan sebagai gantinya Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai kekuatan politik baru.

Selain soal keamanan di daerah-daerah yang belum dapat dipulihkan pada waktu itu, seperti DI Kartosuwirjo di Jawa Barat, Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, Kabinet Ali I juga menghadapi persoalan-persoalan lain, baik soal dalam negeri maupun soal luar negeri. Salahsatu persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan yalah persiapan pemilihan umum yang direncanakan akan diadakan pada per-

222 *Antara*, 17 Maret 1953; *Keng Po*, 17 Maret 1953.

tengahan tahun 1955. Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk pada tanggal 31 Mei 1954 dan diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 APRIL 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk Parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955 dan untuk Konstituante akan diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dengan adanya pengumuman ini kampanye yang dilakukan oleh partai-partai semakin meningkat. Mereka masing-masing berusaha untuk mendapatkan suara yang terbanyak dan kampanye sampai ke pelosok-pelosok desa. [223]

Persoalan yang berhubungan dengan luar negeri yang menonjol pada masa kabinet ini ialah diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika (AA) di Bandung. Konferensi ini dibuka pada tanggal 18 April 1955, dan berlangsung selama seminggu. Dengan terselenggaranya konferensi ini, politik luar negeri Indonesia nyata keaktifannya. Hubungan dengan negara Asia-Afrika diantara peserta konferensi semakin erat dan diharapkan dengan adanya konferensi ini ketegangan antara blok Kapitalis dan blok Komunis menjadi reda. Hasil utama konferensi, yakni Dasasila Bandung, merupakan prinsip-prinsip yang berharga bagi pemeliharaan perdamaian dunia dan hubungan antar-negara yang baik. [224]

Untuk Indonesia sendiri Konferensi ini membawa keuntungan yang nyata yaitu ditandatanganinya persetujuan dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC (seorang yang memegang dwi-kewarganegaraan harus memilih salahsatu menjadi warga negara Indonesia atau RRC; yang tidak bisa memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya) dan keuntungan kedua ialah dukungan yang didapat dari putusan Konferensi A–A dalam perjoangan merebut Irian Jaya. [225]

Walaupun Kabinet Ali-Wongso dapat dikatakan merupakan kabinet yang paling lama dapat bertahan, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Sebab yang utama adalah persoalan dalam TNI–AD sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober dan soal pimpinan AD yang tidak dapat diselesaikan oleh Menteri Pertahanan. AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa

223 Herbert Feith. *The Indonesian Elections of 1955*, Ithaca, New York, 1957, hal. 353 - 354.

224 Nugroho Notosusanto. *Sedjarah dan Hankam* Jakarta 1968, hal. 120.

225 Herbert Feith, *op,cit.*, hal. 393.

menghiraukan norma-norma yang berlaku didalam lingkungan TNI–AD. [226] Disamping itu juga karena keadaan perekonomian yang semakin buruk dan korupsi yang meningkat yang menyebabkan kepercayaan rakyat merosot.

Pada tanggal 20 Juli, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya, dan kemudian diikuti oleh partai-partai lain. Terjadinya keretakan ini memaksa Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Dengan jatuhnya kabinet Ali I ini mulailah babak baru dalam sejarah Indonesia, yaitu masa setelah pemilihan umum.

2. Periode sejak pemilihan umum I

Periode ini dumulai dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum I dan berakhir dengan diumumkannya Dekrit Presiden tahun 1959 tentang kembali ke UUD'45. Masa yang lamanya 4 tahun ini mengalami 3 buah kabinet yang silih berganti, yaitu kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959). Dari sini ternyata bahwa walaupun sudah diadakan pemilihan umum sesuai dengan aturan permainan demokrasi Barat yang menurut peninjau-peninjau luar negeri berjalan dengan bersih, namun pemerintahan yang stabil tetap tidak tercapai. Rata-rata kabinet memerintah selama 1½ tahun. Terbukti bahwa demokrasi liberal memang tidak sesuai bagi kondisi-kondisi di Indonesia.

Setelah kabinet Ali-Wongso menyerahkan mandatnya kembali, maka pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan nama 3 orang formatur yang bertugas untuk membentuk kabinet baru. Ketiga orang formatur itu ialah Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI) dan Assaat (non-partai). Pada waktu itu Presiden Sukarno sedang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Kabinet baru ini bertugas untuk:

1. mengembalikan kewibawaan pemerintah, yakni kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

---

226 Departemen Penerangan, *20 tahun Indonesia Merdeka II*, Jakarta 1965, hal. 104.

2. melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. [227]

Ketiga formatur ini mencapai persetujuan akan menempatkan Hatta sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Tetapi timbul kesukaran karena Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Karena soal ini timbul pertentangan pendapat antara PNI dan Masyumi; masing-masing saling menolak rencana yang diajukan. Formatur mengajukan usul agar Presiden mengumumkan bahwa Hatta non aktif sebagai Wakil Presiden selama menjadi Perdana Menteri. Setelah tugasnya selesai kembali sebagai Wakil Presiden. Usul ini ditolak oleh PNI dan mengusulkan agar parlemen mengeluarkan resolusi yang memungkinkan Hatta sebagai warganegara memimpin kabinet parlementer.
Usul ini ditolak oleh Masyumi, dan Sukiman diinstruksikan untuk mengembalikan mandatnya. Pada tanggal 3 Agustus ketiga orang formatur mengembalikan mandatnya.

Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Burhanuddin Harahap mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil PM, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran ini tapi menuntut hak untuk menunjuk orang yang akan duduk didalamnya. Sedang formatur menghendaki agar orang-orangnya dipilih oleh formatur sendiri. Jalan buntu tak dapat dihindarkan. Akhirnya Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa PNI. Kabinet ini terdiri dari 23 menteri dan didominasi oleh Masyumi.

Segera setelah kabinet terbentuk, Polisi Militer menangkap Mr. Djody Gondokusumo, bekas menteri kehakiman dalam kabinet Ali I yang demisioner, dengan tuduhan korupsi. Wakil Jaksa Agung mengumumkan bahwa tindakan Polisi Militer ini tidak ada hubungannya dengan kabinet yang baru terbentuk. [228]

Tindakan Polisi Militer ini mendapat dukungan dari masyarakat dan tampak adanya hubungan yang dekat antara Angkatan Darat dengan kabinet. Selanjutnya pada tgl. 14 Agustus 1955 serangkaian penangkapan terhadap pejabat-pejabat tinggi ber-

---

227 *Pedoman*, 1 Agustus 1955.

228 Herbert Feith. *op.cit.* hal. 422.

langsung. Tindakkan ini merupakan salahsatu pelaksanaan program kabinet, yaitu pemberantasan korupsi.

Program lain dari kabinet Burhanuddin Harahap yang harus diselesaikan seperti telah dijanjikan dalam pembentukan kabinet, yalah pemilihan Umum. Golongan oposisi mendesak terus pada kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum itu secepat mungkin. Panitya Pemilihan Umum Pusat telah menetapkan bahwa pemilihan untuk Parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Tapi dalam kabinet sendiri timbul pertentangan karena ada yang menghendaki ditunda, menganggap persiapan belum selesai; tapi ada juga yang menuntut tetap diadakan pada waktu yang sudah ditetapkan. [229]

Semakin mendekati waktu yang ditentukan suasana semakin tegang, sebab masing-masing pihak berusaha untuk menang. Korang-koran partai saling menyerang partai lawannya dan mengeluarkan tuduhan-tuduhan dan membuka keburukan-keburukan lawannya.

Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum I ini ternyata dimenangkan oleh 4 partai yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, sedang partai-partai lainnya mendapat suara jauh lebih kecil dari ke-4 partai tersebut.

Pemilihan untuk Konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember. Suasana dalam menghadapi pemilihan ini lebih tenang daripada ketika menghadapi pemilihan untuk DPR. Rupanya rakyat sudah berpengalaman dan ketegangan dapat diatasi.

Pada bulan Oktober terjadi penggantian Kepala Staf AD. Tiga orang calon diajukan yaitu Kolonel Simbolon, Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Zulkifli Lubis. Tetapi tidak ada kesepakatan dalam Parlemen siapa dari ketiga calon ini yang akan dipilih; masing-masing ada yang menentangnya. Atas usul dari NU, Kolonel A.H Nasution dicalonkan dan Nasution sendiri menerima pencalonan itu pada tanggal 25 Oktober 1955. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1955 diputuskan bahwa Kolonel A.H Nasution kembali diangkat sebagai Kepala Staf AD.

Untuk politik luar negeri, kabinet berusaha menjalankan politik yang aktif dan agak condong ke Barat. Selain dengan

---

229 NU menuntut tetap dilaksanakan pada waktunya, sedang PSI dan PIR menghendaki agar ditunda karena komposisi Panitia Pemilihan Pusat dan Daerah perlu diubah.

Australia, hubungan baik juga dijalin dengan Kerajaan Inggris, Singapura, Malaya dan Amerika Serikat (AS). Indonesia mendapat bantuan surplus makanan dari AS seharga $96.700.000 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 1956. Presiden Sukarno juga secara resmi diundang untuk mengunjungi AS oleh John Foster Dulles, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang datang ke Indonesia pada bulan Maret 1956.

Dengan Belanda dicoba dibuka hubungan baru untuk menyelesaikan masalah Uni Indonesia – Belanda dan masalah Irian Jaya. Perundingan tentang hal ini memakan waktu lama dan berlarut-larut, sehingga menimbulkan tentangan dari partai-partai anggota kabinet sendiri. Indoensia dianggap merendahkan diri dan meminta-minta pada Belanda. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1956 kabinet mengumumkan bahwa Indonesia memutuskan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tindakan ini disambut dengan hangat dan pada tanggal 22, 23 dan 24 Februari bendera Merah Putih dikibarkan sebagai tanda syukur.

Dengan selesainya pemilihan umum, tugas kabinet Burhanuddin pun dianggap selesai dan perlu dibentuk kabinet baru yang akan bertanggungjawab pada Parlemen yang baru. Selain itu dalam pemerintahan terjadi ketidak-tenangan karena banyak mutasi dilakukan di beberapa kementerian, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perekonomian. [230]

Hal-hal tersebut diatas merupakan salah satu faktor adanya desakan agar PM mengembalikan mandatnya. Pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden.

Tak lama setelah kabinet Burhanuddin jatuh, Presiden Sukarno pada tanggal 8 Maret 1956 menunjuk formatur Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dimana ke-3 partai besar yaitu PNI, Masyumi dan NU memegang peranan disamping beberapa partai kecil lainnya. Pengumuman resmi terbentuknya kabinet dengan susunan yang lengkap diumumkan pada tanggal 20 Maret 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang baru ini mendapat tentangan dari PSI dan PKI karena kedua partai tersebut tidak diikutsertakan.

230 Herbert Feith, *op.cit.* hal. 422.

Tetapi tentangan dari partai-partai lain tidak begitu besar sebab banyak yang diajak serta duduk dalam kabinet, sehingga jumlah menterinya ada 24 orang.

Program kabinet ini yang disebut Rencana Lima Tahun, memuat soal-soal jangka panjang misalnya usaha perjuangan memasukkan Irian Jaya ke Indonesia, melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat pemilihan anggota-anggota DPRD; mengusahkan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai; menyehatkan keuangan negara sehingga tercapai imbangan anggaran belanja serta berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat [231]

Kabinet yang baru ini mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Sukarno, terlihat dari pidatonya dimuka Parlemen pada tanggal 26 Maret 1956 yang menyebut kabinet ini sebagai titiktolak daripada periode *planning* dan *investment.* [232] Namun Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini juga tidak luput dari kesukaran-kesukaran yang harus dihadapi; diantaranya yang penting adalah berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat dan adanya kekacauan di beberapa daerah.

Ditandatanganinya Undang-undang Pembatalan KMB oleh Presiden Sukarno pada tanggal 3 Mei 1956, menimbulkan persoalan tentang bagaimana nasib modal Belanda yang ada di Indonesia. Ada anjuran untuk mengadakan nasionalisasi atau Indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda itu. Tetapi sebagian besar anggota kabinet menolak tindakan tersebut. Dalam hal itu banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, terutama kepada orang-orang Cina karena pada umumnya merekalah yang beruang. Orang-orang Cina ini memang sejak lama sudah mempunyai kedudukan yang kuat dalam ekonomi Indonesia. Itulah sebabnya maka pada tanggal 19 Maret 1956 Mr.Assaat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya mengatakan perlunya pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional. Hal ini penting sebab pengusaha Indonesia tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha non-pribumi, khususnya orang Cina.

---

231 *Keterangan dan Jawaban pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo II*, Jakarta 1956.

232 *Pedoman*, 27 Maret 1956.

Perpustakaan
Direktorat Pelindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Pernyataan Assaat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dan lahirlah "gerakan Assaat" dimana-mana.
Pemerintah menanggapi gerakan ini dengan keluarnya statement dari Menteri Perekonomian Burhanuddin (NU) bahwa pemerintah akan memberi bantuan terutama pada perusahaan-perusahaan yang 100% diusahakan oleh orang Indonesia.

Perasaan anti Cina ini menimbulkan tindakan kekerasaan antara lain pengrusakan perusahaan mobil milik Han Swie Tik karena orang itu berkelahi dengan Kapten dr. Harjono. Selain itu juga tidak sedikit tulisan-tulisan anti Cina di-sebarkan, baik di Jakarta, Bandung, Semarang dan Solo. [233]

Disamping gerakan anti Cina. kabinet Ali Sastroamidjojo harus menghadapi kesukaran adanya perasaan tidak senang yang timbul di daerah-daerah. Persoalannya ialah bahwa beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterimanya dari pusat. Lain daripada itu mereka juga tidak menaruh kepercayaan lagi pada pemerintah. Karena mengubah pemerintahan dengan jalan parlementer tidak dapat dilakukan, maka mereka menempuh jalan extra-parlementer.

Gerakan-gerakan daerah ini mendapat dukungan dari beberapa panglima dan terbentuklah dewan-dewan yaitu Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letnan Kolonel A. Hussein pada tanggal 20 Desember 1956; Dewan Gajah dibentuk oleh Kolonel Simbolon di Medan pada tanggal 22 Desember 1956 dan Dewan Manguni yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual di Menado pada tanggal 18 Februari 1957.

Peristiwa-peristiwa ini sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali II. Tak lama setelah munculnya Dewan Manguni pada tanggal 14 Maret 1957 P M Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Dalam keadaan yang gawat dengan munculnya dewan-dewan di daerah-daerah, Indonesia tidak mempunyai pemerintahan. Segera setelah menerima penyerahan mandat, Presiden mengumumkan berlakunya SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan dengan demikian Angkatan Bersendjata mendapat tugas untuk mengamankan negara. Selain itu Presiden terus berusaha menghubungi partai-partai untuk membentuk pemerintahan baru. Tetapi karena kaum politisi dari partai-partai

---

233 *Suluh Indonesia*, 27 Juli 1956.

tetap mau melakukan "dagang sapi", yaitu tawar-menawar kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi, maka Presiden menunjuk Ir. Djuanda seorang non-partai sebagai formatur.

Kabinet Djuanda resmi terbentuk pada tanggal 9 April 1957 dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Kabinet ini adalah *zaken kabinet* dan bertugas selain harus menghadapi pergolakan di daerah, perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia, juga harus menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk; merosotnya jumlah devisa dan rendahnya angka-angka export. Programnya terdiri dari 5 fasal (Panca Karya) sehingga kabinet Djuanda ini juga dinamakan Kabinet Karya.

Programnya ialah [234] :

1. membentuk Dewan Nasional.
2. normalisasi keadaan Republik.
3. melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.
4. perjuangan Irian Barat.
5. mempergiat pembangunan.

Dewan Nasional mempunyai pokok tujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga mempunyai tugas sebagai penasehat guna melancarkan jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik menuju pembangunan negara. Dewan Nasional ini anggotanya berjumlah 45 orang dari golongan fungsionil dalam masyarakat dan diketuai oleh Presiden Sukarno sendiri. Walaupun Dewan Nasional sebagai dewan penasehat sudah terbentuk, tetapi kesukaran-kesukaran yang dihadapi pemerintah tetap meningkat. Dari hari ke hari keadaan negara semakin buruk. Masalah daerah-daerah yang timbul di Sumatra dan Sulawesi menyebakan hubungan Pusat dan daerah terganggu. Masalah daerah juga membawa pengaruh di bidang ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sulit untuk melaksanakan program-programnya.

Untuk meredakan ketegangan daerah-daerah, pada tanggal 14 September 1957 telah dilangsungkan Musyawarah Nasional (MUNAS), dan dilingkungan AD dibentuk panitia yang terdiri

---

234 Naskah riwayat hidup Ir.H.Djuanda Kartawidjaja, (Arsip Kabinet Perdana Menteri.)

dari 7 orang dan disebut Panitya Tujuh. Tetapi belum sampai Panitya Tujuh ini mengumumkan hasil kerjanya, telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada tanggal 30 Nopember 1957 (Peristiwa Cikini). Karena Peristiwa Cikini, keadaan Indonesia semakin memburuk. Daerah-daerah yang bergolak tidak menjadi tenang, tetapi semakin nyata usahanya untuk melepaskan diri dari Pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng, Achmad Hussein mengeluarkan ultimatum pada Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 X 24 jam. Menerima ultimatum ini pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Achmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis dan Dahlan Djambek, yaitu perwira-perwira TNI–AD yang duduk dalam pimpinan gerakan separatis. [235] Kemudian KSAD A.H. Nasution pada tanggal 12 Februari 1958 mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkannya langsung di bawah KSAD. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

Untuk menghadapi gerakan separatis ini dan untuk memulihkan keamanan negara, pemerintah dan KSAD memutuskan untuk melancarkan operasi militer. Operasi gabungan AD–AL–AU terhadap PRRI di Sumatra Tengah itu diberi nama Operasi 17 Agustus. Selain untuk menghancurkan kaum separatis, Operasi juga untuk mencegah mereka meluaskan diri ke tempat-tempat lain dan mencegah turut campurnya kekuatan asing. Kekuatan asing dikhawatirkan akan mengadakan intervensi dengan dalih melindungi modal dan warganegaranya, sebab di Sumatra Timur dan Riau banyak terdapat modal asing. Oleh sebab itu maka gerakan APRI pertama kali ditujukan ke Pekan Baru untuk mengamankan sumber-sumber minyak disitu. Dari Pekan Baru operasi dikembangkan ke segala pusat pertahanan pemberontak dan akhirnya setelah memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit pada tanggal 4 Mei 1958 Bukittinggi dapat direbut kembali. Setelah itu tugas APRI adalah mengamankan

---

235 Ong Hok Ham, *Supta Marga berkumandang di Sumatra: Operasi-operasi menumpas pemberontakan "PRRI"*, Jakarta, 1965, hal. 5

daerah bekas kekuasaan PRRI dimana banyak anggota pemberontak bergerilya dihutan-hutan.

Setelah PRRI diproklamasikan oleh Achmad Hussein, di Sulawesi Utara juga diumumkan berdirinya gerakan separatis Permesta yang menguasai daerah dari Palu di Sulawesi Tengah sampai ke Menado di Sulawesi Utara. Terhadap Permesta-pun pemerintah tidak ragu-ragu untuk bertindak dan segera Operasi Sapta Marga dilancarkan pada bulan April. Ternyata Permesta mendapat bantuan dari petualang asing seperti terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope orang Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon.[136] Walaupun demikian akhirnya pemberontakan Permestapun dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958 walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.

Setelah mengalami instabilitas politik selama hampir sepuluh tahun lamanya, masyarakat Indoensia mulai berselera untuk memiliki pemerintah yang kuat dibawah pimpinan orang kuat yang dapat menghentikan berlarut-larutnya keadaan setelah lebih daripada 10 tahun merdeka, pembangunan nasional yang sudah didambakan oleh Rakyat, belum juga dapat dimulai. Lambat-laun kehidupan politik atas dasar demokrasi liberal mulai digantikan oleh apa yang disebut demokrasi terpimpin. DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 sedikit demi sedikit hilang kekuasaan dan fungsinya karena dibentuknya Dewan Nasional sebagai dewan penasehat pemerintah dan Dewan Perancang Nasional. Dewan Konstituante pada bulan Juli 1959 dibubarkan setelah tidak mencapai 2/3 suara untuk memutuskan berlakunya kembali UUD 1945. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, dengan Dekrit Presiden, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Dengan berlakunya Dekrit Presiden ini maka kabinet Djuanda mengembalikan mandatnya dan diganti oleh kabinet Presidensiil dengan Sukarno sendiri sebagai Perdana Menterinya.

D. PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Menurut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Dr.Ir. Sukarno adalah Presiden/Kepala Negara Konstitusionil.

236 RZ Leirissa, *Bukan disiplin kadaver melainkan disiplin berdjiwa : Operasi-operasi militer terhadap Permesta 1958*, Jakarta 1965, hal.7

Akan tetapi ia menganggap dirinya juga pemimpin rakyat. Sebagai Presiden nampaknya ia tidak mau dijadikan hanya sebagai simbol belaka. Suatu ketika Presiden Sukarno mengatakan bahwa "ia bukan Presiden *à la* Amerika, atau Presiden *à la* Perancis tetapi seorang Presiden *à la* Revolusi Indonesia dan pemimpin dari rakyatnya". [237] Karena itu pada setiap pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus dan pada pelbagai kesempatan lain dikemukakan hal-hal yang seharusnya menjadi urusan dan tanggungjawab kabinet/pemerintah. Walaupun sudah sedemikian jauhnya tindakan Presiden itu, jarang sekali terdengar suara memprotes. Kiranya hal itu disebabkan karena partai-partai politik dalam masa Perang Kemerdekaan maupun dalam periode Demokrasi Liberal tidak berhasil menampilkan pemimpin-pemimpin yang berkaliber besar, sehingga selaku perdana menteri dapat memberikan pegangan kepada rakyat Indonesia yang hidup dalam suatu negara berkembang.

Karena itulah usaha Presiden Sukarno untuk memperluas wewenang dan kekuasaannya melampaui batas-batas kontitusionil tidak memperoleh halangan yang berat. Dengan demikian pribadi Sukarno pada dirinya-sendiri berkembang menjadi sesuatu kekuatan politik yang setingkat dengan partai-partai dan merupakan faktor yang menentukan dalam kehidupan politik Indonesia sejak akhir tahun limapuluhan.

Pada tanggal 10 November 1956 Konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan dari Presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD Republik Indoensia tanpa adanya pembatasan masakerja. [238] Ketika itu situasi dalam negeri goncang, daerah-daerah mulai bergolak dan mulai tahun 1956 berdirilah Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni, Dewan Lambung Mangkurat dan kemudian meningkat menjadi "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" dan "Perjuangan Rakyat Semesta" (PRRI/Permesta) dan akhirnya menjadi "Republik Persatuan Indonesia" (RPI).

Dalam suasana yang gawat itu terasalah keganjilan sikap partai partai politik yang masih saja membiarkan wakil-wakilnya

---

237 Prof.Dr. Ismail Suny S.H., M.C.L., Pertanggunganjawab Presiden menurut Konstitusi2 Indonesia, Prasaran pada Diskusi Ilmu Ketatanegaraan Fakultas Hukum UI, Jakarta 1972, (tidak terbit).

238 Presiden Sukarno: *Susunlah konstitusi yang benar-benar konstitusi Res Publica.* Brosur Kementerian Penerangan., cet. II, tidak bernomor.

berpidato tak berkeputusan didalam Konstituante. Ketidak-sabaran masyarakat semakin meningkat dan keinginan untuk diambilnya tindakan drastis guna mengatasi kemacetan nasional semakin memuncak. Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Sukarno berpidato lagi di muka sidang Konstituante dan atas nama pemerintah menganjurkan agar supaya dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Konstituante menetapkan saja UUD 1945, menjadi UUD Negara Republik Indonesia yang tetap.

Sebelum Konstituante menerima atau menolak usul pemerintah itu, terlebih dahulu dari blok Islam datang usul amandemen untuk menambahkan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" kedalam pembukaan UUD 1945. Usul amandemen tersebut ditolak oleh Konstituante dalam sidangnya tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) lawan 265 (menolak). Pada tanggal 30 Mei 1959 baru dilakukan pemungutan suara terhadap usul pemerintah: kembali kepada UUD 1945 (tanpa perobahan). Hasilnya ialah 269 lawan 199, sedangkan yang hadir pada waktu itu 474 orang anggota. Jadi dengan demikian tidak tercapai quorum 2/3 seperti disyaratkan oleh UUDS 1950, pasal 37.

Sesuai dengan ketentuan dalam tatatertib Konstituante, maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan pada tanggal 2 Juni 1959, akan tetapi juga tidak tercapai quorum seperti tersebut diatas. Mulai keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya.

Untuk mencegah ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usul pemerintah oleh Konstituante, maka Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), telah mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan-kegiatan politik, yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959, jam 06.00.[239] Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI) Suwiryo, mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno (yang ketika itu sedang berada di Jepang dalam rangka perjalanan keliling dunia), agar supaya Presiden Sukarno mendekritkan berlakunya kembali UUD

239 *Antara*, 3 Juni 1959.

Perpustakaan
Direktorat Perladangan dan
Pembinaan Peningkatan
Sejarah dan Purbakala

1945 dan membubarkan Konstituante. [240] Sekretaris Jenderal Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC-PKI) D.N. Aidit mengirim surat kepada fraksi PKI di Konstituante, berbunyi: "Harap diketahui bahwa politbiro CC–PKI hanya membenarkan anggota-anggota fraksi menghadiri sidang pleno Konstituante jika hal itu terpaksa diadakan dan dengan acara untuk membubarkan diri. [241]

Dalam waktu-waktu yang kritis itulah, dimana keadaan ketatanegaraan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, adanya ancaman pemberontakan yang ditumpangi intervensi tertutup kekuatan-kekuatan besar asing, dan dimana partai-partai politik sebagai keseluruhan memperlihatkan impotensinya, Presiden Sukarno dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) muncul sebagai kekuatan politik yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan nasional.

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 secara konstitusionil yaitu dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaxnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Sukarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah timbul: "keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur". Demikianlah demi keselamatan negara, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka demokrasi terpimpin.

Dekrit Presiden itu mendapat sambutan baik dari rakyat dan disokong penuh oleh TNI–AD, seperti disebut dalam Perintah Harian KASAD, yang ditujukan kepada seluruh TNI untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI Mahkaman Agung juga membenarkan Dekrit Presiden itu, [242] sedang DPR (hasil pemilihan umum 1955) dalam sidang plenonya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk bekerja terus dalam rangka UUD 1945, berarti menyetujui Dekrit Presiden itu.

240 *Suluh Indonesia*, 18 Juni 1959.
241 *Harian Rakyat*, 27 Juni 1959.
242 *Suluh Indonesia*, 11 Juli 1959.

Rakyat yang sudah lama mendambakan stabilitas politik menggantungkan harapannya kepada berlakunya kembali UUD 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Menurut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada Parlemen; baik Parlemen maupun Presiden berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pengertian terpimpin dalam UUD 1945 adalah dengan "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Akan tetapi kemudian ternyata Presiden Sukarno menafsirkan "terpimpin" itu dengan pimpinan pribadinya selaku Pemimpin Besar Revolusi, sehingga pengertiannya menjadi demokrasi yang dipimpin oleh Sukarno.

Tidak berapa lama kemudian harapan-harapan tadi semakin kabur dan hilang, karena UUD 1945 ternyata tidak dilaksanakan secara murni. Kalau menurut UUD 1945, Presiden berada di bawah MPR seperti disebut di atas, maka MPR(S) yang dibentuk atas penetapan Presiden dengan pembatasan tugas dan anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, menjadi MPR(S) yang tunduk kepada Presiden; Presidenlah yang menentukan apa saja yang harus diputuskan oleh MPR(S). Kenyataan-kenyataan itu jelas dengan diambilnya tindakan-tindakan oleh Presiden dalam rangka pengangkatan pimpinan MPR(S). Ketua MPR(S) dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II dan Wakil-wakil Ketua diangkat dari pimpinan partai-partai besar (PNI,NU, PKI) dan dari Wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai Menteri tidak ber*portfolio*. Dan dengan demikian Presiden dapat berbuat apa saja menurut kehendaknya. Kemudian Sidang Umum MPR (S) I/1959 menetapkan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus 1959 "Penemuan Kembali Revolusi Kita" menjadi Manifesto Politik Republik Indonesia dan menetapkannya menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara, sedangkan Sidang Umum MPR(S) tahun 1963 mengambil ketetapan "Mengangkat Dr. Ir.Haji Sukarno menjadi Presiden seumur hidup" [243]

DPR hasil pemilihan umum (1955) yang telah bekerja selama 8 bulan dan menyatakan dirinya mau bekerja terus dalam rangka UUD 1945, pada tanggal 5 Maret 1960 dibubarkan oleh Presiden, karena persoalan anggaran belanja Negara. [244] Dan

243 *TAP* No. III/MPRS/1963

244 Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, *Lembaran Negara*, 1960 No.24.

kemudian Presiden mengangkat anggota-anggota DPR baru yang disebut DPR Gotong-Royong (DPRGR). DPR menurut ketentu-an-ketentuan UUD 1945, merupakan perwakilan rakyat yang mengawasi atau mengkontrol tindakan-tindakan pemerintah, dalam Demokrasi Terpimpin tidaklah lebih daripada lembaga yang mensahkan secara formil-yuridis apa yang diputuskan dan apa yang dilakukan oleh Presiden/Kepala Pemerintahan, seperti dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Negara, politik luar negeri dll.

2. *Kekuatan-kekuatan politik dalam konstelasi Demokrasi Terpimpin.*

Pada umumnya partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maupun Penpres No.7 tahun 1959 yang mengatur tentang dapat atau tidaknya sesuatu parpol diakui existensinya dalam negara Republik Indonesia. Dalam pen-pres. tersebut disebutkan ketentuan-ketentuan mewajibkan parpol mencantumkan, baik dalam anggaran dasar, anggaran rumahtangga maupun dalam progamnya: "tidak bertentangan dengan azas dan tujuan negara, menerima Pancasila dan UUD 1945, menghukum partai-partai yang terlibat dalam pemberontakan". Sehubungan dengan Penpres No.7 tahun 1959 itu, maka Masyumi dan PSI terkena dan kemudian dibubarkan. Demikianlah dengan tidak memakan waktu lama setelah Dekrit itu, maka dibentuklah Kabinet Kerja dengan program kerja: sandang-pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Pada pertengahan tahun 1960 telah selesai disusun lembaga tertinggi negara baik yang disebutkan dalam UUD maupun tidak, misalnya DPA, DPR–GR, MPR(S), Depernas, Front Nasional, dll. Semua keanggotaan lembaga-lembaga tersebut disusun dengan komposisi gotong-royong yang menurut Bung Karno adalah merupakan pengejawantahan dari Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak banyak berbuat berhubung dengan pembatasan tugas yang diberikan oleh Presiden Sukarno.[245] Mereka menetapkan apa yang diajukan dan diinginkan oleh

---

245 Surat Menteri Penghubung DPR–GR/MPR(S), tertanggal 30 Nopember 1960, lihat: *20 Tahun Indonesia Merdeka I*, Jakarta 1965, hal.431.

Presiden/Kepala Pemerintahan. Sementara itu TNI yang telah ikut aktif menyumbangkan tenaga dan pikirannya sejak Perang Kemerdekaan (1945-1949), bahkan menjadi inti dan pembina pemerintahan gerilya terutama di pulau Jawa, sejak tahun 1956, menonjol kembali peranan sosial-politiknya setelah adanya beberapa peristiwa, seperti timbulnya PRRI/Permesta, kegagalan Konstituante untuk menetapkan Undang-undang Dasar baru sepagai pengganti UUDS-1950, serta aksi-aksi perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Jaya. Peranan TNI itu dimainkan terutama dalam sidang Dewan Nasional. Misalnya saja setelah mempelajari rumusan "Rancangan usul Dewan Nasional kepada Dewan Menteri tentang tindakan yang harus diambil untuk mencapai demokrasi terpimpin",(yang tetap dalam kerangka UUD 1950).[246] yang disusun oleh panitia perumus Dewan Nasional, Pimpinan TNI tidak dapat menerimanya; sebagai gantinya pimpinan TNI mengajukan rancangan usul baru, yakni: "kembali ke UUD 1945". Diajukan pula pendapat, bahwa demokrasi terpimpin tetap demokrasi dan bukan diktatur, jadi kekuasaan tertinggi tetap pada Rakyat melalui pemilihan umum.

Demikianlah sejak tahun 1957–1959 TNI berusaha memperoleh landasan hukum untuk melakukan peranan sosial-politiknya. Usaha tersebut berhasil dengan termasuknya TNI kedalam golongan karya yang duduk dalam Kabinet Karya dibawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda. Sejak diumumkannya SOB pada bulan Maret 1957 terdapatlah sesuatu dasar hukum bagi TNI untuk berperanan dan bergerak di bidang non-militer. [247]

Adapun PKI sudah sejak semula mendukung konsepsi Presiden dengan perhitungan bahwa dengan mendukung konsepsi tersebut PKI akan dapat menuju ke realisasi Nasakom (Nasakomisasi, Kabinet Gotong Royong dll). Dengan menggarapnya secara sistimatis, ditimbulkan keyakinan pada diri Presiden Sukarno, bahwa tanpa PKI, ia akan menjadi lemah terhadap TNI. Konsepsi Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) pada hakekatnya berarti mengikutsertakan dan memasukkan komunisme kedalam pelaksanaan Pancasila. Padahal komunisme didasarkan atas dialektis-

---

246 A.H.Nasution, *Kekaryaan ABRI*, Jakarta 1972, hal.153–156.

247 Wakil-wakil TNI/ABRI duduk dalam lembaga-lembaga tertinggi negara MPR(S), DPR–GR, Dewan Nasional, Dewan Menteri, dll.

materialisme, jadi anti Ketuhanan, lagi pula komunisme mengandung konsepsi perjuangan klas, yang asing bagi Pancasila.

Dalam periode itu semuanya diatur oleh Pemerintah, sampai-sampai kepada kreasi-kreasi seni dan selera hiburan. Bahkan band Koes Bersaudara pernah ditahan atas tuduhan menyebarkan budaya nekolim. Jaminan dan perlindungan hukum tidak ada. Banyak pemimpin-pemimpin yang anti Demokrasi Terpimpin ditangkap tanpa diadili, dituduh kontra-revolusi, agen nekolim, subversif dan sebagainya. Dalam usaha mencapai cita-cita untuk mewujudkan sosialisme dan kemudian komunisme di Indonesia PKI menjalankan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan:

1. Dalam Negeri berusaha keras untuk memecah-belah atau menyusupi kekuatan partai atau organisasi massa atau badan-badan lainnya dari pihak lawan. Di bidang pendidikan berusaha memasukkan Marxisme-Leninisme sebagai salahsatu matapelajaran wajib. Di bidang militer berusaha untuk mengindroktrinasikan perwira-perwira dengan ajaran komunisme dan membina sel-sel di kalangan ABRI.
2. Luar Negeri: berusaha untuk mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke blok komunis.

Landasan dari semua gerakan PKI adalah Manipol yang menyatakan, bahwa rakyat Indonesia sedang menyelesaikan revolusinya atau lebih populer: revolusi belum selesai.
Dengan dalih ini PKI mengajak Rakyat untuk menyelesaikan revolusi menurut tahapan-tahapan yang telah ditentukannya. Selanjutnya untuk mengaburkan tuduhan bahwa PKI bersifat internasional dan anti-agama, PKI mengakui menganut Manipol (yang dikatakan sudah mencakup Pancasila), dengan dalih bahwa Manipol adalah satu-satunya doktrin Revolusi Indonesia yang harus dipegang teguh. Apalagi dengan adanya anjuran Presiden Sukarno supaya jangan berkomunistofobi maka amanlah PKI dari serangan. Pada awal tahun 1964, ditemukanlah dokumen mengenai rencana perjuangan PKI yang mengandung pula rencana merebut kekuasaan. PKI menyatakan bahwa dokumen itu palsu. Tetapi mengingat sikap Presiden Sukarno yang melindungi PKI dan dominasinya yang mutlak pada panggung politik dewasa itu,

partai-partai lainnya dan ABRI tidak dapat bertindak mengusut rencana PKI itu secara terang-terangan. Adanya heboh karena ucapan Aidit di depan Kursus Kader Revolusi pada tanggal 16 Oktober 1964 bahwa "Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan kalau kita sudah bersatu, Pancasila tidak perlu lagi" dapat dilaluinya dengan selamat, karena Pemerintah tidak mengambil tindakan. Atas petunjuk Presiden Sukarno, PKI dan ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang dianggapnya lawan dengan mengatakan siapa saja yang menentang Nasakom apalagi anti PKI, adalah kontra-revolusioner dan anti Bung Karno.

Dengan adanya perlindungan resmi dari Presiden, ormas PKI meningkatkan aksi-aksinya yang lebih dikenal dengan aksi sepihak. Ormas PKI Barisan Tani Indonesia (BTI) di beberapa tempat mengacaukan pelaksanaan landreform. Terjadilah peristiwa Boyolali dan Bandar Betsy dimana buruh tani dihasut untuk merampas tanah milik pihak lain. Kedua peristiwa ini merupakan ujian untuk mengukur kekuatannya dalam menghadapi ABRI. Front Nasional juga mereka gunakan untuk melancarkan aksi-aksinya. Sebagai reaksi atas teror PKI di bidang budaya dan pers, terbentuklah suatu kelompok budayawan yang mengajukan suatu Manifes Kebudayaan dan suatu kelompok wartawan dan penerbit suratkabar yang menamakan dirinya Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Kedua kelompok itu dengan caranya sendiri bermaksud memecahkan belenggu absolutisme PKI yang mengekang kegiatan kreatif mereka.

Mengenai Manifes Kebudayaan, yang ditakutkan PKI sebenarnya adalah terselenggaranya Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) yang berhasil membentuk organisasi pengarang dengan nama Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI) yang dapat menghambat usaha mereka untuk menguasai bidang budaya. Oleh Presiden Sukarno Manifes Kebudayaan dan BPS kemudian dilarang setelah dikeluarkan tuduhan dibiayai CIA (badan intelijen Amerika Serikat). Dua instansi sebagai alat komunikasi-massa yang vital, yaitu Kantor Berita Antara dan RRI juga mereka kuasai. Diantara parpol-parpol yang ada, masih ada satu yang mengadakan perlawanan aktif terhadap PKI, yakni Partai Murba. Akhirnya PKI berhasil mempengaruhi Presiden Sukarno sehingga Partai Murba dibubarkan pada bulan Septem-

ber 1964. Terhadap ABRI dilakukan usaha menguasai melalui komisaris politik Nasakom yang mendampingi panglima atau komandan pada setiap eselon. Usaha itu tidak berhasil karena keteguhan sikap Pimpinan ABRI. Semboyan "Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu" yang juga dibuatkan lagunya, dibalas dengan semboyan "Nasakom jiwaku", yang berarti Nasakom dianggap ada pada setiap organisasi, tanpa menempatkan tiga orang komisaris politik kedalamnya yang berasal dari PNI, NU dan PKI yang dikatakan mewakili Nasakom.

Adanya saran RRC kepada Presiden Sukarno agar dibentuk Angkatan ke-5 disamping Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polisi dengan tujuan memberikan kekuatan bersenjata kepada PKI yang terdiri dari sukarelawan Dwikora yang sudah dikerahkan, juga menemui kegagalan. Pada akhirnya PKI melakukan kampanye untuk pembentukan kabinet Nasakom, yang baru mencapai hasil sedikit dengan masuknya pemimpin-pemimpin utama PKI sebagai menteri-menteri tanpa *portofolio*.

3. *Keadaan ekonomi selama Demokrasi Terpimpin*

Sejak periode 1960/1961 keadaan neraca perdangan Indonesia belum menampakkan suatu kemajuan, malahan telah menunjukkan perkembangan yang lebih memburuk. Index biaya hidup menunjukkan perkembangan yang makin menaik: dari tahun 1961 mengalami kenaikan 70% pada tahun 1962 dalam waktu tiga bulan atau kenaikan 225% bila dibandingkan dengan angka index tahun 1960. Meskipun pemerintah telah berusaha memperbanyak export Indonesia, tetapi belum berhasil. Hal ini disebabkan para exportir masih selalu berorientasi pada barang export tradisionil Indonesia seperti karet, kopra dan sebagainya.

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka *export drive*, misalnya sistim Bukti Export (BE), SIVA dan peraturan lainnya mengalami kegagalan. Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden telah mengumumkan berlakunya Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dengan adanya Deklarasi Ekonomi tersebut, maka pemerintah yang memegang peranan memimpin dalam bidang ekonomi. Peraturan pelaksanaan Dekon tanggal 26 Mei 1963 ternyata telah menimbulkan kesulitan, karena tidak sesuai dengan Dekon itu sendiri. Pemerintah kemudian menggantinya dengan peraturan baru yang dikenal dengan nama

peraturan 17 April 1964, dimana antara lain ditetapkan adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (Kesop) dalam usaha perdagangan. Kebijaksanaan pemerintah tersebut ternyata telah mengundang reaksi menolak peraturan tersebut, karena dengan peraturan tersebut belum bisa segera dirasakan perbaikan ekonomi yang merata bagi rakyat.[248]

Mengenai strategi dasar ekonomi yang ditempuh pemerintah pada waktu itu, pada tahap pertama berusaha menciptakan susunan ekonomi yang bersifat demokratis serta bersih dari sisa-sisa imperalisme dan feodalisme. Tahap pertama sebenarnya merupakan persiapan menuju pada alam masyarakat Sosialis Indonesia, dimana setiap orang akan dijamin hidupnya secara layak. Dalam prakteknya ekonomi terpimpin berubah menjadi sistim lisensi yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang dekat dengan istana. DPR tidak berfungsi, sehingga pernah pada awal tahun 1965 mengesahkan 50 undang-undang, termasuk Anggaran Belanja Negara.[249] *Deferred payment*, proyek mercusuar, cetak uang kertas tanpa batas, inflasi 600%, merupakan ciri-ciri ekonomi Demokrasi Terpimpin.

4. *Politik Luar negeri selama Demokrasi Terpimpin.*

Politik luar negeri poros-porosan bertentangan dengan prinsip politik bebas dan aktif. Adanya konfrontasi dengan Malaysia tidak membawa keuntungan bagi rakyat dan hubungan internasional, sehingga Indonesia makin diasingkan dari pergaulan bangsa-bangsa. Pada waktu itu PKI telah berhasil membelokkan politik luar negeri Indonesia ke arah blok komunis, sehingga tercipta poros Jakarta-Peking. Karena itu kita makin terikat pada RRC. Timbulnya gagasan politik yang ingin menciptakan suatu dunia baru *(New Emerging Forces)* sebagai tandingan pihak kolonial *(Old Established Forces)* kenyataannya sejalan dengan politik komunis. Sementara itu atas desakan PKI, akhirnya Indonesia telah keluar dari PBB yang dianggap sudah tidak kapabel lagi.

Dalam bidang sosial-budaya kelihatan kegigihan PKI mempengaruhi kehidupan Sosial-budaya dengan ciri-ciri budaya

---

248 Adam Malik, *Politik dan Ekonomi* Jakarta, 1966, hal. 10, 17.

249 Dj.L. Aroean SH. *Deklarasi Ekonomi Dengan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya Dan Peraturan-peraturan Ekonomi Irian Barat*, Jakarta, 1963, hal. 5

asing komunis. Buku-buku, majalah-majalah serta film-film yang berbau Barat dikatakan merusak jiwa masyarakat dan dilarang. Hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda sejak tanggal 17 Agustus 1960 diputuskan secara sepihak oleh Indonesia. Hal ini terjadi setelah perjuangan diplomasi dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan.

Selain terjadi pendekatan dengan RRC, sebagai akibat adanya bantuan kredi> jangka panjang dari Uni Sovyet dan sekutunya dalam perkembangannya kemudian berpengaruh besar bagi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Misi-misi dan pertukaran kebudayaan lebih banyak dilakukan dengan negara-negara komunis, terutama RRC. Dibidang olah raga, diselenggarakannya Ganefo *(Games of the New Emerging Forces)* adalah alat RRC untuk mengukur kekuatannya di bidang olahraga.

5. Pembebasan Irian Jaya.

Salah satu program Kabinet Kerja ialah pembebasan Irian Jaya yang telah lama merupakan masalah nasional. Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), pasal 1 mengenai "penyerahan" kedaulatan atas Indonesia berbunyi: "Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat". Akan tetapi KMB tidak berhasil menyelesaikan salahsatu masalah, yaitu penyerahan kekuasaan oleh Belanda atas Irian Jaya kepada Indonesia. Oleh karena itu untuk masalah tersebut kemudian dicapai suatu kompromi, yakni bahwa dalam waktu satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah status Irian Jaya akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Setelah setahun dan Irian Jaya masih tetap dikuasai oleh Kerajaan Belanda dan usaha-usaha secara bilateral telah mengalami kegagalan, maka pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Jaya ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berulang-ulang persoalan Irian Jaya diajukan ke Sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan yang positif. Pada Sidang ke 12 Majelis Umum PBB tahun 1957, masalah Irian Jaya kembali diperbincangkan, akan tetapi juga tidak berhasil. Pihak Kerajaan Belanda tidak mau menyerahkan-

nya, bahkan untuk membicarakannya saja mereka sudah tidak mau lagi.

Jalan damai tidak berhasil ditempuh, sehingga pihak Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Maka dilancarkanlah aksi-aksi pembebasan Irian Jaya di seluruh tanahair, yang dimulai dengan pengambil-alihan milik perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan karyawan. Untuk mencegah anarchi dan untuk menampung keinginan rakyat banyak, maka Kasad selaku Penguasa Perang Pusat memutuskan untuk mengambil-alih semua perusahaan milik Belanda dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah. [250] Kelanjutan daripada hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda itu mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960. Pada waktu itu Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kembali masalah Irian Jaya diperdebatkan. Sekretaris Jenderal PBB, U Thant menganjurkan kepada salah-seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker untuk mengajukan suatu usul penyelesaian masalah Irian Jaya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Usul Bunker tersebut menyebutkan pada pokoknya: agar pihak Belanda menyerahkan Irian Jaya kepada Indonesia dan penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun.

Pemerintah RI pada prinsipnya dapat menyetujui usul tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Pemerintah Kerajaan Belanda mempunyai pendapat sebaliknya: pihak Kerajaan Belanda akan mau melepaskan Irian Jaya dengan membentuk dulu perwalian dibawah PBB untuk kemudian membentuk Negara Papua".[251] Sikap pemerintah Kerajaan Belanda itu di Indonesia disambut dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersenjata membebaskan Irian Jaya. Untuk itu maka pada tahun 1961 bertepatan dengan hari ulangtahun dimulainya aksi militer ke-II Belanda pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengucapkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta.

---

250 *Antara*, 14 Desember 1957

251 Roeslan Abdulgani, *25 Tahun Indonesia - PBB*, Jakarta, 1971, hal., 17.

Tri Komando Rakyat itu adalah :

1. Gagalkan Negara Papua.
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum..

Dalam rangka persiapan suatu kekuatan militer untuk merebut Irian Jaya, pemerintah RI mencari bantuan pembelian senjata keluar negeri. Pada mulanya diharapkan pembelian di negara-negara Barat terutama Amerika Serikat tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha bantuan pembelian senjata itu dilanjutkan, kali ini ke negara-negara blok komunis terutama Uni Sovyet. Demikianlah pada bulan Desember 1960, suatu missi dibawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional/Kasad, Jenderal A.H. Nasution bertolak ke Moskwa dan berhasil mengadakan suatu perjanjian pembelian senjata. Missi tersebut disusul dengan missi kedua dan ketiga (untuk penyempurnaan dan tambahan), dan kemudian disusul pula dengan suatu missi Menteri Keamanan Nasional/Kasad mengunjungi beberapa negara: India, Pakistan, Muang Thai, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Perancis dan Inggris untuk menjajagi dan mendapatkan kesan atau kepastian dari negara-negara tersebut "tentang bagaimana sikap negara-negara itu, seandainya terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda". Kesimpulan dari Menteri Keamanan Nasional/Kasad dari hasil penjajagannya itu adalah: bahwa negara-negara tersebut tidak ada yang terikat kepada Belanda untuk bidang bantuan militer, meskipun negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada yang mendukung posisi Belanda. [252]

Pembelian senjata dari Uni Sovyet ditujukan kepada usaha memperkuat TNI terutama pembangunan pertahanan udara, pertahanan maritim serta pembentukan kekuatan ofensif, terutama di laut dan di udara.

Dengan demikian Belanda mulai menyadari bahwa bila Irian Jaya tidak diserahkan secara damai kepada Indonesia dalam waktu tertentu, maka pasti Indonesia akan berusaha membebaskannya dengan kekuatan militer. Menghadapi persiapan-persiapan Indonesia itu Belandapun tidak tinggal diam, mula-mula diajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi.

---

252 A.H. Nasution, *Kekaryaan ABRI*, hal. 390.

selanjutnya Belanda memperkuat kedudukannya di Irian Jaya dengan mendatangkan balabantuan militernya, dan mengirimkan kapal perangnya ke perairan Irian Jaya diantaranya kapal induk *Karel Doorman.*

Dengan diucapkannya Trikora mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Dan guna menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk merebut Irian maka pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan No. 1 Tahun 1962 membentuk Komando Mandala yang bertanggungjawab atas segala kegiatan operasionil ABRI serta Sukarelawan.

Sebelum Komando Mandala Pembebasan Irian Barat terbentuk, terjadi peristiwa pertempuran Laut Aru antara tiga MTB kita melawan kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran itu gugur Deputy Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama Yos Sudarso yang tenggelam dengan MTB *Macan Tutul.* Peristiwa itu mendorong pimpinan Angkatan Perang untuk mempercepat pembentukan Komando Mandala. Setelah Komando terbentuk, barulah dapat diambil langkah-langkah konkrit untuk membebaskan Irian Jaya. Pada mulanya Belanda mencemoohkan persiapan-persiapan tersebut. Mereka yakin, bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah Irian. Tetapi setelah ternyata bahwa operasi-operasi infiltrasi dari fihak Indonesia berhasil, dan bahkan kota Teminabuan jatuh ke tangan pasukan ABRI, maka Belanda bersedia untuk duduk pada meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian.

Dalam pada itu pemerintah Kerajaan Belanda sedikit-banyak mendapat tekanan dari pihak Amerika Serikat untuk berunding, untuk mencegah terseretnya Uni Sovyet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat-daya dimana masing-masing memberi bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa, yakni Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Dengan demikian pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda di New York, yang terkenal dengan Perjanjian New York. [253] Perjanjian itu berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Duta Besar Ellsworth Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah.

253 *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, Jakarta, 1971, hal., 99.

Soal yang terpenting dalam perjanjian itu, yalah perihal penyerahan administrasi di Irian Jaya dari pihak pemerintah Kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut dibentuklah *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)* yang akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Sedangkan Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan penentuan pendapat rakyat (Pepera) di Irian Jaya sebelum akhir tahun 1969,[254] dengan ketentuan bahwa: kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menerima hasilnya.

Akhirnya penyelesaian sengketa Irian Jaya dengan penyerahan administrasi kepada Indonesia dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 dan pemulihan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara dilakukan pada tahun 1963 itu juga, dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta.

6. *Konfrontasi terhadap Malaysia dan ke luar dari PBB*

Dalam periode ini Indonesia menentang pembentukan Malaysia, karena sebagai akibat pengaruh PKI Presiden Sukarno menganggap bahwa Malaysia adalah proyek neo-kolonialisme Inggris, yang "membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai". Karena itu Malaysia harus dicegah berdirinya dan setelah tetap dipaksakan berdirinya, harus dihancurkan.

Untuk melaksanakan niat itu dilancarkanlah konfrontasi bersenjata yang dilakukan oleh sukarelawan yang sebagian diambil dari ABRI dan sebagian dari masyarakat luas. Berlandaskan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yakni:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunai, untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Para gerilyawan Indonesia berusaha masuk ke daerah Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara dan di sana melancarkan operasi-operasi terhadap angkatan perang persemakmuran Inggris.

---

254 *Act of free choice* atas dasar musyawarah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus 1969 dengan hasil, bahwa penduduk Irian Jaya tetap dalam negara Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelesaian sengketa dengan Malaysia secara damai, atas prakarsa Filipina, pada tanggal 9-17 April 1963 diadakan konferensi tingkat Wakil-wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) dari Indonesia, Malaya dan Filipina. Pertemuan itu membicarakan rencana pembentukan Federasi Malaysia dan suatu konfederasi antara ketiga negara tersebut dalam rangka kerjasama. Selain daripada itu pertemuan tersebut merupakan suatu persiapan konferensi tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diadakan pada bulan Juni 1963.

Pertemuan Tokyo antara Presiden Sukarno dengan Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman yang diadakan pada tanggal 1 Juni 1963, agak mengurangi ketegangan dan meratakan jalan bagi diadakannya konferensi puncak tiga negara di Manila. Menteri Luar Negeri dari tiga negara tersebut mengadakan pertemuan dari tanggal 7–11 Juni 1963 di Manila dalam rangka persiapan konferensi puncak. Pertemuan itu menghasilkan suatu pengertian tentang masalah-masalah yang timbul sebagai akibat rencana pembentukan Federasi Malaysia. Pada waktu sedang dilakukan persiapan-persiapan kearah terselenggaranya pertemuan puncak, maka pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman menandatangani dokumen mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Dengan demikian segala yang telah dirintis bersama tentang pembentukan Federasi Malaysia menjadi cair, dan dianggap sudah menyimpang dari mufakat semula. Meskipun demikian pertemuan puncak dari tiga kepala negara/kepala pemerintahan tersebut diselenggarakan juga pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 5 Agustus 1963 di Manila. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga dokumen: Deklarasi Manila, Persetujuan Manila dan Komunike Bersama.[255] Mengenai pembentukan Federasi Malaysia ketiga kepala negara/kepala pemerintahan tersebut mufakat untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia itu. Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Malaysia, bilamana keinginan rakyat telah diselidiki oleh sesuatu otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya.

Semula pembentukan Federasi Malaysia itu akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1963 di London, akan tetapi kemudian

---

255 *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*. 1971, hal 276.

diundurkan. Ternyata pada tanggal 16 September 1963, walaupun missi PBB belum menyampaikan hasil laporan penyelidikannya mengenai kehendak rakyat di daerah-daerah itu, pembentukan Malaysia tetap dilaksanakan. Pemerintah Republik Indonesia berpendapat, bahwa tindakan itu suatu pelanggaran terhadap pernyataan bersama, yang tegas menyebutkan: penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diumumkan. [256]

Dalam memuncaknya ketegangan, terjadilah demonstrasi di Kualalumpur terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia dan demonstrasi di Jakarta terhadap Kedutaan Besar Malaysia dan Kedutaan Besar Inggris. Maka pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur oleh pemerintah Republik Indonesia diputuskan secara sepihak. Maka pada akhirnya pecahlah permusuhan antara RI dengan Malaysia sejak diucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

Pada tanggal 3 September 1964, pemerintah Malaysia meminta kepada Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan pengaduannya mengenai "agresi Indonesia berupa invasi lintas-udara oleh pasukan payung Indonesia" di Malaysia bagian selatan. Dewan Keamanan menyetujui permintaan Malaysia itu, sehingga masalah itu diperdebatkan dalam sidang Dewan Keamanan.

Perkembangan politik Dwikora ini tidak lepas dari kedudukan terkemuka PKI dalam konstelasi Demokrasi Terpimpin, sehingga akhirnya membelokkan politik luar negeri Indonesia menyimpang dari politik bebas-aktif, masuk kedalam ril politik luar negeri RRC dengan adanya apa yang disebut poros Jakarta-Peking.

Dilihat dari sudut kepentingan RRC, konfrontasi Dwikora itu sangat menguntungkan karena menyedot potensi negara-negara yang dianggap musuh oleh RRC. Tetapi dilihat dari sudut kepentingan Indonesia, yang ingin memainkan peranan yang positif di Asia Tenggara, konfrontasi itu justru sangat merugikan karena untuk sementara melenyapkan simpati jutaan orang Malaysia. Ditinjau dari sudut militer, konfrontasi Dwikora tidak merupakan sukses, berlainan dengan operasi-operasi pembebasan Irian Jaya. Baru pada jaman Orde Baru hubungan baik dengan

256 *Ibid*, hal.277.

Malaysia pulih kembali, yaitu setelah diadakan persetujuan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. [257]

Pada Sidang Umum PBB tahun 1960, Presiden Sukarno hadir dan mengucapkan suatu pidato dengan judul "Membangun Dunia Kembali". Isi pidato tersebut menyebutkan antara lain "kemungkinan retooling PBB". [258] Ternyata saran Presiden Sukarno itu tidak mendapat sambutan yang serius dari PBB.

Berhubung dengan masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan maka Presiden Sukarno mengulangi lagi pidato"Membangun Dunia Kembali", yaitu "PBB sekarang adalah pencerminan dari keadaan dunia tahun 1945, sewaktu masih belum banyak terdapat negara-negara di Asia. Konstelasi dunia, komposisi dunia sudah berobah, tetapi PBB tidak berobah. PBB tetap tinggal seperti PBB tahun 1945. Itulah sebabnya maka PBB perlu dirombak. Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum berobah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang. [259]

Jelas dari isi pidato tersebut, bahwa Presiden Sukarno mengkaitkan masuknya Malaysia kedalam Dewan Keamanan dengan alasan untuk keluar dari PBB. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di PBB menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB isi pidato Presiden Sukarno itu dengan tujuan, supaya para anggota PBB tidak menyokong masuknya Malaysia kedalam Dewan Keamanan dan memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB.

Inilah taktik terakhir di forum PBB untuk memencilkan Malaysia, yang hasilnya malahan Indonesia yang keluar sendiri dari PBB, karena pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan, sedang Malaysia itu yang menjadi sasaran politik konfrontasi Dwikora Indonesia. Maka terpaksalah Presiden Sukarno mengeluarkan Indonesia dari PBB dan dengan demikian bertambahlah isolasi negara kita. Kemudian Menteri Luar Negeri Dr Subandrio resmi menyatakan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1965 Indonesia keluar dari

---

257 *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, Jakarta 1971. hal. 323.

258 *Puntjawarsa Manipol*, hal 163–212.

259 *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, Jakarta, 1971, hal. 282.

PBB. Akan tetapi sejak tanggal 28 September 1966, masa permulaan Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

7. Gerakan 30 September/PKI

Momentum yang diperoleh Partai Komunis Indonesia (PKI) selama jaman Demokrasi Terpimpin mencapai klimaxnya pada pertengahan tahun 1965. Dalam suatu aliansi dengan Presiden Sukarno mereka telah membagi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia atas kawan dan lawan, yang kawan dirangkul, yang lawan disingkirkan. Yang masih ragu-ragu digarap supaya menjadi kawan.

Sejak tahun 1964 dan berjalan selama tahun 1965, sikap PKI semakin agresif. Sesuai dengan anjuran Ketuanya D.N. Aidit, PKI mengajak semua kawannya untuk "meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya". Melalui rapat-rapat umum, kampanye pers dan radio serta kampanye poster dan papan-papan propaganda raksasa di tepi-tepi jalan mereka menghasut rakyat untuk memusuhi golongan-golongan yang mereka anggap lawan dengan menggambarkan mereka itu sebagai "setan desa, setan kota, kapitalis birokrat (kabir)" yang harus dibunuh dan dibasmi.

Dan usaha mereka tidak terbatas kepada kata-kata dan gambar-gambar belaka. Di pelbagai daerah mereka melancarkan aksi-aksi sepihak dimana kader-kader mereka menghasut petani-petani untuk merampas tanah yang bukan haknya dengan semboyan *landreform*. Padahal misalnya saja di Jawa sudah tidak terdapat lagi tanah cukup untuk di - "landreform"-kan. Satu-satunya cara untuk memberikan tanah kepada petani miskin adalah dengan jalan transmigrasi.

Sesuai dengan doktrinnya, setiap partai komunis, dimana-pun didunia, bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dan menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik lainnya dalam rangka menegakkan "diktatur proletar" yang dilaksanakan oleh partai. Usaha merebut kekuasaan negara itu selalu dilakukan dengan kekerasan, dengan kudeta atau dengan menggunakan kekuatan tentara komunis seperti di Eropa Timur maupun di Cina dan Asia Timur. Di Indonesia, PKI telah pula berusaha merebut kekuasaan negara dengan Pemberontakan Madiun yang dimulai pada tanggal 18 September 1948. Usaha itu gagal dan PKI selama beberapa

tahun bergerak di bawah tanah. Tetapi sejak tahun limapuluhan PKI muncul kembali dan ikut dalam kehidupan politik-partai. Nampaknya seolah-olah PKI hendak mencapai kekuasaan Negara dengan jalan parlementer, terutama setelah pada jaman Demokrasi Terpimpin memperoleh dukungan penuh dari Presiden Sukarno.

Tetapi kemudian terbukti bahwa mereka melaksanakan strategi dua-muka: mempergunakan cara-cara parlementer secara maximal untuk memperlihatkan wajah demokrasi parlementer yang respektabel; tetapi sementara itu mereka mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu kondisinya matang beralih kepada cara "lain", yakni dengan menggunakan kekerasan atau kudeta. Untuk cara "lain" itu mereka harus dapat membina suatu blok didalam Angkatan Bersenjata yang terdiri atas kader-kader PKI atau setidak-tidaknya simpatisan-simpatisan mereka. Dari pemberontakan Madiun mereka belajar, bahwa tidak cukup untuk menguasai pasukan-pasukan tempur, melainkan mutlak perlu pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata dinetralisasi, dan jika perlu dilikwidasi.

Untuk melaksanakan strategi dua-muka itu, Ketua D.N. Aidit memakai dua aparat yang berbeda dan terpisah: untuk cara-cara demokratis parlementer ia mempergunakan aparat partai yang terbuka, sedangkan untuk cara "lain" dipergunakan Biro Khusus. Tugas Biro Khusus ini adalah untuk merancang, mempersiapkan dan melaksanakan perebutan kekuasaan dengan kekerasan atau dengan jalan kudeta. Untuk melaksanakan tugasnya, agen-agen Biro Khusus secara sistimatis telah melakukan usaha "pembinaan" terhadap "perwira-perwira ABRI" mulai dari Panglima Angkatan dan Polisi sampai kepada kepala-kepala seksi staf di komando-komando daerah.

Menurut suatu dokumen yang diketemukan oleh Pemerintah pada tahun 1964, PKI memperkirakan bahwa pada tahun 1966 kondisi akan matang dan situasi akan menguntungkan untuk beralih dari taktik demokratis-parlementer ke taktik kekerasan. Pihak PKI menyangkal keras otentisitas daripada dokumen itu dan mencegah dipersoalkannya dokumen itu secara luas dan terbuka.

Pada bulan Agustus 1965 Presiden Sukarno sakit keras dan menurut suatu team-dokter yang khusus didatangkan dari Republik Rakyat Cina ada kemungkinan ia akan lumpuh jikapun tidak

meninggal. Mengingat perkembangan situasi yang demikian itu, D.N.Aidit memutuskan untuk mempercepat bagan-waktu peralihan dari taktik demokratris-parlementer ke taktik kekerasan. Sasaran utama daripada tindakan kekerasan itu adalah pucuk pimpinan TNI–Angkatan Darat yang ternyata tidak berhasil dibina oleh Biro Khusus. Untuk beberapa bulan lamanya, Biro Khusus telah melancarkan kampanye fitnah yang berisi issue seolah-olah pemimpin-pemimpin TNI–AD membentuk "Dewan Jenderal" yang akan melakukan *Coup (coup d'etat* atau kudeta) terhadap Presiden Sukarno. Dalam kampanye-fitnah itu juga dikatakan seolah-olah anggota-anggota "Dewan Jenderal" itu adalah agen Amerika dan Inggris yang pada waktu itu dinyatakan sebagai "Nekolim" (Neo-kolonialis/imperialis).

Untuk melaksanakan rencananya itu Biro Khusus mengerahkan agen-agennya didalam ABRI, yang terkemuka diantaranya adalah Brigjen Supardjo dan Letnan Kolonel Untung dari TNI–AD, Kolonel Sunardi dari TNI–AL, Letnan Kolonel Heru Atmodjo dari TNI–AU dan Kolonel Anwas dari Polisi. Mereka menentukan sasaran-antara yakni menyingkirkan pimpinan TNI–AD yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani dan menggantinya dengan tokoh-tokoh simpatisan PKI atau setidaktidaknya tokoh-tokoh yang bukan lawan PKI, dan membentuk pemerintah Nasakom berupa Dewan Revolusi dengan mendemisionerkan kabinet Dwikora yang ada. Jika sasaran-antara sudah tercapai akan dicapai sasaran sesungguhnya, yakni secara terang-terangan merebut kekuasaan Negara dan mengganti Pancasila serta UUD 1945. Kepada gerakan itu yang digambarkan sebagai suatu usaha bersama kekuatan-kekuatan "progresif revolusioner", diberikan nama Gerakan 30 September sesuai dengan saat mereka mulai bergerak. Untuk memimpin Gerakan 30 September, D.N.Aidit menunjuk Syam (Kamaruzaman), Ketua Biro Khusus PKI.

Pada tanggal 1 Oktober sebelum subuh, Gerakan 30 September (G 30 S PKI) beraksi. Letnan Jenderal A.Yani, Menteri/Panglima TNI–AD, seorang pahlawan gerilya yang terkenal dalam Perang Kemerdekaan dan panglima operasi yang dalam waktu beberapa hari berhasil menduduki daerah pusat pemberontakan PRRI di Sumatra Barat, ditembak mati di rumahnya oleh gerombolan penculik G 30 S/PKI dan kemudian dibawa ke Lubang Buaya tempat pembunuhan yang sudah

mereka sediakan. Mayor Jenderal Haryono, Deputy Khusus juga dibunuh di rumahnya lalu dibawa ke Lubang Buaya sedangkan Mayor Jenderal Suprapto, Deputy Pembinaan, Mayor Jenderal S.Parman, Asisten I, Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten 4, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, Direktur Kehakiman/Oditur Jenderal, diculik dan dibawa ke Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Jenderal A.H. Nasution, Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dapat meloloskan diri, tetapi putrinya yang berusia 5 tahun ditembak oleh gerombolan G 30 S/PKI sehingga kemudian meninggal, sedangkan ajudannya Letnan satu Pierre Tendean diculik dan dibawa ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya para perwira yang masih hidup dianiaya dengan senjata tajam dan popor senapan untuk akhirnya dibrondong dengan tembakan dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di tempat itu dan kemudian ditimbun dengan sampah. Kesemuanya itu dihadiri oleh seorang anggota Polisi yang kebetulan mereka culik dari jalan yang mereka liwati dan mereka tawan di Lubang Buaya. Anggota Polisi itulah yang kemudian berhasil meloloskan diri dan menunjukkan sumur tua itu kepada pasukan-pasukan yang mencarinya. Seorang bintara Polisi lain bernama Karel Satsuit Tubun telah gugur dalam suatu pergulatan dengan gerombolan yang mau menculik Jenderal Nasution.

Di Jawa Tengah, G 30 S/PKI merebut kekuasaan di Markas Kodam VII/Diponegoro dan Markas Korem 072 di Yogyakarta. Komandan Korem 072 Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya, Letnan Kolonel Sugijono dibunuh oleh para pemberontak.

Di Jakarta, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) setelah menerima laporan dari stafnya dan membuat perkiraan keadaan, segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kekuasaan Pemerintah di ibukota. Pada malam hari itu juga Jenderal Soeharto telah dapat menguasai keadaan di pusat kota dan mengucapkan pidato di depan corong RRI yang menjelaskan kejadian-kejadian di ibukota pada hari itu dengan penegasan bahwa situasi telah dikuasai. Pidato radio itu meruntuhkan semangat kaum pemberontak di luar ibukota, khususnya di Jawa Tengah.

Keesokan harinya lapangan-udara Halim yang dijadikan basis G 30 S/PKI direbut oleh pasukan Resimen Parakomando Angkatan Darat (RPKAD) dan pasukan-pasukan pemberontak

Perpustakaan
Direktorat Pembinaan Kesejarah dan Purbakala

bubar, baik yang berasal dari ABRI maupun yang berasal dari Pemuda Rakyat dan Gerwani (ormas PKI). Dalam hari-hari berikutnya Jenderal Soeharto mengirimkan pasukan RPKAD ke Jawa Tengah dan juga disana kekuasaan G 30 S/PKI runtuh. [260]

260 Pusat Sejarah Angkatan Bersendjata, *40 hari Kegagalan G. 30 S.*, Jakarta, 1965 hal. 47 - dst. Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *The Coup attempt of the September 30th movement*, Jakarta 1968.

BAB II
JAMAN JEPANG

A. PERUBAHAN SOSIAL DAN MOBILITAS SOSIAL

1. Mobilitas sosial kaum muda

Masa pendudukan Jepang yang berlangsung tiga setengah tahun itu menggoncangkan bukan hanya sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda, melainkan juga struktur masyarakat Indonesia sendiri. Dalam masa ini terjadi perubahan sosial yang besar, baik di kota-kota maupun di desa-desa yang mengubah struktur yang semula sama dengan yang terdapat pada akhir jaman Hindia Belanda. Perubahan itu terlihat dari kenyataan adanya golongan yang naik statusnya dan kebalikan dari itu ada golongan yang statusnya turun, bahkan muncul golongan baru, yaitu kaum muda yang turut memegang peranan penting dalam masyarakat pada waktu itu.

Perubahan itu timbul dari atas, artinya tercipta berdasarkan kepentingan pemerintahan pendudukan Jepang. Kepentingan itu meliputi hal-hal yang berhubungan dengan propaganda untuk mempengaruhi rakyat, kebutuhan akan tenaga-tenaga untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan untuk keperluan perang. Kebutuhan itu dipenuhi melalui golongan nasionalis "sekuler", golongan nasionalis Islam dan kaum muda. Karena itu status ketiga golongan ini menjadi naik.

Perubahan sosial yang tercipta berdasarkan kepentingan Jepang itu tidak merata untuk seluruh Indonesia. Perobahan banyak terjadi di pulau Jawa yang dikuasai oleh Angkatan Darat (Rikugun). Sebaliknya di Sumatra yang juga diperintah oleh Angkatan Darat dan di daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut (Kaigun), perubahan itu tidak sebesar seperti terjadi di Jawa. Selama pemerintahan Jepang di Indonesia tidak terdapat kesatuan dalam administrasi pemerintahan. Dibandingkan dengan pemerintahan Angkatan Laut di Kalimantan dan Indonesia bagian timur dan bahkan dibandingkan dengan pemerintahan militer di Sumatra, pemerintahan militer di Jawa lebih banyak memberikan kesempatan kepada orang Indonesia

untuk bergerak, meskipun dalam batas-batas yang tidak membahayakan keamanan Jepang.[1]

Golongan yang terutama mendapat perhatian dari pemerintah pendudukan Jepang yalah golongan pemuda. Mereka berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda, dan ada yang berasal dari kota dan ada pula yang berasal dari pedesaan. Ada yang mendapat pendidikan yang cukup misalnya pernah duduk di sekolah menengah, tetapi ada juga yang rendah pendidikannya, yakni hanya berpendidikan sekolah dasar. Perhatian Jepang dicurahkan kepada kaum muda ini karena mereka pada umumnya memiliki sifat yang giat, penuh semangat dan biasanya masih diliputi idealisme. Mereka belum sempat dipengaruhi oleh alam pikiran Barat. Karena memiliki sifat-sifat yang demikian, segala propaganda dari pihak Jepang diduga akan mudah ditanamkan kepada mereka. Misalnya propaganda yang dilancarkan Jepang pada waktu pembentukan Gerakan Tiga A seperti yang dikemukakan oleh ketuanya, Mr. Samsuddin, yang antara lain menyatakan bahwa orang Barat telah berabad-abad lamanya menjajah Asia sehingga rakyat menderita. Berkat Jepanglah maka penjajahan itu berhasil dihapuskan, sebab Jepang adalah Cahaya Asia, Pemimpin Asia, Pelindung Asia.[2] Propaganda semacam itu mudah ditangkap dan dimengerti oleh kaum muda. Apalagi Jepang sering mengemukakan, bahwa Jepang adalah orang Asia dan sebagai orang Asia mereka senasib dengan orang-orang Asia lainnya yang dianggap sebagai saudaranya. Dengan propaganda yang demikian pada mulanya pemuda tidak merasakan adanya perbedaan antara orang Jepang dengan orang Indonesia. Semboyan-semboyan seperti "Jepang-Indonesia sama-sama" atau "Jepang saudara tua" memukau golongan muda khususnya dan masyarakat luas umumnya. Persamaan dengan Jepang itu dianggap sebagai perubahan baru yang tidak pernah terjadi semasa pemerintahan Belanda di mana diskriminasi rasial jelas terasa.

Sehubungan dengan sifat kaum muda itu, maka salahsatu pelajaran yang ditekankan kepada mereka yalah *seisyin* atau semangat. Semangat yang diutamakan yalah semangat satria atau *busyido* yakni berbakti kepada tuannya atau pemimpinnya dan

---

1 George S. Kanahele, The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence, A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for the degree of Doctor of Philosophy 1967, bab. III.

2 *Pandji Poestaka*, 2 Mei 2602 (1942), No. 4, hal. 118.

orang tuanya. Selain itu ditekankan pula perlunya disiplin dan diberantasnya rasa rendah diri serta semangat budak.[3] Berlawanan dengan tujuan Jepang dalam hal penanaman semangat yang demikian itu, ternyata hal itu kemudian merupakan senjata di tangan pemuda Indonesia ketika mempertahankan kemerdekaan. Malahan senjata itu ditujukan pula terhadap Jepang sendiri, misalnya dalam pemberontakan Peta Blitar di tahun 1945.

Salahsatu media yang dipakai untuk mempengaruhi kaum muda ialah media pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Yang dimaksud dengan pendidikan umum ialah lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada sejak sebelum Jepang datang, seperti sekolah rakyat (sekolah dasar) dan sekolah menengah. Sedangkan dengan pendidikan khusus dimaksudkan kursus-kursus yang diadakan oleh Jepang.

Di antara kursus-kursus yang diadakan Jepang untuk menanamkan semangat pro Jepang di kalangan kaum muda itu ialah Barisan Pemuda Asia Raya di Jakarta yang diresmikan pembentukannya dalam bulan Agustus 1952. Lama kursus ini tiga bulan. Kepada para peserta kursus ditekankan pentingnya semangat, kemauan dan keyakinan karena mereka diharapkan akan menjadi pemimpin dari pemuda-pemuda yang lain. Terhadap peserta tidak dilakukan pembatasan, artinya setiap pemuda boleh memasuki kursus tersebut.[4] Kursus lain yang bersifat lebih khurus lagi adalah kursus yang diadakan oleh Gerakan Tiga A yang disebut *San A Seinen Kunrensyo* dan diresmikan pada bulan Juli 1942. Lama kursus ½ bulan. Berbeda dengan kursus di atas, kursus ini lebih bersifat khusus, yakni ditujukan kepada para pemuda yang pernah turut dalam salahsatu organisasi, misalnya kepanduan. Mereka ditempatkan dalam asrama. Selain pendidikan yang berhubungan dengan disiplin dan semangat, kepada mereka juga diajarkan pekerjaan sehari-hari, seperti memasak, membersihkan rumah serta berkebun. Selain itu juga diajarkan mata pelajaran bahasa Jepang.[5]

Situasi perang di tahun 1943 mulai berubah. Dari sikap ofensif, Jepang beralih ke sikap defensif. Pukulan-pukulan Serikat di daerah Pasifik mulai dirasakan terutama sejak pertem-

---

3 Drs. O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia menentang fasisme Djepang*, Djakarta, hal. 93.

4 *Almanak Asia Raya*, 2603 (1943), hal. 161.

5 *Pandji Poestaka*, No. 13, 4 Juli 2602 (1942) hal. 439 – 440.

puran di Laut Karang (Mei 1942) dan Guadalcanal (Agustus 1942). Jepang menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan pendudukannya yang luas itu mereka memerlukan dukungan dari penduduk di daerah masing-masing. Karenanya sejak itu Jepang mulai lebih intensif mengumpulkan dan mendidik kaum muda Indonesia. Untuk itu pada tanggal 9 Maret 1943 diresmikan berdirinya gerakan *Seinendan* (Barisan Pemuda). Pelantikan Gerakan *Seinendan* yang disebut juga *Djawa Seinendan* ini dilakukan pada tanggal 29 April 1943. Anggautanya tercatat sebanyak 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa.[6] Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan itu bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda, agar dapat menjaga dan mempertahankan tanahairnya dengan kekuatan sendiri. Maksud yang disembunyikan yalah agar dengan demikian Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat angkatan perangnya melawan Sekutu, seperti yang tercantum dalam peraturan *Djawa Seinendan*, yang untuk mempercepat tercapainya kemenangan akhir dari perang dewasa itu.[7] Kepada anggauta *Seinendan* diberikan latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri, maupun untuk penyerangan.[8] Pemuda yang diperbolehkan masuk hanya pemuda yang berusia antara 14 tahun dan 25 tahun. Kemudian dalam bulan September 1943 batas umur ini diubah menjadi 14 sampai 22 tahun.[9] Pengerahan tenaga untuk perang ini tidak hanya untuk kaum laki-laki, tetapi kaum wanitapun diikutsertakan. Untuk keperluan itu dalam bulan Agustus 1943 dibentuk *Fujinkai* (himpunan wanita). Dalam keanggotaan, batas umur maximum tidak ditentukan, tetapi batas minimum ditetapkan, yaitu 15 tahun .[10] Kepada kaum wanita ini juga diberikan latihan-latihan militer.

Di samping *Djawa Seinendan*, para pemuda ada juga yang dimasukkan ke dalam kelompok khusus dan mendapat pendidikan untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Kelompok khusus ini disebut *Keibodan*, (barisan-bantu polisi). Umur anggota *Keibodan* lebih tua daripada umur anggota *Seinendan*. Batas umur anggota *Keibodan* yalah antara 23 dan 35 tahun.[11] Yang

6 *Kan Pō*, No. 10, th. II, 10 Januari 2603 (1943). hal. 43.
7 *Djawa Seinendan*, Jakarta, 2603 (1943).
8 *Atoeran-atoeran tentang Seinendan*, Jakarta, 2605 (1945), hal. 36 – 40.
9 *Ibid*, hal. 4 dan 41.
10 *Kan Pō*, No. 26 th. II, 10 September 2603 (1943).
11 *Ibid*, No. 18, th. II, 10 Mei 2603 (1943)

dapat diterima menjadi angggota *Keibodan* yalah semua laki-laki dari setiap *ku* (desa), yang dinyatakan berbadan sehat, kuat dan berkelakuan baik. Jumlah pemuda yang memasuki *Keibodan* lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang memasuki *Seinendan*, yakni 28.000 untuk *Keibodan* 50.000 sampai 60.000 untuk *Seinendan*.[12]

Satu hal harus dicatat dalam pembentukan *Keibodan* ini. Jepang berusaha agar badan ini tidak dipengaruhi oleh golongan nasionalis. Hal itu terlihat dari kenyataan bahwa *Keibodan* dibentuk di desa-desa di mana golongan nasionalis kurang mempunyai pengaruh. Bahkan golongan nasionalis dari eselon bawahan pun tidak mempunyai hubungan dengan *Keibodan*, karena badan ini langsung ditempatkkan di bawah pengawasan polisi. Hal itu berbeda dengan *Seinendan*. Dalam badan ini golongan nasionalis sekuler dapat menanamkan pengaruhnya dan dengan demikian dapat mengisi jiwa pemuda dengan semangat nasionalisme. Bahkan di markas besar *Seinendan* duduk beberapa orang nasionalis muda seperti Sukarni, Abdul Latif dan lain-lain.[13]

Selain di Jawa, kedua badan ini dibentuk pula di Sumatra dan di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatra *Keibodan* ini dikenal dengan nama *Bogodan*. Berbeda dengan di Jawa, di Sumatra tidak terdapat suatu markas pusat; tiap-tiap *Syū* memimpin langsung organisasi sedaerah. Hal yang sama terdapat pula di daerah yang dikuasai Angkatan Laut. Di Kalimantan terdapat badan yang disebut *Borneo Konan Hōkōkudan*.

Hal lain yang penting dalam hal *Seinendan* dan *Keibodan* ini yalah bahwa badan-badan ini dibentuk meliputi seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok kecil, walaupun dengan nama yang berlain-lainan. Tidak pernah dalam sejarah Indonesia sebelumnya terjadi pengorganisasian pemuda secara besar-besaran seperti itu. Di samping itu terdapat pula barisan semi-militer dari kaum muda Islam yang disebut Hisbullah dan beranggota hanya 500 orang.[14]

Memasuki tahun 1944, keadaan perang bagi Jepang semakin kritis. Satu demi satu daerah pendudukan Jepang jatuh ke tangan Sekutu dan serangan mulai diarahkan langsung ke negeri

---

12 M.A. Aziz, *Japan's Colonialism and Indonesia*, The Hague, 1955, hal. 178.
13 G.S. Kanahele, *op.cit.*, bab IV.
14 *Ibid.*

Jepang sendiri. Dalam suasana yang demikian itu, dalam bulan Maret 1944 Poetera digantikan oleh *Djawa Hōkōkai*. Seminggu setelah Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari, pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor *(Suisyintai)*. Barisan Pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama yang diawasi dan dibimbing oleh kaum nasionalis Indonesia. Ketua (*taicō*) barisan ini ialah Ir. Sukarno, wakilnya R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmodjo. Barisan Pelopor ini dapat dianggap sebagai "onderbouw" dari *Djawa Hōkōkai*.

Sebagai suatu kekuatan para militer, Barisan Pelopor melatih para pemuda, dengan latihan-latihan militer walaupun senjata yang dipakai adalah senapan-kayu atau bambu runcing. Mereka juga dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpin nasionalis dan bahkan dianjurkan kepada mereka agar meneruskan pidato-pidato itu kepada rekan-rekannya yang tidak hadir. Setelah itu mereka juga dilatih tentang cara-cara menggerakkan massa rakyat, memperkuat pertahanan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Melalui Barisan Pelopor ini golongan pemuda terpelajar akhirnya terjun dalam kegiatan-kegiatan di antara massa rakyat dan sebaliknya golongan pemuda yang tidak terpelajar dapat menyesuaikan diri dengan-golongan terpelajar ini untuk bersama-sama mengobarkan semangat nasional dan rasa persaudaraan.[15]

Sejak awal masa pendudukan, pemerintah Jepang telah memulai memikirkan untuk memberi latihan-latihan militer kepada penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan negeri-negeri yang telah mereka duduki. Sehubungan dengan itu, dalam bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang isinya memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang *(heiho)*. Para *heiho* ini langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.[16] Syarat-syarat penerimaan ialah mereka yang berbadan sehat, berkelakuan baik dan berumur antara 18 – 25 tahun dan pendidikan terendah yalah sekolah dasar.[17] Walaupun *heiho* ini pada dasarnya hanya pembantu prajurit tetapi kemudian ketika perang

15 Benedict R.O.G. Anderson, *op.cit.*, hal. 30.
16 *Kaigun heiho*.
17 *Asia Raya*, 24 April 2603 (1943).

semakin menghebat, mereka diberi pula senjata bahkan ada yang dilatih untuk melayani meriam-meriam penangkis serangan udara.[18]

Status *hetho* ini dipandang tidak terlalu tinggi oleh masyarakat, lain halnya dengan *Peta (Tentara Pembela Tanah Air)* yang dibentuk secara formil dengan *'Osamu Seirei* No. 4, tanggal 3 Oktober 1943.[19] Dari badan ini muncul suatu golongan yang memperoleh pendidikan militer dalam zaman Jepang, dan merekapun menjadi kekuatan sosial baru dalam masyarakat Indonesia. Perhatian penduduk terhadap Peta ternyata sangat besar, terutama dari pemuda-pemuda yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan tergabung dalam *Seinendan* [20]

Anggota Peta berasal dari berbagai-bagai golongan dalam masyarakat. Perwira-perwira yang menjadi komandan batalyon biasanya dipilih dari pemimpin masyarakat atau orang yang terkemuka di daerahnya seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atau kaum politikus. Mereka disebut *daidancō. Cudancō* atau komandan kompi dipilih dari guru-guru sekolah atau pegawai pemerintah yang kedudukannya lebih rendah dari yang disebut di atas. Sedangkan *syodancō* atau komandan peleton umumnya dipilih dari pelajar-pelajar sekolah menengah.[21] Sehingga yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan calon komandan batalyon pada umumnya bukanlah terdiri dari para pemuda yang masih bersekolah, melainkan tokoh-tokoh yang oleh pejabat militer Jepang dianggap mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Misalnya K.H. Sjam'un adalah seorang kyai dari Banten dan Mustopo adalah seorang dokter gigi yang berasal dari keluarga bupati Kediri.[22]

Di kalangan masyarakat kedudukan dalam *Peta* dianggap kedudukan yang tinggi. Dalam kenyataannya, status mereka seringkali lebih tinggi dari seorang kepala daerah.[23] Apabila seseorang menjadi anggota *Peta* maka statusnya menjadi naik.

---

18 *Asia Raya*, 16 Juli 2603 (1943).

19 *Boekoe Pengoempoelan Oendang-Oendang*. Disoesoen dengan peroebahan dan tambahan sampai penghabisan boelan 6 tahoen Syoowa 19 (2604). Jakarta 2604 (1944), hal. 122.

20 Nugroho Notosusanto, *The Peta Army in Indonesia* (1943 – 1945) Jakarta, 1971, hal. 17.

21 *Ibid*, hal. 15 – 17.

22 B.R.O'G. Anderson, *op.cit.*, hal. 21.

23 Prof. Sudjito Sosrodihardjo SH, MA, *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa: Suatu Analisa*, Yogyakarta, 1968, hal. 106.

2. *Mobilitas sosial golongan lain*

Kelompok sosial yang juga mengalami perubahan status dalam zaman Jepang yalah kelompok guru. Bila dalam zaman Hindia Belanda tidak semua guru diperbolehkan mengajar anak priyayi, dalam zaman Jepang tidak terdapat perbedaan antara sekolah untuk anak priyayi dan bukan priyayi. Guru-guru yang pada masa sebelumnya hanya diperbolehkan mengajar di sekolah dasar untuk anak-anak kalangan bawah, diperbolehkan mengajar anak-anak kalangan atas. Guru-guru yang tadinya mengajar anak priyayi di sekolah dasar, kemudian harus mengajar di sekolah menengah. Hal ini dengan sendirinya membangkitkan keberanian di kalangan mereka untuk mencapai kedudukan yang lebih terpandang dalam masyarakat. Tatkala diadakan pendaftaran untuk menjadi perwira *Peta*, para gurulah yang mendaftarkan dirinya; misalnya saja Panglima Besar Jenderal Soedirman adalah seorang guru sebelum menjadi *daidancō* Peta.

Selain karena kedudukan yang dipandang tinggi oleh masyarakat, *Peta* menarik perhatian pula karena memiliki lambang-lambang kebesaran, antara lain pakaian seragam yang lengkap dengan pedang samurai yang sebenarnya merupakan lambang kebesaran perwira Jepang. Selain itu mereka juga menerima penghasilan yang lebih besar daripada penghasilan pegawai lainnya.

Jepang menyadari bahwa golongan ulama mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat Indonesia, terutama di desa-desa. Pendapat mereka umumnya lebih didengar daripada pendapat golongan priyayi. Pengaruh yang demikian diperlukan oleh Jepang untuk melakukan propaganda. Karena itu Jepang meningkatkan status golongan ini sebagai guru-guru di desa untuk menjadi pemimpin rakyat yang terkemuka. [24]

Dalam hal mengolah para ulama ini, Jepang mengadakan hubungan secara langsung, tidak melalui pemimpin-pemimpin Islam yang ada di Jakarta. Untuk tujuan itulah Kolonel Horie, kepala *Syumubu* (Kantor Urusan Agama) dengan para pembantunya melakukan perjalanan keliling Jawa, mengadakan perundingan-perundingan dengan ulama-ulama dan kyai-kyai di tempat-

---

[24] H.J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun*. The Hague, 1958, hal. 133. Selanjutnya mengenai hal-ihwal golongan Islam dibawah pendudukan Jepang, kami banyak bertumpu kepada buku ini.

tempat yang dikunjunginya. Kepada golongan ini, yang oleh pemerintah Belanda dulunya dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah daripada golongan priyayi, golongan nasionalis sekuler maupun elite Islam di kota-kota, ditanamkan keyakinan bahwa mereka mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat.

Untuk menanamkan semangat pro Jepang, maka pemerintah Jepang mengadakan latihan untuk para ulama dan kiyai tersebut. Dalam bulan Juli 1943 di Jakarta dilangsungkan latihan pertama yang dihadiri oleh 50 orang ulama yang dipilih dari tiap-tiap *Syū* (keresidenan), *Kōci* (daerah istimewa) di Jawa Tengah dan Jakarta *Tokubetsu Syi.* Latihan tersebut berlangsung satu bulan di bawah pengawasan *Syumubu*. Dari daftar matapelajaran terlihat bahwa hanya dua mata pelajaran yang berkenaan dengan agama Islam, sedangkan sepuluh matapelajaran berhubungan dengan hal-hal umum, dan pelajaran bahasa Jepang menduduki tempat teratas. [25] Tujuan latihan ini yalah supaya para peserta-mengetahui situasi dunia dan untuk mengobarkan semangat agar dapat memberikan bantuan sepenuhnya kepada pemerintah. Latihan serupa diadakan lagi dalam bulan Agustus dan November 1943. Hal itu merupakan hal yang tidak pernah terjadi dalam masa pemerintahan Belanda. [26]

Dalam zaman Jepang kepada para pemimpin agama bahkan diberikan kesempatan untuk menjadi bupati atau kepala daerah. Jabatan-jabatan yang demikian tidak pernah diberikan oleh pemerintah Belanda yang selalu mendasarkan kekuatannya pada golongan priyayi dan golongan adat. Dalam masa-masa permulaan itu kelihatan bahwa pengaruh golongan agama ternyata lebih besar daripada pengaruh golongan nasionalis sekuler. Sekalipun Poetera pernah mencapai puncak popularitasnya, namun organisasi ini hanya dikenal pada umumnya di kota-kota dan tidak berakar di desa-desa, berlainan halnya dengan pengaruh yang diperlihatkan oleh golongan Islam. Bahkan dalam panji-panji Peta pun yang dilukiskan bukan bendera Merah Putih, tetapi lambang Islam di atas lambang matahari terbit.

Latihan-latihan yang diadakan di Jakarta bukannya tidak berhasil untuk membangkitkan kebencian umum dari golongan

25 *Ibid*, hal. 134.

26 "Pertemoean dengan Kyai-kyai diseloeroeh Djawa", *Pandji Poestaka*, 15 Agustus 1943, hal. 810.

Islam terhadap imperialis Barat. Perkembangan yang terjadi di kalangan golongan Islam selama tahun 1943 dihasilkan oleh insiatif Jepang, tidak digerakkan oleh salahsatu organisasi Islam, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) misalnya. *Syumubu* dalam usaha untuk mendapatkan bantuan golongan Islam, ternyata berhasil melampui kegiatan MIAI.

Di tingkat pemerintahan pusat golongan Islam memperoleh pula kesempatan-kesempatan yang luas. Dalam badan-badan seperti *Cūo Sangi In* maupun *Syū Sangi Kai* banyak orang Islam yang duduk sebagai anggota. Bila dalam masa pemerintahan Belanda, dalam badan legislatif yang terdiri dari 60 orang anggota, golongan Islam hanya diwakili oleh seorang wakil, di zaman Jepang dalam *Cūo Sangi In* yang beranggotakan 43 orang, golongan Islam diwakili oleh 6 orang tokoh-tokoh Islam, yakni diantaranya K.H.A. Halim, ulama dari Cirebon, K.H. Wahid Hasjim, ketua Nahdatul Ulama, dan K.H. Fatchurrachman pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Jelaslah bahwa pada zaman Jepang ini golongan Islam bebas berpolitik asal pro Jepang. Hal ini tampak misalnya dengan dibentuknya Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam bulan Nopember 1943 dan ikutsertanya Masjumi dalam *Djawa Hōkōkai.* Ketua Masjumi sendiri, K.H.Asj'ari diangkat menjadi penasehat *Gunseikan.*

Dengan naiknya status itu tidak berarti bahwa golongan Islam selalu mengekor kepada politik pemerintah Jepang. Banyak hal-hal yang berlawanan dengan prinsip-prinsip agama yang dipraktekkan oleh Jepang. Hal ini menyebabkan sebahagian tokoh-tokoh Islam menarik diri dari kerjasama dengan Jepang, bahkan pemberontakan yang dipimpin golongan ulama pun terjadi di Singaparna dan di Aceh.

Pada mulanya Jepang membekukan segala kegiatan politik di Indonesia, tetapi kemudian kebijaksanaan itu mereka ubah. Kerjasama dengan nasionalis sekuler ternyata mereka perlukan untuk dua hal, yakni untuk menarik simpati rakyat dan untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan. Tindakan Jepang membebaskan tokoh-tokoh politik yang dulunya ditawan oleh Pemerintah Belanda, menunjukkan hal itu. Sebaliknya golongan nasionalis bersedia bekerjasama dengan perhitungan dapat mengembangkan perasaan kebangsaan di kalangan rakyat dengan kedok membantu Jepang, di samping pertimbangan-pertimbangan

keamanan dan keuangan.[27] Tetapi ada juga golongan nasionalis yang tidak bersedia bekerjasama, seperti Sjahrir dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Mereka lebih suka melakukan kegiatan di bawah tanah, sedangkan golongan yang sedia bekerjasama melakukan hal itu dengan tujuan mempergunakan segala usaha secara legal guna memperluas lapangan perjuangan kaum nasionalis.

Wadah bagi golongan nasionalis sekuler yalah pertama-tama Gerakan Tiga A yang dibentuk dalam bulan April 1943. Ketika dalam bulan Agustus dalam tahun yang sama *Saikō Syikikan* mengumumkan garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah Jepang dalam mana orang-orang Indonesia memperoleh hak untuk ambil bagian di dalamnya maka kesempatan itu menjadi bertambah luas. Realisasi dari rencana itu berupa pembentukan badan-badan pertimbangan, baik di pusat maupun di daerah. Golongan nasionalis sekuler duduk dalam badan-badan tersebut hanya merupakan penasehat saja, dan tidak aktif dalam politik pemerintahan, tetapi kedudukan anggota-anggotanya dalam masyarakat dipandang tinggi. Ketika pemerintahan Jepang menganggap Gerakan Tiga A kurang memenuhi aspirasi mereka, badan itu dibubarkan dan dibentuk badan baru yang dinamakan Poesat Tenaga Rakyat (Poetera). Tujuan Jepang ialah untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektuil agar mengerahkan tenaganya untuk membantu Jepang. Empat orang tokoh muncul sebagai pemimpinnya, yakni Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Mas Mansur. Bahwa lama-kelamaan golongan nasionalis mendapat tempat yang tinggi dalam pemerintah Jepang terbukti dari diangkatnya beberapa orang Indonesia sebagai penasehat di departemen-departemen.

Di luar pulau Jawa golongan nasionalis ternyata kurang mendapat tempat dalam sistim pemerintahan setempat. Hal itu disebabkan oleh kebijaksanaan penguasa setempat. Di Sumatra misalnya tidak dapat dibentuk sebuah organisasi yang akan menjadi wadah bagi golongan nasionalis. Penguasa di Sumatra berpendapat bahwa Sumatra tidak menggambarkan suatu homogenitas, sebab terdiri dari berbagai-bagai suku, bahasa dan adat-istiadat. Karenanya yang diizinkan hanyalah organisasi-organisasi lokal. Ketika di Jawa dibentuk *Poetera*, Sumatrapun ingin membentuk organisasi yang sama. Untuk itu dalam bulan

---

27 G.S. Kanahele, *op.cit.* bab IV.

Juli 1943 Moh. Sjafe'i dan Chatib Sulaiman mengajukan surat permohonan kepada pemerintah Jepang, tetapi pembentukan itu tidak diizinkan. Barulah dalam bulan Maret 1945 konsesi politik diberikan untuk Sumatra dengan diizinkannya membentuk *Cūo Sangi In* Memang sejak semula Jepang berusaha menghalangi kegiatan kaum nasionalis di Sumatra.

Di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut perkembangan yang terjadi di Jawa juga tidak banyak diketahui. Penguasa-penguasa setempat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sengaja menutupi berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa yang dianggapnya berlawanan dengan kebijaksanaannya. Begitu pula mengenai pembentukan *Poetera*, pada umumnya golongan nasionalis di daerah-daerah tersebut tidak mengetahuinya. Di Makasar misalnya, berita tentang pembentukan *Poetera* ditutupi.[28]

Perubahan sosial menyentuh pula golongan priyayi dan golongan intelektuil. Yang dimaksud dengan golongan priyayi ialah golongan dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan dalam administrasi negara berdasarkan kelahiran atau keturunan.[29] Mereka biasanya termasuk golongan atas atau menengah dalam masyarakat Indonesia dan seringkali menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan.[30] Dengan terbukanya kesempatan menjadi pegawai negeri pada zaman Belanda, pengertian priyayi meluas dalam arti kata pegawai negeri.[31] Umumnya pada masa penjajahan Belanda yang berhasil menjadi pegawai adalah golongan priyayi dan oleh karena itu kedudukan pegawai negeri yang pada umumnya adalah juga priyayi, menjadi tinggi. Dalam zaman Jepang, golongan ini merosot dan gaji pejabat-pejabat tingkat pemerintah juga diturunkan.[32]

Selain itu karena terbukanya kesempatan kerja bagi setiap orang, maka dalam masyarakat terjadi mobilitas vertikal, yaitu golongan bawah bisa menyamai kedudukan golongan priyayi. Lapangan pekerjaan banyak terbuka, terutama di bidang administrasi pemerintahan, sebab Jepang pada waktu mendarat hanya

---

28 G. S. Kanahele, *op.cit.*, hal. 74.

29 Cf. Henry Pratt Fairchild Ph.D. LLD (ed.), *Dictionary of Sociology*, Philosophical Library, New York.

30 Cf. Clifford Geertz, *The religion of Java*, New York, 1960, part III.

31 Soedjito, *op.cit.*, hal. 18.

32 S.M. Gandasoebrata, *An Account of the Japanese Occupation of Banjumas Residency, Java, March 1942 to August 1945*, Ithaca, 1953, hal. 6.

membawa kira-kira 300 orang pegawai sipil, sedangkan pegawai-pegawai Belanda banyak yang ditawan.

Kedudukan kaum priyayi ini juga terdesak oleh kaum intelektuil atau kaum terpelajar. Golongan ini yalah orang yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan barat sehingga sedikit banyak terpengaruh oleh cara-cara barat. Pada jaman Belanda kebanyakan dari golongan ini bergabung dalam pergerakan nasional, walaupun ada juga yang bekerja di lapangan pemerintahan. Mereka membentuk gerakan atau organisasi dengan tujuan memperoleh kemerdekaan bagi Indonesia.[33] Dalam masa pendudukan Jepang keadaan ini berubah. Golongan intelektuil mendapat posisi yang lebih baik terutama pada akhir masa pendudukan Jepang. Mereka berhasil menyaingi golongan priyayi. Selain disebabkan oleh karena Jepang sedikit sekali membawa tenaga-tenaga sipil, sedikit sekali di antara mereka yang memahami adat-istiadat dan bahasa dari daerah-daerah yang mereka kuasai.

Dalam jaman Jepang ini golongan minoritas, dalam hal ini golongan Indo-Eropa, peranakan Cina, peranakan Arab, dan lain-lain, mengalami perubahan pula. Kedudukan mereka merosot dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kalau dalam sistim masyarakat kolonial zaman Belanda, kedudukan mereka lebih tinggi dari kedudukan bangsa Indonesia yang menempati lapisan terendah, dalam zaman Jepang sebaliknyalah yang terjadi. Banyak orang-orang Indo-Eropa yang pada sebelumnya malu dengan statusnya sebagai golongan Indo, dalam masa ini dengan bangga menyatakan dirinya orang peranakan, yakni berasal dari ayah atau ibu Indonesia.[34] Di lapangan pendidikan golongan ini pun memperoleh pembatasan-pembatasan pula. Orang-orang Indo-Eropa yang beruntung tidak dimasukkan ke dalam kamp interniran, hanya sedikit yang diizinkan memasuki sekolah-sekolah yang didirikan oleh Jepang, walaupun pada masa kemudian pembatasan itu agak diperlonggar. Orang-orang peranakan Cina diizinkan memasuki sekolah-sekolah dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya sekolah-sekolah terbuka lebar untuk orang Indonesia, suatu hal yang tak mungkin diperoleh dalam masa penjajahan Belanda.

---

33. J.D. Legge, *Indonesia*, New Jersey, 1964, hal. 119.
34. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. 's Gravenhage, 1959, hal. 154.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Dengan cara demikian kedudukan golongan peranakan menjadi merosot. Dibidang perdagangan kegiatan mereka dibatasi pula dan Jepang berusaha mengembangkan kegiatan dagang orang Indonesia. Dalam hal ini yang banyak terpukul yalah golongan Cina. Karena perdagangan legal agak dibatasi, maka golongan ini melakukan kegiatan dagang secara ilegal. Golongan Indo-Eropa yang turut tertawan, hidup dengan jalan menjual barang-barang mereka atau turut serta dalam kegiatan dagang ilegal yang dilakukan oleh orang-orang Cina. [35]

Golongan lain yang hampir-hampir tidak dikenal pada masa pemerintahan Belanda timbul sebagai akibat dari politik perang Jepang. Keadaan ekonomi sangat parah sebab segala penghasilan dipakai untuk kepentingan perang.. Kekayaan rakyat dikuras sampai kepada pengambilan pagar-pagar besi pekarangan rumah penduduk. Kemelaratan timbul dan kelaparan berjangkit hampir di seluruh Indonesia. Akibatnya timbul golongan yang disebut "kere" atau jembel, terutama di kota-kota besar. Mereka ini merupakan golongan yang sengsara di samping golongan lain yang dikenal dengan nama *romusya*, yakni mereka yang dipekerjakan dengan paksa oleh pihak Jepang.

Untuk membangun sarana-sarana pertahanan seperti benteng-benteng, jalan-jalan raya dan sebagainya, Jepang memerlukan tenaga kasar. Selain itu tenaga ini juga diperlukan untuk bekerja di pabrik-pabrik atau tempat-tempat produksi lainnya. Tenaga-tenaga ini di perdapat di desa-desa. Pulau Jawa sebagai pulau yang padat penduduknya memungkinkan pengerahan tenaga tersebut secara besar-besaran. Pada mulanya tugas-tugas yang dilakukan itu bersifat sukarela. Karena pengerahan tenaga tersebut tidak begitu sukar dilakukan, karena orang masih dipengaruhi oleh propaganda untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Bahkan di beberapa kota terdapat barisan-barisan *romusya* sementara untuk bekerja di tempat-tempat dan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya dalam bulan September 1944 sejumlah 500 orang *romusya* sukarela yang terdiri dari pegawai tinggi dan menengah, bekerja selama satu minggu di suatu tempat yang penting. Mereka berasal dari Jakarta dan dipimpin sendiri oleh Ir. Sukarno. Para pekerja itu bekerja dalam apa yang disebut "Pekan Perjuangan mati-matian". [36]

35 *Ibid*, hal. 156.
36 *Djawa Baroe*, 1 Oktober 1944, hal. 16 – 17.

Tetapi lama-kelamaan pengerahan tenaga yang bersifat sukarela berubah menjadi paksaan. Beribu-ribu *romusya* dikirim ke luar Jawa bahkan ke luar Indonesia, seperti Birma, Muangthai. Vietnam dan Malaya. Tenaga *romusya* ini pada umumnya adalah petani di desa-desa, sehingga hal itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan ekonomi desa. Mereka diperlakukan sangat buruk. Kesehatan yang tidak dijamin, makanan yang tidak cukup dan pekerjaan yang berat, menyebabkan banyak para *romusya* ini meninggal di tempat kerjanya. Untuk menghilangkan ketakutan di kalangan penduduk karena sudah menjadi rahasia umum bahwa para *romusya* diperlakukan sangat buruk, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye yang menganggap *romusya-romusya* itu sebagai pahlawan. Di dalam kampanye itu mereka mendapat julukan "prajurit ekonomi" atau "pahlawan pekerja" yang digambarkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk angkatan perang Jepang. Mereka tidak boleh disebut kuli. *"Romusya* adalah juga prajurit dan sumbangan mereka terhadap usaha perang sangat dihargai". Akan tetapi kenyataan adalah sebaliknya, di mana diantara 300.000 tenaga *romusya* yang dikirim ke luar Jawa, diperkirakan 70.000 orang dalam kondisi yang menyedihkan. [37]

Pengerahan tenaga *romusya* tersebut telah membawa akibat penting dalam struktur sosial di Indonesia. Karena kaum tani yang dikerahkan, banyak pemuda-pemuda yang menghilang dari desanya pergi ke kota karena takut akan dikirim sebagai *romusya*. Pemerintah Jepang bertindak lebih jauh lagi, di mana hampir semua laki-laki yang berbadan sehat diambil. Yang tinggal di desa hanyalah kaum wanita, anak-anak dan orang-orang yang cacad. Para *romusya* yang dapat mengatasi kesengsaraan yang mereka alami maupun pemuda-pemuda yang lari ke kota-kota, sesudah pengerahan Jepang kembali ke desanya dengan pengalamannya yang banyak. Baik karena pengerahan *romusya*, maupun karena datangnya pengaruh gagasan-gagasan baru oleh mereka yang kembali, desa-desa menjadi terbuka dari isolasinya.

Desa juga mengalami perobahan disebabkan suatu hal lain, yaitu dibentuknya *tonarigumi* (rukun tetangga). Maksud yang sebenarnya dari pembentukan *tonarigumi* yalah untuk meningkatkan bantuan kepada usaha perang Jepang. Seperti tercantum

---

37 K.A. de Weerd, *The Japanese Occupation of the Netherlands Indies*, 1946, hal. 73.

dalam berita pembentukannya, tujuannya antara lain adalah agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil buminya dan menyerahkannya untuk negeri. [38]

Kesemuanya itu: pengerahan *romusya, exodus* pemuda desa karena takut, dan juga karena turut-sertanya pemuda desa dalam organisasi pemuda seperti *Seinendan* dan *Keibodan* serta menjadi prajurit Peta atau *heiho* yang berakibat keluarnya mereka dari desa masing-masing untuk pergi ke kota-kota, memberikan pandangan baru kepada mereka tentang dunia di luar desanya. Bagi mereka yang keluar, mobilitas vertikal terjadi, karena mereka mendapat status yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika menjadi petani di desanya.

B. EKONOMI PERANG

1. Penguasaan dan pengawasan

Dalam rencana penguasaannya terhadap Asia Tenggara (yang disebut "Daerah Selatan"), oleh Jepang yang dipandang penting adalah menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Penggunaan daerah sumber ini menjadi tujuan utamanya. Dalam rencananya, "Daerah Selatan" dibagi atas dua wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B. Wilayah A adalah beberapa koloni Inggris, Belanda dan Amerika Serikat, yaitu Malaya, Kalimantan Utara, Hindia Belanda dan Filipina. Wilayah B meliputi beberapa koloni Perancis di daratan Asia Tenggara, yakni Vietnam , Laos, Kamboja. Khususnya di wilayah A, Jepang tidak semata-mata bertujuan menguasai wilayah sumber ini tetapi juga sebagai usaha untuk memotong garis perbekalan musuhnya yang bersumber dari wilayah ini. Telah diperkirakan bahwa perang akan berlangsung lama, penguasaan wilayah yang kaya akan bahan mentah sangat meringankan beban yang dipikul oleh Jepang. Demikianlah rencana Jepang yang akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap penguasaan dan tahap kedua merupakan rencana untuk jangka panjang, yaitu menyusun kembali struktur ekonomi di wilayah tersebut di dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan-bahan untuk perang. Struktur ekonomi yang

38 *Kan Pō*, No. 34. th III, Januari 2604 (1944).

direncanakan terdiri dari wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.[39]

Pada bulan Maret 1942 Jepang berhasil merebut Hindia Belanda sesuai dengan rencana. Setelah pemerintah Hindia Belanda memperhitungkan bahwa invasi Jepang tidak dapat ditahan lagi, maka mulailah dilaksanakan aksi bumi-hangus. Obyek-obyek vital dihancurkan, yang sebagian besar terdiri atas aparat produksi. Akibatnya pada saat pertama pendudukan Jepang hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh.[40] Kehidupan ekonomi berubah dari keadaan normal menjadi ekonomi perang.

Sejalan dengan perkembangan keamanan pemerintah militer Jepang mengambil-alih semua bidang kegiatan dan pengawasan ekonomi. Langkah pertama adalah rehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transport, telekomunikasi dan lain-lainnya yang bersifat fisik. Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap kegiatan ekonomi dikeluarkan. Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang dan barang-barang yang disita dari musuh diperketat. Untuk mencegah-meningkatnya harga barang dan timbulnya pelbagai manipulasi secara setempat dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan hukuman yang berat bagi pelanggarnya.[41] Harta milik musuh, bekas milik musuh atau harta yang dibiayai dengan modal musuh disita dan menjadi hak milik pemerintah Jepang. Harta milik musuh yang disita antara lain perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan vital seperti: pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perusahaan transport. Khusus mengenai perkebunan dikeluarkan undang-undang No. 22/1942. Pada undang-undang itu dinyatakan, bahwa *gunseikan* (kepala pemerintahan militer) langsung mengawasi perkebunan-perkebunan kopi, kina, karet, teh. Pelaksanaan mengawasi perkebunan-

---

39 Syigetada Nisyijima, Koichi Kishi dkk, *The Japanese Military Administration in Indonesia* (terjemahan dari bahasa Jepang, Washington, 1963) hal. 114 – 115.

40 Sampai bulan Maret 1942 ditaksir ada 4000 aparat produksi dengan jumlah pekerja 325.000 orang, periksa Ir.F.J.H. Davis "Beknopt overzicht van den huidigen toestand der industrie in Nederlands-Indië" dalam *Economisch Weekblad*, No. 1 Th. XXII, 1 Februari 1946, hal. 2.

41 Misalnya di Yogyakarta. *Gunseibu* mengeluarkan maklumat, yang berkenaan dengan pengendalian harga. Makloemat *Gunseibu* No. 36 (2 Juli 1942) periksa *Kan Pō*, No. 1 Agustus 1942, hal. 23 – 24.

perkebunan tersebut diserahkan kepada sebuah badan pengawas yang dibentuk oleh *gunseikan*. Badan pengawas itu bernama *Saibai Kigyo Kanrikodan* (SKK). SKK ini selain bertindak sebagai pengawas juga bertindak sebagai pemegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan hasil perkebunan itu. Ditambah juga dengan memberikan kredit kepada perkebunan yang ditunjuk oleh *gunseikan* untuk direhabilitasi,[42] karena tidak semua jenis perkebunan diijinkan untuk direhabilitasi. Sebagai pelaksana penguasaan perkebunan-perkebunan itu ditunjuk beberapa perusahaan swasta Jepang. Tanpa petunjuk dari *gunseikan* semua pihak dilarang untuk melakukan rehabilitasi perusahaan perkebunan. Larangan ini dikaitkan dengan kepentingan perang, karena tidak semua perkebunan dinilai sebagai usaha penunjang perang. Hanya beberapa jenis perkebunan saja yang mendapat perhatian dari pemerintah Jepang, khususnya karet dan kina.[43] Tetapi secara terbatas perkebunan kopi, teh dan tembakau, masih dipertahankan pengusahaannya. Kopi, teh dan tembakau diklasifikasi sebagai barang kenikmatan, yang kurang berguna bagi usaha perang, maka perkebunan ketiga jenis tanaman ini diganti tanamannya dengan tanaman istimewa,[44] yaitu penghasil bahan makanan dan jarak untuk pelumas. Di Jawa dilakukan dengan menebang pohon-pohon kopi. Di Sumatra diusahakan menanam padi pada bekas perkebunan tembakau.

SKK sebagai pemegang monopoli penjualan dan pembelian hasil perkebunan berakhir sesudah dikeluarkannya *Osamu Seirei* No. 30/1944. Aktivitas SKK diganti oleh *Kigyo Saibaien* (Penguasa Perkebunan); peranannya terbatas pada pengusahaan kebun yang ditunjuk oleh *gunseikan*.[45] Terutama kina yang merupakan bahan obat-obatan yang vital bagi perang, kelangsungan hidup perkebunannya diperhatikan benar dan dipelihara sebaik-baiknya. Pabrik obat-obatan dari kina yang pada zaman Hindia Belanda bernama Bandoengsche Kinine Fabriek (BKF diteruskan oleh maskapai swasta Jepang Takaco.[46]

Demikian pula tanaman karet juga dianggap penting. Di Jawa Timur hampir semua perkebunan karet dinyatakan terus

42 Oendang-oendang No. 22/1942, 5 Juli 1942, *Kan Pō*, No. 1 Th. I, Agustus 1942, hal. 3 dst.
43 *Ibid*, No. 52, Th. III, Oktober 1944, hal. 26
44 *Ibid*, No. 32, Th. II, Desember 1943, hal. 52, John O. Sutter, *Indonesianisasi*, New York, hal. 150.
45 John O. Sutter, *op.cit.*, hal. 1953.
46 *Ibid*, No. 44. Th. III, Juni 1944, hal. 5.

bekerja sebagai tanaman yang ditunjuk oleh *gunseikan*. Di Sumatra perkebunan karet yang direhabilitasi seluas 672.000 hektar yang terdiri dari 216 perkebunan. Tetapi di Kalimantan hasil karet menjadi surplus karena pengangkutannya sulit. Oleh karena karet dan kina dianggap sebagai barang penting, maka kerusakan perkebunan kina dan karet relatif kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Kina diperkirakan rusak 3% dan karet sampai 7%. [47]

Hasil perkebunan lainnya adalah gula. Industri gula diusahakan kembali dengan modal swasta Jepang. Sekalipun sebagian besar dari pabrik-pabriknya dibumihanguskan oleh Belanda, sebagian berhasil direhabilitasi. Akan tetapi dalam usaha pembukaannya kembali, Jepang kekurangan tenaga-tenaga ahli. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga ini personil ahli Belanda masih digunakan. Dari jumlah pabrik di Jawa yang semula 85 pabrik, yang berhasil direhabilitasi ada 13 pabrik.Sebagai badan pengawas industri gula oleh pemerintah Jepang dibentuk *Tōgyō Rengō kai* (Persatuan Perusahaan Gula). Karena persediaan gula di Jawa telah dianggap cukup dan yang diperkenankan menghasilkan surplus export hanya negeri Jepang dan Taiwan, maka produksi gula setiap tahunnya dikurangi. Persediaan itu sudah termasuk untuk kepentingan perang dan penduduk. Sampai tahun 1945 produksi gula di Jawa hanya mencapai 84.000 ton saja. [48] Karena itu *Gunseikan* mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 31/1944, yang menyatakan bahwa rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. [49] Alasan melarang ini untuk mengurangi jumlah gula yang beredar dalam masyarakat, juga untuk menekan produksi. Cara lainnya untuk menekan produksi gula adalah merubah pabrik-pabrik gula menjadi pabrik senjata atau membongkarnya dan memindahkan ke tempat lain untuk kepentingan perang. Selama itu perusahaan gula diserahkan kepada beberapa maskapai swasta Jepang yaitu: *Meiji Seito Kaisya, Okinawa Seito Kaisya, Taiwan Seito Kaisya* dan *Dai Nippon*

47 Untuk jelasnya prosentasi kerusakan dan penyusutan areal perkebunan adalah: karet 7%, teh 22%, kina 3%, kopi 22%, kelapasawit 16%, periksa Ir. Prillwitz, "De ondernemings-landouw tijdens de Japanse bezetting" dalam *Economisch Weekblad*, No, 1 Th. XII, Maret 1946, hal. 14 dst.

48 Ir. Sosrohadikoesoemo, "Kedoedoekan goela di Djawa", *Berita Perekonomian*. No. 1 Th.I, 15 Mei 1946 hal. 10–14. periksa juga Mr. G. Rodenburg, "De suiker industrie op Java tijdens de Japanse bezetting" *Economische Weekblad*, No. 5 Th. XII, 13 April 1946, hal. 38 – 39.

49 *Kan Pō*, No. 44, Th. III, Juni 1944, hal. 6.

Seito Kaisya. Untuk distribusi dan penjualannya dilakukan oleh *Djawa Hanbai Rengō Kumiai* (Koperasi Pusat Penjualan Gula Jawa). Sedangkan tambang-tambang yang penting khususnya minyak bumi pengusahaannya kembali dilakukan oleh *Mitsui Kabusyiki Kaisya.*

2. Keuangan, perdagangan dan industri

Di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan nilai gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya yalah agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang dan untuk mengawasi lalulintas permodalan dan arus kredit. Uang rupiah Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebagai tanda pembayaran yang sah. Selanjutnya diambil tindakan terhadap bank-bank bekas milik musuh. Bank bekas milik musuh dilikwidasi berdasarkan Undang-Undang No. 13/1942. Antara lain beberapa bank bekas milik Belanda yaitu *De Javasche Bank, Nederlandsche Handels-Maatschappij, Nederlands-Indische Escompto Bank* dan *Batavia Bank.* Bank-bank milik Inggris dan asing lainnya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya sampai batas waktu 20 November 1942.[50] Bank-bank itu adalah: *The Chartered Bank of India,The Hongkong and Shanghai Corporation Ltd.,* dan *Overseas Chinese Banking Corporation Ltd.* Kedudukan dan tugas bank-bank yang telah dilikwidasi itu digantikan oleh bank-bank Jepang yaitu: *Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, Taiwan Ginko* dan *Kana Ginko.* Bank-bank Jepang di atas ada di bawah supervisi *Nanpo Keihatsu Kenso* (Perbendaharaan untuk Kemajuan Daerah Selatan). Di bidang perpajakan, diadakan pungutan pajak dari pelbagai sumber. Orang asing dikenakan pajak yang tinggi. Ketentuannya ialah bagi orang Eropa (yang dimaksud warganegara musuh) yang memiliki penghasilan sebesar F.3.000 setahun dan kekayaan dari ketentuan pada zaman Hindia Belanda. Mereka diberi keringanan mengangsur sampai 3 kali dalam waktu 3 bulan. Sedang orang Cina yang memiliki kekayaan yang sama, dipungut pajaknya 35 kali pajak kekayaannya pada zaman Hindia Belanda. Mereka diperbolehkan mengangsur enam kali selama enam bulan.[51]

50 *Kan Pō*, No. 5 Th. I, Oktober 1942, hal. 8

51 *Ibid*, No. 27 Th. II, September 1943, hal. 3.

Bidang perdagangan pada periode ini pada umumnya lumpuh akibat menipisnya persediaan. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur-penyalur yang ditunjuk. Pengendalian harga diadakan dengan tujuan untuk mengurangi manipulasi. *Osamu Seirei* No. 38/1943 menetapkan bahwa semua barang harus dijual dengan harga yang ditentukan. Barang-barang yang diklasifikasi penting dikuasai oleh pemerintah, baik penggunaannya maupun distribusinya diawasi. Para penyimpang barang-barang diklasifikasi penting harus melaporkan jumlah barang dan peredarannya, apabila barang itu terjual. Barang penting dibagi atas dua golongan: golongan pertama, adalah barang-barang yang langsung kegunaannya bagi usaha perang, seperti mobil, sepeda motor, agregat (alat pembangkit listrik, pabrik-pabrik) pelbagai barang dari baja, besi, aluminium, golongan kedua adalah barang yang menyangkut kehidupan dan kebutuhan rakyat. Mula-mula hanya beberapa macam barang saja yang digolongkan penting seperti benang tenun. Tetapi pada akhir pendudukan Jepang, hampir setiap *syū* (karesidenan), menyatakan beberapa jenis barang sebagai barang penting, untuk keperluan daerahnya. Larangan pokok bagi barang penting jenis kedua adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain keluar *syū*.[52] Secara lokal tiap *syū* melaksanakan autarki. Sektor export dan import selama perang ini lumpuh. Amerika Serikat mengadakan blokade keras terhadap wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang.

Adanya pengaturan-pengaturan, pembatasan-pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah, adalah ciri daripada ekonomi perang. Pola ekonomi perang yang direncanakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekwen pada wilayah yang dikuasai Jepang. Setiap lingkungan daerah harus melaksanakan autarki, yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah *Minseifu* juga dibagi 3 lingkungan autarki. Politik ekonomi adalah desentralisasi. Di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ini pulau Jawa sebagai satu bagian daripada Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, mempunyai dua tugas. Tugas pertama adalah memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan, dan tugas kedua adalah mengusahakan

---

52 *Kan Pō*, No. 40 Th. III, April 1944, hal. 19 dan No. 24, Th. II, Agustus 1943.

produksi bahan-bahan untuk kepentingan perang. Kedua tugas yang dibebankan oleh Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya kepada para penguasa militer di pulau Jawa, dilaksanakan secara konsekwen. Penduduk dan rakyat disertai kekayaan pulau Jawa dikorbankan untuk pelaksanaan itu. Kepentingan militer dapat prioritas pertama.

Ketika perang menginjak tingkat yang kritis pada tahun 1944 di mana ofensif Serikat sudah mendekat ke Jepang, tuntutan akan bahan-baku kebutuhan meningkat. Di Jawa tentara Jepang mulai menyusun pertahanan yang didasarkan atas konsepsi perang gerilya untuk waktu yang lama. Pada tingkat inilah pengerahan kebutuhan perang meningkat. Pada bulan Juni 1944 diadakan kampanye mengenai gerakan memperkuat tenaga perang tingkat pertama. Kampanye ini adalah kampanye pengerahan barang untuk menambah tenaga perang.[53] Pengerahannya dilakukan melalui badan-badan resmi seperti *Djawa Hōkōkai*, *Nōgyō Kumiai* dan instansi-instansi resmi lainnya.

Pada sidang *Cuō Sangi In* bulan Oktober 1944 telah-disepakati untuk;

1. memperkuat dan melindungi para prajurit Peta dan *Heiho;*
2. menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang;
3. meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang;
4. memperbanyak hasil produksi pangan.

Khususnya usaha memperbesar produksi hasil bumi ini telah dibicarakan dalam rapat *keizaibucō* (kepala urusan perekonomian *syū)* pada bulan April 1944. Dalam kesempatan tersebut *gunseikan* menerangkan, bahwa di dalam rangka memenangkan perang, yang harus ditimbulkan adalah tenaga perang dan penggunaan untuk perang.[54] Sebenarnya keadaan beras di Jawa sendiri sejak 1942 dirasakan mengkhawatirkan. Karena itu untuk distribusi bahan makanan ini dibentuk *Syokuryo Kanri Jimusyo.* Untuk menambah produksi direncanakan untuk menambah areal tanah. Cara menambah areal ini dengan membuka tanah baru, terutama bekas perkebunan dan memanfaatkan tanah lainnya yang belum pernah ditanami. Usaha untuk menambah produksi beras itu

53 *Ibid*, hal. 17, khususnya mengenai Penjelasan *Osamu Seirei* No. 20/1944.
54 *Soeara Asia*, 17 April 1944.

sebenarnya adalah rencana lama. Di Sumatra Timur bekas perkebunan tembakau ditanami padi, yang luasnya lebih kurang 10.000 ha. Tanah pertanian baru di daerah Karo juga dibuka dengan menggunakan tenaga-tenaga tawanan. Di Kalimantan juga terdapat semacam kewajiban menanam hasil padi. Hal yang sama dilakukan juga di Sulawesi.[55] Di samping itu juga diserukan menebang tanaman kenikmatan seperti kopi dan teh. Yang menderita karena peraturan ini adalah rakyat. Mereka diharuskan menebang kebun-kebun kopi mereka dengan mengganti tanaman lainnya untuk memperbesar produksi pangan.[56] Pulau Jawa dituntut untuk menghasilkan 50.000 ton beras dan 30.000 ton jagung.[57] Akibat yang parah lagi daripada anjuran pemerintah ini adalah pengrusakan hutan-hutan. Pada masa itu hutan di pulau Jawa tidak kurang dari 500.000 hektar yang ditebang secara liar. Kecuali anjuran untuk menambah luas areal pemerintah Jepang juga menyelenggarakan bimbingan secara intensif kepada para petani melalui para penyuluh pertanian.[58] Sebenarnya cara ini adalah cara yang terbaik, karena pemerintah Jepang secara tidak langsung telah memperkenalkan cara bertani modern, sebagaimana yang telah dilakukan di Jepang. Tetapi kelemahan dari sistim ini terletak pada organisasinya, para pelatihnya *(syidōkan)* bukanlah dipilih orang yang benar-benar mengerti masalah pertanian, sedang orang yang dilatih *(syidōin)* hanya mendapat latihan yang sangat singkat. Karena itu produksi bahan makanan terus-menerus merosot. Faktor lainnya yang sangat mempengaruhi adalah jumlah pemotongan hewan yang meningkat dan menurunnya angka kelahiran hewan yang berguna untuk pertanian. Menurunnya produksi pangan di Jawa dapat dilihat pada angka-angka di bawah ini.

Tahun	P a d i	Palawija
1941	89.934.807	121.525.781
1942	83.081.989	118.054.367 Quintal
1943	81.125.225	107.109.669 = 100 kg
1944	68.115.550	90.055.664

Sumber : *Makmoer*, Th. 1 (25 Desember 1945) hal. 13.

55 John O. Sutter, *op.cit.*, hal. 150 – 151.
56 *Kan Pō*, No. 32, Th. II, Desember 1943, hal. 52.
57 *Soeara Asia*, 1 April 1944.
58 *Ibid*, 24 Oktober 1943.

Cara-cara tersebut di atas akan lebih berhasil sekiranya tidak ada unsur paksaan yang meliputi pelaksanaannya dan penyetoran hasilnya. Rakyat hanya diperbolehkan memiliki 20% saja dari jerih payahnya, setiap kali musim panen. Yang 30% harus disetorkan kepada pemerintah melalui *Beikoku Seimeigyo Kumiai (kumiai* penggilingan padi) dan dibeli dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang 30% lainnya disediakan untuk bibit yang harus disetor kepada lumbung desa. Sebenarnya rakyat sendiri tidak menghendaki menjual padinya kepada pemerintah. Karena itu seringkali terjadi kecurangan-kecurangan dalam penyetoran padi, akibat perbedaan harga padi di pasaran gelap. Bagaimanapun kerasnya tindakan pemerintah Jepang, namun tetap tidak berhasil memecahkan masalah beras ini. Karena itu ia meminta kepada Dewan Penasehat *(Sanyo Kaigi)* yang anggota-anggotanya terdiri dari: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Oto Iskandardinata, Dr. Buntaran Martoatmodjo, Prawoto Sumodilogo, Mr. R. Sartono, Sukardjo Wirjopranoto dan R P Suroso dan lain-lain, untuk memecahkan masalah beras ini. Sidang tersebut diadakan sehubungan dengan pertanyaan *Saikō Syikikan* pada Sidang *Cūō Sangi In* mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pengumpulan padi. Dalam sidangnya pada tanggal 8 Januari 1945, *Sanyo Kaigi* menyimpulkan:

Cara-cara pengumpulan padi kurang sempurna, disebabkan oleh:

a. musim kemarau yang panjang pada tahun 1944, panen tak dapat diharapkan.
b. cara memberikan penerangan mengenai penyetoran padi kepada pemerintah kurang cukup jelas bagi rakyat, dan kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa padinya di bawa ke luar keresidenan, bahkan ke luar Jawa.
c. struktur masyarakat dan kondisi sosial pada umumnya belum teratur dan masih belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perang. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

    1. perlengkapan pemimpin desa masih kurang berkembang untuk dapat menyelesaikan masalah pengumpulan padi.

2. solidaritas sosial masih cukup tinggi pada semua lapisan masyarakat desa, khususnya di antara mereka yang kaya dan berpengaruh.
3. adanya pasar gelap merupakan rintangan bagi kelancaran penyetoran padi.
4. pelbagai kecurangan yang timbul, melemahkan gairah petani untuk menyetor padinya.
   d. kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pemindahan padi mulai dari tangan para pedagang sampai menjadi beras di tangan pemerintah. [59]

Gagalnya penyetoran padi merupakan perlawanan diam-diam daripada rakyat desa. Akibat yang timbul adalah kekurangan bahan makanan, karena itu tidak mengherankan jika di dalam rangka ini seringkali timbul kecurangan dan pasaran gelap. Harga resmi ditentukan 10 sen, sedang harga di pasaran gelap tertinggi mencapai f 3.25 (Jakarta) dan yang terendah f 1.20 (Bojonegoro). Kelaparan melanda di berbagai tempat, angka kematian tinggi. Di Wonosobo angka kematian mencapai 53.7 dan Purworejo 24.7. [60]

Di samping rakyat dituntut untuk menyetor padi dan menaikkan produksi padi, masih dibebani pekerjaan tambahar yang bersifat wajib, seperti menanam dan memelihara jarak. Pekerjaan semacam ini mengurangi waktu kerja pertanian bahkan kadang-kadangg mereka dipaksa menjadi *romusya*. Sebagian besar dari mereka adalah petani. Hal ini mengurangi jumlah tenaga kerja petani. Karena tenaga kerja berkurang, gairah menjadi berkurang ditambah keadaan gizi yang rendah, stamina mereka mundur. Keadaan ini merupakan tindakan yang berlawanan dengan gagasan untuk meningkatkan produksi. Bagi rakyat tindakan pemerintah mengakibatkan kesengsaraan yang berlipat ganda. Penyakit akibat kekurangann gizi merajalela, ditambah timbulnya pelbagai bencana alam.

Masalah pokok yang menyangkut kehidupan rakyat, selain pangan adalah sandang. Karena memang sejak masa sebelum pecah perang, masalah sandang di Indonesia sangat tergantung pada import dari negeri Belanda. Untuk mengatasi masalah sandang ini diusahakan percobaan penanaman kapas dan usaha-usaha lainnya. Di Jawa daerah-daerah yang dipilih untuk tempat

59 Ben Anderson, "The Problem of Rice", *Indonesia II*, Oktober 1966, hal. 85–87.
60 Ben Anderson, *ibid*, hal. 93.

percobaan, yaitu Cirebon, Malang, Kediri dan Besuki. Setelah percobaan berjalan dua tahun maka yang menghasilkan kapas terbaik adalah Kediri dan Besuki.[61] Di Sumatra kapas juga ditanam di daerah Palembang, demikian pula di Bali dan Lombok, yang terutama di Sulawesi.[62] Penanaman kapas ini dimasukkan sebagai rencana 5 tahun. Memang pada awal pendudukan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertenunan masih meneruskan usahanya. Karena kekurangan bahan baku, usahanya ditutup. Tetapi usaha pemintalan rakyat secara massal didirikan dan rakyat dilatih untuk memintal. Diusahakan dipintal bahan-bahan yang mengandung serat, kapok-randu. Percobaan-percobaan mencari ganti benang kapas dilakukan secara intensif. Kampanye untuk menolong orang yang tidak berpakaian, dilakukan secara intensif oleh *Djawa Hōkōkai* dan aparat pemerintah lainnya. Bahkan pada bulan April 1944 diadakan Pekan Pengumpulan Pakaian untuk Rakyat Jelata.[63] Masalah sandang merupakan masalah serius. Sebagian rakyat sudah memakai pakaian dari karung, bahkan sudah ada yang mengganti pakaian dengan lembaran karet.

Di bidang keuangan, khususnya mengenai hasil pemasukan pemerintah hanya diperoleh dari sumber yang terbatas, yaitu pungutan pajak dan penjualan hasil perkebunan. Pengeluaran memerlukan biaya yang sangat besar. Khususnya untuk kepentingan perang, seperti pembuatan benteng pertahanan, pembuatan alat-alat perang, dan lain-lain pengeluaran yang berhubungan dengan usaha perangnya. Sumber penghasilan tidak menutup jumlah pengeluaran yang besar sekali. Untuk menutup defisit, satu-satunya jalan adalah mengeluarkan uang baru. Jumlah mata uang yang beredar dalam masyarakat 1,5 milyard, di samping cadangan yang tersimpan dalam bank lebih kurang 2,5 milyard. Karena sirkulasi uang sangat besar pemerintah Jepang mengadakan kampanye menabung, untuk menyedot sebagian uang yang beredar. Semula di Jawa hasil kampanye itu sejumlah f 20 juta dan pada akhir Februari 1944 mencapai f 127 juta. Di samping itu pengawasan terhadap kenaikan harga dengan tujuan untuk mengendalikan harga, ternyata tidak berhasil. Hal ini terbukti menimbulkan harga-harga baru di pasaran gelap, sekalipun

61 *Soeara Asia*, 27 Mei 1944.
62 John O. Sutter, *op.cit.*, hal. 158.
63 *Soeara Asia*, 18 April 1944.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

diancam dengan hukuman yang berat. Harga barang dengan cepat menjadi naik khususnya sesudah Jepang menyerah kepada Serikat.

Sesuai dengan azas ekonomi perang, bahwa segala aparat perekonomian dikuasai oleh negara, maka bidang perdagangan dimonopoli maskapai swasta Jepang, seperti *Mitsui Kabusyiki Kaisya, Osaka Rima Kabusyiki Kaisya.* Monopoli juga dilakukan terhadap pembelian, penjualan, pembagian barang-barang yang berasal dari *kumiai.* Sebaliknya pedagang-pedagang pribumi diawasi secara keras, barang yang dijual harus didaftar dan dilaporkan hasil penjualannya.

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN POLITIK

1. Struktur Pemerintahan

Dengan akhirnya Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pemerintah pendudukan militer Jepang. Pemerintah militer yang menguasai Indonesia membagi wilayah bekas Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan yaitu:

1. Pemerintahan militer angkatan darat (Tentara Keduapuluh-lima), untuk Sumatra berkedudukan di Bukittinggi.
2. Pemerintah militer angkatan darat (Tentara Keenambelas) untuk Jawa, Madura, Bali berkedudukan di Jakarta.
3. Pemerintah militer angkatan laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku berkedudukan di Makasar.

Setelah tentara Jepang mulai berkuasa di Jawa dikeluarkan Undang-undang No. 1. tahun 1942. Undang-undang ini menjadi pokok dari peraturan-peraturan tatanegara pada waktu pendudukan Jepang. Undang-undang ini berisi antara lain:

- pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintah militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.
- pasal 2 : Pembesar balatentara memegang kekuasaan pemerin-

tah militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu berada di tangar. Gubernur Jenderal.

- pasal 3: Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.
- pasal 4: Bahwa balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang. [64]

Dari undang-undang ini dapat diketahui bahwa jabatan Gubernur Jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda. dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu di tangan Gubernur Jenderal sekarang dipegang oleh pembesar Balatentara Jepang. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah militer Jepang juga ingin meneruskan pemerintahan sipil yang lama beserta para pegawainya. Tindakan Jepang ini dimaksudkan agar pemerintah dapat berjalan terus dan kekacauan dapat dicegah. Hanya pimpinan dipegang oleh tentara Jepang baik di pusat maupun di daerah. [65] Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri atas: *Gunseireikan* (panglima tentara), kemudian disebut *Saikō Syikikan*) sebagai pucuk pimpinannya, dibawah *Saikō Syikikan* adalah *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer). *Gunseireikan* menetapkan peraturan-peraturan yang dinamakan *Osamu Seirei*, sedang peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan* disebut *'Osamu Kanrei.* Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam *Kan Pō* (berita pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu.*

Panglima Tentara Keenambelas di pulau Jawa yang pertama, yalah Letnan Jenderal Hitosyi Imamura. Sedangkan kepala stafnya adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Dia diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa. yang kemudian diangkat sebagai *Gunseikan.* Staf pemerintahan militer pusat dinamakan *Gunseikanbu,* yang terdiri dari 4 macam *Bu* (semacam departemen) yaitu *Sōmubu* (Departemen Dalam Negeri), *Zaimubu* (Departemen Keuangan), *Sangyōbu* (Departemen Perusahaan, Industri, Pertanian dan Kerajinan Tangan) dan

64 *Kan Pō*, No. Istimewa, th I, 2602 (1942), hal. 6 – 7.

65 Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, *Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang. Dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942*, Yogyakarta, 1952, hal. 10 – 13.

Kotsubu (Departemen Lalu-lintas), yang kemudian ditambah dengan *Bu*-yang kelima, yaitu *Syihōbu* (Departemen Kehakiman).[66]

Koordinator pemerintahan militer yang dituangkan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan disebut *Gunseibu*, *Gunseibu* dibentuk di Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, Jawa Tengah di Semarang dan Jawa Timur di Surabaya. Di samping itu dibentuk dua daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta, *(kōci)*.

Untuk setiap *gunseibu* ditempatkan beberapa komandan militer setempat, di samping bertugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, mereka diberi wewenang untuk memecat para pegawai bangsa Belanda serta membentuk pemerintahan setempat. Tetapi usaha membentuk pemerintahan setempat ternyata tidak berjalan lancar. Jepang mengalami kekurangan pegawai. Karena itu terpaksa pemerintah militer mengangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Tindakan yang simpatik terhadap pegawai-pegawai Indonesia yang diangkatnya itu, merupakan taktik guna mempercepat konsolidasi kekuasaannya.

Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintah Daerah, untuk menciptakan suasana dan kerjasama yang baik. Yang mendampingi gubernur Jawa Barat, Kolonel Matsui adalah R. Pandu Suradiningrat yang diangkat sebagai wakil gubernur. Sebagai pembantu wakil gubernur diangkat Atik Suardi.

Bersamaan dengan pengangkatan wakil gubernur dan pembantu wakil gubernur Jawa Barat itu pada tanggal 29 April 1942, diangkat beberapa residen yakni:

1. R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang);
2. R.A.A. Surjadjanegara di Bogor;
3. R.A.A. Wiranatakusumah di Priangan (Bandung);
4. Pangeran Ario Suriadi di Cirebon;
5. R.A.A. Surjo di Pekalongan;
6. R.A.A. Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.[67]

Demikian halnya dikota "Batavia" (belum dinamakan Jakar-

66 *Pandji Poestaka*, No. 26, 3 Oktober 1942, hal. 933.
67 *Asia Raya*, 4 Mei 1942.

ta) H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai kepala pemerintah daerah. Jabatan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko.

Di Jawa Tengah sama halnya dengan di Jawa Barat, jabatan gubernur berada di tangan orang Jepang yakni Letnan Kolonel Taga yang berkedudukan di Semarang. Sedangkan tugas sehari-hari untuk Yogyakarta, yang saat itu dinyatakan sebagai pusat dari organisasi pemerintahan militer di Jawa Tengah, tetap diserahkan kepada Dr. L. Adam.[68] Pegawai tinggi bangsa Indonesia lainnya yang mendampingi Letnan Kolonel Taga diantaranya adalah Rd. Muhammad Chalil sebagai wakil gubernur Jawa Tengah dan Salaman sebagai residen.[69] Mereka bekerja di bawah pengawasan ketat pembesar-pembesar militer Jepang.

Masa pemerintahan sementara berakhir pada bulan Agustus 1942 tatkala dikeluarkannya Oendang-oendang No. 27 (Tentang Atoeran Pemerintahan Daerah) dan Oendang-oendang No. 28 (Tentang Atoeran Pemerintahan *Syū* dan *Tokubetsu Syi.*[70] Kedua undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan daripada reorganisasi struktur pemerintahan yang sifatnya sementara, setelah datangnya tenaga-tenaga ahli pemerintahan sipil Jepang di pulau Jawa. Mereka mulai dikerahkan pada badan-badan pemerintahan guna melaksanakan reorganisasi, karena Jepang hendak menjadikan pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya di daerah selatan. Oleh karena itu aparat-aparat pemerintahan harus berada di bawah kekuasaan bangsa Jepang, terbukti dengan jumlah pegawainya yang ada di pulau Jawa.[71]

Menurut Oendang-Oendang No. 27 (yaitu Oendang-Oendang tentang perubahan tata pemerintahan daerah) seluruh pulau Jawa dan Madura, kecuali kedua *kōci* Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas *syū, syi, ken, gun, son* dan *ku*. Daerah *syū* sama dengan "residen" dahulu yang terbagi atas *syi* dan *ken*. Daerah *syi* sama dengan daerah "stadsgemennte" dahulu, daerah *ken* sama dengan daerah "regentschap" dahulu, kecuali daerah yang dijadikan *syi* .

Daerah *ken* terbagi atas *gun, gun* atas *son* dan *son* atas *ku*. Daerah *gun, son* dan *ku* masing-masing sama dengan daerah "district", onderdistrict, dan "desa" dahulu, kecuali daerah yang

---

68 *Pandji Poestaka*, No. 2, 18 April 1942, hal. 64.
69 *Asia Raya*, 11 Mei 1942.
70 *Pandji Poestaka*, No. 18, 8 Agustus 1942, hal. 671 – 672.
71 Menurut M.A. Azis jumlah pegawai Jepang di Jawa ada 23.242 orang.

dijadikan *syi*. Di dalam *syi, ken, gun, son* dan *ku* masing-masing diangkat seorang *syicō, kenco, gunco, soncō* dan *kucō*.[72] Dengan demikian pembagian daerah pemerintahan yang terdiri atas provinsi-provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa Hindia Belanda dihapuskan.[73]

Sejak tanggal 8 Agustus 1942 daerah pemerintahan yang tertinggi ialah *syū*. Jumlahnya di pulau Jawa 17, terdiri dari Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Meskipun tidak ada perubahan strukturil, namun terdapat perbedaan di dalam pelaksanaan pemerintahannya. Luas daerah *syū* sama dengan keresidenan dahulu, tetapi fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residensi dahulu merupakan daerah dari pembantu gubernur, (residen). Sedangkan *syū* merupakan pemerintahan daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah *Syūcōkan*. *Syūcōkan*, kedudukannya sama dengan seorang gubernur. Seorang *syūcōkan* memegang kekuasaan tertinggi daerah *syū*, karena ia mempunyai kekuasaan legislatif dan exekutif, sehingga dapat disebutkan sebagai satu otokrasi yang terdapat dari bawah sampai ke atas. Dengan demikian struktur pemerintahan *syū* samasekali berbeda dengan struktur pemerintahan *residentie* pada jaman Hindia Belanda, karena *syūcōkan* kekuasaannya sama dengan gubernur, meskipun daerah kekuasaannya seluas daerah *residentie*.[74]

Didalam melaksanakan tugasnya *syūcōkan* dibantu oleh *cōkan kanbo* (majelis permusyawaratan *cōkan*) yang mempunyai 3 (tiga) *bu* (bagian) yakni sebagai berikut:

1. Naiseibu (bagian pemerintahan umum);
2. *Keisaibu* (bagian ekonomi);
3. *Keisatsubu* (bagian kepolisian).

Para *syūcōkan* secara resmi dilantik oleh *Gunseikan* pada bulan September 1942. Pelantikan tersebut merupakan awal daripada pelaksanaan reorganisasi pemerintahan daerah, dan menyingkirkan pegawai-pegawai Indonesia yang pernah digunakan untuk sementara waktu dari kedudukan yang tinggi.

---

72 *Pandji Poestaka*, No. 23, 12 September 1942, hal. 88.

73 Harry J. Benda, Irikura, Koichi Kishi, *Japanese Military Administration in Indonesia*, Southeast Asia Studies Yale University, 1965. hal. 66.

74 "Berkas Dokumentasi Mr. Achmad Subardjo Tentang Djaman Djepang", hal. 42.

Panglima Tertinggi Tentara Keduapuluhlima di pulau Sumatra membentuk pemerintahan sipil yang terdiri atas *syū, bunsyū, gun* dan *son*. Pada pertengahan 1943 baru dibentuk *gunseikanbu* bertempat di Bukittinggi dengan departemen-departemen sbb:

- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Kepolisian
- Departemen Kehakiman
- Departemen Industri
- Departemen Keuangan
- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Perhubungan
- Departemen Pembukuan
- Departemen Penerangan
- Departemen Pemindahan dan Pengiriman
- Departemen Meteorologi.[75]

Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang direktur yang diawasi oleh Direktur Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil *Gunseikan*. Pemerintah militer membagi Sumatra dalam 9 keresidenan *(syū)* dipimpin oleh seorang *syūcōkan*.

Setiap *syū* mempunyai:

- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Kepolisian.
- Departemen Kesejahteraan Sosial.

Kesembilan *syū* yang dibentuk di Sumatra yalah: Sumatra Timur, Tapanuli, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bangkahulu, Palembang, Lampung, Bangka-Biliton.

Indonesia Timur dan Kalimantan Selatan berada dibawah kekuasaan Armada Selatan Kedua dengan pusatnya di Makassar. Pemerintahannya disebut *Minseifu* dan terdiri atas departemen keuangan, kehakiman, pengangkutan dan pekerjaan umum, kesehatan, perindustrian .dan urusan umum. Dibawah *Menseifu* terdapat eselon pemerintahan yang lebih rendah yang bernama *minseibu,* yang jumlahnya ada tiga yang berpusat di Borneo, Sulawesi dan Seram. Dibawah *minseibu* terdapat *syū, ken, bunken, gun* dan *son.*[76]

---

75 Berkas Dokumentasi Mr. Achmad Subardjo Tentang Djaman Djepang, hal. 42; Cf. Kanahele, *op.cit.*, bab IV, alinea 9.

76 Kanahele, *op.cit.*, bab II, alinea 7 dan 8.

2. *Kehidupan Politik*

Berbeda dengan Pemerintah Hindia Belanda yang selalu mencurigai golongan nasionalis Indonesia, maka selama masa pendudukan Jepang golongan nasionalis muncul sebagai golongan yang diajak bekerjasama dengan Pemerintah. Kalau pada jaman Pemerintah Hindia Belanda sebagian golongan nasionalis Indonesia mengambil sikap yang non-kooperatif, maka pada jaman Jepang, sikap mereka itu ternyata berbeda, karena menempuh jalan kerjasama dengan pihak Jepang. Kerjasama itu didahului dengan tindakan pemerintah militer Jepang yang secara berangsur-angsur membebaskan pemimpin nasionalis Indonesia, yang sebelumnya ditawan atau dibuang oleh pemerintah H...dia Belanda. Mereka yang mendapat kebebasannya kembali antara lain Ir Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Sjahrir.

Tindakan pemerintah militer Jepang tersebut bertolak dari anggapan bahwa golongan nasionalis Indonesia meskipun suatu golongan yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat, sehingga mereka merasa perlu untuk mengadakan kerjasama dengan pihak nasionalis itu. Dalam suatu pertemuan dengan Wakil Kepala Staf Tentara Keenambelas di pulau Jawa, Jenderal Harada Yosyikazu, akhirnya Drs. Hatta menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan pihak Jepang. Kesediaannya itu didasarkan atas uraian Jenderal Harada yang menekankan tentang tujuan pemerintah Jepang yang tidak bermaksud untuk menjajah Indonesia, melainkan untuk membebaskan sekalian bangsa Asia dari dominasi negara-negara Barat.[77] Kerjasama yang dikehendaki Drs. Hatta adalah sebagai penasehat pemerintah militer dan tugas pertama itu dilaksanakannya dalam Kantor Penasehat Umum. Pada kesempatan itu ia diijinkan untuk menunjuk anggota Staf pembantunya yang terdiri dari bangsa Indonesia, seperti antaranya A.K. Pringgodigdo, Suwirjo, Sujitno Mangunkusumo dan Mr. Hardjono.[78]

Kerjasama itu diikuti oleh kaum nasionalis lainnya seperti Ir. Sukarno, Muh. Yamin, Mr. Sartono, dr. Buntaran Martoatmodjo, Drs. Ratu Langie, Oto Iskandardinata, dll-nya. Dalam bulan April 1942 bekas anggota Volksraad pada jaman Hindia Belanda seperti Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Samsuddin, Dr.

77 G. Kanahele, *Op.cit.*, bab III, alinea 12 & 13.
78 *Pemandangan*, 16 Mei 1942.

Mulia, Abdul Rasjid, Tadjuddin Noor, Sukardjo Wirjopranoto dan Muchtar menyatakan kesediaannya pula untuk bekerjasama dengan pihak Jepang. [79]

Adapun faktor yang memungkinkan terjalinnya kerjasama itu, pertama-tama adalah karena kemenangan yang gilang-gemilang dari pihak Angkatan Perang Jepang atas Belanda dan berhasil dihancurkannya kekuatan militer Serikat di Indonesia. Hasil yang dicapai itu telah menimbulkan keyakinan di kalangan golongan nasionalis Indonesia akan perlunya kerjasama dengan pihak Jepang sebagai pihak pemenang, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memajukan perjuangan nasional.

Tetapi di antara golongan nasionalis itu ada tokoh-tokoh yang menolak untuk bekerjasama dengan pihak Jepang. Di antaranya yang terkenal adalah Sjahrir dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Sikap Dr. Tjipto itu tidak hanya didasarkan atas tantangan yang bercorak politik, tetapi juga karena kesehatannya yang semakin mundur. [80] Sedang Sjahrir untuk menghindarkan diri dari pemerintah militer Jepang dengan cara menyingkirkan diri ke luar kota di Cipanas.

Jumlah pegawai-pegawai *Gunsei* sekitar 300 orang yang datang bersama-sama dengan tentara Jepang di Jawa tidak semuanya merupakan pegawai pemerintahan juga ini terasa sangat kurang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya. Meskipun kekurangan tenaga pegawai itu dapat diatasi dengan ditempatkannya personil militer dan personil rendahan, tetapi jumlah tersebut belumlah mencukupi. Dan jalan satu-satunya untuk mengatasinya yalah membuka kesempatan bagi golongan nasionalis untuk turut aktif dalam *Gunsei*. Untuk golongann nasionalis tersedia pula jabatan-jabatan dalam dunia pers, radio dan bagian propaganda. Dengan cara demikian pemerintah *Gunsei* mengharapkan terhimpunnya tenaga daripada tokoh-tokoh penulis, penyair, seniman dan terutama wartawan Indonesia. Tokoh-tokoh wartawan Indonesia seperti Sukardjo Wirjopranoto, Oto Iskandardinata, Winarno dan Parada Harahap merupakan tokoh-tokoh yang segera diangkat sebagai pegawai *Gunsei*. [81]

---

79 *Hong Pō*, 24 April 1942.
80 Sutan Sjahrir, *Out of Exile*, New York, 1949, hal. 241.
81 G.S. Kanahele, *op.cit.*, bab III, alinea 17.

Pada akhir bulan Maret 1942 hubungan kerjasama antara nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang semakin erat. Kerjasama itu meningkat dengan dibentuknya organisasi politik pertama yang dikenal dengan nama Gerakan Tiga A. Bagian propaganda (*sendenbu*) sebagai koordinatornya telah mengangkat bekas tokoh Parindra Jawa Barat.[82] Mr. Samsuddin sebagai Ketua Gerakan Tiga A. Ia dibantu oleh bekas tokoh-tokoh Parindra lainnya, seperti K. Sutan Pamuntjak dan Mohammad Saleh.

Rupanya golongan nasionalis bekas anggota Parindra tidak berpengaruh luas di kalangan masyarakat. Lain halnya dengan Ir. Sukarno, seorang tokoh nasionalis lulusan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, yang telah dikenal namanya sejak jaman Hindia Belanda, karena membentuk *Partai Nasional Indonesia* pada tahun 1927. Sikapnya yang non-kooperatif pada jaman Hindia Belanda diganti dengan sikap kooperatif pada jaman Jepang. Karena pengaruhnya sangat besar di kalangan masyarakat, oleh pihak Jepang ia dianggap tokoh utama yang harus mereka tarik untuk bekerjasama. Kerjasama itu pertama kali diputuskannya dalam suatu pertemuan dengan komandan Jepang di Bukittinggi dengan suatu jaminan bahwa pemerintah militer Jepang tak akan menghalangi usaha Ir. Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.[83] Dalam pertemuannya dengan Drs. Moh. Hatta dan Sjahrir, kembali Ir. Sukarno menekankan tentang keputusannya untuk bekerjasama, yang didasarkan atas harapannya agar pihak Jepang memberikan konsesi-konsesinya kepada bangsa Indonesia.

Kembali kepada Gerakan Tiga A, yang disponsori oleh Bagian Propaganda *(Sendenbu)*, pada waktu permulaan ini H. Syimizu, kepala *Sendenbu* mengarahkan Mr. Samsuddin untuk memperluas pengaruh Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia)[84] di seluruh Jawa. Karena gerakan itu dibentuk secara resmi, di daerah-daerah telah dibentuk komite-komite, ada yang bernama komite nasional, komite rakjat, ada yang bernama lain yang bersifat lokal. Komite-komite yang dibentuk secara lokal ini belum berjalan

---

82 Gunseikanbu, *Orang Indonesia jang terkemoeka dipoelau Djawa*, Jakarta, 1943.
83 Cindy Adams, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*, Jakarta, 1966, hal. 217 – 218.
84 Gunseikanbu, *Orang Indonesia jang terkemoeka di poelau Djawa*, hal. 462.

dengan baik sebab situasi belum memungkinkan untuk membentuk organisasi. Kemudian secara bertahap pergerakan yang diciptakan oleh Jepang itu diperkenalkan kepada rakyat, melalui mass media pada bulan Mei 1942.[85] Mr. Samsudin sebagai tokoh yang diserahi untuk memimpin pergerakan baru Tiga A itu menjelaskan bahwa Pergerakan Tiga A adalah organisasi kemakmuran bersama yang kegiatannya meliputi segala lapangan untuk seluruh Asia.

Dari pihak Jepang, pemimpin *Sendenbu* H. Syimizu mengumpulkan para-pemimpin pergerakan yang tidak ditangkap dan berada di Jakarta.[86] Mereka itu antara lain: Mr. Supomo, Atik Suardi, Mr. Subardjo, Dr. G.S.S.J. Ratulangie, Abikusno Tjokrosujoso, Mr. Tadjudin Noor, Untuk diminta nasihatnya berhubung dengan dibentuknya pergerakan baru Tiga A itu. [87]

Dalam usaha pengembangan pergerakan Tiga A ini, Mr. Samsuddin bersama-sama dengan *sendenbu* mulai berkampanye ke daerah-daerah *syū*, khususnya di Jawa Barat. Di beberapa tempat di Jawa Barat ini ia memimpin sendiri rapat-rapat umum dengan didampingi oleh para pejabat Jepang di daerah itu.

Sampai dengan bulan Juni di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah usaha memperluas Gerakan Tiga A hanya sampai pada taraf pembentukan komite. Persiapan rapat-rapat umum untuk usaha pembentukan komite-komite baru diadakan bulan berikutnya. Komite-komite persiapan itu hanya terdapat di beberapa kota saja, seperti Salatiga, Magelang, Purwokerto, Cilacap.[88]

Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Pemerintah militer Jepang mulai memikirkan satu cara untuk membentuk organisasi yang khusus bagi bangsa Indonesia. Mereka melihat bahwa potensi bangsa Indonesialah yang dikerahkan untuk tujuan perangnya. Pemerintah mengambil pelajaran dari kegagalan membentuk organisasi semacam Tiga A yang multi-rasial itu yang sulit untuk diwujudkan. Karena kegagalan Tiga A ini, pada bulan Desember 1942 telah dirancang untuk membentuk organisasi baru.[89] Organisasi baru yang dirancang itu dalam segi kepemimpinannya lebih maju. Jepang

85 *Asia Raya*, 12 Mei 1942.

86 Pada awal penjajahan Jepang sebagian pemimpin pergerakan ditawan dan rata-rata dibebaskan pada bulan Agustus 1942.

87 *Asia Raya*, 11 Juni 1942.

88 *Asia Raya*, 16 Juni 1942.

89 Cindy Adams, *op.cit.*, hal. 160.

menggunakan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang telah terkenal di kalangan rakyat. Harapan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat semakin besar. Tokoh-tokoh Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H. Mas Mansur ditampilkan sebagai pemimpin-pemimpin dengan sebutan Empat Serangkai. Pemerintah Jepang tidak mempedulikan bahwa mereka pada masa sebelum pecah perang mempunyai sikap anti Jepang. Tokoh-tokoh seperti Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Sjahrir dan lain-lainnya sudah diketahui secara jelas, ideologi dan sikapnya sangat anti militerisme dan fasisme, sekalipun mereka juga bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Jepang ingin mempergunakan tokoh pergerakan Indonesia sebagai simbol untuk membangkitkan semangat dan perasaan anti-kolonialisme Barat, serta mempertajam perasaan anti bangsa kulit putih. Masalah sentimen rasial sangat ditonjolkan, sebab Jepang ingin mendapatkan dukungan yang secepatnya dari rakyat.

Proses pembentukan organisasi baru ini, melibatkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Pada bulan Desember 1942, dibentuk satu panitia persiapan yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. Pada tanggal 1 Maret 1942 Ir. Sukarno mengumumkan lahirnya gerakan baru yang bernama Poesat Tenaga Rakyat yang disingkat Poetera.[90] Tujuan daripada Poetera ini menurut Ir. Sukarno adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala apa yang dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Peranan Sukarno dalam membentuk Poetera ini menentukan, sekalipun dalam beberapa hal dibatasi tindak-tanduknya. Tujuan Poetera bagi pemerintah Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha-usaha pemerintah militer Jepang. Untuk itu, telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan, sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan dasarnya. Yang terpenting antara lain adalah tugas untuk memimpin rakyat supaya kuat rasa kewajiban dan tanggung-jawabnya menghapuskan pengaruh Amerika, Inggeris dan Belanda, mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya, mendalamkan pengertian persaudaraan Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang. Di samping propaganda sebagaimana

90 *Asia Raya*, 1 Maret 1942.

tersebut diatas, Poetera mempunyai tugas di bidang sosial-ekonomi.[91] Poetera mempunyai tugas untuk membina masyarakat dan memusatkan potensi itu untuk kepentingan Pemerintah militer Jepang. Karena itu Poetera disusun atas pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Di tingkat Pusat organisasi ini disusun atas empat bagian, yang masing-masing bagian disebut pejabatan yaitu:

1. Pejabatan Susunan Pembangunan
2. Pejabatan Usaha dan Budaya
3. Pejabatan Propaganda.

Pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yaitu pimpinan tingkat *syū*, *ken* dan *gun*. Pada tingkat daerah ini hanya diadakan dua pejabatan saja yang kegiatannya terbatas pada daerah.[92]

Tetapi usaha pengembangan Poetera baru dimulai pada bulan April 1943. Sebagai pemimpin tertinggi diangkat Ir. Sukarno yang dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H. Mas Mansur. Pimpinan Poetera ini bersifat kolektif dan seperti telah diketahui disebut Empat Serangkai. Empat Serangkai dianggap lambang daripada aliran-aliran di dalam pergerakan nasional. Pada tingkat *syū* mula-mula dilantik tujuh orang pimpinan daerah *syū*. Di samping pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia Poetera mempunyai beberapa penasehat bangsa Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, seorang bekas konsul Jepang di Jakarta, G. Taniguchi pemimpin surat kabar *Toindo Nippon*, Ichiro Yamasaki seorang pemimpin badan perdagangan dan Akiyama dari Yokohama Bank.[93] Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di Indonesia sebelum perang.

Pada awal berdirinya, Poetera mendapat sambutan yang baik dari organisasi-organisasi massa yang ada. Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PGRI) beserta sejumlah 15.000 anggotanya telah menyatakan diri akan bergabung dengan Poetera.[94] Demikian pula Perkumpulan Pegawai Pos Menengah (Midpost) akan menyerahkan perkumpulannya kepada Poetera.[95] Jejak kedua organisasi ini kemudian diikuti oleh organisasi

---

91 Interrogation of Shimizu Hitoshi, 27 November 1945.
92 *Asia Raya*, 10 Maret 1943.
93 Report on further interrogation of Shimizu Hitoshi, 2 Desember 1945.
94 *Asia Raya*, 27 Maret 1943
95 *Ibid*, 30 Maret 1943.

lainnya. Pada bulan April Pegawai Pos, Telegraf, Telepon dan Radio (PTTR) di Bandung,[96] dan Pengurus Besar Isteri Indonesia di bawah pimpinan Mr. Maria Ulfah Santoso dan Ny. Yusupadi Danuhadiningrat di Jakarta,[97] sejak tanggal 16 April menyatakan bergabung dengan Poetera. Dari kalangan organisasi pemuda yang pertama kali menyatakan diri masuk dan bergabung dengan Poetera adalah Barisan Banteng.[98] Dari organisasi keolahragaan adalah Ikatan Sport Indonesia (ISI) yang kemudian diikuti oleh beberapa perkumpulan olahraga lainnya yang menjadi anggotanya. Dari kalangan pelajar, Badan Perantaraan Pelajar-pelajar Indonesia (BAPERPI) dibawah pimpinan Supeno juga menyatakan diri bergabung dengan Poetera.[99]

Tetapi Poetera tingkat *syū* dan daerah yang bertingkat lebih rendah tidak dapat berkembang secara baik. Tidak pesatnya perkembangan organisasi ini karena kondisi sosial-ekonomi. Sekalipun Poetera organisasi resmi pemerintah, bantuan pemerintah tidak bisa dirasakan oleh Poetera sebagai organisasi. Untuk penghidupannya Poetera harus mengerahkan dana iuran anggota serta keuntungan badan-badan perdagangan yang didirikan. Dengan segala kekurangannya, Poetera berhasil untuk terus mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan. Dengan rapat-rapat raksasa dan dengan memakai media komunikasi-massa pihak Jepang, pemimpin-pemimpin Indonesia dapat mencapai rakyat secara lebih luas daripada yang pernah dialami dalam jaman Hindia Belanda. Rupa-rupanya pihak Jepang menyadari bahwa Poetera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia.

Perkembangan dan aktivitas Poetera dinilai kurang memuaskan bagi pemerintah Jepang. Poetera kurang menunjukkan dukungannya kepada Pemerintah Militer Jepang. Karenanya mereka memikirkan pembentukan organisasi baru, yang mencakup semua golongan masyarakat. Pada tahun baru 1944 Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakici Harada menyatakan berdirinya organisasi *Djawa Hōkōkai* (perhimpunan-kebaktian Jawa).

Organisasi ini didirikan setelah mendengar pendapat dari Empat Serangkai.[100] Alasan untuk membentuk badan baru

96 *Asia Raya*, 9 April 1943.
97 *Ibid*, 17 April 1943
98 *Ibid*, 31 Maret 1943
99 *Ibid*, 9 April 1943.
100 *Peratoeran-peratoeran Himpoenan Kebaktian Rakjat*, Jakarta, 1944, hal. 1.

menurut keterangan pemerintah Jepang adalah karena semakin menghebatnya perang sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segenap tenaga rakyat lahir dan batin. Dasar pengertiannya berasal dari *hōkōseisyin* (semangat kebaktian). Kebaktian ini memiliki tiga dasar: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Tiga hal inilah yang dituntut dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia berhubung dengan semakin gawatnya perang. Pemerintah berusaha untuk menggabungkan semua kekuatan sosio-ekonomi dan kulturil serta kekuatan-kekuatan politik untuk menyelesaikan perang dengan menggunakan tenaga dan materiil yang ada. [101]

Berbeda dengan Poetera, *Djawa Hōkōkai* dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Susunan organisasi *Djawa Hōkōkai* merupakan lembaga yang integral dengan tubuh pemerintahan. Jika dalam Poetera pucuk pimpinannya diserahkan sepenuhnya kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, hal ini tidak terjadi pada gerakan ini. Pimpinannya langsung di bawah pengawasan *Gunseikan*. Demikian pula mulai *Syūcōkan* sampai ke *kucō* adalah pemimpin-pemimpin *Djawa Hōkōkai*, secara *ex officio*. Kegiatan *Djawa Hōkōkai* sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi :

- melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
- memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa.
- memperkokoh pembelaan tanahair.
- memperteguh kehidupan di masa perang.

Djawa Hōkōkai mempunyai peraturan yang khusus mengenai keanggotaannya. Menurut peraturan itu syarat untuk diterima menjadi anggota, minimal berusia 14 tahun, bangsa Indonesia dan Jepang pegawai negeri, atau organisasi kelompok profesi. Bagi bangsa Jepang yang bukan pegawai negeri, jika ingin menjadi anggota harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada *syūcōkan* setempat. Bagi bangsa Cina dan Eropa terlebih dahulu diteliti.

Pengurus pusat *Djawa Hōkōkai* mempunyai tiga bagian yaitu

101 *Ibid*, hal. 28

bagian pendidikan, bagian usaha dan bagian umum. Pada tingkat daerah *Djawa Hōkōkai* hanya memiliki dua bagian saja. *Djawa Hōkōkai* adalah organisasi sentral yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam *hōkōkai* sesuai dengan bidang profesinya. Guru-guru bergabung dalam wadah *Kyoiku Hōkōkai* (kebaktian para pendidik), *Izi Hōkōkai* (wadah kebaktian untuk para dokter). Kecuali itu *hōkōkai* mempunyai anggota istimewa (*tokubetsu hōkōkai*) yang terdiri atas *Fujinkai* (organisasi wanita), *Keimin Bunka Syidōsyo* (Pusat Kebudayaan), *Boei Engokai* (tatausaha pembantu prajurit Peta dan *heiho*) serta beberapa *hōkōkai* perusahaan. Perkembangan organisasi *Djawa Hōkōkai* tidak berbeda dengan Poetera. Tetapi di dalam usaha pengerahan barang-barang atau padi, *Djawa Hōkōkai* merupakan pelaksanaan utamanya. Bahkan pada pertengahan 1945 semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh *Djawa Hōkōkai*. Potensi sosial-ekonomi masyarakat dimobilisasi melalui *Djawa Hōkōkai* untuk mencapai jumlah yang telah ditentukan, dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Dalam rangka melukiskan kehidupan politik pada jaman pendudukan Jepang, perlu diberikan perhatian khusus kepada golongan Islam. Golongan Islam merupakan golongan yang memperoleh perhatian istimewa dari pemerintah militer Jepang. Golongan ini memperoleh lebih banyak kelonggaran dibandingkan dengan golongan lain karena dinilai bahwa golongan Islam pada dasarnya anti Barat karena soal agama dan karenanya diduga akan lebih mudah dirangkul oleh Jepang. Dalam rangka memberikan kelonggaran kepada golongan Islam di pulau Jawa, pemerintah militer Jepang masih mengijinkan berdirinya satu organisasi Islam, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937 oleh K.H. Mas Mansur dkk. Pada awal pendudukannya, pihak Jepang membentuk Bagian Pengajaran dan Agama dibawah pimpinan Kolonel Horie. Kolonel Horie memulai aktivitasnya dari Jawa Timur. Pada bulan Mei 1942 ia mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pemuka agama dari seluruh Jawa Timur di Surabaya.[102] Dalam pertemuan dengan para pemuka agama ini, Horie menyatakan bahwa ia ingin berkenalan dengan para pemuka agama dan menjelaskan menge-

102 *Soeara MIAI*, th. I No. 1 (1 Januari 2603) hal. 7.

nai tujuan Jepang terhadap agama Islam. Ia meminta agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politis. Setelah pertemuan berakhir, organisasi Islam menyatakan diri tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Partai Islam Indonesia pimpinan dr. Sukiman telah menyatakan diri tidak akan membantu, dan menghentikan semua aktivitasnya. [103]

Hasil dari pertemuan di Surabaya itu, ditingkatkan pada akhir Desember 1942: sejumlah 32 kyahi dari seluruh Jawa diundang menghadap Panglima Tentara Ke-enambelas Letnan Jenderal H. Imamura. Dalam pertemuan itu baik Jenderal Imamura, maupun *Gunseikan* Mayor Jenderal Okasaki menyatakan bahwa Jepang akan tetap menghargai Islam dan akan mengikutsertakan golongan Islam di dalam pemerintahan. Dalam pidato balasannya K.H. Mas Mansur menyatakan terimakasihnya kepada pemerintah Jepang karena akan mengikutsertakan para kyahi di dalam pemerintahan tanpa membedakan tamatan pesantren maupun tamatan sekolah. Mula-mula Jepang memilih MIAI sebagai wadah daripada golongan Islam sebagai satu-satunya organisasi gabungan, yang mewakili kepentingan umat Islam. Tetapi MIAI baru diakui oleh pemerintah militer Jepang sesudah merubah anggaran dasarnya, azas dan tujuannya. Di dalam azas dan tujuan MIAI yang baru ditambah dengan kalimat "turut bekerja dengan sekuat tenaganya dalam pekerjaan membangunkan masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama dilingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon." Pada tahap pertama pengaktifan kembali MIAI agaknya MIAI lebih berhasil daripada Gerakan Tiga A. Ketua Dewan MIAI diserahkan kepada Wondoamiseno dan dibantu oleh para kyahi terkenal seperti K.H. Mas Mansur sebagai Ketua Muda dan K.H. Taufiqurrachman sebagai penasehat. Untuk memperkembangkan MIAI ini di setiap daerah *syū* dibentuk majelis konsul. Kegiatan MIAI yang sangat menonjol yalah membentuk *baitul mal*. *Baitul mal* ini berkembang pesat di daerah-daerah. Kolonel Horie sebagai pemimpin yang menangani masalah-masalah keagamaan berusaha terus untuk menggarap kyahi yang berada di daerah Jawa Barat. Pada bulan Januari 1943 secara berturut-turut Horie mengadakan pertemuan di beberapa kota kabupaten.[104] Ia mengerahkan para pembantunya orang Jepang Islam seperti Abdul Muniam Inada, Moh. Sajido Wakas,

103 *Ibid*, hal. 6.

104 *Asia Raya*, 19, 21 Januari 1943.

agar secara bergilir mengunjungi beberapa mesjid besar yang ada di Jakarta, untuk mengadakan ceramah dan khotbah Jum'-at. [105]

MIAI sebagai organisasi tunggal golongan Islam, mendapat simpati yang luarbiasa dari kalangan umat Islam. Kegiat-an-kegiatannya di dalam membentuk baitul mal, melaksanakan hari peringatan hari besar Islam, menyebabkan MIAI menjadi semakin maju. Pihak Jepang waspada terhadap pertumbuhan MIAI yang sekonyong-konyong menjadi besar dan pesat. Para tokoh MIAI di daerah-daerah mulai diawasi. Untuk mengenal dan meyakini bahwa tidak berbahaya, perilaku dan pribadi para pemuka agama di daerah-daerah, oleh pemerintah diseleng-garakan latihan kyahi. Latihan diselenggarakan oleh MIAI. Para kyahi peserta latihan ini harus dipilih dan disaring melalui syarat-syarat: mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan mempunyai watak yang baik. Lama latihan satu bulan bertempat di Balai Urusan Agama Jakarta. Dari setiap *syū* dikirimkan dua orang peserta. Pada angkatan pertama latihan ini para pesertanya dipilih sendiri oleh *kenco*. [106] Selama tahun 1943, telah selesai dilatih 3 angkatan, yakni pada bulan-bulan Juli, Agustus, dan September. Pada tahun berikutnya latihan kyahi diadakan secara lokal, karena latihan tingkat pusat sudah dianggap cukup. Dari hasil latihan kyahi itu pemerintah Jepang berkesimpulan bahwa kyahi tidak membahayakan pengaruhnya. Pada bulan September 1943, dua organisasi Islam Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah diijinkan berdiri kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan dibidang kerohanian dan sosial. MIAI bagi Jepang masih kurang memuaskan karena menurut seleranya kegiatan-kegiatannya ter-batas. Pada bulan Oktober 1943, secara resmi MIAI dibubarkan dan dibentuk badan baru yang bernama Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia (Masjoemi) yang disahkan oleh *Gunseikan* pada 22 Nopember 1943 dengan pimpinan Ketua Pengurus Besar KH. Hasjim Asy'ari, dengan wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasjim, Kartosu-darmo dan dari NU K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, K.H. Moch-tar. [107]

Bersamaan dengan dibentuknya Gerakan Tiga A dari golong-

105 *Asia Raya*, 25 Januari 1943.
106 *Soeara Asia*, 7 Mei 1943.
107 *Asia Raya*, 28 Nopember 1943.

an muda dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR). Gerakan ini dimulai dari tingkat pusat di Jakarta. Sebenainya di daerah juga telah dibentuk komite untuk pemuda seperti Komite Penginsafan Pemuda yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur kepanduan.[108] Bentuk komite seperti itu sifatnya sangat lokal dan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing. Di tingkat pusat BPAR diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan dipimpin oleh dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. BPAR adalah ormas daripada Gerakan Tiga A, sekalipun demikian organisasi BPAR ini lebih populer daripada induknya. Di samping mendirikan organisasi BPAR pemerintah Jepang mengadakan latihan pemuda di *Seinen Kunrensyo* di tempat latihan ini mereka dididik selama lebih kurang 1½ bulan. Yang dididik adalah para pemuda yang berasal dari pelbagai macam kepanduan dan tujuannya adalah untuk menghidupkan semangat satria. Pendidikan pemuda diadakan atas prakarsa H. Syimizu Wakabayasyi. Pada tahap pertama dilatih sejumlah 250 pemuda .[109] Latihan yang semacam ini juga diadakan di Yogyakarta.

Latihan-latihan pemuda semacam itu menjadi intensif tetapi perkumpulan-perkumpulan kepanduan masih diperkenankkan berdiri dan melakukan kegiatan. Kegiatan besar kepanduan adalah Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia yang diadakan di Jakarta, bahkan mendapat kunjungan dari *Gunseikan* dan Empat Serangkai dari Poetera.

Pada awal 1943 aktivitas gerakan-gerakan pemuda diintensifkan di semua *syū*. Bahkan di Jakarta *Syū* di setiap *gun* diadakan pendidikan pemuda. Semua usaha mengadakan gerakan pemuda secara lokal dan menyeluruh itu adalah dalam rangka persiapan membentuk gerakan pemuda yang terpusat dan dibawah satu pucuk pimpinan. Dalam masa persiapan ini pelbagai pujian dan harapan bagi pemuda disiarkan secara luas.

Pada bulan April 1943, tepat pada hari ulangtahun Kaisar Jepang diumumkan secara resmi berdirinya dua organisasi pemuda yang diberi nama *Djawa Seinendan* dan *Keibodan*. Kedua organisasi ini langsung di bawah pimpinan *Gunseikan*. Persaratan menjadi anggota *Seinendan* tidak begitu sulit. Mereka

---

108 *Asia Raya*, 8 Juni 1942.
109 *Asia Raya*, 26 Juni 1942.

adalah pemuda-pemuda Asia yang berusia 15 – 25 tahun (kemudian diubah menjadi 14 – 22 tahun). Sebagai pembina *Seinendan* adalah *Naimubu Bunkyokyoku* (Departemen Urusan Dalam Negeri bagian pengajaran, olahraga dan seinendan). Pimpinan exekutif di daerah *syū* adalah *syūcōkan* sendiri, demikian pula pada daerah yang tingkatnya di bawah *syū* para kepala daerah menjadi pimpinan langsung daripada *Seinendan* itu. *Seinendan* ini tidak semata-mata dibentuk di desa-desa atau di sekolah-sekolah, tetapi juga di pabrik atau perumahan-perumahan. Pada bulan Oktober 1944 dibentuk *Josyi Seinendan (Seinendan* putri). Untuk mensukseskan organisasi *Seinendan*, pemerintah Jepang memperluas *Seinen-Kunrensyō* (pusat latihan pemuda) yang didirikan pada 1942, menjadi *Cuō Seinen Kunrensyō* (pusat latihan seinendan). Di pusat latihan inilah kader-kader pimpinan Seinendan daerah dilatih. Disini mereka mendapat latihan dasar kemiliteran tetapi tanpa menggunakan senjata yang sebenarnya. Di dalam rangka perang, *Seinendan* merupakan barisan cadangan yang bertugas untuk mengamankan garis-belakang. Sedang *Keibodan* adalah pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian seperti : penjaga lalulintas, pengaman-an desa, dan lain-lain yang menyangkut tugas-tugas kepolisi-an. Berbeda dengan *Seinendan*, *Keibodan* anggota-anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia 20 – 35 tahun (kemudian diubah menjadi 26 – 35 tahun). Pembina *Keibodan* adalah *Keimubu* (departemen kepolisian) dan di daerah *syū* dibina oleh *keisatsubu* (bahagian kepolisian) dan seterusnya dibawah tingkat *syū*, *Keibodan* dimasukkan dalam organisasi kepolisian, kepala polisi daerah itu harus bertanggungjawab mengenai *Keibodan* di daerahnya. Untuk meningkatkan mutu *Keibodan* diadakan latihan khusus para kader *Keibodan* di Sukabumi bertempat di sekolah polisi. Di kalangan penduduk Cina dibentuk semacam *Keibodan*, namanya *Kakyo Keibodan*.

Pada pertengahan 1944, *Cūo Sangi In* telah mengadakan sidangnya yang ke-3. Pada sidang itu *Saikō Syikikan* mengaju-kan pertanyaan bagaimana cara memperdalam keinsafan rakyat terhadap kewajiban yang sedalam-dalamnya dan membangunkan persaudaraan segenap rakyat. *Cūo Sangi In* memberikan jawaban agar membentuk satu badan yang dapat mempersatukan seluruh penduduk untuk bersama-sama menggiatkan usaha dalam men-

capai kemenangan akhir. Kemudian dibentuk *Djawa Sentōtai* (benteng perjuangan Jawa). *Djawa Sentōtai* ini kemudian dimemasukkan ke dalam *Djawa Hōkōkai*, Benteng Perjuangan Jawa ini membentuk Barisan Pelopor (*Suisyintai*) yang diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Di samping Barisan Pelopor juga dibentuk Barisan Pelopor Istimewa. Barisan Pelopor ini pada hakekatnya tidak berbeda dengan *Seinendan*. Sebulan kemudian dibentuk pula Barisan Pelopor Wanita (*Josyi Suisyintai*), dengan tugas-tugas khusus.

D. PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI SOSIAL

1. Pendidikan

Jaman pendudukan Jepang di Indonesia, memperlihatkan gambaran buruk mengenai bidang pengajaran, bilamana dibanding dengan masa-masa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah rendah, menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Perguruan Tinggi/Fakultas terdiri dari 4 buah, dapat dikatakan beberapa waktu belum dapat melakukan kegiatan-kegiatannya . Jumlah murid sekolah merosot 30%, murid sekolah menengah merosot 90%. Guru-guru sekolah rendah berkurang 35%, guru sekolah menengah yang aktif tinggal kira-kira 5%. Angka buta huruf tinggi sekali walaupun memang ada di sana-sini dilakukan usaha-usaha untuk pemberantasan buta-huruf. [110]

Pada masa pemerintahan militer Jepang pendidikan tingkat sekolah dasar dijadikan satu macam saja yakni sekolah dasar 6 tahun. Sebenarnya Jepang mengadakan penyeragaman tersebut adalah hanya untuk memudahkan pengawasan sekolah-sekolah rendah tersebut, baik dalam isi maupun dalam hal penyelenggaraannya. Ternyata kemudian bahwa penyeragaman tersebut menguntungkan bagi kita, terutama bila dilihat dari segi pendidikan itu sendiri, yaitu menghapuskan diskriminasi. Sistim pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan kepada keperluan perang Asia Timur Raya, seperti disebutkan di bawah ini :

---

110 Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, jilid VIII, Jakarta 1965 hal. 35. Pemberantasan butahuruf ini, dimasukkan dalam kategori pendidikan masyarakat. Pendidikan ini dipelopori oleh Poetera atau Djawa Hōkōkai dan Tonarigumi, *Soeara Asia*, 28 April 2603.

1. Mengadakan latihan bagi guru-guru di Jakarta untuk meng-indoktrinasi mereka dalam *Hakkō Iciu* (Kemakmuran bersama di Asia Timur Raya). Para peserta latihan diambil dari tiap-tiap daerah/atau kabupaten. Sesudah mereka selesai dari latihan tersebut harus kembali ke daerah masing-masing dan mengadakan latihan untuk meneruskan hasil-hasil latihan yang diperolehnya selama latihan di Jakarta. Dengan cara demikian para guru mendapat gemblengan mental ideologis.
2. Menghapuskan diskriminasi dalam sistim persekolahan karena struktur sekolah diseragamkan jenisnya menjadi:

A. Sekolah Umum terdiri dari :
   a. Sekolah rakyat 6 tahun *Kokumin Gakko*, disamping itu masih ada lagi sekolah desa atau sekolah pertama,
   b. Sekolah Menengah 3 tahun,
   c. Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun.

B. Sekolah guru terdiri dari :
   a. Sekolah Guru 2 tahun *(Syoto Syihan Gakko)*,
   b. Sekolah Guru 4 tahun *(Guto Syihan Gakko)*,
   c. Sekolah Guru 6 tahun *(Koto Syihan Gakko)*.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar digunakan disemua sekolah-sekolah dan dianggap sebagai matapelajaran utama. Bahasa Jepang diberikan sebagai matapelajaran wajib. Para pelajar diharuskan menghormati adat-kebiasaan Jepang. Pelajaran bahasa daerah diberikan pada murid kelas 1 dan 2 sebagai bahasa pengantar, sampai murid dapat mengerti bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia biasanya mulai diajarkan pada kelas 3.

Murid-murid diharuskan melakukan *kinrōhosyi* (kerjabakti), seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan-jalan, dll. Selain itu juga diadakan latihan jasmani serta latihan kemiliteran.

Murid-murid menerima gemblengan sedemikian rupa agar mereka memiliki dan bersemangat Jepang *(Nippon Seisyin)*, walaupun mereka itu orang-orang Indonesia. Tradisi lainnya yang harus dilakukan para pelajar adalah harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dan lagu-lagu lainnya, serta melakukan penghormatan kearah istana Kaisar di Tokyo dan bendera Jepang dan melakukan gerak badan (pendidikan jasmani) yang disebut *taiso*. Untuk guru-guru di samping diadakan latihan juga

diadakan kursus-kursus bahasa Jepang, yang diakhiri dengan ujian. Bila mereka ternyata lulus dari ujian itu, maka diberikan sekedar tambahan gaji sebagai perangsang.

Demikianlah, maka sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan menjadi tempat pendidikan yang militeristis dán tempat propaganda. Menurut Jepang bahwa melalui pendidikan akan dibentuk kader-kader untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi Kesemakmuran Asia Timur Raya. Kesemakmuran Asia Timur Raya tergantung pada perang Asia Timur Raya. Karena itu segala usaha harus ditujukan untuk memenangkan perang itu. Konsepsi dan cara-cara sistim pelaksanaannya telah lama dibuat oleh Jepang sebelum Perang Pasifik pecah. [111]

Salah satu cara dalam melaksanakan konsepsi itu adalah melalui pendidikan. Karena itulah, maka pemerintah militer Jepang mulai membuka dan mengatur pendidikan di Indonesia (Jawa). Sejak bulan Juli 2602 (1942), sekolah-sekolah kembali dibuka secara bertahap, dari tingkat sekolah dasar (rakyat), sekolah menengah (umum, kejuruan) hingga sekolah menengah tinggi .

Di samping pembukaan kembali sekolah-sekolah pemerintah bekas pemerintah Belanda, juga diijinkan dibukanya kembali sekolah-sekolah swasta, yaitu sekolah-sekolah yang diasuh oleh sesuatu badan swasta atau yayasan. Misalnya: sekolah agama Islam, [112] sekolah Taman Siswa, sekolah Muhammadiyah, dll. [113] Sekolah-sekolah swasta yang dulunya diasuh oleh badan-badan Missi ataupun oleh Zending, pada umumnya kembali dibuka dengan catatan, bahwa sekolah-sekolah itu langsung diselenggarakan oleh pemerintah Jepang, sebagaimana sekolah-sekolah negeri. Mengenai pembukaan sekolah-sekolah swasta baru, pemerintah militer Jepang memberikan kesempatan kepada perkumpulan-perkumpulan untuk membuka sekolah-sekolah kepada golongan minoritas misalnya: kepada Perkumpulan *Chung Hua Chiao Thung* diijinkan membuka sekolah bagi penampungan anak-anak turunan golongan Cina. [114]

Dengan dikeluarkannya *Osamu Seirei* No. 22/2604 (1944) yaitu mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta dan kebebasan

---

111 Willard H. Elsbree, *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements*, Cambridge, 1953, hal. 38.

112 *Sinar Baroe*, 10 Juli 2602 (1942).

113 *Ibid*, 2 Agustus 2605 (1945).

114 *Soeara Asia*, 14 April, 1603 (1943).

untuk membuka sekolah-sekolah, baru diberikan kepada *Djawa Hōkōkai*, sedang bagi swasta lainnya, hanya diperkenankan untuk membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Pemberian ijin demikian untuk *Djawa Hōkōkai* tidak mengherankan, karena badan itu adalah suatu badan/organisasi untuk membantu Jepang dalam usaha perangnya.[115] Pengadaan sekolah-sekolah kejuruan dan bahasa adalah sejajar dengan kepentingan Jepang di Indonesia, yaitu untuk memenuhi tenaga kerja pendidik.

Di muka telah disebutkan, bahwa pemerintah militer Jepang mengadakan latihan-latihan atau indoktrinasi kepada para guru untuk seluruh Jawa. Latihan pertama dimulai pada bulan Juni 1942 di Jakarta. Matapelajaran yang diberikan kepada mereka, antara lain adalah: pendidikan semangat, bahasa dan adat-istiadat Jepang, nyanyian dan lagu-lagu Jepang, olahraga, pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan, dan sebagainya.[116]

Para guru turut juga menjadi pelaksana propaganda. Latihan-latihan bagi para guru-guru untuk seluruh Jawa seperti disebutkan di atas adalah merupakan suatu *pilot project* pemerintah militer Jepang. Setelah selesai latihan, mereka dikembalikan ke daaerah masing-masing. Mereka meneruskan hasil-hasil latihan yang diperolehnya itu kepada rekan-rekan guru, murid-murid dan juga kepada masyarakat lingkungannya.[117] Kedudukan golongan pendidik dalam masa Jepang mendapat tempat baik dalam lingkungan masyarakat.

Di masa pemerintah militer Jepang, semua perguruan tinggi/fakultas ditutup, walaupun kemudian ada beberapa yang dibuka kembali, seperti Perguruan Tinggi Kedokteran *(Ika Daigaku)* di Jakarta (April 1943) dan Perguruan Tinggi Teknik *(Kogyo Daigaku)* di Bandung. Jepang membuka Perguruan Tinggi Pamongpraja *(Kenkoku Gakuin)* di Jakarta dan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor (1943).[118]

Demikianlah, bila dilihat dari segi pencapaian akademis *(academic achievements)*, maka perguruan tinggi pada masa Jepang itu benar-benar mundur, akan tetapi *achievement* yang paling penting pada sekolah-sekolah ketika itu (1942 – 1945) adalah nasionalisasi bahasa pengantar menjadi bahasa Indonesia

115 *Djawa Baroe*, No. 7, 4 Januari 2604 (1944) hal. 6.
116 *Soeara Asia*, 9 Juli 2602 (1942).
117 *Asia Raya*, 9 Juli 2602 (1942)
118 *Asia Raya*, 1 Pebruari, 2603 (1943).

dan permulaan nasionalisasi staf pengajar serta pembentukan kader-kader muda untuk tugas besar dan berat di masa datang.

2. Komunikasi sosial

Sudah tentu dapat dipahami, bahwa tentara Jepang yang menguasai Indonesia dapat menguasai media komunikasi seperti suratkabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwara dan sebagainya. Karena dengan menguasai dan mempergunakan alat-alat tersebut dapatlah diatur dan dikendalikan usaha-usaha propagandanya.

Suratkabar dan majalah dilarang terbit dengan tiada ijin istimewa dan dibentuklah badan-badan sensor. Pikiran-pikiran atau pendapat yang tiada sesuai dengan kehendak dan cita-cita Jepang dilarang. Suratkabar yang terbit berada di bawah pengawasan badan yang diberi nama *Jawa Syinbun Kai.* [119]

Suratkabar berbahasa Belanda, Cina dan Indonesia dihentikan penerbitannya oleh pemerintah militer Jepang. Karena penguasa militer Jepang itu menyadari bahwa pers adalah suatu alat yang ampuh, maka karenanya harus berada dalam penguasaan pemerintah militer Jepang untuk dipakai sebagai alat propaganda yang mendukung sepenuhnya politik pemerintah. Hanya untuk sementara, suratkabar *Tjahaja Timoer* dan surat kabar *Pemandangan* yang berkeras memperjuangkan untuk meneruskan penerbitannya dengan menyatakan kepada Jepang "bahwa menyetopnya adalah suatu usaha menekan pikiran dan menghalangi kemajuan Indonesia". Tidak lama kemudian suratkabar tersebut dipaksa oleh Jepang untuk tidak terbit lagi. [120] Sebagai gantinya diterbitkan surat kabar *Asia Raya* pada bulan April 2602 (1942) dengan pimpinan Sukardjo Wirjopranoto.

Pada tanggal 8 Desember 2602 (1942) di Jakarta diterbitkan oleh pemerintah militer sebuah suratkabar yang bernama *Djawa Shinbun*. Suratkabar berbahasa Jepang tersebut berada dibawah pimpinan Bunsyiro Suzuki. [121] Suratkabar *Asia Raya* dan *Djawa Shinbun* merupakan sumber pemberitaan bagi seluruh suratkabar di Jawa. Selain daripada itu diterbitkan pula suratkabar *Kung Yung Pao* yang berbahasa Cina dibawah pimpinan *Oei Tiang Tjoei.*

119 *Djawa Baroe* No. 4. th III, 15 Pebruari, 2609 (1943) hal. 23.
120 Sekitar bulan Juli 2602 (1942).
121 *Asia Raya*, 4 Pebruari 2603 (1943).

Di Bandung surat kabar *Sipatahunan* dari Paguyuban Pasundan dan surat kabar *Nicork Express* dihentikan penerbitannya oleh Jepang dan diganti dengan surat kabar *Tjahaja* dengan pimpinan umum Oto Iskandardinata. Suratkabar *Mataram* kepunyaan Belanda di Yogyakarta diganti dengan suratkabar *Sinar Matahari* dengan pimpinan R. Sudjito, sedang suratkabar *Sedyo Tomo* kepunyaan seorang Indonesia tidak diperbolehkan lagi terbit. Di Semarang suratkabar *Locomotief*, suratkabar *Matahari*, suratkabar *Soeara Semarang* dan surat kabar *Djaja Oepaja* semuanya dihentikan penerbitannya oleh Jepang. Sebagai gantinya terbit suratkabar *Sinar Baroe* di bawah pimpinan Parada Harahap. Di Surabaya semua suratkabar kepunyaan Indonesia, Belanda dan Cina dilarang terbit dan beredar; kemudian pemerintah Jepang menerbitkan suratkabar *Soeara Asia* di bawah pimpinan R. Tukul Surohadinoto.

Demikianlah gambaran suratkabar-suratkabar baik yang dilarang terbit dan dihentikan peredarannya maupun yang diterbitkan oleh Jepang, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari pertimbangan politik Jepang di Indonesia. Tindakan-tindakan yang demikian berlaku pula di Sumatra (Palembang, Bukittinggi, Medan). Semua suratkabar yang diterbitkan oleh Jepang baik di Jawa maupun di Sumatera dicetak oleh ;percetakan suratkabar-suratkabar Belanda dulu, sehingga bila dilihat rupa dan bentuk suratkabar-suratkabar itu baik, akan tetapi ditinjau isinya sedikitpun tidak beroleh kemajuan apa-apa.

Pada tanggal 2 Pebruari 2603 (1943), setelah suratkabar-suratkabar yang berada di bawah pengawasannya beredar, pemerintah pendudukan militer Jepang mendirikan perserikatan (gabungan) suratkabar-suratkabar di Jawa dan diberi nama *Djawa Shinbun Kai*. Pengurusnya terdiri dari pimpinan redaksi semua suratkabar yang terbit di Jawa termasuk *Djawa Shinbun* dan kantor berita *Domei* cabang Jawa. Ditunjuk sebagai ketua perserikatan: Bunsyiro Suzuki dari suratkabar *Djawa Shinbun*, sedang Sukardjo Wirjopranoto dari *Asia Raya* ditunjuk sebagai Ketua Muda serta beberapa anggota pengurus lainnya atas pengangkatan *Gunseikan*.[122] *Djawa Shinbun Kai* dijadikan badan hukum dan sejak itu pula semua suratkabar yang dulunya berdiri sendiri sekarang berada dalam pengaturan dan pengawasan

122 *Asia Raya*, 4 Pebruari 2603 (1943).

Djawa Shinbun Kai. Jadi tidaklah mengherankan bilamana isi, bentuk, jumlah dan daerah peredarannya ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Di samping didirikan pula badan sensor pers.

Semua artikel-artikel atau tulisan yang akan diterbitkan, baik untuk suratkabar maupun untuk majalah, karya berbentuk ceritera maupun sajak harus melewati badan sensor. dan baru dapat dicetak dan beredar bilamana telah dibubuhi paraf pegawai yang berwenang memberikan ijin itu.

Animo pembaca pada umumnya baik, terbukti dari jumlah peredaran suratkabar harian tersebut. Misalnya sebagai contoh: suratkabar *Sinar Baroe* pada bulan Juli 2602 (1942) mencatat tempat-tempat peredarannya hampir di semua kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti: Ambarawa, Batang, Blora, Cirebon, Yogyakarta, Jepara, Kendal, Magelang, Pekalongan, Pemalang, Purwodadi, Purworejo, Salatiga, Solo, Tegal, Temanggung, Madiun, Surabaya, Kedungjati dan lain-lain. '[123]

Terjadinya peningkatan animo membaca suratkabar itu ada kemungkinan disebabkan oleh karena pada waktu itu suratkabar-suratkabar lain tidak ada dan ditambah lagi suratkabar itu memakai bahasa Indonesia atau ada bagian-bagian yang diberi tempat untuk bahasa daerah (Sunda, Jawa, Madura dll). Jumlah oplah berbagai suratkabar di Jawa pada tahun 1603 (1943) sebagai berikut :

Soeara Asia	di Surabaya	23.000
Asia Raya	di Jakarta	18.000
Kung Yung Pao	di Jakarta	5.000
Tjahaja	di Bandung	8.000
Sinar Baroe	di Semarang	7.000
Sinar Matahari	di Yogyakarta	5.000 [124]

Di samping suratkabar disebut di atas diterbitkan juga majalah-majalah seperti *Djawa Baroe, Pandji Poestaka, Seroean Kita* [125] dan *Warta Sjū* untuk tiap-tiap *Sjū* yang memuat warta daerah dan memakai bahasa daerah yang bersangkutan dan bahasa

123 *Sinar Baroe*, 2 Juli 2602 (1942).

124 Parada Harahap, *Serba sedikit tentang Pers*, Jakarta, 1952, hal. 36.

125 *Sendenbu*, Jakarta yang menerbitkannya. Terbit 2 kali sebulan tiap-tiap tanggal 10 dan tanggal 25. Diterbitkan secara gratis, setiap terbitan 20.000 lembar. *Asia Raya*, 13 Pebruari, 2603 (1943).

Indonesia. Oplah suratkabar atau majalah saat itu sangat terbatas, karena kurangnya kertas, tinta dan prasarana lainnya.

Seperti telah disebutkan, *Djawa Shinbun Kai* setelah dijadikan badan hukum kemudian berfungsi sebagai pengawas terhadap suratkabar yang terbit dan beredar di Jawa. Karena itu Jepang mengangkat dan menempatkan beberapa orang wartawan berbangsa Jepang yang diberi kedudukan sebagai penasehat *(syidobucō)* pada *Djawa Shinbun Kai.* Wartawan-wartawan Jepang itu hanya menjadi penasehat saja, sedang yang bertindak sebagai penanggungjawab adalah orang Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya para *syidobucō* itu lebih banyak menimbulkan kesukaran-kesukaran dari pada membantu memperlancar penerbitannya.

Asia Raya masih terus terbit di Jakarta beberapa waktu setelah Proklamasi. Tetapi kemudian terjadi pertentangan karena pihak Jepang melarang menyiarkan berita Proklamasi melalui suratkabar itu. Karena itu semua staf redaksi *Asia Raya* serentak meletakkan jabatan, sehingga suratkabar tersebut terhenti penerbitannya. Sementara itu beberapa orang wartawan Indonesia di bawah pimpinan B.M. Diah berhasil memaksa pegawai-pegawai Jepang untuk meninggalkan percetakan *Djawa Shinbun Kai* (dulu penerbitan *Java Bode*), dan kemudian mereka menerbitkan suratkabar *Merdeka* pada tanggal 1 Oktober 1945, di bawah pimpinan B.M. Diah.

Demikian juga suratkabar di Bandung direbut oleh wartawan-wartawan Indonesia dan kemudian mereka menerbitkan suratkabar *Soeara Merdeka*. Suratkabar *Sinar Baroe* di Semarang digantikan oleh suratkabar *Warta Indonesia*, suratkabar *Soeara Asia* di Surabaya digantikan oleh suratkabar *Soeara Rakyat* dan suratkabar *Sinar Matahari* di Yogyakarta digantikan oleh suratkabar *Kedaulatan Rakyat.*

Seperti diketahui radio tidak kurang pentingnya sebagai alat komunikasi-massa, dan karena itu Jepangpun setelah menduduki Indonesia terus bertindak menguasai radio, baik swasta maupun semi pemerintah, seperti Perserikatan-Perserikatan Radio Ketimuran (PPRK), *Nederlands-Indische Radio Omroep* (NIROM) dan sebagainya. [126]

Setelah mereka menghentikan semua aktivitas siaran radio swasta dan semi-pemerintah tersebut, maka Jepang mendirikan

126 Kementerian Penerangan, *Sedjarah Radio di Indonesia*, Jakarta, 1953, hal. 16.

suatu badan yang mengurus dan menyelenggarakan siaran radio, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Badan ini diberi nama *Hōsō Kanri Kyoku* untuk Jawa di bawah pimpinan Tomabeci. *Hōsō Kanri Kyoku* mempunyai 8 cabang radio di daerah-daerah dan disebut *Hōsōkyoku* Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, dan Surakarta. Cabang-cabang tersebut dipimpin oleh Jepang sendiri, sepepti halnya di Jakarta dipimpin oleh Syimaura. [127]

Di samping adanya *Hōsōkyoku* tersebut, maka di kabupaten-kabupaten didirikan lagi kantor studio; kantor tersebut diberi nama *syōdanso. Syōdanso* ini selain menyelenggarakan penyiaran propaganda pemerintah militer Jepang, juga melakukan reparasi dan servis radio di daerah tersebut. Kantor inilah satu-satunya yang diberi tugas oleh Jepang untuk menyelenggarakan reparasi, servis dan penyegelan radio. *Syōdanso* juga memegang peranan penting dalam mengatur penyelenggaraan radio untuk umum propaganda, penyegelan terhadap radio atau menetapkan gelombang-gelombang mana yang boleh didengarkan. Pada masa pendudukan militer Jepang, radio umum dipasang hampir di setiap tempat yang ramai atau dipelosok- pelosok desa dengan maksud agar rakyat dapat mendengarkan siaran-siaran propaganda Jepang. [128] Pengawasan terhadap radio dilakukan dengan ketat untuk mencegah, jangan sampai ada siaran yang lolos dari pengawasan atau penyegelan, sehingga orang dapat mendengarkan siaran luar negeri, kecuali siaran-siaran dari delapan cabang studio *(hōsōkyoku)* tersebut di atas.

Walaupun demikian ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Jepang terhadap semua alat-alat pemberitaan baik melalui radio, kantor berita *Domei* dan suratkabar, tetapi masih ada juga celah yang dapat ditembus oleh pejuang-pejuang Indonesia , yang bekerja di kantor-kantor tersebut. Mereka mengetahui dari siaran-siaran luar negeri mengenai kedudukan kedua belah pihak yang sedang terlibat di dalam Perang Pasifik.

Pemerintah Jepang menerbitkan *Berita Gunseikanbu*, berisi undang-undang dan beberapa maklumat, yang isinya antara lain menyatakan: untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum sesuai dengan perintah Sekutu kepada Jepang dan memperhatikan sikap menekan terhadap Proklamasi dan per-

127 *Ibid*, hal. 27.

128 Kementerian Penerangan *op.cit.*, hal. 22.

juangan-perjuangan lainnya. Berita *Gunseikanbu*, undang-undang dan maklumat tersebut dikirim sampai ke pelosok-pelosok di Jawa melalui kereta-api ke cabang-cabang barisan propaganda Jepang dan agen-agen suratkabar yang dulunya kepunyaan *Djawa Shinbun Kai*.

Untuk menandingi atau memberantas penerangan yang merugikan perjuangan itu, maka beberapa orang pemuda dan mahasiswa yang bekerja sebagai wartawan dan pekerja percetakan berhasil menerbitkan secara gelap *Berita Indonesia*, suatu suratkabar harian, yang pertama terbit setelah Proklamasi. Dalam menyebar-luaskan *Berita Indonesia* itu pegawai jawatan kereta api sangat berjasa sekali,[129] karena dengan usaha merekalah suratkabar itu dapat dengan mudah disebarluaskan di seluruh pelosok pulau Jawa. Di pihak lain mereka kadang-kadang membuang atau membakar Berita *Gunseikanbu*, undang-undang, dan maklumat Jepang, sehingga tidak sampai kepada tempat yang dituju.

Sarana komunikasi, pers dan radio pada masa pemerintahan militer Jepang memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan serta meningkatkan semangat nasional rakyat Indonesia, karena mereka dapat mendengar dan membaca pidato-pidato dan tulisan-tulissan para tokoh pergerakan nasional Indonesia.

Suratkabar-suratkabar dan radio turut menyebar-luaskan pemakaian bahasa Indonesia. Dalam pada itu Indonesia hampir tertutup dari hubungan dengan dunia luar sehingga dapat dikatakan, bahwa pada masa pendudukan Jepang itu Indonesia tertutup ke luar dan ke dalam, karena komunikasi di dalam Indonesia sendiri tertutup, misalnya antar-pulau Sumatera, pulau Jawa, Kalimantan dll. Demikianlah, seluruh bidang komunikasi itu diatur dan dikuasai oleh pemerintah militer Jepang.

Lenyapnya bahasa Belanda dari dunia perguruan dan dari pergaulan sehari-hari memberikan kesempatan yang baik bagi meluasnya pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia. Orang Belanda sendiri dilarang memakai bahasanya sendiri. Bila

---

129 Militansi pegawai-pegawai/angkatan muda dari jawatan kereta-api cukup menggembirakan, seperti putusan-putusan yang diambil oleh mereka dalam rapatnya di Taman Raden Saleh Jakarta, tanggal 7 Juli 2605 (1945), antara lain: Mutlak Indonesia Merdeka bagi kemuliaan bangsa, dan oleh karena itu Angkatan Muda sanggup berjuang sehebat-hebatnya untuk mencapai cita-cita itu. lihat: *Sinar Baroe*, 10 Juli 2605.

ada yang melanggarnya dituduh membantu musuh (Belanda, Amerika Serikat dan Inggeris). Seperti diketahui, pada masa penjajahan Belanda bahasa Belanda hampir menjadi bahasa resmi satu-satunya.

Demikian kerasnya larangan pemakaian bahasa Belanda. sehingga hampir di semua toko, rumahmakan, perusahaan, perkumpulan dan lain-lainnya yang memakai papan dan reklame yang berbahasa Belanda harus menggantinya dengan yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Jepang. Film atau gambar-gambar yang memakai bahasa Belanda dilarang beredar.[130] Sedang mengenai bahasa Jepang tidak jual mahal, malahan diobral, tidak seperti masa pemerintahan Hindia Belanda,di mana bahasa Belanda sebelumnya hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu.[131]. Ketika itu sudah jelas, bahwa maksud bangsa Jepang adalah untuk menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Jepang. Karena itulah di semua sekolah yang dibuka kembali oleh Jepang harus diberi matapelajaran bahasa Jepang. Di kota-kota besar, menengah, kecil ataupun di kantor diadakan sekolah atau kursus bahasa Jepang, dan umumnya pada akhir pendidikan diadakan ujian. Pelajaran bahasa Jepang disiarkan melalui siaran radio.[132] Selain itu Jepang juga menerbitkan suratkabar *Kana Djawa Shinbun*, yang memakai bahasa Jepang dengan mempergunakan tulisan *katakana*. Disebutkan bahwa tujuan utama daripada suratkabar itu adalah untuk menyebarluaskan bahasa Jepang dan meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis bagi rakyat Jawa.[133] Demikianlah Jepang mendatangkan ahli-ahli bahasa Jepang beratus-ratus ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia,[134] untuk mengajarkan bahasa Jepang. Jepang harus belajar bahasa Indonesia, agar dapat berhubungan langsung dengan rakyat Indonesia, dan kadang-kadang dengan pengetahuan bahasa yang minim itu, ia dapat menjelajah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia.

Oleh karena pada waktu itu banyak benar yang diucapkan atau dituliskan dalam bahasa itu, maka dengan tiba-tiba bahasa itu maju dengan amat cepat. Perkembangan bahasa Indonesia

---

130 *Asia Raya*, 1 Pebruari 2603.

131 Pada jaman Hindia Belanda ada yang pro ada yang kontra tentang pengajaran bahasa Belanda untuk anak bumiputra.

132 *Sinar Baroe*, 6 Juni 2603.

133 *Djawa Baroe*. No. 24 th II, 15 Desember 2603 (1943), hal. 8

134 *Asia Raya*, 9 Pebruari 2603.

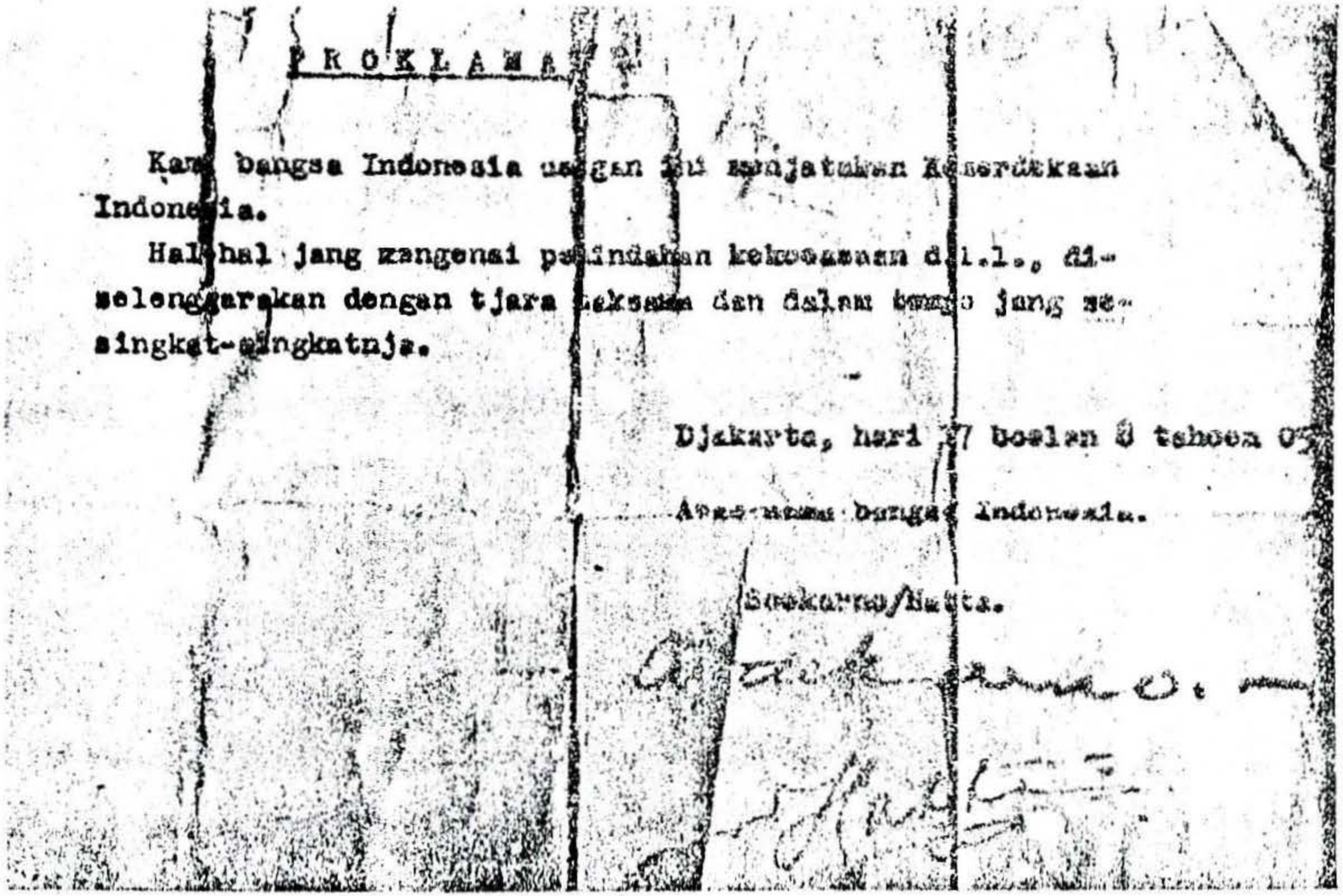

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Teks Proklamasi yang Otentik.

(sep. Deppen).

R 221

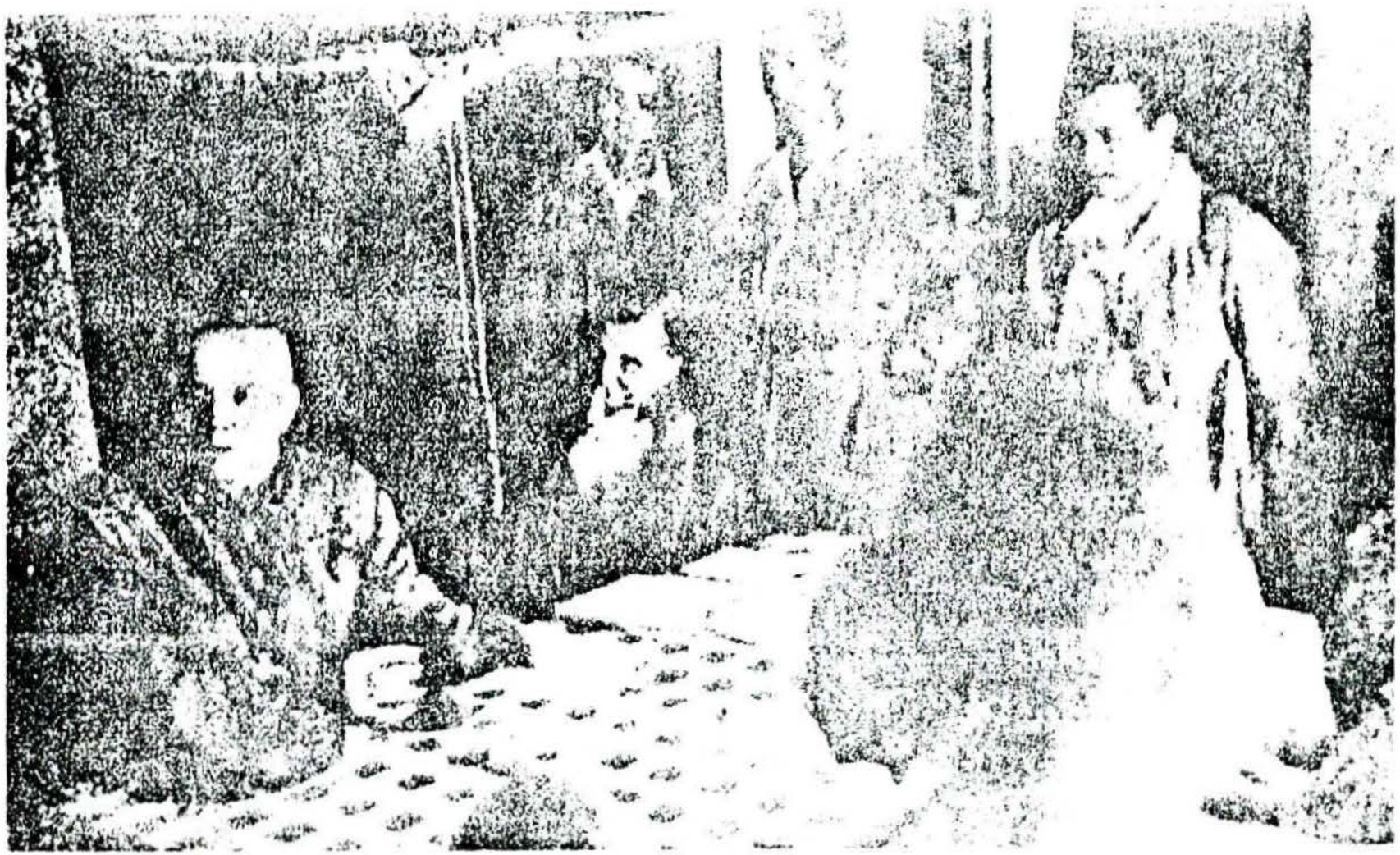

Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, pada tanggal 8 Maret 1942.

(rep. Deppen).

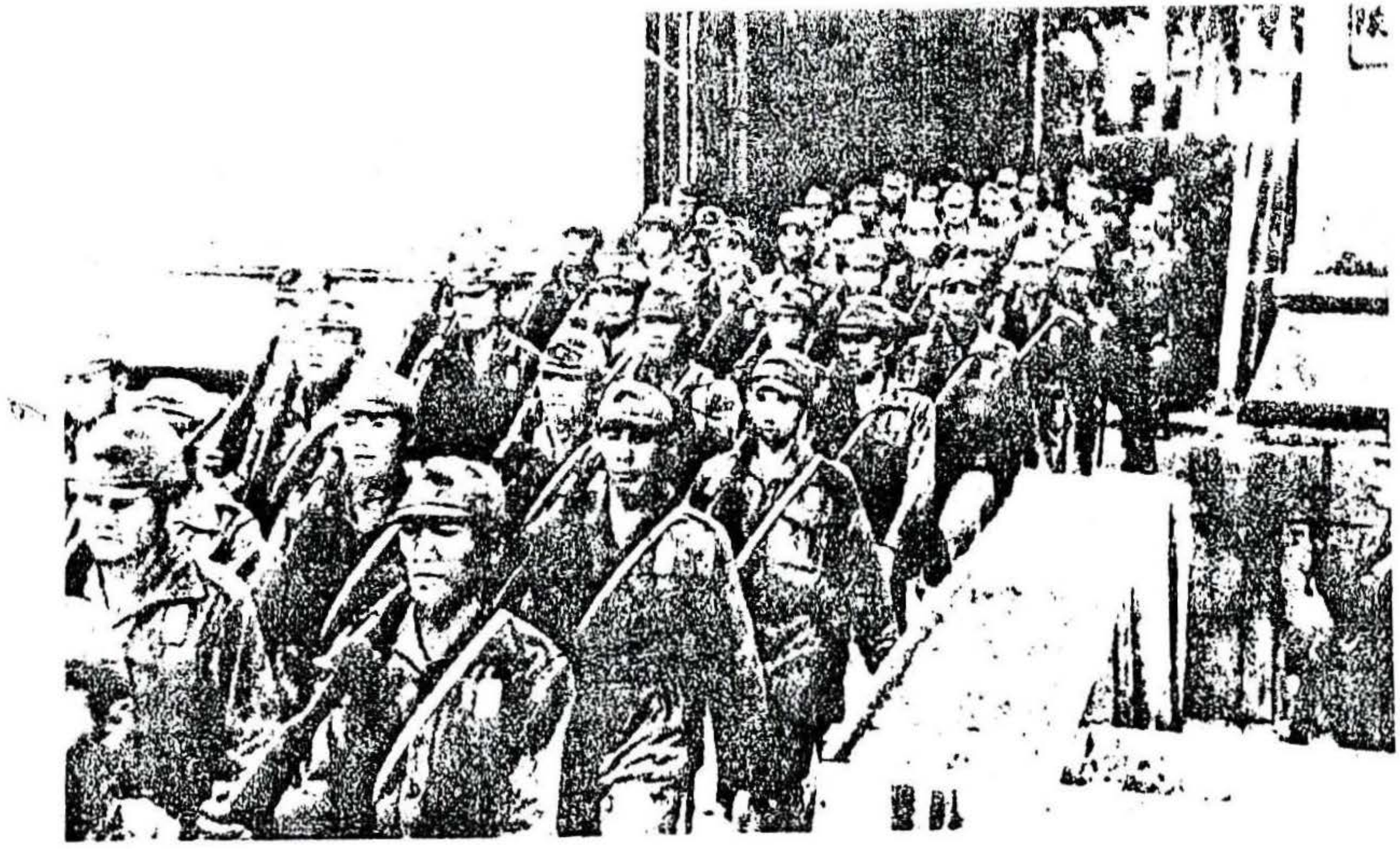

Tentara Pembela Tanah Air (1943).

Perpustakaan
Direktorat Pelindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Latihan Seinendan.

Empat Serangkai dalam Poetera.
(Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, K.H. Mas Mansur).

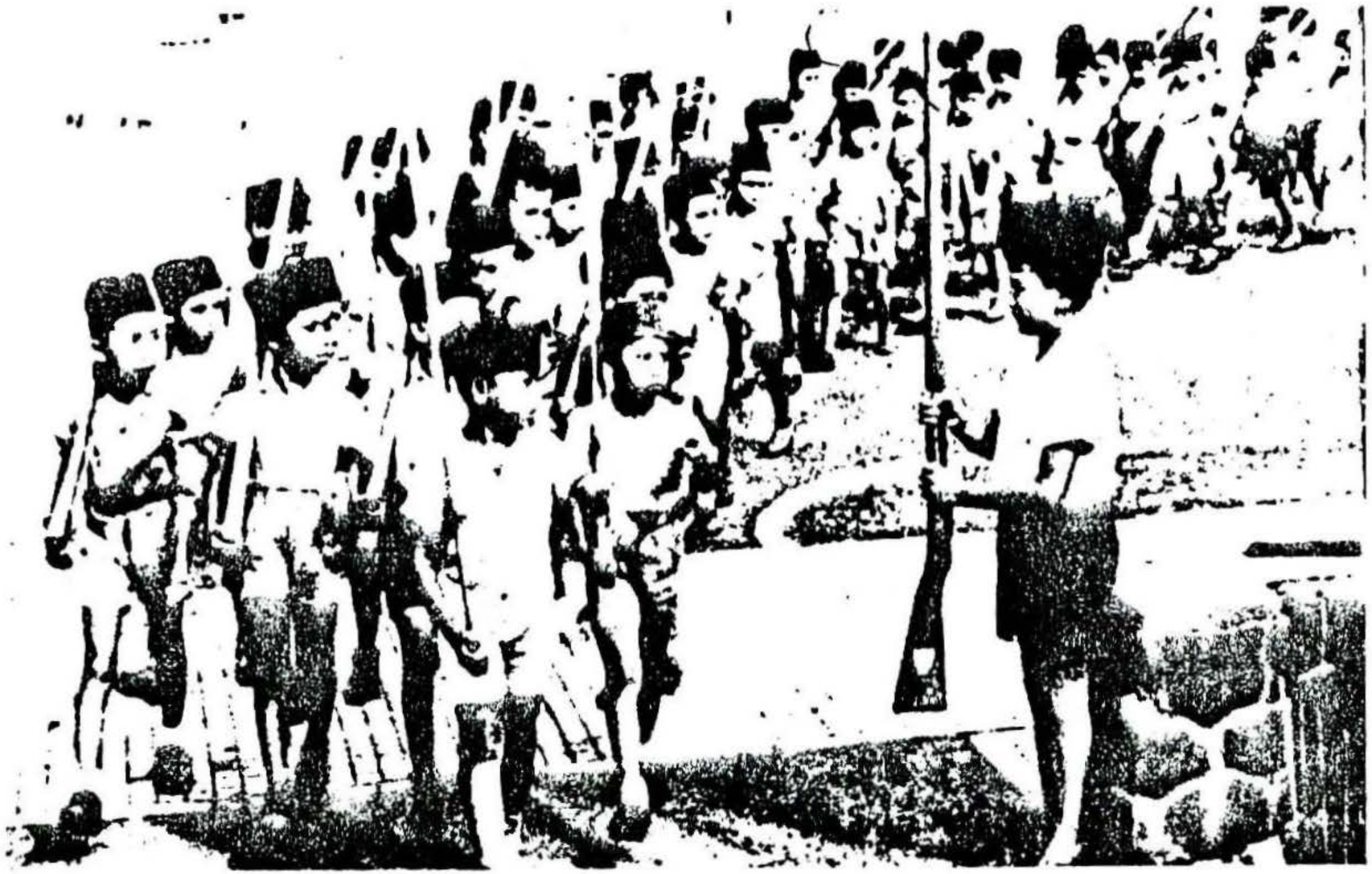

Latihan kemiliteran untuk anak sekolah.

Pengumpulan padi untuk tentara Jepang.

Sidang Cūō Sangi In di Pejambon.

Anggota Tentara Peta Blitar diadili.

Sidang Dōkuritsu Junbi Cōsakai

Bung Karno di dampingi Bung Hatta mengucapkan Proklamasi Kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56.

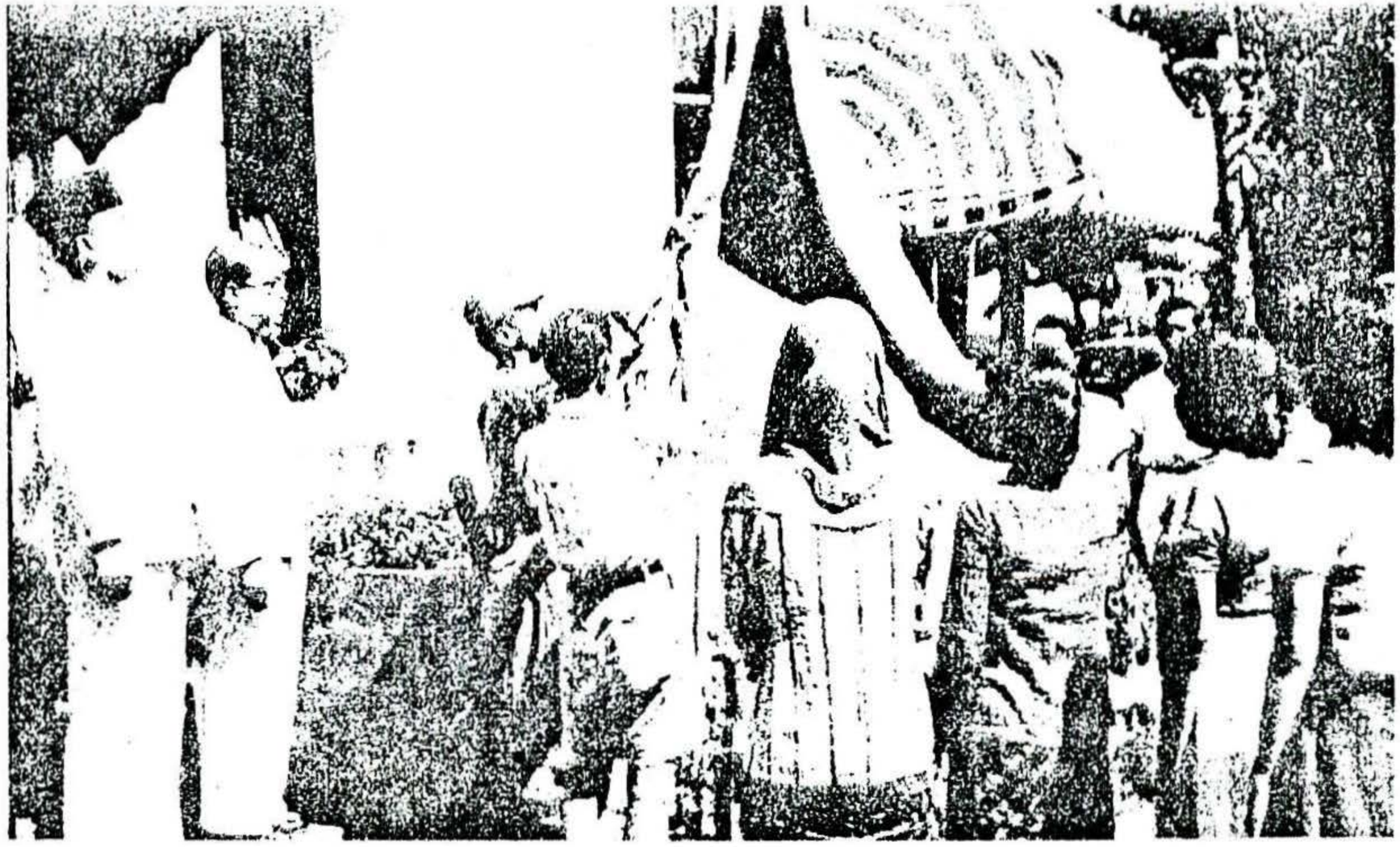

Mengibarkan Sang Merah Putih sesudah Proklamasi.

(Deppen)

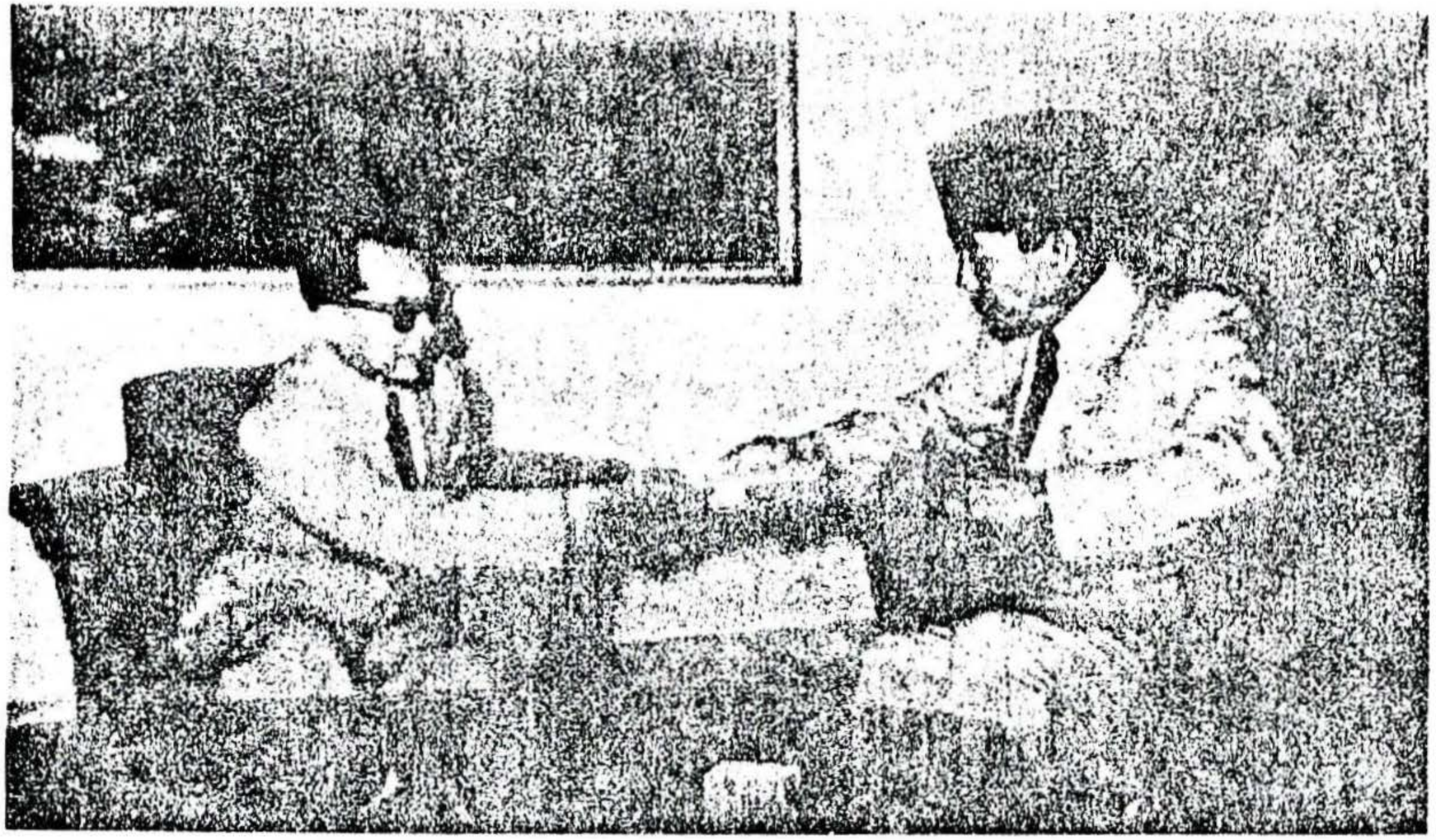

Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, proklamator serta Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

(Deppen)

Gedung Menteng 31.

(Deppen).

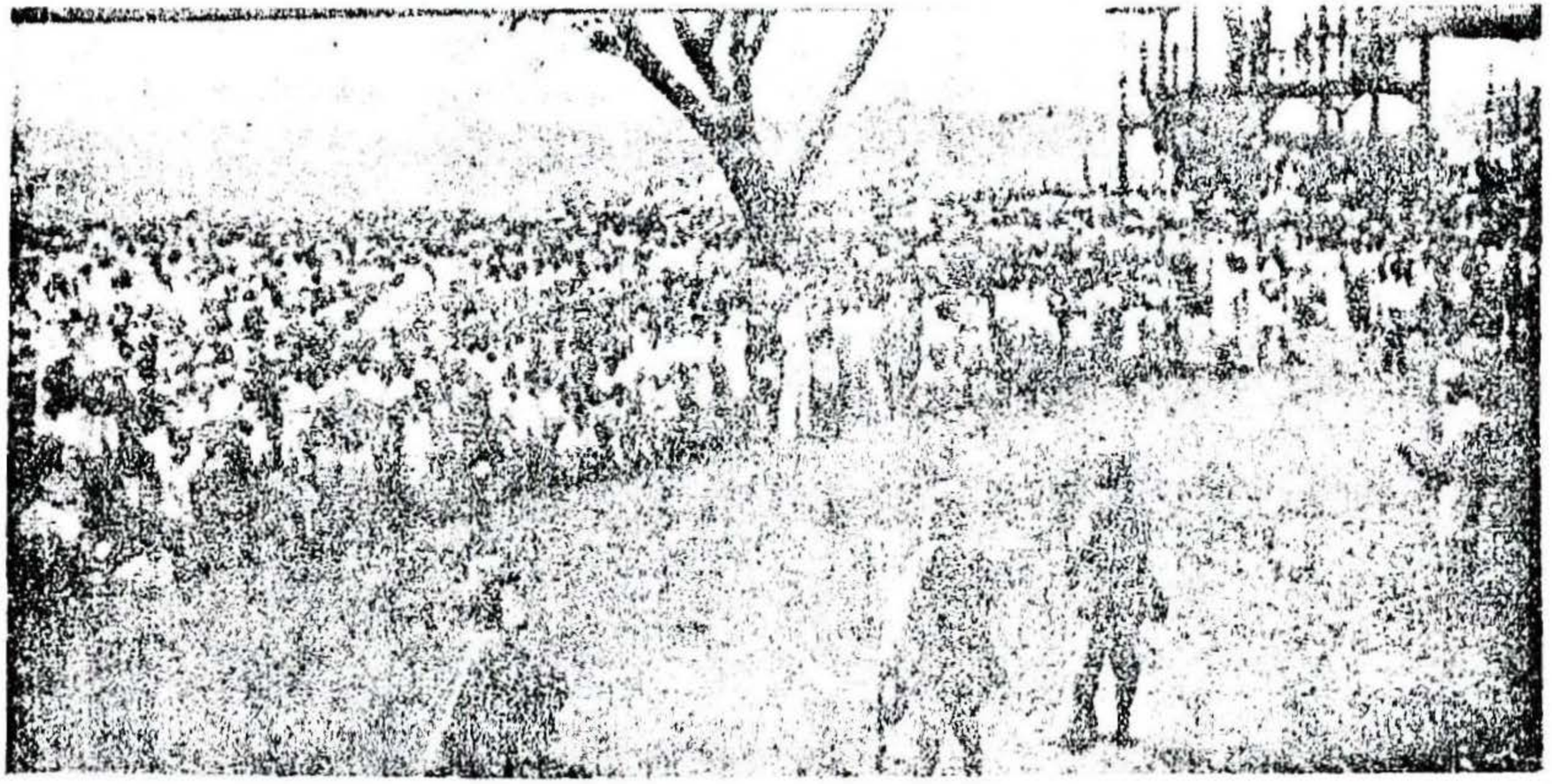

Rapat raksasa mendukung Proklamasi di lapangan Ganbir, 19 September 1945.

(Dispen.)

Direktorat Pembinaan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Korban keganasan pemberontak PKI Madiun, 1948.

(Ipphos)

PELANTIKAN PRESIDEN SUHARTO, 23 MARET 1973.

Untuk pertama kalinya seorang Presiden Republik Indonesia dipilih oleh MPR hasil Pemilihan Umum.

(Deppen)

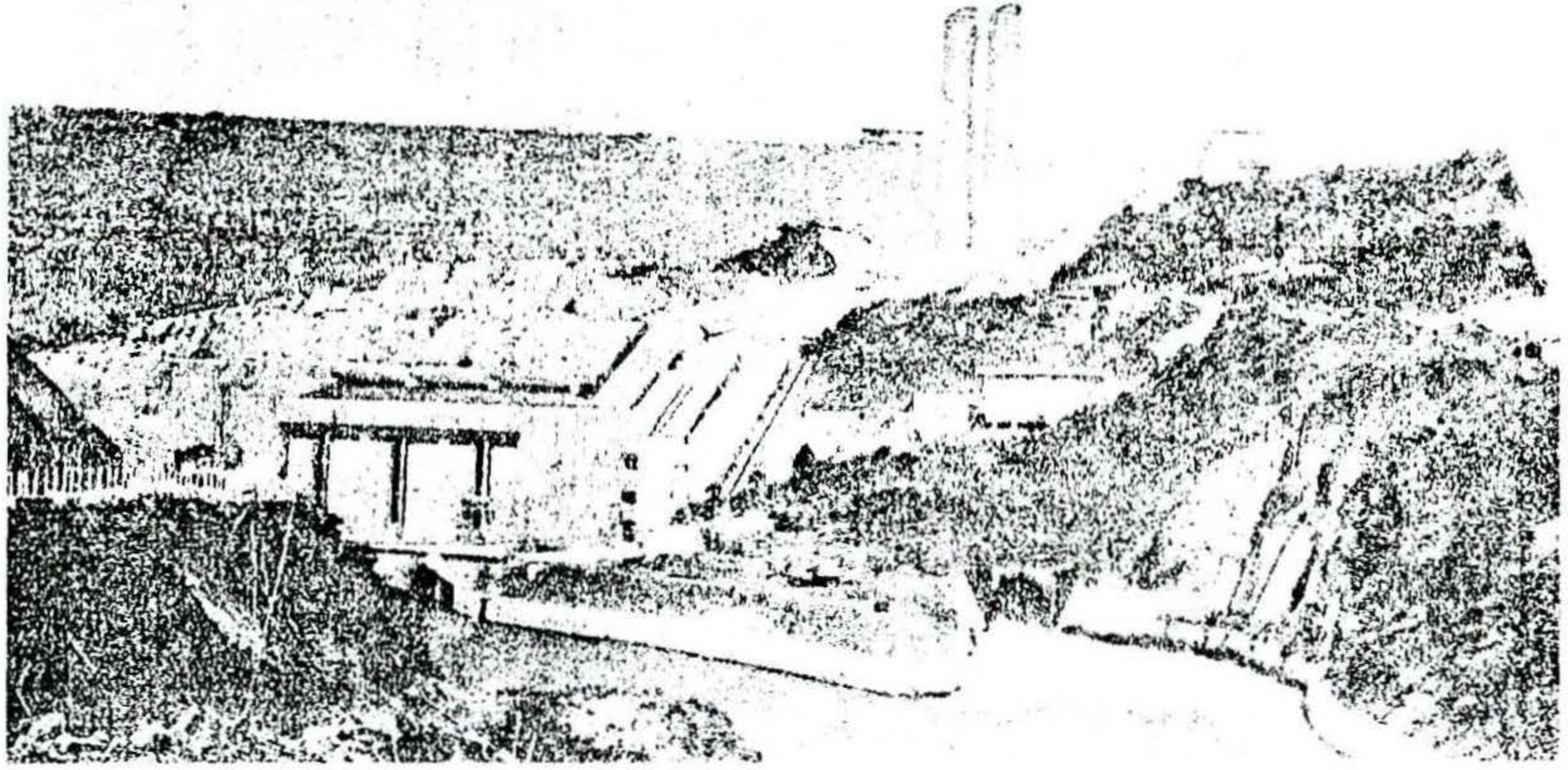

Bendungan Serbaguna Karangkates.

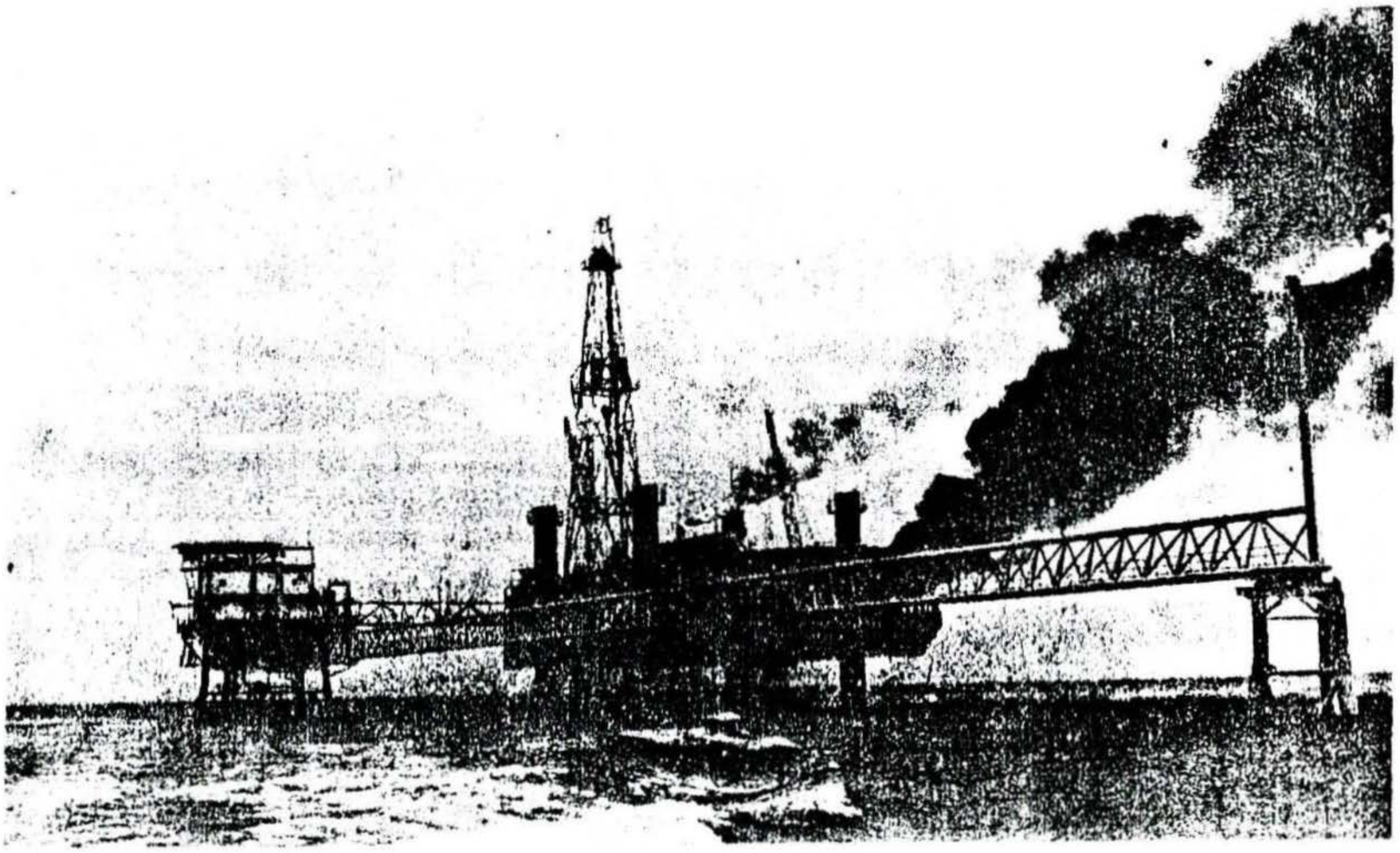

Pengeboran Minyak Lepas – Pantai.

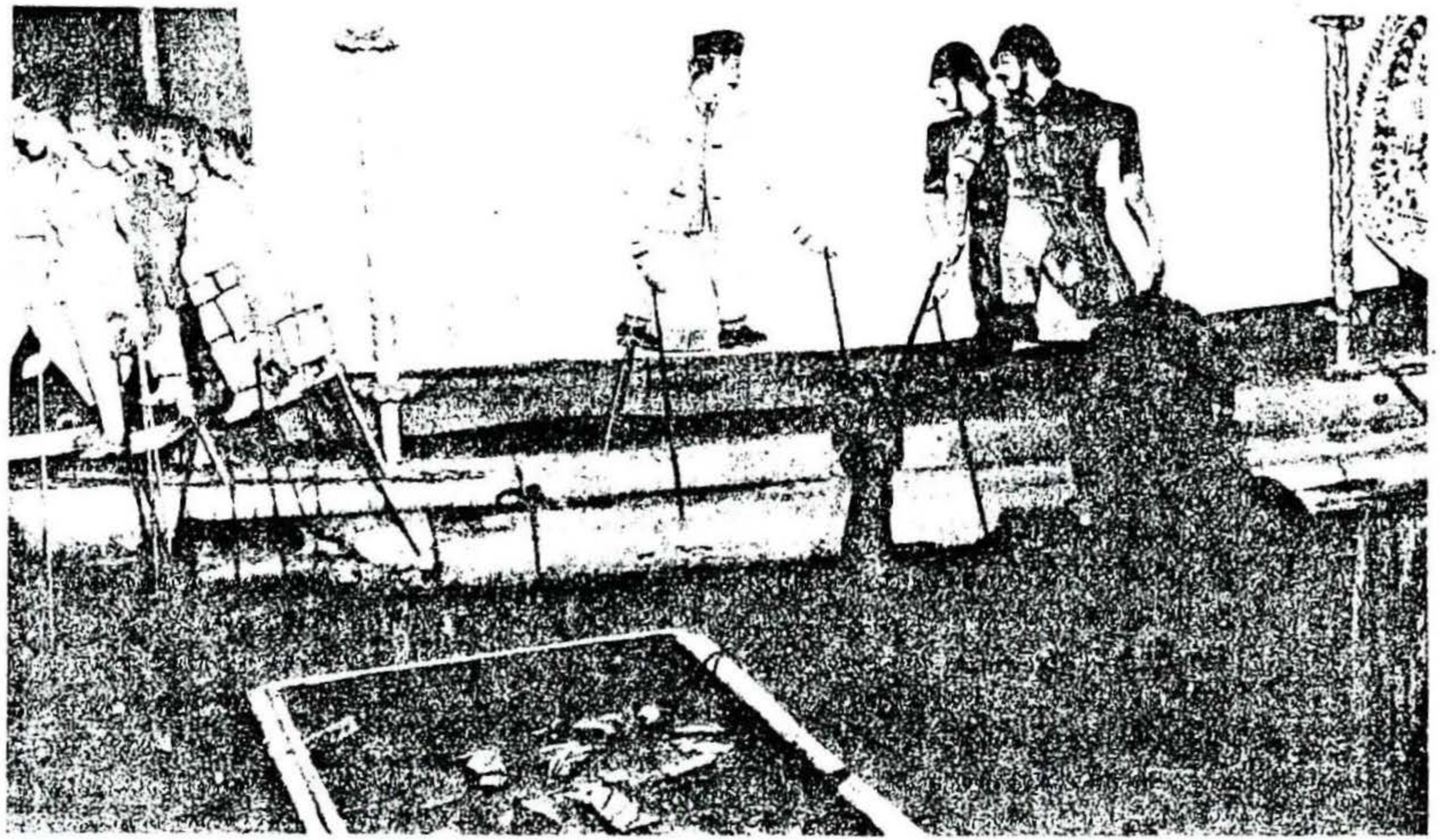

WAYANG SULUH.
Alat komunikasi massa tradisionil yang efektif.

(Deppen)

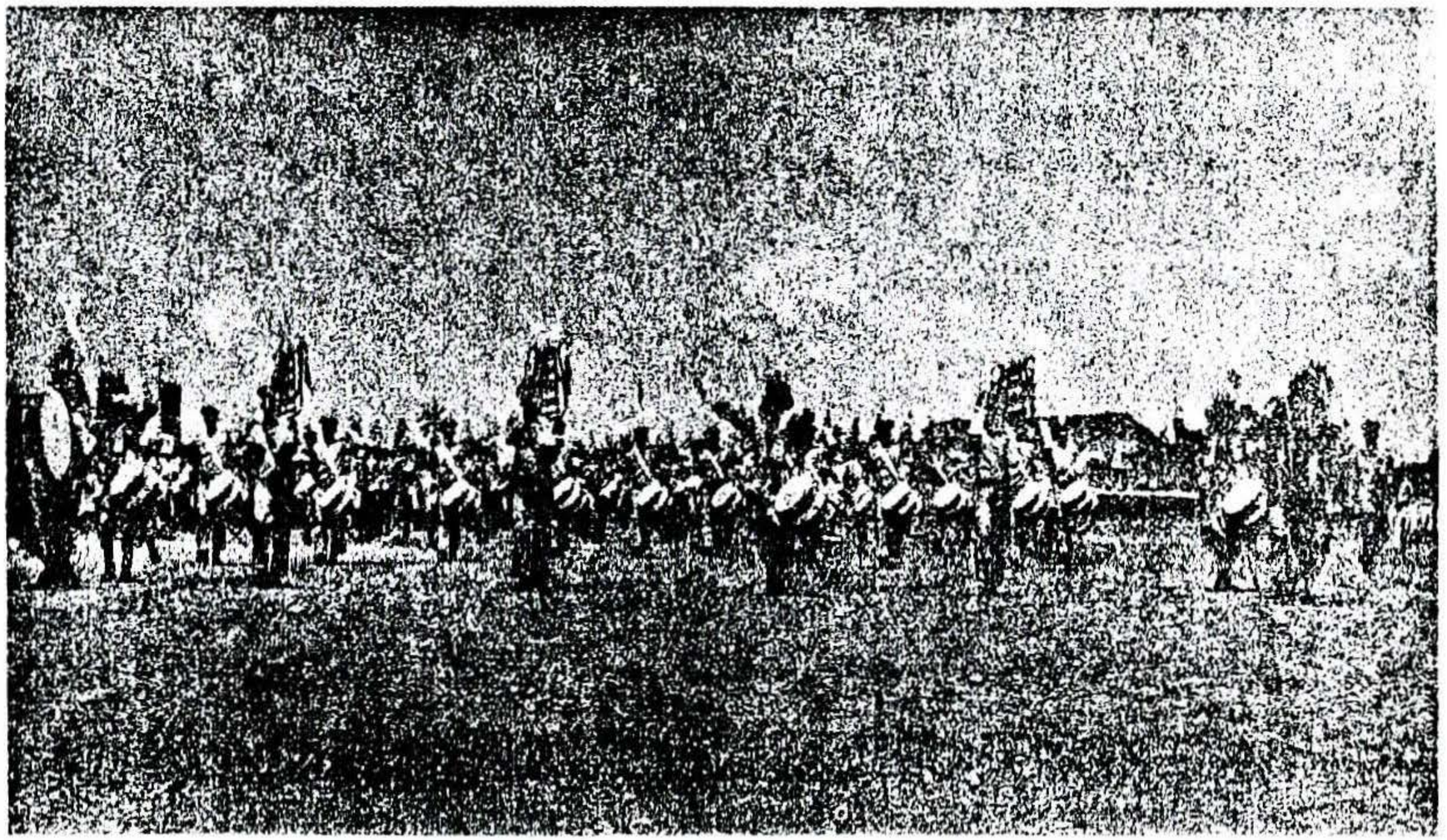

AKABRI.

Tempat pendidikan perwira-perwira jabatan secara terintegrasi.

(Muko AKABRI).

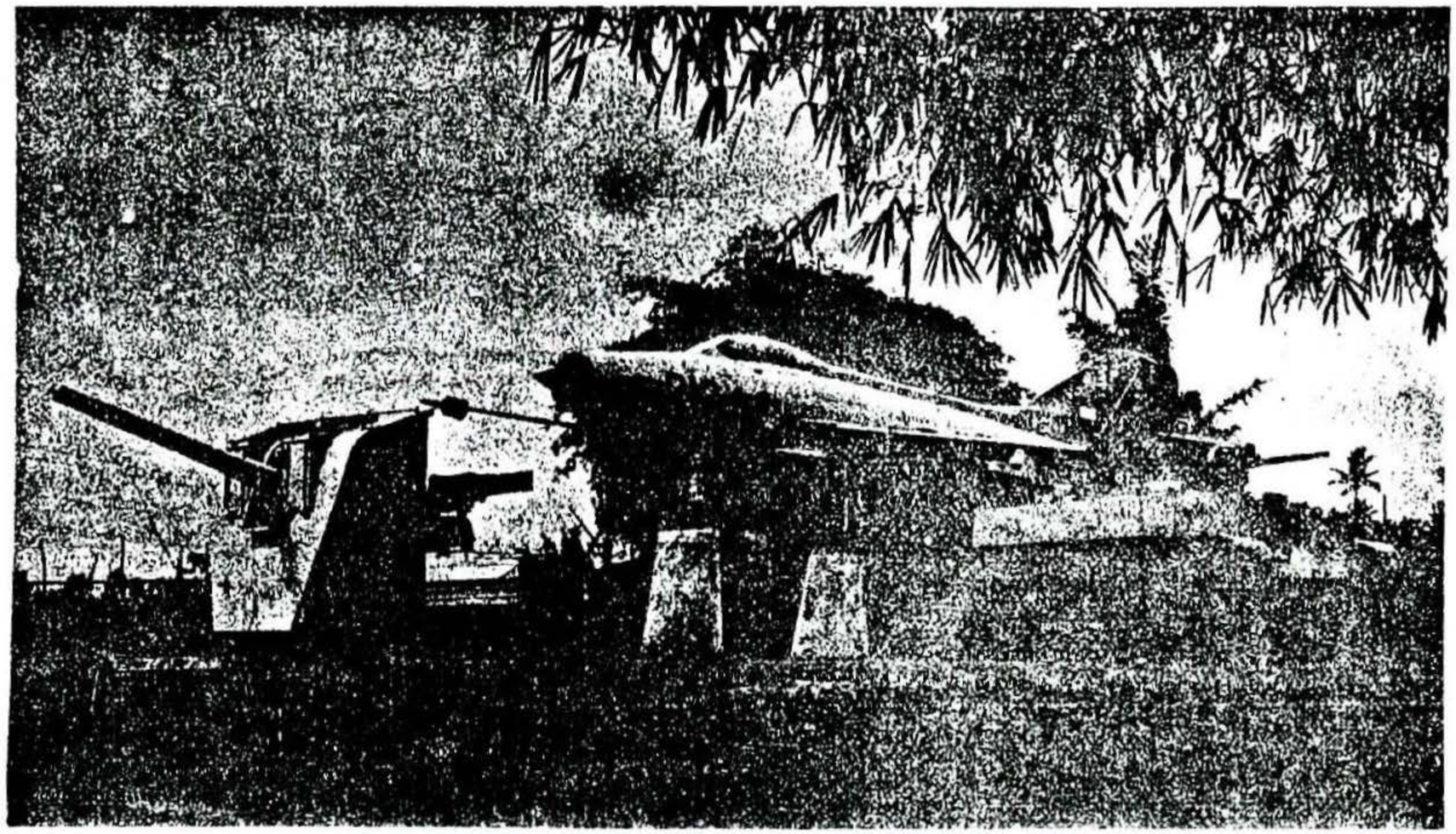

MUSEUM PUSAT ABRI SATRIAMANDALA
Salah satu lambang integrasi ABRI

(Mus. Satriamandala).

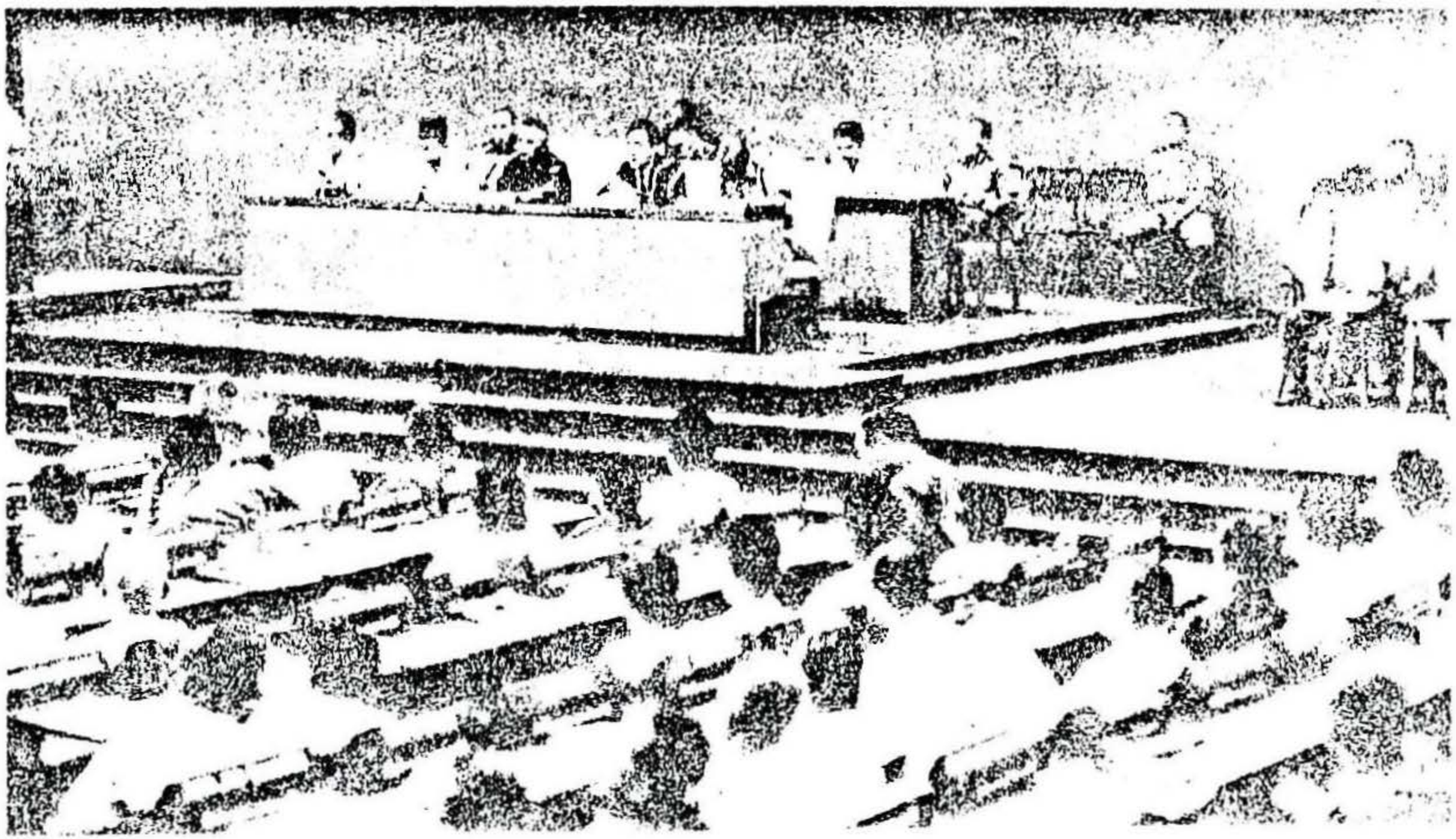

SIDANG UMUM IV MPRS
Salah satu tonggak sejarah Orde Baru.

(Dcapen)

Aksi-aksi Tritura 1966.

PAHLAWAN REVOLUSI DI LUBANG BUAYA.

Untuk kedua kalinya sejak berdirinya Republik Indonesia kaum Komunis melakukan pengkhianatan.

(Deppen)

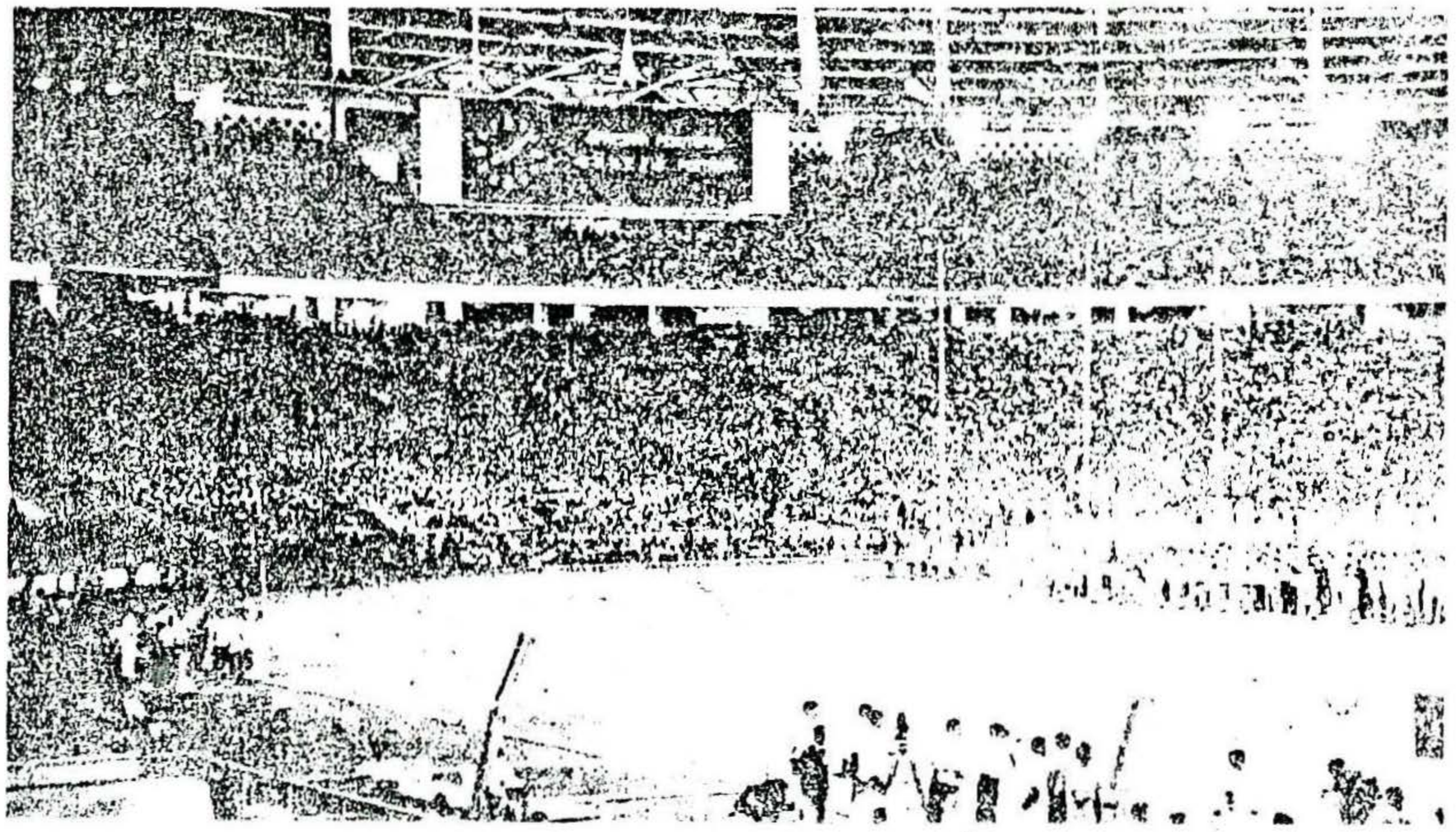

GANEFO.

Manifestasi politik luar negeri Mercusuar.

(Deppen)

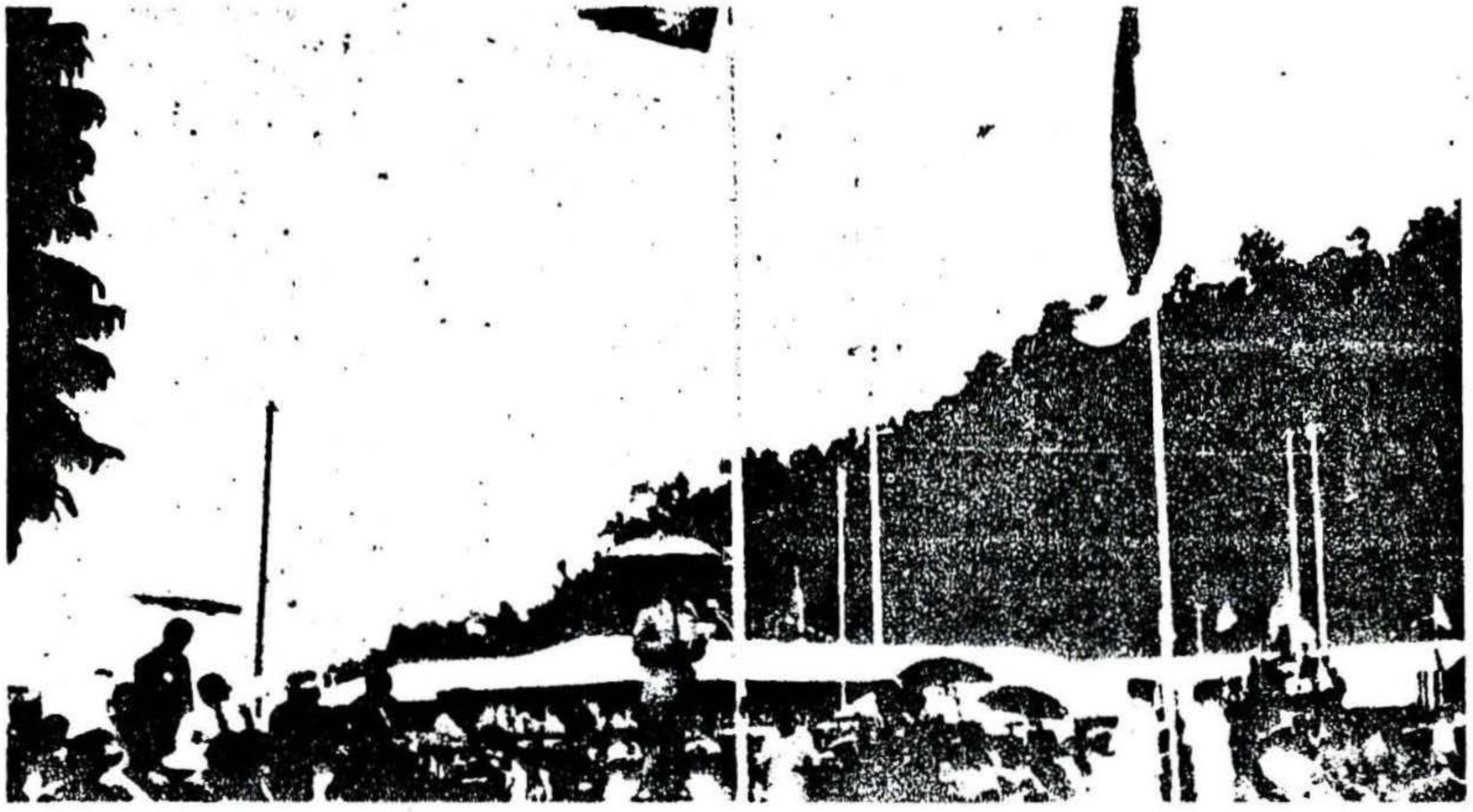

PEMBEBASAN IRIAN.
Pulihlah persada pertiwi.

(Deppen)

OPERASI PENUMPASAN PRRI – PERMESTA.
Republik Indonesia terhindar dari ancaman distintegrasi.
(Dappen)

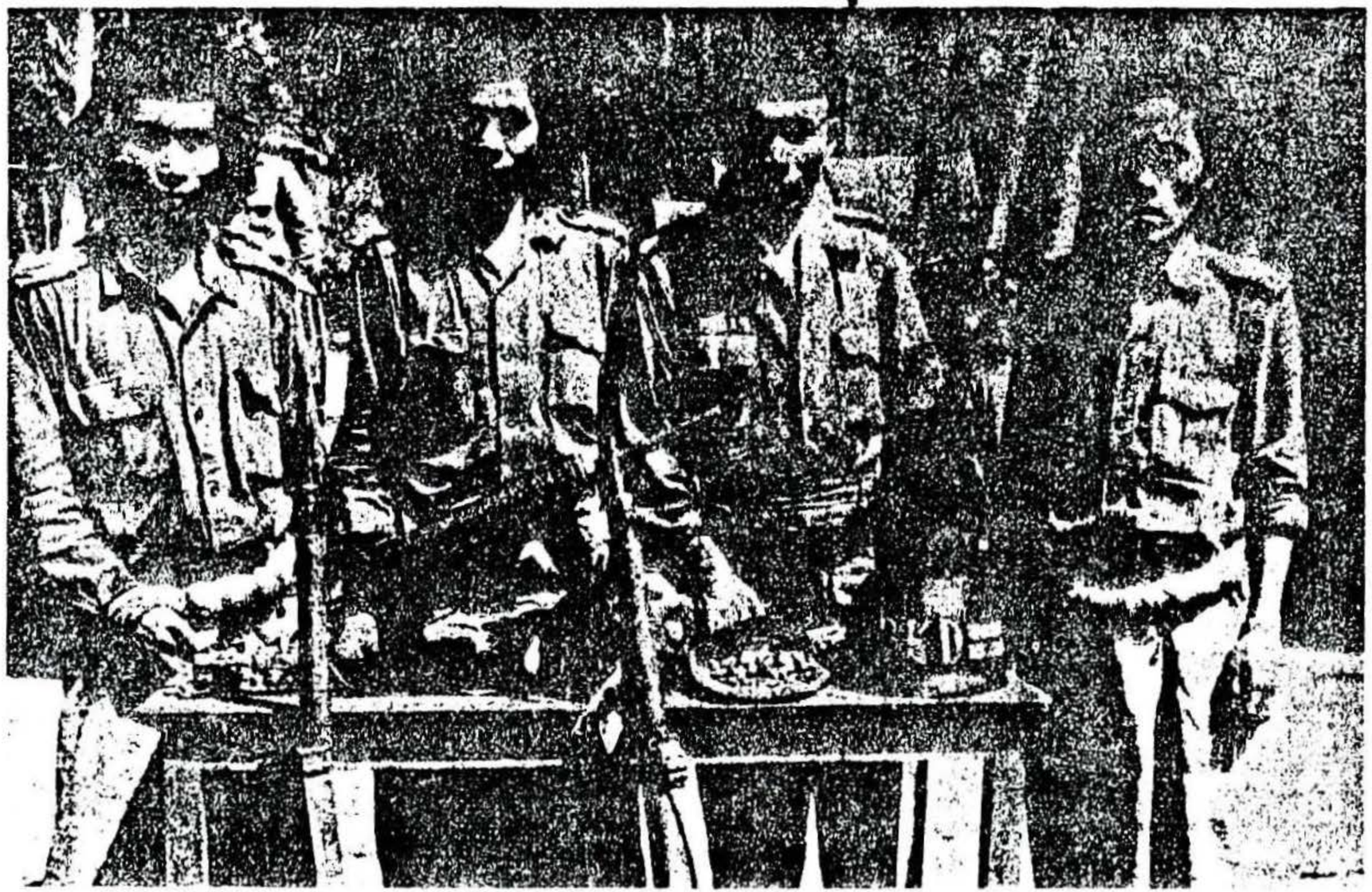

Gerombolan DI/TII yang menyerah kepada TNI.

Pemilihan Umum pertama, 1955.

(Deppen)

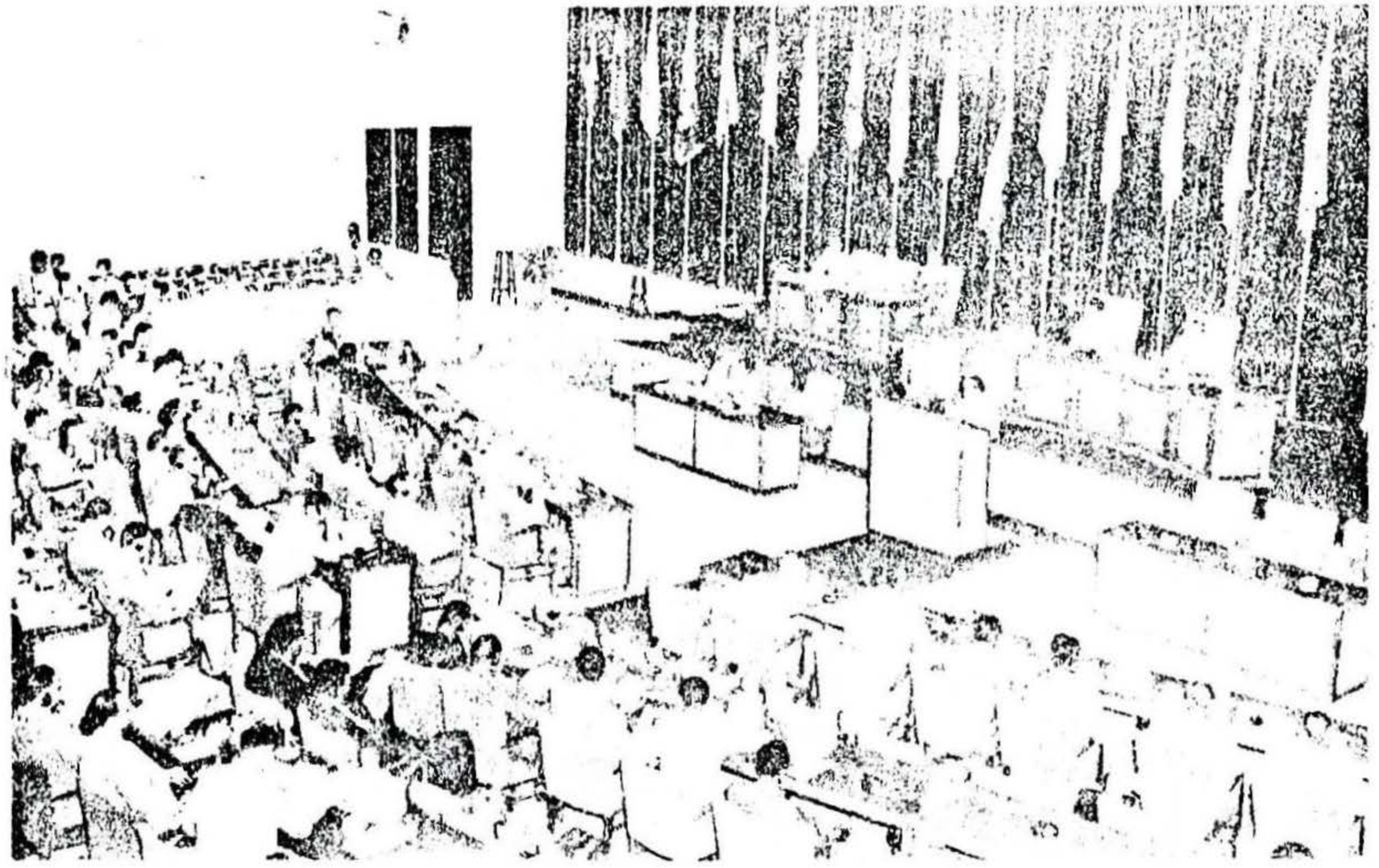

Konferensi Asia - Afrika di Bandung April 1955.

(Depnen)

Penanda-tanganan naskah pengakuan kedaulatan di istana Merdeka, 27 Desember 1949.
(Deppen)

ketika itu boleh kita katakan dipaksakan. agar dalam waktu secepat-cepatnya dapat menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan ke seluruh pelosok. Selain daripada itu, bangsa Jepang yang telah bulat tekadnya untuk memakai seluruh tenaga bangsa Indonesia untuk Perang Asia Timur Raya, masuk sampai ke desa-desa yang jauh terpencil, karenanya perlu menggunakan bahasa Indonesia. Demikian bahasa Indonesia meluas sampai ke segela penjuru, sedangkan bangsa Indonesia mengalami suatu perasaan yang baru, yang selama ini tiada dikenalnya. Bertambah maju perang, bertambah banyak orang Indonesia-memakai bahasa Indonesia, maka bertambah kuat pulalah terasa perhubungan antara sesamanya: bahasa Indonesia menjadi lambang kesatuan bangsa Indonesia.

Demikianlah bagi penguasa Jepang jelas, bahwa mereka tak dapat lagi menahan pertumbuhan bahasa Indonesia itu. Mereka mau tak mau mesti memberi jalan kepada keinginan bangsa Indonesia untuk menyempurnakan bahasanya. Begitulah Kantor Pengajaran Pemerintah militer Jepang di Jawa pada tanggal 20 Oktober 2603 (1943), mendirikan komisi (penyempurnaan) bahasa Indonesia, atas desakan dari beberapa tokoh bangsa Indonesia. Tugas daripada komisi itu adalah menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern, serta menyusun suatu tatabahasa normatif dan menentukan kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Susunan anggota komisi bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut:

Ketua : Mori (pemimpin Kantor Pengajaran),
Wakil Ketua : Iciki,
Penulis : Mr. R. Suwandi,
Penulis Akhli : Mr. S. Takdir Alisjahbana,
Anggota-anggota :

Abas St. Pamuntjak, Mr. Amir Sjarifuddin, Armijn Pane, Dr. Aulia, Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Drs. Moh. Hatta, S. Mangunsarkoro, Dr. R. Ng. Purbatjaraka, R.P. Prawiradinata, Dr. Prijono, H.A. Salim, Sanusi Pane, Ir. Sukarno, Mr. R.M. Sumanang, dll. [135]

135 S. Takdir Alisjahbana, *Dari Perdjuangan dan Pertumbuhan bahasa Indonesia*, Jakarta, 1957, hal. 78.

Di muka disebutkan, bahwa Jepang merasa terpaksa harus memberi jalan kepada bangsa Indonesia untuk menyempurnakan bahasanya sendiri. Sikap yang demikian itu dapat dilihat setelah dibentuknya komisi bahasa Indonesia. Mereka tidak segera bekerja, baru setelah satu tahun kemudian mulai bekerja,itu pun adalah karena telah berkali-kali didesak, sehingga Jepang mulai membuka kantor komisi bahasa Indonesia dengan peralatan dan staf yang serba kurang. Soal nama bahasa Indonesia selalu ditunda-tunda, barulah setelah pasti akan kekalahan mereka, diijinkan memakai nama Indonesia. Kantor pengajaran balatentara Jepang itu tidak pernah menyampaikan kata-kata yang sudah diputuskan kepada sekolah-sekolah dan kantor-kantor, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh komisi bahasa Indonesia tidak pernah diumumkan oleh pemerintah balatentara Jepang.[136] Akan tetapi berkat ketekunan dari para anggota komisi, maka pada akhir masa pendudukan militer Jepang di Indonesia telah dapat ditetapkan kira-kira 7.000 istilah.[137] Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 36, ditentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara yang resmi. Penetapan itu sebetulnya adalah suatu penetapan dalam teori tentang sesuatu yang telah lama terjadi dalam praktek.

Mengenai ukuran sastra di masa pendudukan Jepang yang sedang berperang mati-matian itu, sudah dengan sendirinya lain daripada di masa damai. Umumnya isi sajak-sajaknya mengandung cita-cita yang menimbulkan cinta kepada tanahair, serta mengobarkan semangat kepahlawanan atau menganjurkan semangat bekerja.

Para pujangga tua meminta pada pujangga muda supaya menginsafi arti karya mereka bagi masyarakat, agar dapat memberikan kepada masyarakat tempat berpegang. Sajak-sajak hasil sastra yang menimbulkan keragu-raguan dan kebimbangan harus dijauhkan, sehingga tidak turut meracuni masyarakat. Untuk itu dibangkitkan atau diberi jalan sekedar kepada nasionalisme Indonesia dengan mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia itu sejajar dengan nasionalisme Asia.[138]

Jiwa muda yang tadinya sedia menerima pikiran-pikiran,

136 *Ibid*, hal. 88.
137 Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, jilid VIII, Jakarta 1965 hal. 33.
138 *Almanak Seni*, 1957, hal. 30.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

cita-cita yang kelihatannya bagus dan indah, untuk beberapa lama hanyut dalam kekaguman semboyan-semboyan "Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya" dan sebagainya, yang ternyata hanya sebagai balon-balon yang indah berisi angin. [139]

Karya sastra sesuai dengan anjuran pemerintah saat itu harus ditujukan kearah memenangkan perang Asia Timur Raya. Demikianlah dari publikasi pemerintah dihasilkan karya-karya sastra pengganti pengaruh barat. Dalam situasi yang demikian itu lahir juga karya-karya sastra yang bersemangat sesuai dengan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia. Untuk mengarahkan agar supaya karya-karya seniman (seperti: roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara dan film) itu jangan menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Badan Pusat Kebudayaan, yang diberi nama bahasa Jepang *Keimin Bunka Syidōsyo*, tanggal 1 April 2603 (1943) di Jakarta. [140] Penyiaran-penyiaran hasil karya Pujangga Baru, begitu Jepang tiba di Indonesia, segera dihentikan oleh pemerintahan militer Jepang. [141] Di dalam Keimin Bunka Syidōsyo sastrawan-sastrawan dapat diawasi kegiatan-kegiatan mereka oleh Jepang, karena baik *Keimin Bunka Syidōsyo* maupun *Djawa Shinbun Kai* tidak mengijinkan para pengarang/sastrawan mengeluarkan isi hatinya dalam bentuk cerita (tulisan) kecuali bila mendukung kepentingan atau politik pemerintah militer Jepang. Seorang sarjana Belanda mengatakan tentang berdirinya Badan Pusat Kebudayaan itu demikian: Badan Pusat Kebudayaan ini membuktikan betapa sempurnanya Jepang dalam usahanya untuk menghapuskan kemungkinan-kemungkinan bagi tiap pernyataan berterang-terang perihal kebudayaan. [142]

Di dalam penjelasannya pada waktu pembukaan berdirinya *Keimin Bunka Syidōsyo* disebutkan bahwa badan ini bertugas memimpin dan menilik kebudayaan umum untuk meningkatkan derajat (mutu) kebudayaan rakyat asli. Akan tetapi semua itu tidak lepas dari kepentingan Jepang, karena disebutkan, bahwa maksud dan tujuan utama dari pendirian ini, yalah menanamkan dan menyebarkan kesenian dan kebudayaan Jepang untuk rakyat di Indonesia. [143] *Keimin Bunka Syidōsyo* mempunyai

139 H.B. Jasin, *Kesusasteraan Indonesia dimasa Djepang*, Jakarta, 1969, hal. 9.
140 *Djawa Baroe* No, 8 tahun II, 15 April 2603 (1943) hal. 8 – 10.
141 Ajip Rosidi, *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Bandung, 1969, hal. 35, hal. 80 – 81.
142 Prof. Dr. A.Teeuw, *Pokok dan Tokoh*, II, Jakarta, 1958, hal. 11.
143 *Djawa Baroe*, No. 8 th II, 15 April 2603 (1943) hal. 93.

bagian-bagian, antara lain: bagian musik, bagian sandiwara, bagian seni tari dan bagian seni lukis. [144]

Karya-karya sastra yang mendukung politik Tiga A atau bersamaan dengan itu, seperti *Tjinta Tanah Sutji,* karangan Nur Sutan Iskandar; *Palawija,* karangan Karim Halim; *Angin Fuji,* karangan Umar Ismail, adalah karya sastra yang berisi propaganda Jepang untuk menggelorakan semangat berjuang dañ berkorban untuk kepentingan Asia Timur Raya. Karya-karya seperti itulah yang diinginkan oleh Jepang.

Karya sastra yang bertentangan dengan atau menentang kebijaksanaan dan kepentingan Jepang tidak boleh terbit dan beredar, bahkan kalau diketahui penciptanya ia harus berhadapan dengan *kempeitai.* Seperti misalnya sajak Chairil Anwar *Siap Sedia* yang menyebabkan pengarangnya harus bermukim dalam tahanan beberapa waktu. Sajak tersebut mengajak kawan-kawan untuk bangkit dengan kesadaran dan mengayunkan pedang untuk menuju dunia baru. Tentu saja yang dimaksudkan adalah semangat juang bangsa Indonesia; antara lain dia berseru:

Kawan, kawan,
Dan kita bangkit dengan kesadaran,
Mencucuk dan menyerang berulang,
Kawan, kawan,
Kita mengayun pedang ke Dunia Terang. [145]

"Dunia Terang" pada baris penghabisan didakwakan oleh *gunseibu* diartikan sama dengan negeri Jepang, jadi pengarang dituduh menganjurkan pemberontakan terhadap Jepang.

Tjak Durasim dengan sandiwaranya (1944) menyentil ketidak-benaran perbuatan Jepang dengan lagunya yang berbunyi antara lain:

Pegupon omahé doro,
Mèlok Nippon tambah soro.

"Mèlok Nippon tambah soro" artinya "ikut Nippon tambah sengsara". Demikianlah kemudian Tjak Durasim ditangkap dan ditahan, serta disiksa oleh *kempeitai* sehingga meninggal dunia.[146]

Gubahan-gubahan untuk seni drama, seperti drama Usmar Ismail "Api", "Tjitra", yang mengambil tema kecintaan dan

144 *Ibid,* hal. 8 – 10.
145 H.B. Jasin, *op.cit.*, hal. 20.
146 Tjak Durasim adalah anggota Parindra di Surabaya.

pengabdian kepada tanahair, El Hakim (dr. Abu Hanifah) yang menciptakan "Taufan di atas Asia", "Intelek Istimewa", "Dewi Rini" adalah pedang bermata dua yang penuh arti bagi bangsa Indonesia. [147] Karena sensor yang ketat dari Jepang, maka pengarang-pengarang itu mencari kata-kata, susunan kalimat, sindiran yang samar-samar untuk menembus tembok-dinding sensor.

Dalam pada itu selama masa pemerintahan militer Jepang, sandiwaralah satu-satunya tontonan, karena film luar negeri dan yang lain dilarang oleh Jepang. Dengan demikian sandiwara diberi kesempatan dan mendapat fasilitas dari Jepang. Pemberian fasilitas ini membuat sandiwara beserta pelaku-pelakunya bisa lebih bebas bergerak, walaupun masih tetap dalam rangka propaganda Jepang. Sandiwara sekaligus berfungsi penerangan dan hiburan untuk rakyat, misalnya sandiwara "Bintang Surabaya", Tjahaja Timur", "Warnasari", "Miss Tjitjih" dll.[148] Sebelum Perang Pasifik, boleh dikatakan sandiwara hampir tidak ada. [149] Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan pertunjukan sandiwara, karena film-film luar negeri dilarang jumlahnya atau berkurang. Kegiatan sandiwara mendapat bantuan atau fasilitas dan dorongan dari penguasa, dalam hal ini dari bagian propaganda Jepang. Banyak dari kalangan generasi muda menceburkan diri ke dunia sandiwara atau menjadi pengarang. Artis-artis Jepang juga ikut terjun seperti yang dilakukan dengan Persafi. Tindakan atau perbuatan itu turut mendorong artis-artis bumiputera profesionil maupun amatir memulai usaha experimen dengan mempertunjukkan lakon-lakon yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk sandiwara.

Adanya sensor yang keras dan sukarnya kertas serta tidak adanya pers yang ilegal, membuat kehidupan sastra hanya bergerak melalui saluran-saluran resmi Jepang. Keadaan itu membuat tiadanya kesempatan untuk menyiarkan atau menge-

---

147 H.B. Jasin, *op.cit.*, hal. 19.

148 *Djawa Baroe*, No. 7 th. IV, 1 April 2605 (1945) hal. 24. Semua badan yang menyelenggarakan tontonan harus mendapat ijin dan begitu juga ceritera yang akan dimainkan, harus terlebih dahulu dikirimkan kepada penguasa Jepang, apakah cerita itu diijinkan untuk dimainkan. Lihat: *Sinar Baroe*, 16 Januari 2603 (1943).

149 Andjar Asmara, "Sandiwara dimasa datang", *Mimbar Indonesia*,. No. 2, 22 Nop. 1947, Jakarta, hal. 14.

luarkan perasaan, sehingga api terus menjalar di bawah tanah. [150]

Tetapi adalah keliru untuk memungkiri adanya nada patriotisme dalam karangan-karangan dan sajak-sajak, sekalipun harus disebutkan "di dalam lingkungan Asia Timur Raya" di belakang tiap perkataan "tanah-air Indonesia".

Kedudukan masyarakat sastrawan baik, dalam arti bahwa penguasa Jepang dalam batas-batas tertentu membantu memberikan fasilitas bagi perkembangan sastra. Cabang-cabang seni: Seni suara, seni drama, seni film maupun fasilitas yang sama. Kegiatan seni diatur dan diawasi oleh suatu badan yang dibentuk oleh penguasa Jepang, karena dimasukkan sebagai bagian propaganda guna menunjang perang Asia Timur Raya. Badan-badan bentukan Jepang untuk mengatasi kegiatan terdiri dari: *Keimin Bunka Syidōsyo, Djawa Shinbun Kai,* Persafi, dll. Mengenai kegiatan seni suara komponis C. Simanjuntak menciptakan antara lain lagunya: "Tanah Tumpah Darahku", menggambarkan rasa kecintaan terhadap tanah air. [151] Begitu juga dengan lagunya "Madju Putra-Putri Indonesia", membangunkan semangat-kesadaran bangsa Indonesia untuk membangun Jawa Baru, dalam rangka Asia Timur Raya. [152]

Pada masa pemerintahan militer Jepang muncul beberapa pengarang dan penyair baru: misalnya; M.S. Azhar, Usmar Ismail, M.H. Lubis, Amal Hamzah, Nursyamsu, Anas Ma'ruf, Maria Amin, Rosihan Anwar, El Hakim, dan lain-lainnya.

---

150 Prof. Dr. A. Teeuw, *op.cit.*, hal. 12.
151 *Djawa Baroe*, No. 7, 1 April 2605 (1945) hal. 24.
152 *Ibid*, No. 6 th III, 15 Maret 2604 (1944), hal. 34.

BAB III
REPUBLIK INDONESIA

A. STRUKTUR SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIAL

1. Stratifikasi sosial dan mobilitas vertikal.

Dalam negara yang sedang berkembang seperti Indonesia masih sukar untuk melihat suatu stratifikasi sosial yang sudah mantap. Perubahan-perubahan masih terus berlangsung. Sementara hal itu terjadi, pola-pola masyarakat lama, masyarakat tradisionil, masih terlihat walaupun dalam banyak hal pola-pola itu semakin terdesak oleh pola-pola baru yang sedang membentuk diri[1]. Pola-pola masyarakat tradisionil itu terdapat pada masyarakat kota maupun pada masyarakat pedesaan. Masyarakat kota dibagi atas dua bahagian, yakni kota-kota dagang yang umumnya terletak di tepi pantai dan kota-kota yang terletak di daerah-daerah kerajaan.[2]

Dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Jawa pada khususnya terdapat tiga lapisan sosial, yakni: orang kecil (wong cilik), priyayi dan bangsawan, sedangkan didalam lingkungan umat islam terdapat golongan abangan dan golongan santri. Orang kecil merupakan massa yang terbesar, terdapat baik di desa-desa maupun di kota-kota. Mereka pada umumnya terdiri dari petani-petani di desa-desa sedangkan di kota-kota golongan ini terdiri dari buruh kecil, tukang becak, tukang gunting rambut dan sebagainya. Golongan priyayi terdiri dari pegawai-pegawai pemerintah, baik pegawai-pegawai rendah di kota-kota kecil maupun pegawai-pegawai tinggi di kota-kota besar. Sebagian dari golongan ini berasal dari sistim birokrasi pemerintahan kerajaan-kerajaan sejak sebelum penjajahan Belanda dan sebagian lagi berasal dari orang-orang yang mendapat pendidikan akademis pada zaman Hindia Belanda. Golongan bangsawan yalah keturunan raja-raja atau sultan-sultan di pusat-pusat kraton seperti di Jawa Tengah. Mereka merupakan anggota-anggota keluarga kraton tersebut serta terbagi dalam beberapa tingkatan dengan gelar yang berbeda sesuai dengan tingkat hubungan mereka dengan raja[3]

---

1 John W. Henderson cs., *Area Handbook for Indonesia*, hal. 113.

2 *Ibid.*

3 Lihat R.M. Koentjaraningkrat, "The Javanese of South-Central Java" dalam G.P. Murdock (ed) *Social Structure of South East Asia*, Chicago, 1960 hal. 89–90.

Golongan santri dan abangan dibedakan oleh ketaatan beragama dan oleh gaya dan pandangan hidup. Dalam hal ketaatan beragama, maka golongan santri yalah orang-orang yang menjalankan syari'at Islam sepenuhnya, sedangkan orang-orang abangan ialah orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam sepenuhnya, misalnya tidak bersembahyang lima kali sehari, makan babi dan sebagainya.[4]

Seorang santri maupun seorang abangan dibesarkan dalam lingkungan masing-masing, mewarisi sistim nilai yang terlahir dalam adat dan ajaran agamanya serta sentimen-sentimen lain yang telah dipelihara dan diwariskan oleh nenek-moyangnya. Hal-hal itu merupakan unsur yang membentuk kepribadian dan mempengaruhi individu dalam bertindak dan bersikap. Antara kedua golongan ini terdapat perbedaan, dimulai sejak masuknya ajaran-ajaran Islam ke pusat-pusat kerajaan Hindu sampai kemasa masuknya ideologi politik ke pedesaan, dimana perbedaan penghayatan agama diwarnai pula oleh perbedaan ideologi politik.

Revolusi membawa banyak kemungkinan-kemungkinan dan perubahan-perubahan. Golongan-golongan yang pada masa-masa sebelumnya dalam sistim kolonial memiliki status sosial yang rendah, tiba-tiba muncul ke atas dan memegang posisi penting. Begitu pula sebaliknya dengan golongan yang dulunya memegang dominasi, turun menjadi golongan yang kurang berkuasa atau tidak berarti samasekali.

Perubahan yang ditimbulkan oleh Revolusi itu dalam hal status sosial masih banyak bersifat spasmodis dan untuk sementara waktu sukar untuk menentukan akibat-akibat yang menyeluruh. Dalam hubungan dengan status bangsawan, selama Revolusi terlihat tiga macam perubahan. Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono IX misalnya berhasil menjalin kerjasama yang erat dengan kepemimpinan Republik. Partisipasinya selama Revolusi dan sesudahnya menyebabkan Hamengku Buwono IX termasuk pemimpin Republik yang terkemuka dan bahkan akhirnya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Keadaan seperti yang terjadi di Yogya itu berbeda dengan keadaan yang terjadi di Sumatra Timur. Di sini, di mana golongan bangsawan memperoleh kedudukan yang baik selama pemerintahan Belanda, rakyat menganggap mereka sebagai orang-orang

[4] *Ibid*. hal. 91

yang pro Belanda. Dalam "revolusi sosial" yang terjadi di daerah ini, banyak golongan bangsawan yang terbunuh. Peristiwa yang serupa juga terjadi di Aceh. Berbeda dengan Yogyakarta di satu pihak dan Sumatra Timur di lain pihak yalah keadaan di Solo. Sunan Solo menyerahkan kekuasaan kepada Republik, tetapi masih tetap tinggal dalam kraton.[5]

Secara keseluruhan status bangsawan merosot dan telah dilampaui oleh golongan intelektuil[6]. Banyak kaidah-kaidah hidup yang lama ditinggalkan. Kecuali di daerah-daerah kraton, orang-orang bangsawan tidak lagi memakai gelar kebangsawanannya. Selama Revolusi, yang merupakan tahun-tahun yang penuh kesulitan, banyak di antara mereka yang melakukan pekerjaan berdagang, suatu pekerjaan yang dianggap hina pada masa-masa sebelumnya.[7] Pandangan masyarakatpun berobah terhadap golongan ini: raja tidak lagi dipandang sebagai seseorang yang sangat agung. Raja hanya dihargai sebagai suatu contoh yang harus ditiru dalam tingkah laku "halus"-nya. Dengan demikian maka golongan bangsawan kehilangan kemegahan yang dulu mengelilingi mereka.

Stratifikasi sosial tidak lagi didasarkan atas dasar ras.[8] yang pada masa dulu merupakan ciri masyarakat kolonial, ataupun atas dasar kelahiran menurut tingkat kebangsawanan. Stratifikasi lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan dan begitu pula mobilitas sosial terjadi atas dasar ini. Supremasi ras kulit putih hancur di zaman Jepang dan supremasi Jepang hancur di zaman Republik; begitu pula kedudukan bangsawan yang berdasarkan kelahiran itu, tidak lagi mendapat tempat dalam masyarakat.

Terbukanya kesempatan bagi anak-anak priyayi untuk memasuki sekolah-sekolah di zaman Belanda, menumbuhkan suatu kelompok intelektuil yang aktif memperjuangkan Kemerdekaan. Sesudah tercapainya Kemerdekaan, mereka langsung menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam administrasi pemerintahan. Hal itu berarti terjadinya suatu mobilitas. Golongan priyayi yang dalam zaman Belanda hanya menduduki jabatan pemerintahan pada eselon menengah atau lebih rendah lagi, di zaman

---

5 W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, s'Gravenhage, 1959, hal. 159–161.

6 Koentjaraningrat, *op.cit.*, hal. 90.

7 Wertheim, *op.cit.*, hal. 164.

8 Jaspan M.A., *Social strafication and Social mobility in Indonesia*, Jakarta, 1961. hal. 10. Wertheim *op. cit.*, hal. 164.

Republik menduduki eselon yang lebih tinggi. Karena itu terdapat satu lowongan dibawah mereka bagi calon-calon baru untuk status priyayi.[9]

Sesudah Kemerdekaan kesempatan untuk memperoleh pendidikar menjadi terbuka lebar. Bukan hanya golongan priyayi, tetapi golongan orang kecilpun mempunyai kesempatan itu. Dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan. Kemerdekaan membawa zaman baru bagi golongan intelektuil. Kesempatan di bidang sosial-budaya terbuka lebar, sementara kehidupan politik menjadi wadah bagi pergulatan untuk memperoleh kekuasaan. Anak-anak santri maupun abangan berkat pendidikan yang mereka peroleh-mencapai pula kenaikan status dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orangtua mereka. Banyak diantara mereka yang menjadi pegawai rendah di pemerintahan atau menjadi priyayi di desa-desa, sedangkan santri intelektuil memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional, ikut aktif dalam perjuangan Kemerdekaan dan kemudian banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam partai-partai politik NU dan Masjumi. Pula banyak yang menjadi militer, bahkan selama Perang Kemerdekaan terdapat laskar-laskar yang terdiri dari golongan ini, seperti Hisbullah dan Sabilillah. Di kalangan santri kauman yang sudah mempunyai tradisi dagang, banyak yang mengembangkan aktivitas dagangnya dari tingkat daerah ke tingkat nasional untuk kemudian memasuki tingkat internasional.

Hapusnya pembatasan-pembatasan yang berdasarkan kelahiran, ras dan lain-lain, memungkinkan seseorang mencapai status sosial yang tidak akan bisa dicapainya sekiranya pembatasan-pembatasan tersebut masih berlangsung. Anak seorang petani atau anak seorang tukang kayu bisa saja menjadi seorang pembesar. Jenderal Soeharto yang menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah anak orang kecil dari desa yang karena kemampuan pribadinya dapat memangku jabatan tertinggi dalam Negara.

Sudah kita sebut di atas bahwa dengan merosotnya kedudukan golongan bangsawan, maka golongan intelektuil menjadi golongan yang menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat. Di bawah golongan ini terdapat golongan menengah

---

9 John W. Henderson cs., *op. cit.* hal. 117.

di kota-kota. Mereka ini umumnya terdiri dari pegawai rendahan, pedagang-pedagang kecil dan tukang. Golongan ini merupakan penghubung antara hal-hal yang modern dengan hal-hal yang sudah usang. Karena pendidikan, tempat pegawai rendah ini lebih tinggi daripada pedagang kecil dan tempat pedagang kecil karena kekayaannya lebih tinggi daripada tukang.[10] Golongan yang paling bawah adalah golongan petani di desa-desa dan golongan buruh kasar.

Sifat militeristis Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia melahirkan satu kelompok baru yang lebih muda dan lebih terorganisasi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Golongan ini yalah pemuda, yang pada masa sesudahnya terutama selama Perang Kemerdekaan, memegang peranan besar. Pada umumnya mereka berasal dari kalangan rakyat[11] yang atas seruan Jepang memasuki Tentara Peta (Pembela Tanah Air), *heiho, seinendan, keibodan* dan sebagainya. Kahin menandai masa pendudukan Jepang ini sebagai masa lahirnya kepercayaan diri bangsa Indonesia.[12] Golongan inilah yang bersama-sama dengan golongan intelektuil akan memimpin Indonesia sesudah Republik dibentuk. Sesudah Proklamasi golongan pemuda ini ada yang memasuki tentara resmi dan ada pula yang membentuk laskar-laskar dibawah naungan salahsatu partai politik. Dari integrasi kedua jenis militer ini kemudian lahirlah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kemudian-bersama Polisi-menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Peranan terkemuka Angkatan Bersenjata selama Perang Kemerdekaan menempatkan golongan ini menjadi golongan yang turut menentukan dalam percaturan politik nasional pada masa-masa selanjutnya. Terutama sesudah tahun 1969, kedudukan golongan ini mulai kelihatan menyaingi peranan golongan intelektuil generasi tua. Peranan sosial-politiknya sekarang dirasakan di segala lapangan pemerintahan dan masyarakat.

Kesempatan untuk menjadi anggota angkatan bersenjata terbuka bagi semua lapisan penduduk. Mobilitas memang terjadi dalam tubuh angkatan bersenjata. Orang-orang yang pada galib-

---

10 Leslie Palmer, *Indonesia*, New York, 1965, hal. 123–124.

11 Yang dimaksud dengan rakyat disini yalah semua orang Indonesia terutama dari tingkat bawah seperti petani atau orang kecil (wong cilik) menurut konsepsi Koentjaraningrat.

12 George Mc.T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, 1969, hal. 151.

Pada masa ini, kelompok bangsawan, intelektuil, tokoh politik, dll. masih merupakan suatu lapisan yang tipis dalam struktur masyarakat. Sementara itu elite baru di kota-kota menambah kontrasnya warna pelapisan sosial jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Hal ini adalah karena timbulnya masalah-masalah urbanisasi dan transmigrasi setelah Perang Kemerdekaan, ditambah lagi dengan adanya pengaruh tehnologi modern pada masa ini. Urbanisasi penduduk desa ke kota-kota tidak hanya terjadi karena ingin mendapat lapangan kerja di bidang industri dan perdagangan, tapi juga dalam lapangan pemerintahan, pendidikan, militer, politik, budaya dsb. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya pertambahan penduduk kota Jakarta.[15] Ini semua mengakibatkan munculnya pola baru dalam stratifikasi sosial untuk masyarakat Indonesia. Hal ini membutuhkan suatu penelitian yang khusus karena memang banyak sekali kesulitan untuk meneliti stratifikasi sosial, lebih-lebih untuk suatu masyarakat yang pluralistis dan mengalami perubahan sosial yang cepat seperti Indonesia.

2. Mobilitas horizontal

Untuk mengetahui perkembangan penduduk Indonesia, telah diadakan suatu pengukuran secara kasar. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa yang luasnya 6,9% dari luas seluruh Indonesia, pada tahun 1961 mempunyai jumlah penduduk sebesar 64,9% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia. Kepadatan jumlah penduduknya pada tahun 1961 adalah sebesar 477 jiwa setiap kilometer. Jumlah tersebut adalah sangat besar jika dibandingkan dengan Kalimantan yang hanya mempunyai kurang lebih 8 jiwa setiap kilometer perseginya.[16] Kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya menunjukkan jumlah yang sangat berbeda. Seperti Sumatra, hanya mempunyai kepadatan penduduk sebesar 44 jiwa setiap km2, Sulawesi 48 jiwa setiap km2 dan pulau-pulau lainnya 16 jiwa setiap km2.[17]

Dalam tahun 1961 jumlah penduduk di seluruh Indonesia yang tinggal di kota-kota adalah sebesar 15%, sedangkan sisanya

---

15 Han.R. Redmana *Beberapa Persoalan Penduduk di Indonesia*, Jakarta, 1970, hal.9

16 Lihat Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Beberapa Masalah Penduduk di Indonesia*, Jakarta, 1971, hal. 1 (stensil).

17 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *ibid.*, hal. 2.–

nya hanya terlatih dan diperuntukkan untuk memanggul senapan, ternyata banyak memegang peranan di bidang lain. Ketika ditahun 1957, dalam rangka konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Jaya terjadi pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda, maka banyak anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin perusahaan tersebut. Begitu pula sejak dinyatakan berlakunya kembali UUD'45 di tahun 1959, banyak pula perwira ABRI duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam masyarakat desa, yang dalam banyak hal masih memperlihatkan ciri-ciri masyarakat tradisionil, mobilitas tidak banyak terjadi. Di Bali misalnya penguasa-penguasa tradisionil masih tetap menempati status yang tinggi dibandingkan dengan kepala pemerintahan desa. Tetapi hal itu tidak sama untuk desa-desa di Indonesia. Di Sumbawa keadaan itu malah sebaliknya.[13]

Mobilitas yang terjadi dalam banyak hal disebabkan tindakan perseorangan, yakni warga desa yang meninggalkan desanya, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain misalnya menjadi tentara, menjadi pegawai di kota-kota atau masuk sekolah. Nilai-nilai baru yang datang dari kota, baik yang dibawa oleh para pedagang atau oleh warga desa yang kembali ke desanya, pada umumnya dapat diterima setelah melalui proses yang lama dan bukannya tidak sering mendapat tantangan terlebih dulu.

Mobilitas lain yang terjadi dalam masyarakat Indonesia tampak dalam hal naiknya status wanita. Dari golongan yang dianggap lemah, yang hanya harus mengurus soal-soal rumah tangga, golongan ini pada masa ini turut memegang beberapa kedudukan penting, baik di bidang pemerintahan maupun bidang-bidang kegiatan sosial lainnya. Dimulai dari perjuangan Kartini di awal abad ke 20, setahap demi setahap kaum wanita berhasil melepaskan diri dari status "pingitan".[14] Dalam pergerakan politik wanita memainkan peranan penting dan sudah cukup banyak wanita yang menjadi menteri, hakim agung, dls. Banyak pula wanita yang menjadi lulusan universitas-universitas, menjadi dokter, insinyur dan sarjana-sarjana di bidang lain. Dalam angkatan bersenjatapun mereka menjadi anggota, dimulai dari masa Perang Kemerdekaan ketika terdapat laskar wanita, hingga pada masa ini terdapat korps wanita ABRI.

13 John W. Henderson, *op. cit.*, hal. 128.
14 W.F. Wertheim, *Ibid*, hal. 187 – 188.

merupakan penduduk yang menetap di daerah pedesaan. Jumlah penduduk kota tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar dua kali lipat, bila dibandingkan dengan angka-angka Sensus Penduduk tahun 1930 yang hanya mencapai jumlah 7,5% penduduk kota dari seluruh penduduk Indonesia.[18] Akibatnya adalah bahwa beberapa kota besar mengalami tekanan akan bertambahnya jumlah penduduk hingga tiga sampai enam kali lipat.

Kalau menurut Sensus Penduduk tahun 1930 hanya terdapat tujuh buah kota di pulau Jawa dan sebuah kota di Sumatra yang mempunyai jumlah penduduk di atas 100.000 jiwa, maka jumlah tersebut terus meningkat pada tiga puluh tahun kemudian. Menurut Sensus Penduduk tahun 1961, jumlah tersebut meningkat sampai 20 kota dipulau Jawa, 8 kota di Sumatra, 3 kota di Kalimantan, 3 kota di Sulawesi dan 3 kota di pulau-pulau lainnya.[19]

Mengalirnya kaum pendatang dari daerah pedesaan dengan tujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan menuntut ilmu di kota merupakan faktor utama bagi berkembangnya pertambahan penduduk kota-kota di Indonesia. Kurang lebih sepertiga dari pertambahan penduduk di pulau Jawa/Madura selama dasawarsa antara sensus 1961–1971 mengalir ke tiga kota besar, yakni ke Jakarta, Surabaya dan Bandung. Kota Jakarta merupakan salahsatu contoh untuk digunakan sebagai bahan perbandingan yang jelas lagi mengenai meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 1941 jumlah penduduknya yang hanya mencapai 544.823 jiwa dalam tahun 1958 bertambah menjadi 2.021.950 jiwa dan jumlahnya terus meningkat sampai 4.500.675 jiwa pada tahun 1968.[20]

Pertambahan penduduk yang terus meningkat didalam waktu singkat tersebut mengakibatkan hal-hal yang negatif. Pembangunan di kota tidak dapat mengikuti pesatnya pertambahan penduduk di daerah pedesaan. Sehingga di kota-kota tersebut terlihatlah pemandangan rumah-rumah gubug yang dibangun secara liar dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, semakin banyaknya jumlah becak yang memenuhi lalu-lintas.

---

18 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *op.cit.* hal. 2.–

19 N. Iskandar, *Masalah Populasi Dalam Rangka Pembangunan dan lingkungan*, Jakarta, 1972, hal. 6 (stensil).

20 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *ibid*, hal. 2.

Demikian pula terlihat adanya pedagang-pedagang liar seperti penjual rokok di tepi-tepi jalan, pedagang-pedagang kakilima, penjual makanan dan minuman di kedai-kedai kecil, bahkan nampak kaum gelandangan dan pengemis yang berkeliaran.

Bila kita tinjau lebih lanjut, maka berdasarkan taksiran Biro Pusat Statistik dibawah ini, maka pertambahan penduduk di Indonesia pada tahun 1971 telah mencapai jumlah sebesar 119.183.000 jiwa.

Perkembangan Penduduk di Indonesia.

Tahun	Jawa/Madura	Pulau2 lain	Jumlah
1815	4.615	–	4.615
1850	9.570	–	9.570
1860	12.710	2.965	15.684
1870	16.452	4.285	20.737
1880	19.795	6.768	26.079
1890	23.915	6.768	30.683
1900	28.747	6.576	35.323
1905	30.098	7.305	37.403
1920	31.084	13.871	44.955
1930	41.718	18.247	59.968
1961	62.993	34.026	97.019
1970	73.754	41.814	115.568
1971	76.100	43.083	119.183 [21]

Dan berdasarkan hasil sementara Sensus 1971 tingkat perkembangan penduduk dalam tahun 1970–1971 adalah 2, 68 persen.

Pada tahun 1972, menurut taksiran Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pertambahan penduduk Indonesia meningkat jumlahnya menjadi kuranglebih 124 juta jiwa. [22]

Densitas (kepadatan) penduduk di Indonesia ternyata tidaklah seimbang jika melihat pada tabel dibawah ini:

21 N. Iskandar, *op. cit.*, hal. 5.
22 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *op. cit.*, hal. 5.

Densitas Penduduk di Indonesia. 1971[23]

Pulau	Penduduk	Luas km2	Densitas/km2
Jawa/Madura	76.1 juta	132 ribu	576
Sumatra	20,8 juta	474 ribu	44
Kalimantan	5,1 juta	539 ribu	10
Sulawesi	8,5 juta	189 ribu	45
Pulau2 lain	8,6 juta	750 ribu	15
Indonesia	119,2 juta	1.904 ribu	63

Pulau Jawa/Madura yang luasnya 1/15 dari daerah Indonesia ternyata didiami oleh hampir 2/3 dari penduduk Indonesia. Salah satu cara untuk memecahkan masalah penduduk Indonesia itu adalah dengan memindahkan penduduk dari pulau Jawa dan Madura yang telah padat itu ke pulau-pulau lain yang masih rendah densitas penduduknya. Dan sampai saat ini beberapa kalangan beranggapan bahwa transmigrasi merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah penduduk di Indonesia.

Masalah transmigrasi tidak lepas dari masalah yang menyangkut soal kepadatan penduduk. Transmigrasi dalam arti kata pemindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah dari pulau-pulau yang padat penduduknya seperti pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya yang masih relatif kosong telah mulai digerakkan dalam jaman Hindia Belanda sejak awal abad ke 20 ini.[24] Proses tersebut merupakan akibat daripada timbulnya kekhawatiran akan mundurnya kemakmuran rakyat yang disebabkan karena tekanan penduduk yang makin terasa. Menurut data-data yang tersedia, dibawah ini tercantum tabel perkembangan penduduk di pulau Jawa/Madura sebagai berikut:

23 N. Iskandar, *op.cit.*, hal. 13.

24 Lihat Dr. Nathan Keyfitz dan Widjojo Nitisastro, *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta, 1955, hal. 119.

Tabel Perkembangan penduduk di pulau Jawa/Madura.

Tahun	Jumlah penduduk (juta)	Pertambahan Penduduk (juta)	Jangka waktu (waktu)
1815	4,5	—	—
1845	7,5	3	30 tahun
1880	19,5	12	36 tahun
1920	34,5	15	40 tahun
1961	63,0	29	41 tahun
1970	75,0	22	9 tahun
2000	130,0	67	39 tahun [25]

Angka-angka di atas menunjukkan kenaikan jumlah penduduk yang makin lama makin cepat. Sedangkan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada saat kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945 adalah disekitar 70 juta jiwa Dua tahun kemudian yakni pada tahun 1947 Pemerintah Republik Indonesia yang baru mencapai kemerdekaan itu mulai memikirkan soal pemindahan rakyatnya yang pada jaman Hindia Belanda usaha itu dikenal dengan istilah "kolonisasi." [26] Pada saat itu juga untuk merealisasi usaha pemindahan rakyat didirikan Jawatan Transmingrasi yang merupakan bagian dari Kementerian Perburuhan dan Sosial. Tetapi dalam tahun 1948 tugas tersebut dipindahkan ke Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Sejak saat itu pula Pemerintah Republik Indonesia merubah istilah kolonisasi yang dikenal pada jaman Hindia Belanda dengan istilah transmigrasi. Hal tersebut disebabkan karena pemindahan atau migrasi yang dilakukan Pemerintah adalah merupakan pemindahan dari pulau Jawa ke daerah-daerah diluar Jawa, yang masih termasuk dalam lingkungan batas Negara. Dengan cara pemindahan yang melewati (trans) lautan tersebut, memungkinkan Pemerintah menggunakan istilah "transmigrasi". Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah transmigrasi adalah peindahan atau perpindahan rakyat secara besar-besaran dari satu daerah ke

25 Dr.N. Iskandar, "Transmigrasi dan Pemanfaatan Natural dan Human Recources" *Arti dan peranan Transmigrasi di Indonesia,. 'Dalam Pembangunan dan Hankamnas*, Hasil Seminar Transmigrasi 1970, Jakarta 1970, hal. 48.

26 Soebandi Resosoedarmo SH., "Perundang-undangan Transmigrasi *Arti dan Peranan Transmigrasi di Indonesia Dalam Pembangunan dan Hankamnas*, Jakarta, 1970, hal. 103.

daerah lain dalam lingkungan batas Negara, dengan tujuan untuk menetap di daerah yang baru.

Pada saat Kementerian Pembangunan dan Pemuda dibubarkan dalam tahun 1948, maka usaha transmigrasi termasuk salahsatu tugas dari Kementerian Dalam Negeri. Tetapi ternyata sejak dari Kementerian Perburuhan, Sosial sampai Kementerian Dalam Negeri tugas transmigrasi tak pernah dilaksanakan karena keadaan Negara yang sedang mengalami Perang Kemerdekaan. Baru sesudah terbentuknya Jawatan Transmigrasi yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial, dimulailah usaha memindahkan penduduk. Tujuan transmigrasi yalah mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan jalan mengadakan pemindahan penduduk dari suatu daerah (tempat) ke daerah (tempat) lainnya, yang ditujukan kearah pembangunan ekonomi dalam segala lapangan.[27] Tugas Jawatan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

(a) menyelenggarakan segala urusan pemindahan penduduk dari suatu daerah (tempat) kedaerah (tempat) transmigrasi, menurut rencana yang telah disusun dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

(b) menjalankan segala usaha aktif yang berhubungan dengan pembukaan dan pembangunan daerah-daerah transmigrasi mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial dalam segala lapangan, sepanjang tidak termasuk dalam lapangan pekerjaan lain jawatan atau kementerian.[28]

Pekerjaan yang dilakukan oleh Jawatan Transmigrasi yalah terutama mendirikan kantor-kantor di pulau Jawa dan Sumatra Selatan kemudian menyelenggarakan pengiriman transmigran, sesuai dengan Peraturan Jawatan Transmigrasi No. 2/50 tahun 1950 tertanggal 1 Mei 1950. Maka pada akhir tahun 1950 disamping didirikan Kantor Pusat telah didirikan pula 6 kantor rayon dan 2 kantor cabang di pulau Jawa dengan 117 pegawai. Di pulau Sumatra berdiri satu kantor daerah dengan 4 kantor cabang dengan 14 orang pegawai.[29]

Sedangkan pengiriman transmigran dimulai pada tanggal 12

---

27 Dr. N. Keyfitz dan Widjojo Nitisastro, *op.cit.*, hal. 126.

28 *Ibid.*

29 *Arti dan Peranan, Transmigrasi di Indonesia Dalam Pembangunan dan HANKAMNAS.* Jakarta, 1970, hal. 126.

Desember 1960 yang berjumlah 77 orang.[30] Transmigrasi keluarga sebagian besar menuju ke Sumatra Selatan, sebagian kecil ke Sulawesi. Transmigrasi umum kebanyakan ke Sumatra Selatan, 154 keluarga ke Banten. Mereka pada umumnya berasal dari Jawa Tengah, sedangkan yang ke Banten berasal dari daerah Cirebon, Garut dan lain-lain.[31]

Kalau pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda transmigrasi dilakukan secara paksa, maka lain halnya pada jaman pemerintah Republik. Sejak Pengakuan Kedaulatan, proyek transmigrasi dititik-beratkan atas migrasi sukarela spontan dan transmigrasi umum khusus. Maksudnya adalah pemindahan secara sukarela sebagian daripara bekas pejuang ke daerah-daerah seberang, yang didasarkan atas perimbangan ekonomis dan strategis. Apabila para transmigran di daerah yang baru didatanginya itu belum mendapatkan sumber-sumber yang dapat digali sebagai penyambung hidupnya, maka sementara itu pemerintahlah yang akan menjamin biaya perpindahannya.

Jumlah transmigran yang dipindahkan baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia, dapat kita ikuti dalam tabel berikut.

Pemindahan penduduk dari pulau Jawa yang sangat padat itu ke pulau-pulau lainnya, terutama ke Sumatra, dilakukan dengan cara yang berbeda. Setelah tahun 1950, biaya untuk melanjutkan usaha pemindahan penduduk mencapai jumlah yang lebih besar daripada biaya yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial.[33] Hal itu disebabkan karena adanya persiapan-persiapan dan pemeliharaan yang lebih intensif. Pertama-tama pemerintah menjamin terlaksananya pengangkutan dan penginapan bagi para transmigran selama di dalam perjalanannya. Setibanya di daerah yang baru itu, mereka menerima fasilitas-fasilitas yang menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan cuma-cuma mereka menerima tanah sebanyak 2 ha dilengkapi dengan alat-alat pertanian untuk bercocok tanam. Disamping itu untuk keperluan sehari-hari, mereka menerima alat-alat pertukangan dan alat-alat dapur, demikian pula sandang-pangan dan bibit pupuk. Kecuali ternak, yang dapat digunakan untuk bersawah sebagai pinjaman.

30 *Ibid.*
31 Dr.N.Keyfitz dan Widjojo Nitisastro, *op.cit.*, hal. 126.
32 *Ibid.*

Tahun	Transmigrasi Umum	Transmigrasi Khusus	Jumlah
1938			33.399
1939			44.694
1940			52.208
1951			2.864
1952	16.825	682	17.507
1953	35.432	3.995	39.427
1954	26.239	3.953	30.192
1955	16.665	4.724	21.389
1956	18.232	6.118	24.350
1957	12.509	10.721	23.230
1958	10.610	15.809	26.414
1959	23.963	22.133	46.096
1960	10.295	11.780	22.075
1961	14.709	4.900	19.609
1962			22.129
1963			32.159
1964			15.222
1965			53.225 [32]

Rumah-rumah penampungan telah pula didirikan secara khusus bagi para transmigran baru, yang dapat mendiaminya untuk sementara waktu. Dan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mereka mendapat pula bimbingan dan petunjuk-petunjuk.

Akan tetapi biaya perpindahan ke daerah transmigrasi kemudian bukan lagi menjadi tanggungan Pemerintah melainkan para transmigran itu sendiri. Hal itu disebabkan karena pengaruh inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga-harga. Dengan demikian pada tahun 1964 dilancarkanlah sistim swakarya transmigrasi. Dengan sistim tersebut, para transmigran masih menerima 2 ha tanah dengan alat-alat pertaniannya dan alat-alat perkayuan. Sedangkan pembukaan hutan dan pemasaran hasil penebangan merupakan beban transmigran. Dalam hal tersebut pemerintah tetap memimpin pekerjaan para transmigran yang dilakukan

---

33 Dr.N. Iskandar, "Transmigrasi dan pemanfaatan Natural dan Human Resources". *Op.cit* hal. 50.

secara berkelompok dan gotong-royong, sehingga mereka dapat memetik hasil jerih-payah seluruhnya. Transmigrasi sistim swakarya tersebut, memungkinkan terseleksinya para transmigran yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk memperoleh perbaikan tingkatan hidup di daerah baru. Dengan sistim tersebut dimungkinkan pula berkurangnya volume transmigrasi karena adanya peraturan-peraturan baru.

Adapun mengenai arus transmigrasi itu, ternyata di jaman sejak Kemerdekaan, tidaklah menjadi lebih besar dari jaman-jaman sebelumnya yakni rata-rata hampir mencapai jumlah sebanyak 25.000 orang per tahun, dengan prestasi tertinggi sebanyak 53.000 orang, yaitu pada tahun 1965. Jadi hanya kira2 1000 orang lebih tinggi dari masa kolonial ditahun 1940 yang mencatat sebesar 52.000 orang transmigran. Angka-angka tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat kecil dan tidak berarti terhadap masalah pertambahan penduduk di Jawa. Adanya usaha pengurangan penduduk tersebut, yang meliputi rencana jangka panjang dan jangka pendek, ternyata tidak memperbaiki tingkatan hidup penduduk di Jawa.

Sesungguhnya sejak tahun 1952 oleh Kepala Jawatan Transmigrasi Ir. A.H.O. Tambunan telah diputuskan adanya rencana jangka pendek 5 tahun (1953–1957), akan tetapi rencana ini kemudian dirubah lagi menjadi rencana 35 tahun. Rencana tersebut dimulai tahun 1953, yang dimaksudkan untuk mengurangi penduduk Jawa sampai pada tingkat 31 juta saja, dan pada rencana yang berakhir pada tahun 1987 sudah dapat diperkirakan jumlah pemindahan penduduk disekitar 60 juta. Baru berjalan pada 5 tahun yang pertama, ternyata rencana tersebut mengalami banyak kesulitan, terutama karena menyangkut soal biaya, sehingga Kepala Jawatan Transmigrasi merasa perlu untuk merubah lagi rencananya. Maka dibuatlah suatu rencana baru yang dikenal dengan nama "Rencana Transmigrasi Lima tahun 1956–1960"[34] yaitu memindahkan penduduk Jawa sebanyak 2.00.000 dalam waktu 5 tahun.[35] Perencanaan Transmigrasi mengalami perubahan ber-kali-kali. Kemudian disusul dengan Rencana Transmigrasi 8 Tahun yang disesuaikan dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Tahapan

---

34 Soebandi Resosoedarmo SH, *op.cit.*, hal. 105.

35 Sri Edi Swasono, Dr, "Transmigrasi Dalam Perspektif Pembangunan", *Arti dan Peranan Transmigrasi Dalam Pembangunan dan HANKAMNAS*, Jakarta 1970.

1961–1969,[36] yang memindahkan sebanyak 15.000.000 orang dalam waktu 8 tahun.[37]

Sesudah terjadi peristiwa G.30.S/PKI diadakan rencana baru lagi, yang dikenal dengan Rencana Tiga Tahun Transmigrasi 1967–1969. Dan sebagai hasil Rapat Kerja Transmigrasi di Jakarta ditetapkan kemudian Rencana Lima Tahun Transmigrasi 1969–1973, yang disampaikan kepada BAPPENAS sebagai bahan Repelita. Adanya perubahan tersebut antara lain disebabkan karena kurang tersedianya anggaran dan juga karena selalu berubah-ubahnya organisasi penyelenggaraan transmigrasi.[38]

Dengan demikian angka pemindahan penduduk yang tertinggi hanya dapat dicapai dengan susah-payah. Sedangkan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota atau dari kota-kota kecil ke kota besar lainnya, yang dikenal dengan istilah urbanisasi sangat terasa perkembangannya di beberapa kota besar di Indonesia. Pertama-tama adalah DKI Jakarta Raya, di mana penduduknya yang pada tahun 1930 hanya mencapai jumlah sebesar 553 ribu saja, pada tahun 1961 sudah hampir mencapai jumlah 3 juta jiwa (2.973.100).[39] Sepuluh tahun kemudian, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971 jumlah penduduknya sudah mencapai 4,56 juta jiwa.[40] Faktor-faktor yang menyebabkannya yakni karena meningkatnya kelahiran dan migrasi, perluasan daerah yang mengakibatkan penduduk yang semula berada di luar daerah ibukota kini menjadi penduduk ibukota.

Demikian pula berdasarkan penelitian Pusat Penelitian Penduduk LEKNAS tahun 1971[41] dikemukakan alasan mengapa mereka pindah. Yang merupakan alasan utama adalah alasan untuk mencari pekerjaan, disusul kemudian dengan alasan mengikuti orangtua, sanak-saudara, dan turut suami atau istri. Baik alasan mutasi dan mencari sekolah, maupun adanya faktor keamanan di daerah-daerah yang memaksa orang untuk pindah ke ibukota guna mencari ketenangan, merupakan alasan-alasan lain yang penting dikemukakan.

---

36 Soebandi Resosoedarmo SH, *op.cit*, hal. 105.
37 Sri Edi Swasono, *op.cit.* hal. 194.
38 Han R. Redmana, *op.cit.*, hal. 11.
39 Soebandi Resosoedarmo, *op.cit.* hal. 105.
40 Sukarso, "Urbanisasi di Indonesia: Sebuah Analisa Kejadian", *Prisma*, no. 7 (Desember 1972) hal. 27.
41 *Ibid.*

Dengan adanya alasan tersebut, maka berdatanganlah kaum pendatang ke ibukota, yang sebagian terbesar berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari luar Jawa, jumlah kaum pendatang yang terbesar berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Antara pendatang dari daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam tingkat pendidikan yang dimilikinya, hingga menyebabkan perbedaan pula mengenai alasan kepindahannya. Berbeda dengan para pendatang dari Jawa dan Sunda para pendatang dari daerah luar Jawa pada umumnya mengemukakan alasan mereka datang ke kota besar adalah untuk melanjutkan sekolah atau mengembangkan karier. Alasan tersebut tercermin dari jenis pekerjaan mereka, yakni bekerja di bidang angkutan bermotor atau mendirikan rumahmakan. Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh para pendatang dari daerah pedesaan di Jawa datang ke kota besar adalah "mencari tingkatan hidup yang lebih layak". Maka jenis pekerjaan yang ditempuhnya hanyalah mencapai jumlah penghasilan yang tidak seberapa, seperti menjadi pedagang-keliling yang menjajakan minyak tanah, abu gosok, botol-botol bekas, kertas bekas, rumahtangga. Penduduk. dari pedesaan di Jawa seperti dari desa-desa Rongkop (Wonosari), Wuryantoro (Wonogiri), dan Jeruk Sawit (Kabupaten Karang Anyar), demikian pula penduduk dibeberapa desa lainnya di Tegal, Purwodadi, Cirebon, Pasuruan dan sekitarnya, terpaksa meninggalkan daerahnya untuk mencari hidup di kota. Sebabnya adalah karena di daerahnya berlaku masa tandus antara bulan-bulan Juli sampai dengan November. [42]

Perkembangan Penduduk dikota-kota besar [43]
(1920 – 1971)
dalam juta

Kota	1920	1930	1961	1971
Jakarta	0,3	0,5	3,0	4,6
Surabaya	0,2	0,4	1,0	1,5
Bandung	0,1	0,1	0,97	1,2

42 Sukarso, *op.cit.* hal. 25.
43 N. Iskandar, *op.cit.*, hal. 22.

Disamping DKI Jakarta Raya. pemusatan penduduk di daerah kota atas urbanisasi yang menyolok terasa pula dikota-kota besar lainnya yakni di Surabaya dan kemudian menyusul Bandung. Pada tabel terlihat perkembangan penduduk di tiga ko ta besar dari tahun 1920-- 1971.

Dengan demikian. maka tingkat pertambahan penduduk dalam waktu sepuluh tahun lamanya, yakni antara tahun 1961 -1971 diperkirakan 5,3% per tahun di Jakarta. 5,0% di Surabaya dan 2,3% di Bandung.[44]

Melihat pada jumlah tersebut tampak pemasukan penduduk ke kota Jakarta dan Surabaya menimbulkan masalah yang cukup besar. Lain halnya dengan kota Bandung. dimana urbani-'sasi nampak merata.

Sekalipun mengalami masa perang dan revolusi dalam waktu setengah abad, jumlah penduduk kota di Indonesia telah berkembang lebih cepat daripada perkembangan penduduk pada umumnya. Dari tahun 1920--1030 jumlah penduduk seluruhnya naik dengan 55 persen. Dari tahun 1930--1961 pertambahan penduduk Indonesia adalah 60 persen dan dalam waktu yang bersamaan itu penduduk kotanya meningkat sampai 255 persen. Dan dalam waktu sepuluh tahun lamanya yakni antara tahun 1961 dan 1971 pertambahan penduduk mencapai sebesar 21 persen, sedangkan pertambahan penduduknya/kotanya berjumlah 57 persen.[45]

Meningkatnya urbanisasi, dimana hampir 1/3 dari pertambahan penduduk Indonesia ditampung oleh daerah kota disebabkan pertama-tama karena situasi di daerah pedesaan itu sendiri. Hal tersebut karena berlakunya hak waris serta sistim gotong-royong seperti halnya yang terlihat di pulau Jawa dimana tanah dibagi-bagikan sedemikian rupa, sehingga lama kelamaan penduduk hanya memiliki sebidang tanah yang sempit. Hak milik yang sudah minim itu kadang-kadang dikerjakan bersama dengan keluarga lain atau dibiarkan dikerjakan oleh orang lain sekampung. Dengan cara demikian ini hasil tanahnya menjadi milik dua keluarga.[46]

---

44 *Ibid.*

45 N. Iskandar. *Ibid*. hal. 25.

46 Han R. Redmana *op.cit.*. hal. 11.

Faktor-faktor pendorong lain yang berhubungan dengan daerah asal secara langsung maupun tidak langsung hingga menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun dari kota kecil ke kota besar lainnya. adalah adanya perbanding-an yang demikian pincangnya antara jumlah penduduk dengan luas tanahnya. Kepadatan penduduk yang melebihi dari 1000 jiwa per km2 menimpa di daerah-daerah pedesaan dimana tanah pertanian merupakan sumber hidup yang utama. Keadaan se-macam tersebut dapat dijumpai di desa Adiwerna dekat Tegal. Punung di Pacitan dan beberapa desa di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Masalah tersebut tidak dapat teratasi. mengingat bahwa pekerjaan di luar pertanian di daerah pedesaan di Indonesia. khususnya di Jawa pada umumnya hampir tidak ada. Sedangkan pekerjaan sampingan sementara mereka tidak mengerjakan sa-wah; dibidang kerajinan tangan. seperti anyam-anyaman. keran-jang buah atau alat-alat dari batu merupakan kegiatan yang tidak berhasil meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka mengerjakan-nya sambil lalu atau hanya berdasarkan pesanan saja. Masalah tersebut mempengaruhi pasaran tenaga. Berlebihnya jumlah buruh yang tidak memiliki keterampilan khusus memaksa mereka untuk menerima pendapatan yang rendah. Nasib buruh tersebut menimbulkan keinginan dikalangan penduduk desa untuk men-cari tingkatan hidup yang lebih tinggi, hingga mendorong mereka untuk berpindah ke kota.

Kepindahan tersebut menimbulkan masalah-masalah di kota. Menghadapi surplus penduduk dari daerah pedesaan yang terdorong pergi ke daerah kota itu, tidak ada penampungannya. termasuk kesempatan kerja yang produktif di kota-kota dan fasilitas-fasilitas lainnya untuk menjamin hidup yang layak bagi kaum pendatang baru, seperti kesehatan yang terjamin, tempat-tempat rekreasi yang sehat. Tidak jarang kaum pendatang dari desa itu menghadapi kenyataan hidup di kota hanya sebagai gelandangan atau tunakarya saja. Menurut sensus 1961 ada 401.485 jiwa yang menganggur di kota-kota di seluruh Indonesia dan 1.468.135 jiwa di daerah pedesaan. Di ibukota saja ada 15.000 gelandangan dan tunakarya yang setiap harinya ber-tambah dengan 5 sampai 10 orang.[47] Disamping itu terdapat

---

47 Han R. Redmana, *op cit.*, hal. 35.

pula orang-orang setengah penganggur yang pada akhir tahun enampuluhan berjumlah sekitar 12 sampai 15 juta orang.[48]

Urbanisasi di pulau Jawa yang jumlah penduduknya sudah padat itu telah menimbulkan masalah-masalah lainnya dimana keadaan dan tingkat hidup penduduk di daerah kota meminta perhatian khusus. Untuk meningkatkan hasil buminya, diadakanlah perluasan daerah pertanian ke daerah-daerah hutan dan dengan cara menggunduli lereng-lereng gunung. Tindakan tersebut menimbulkan masalah selanjutnya yakni bencana alam dimana penduduk terancam bencana banjir dimusim hujan serta erosi, dan kekeringan sungai di musim kemarau.

Usaha untuk menanggulangi dan memperbaiki tingkat hidup penduduk tidak berjalan dengan semestinya, disebabkan oleh terbatasnya anggaran belanja negara dan terus meningkatnya jumlah penduduk. Salahsatu cara lain untuk mengatasi jumlah penduduk itu ialah dengan menurunkan tingkat kelahiran yang dapat dilaksanakan dengan Keluarga Berencana.

Di Indonesia sebenarnya sejak tahun 1957 suatu perkumpulan swasta yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia telah memelopori pelaksanaan kegiatan keluarga berencana di dalam masyarakat. Tetapi sampai tahun 1966 situasi politik tidak memungkinkan penyebar-luasan gagasan keluarga berencana itu. Baru di dalam tahun 1967 diadakan persiapan-persiapan guna melaksanakan program Keluarga Berencana Nasional, dimana Pemerintah sendiri turut aktif merangsang masyarakat. Ternyata proses ini berjalan dengan memuaskan. Hingga akhirnya Presiden RI dengan surat keputusannya no. 26 tahun 1968 menginstruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat untuk membentuk suatu lembaga semi-pemerintah yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Tugasnya adalah mengkoordinasi usaha-usaha atau kegiatan keluarga berencana. Maka didalam tahun 1969 mulailah program Nasional keluarga berencana dimasukkan didalam program pembangunan nasional Pelita I.

Sesudah kurang lebih 1 tahun kemudian Pemerintah menganggap perlu untuk menanganinya sendiri, sehingga pada permulaan tahun 1970 dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas untuk mengkoordinasi semua kegiatan keluarga berencana di Indonesia. Disam-

48 *Ibid*, hal. 30.

ping itu pada bulan Juli 1969 Pemerintah mengundang team akhli dari PBB dan Bank Dunia untuk membantu kita didalam melaksanakan program nasional keluarga berencana.

Dan sesudah dilantiknya pimpinan BKKBN pada pertengahan tahun 1970 dirumuskan program 5 tahun serta susunan organisasi BKKBN dari tingkat pusat sampai ke-eselon-eselon bawah.

Program Keluarga Berencana di Indonesia yang pada saat ini meliputi Jawa, Madura dan Bali, bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. menurunkan tingkat fertilitas (tingkat kelahiran).

Gubernur DKI Jakarta Raya sendiri pernah menganjurkan perlunya keluarga berencana sehubungan dengan kepadatan penduduk di ibukota khususnya dan dipulau-Jawa dan Bali umumnya. Dengan cara melaksanakan keluarga berencana itu, Gubernur beranggapan bahwa pertambahan penduduk akan dapat dikurangi. Anjurannya itu mendapat dukungan maupun tanggapan dari berbagai golongan. Beberapa jururawat telah dikirim keluar negeri untuk mempelajari cara-cara keluarga berencana, sedangkan di Bandung telah diadakan seminar tentang keluarga berencana oleh Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran.[49] Sejak tahun 1970 mulailah pemerintah melancarkan secara intensif suatu program berencana yang bertujuan untuk mencapai 6 juta wanita dalam kelompok umur reproduksi sebagai peserta dalam waktu lima tahun.

B. PERKEMBANGAN EKONOMI

1. Pemikiran mengenai ekonomi Indonesia.

Para cendekiawan yang berkecimpung didalam pemikiran mengenai masalah pembangunan Indonesia pada umumnya memiliki pendapat yang sama. Pembangunan ekonomi Indonesia adalah suatu usaha untuk merubah struktur ekonomi dari struktur ekonomi kolonial dengan ciri-ciri berat sebelah, artinya pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada beberapa sektor saja. Karena pembangunan ekonomi dalam arti yang luas merupa-

---

49 Han R.Redmana, *op. cit.*, hal. 57.

kan prasarat bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, para pemikir mencurahkan pikirannya untuk merubah struktur ekonomi itu. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah alat: usaha untuk meningkatkan produktivitas dengan menambah modal dan ketrampilan, maka dalam proses pertumbuhannya mengandung kekuatan sendiri untuk dapat menciptakan investasi baru.[50] Juga mereka berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional yang stabil memerlukan jangka waktu yang relatif lama.

Pertumbuhan yang lamban pada ekonomi Indonesia adalah akibat perubahan-perubahan baru dibidang teknologi, pertambahan penduduk yang cepat, stabilitas politik, serta kebijaksanaan ekonomi yang berganti-ganti.

Sejarah daripada pemikiran *elite* mengenai ekonomi Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa Pergerakan Nasional. Pemikiran-pemikiran ekonomi ini merupakan reaksi daripada sikap dan politik kolonial, yang serba diskriminatif. Timbulnya dua sektor yang berbeda didalam konstelasi ekonomi kolonial, antara pemilik modal raksasa yang berhasil membangun pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, pertambangan, dengan pemilik modal kecil yang produktivitasnya rendah, yang koefisien teknisnya mudah berubah, adalah akibat daripada politik kolonial itu sendiri.

Reaksi dalam bentuk pemikiran ekonomi dipelopori oleh Drs. Moh. Hatta. Pokok pikiran Hatta dinyatakan sebagai berikut: Bahwa perekonomian bangsa Indonesia harus dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri dengan azas gotong royong.[51] Hatta mendasarkan pendapatnya pada situasi riil keadaan ekonomi bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Karena salah satu faktor perkembangan pergerakan nasional adalah reaksi terhadap diskriminasi dan ekonomi kolonial yang bersifat liberal. Pada saat itu lahir bermacam-macam istilah yang hakekatnya adalah menentang ketidak-adilan dan usaha mengubah situasi ekonomi yang terjadi pada masa itu. Tjokroaminoto, menyebut kapitalisme asing dengan *"zondig Kapitalisme"* (kapitalisme berdosa). Dari kalangan Boedi Oetomo kapitalisme disebut sebagai "tanaman yang datang dari negeri asing". Kelompok

---

50 Prof.Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, 1955, hal. 39.

51 Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi*, Jakarta, 1960, hal. 120.

nasionalis radikal reaksinya tercermin dalam sikapnya yang keras dengan azasnya non-kooperasi. [52]

Keadaan riil pada masa perkembangan pergerakan nasional yang mendasari pemikiran Hatta adalah stratifikasi sosial pada masyarakat kolonial. Hatta memulai pembahasan mengenai stratifikasi itu dari tingkatan yang terendah, yakni golongan petani. Golongan ini merupakan mayoritas didalam masyarakat. Mereka memiliki solidaritas yang tinggi dan pada umumnya masih berpegang teguh kepada tradisi karena lingkungan hidupnya yang serba statis. Mereka sangat terikat pada tanah sebagai satu-satunya faktor produksi.

Pada lapis kedua dari stratifikasi masyarakat kolonial ini adalah golongan pedagang kecil, priyayi kecil. Pada umumnya kedudukan ekonominya lemah, modal mereka tidak dapat berkembang. Dengan petunjuk pada strafikasi dan watak sosial ini Hatta berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk membangun dan memperkembangkan ekonomi, adalah dengan jalan melaksanakannya dari bawah dengan sarana koperasi. Azas koperasi adalah gotong-royong, dimana ciri dan sifat ini dimiliki oleh masyarakat. Dengan azas gotong-royong, bekerjasama, masyarakat dididik untuk membentuk modal. Kalau modal masyarakat ini telah terkumpul, maka modal ini merupakan satu kekuatan baru untuk mempertahankan hidupnya. Koperasi dipandang dari segi lain memiliki manfaat yang besar, yaitu bernilai pendidikan bagi masyarakat. Ia akan menumbuhkan kesadaran harga diri dan memperkuat solidaritas. [53] Rasa harga diri dan solidaritas akan tumbuh baik pada masyarakat, baik dikalangan petani, maupun pedagang kecil jika hal-hal ini mendapat bimbingan yang wajar. Dari sini akan tumbuh idealisme dan semangat berjuang untuk kepentingan bersama. [54]

Pokok-pokok pikiran Hatta ini lebih menekankan kepada pendidikan masyarakat. Rakyat harus dididik dan dibimbing dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dengan sekaligus menumbuhkan kesadaran nasional. Karena itu koperasi adalah alat membangun ekonomi rakyat yang belum berkembang. Pendapat Hatta merupakan pendapat yang dominan pada masa

---

52 Mohammad Hatta. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta, 1967. hal. 27–28.
53 Mohammad Hatta, *op. cit.* hal. 128.
54 Mohammad Hatta, *Ibid*, hal. 132.

pergerakan nasional, karena landasannya berpijak pada situasi obyektif masyarakat pada waktu itu. Sampai sekarang pendapat ini masih dipertahankan oleh Pemerintah, sekalipun pengetrapannya telah berbeda. Mengenai masalah koperasi dewasa ini Sumitro menyatakan bahwa kooperasi dan transmigrasi merupakan "pangkalan dongkrak" untuk menanggulangi *rural depression* (depresi di pedesaan) dan *urban unemployment.*[55] (penganggur-an perkotaan).

Sesudah pecahnya perang dunia kedua, kekuasaan ekonomi Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Jepang melaksanakan ekonomi perang, bahwa segala daya dan dana dikerahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan perang. Prasarana ekonomi sebagian besar rusak atau hancur. Keadaan ini disusul dengan pecahnya perang kemerdekaan di Indonesia. Pada masa perang kemerdekaan ini beberapa ahli ekonomi berusaha keras untuk merencanakan pembangunan ekonomi yang rusak pada masa pendudukan Jepang. Pada bulan April 1947 dibentuk Panitya Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin oleh Moh. Hatta. Hasil Panitya ini dituangkan di dalam "Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia". Hakekat daripada pemikiran ini adalah, pengawasan (kontrol) di semua kegiatan ekonomi berada di tangan Pemerintah. Strategi dasar pembangunan pada pemikiran ini ialah mengganti ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Realisasi daripada Rancangan Ekonomi Indonesia itu terhambat oleh perang.

Sesudah pengakuan kedaulatan, tokoh yang mencurahkan perhatiannya terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi adalah Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Dr. Sumitro berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang perlu dilakukan adalah merubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Sumitro mencoba mempraktekkan pemikiran-nya itu pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pada bangsa Indonesia harus selekas mungkin ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, baik dalam bentuk

55 Sumitro Djojohadikusumo, "Beberapa pemikiran mengenai kebijaksanaan dibidang Perdagangan." *Prisma.* No. 6, Oktober 1972, hal. 11.

bimbingan konkrit atau dengan bantuan pemberian kredit karena pemerintah menyadari bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup. Apabila usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha bangsa Indonesia akan dapat berkembang maju, maka tujuan merubah struktur ekonomi kolonial dibidang perdagangan akan tercapai. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program kabinet Natsir (September 1950 – April 1951), ketika itu ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.[56] Program ini terkenal dengan program Benteng. Gerakan Benteng (Benteng *Group)* telah dimulai pada bulan April 1950. Selama tiga tahun (1950–1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia yang mendapat kredit bantuan dari program Benteng ini.[57] Program Pemerintah itu hakekatnya adalah kebijaksanaan untuk melindungi usaha-usaha pribumi terhadap kekuatan-kekuatan golongan ekonomi non-pribumi. Namun usaha ini tidak tercapai tujuannya. Pengusaha-pengusaha Indonesia ternyata lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalah-gunakan maksud Pemerintah ini dengan mencari keuntungan secara cepat. Bantuan kredit ini ternyata tidak efektif, sudah tentu program pemerintah gagal. Hal ini berarti pemborosan, pemerintah menambah bebannya, sehingga menjadi salahsatu sumber defisit.[58] Kegagalan pemikiran Sumitro ini karena belum pernah diteliti sejauh mana kondisi intern pengusaha itu dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha non-pribumi.

Pemikir lainnya adalah Ali Wardhana. Ali Wardhana mengajukan pendapatnya bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami Pemerintah dalam usahanya membangun ekonomi nasional, karena kita tidak memiliki ahli-ahli yang berpengalaman. Indonesia sebagai negara yang berkembang dihadapkan kepada beberapa masalah yang saling berkaitan satu sama lain, seperti ekonomi politik, sosial-budaya. Faktor stabilitas politik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Dengan melihat beberapa faktor itu Ali Wardhana menekankan,

---

56 Dalam Kabinet Natsir, salah satu Programnya adalah: "memperkembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar melaksanakan ekonomi nasional yang sehat".

57 Ralph Anspach, *The Problem of a Plural Economy and its effects on Indonesia's Economy*, Ann Arbor, 1963 hal. 212.

58 Douglas S. Paauw, *Financing Economic Development: the Indonesia Case*, Glencoe, 1959, hal. 65, Sri Edi Swasono, "Proteksi atau Penyuluhan untuk Pengusaha Pribumi", *Indonesia Raya*, 28–29 Mei 1973.

perkembangan ekonomi hendaknya tidak berlandaskan struktur ekonomi yang berat sebelah *(unbalanced)* ini. Program jangka panjang hendaknya ditujukan kearah industrialisasi dan modifikasi struktur ekonomi yang berat sebelah ini. Kita tidak perlu mengubah struktur ekonomi export tradisionil, melainkan harus diadakan diversifikasi dan spesialisasi. Prosentase *man power* yang tinggi pada aktivitas pertanian, akibat kekurangan modal, teknik pertanian yang rendah dengan produktivitas yang rendah pula, dapat dikurangi dengan memperkenalkan metode dan teknologi modern. Sehingga para petani akan terbiasa menggunakan alat-alat mekanis. Dengan cara ini aktivitas *man power* pada pertanian akan menurun, secara pelan-pelan dilepaskan dari aktivitasnya yang lama, kemudian diserap kedalam industri, angkutan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan bertambahnya aparat produksi dan spesialisasi, maka kita dapat memulai pembangunan ekonomi. [59]

Pada masa demokrasi terpimpin, Adam Malik mengeluarkan buah pikirannya didalam rangka meningkatkan sektor perdagangan dengan nama *trade reform*. Adam Malik memandang bahwa pada masalah perdaganganpun tidak berbeda dengan masalah pertanian. Ia mengemukakan perbandingan sebagai berikut:

pedagang	-- tanah
jasa-jasa	— hasil pertanian
pedagang kecil	— tani miskin
pedagang menengah	— tani sedang
pedagang besar	— perkebunan
buruh dagang	— buruh tani
perusahaan dagang tanpa izin	— penggarap liar
sistim catut	— sistim tengkulak
penjualan lisensi	— sistim ijon.

Pendapat Adam Malik diilhami adanya *land-reform*, dengan dilengkapi oleh peraturan pelaksanaannya. Kerangka pokok daripada *trade reform* yang diusulkan adalah:

1. Disusun undang-undang pokok perdagangan nasional

---

59 Ali Wardhana, *Monetary Problems of an Underdeveloped Economy: With Special Reference to Indonesia*, Ann Arbor, 1962, hal. 13.

2. konsentrasi modal nasional
3. mempertinggi ketahanan koperasi rakyat
4. merapatkan barisan-barisan negara *Nefos* dalam perdagangan.

Dengan didasari oleh situasi politik pemerintah, Adam Malik juga mengemukakan suatu usul untuk membentuk *Trade Concentration of the New Emerging Forces (TRACO).* Pendapat ini cenderung pada pendekatan politik, bukan pendekatan ekonomis untuk menanggulangi masalah perdagangan.[60] Masalah ekonomi dan politik saling jalin-menjalin. Suasana politik pada masa orde lama (demokrasi terpimpin), menghasilkan strategi dasar pembangunan ekonomi yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon). Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dinyatakan bagian mutlak daripada strategi umum Revolusi Indonesia. Dekon bertujuan: menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional, dan demokrasi yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme; dan mencapai tahap-tahap ekonomi sosialis Indonesia tanpa adanya penghisapan manusia oleh manusia.[61] Konsepsi Dekon yang ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada 28 Maret 1963 itu dalam pelaksanaannya ternyata membawa akibat stagnasi bagi ekonomi Indonesia. Pada tahun 1966, Widjojo Nitisastro menyatakan pendapatnya bahwa untuk menanggulangi masalah ekonomi hendaknya dikeluarkan kebijaksanaan yang berpangkal kepada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut Widjojo bukanlah suatu hal yang baru melainkan telah terdapat didalam penjelasan UUD 1945. Demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan dan penilikan anggota masyarakat. Perekonomian disusun bersama tidak mengenal struktur pertentangan kelas.[62] Peranan Pemerintah sejauh mungkin tidak menguasai segala sesuatu, tetapi memberikan pengarahan dan mendorong pembangunannya. Hal ini bukanlah sistim liberal, tetapi pemerintah janganlah mengurus segala sesuatu dengan

---

60 Adam Malik, *Politik dan Ekonomi*, Jakarta, 1966, hal. 19–20.

61 Dj.L. Aroean SH, *Deklarasi Ekonomi. dengan Peraturan2 Pelaksanaannya*. Jakarta, 1963, hal. 5.

62 Widjojo Nitisastro, *Hakekat dan Konsekwensi Ketetapan MPRS dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta, 1966, hal. 8, Widjojo Nitisastro, "Rencana Pembangunan Lima Tahun", *Administrasi Negara*, . No.3 th X, Nopember 1970, hal. 6.

sistim lisensi, sistim penjatahan. Jadi pemerintah menjalankan apa yang disebut *indirect means* dan *indirect control.*

Disamping pribadi-pribadi yang mengemukakan pemikiran pembangunan ekonomi terdapat juga golongan-golongan dalam masyarakat. Partai Nasional Indonesia (PNI) menyadari bahwa ekonomi bangsa Indonesia masih jauh terbelakang. Indonesia memiliki kekayaan dan tenaga manusia, apabila dimobilisasi secara sungguh-sungguh merupakan modal pokok bagi pembangunan ekonomi. Pokok-pokok pikiran PNI adalah:

1. Perekonomian harus disusun atas dasar usaha bersama dan azas kekeluargaan. Badan-badan perusahaan terdiri dari koperasi dan perusahaan negara.
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai oleh negara. Untuk pelaksanaannya dibentuk badan perusahaan vital yang dikuasai oleh negara.
3. Bumi air dan kekayaan yang terkandung didamnya dikuasai oleh negara. Pengusahaannya dilakukan oleh perusahaan besar (perusahaan industri dasar) yang harus bersifat perusahaan negara. [63]

Pokok pikiran PNI, pada dasarnya tidak berbeda dengan pokok-pokok pikiran Hatta dan fasal 33 Undang-undang Dasar 1945, atau hasil dari Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 1947. Golongan PNI menyebut konsepsi itu ekonomi marhaenis. Untuk mencapai ekonomi marhaenis, sarana-sarana harus dibentuk adalah, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perancang Nasional, Front Marhaenis. [64]

Pemikir masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia, pada dasarnya terbagi atas 2 kelompok. Kelompok pertama adalah para intelektuil yang berpendidikan barat. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dan sosial didalam negeri harus mendapat perhatian yang utama. Pembangunan ekonomi harus mengikuti pola pembangunan ekonomi secara Barat. Perlu diselenggarakan kerjasama dengan negara-negara yang maju. Kelompok ini oleh Higgins disebut kelompok

63 Mr Soebagio Resodipoero, "Bergerak ke Ekonomi Marhaenis," dalam *Menuju ke Ekonomi Marhaenis*, Yogyakarta, 1959, hal. 16.

64 Soebagio Reksodipoetro, *ibid.*, hal. 20.

yang berhaluan ekonomi *(economic-minded)*. Kelompok kedua terdiri dari bermacam aliran, yang pada umumnya adalah politisi.

Mereka ada yang beraliran nasionalis, komunis, konservatif, isolasionis. Pendapat kelompok ini pada umumnya, bahwa sebelum pembangunan ekonomi dimulai harus terlebih dahulu dilaksanakan penyelesaian revolusi dengan mengakhiri dominasi ekonomi asing, pengusahaan modal asing dan pengaruh asing lainnya di dalam tata-kehidupan masyarakat Indonesia. Sikap kelompok ini sangat dipengaruhi oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mengakhiri dominasi penjajah. Kelompok ini digolongkan sebagai kelompok yang berhaluan sejarah *(history minded)*.[65]

2. Pelaksanaan daripada pemikiran ekonomi Indonesia.

Pada akhir Pemerintahan pendudukan Jepang dan awal Republik Indonesia keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Inflasi yang hebat menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa hari. Sumber inflasi adalah beredarnya matauang rupiah Jepang secara tak terkendali. Peredaran matauang Jepang di masyarakat diperkirakan sejumlah 4 milyard. Sampai pada bulan Agustus 1945 matauang Jepang itu beredar di Jawa, berjumlah 1,6 milyard. Jumlah ini kemudian bertambah ketika pasukan Serikat berhasil menduduki beberapa kotabesar di Indonesia, dan segera menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyard, untuk tujuan operasi dan membiayai pembantu-pembantunya, menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintah kolonial Belanda. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel.

Karena itu perekonomian kita bertambah sulit. Pemerintah Republik tidak dapat menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum memiliki uang untuk penggantinya. Kas Pemerintah kosong. Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.[66] Untuk sementara waktu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan Penetapan berlakunya beberapa matauang sebagai tanda pembayaran yang sah diwilayah RI. Ditetapkan tiga macam mata-

65 Benjamin Higgins, *Indonesia's Economic. Stabilization and Development*, New York, 1959, hal. 103–104.

66 Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa soal Keoeangan*, Jakarta, 1947, hal. 27.

Keadaan peredaran uang di Jawa sampai bulan Desember 1945

Matauang pendudukan Jepang yang beredar.	1.600.000.000.
Sisa dari Pemerintah Hindia Belanda dan De Javasche Bank	300.000.000.
Matauang cadangan yang disita oleh Nica	2.000.000.000.
Jumlah	39.000.000.000.

Sumber: *Makmoer*, No. 2 th I, 10 Januari 1946, hal. 60.

uang: matauang De Javasche Bank, matauang pemerintah Hindia Belanda, dan matauang pemerintah pendudukan Jepang.[67] Yang paling menderita pada masa inflasi ini adalah para petani, karena pada jaman Jepang mereka adalah satu-satunya penghasil (produsen) karena itu mereka yang paling banyak menyimpan dan memiliki uang Jepang. Kedudukan dan situasi yang sulit yang dialami oleh pemerintah ini masih ditambah dengan dilakukannya blokade laut menutup pintu keluar masuk perdagangan Republik oleh Angkatan Laut Belanda. Tindakan blokade dimulai pada bulan Novemver 1945. Akibat blokade ini barang milik Republik seharga Rp. 200.000.000 tidak dapat diexport. Adapun alasan Belanda untuk melakukan blokade adalah:

1. untuk mencegah dimasukkannya senjata dan alat-alat militer ke Indonesia.
2. mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
3. melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Belanda itu tujuannya adalah: suatu usaha untuk melikwidasi Republik dengan senjata ekonomi. Terutama akibat dari blokade ini yang diharapkan oleh pihak Belanda ialah timbulnya keadaan sosial yang buruk, kekurangan bahan-bahan import yang sangat dibutuhkan. Barang-

67 Makloemat Presiden RI No.1/10, 3 Oktober 1945.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

barang milik Republik dihancurkan atau dibumihanguskan. Keadaan inflasi yang keras akan menimbulkan kegelisahan dan ketegangan sosial sehingga menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik. Nyata-nyata perbendaharaan Republik kosong, dan pengeluaran negara semakin besar. Pihak Belanda mengira bahwa RI secara ekonomis akan segera bangkrut.

Pemerintah RI berusaha keras untuk mengatasi kesulitan moneter yang semakin kalut ini. Usaha pemerintah pertama-tama adalah melakukan pinjaman nasional. Dengan mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), Menteri Keuangan Ir Surachman melaksanakan pinjaman nasional dengan Undang-undang No.4/1946. Besar pinjaman ini direncanakan akan meliputi Rp. 1000.000.000., yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya 40 tahun.[68] Pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk di Jawa dan Madura diwajibkan menyetor uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.[69] Pinjaman nasional pada tahap pertama berhasil dikumpulkan sejumlah Rp. 500.000.000. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Sukses yang dicapai oleh pemerintah ini adalah satu ukuran yang menunjukkan bahwa usaha pemerintah mendapat dukungan dari Rakyat. Tanpa dukungan dan kesadaran Rakyat yang tinggi semacam ini, pemerintah pasti akan mengalami kebangkrutan. Ditinjau dari segi politik sukses ini merupakan pertanda adanya kepercayaan Rakyat terhadap Pemerintah dan aparatnya.[70]

Kesulitan pemerintah belum lagi teratasi, ketika dari pihak Serikat, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford, Panglima baru AFNEI, memproklamasikan berlakunya uang Nica. Uang Nica ini dimaksudkan untuk mengganti uang Jepang yang nilainya telah jauh menurun. Kurs ditentukan 3% yaitu setiap Rp. 1 uang Jepang berbanding dengan 3 sen uang Nica. Proklamasi penggantian itu dilakukan pada tanggal 6 Maret 1946. Uang Nica dinyatakan berlaku didaerah-daerah yang diduduki oleh Serikat. Perdana Menteri Sutan Sjahrir memprotes tindakan Panglima Inggris itu, karena Serikat terang-terang melanggar persetujuan yang telah disepakati, bahwa selama situasi politik belum

---

68 *Makmoer*, No.10. Th. I, 10 Mei 1946.
69 Soemitro Djojohadikoesoemo, *op. cit.* hal. 27.
70 Soemitro Djojohadikoesoemo, *op. cit.* hal. 22 dan hal. 27.

mantap, tidak akan dikeluarkan uang baru untuk menghindari kekacauan dibidang ekonomi dan keuangan.[71] Karena tindakan Serikat ini Pemerintah sekali lagi memperingatkan kepada masyarakat, bahwa diwilayah RI hanya berlaku tiga macam matauang sebagaimana diumumkan oleh Pemerintah pada 1 Oktober 1945. Penduduk dianjurkan untuk tidak mempergunakan uang Nica sebagai alat pembayaran. Tindakan Serikat ini bagian dalam rangkaian tindakan yang melemahkan posisi RI dibidang ekonomi dan keuangan. Pemerintah RI kemudian mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia, yang terkenal dengan nama ORI. ORI baru dikeluarkan pada bulan Oktober 1946, untuk menggantikan matauang pendudukan Jepang. Kurs uang pendudukan Jepang dengan ORI adalah satu perseribu artinya setiap seribu rupiah uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah ORI. Untuk sementara waktu setiap keluarga hanya diperkenankan memiliki Rp.300, dan bagi mereka yang tidak berkeluarga Rp.100,-

Tindakan pemerintah selanjutnya, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan koordinasi secara konkrit antara masalah-masalah ekonomi dan keuangan, berupa pembentukan Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Nopember 1946. Sebelum dibentuknya Bank Negara, Pemerintah telah merintis bahwa bekas *Syomin Ginko*, menjadi Bank Rakyat Indonesia Bank ini merupakan prototipe daripada Bank Negara.[72] Tetapi Bank Negara ini dimulai dengan Yayasan Fusat Bank Indonesia yang dipimpin oleh Margono Djojohadikoesoemo.[73] Bank Negara ini diberitugas untuk mengatur nilai tukar antara ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Karena situasi perang, situasi perekonomian terpengaruh oleh keadaan itu. Pendapatan Pemerintah tidak sebanding dengan pengeluarannya. Hasil produksi perkebunan dan pertanian sebagian besar tidak dapat diexport secara biasa. Pemerintah semata-mata hanya bergantung pada produksi petani. Prof Sumitro menyatakan bahwa pada masa Perang Kemerdekaan, produksi petani merupakan dasar pokok daripada kehidupan ekonomi Indonesia. Karena itu Pemerintah RI berhasil bertahan

---

71 John O.Sutter, *Indonesianisasi*, New York, 1959, hal. 345–347.

72 *Makmoer*, No.7 Th.I, 10 April 1946.

73 *Antara*, 19 Mei, 1947.

sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk.[74] Dengan produksi petani, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan menghadapi akibat blokade Belanda. Usaha-usaha untuk menembus blokade dengan tujuan untuk melepaskan isolasi ekonomi dengan negara lain, dilakukan oleh pemerintah dengan pelbagai cara. Usaha yang pertama adalah masih lebih bersifat politis daripada ekonomis. Misalnya pemerintah RI berani menjanjikan akan membantu pemerintah India dengan 500.000 ton beras, karena negara ini sedang ditimpa bahaya kelaparan. Alasan pemerintah dinyatakan bahwa untuk panen tahun 1946 diperkirakan akan surplus 200.000 sampai 400.000 ton.[75] Sebagai imbalannya pemerintah Indonesia akan menerima ganti bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Untuk harga beras yang ditawarkan kepada India itu, Indonesia adalah negara yang memberikan tawaran yang paling rendah. Bagi RI yang penting bukanlah masalah harga, akan tetapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan persetujuan Linggajati, antara lain, bahwa RI diharuskan menjual surplusnya ke daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Rupa-rupanya pemerintah lebih cenderung untuk menjual berasnya keluar negeri daripada membantu Belanda.[76] Perhitungan ini terbukti tepat karena secara politis India yang paling aktif, membantu perjuangan diplomasi di forum internasional. Usaha lainnya dari pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luarnegeri. Usaha ini dirintis oleh BTC *(Banking and Trading Corporation)* suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. BTC berhasil mengadadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Insbranton Inc). Dalam transaksi pertama pihak Amerika Serikat bersedia untuk membeli barang export dari Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lainnya. Kapal milik Insbranten Inc. yang masuk kepelabuhan RI Cirebon adalah *Martin Behrmann*, yang mengangkut barang pesanan BTC dan akan memuat barang2 export RI. Namun kemudian kapal ini dicegat oleh Angkatan Laut Belanda, dan ditarik ke pelabuhan Tanjung Priok. Muatannya disita. Usaha menembus blokade karena kuatnya

---

74 Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, *op.cit.* hal. 23.
75 *Maknoer*, No.9 Th.I, 25 April 1946 Hal. 312.
76 Dr Soedarsono, "Pengiriman beras ke India" *Siasat*, No.16. Th.I. 19 April 1947, hal. 11.

kekuatan laut Belanda lebih dipusatkan di Sumatra. Selama tahun 1946 pelabuhan di Sumatra hanya Belawan yang diduduki dan dikuasai penuh oleh Belanda. Ditambah dengan wilayah perairan Sumatra yang luas, pihak Belanda kurang mampu melaksanakan pengawasan yang ketat. Hasil-hasil dari export Sumatra, terutama karet sheet banyak diselundupkan keluar, khususnya ke Singapura. Mengenai jumlah barang-barang yang pernah diterima oleh Singapura dari Sumatra pada tahun 1946 diperkirakan seharga Straits $20.000.000 dan dari Jawa seharga Straits $1.000.000.- Sebaliknya barang yang dikirim ke Sumatra dari Singapura seharga Straits $3.000.000. Dari Singapura ke Jawa seharga Straits $ 2.000.000.[77]

Oleh karena pada awal pertumbuhan perekonomian RI Pemerintah dihadapkan kepada satu kenyataan yang serba kacau akibat pendudukan Jepang; Pemerintah tidak sempat melakukan tindakan-tindakan penanggulangan secara konsepsionil. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha yang bersifat konsepsionil untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak.. Prakarsa itu dituangkan didalam konperensi ekonomi pada bulan Februari 1946. Konperensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan pejabat-pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung terhadap masalah ekonomi. Sekalipun konperensi ini masih terbatas membahas masalah-masalah ekonomi di Jawa saja, namun usaha ini merupakan perintis daripada pemecahan ekonomi secara konsepsionil. Konferensi dipimpin oleh Ir Darmawan Mangunkusumo, Menteri Kemakmuran. Tujuan konperensi ini ialah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat didalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah adalah:

1. masalah produksi dan distribusi bahan makanan.
2. masalah sandang.
3. status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Didalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan ini masih tetap dilakukan autarki lokal, sampai saat itu belum ada peraturan yang mengubahnya. Sistim ini disepakati akan dihapuskan secara berangsur-angsur dan diganti dengan sistim sentralisasi.

---

77 Perhitungan tersebut dikutip dari *Malaya · Statistics* bulan September 1946, selanjutnya periksa Mr Moh I. Thajeb, "Blokade Ekonomi", *Mimbar Indonesia*, No. 1 Th. II, 3 Januuari 1947, hal.10.

Badan Pengawasan Makanan Rakyat kemudian diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) dibawah supervisi Kementerian Kemakmuran. PPBM dipimpin oleh Dr Sudarsono.[78] Sejak adanya PPBM dihapuskan larangan pengiriman bahan-bahan antar keresidenan kecuali beras. Untuk beras masih harus mendapat izin dari Jawatan Kemakmuran. Tentang administrasi perkebunan-perkebunan konperensi menyumbangkan beberapa pokok pikiran mengenai penilaian kembali status dan administrasi perkebunan, karena perkebunan merupakan perusahaan vital bagi RI. Pada Kabinet Sjahrir kedua, masalah status dan administrasi perkebunan berhasil diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai negara dengan sistim sentralisasi dibawah pengawasan Menteri Kemakmuran.

Konperensi ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konperensi ekonomi kedua ini mempunyai ruang-lingkup yang luas dibandingkan dengan konperensi yang pertama. Acara-acara yang dibahas adalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konperensi ini rencana konkrit yang disarankan oleh Wakil Presiden Moh. Hatta adalah: rehabilitasi pabrik-pabrik gula, karena gula merupakan bahan export yang penting dan pengusahaannya harus dikuasai negara.[79] Dari hasil export ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh RI. Rencana dan rancangan lainnya yang dibahas dalam Konperensi Ekonomi ini belum dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat. Realisasi yang konkrit adalah penguasaan dan pengubahan administrasi perusahaan gula. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946 tanggal 21 Mei 1946 dibentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Guna Negara (BPPGN) dengan status perusahaan Negara. BPPGN dipimpin oleh Notosudirdjo.[80]

Peraturan Pemerintah mengenai gula disusun dengan Peraturan Pemerintah No. 4 th 1946, tanggal 6 Juni 1946, mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Status PPN adalah perusahaan negara, yang mempunyai tugas:

1. meneruskan pekerjaan bekas perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh Jepang.

---

78 *Siasat*. No. 20 Th I, 17 Mei 1947, hal. 4.
79 *Makmoer*, No. 10, Th I, 10 Mei 1946, hal. 331.
80 *Antara*, 22 Juni 1946.

2. mengawasi perkebunan bekas milik Belanda.
3. mengawasi perkebunan-perkebunan lainnya, dengan cara mengawasi mutu produksinya.

Di pulau Jawa dibagi atas beberapa wilayah PPN: [81]

Sesudah dua kali diadakan konperensi ekonomi, Pemerintah tetap berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan masalah ekonomi secara realistis. Atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr..A.K. Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi). [82] Badan Perencana ini merupakan badan yang tetap, yang tugasnya untuk membuat rencana pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Perencanaannya adalah untuk mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, Menteri Gani kemudian mengumumkan rancangan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana-rencana yang dikemukakan oleh dr. A.K. Gani sebagai langkah pertama adalah :

1. Semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara jatuh ketangan Pemerintah RI.
2. Bangunan umum vital milik asing, akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
3. Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI.
4. Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI–Belanda. [83]

Dr.Gani menyatakan bahwa untuk membiayai Rencana Pembangunan ini Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing, pinjaman dari dalam dan luarnegeri. Untuk menampung dana-dana pembangunan yang direncanakan dibentuk Bank Pembangunan.

---

81 Lima wilayah PPN: Jakarta, Banten, Bogor, Priangan-Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur.
82 *Antara*, 14 Juni 1947.
83 *Siasat*, No. 15 Th I, 12 April 1947, hal. 2.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh Badan Perencana ini oleh Pemerintah dinilai sangat positif. Perusahaan campuran *(joint venture)* diperkenankan dengan pengawasan dari negara. Tanah-tanah partikelir dihapuskan.

Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi ini pemerintah akan mengerahkan dana-dana masyarakat yaitu dengan pinjaman nasional dan tabungan rakyat, pinjaman dari luarnegeri sebagaimana yang telah direncanakan oleh *Planning Board*. Dan biaya lainnya didapat dengan cara mengikutsertakan badan-badan swasta di dalam pembangunan ekonomi. [84]

Rencana panitya pemikir ini belum berhasil dilaksanakan, karena situasi politik dan militer tidak memungkinkan. Aksi militer Belanda yang pertama mengakibatkan sebagian besar daerah Republik yang ekonomis potensiil jatuh ketangan pihak Belanda. Wilayah RI yang tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatra tergolong daerah yang minus dan berpenduduk padat. Akibatnya kesulitan ekonomi semakin memburuk. Disamping itu pemerintah harus menanggung-konsekwensi persetujuan Renville, dimana pasukan-pasukan TNI harus ditarik kewilayah RI. Pemerintah yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta melaksanakan tindakan-tindakan yang realistis, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dan laskar yang menjadi beban pembiayaan pemerintah, dikurangi secara drastis. Tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang dan lasykar-lasykar akan disalurkan kepada bidang yang produktif, dan diurus oleh Kementerian Pembangunan Pemuda. Karena dasar perekonomian kita bergantung pada produksi petani, maka bidang ini akan dipergiat kembali. Dari Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo diturunkan Rencana Produksi Tiga Tahun 1948–1950 atau terkenal dengan Kasimo Plan. Kasimo Plan pada dasarnya adalah usaha swa sembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah yang kosong di Sumatra timur seluas 281. 277 ha. Di Jawa diadakan intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul. Hewan yang memegang peranan penting dalam produksi pangan harus dipelihara sebaik-baiknya, dalam arti pencegahan penyem-

---

84 "Dasar Pokok Rancangan Ekonomi Indonesia", *Mimbar Indonesia*, No.2. Th I, 22 Nopember 1947, hal. 7.

belihan dan penggunaan yang kurang perlu. Sensus hewan harus dilaksanakan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik bagi rakyat. Tidak ketinggalan oleh Kasimo juga disarankan dilaksanakannya transmigrasi.[85] Pada bulan April 1947, Badan Perancang dr.Gani diperluas menjadi Panitya Pemikir Siasat Ekonomi. Panitya Pemikir ini dipimpin sendiri oleh Wakil Presiden Hatta, dan dr A.K. Gani sebagai wakilnya. Tugas Panitya ini adalah mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan bahan bagi kebijaksananan pemerintah dan bahan-bahan guna merencanakan pembangunan ekonomi, serta nasehat-penasehat kepada Pemerintah didalam rangka perundingan dengan Belanda. Panitya Pemikir ini dibagi atas delapan bagian; yang mempelajari masalah ekonomi yang mendesak pada waktu itu;

1. masalah ekonomi umum
2. masalah perkebunan
3. masalah industri, pertambangan dan minyak bumi
4. masalah hakmilik asing
5. masalah keuangan
6. masalah listrik, kereta api dan trem
7. masalah perburuhan
8. masalah-masalah di daerah pendudukan Belanda.[86]

Panitya Pemikir ini kemudian menghasilkan Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia. Rancangan ini berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat dengan merata, dengan cara:

a. mengintensifkan usaha produksi
b. memajukan pertukaran internasional
c. mencapai taraf hidup yang lebih tinggi
d. mempertinggi derajad dan kecakapan rakyat

Adapun petunjuk pelaksanaan yang harus ditempuh sebagai berikut :

Sektor perdagangan harus digiatkan kembali. Import dibatasi pada barang-barang yang penting seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri, alat transport. Export meliputi

---

85 "Rencana Produksi Tiga Tahun" (Plan Kasimo), *Buku Penyongsong Konferensi Ekonomi antar Indonesia di Yogyakarta 2–8 Desember 1949*, Semarang, 1949, tanpa halaman.

86 John O Sutter, *op. cit.*, hal. 496–497.

hasil-hasil perkebunan, hasil hutan dan tambang. Persebaran penduduk dengan cara memindahkan sejumlah 20 juta penduduk Jawa ke Sumatra selama 10 sampai 15 tahun. Dengan cara demikian diharapkan kemakmuran di Jawa berkembang dan terbuka kemakmuran baru di Sumatra. Dasar politik perekonomian pemerintah adalah fasal ·33 Undang-Undang Dsaar 1945, karena semua perusahaan vital harus dikuasai oleh negara. Perusahaan itu adalah perusahaan listrik dan air, perusahaan keretaapi dan trem, pos dan telekomunikasi, bank sirkulasi.

Semua hasil pemikiran itu belum sempat dilaksanakan, karena situasi politik yang tidak stabil. Pada bulan September 1948 pecah pemberontakan PKI di Madiun, yang kemudian disusul dengan aksi militer Belanda yang kedua, pada bulan Desember 1948. Pada masa Perang Kemerdekaan, dimana pemerintah mengawasi semùa kegiatan ekonomi, peranan dan partisipasi pengusaha-pengusaha swasta kurang begitu menggembirakan. Karena itu di dalam kongres Persatuan Tenaga Ekonomi di Malang Wakil Presiden Moh Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperkuat wadah persatuannya. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) di bawah pimpinan B.R. Motik menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Tujuannya adalah menggalang kembali dan melenyapkan individualisme dikalangan organisasi pedagang untuk memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia. Bahkan Presiden Sukarno pernah menjanjikan kepada PTE, untuk lebih meningkatkan partisipasinya, akan diangkat calon-calon dari PTE di dalam Komite Nasional Pusat. Dianjurkan juga agar pemerintah daerah membantu usaha-usaha PTE. Dua perusahaan yang berada di bawah PTE karena situasi berubah menjadi semakin mundur. PTE hanya berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal pertama Rp. 5000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat aksi militer Belanda. PTE kemudian mencurahkan kegiatannya pada bidang perbankan.[87]

---

87 Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dibentuk di Jakarta pada bulan September 1945, sebagai hasil Permoesyawaratan Kaoem Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 20 Juli 1945. periksa *Indonesia Merdeka*, no.7 Th I, 25 Juli 2605 (1945) hal.5.
Ketua PTE adalah B.R. Motik. Tujuan PTE: menyusun segala tenaga ekonomi bangsa Indonesia dalam kebaktian terhadap Pemerintah dan memperkokoh kedudukan perekonomian bangsa Indonesia. Soewarno, "Persatuan Tenaga Ekonomi" *Buku Penyongsong*, tanpa halaman.

Usaha perdagangan swasta lainnya yang membantu usaha perekonomian pemerintah adalah *Banking and Trading Corporation (BTC)* atau Perseroan Bank dan Perdagangan. Dibentuknya BTC ini menurut Dr Soemitro, adalah langkah persiapan organisasi badan perdagangan nasional, jika sewaktu waktu perjuangan politik beralih keperjuangan ekonomi. [88]

Beberapa perusahaan lainnya dari kalangan swasta bergabung dalam bentuk Gabungan Perusahaan. Misalnya Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting [89] yang berpusat di Malang, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia (Puperti) yang berpusat di Cirebon. Produksi Puperti mencapai 170 juta batang rokok untuk konsumen di Jawa. [90]

Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, sitausi perekonomian kita mewarisi keadaan ekonomi dan keuangan yang mengkhawatirkan. Beban hutang luarnegeri sebesar Rp.1.500 juta dan hutang dalam negeri sejumlah Rp.2.800 juta. [91] Struktur perekonomian yang kita warisi juga struktur ekonomi yang berat sebelah. Export kita masih bergantung kepada beberapa jenis hasil perkebunan. Produksi barang-barang export ini dibawah produksi sebelum Perang Dunia II. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh Pemerintah adalah:

a. mengurangi jumlah uang yang beredar.
b. mengatasi kenaikan biaya hidup. [92]

Sedang masalah jangka panjang adalah, masalah pertambahan penduduk, dan tingkat hidup yang rendah. Beban yang berat ini merupakan konsekwensi daripada pengakuan kedaulatan. Defisit Pemerintah pada waktu itu sejumlah Rp. 5,1 milyard. Defisit ini sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah, yaitu dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal 20 Maret 1950. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp.1.6 milyard. Kemudian dengan kesepakatan sidang Menteri Uni-Indonesia-Belanda, mendapat kredit sebesar Rp. 200.000.000 dari negeri Belanda. Pada tanggal 13 Maret dibidang perdagangan diadakan usaha untuk memajukan export dengan sistim sertifikat devisa. Tujuan Pemerintah adalah untuk merangsang export. Nilai

---

88 *Siasat*, No. 8 th.I, 22 Februari 1947, hal. 1.
89 *Antara*, 31 Mei 1946.
90 *Ibid*, 2 Januari 1947.
91 Ir Djuanda, "Ekonomi Nasional" *Mimbar Indonesia*., No. 32, th IV, 12 Agustus 1950, hal. 11.
92 Soemitro Djojohadikoesoemo, *op.cit.*, hal. 138.

tukar rupiah dirubah dari Rp.3.80 setiap $1, menjadi Rp. 7.60 untuk setiap $1.- untuk export, dan Rp. 11.40 setiap $1, untuk import.[93] Sistim ini memberikan penghasilan yang besar kepada exportir dalam rupiah, sehingga mereka dapat membayar lebih tinggi kepada produsen.

Karena pecah perang Korea, export RI pada kwartal kedua 1950 meningkat. Export Indonesia meningkat 187% pada bulan April 1950, 243% pada bulan Mei, atau sejumlah $ 115 juta. Disamping usaha-usaha tersebut Pemerintah juga berusaha mendapat kredit dari luarnegeri. Kredit ini dimaksudkan untuk pembangunan prasarana ekonomi. Missi Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda ke Amerika Serikat berhasil mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $ 52.245.000. Jumlah ini ditentukan untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automatif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta-api, dan perhubungan udara.[94]

Sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang. Berkurangnya pendapatan pemerintah ini disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang, tidak memiliki barang-barang export lainnya kecuali hasil perkebunan. Perkembangan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan arah yang stabil bahkan sebaliknya. Pengeluaran Pemerintah yang semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik, (perluasan program pemerintah biaya untuk operasi-operasi keamanan dalam negeri), adalah sumber utama daripada defisit. Disamping itu pemerintah sendiri tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan nasional. Kecuali itu kelemahan pemerintah lainnya adalah bahwa politik keuangannya tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Nederland.[95] Jadi sumber-sumber daripada instabilitas tidak semata-mata tergantung pada perluasan program, tetapi dipengaruhi juga oleh dua faktor di atas. Sudah pasti bahwa hal ini adalah akibat daripada politik kolonial Belanda yang kita warisi. Dari Pemerintah Belanda kita tidak memiliki

---

93 John Paul Meek, *The Government and Economic Development in Indonesia*, Ann Arbor, 1956 hal. 282–284.

94 Kementerian Penerangan, *Exim Bank*, Jakarta, 1952 hal. 4–8.

95 Ali Wardhana, *op.cit.*, hal. 30, Drs. Tan Goan Po, *Faktor-faktor Strategis*, hal. 4.

ahli-ahli ekonomi yang cukup, sehingga didalam usaha merubah sistim ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak terasa perubahannya yang drastis. [96]

Pada tahun berikutnya Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan Negara. Kebijaksanaan moneter ditinjau kembali, sesudah pada akhir tahun 1951 menasionalisasi De Javasche Bank. Usaha pemerintah adalah menurunkan biaya export dan tindakan penghematan. Defisit pada tahun 1952 telah meningkat menjadi 3 milyard rupiah. Oleh karena pada mulanya anggaran belanja Pemerintah belum pernah disahkan oleh DPR, maka sejak 1952 rencana anggaran belanja dimintakan persetujuan DPR.

Karena defisit ini, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru, dan menuju kearah inflasi. Kecenderungan inflasi secara tidak langsung akan menghambat produksi karena naiknya upah. Sejak 1953 defisit anggaran belanja pemerintah sebesar Rp.3.047 juta dan peredaran uang pada waktu itu berjumlah Rp.7,6 milyard. Defisit ini meluncur terus sampai 1958.

Tahun	Jumlah
1953	3.047 juta rupiah
1954	3.600 juta rupiah
1955	2.000 juta rupiah
1956	2.300 juta rupiah
1957	5.300 juta rupiah. [97]

Defisit yang terus menerus akibat kebijaksanaan budgetair pemerintah. Kebijaksanaan budgetair pemerintah mempunyai dua kelemahan yakni:

1. tidak terdapat kontinuitas dalam penerimaan, karena penerimaan hanya tergantung pada pajak-pajak tidak langsung. Besar-kecilnya penerimaan ini tergantung kepada perkembangan perdagangan luar negeri,
2. *current expenditures* meningkat akibat perluasan program pemerintah, meluasnya birokrasi dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien. [98]

---

96 Ali Wardhana, *Ibid.*, hal. 11.

97 Mr. Loekman Hakim, "Keadaan dan Keuangan pada waktu sekarang dan jalan keluar untuk mengatasi", *op.cit.* hal. 39.

98 Drs. Tan Goan Po, *op.cit.*, hal. 1.

Kebijaksanaan yang ditempuh kemudian oleh Pemerintah (kabinet Natsir) adalah melaksanakan industrialisasi, yang kita kenal sebagai rencana Sumitro. Sasaran rencana Sumitro ditekankan terutama pada pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dll.[99] Kebijaksanaan Kabinet Natsir ini diikuti pula dengan usaha peningkatan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan liberalisasi pertanian dengan penanaman modal asing.[100]

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo, kebijaksanaan Pemerintah meningkat kepada perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Ekonomi jangka panjang dengan wadah Biro Perancang Negara. Biro ini dibentuk, dengan tugas merancangkan pembangunan jangka panjang, karena Pemerintah yang terdahulu lebih menekankan program jangka pendek, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena masa pemerintahan terlalu singkat dengan program yang berganti-ganti, maka tidaklah terdapat stabilitas politik. Tidak adanya stabilitas politik ini merupakan faktor bagi kemerosotan ekonomi, inflasi dan lambatnya rencana pembangunan. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956–1961). Rencana Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 November 1958, yang mempunyai daya surut sampai 1 Januari 1956. Akibat situasi politik dan ekonomi, Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun kemudian terpaksa dirubah prioritas dan sasarannya pada 1957 sesudah diadakan Musyawarah Nasional Pembanguann (MUNAP). Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp.12,5 milyard didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Tetapi karena adanya depresi di Amerika Serikat dan Eropah Barat akhir 1957 dan awal 1958, maka pendapatan negara menjadi mundur, karena harga export bahan mentah kita merosot. Demikian pula sengketa Irian Barat, dengan akibat Pemerintah melaksanakan tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indo-

---

99 John O.Sutter, *op.cit.*, hal. 775.

100 Benjamin Higgins, *op.cit.*, hal. 15.

nesia pada bulan Desember 1958 ada pula pengaruhnya. Faktor politik lainnya yang memberatkan pelaksanaan RPLT adalah ketegangan antara Pusat dan Daerah. Demikian pula adanya barter gelap menimbulkan tendens yang membahayakan pembangunan.[101] Ketegangan Pusat dan Daerah ini dapat diredakan sementara diadakan .Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP).-Perdana Menteri Djuanda memberikan kesempatan kepada MUNAP untuk merubah rencana pembangunan itu, untuk menghasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh jangka panjang. Namun pelaksanaan pembangunan ini dihambat oleh kesulitan administratif, khususnya penentuan prioritas. Ketegangan politik yang timbul tidak dapat di redakan lagi dan akhirnya pecah pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menumpas pemberontakan itu diperlukan biaya yang besar. Akibat langsung adalah meningkatnya defisit, dan angka export menunjukkan *trend* menurun. Prosentase defisit dari tahun 1950 adalah 20% tetapi pada 1960 meningkat menjadi 100%. Sementara itu ketegangan politik antara Indonesia – Belanda memuncak menuju konfrontasi bersenjata.

Sejak pemerintah mendekritkan kembali ke UUD 1945, pada tanggal 5 Juli 1959, kembali Pemerintah memikirkan rencana pembangunan. Hasilnya adalah rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961–1969). Rencana Pembangunan Delapan Tahun ini di sahkan oleh MPRS pada tahun 1960. Sasaran pembangunan meliputi bidang mental, kesejahteraan, pemerintah, produksi, distribusi. Proyek-proyek dibagi atas proyek A dan proyek B. Proyek B diharapkan untuk dapat membiayai pembangunan selanjutnya. Rencana ini dibuat oleh Majelis Perancang Nasional yang diketuai oleh Prof.Muh. Yamin.[102] Sebenarnya rencana pembangunan delapan tahun ini kurang realistis, kurang logis, dibandingkan dengan rencana yang terdahulu, tetapi mendapat dukungan politik secara penuh. Namun akhirnya rencana pembangunan ini mempunyai nasib yang sama dengan rencana pembangunan yang terdahulu, tidak dapat terlaksana akibat semakin mundurnya pendapatan Pemerintah. Sejajar dengan ditumbuhkannya demokrasi terpimpin, pada tanggal 24

---

101 Biro Perantjang Nasional,. "*Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun*,1956 – 1960, Jakarta,1960, hal. 5–9.

102 Departemen Penerangan RI, *Buku Ringkasan Pembangunan Semesta*,. Jakarta, 1961, hal. 44.

Agustus 1959 Pemerintah mengadakan serangkaian tindakan di bidang ekonomi dan keuangan. Uang kertas yang bernilai Rp. 500,– didevaluasi menjadi Rp. 50,– dan yang bernilai 500 didevaluasi menjadi Rp. 50,– dan yang bernilai dihapuskan Rp. 1.000,– menjadi Rp. 100,–. Semua simpanan dalam bank yang melebihi Rp. 25.000 dibekukan, Bukti Export (BE) dihapuskan dan diganti dengan pungutan export dan pungutan import, serta penilaian kembali nilai rupiah dengan valuta asing.[103] Tindakan Pemerintah selanjutnya adalah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tanggal 26 Mei 1963, yang diikuti dengan 14 peraturan pokoknya. Dan Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistim ekonomi terpimpin. Karena kesukaran-kesukaran yang menyolok, dari tahun 1961–1962 harga-harga telah naik sebesar 400%. Tetapi di dalam melaksanakan ekonomi terpimpin ini pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya. Akibatnya semakin tampak bahwa bidang kelembagaan ekonomi semakin terjerumus ke dalam kebiasaan yang unsur terpimpinnya lebih banyak daripada unsur ekonomi yang efisien. Akibatnya struktur ekonomi mengarah kepada etatisme. Ekonomi terpimpin ala Indonesia terutama bersifat ekonomi-peraturan yang menjerumus menjadi ekonomi anarchi.[104] Pengeluaran negara bertambah besar sebab prinsip-prinsip pembangunan ekonomi diabaikan. Defisit dari tahun ke tahun meningkat, yang disebabkan oleh lebih besarnya pengeluaran daripada penerimaan negara. Antara tahun 1960–1965 pengeluaran negara meningkat dari Rp. 60,5 milyard menjadi Rp. 2.514, milyard atau 40 kali, sedang penerimaan negara pada 1960 Rp. 53,6 milyard menjadi Rp. 923,4 milyard pada 1965, atau 17 kali. Defisit yang makin lama makin besar itu ditutup dengan pencetakan uang baru. Volume uang naik dari Rp. 47,8 milyar pada 1960 menjadi Rp. 2.775,0 milyard pada 1965. Dan sejak bulan Januari – Agustus 1966 pengeluaran mencapai Rp. 11 milyard dan penerimaan hanya Rp. 3,5 milyard, defisit mencapai jumlah Rp. 7,5 milyard yang menambah volume uang dalam sirkulasi. [105]

Pemerintah telah hidup di luar kemampuan, karena terlalu

---

103 Departemen Penerangan, *Amanat dan Penjelasan Presiden RI tentang tindakan-tindakan Pemerintah dibidang keuangan dan ekonomi*, Jakarta, 1959 hal. 3.

104 Dr. Emil Salim, *Masalah Stabilisasi Ekonomi*, Jakarta, 1971, hal. 19.

105 Dr. Emil Salim, *ibid*, hal. 17–18, Drs. Tan Goan Tiong "Beberapa akibat inflasi di Indonesia" *Menjelajah Tracee Baru*, Jakarta, 1966, hal. 3.

banyak yang ingin dilaksanakan: Inflasi kita sudah mencapai hiper-inflasi. Pada tahun 1966 inflasi mencapai 600%. Sebab pokok daripada kemerosotan ekonomi kita adalah:

- pengurusannya tidak lagi rasionil dan tidak ada pengawasannya.
- tidak adanya ukuran yang obyektif dalam menilai sesuatu usaha atau hasil seseorang. [106]

Dilihat secara keseluruhan gambaran ekonomi kita pada masa Orde Lama adalah:

1. Volume uang meningkat terus-menerus akibat defisit anggaran belanja.
2. Arah uang tidak membangkitkan produksi atau melancarkan arus barang.
3. Arus barang mundur akibat kurangnya produksi dalam negeri sebagai konsekwensi kurangnya spare parts.
4. Kepentingan rakyat kecil dikorbankan dengan dihentikannya import beras, digunakan devisa yang lengkap bagi tujuan politik.
5. Menumpuknya hutang yang penggunaannya penuh manipulasi dan tidak bertanggungjawab.
6. Kelangkaan barang, bahan baku, sparepart, semakin bertambah. [107]

Pada saat jatuhnya Orde Lama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 yang berjudul Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. TAP MPRS ini terdiri atas 10 bab dan 71 fasal, yaitu:

1. Landasan dan prinsip kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
2. Kekuatan ekonomi potensiil.
3. Skala prioritas nasional.
4. Peranan pemerintah.
5. Peranan koperasi.
6. Peranan swasta nasional.
7. Kebijaksanaan pembiayaan.
8. Hubungan ekonomi luar negeri.

---

106 Widjojo Nitisastro, *ibid.*, hal. 2.

107 Dr. Emil Salim, *op.cit.*, hal. 9.

9. Prasarat.
10. Penutup.

Pada azasnya ketetapan ini meliputi landasan idiil dan landasan operasionil. Landasan idiil menentukan pokok yang harus dipegang teguh yaitu azas demokrasi ekonomi. Sistim demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua dan dibawah pimpinan atau penilaian anggota masyarakat. Perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan tidak mengenal pertentangan klas. Karena itu mempunyai konsekwensi keharusan adanya pengawasan Rakyat terhadap penggunaan kekayaan negara.[108]

MPRS menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang berlarut-larut itu disebabkan oleh:

a. tidak adanya pengawasan yang efektif dari DPR terhadap kebijaksanaan ekonomi Pemerintah.
b. kepentingan ekonomi dikalahkan oleh kepentingan politik.
c. masalah ekonomi yang rasionil untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dikesampingkan.

Kemudian MPRS menggariskan tiga macam program yang harus diselesaikan oleh Pemerintah secara bertahap.

Program itu adalah :

– program penyelamatan dan rehabilitasi,
– program stabilisasi dan rehabilitasi,
– program pembangunan.

Khusus mengenai program stabilitasi dan rehabilitasi merupakan program jangka pendek dengan skala prioritasnya:

– pengendalian inflasi
– pencukupan kebutuhan pangan
– rehabilitasi prasarana ekonomi
– peningkatan kegiatan export
– kecukupan kebutuhan sandang.

Sesuai dengan Ketetapan MPRS tersebut, Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah penyelematan ekonomi sebelum dilaksanakannya program stabilisasi. Langkah-langkah penyelematan adalah: Pertama, mendobrak kemacetan ekonomi dan secara simultan menyerang sektor penyebab kemacetan yaitu:

1. penerimaan negara terlalu rendah,
2. pengeluaran negara terlalu tinggi dan tidak efisien,

108 Widjojo Nitisastro, *Hakekat dan konsekwensi Ketetapan MPRS dibidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta, 1966, hal. 2.

3. expansi kredit bank terlalu banyak dan tidak produktif,
4. tunggakan atas penglunasan hutang-hutang luarnegeri terlalu banyak,
5. penggunaan devisa bagi import sering kurang berorientasi kepada kebutuhan prasarana.
6. export kita merosot.

Kedua debirokratisasi dan dekontrol sebagai ikhtiar untuk mengurangi gejala ekonomi anarchi.

Ketiga, sejauh mungkin berorientasi kepada kepentingan produsen kecil.

Untuk usaha ini Ketua Presidium Kabinet Ampera secara berturut-turut mengeluarkan serangkaian petunjuk dan instruksi dalam pelaksanaan penyelamatan. Tindakan pemerintah meliputi:

1. mengadakan operasi pajak, terutama di kota-kota besar untuk meneliti sampai seberapa jauh perusahaan-perusahaan besar milik negara dan swasta dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Cara-cara pemungutan pajak baru diciptakan yang terkenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang) untuk pajak pendapatan, perseroan dan kekayaan.Hasilnya pendapatan dan penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak tidak langsung meningkat dari 26% pada 1967 menjadi 36% pada.1968.
2. penghematan di bidang pengeluaran Pemerintah, khususnya pengeluaran yang konsumtif dan routine. Subsidi untuk perusahaan-perusahaan negara dihapuskan.
3. Kredit bank dibatasi, kredit import dihapuskan.

Kredit export diberikan apabila bank yakin akan terlaksananya export Kebijaksanaan kredit ketat dari pemerintah ini merupakan kredit yang selektif dan terarah. Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini merupakan usaha untuk menekan inflasi dan mengurangi volume uang serta mengarahkannya kepada bidang yang produktif. [109] Dengan bertolak dari kenya-

---

109 Dr. Emil Salim, *op.cit.*, hal. 19–21, Soedradjat Djiwandono, *Masalah-masalah Ekonomi-Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta, 1970, hal. 12–13.

taan-kenyataan itu Kabinet Ampera melancarkan program jangka pendek. Hakekat pada stabilisasi adalah membendung inflasi, dan program rehabilitasi adalah memulihkan kemampuan berproduksi. Dalam hal ini strategi yang dicapai oleh pemerintah meliputi tiga hal pokok yang dikembangkan dan dilaksanakan secara serasi dan dinamis:

1. penertiban dan penyelamatan, penyehatan keuangan negara yang serba kalut. Kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi yang ganas harus dibendung dari sumbernya yang langsung yaitu defisit anggaran negara, untuk ini dilaksanakan anggaran berimbang secara konsekwen, penghematan disegala bidang, dan penggunaan keuangan negara secara tepat dan benar-benar perlu. Proyek-proyek pembangunan yang tidak ekonomis dihentikan.

2. penggarapan bidang moneter dan perbankan. Pemberian kredit yang tidak terarah yang juga menjadi sumber inflasi, dihentikan dan diarahkan kepada usaha-usaha yang produktif.
   Sesuai dengan prioritas, tahap kredit diutamakan pada sektor pangan, export prasarana dan industri. Peningkatan export didorong dengan menyederhanakan prosedur export, dengan mengurangi beban-beban dan ongkos-ongkos yang tidak perlu yang memberatkan exportir, serta penyesuaian kurs valuta asing dengan rupiah.

3. memperluas keterlibatan masyarakat didalam kegiatan ekonomi, karena tidak mungkin bahkan tidak perlu pemerintah menangani sendiri seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam jenis; Pemerintah lebih menitikberatkan kepada mengarahkan suasana yang memungkinkan mobilisasi dan kreativitas masyarakat dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi dan kekuatan pasar. Rakyat diberi kesempatan untuk menarik dan menabung uangnya di bank, untuk mencegah agar tidak digunakan usaha spekulasi. Peningkatan produksi dan perkembangan industri

masyarakat diwujudkan dalam pelbagai fasilitas penanaman modal dalam dan luar negeri. [110]

Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang perekonomian ini adalah sistim ekonomi dari ekonomi-komando ke ekonomi-pasar. [111] Kebijaksanaan ini terlihat pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1966 dan Juli 1967. Penggunaan mekanisme pasar nampak pada kebijaksanaan mengenai perdagangan internasional dengan peraturan Bukti Export serta ketentuan tentang diharuskannya penggunaan *cost-accounting* dan dihapuskannya subsidi kepada perusahaan besar negara. Di bidang produksi, kebijaksanaan dilakukan dengan memberikan perangsang untuk menaikkan produksi, dengan BE dan Alokasi Devisa Otomatis (ADO) untuk menaikkan produksi export. Untuk mempertinggi produksi padi diselenggarakan Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) dan penyediaan bibit unggul, insektisida, pestisida, perbaikan prasarana irigasi. Produksi padi pada tahun 1967 menunjukkan kenaikan sebesar 3% dan pada tahun 1968 naik menjadi 5%, artinya dari 9,3 juta ton pada tahun 1967 menjadi 10,16 juta ton pada tahun 1968. Produksi barang-barang lainnya terutama produksi textil pada tahun 1967 sejumlah 225 juta meter menjadi 325 juta meter pada tahun 1968.

Pada perdagangan internasional sesudah disempurnakannya sistim BE, yang maksudnya untuk menghilangkan kontrol terhadap valuta asing dan menjuruskannya kearah sistim kurs valuta tunggal, exportir mendapat dorongan yang lebih keras untuk berproduksi. Juga dengan adanya ADO diberikan kesempatan kepada daerah pengexport untuk mempergunakan 10% dari devisa untuk kepentingan daerah. Peraturan mengenai BE yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1966 disempurnakan dengan peraturan 28 Juli 1967 dengan memberikan prosentase lebih besar kepada exportir.

Karena hutang-hutang peninggalan Orde Lama sangat besar yang meliputi sebesar $ 2,4 milyard, *rescheduling* dilakukan oleh Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan. Pada tahun 1966 diadakan perundingan di Tokyo dengan negara-negara

---

110 *Pidato Pertanggungan Jawab Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, tanggal 12 Maret 1973, Jakarta, 1973, hal. 71–73.

111 J. Soedradjat Djiwandono, *op.cit.*, hal. 9.

kreditor dan dicari kredit dan bantuan baru untuk pembangunan. Dari Tokyo dilanjutkan di Paris, Amsterdam dan Scheveningen. Pembayaran hutang kita termasuk negara-negara sosialis dapat di tunda pembayarannya. Bantuan kredit baru yang didapat adalah untuk tahun 1967 sebesar $ 210 juta, untuk tahun 1968 sebesar $325 juta, untuk 1969 $ 500 juta, untuk 1970 $600 juta, untuk 1971 $640 juta, untuk 1972 $670 juta. Disamping itu Pemerintah juga menjadi anggota badan-badan ekonomi internasional seperti International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank, International Monetary Fund (IMF), International Development Agency (IDA) dan Asian Development Bank (ADB). Dari lembaga-lembaga internasional ini Indonesia mendapat bantuan kredit, tenaga ahli dan rekomendasi untuk menghadapi negara kreditor. [112]

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN POLITIK

2. *Struktur pemerintahan*

Bila ditinjau sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945, maka dapat dilihat bahwa dalam waktu relatif singkat Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan konstitusi.
Masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) yang rancangannya telah disetujui pada tanggal 16 Juli 1945 oleh Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, dan formilnya berlaku sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang racangannya disusun oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg = Pertemuan untuk Musyawarah Federal), yang piagamnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1949 dan mulai berlaku pada waktu Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949.
3. Konstitusi tahun 1950 atau biasa disebut Undang-

112 J. Soedradjat Djiwandono, *op.cit.*, hal. 15–18.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

undang Dasar Sementara (UUDS), yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959.

4. Konstitusi 1945, yang berlaku kembali sejak adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan konstitusi Republik Indonesia kembali ke UUD 45. [113]

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka disebutkan adanya perlengkapan negara yang terdiri dari: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), serta Mahkamah Agung (MA)[114] Dalam pidatonya dihadapan Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu Ir. Sukarno antara lain mengatakan: ". . . . . tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa undang-undang dasar yang (kita) buat sekarang ini adalah Undang-undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini, adalah undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana yang lebih tenteram kita akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. [115] Menurut kenyataannya "suasana yang lebih tentram" itu baru tiba 4½ tahun kemudian setelah bangsa Indonesia keluar dari Perang Kemerdekaan yang menuntut segenap perhatian dan daya-upayanya. Tambahan pula, pada akhir Perang Kemerdekaan itu telah dilakukan kompromi besar, sehingga konstitusi yang disusun dalam suasana damai itu bukanlah suatu penyempurnaan terhadap undang-undang Dasar "kilat" dengan tidak mengubah inti azas-azas pokoknya melainkan merupakan suatu konstitusi lain samasekali yang merupakan dasar daripada suatu negara yang juga lain daripada Republik Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kompromi Konferensi Meja Bundar (KMB), maka

---

113 Departemen Penerangan *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, 1965, hal. 191.

114 JCT Simorangkir dan Drs. M.Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Dasar 1945*, hal. 26–27.

115 Prof.Mr.H.M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar, I*, Jakarta, 1962, hal. 410.

konstitusi RIS dianggap mulai berlaku pula. Konstitusi itu yang rancangannya disusun bersama-sama oleh utusan-utusan Republik Indonesia yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta, dengan utusan-utusan BFO yang diketuai oleh Sultan Hamid II, dalam serangkaian rapat di Scheveningen dan Den Haag semenjak bulan Agustus sampai bulan Oktober 1949, sudah jelas merupakan kompromi pula. Pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatanganilah piagam persetujuan mengenai Konstitusi Republik Indonesia Serikat oleh kedua belah pihak di Scheveningen. [116]

Oleh karena sejak semula rakyat Indonesia menginginkan adanya suatu negara kesatuan, maka RIS sebagai hasil kompromi KMB atas desakan rakyat dan parlemen dalam waktu kurang daripada satu tahun telah membubarkan diri setelah negara-negara bagiannya menyatukan diri dengan Republik Indonesia Yogkayarta. Pembubaran itu dilaksanakan secara konstitusionil, yaitu dengan mengadakan perubahan konstitusi RIS, sesuatu yang diperbolehkan oleh pasal 190. Perubahan itu dilaksanakan dengan ditandatanganinya piagam persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Berdasarkan piagam persetujuan ini dibentuk suatu panitia bersama yang terutama bertugas merancang UUD Sementara Negara Kesatuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam piagam tersebut, antara lain bahwa UUD Negara Kesatuan akan diperdapat dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga essential UUD, antara lain pasal-pasal 27, 29 dan 33 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk didalamnya. Hasil pekerjaan panitia bersama disampaikan kepada Pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 30 Juni 1950. Dengan beberapa perubahan, rencana konstitusi negara kesatuan RI tersebut dioper oleh pemerintah RIS dan pemerintah RI yang kemudian setelah diterima dengan tidak menggunakan amandemennya oleh Badan Pekerja KNIP dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RIS, dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1950 ditetapkan bahwa Konstitusi RIS dirubah menjadi UUD Sementara Republik Indonesia.

Dari prosedur itu dapat disimpulkan, bahwa sesungguhnya UUD Sementara dalam bentuknya pada dasarnya adalah konsti-

---

116 Prof.Mr.H.Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 1960, hal. 34–36.

tusi RIS yang mengalami beberapa perubahan mengenai pasal-pasal yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, bahkan sifat-sifat kompromistis masih melekat pada Undang-undang Dasar Sementara.

Dalam kenyataan kemudian sesudah berdirinya kembali Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan mulai berlakunya UUD Sementara pada saat yang sama, sampai berdirinya Konstituante, Majelis Perubahan UUD tidak pernah bersidang. Bahkan Konstituante, hasil pemilihan umum tahun 1955 yang akan merobah UUD, juga tidak berhasil karena makin kuatnya pertentangan-pertentangan antara partai-partai yang duduk dalam badan tersebut.

Ketika Konstituante sedang berusaha untuk menyelesaikan tugasnya, Presiden Sukarno atas nama Pemerintah pada tanggal 22 April 1959 berpidato pada sidang Konstituante menganjurkan supaya dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin, Konstituante menetapkan saja UUD '45, yang sudah tidak berlaku lagi, menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tetap. [117]

Sebelum Konstituante menentukan sikapnya apakah akan menerima atau menolak usul pemerintah tersebut, golongan Islam memberikan usul amendemen untuk menambah kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam pembukaan UUD '45. Usul ini ditolak dalam sidang tanggal 29 Mei 1950. Tiga kali diadakan pemungutan suara untuk menentukan sikap atas usul-usul pemerintah dan ketiga-tiganya gagal karena tidak memenuhi persyaratan 2/3 jumlah suara yang hadir seperti yang disyaratkan oleh UUD Sementara. Sementara itu PNI dan PKI menyokong usul pemerintah tersebut.

Ketiga konstitusi ini bila diperbandingkan bentuk dan isinya terutama sekali UUD 1945 dengan UUD RIS dan UUD 1950 (Sementara) nampak bahwa UUD 45 sangat singkat dan sederhana. UUD 45 yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal hanya memuat aturan-aturan pokok yang merupakan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan alat-alat negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi betapapun singkatnya, ke-37 pasal tersebut telah

---

117 Presiden Sukarno, *Res Publica Sekali lagi Res Publica*, Jakarta, 1959.

mencerminkan perwujudan dasar filsafat negara, yakni Pancasila. Konstitusi RIS terdiri dari 6 bab, 21 bagian dan 197 pasal. Sedangkan UUDS terdiri dari 6 bab, 18 bagian dan 146 pasal yang memuat aturan aturan yang cukup panjang-lebar keterangannya. Ketiga konstitusi tersebut mempunyai pula penjelasan-penjelasan secara umum dari keseluruhan isinya.

Tiga konstitusi tersebut disamping mengandung persamaan juga mengandung beberapa perbedaan. Perbedaan dan persamaan dari ketiga konstitusi tersebut adalah:

1. Kedaulatan negara pada dasarnya di tangan rakyat, hanya ada variasi dalam pelaksanaannya dalam ketiga konstitusi tersebut:
   a. UUD '45: sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
   b. UUD RIS: oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat.
   c. UUD '50: oleh Pemerintah bersama DPR.
2. Daerah negara, bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara adalah sama untuk ketiga konstitusi. Masing-masing adalah: daerah negara Indonesia seluruhnya, bahasa Indonesia, Sang Saka Merah Putih, Indonesia Raya dan lambang Bhinneka Tunggal Ika.
3. Alat-alat perlengkapan negara pada ketiga konstitusi, mempunyai beberapa perbedaan;
   a. Konstitusi '45, terdiri dari: MPR, Presiden, DPR, Kementrian Negara, DPA, Mahkamah Agung
   b. Konstitusi RIS, terdiri dari: Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia. Dewan Pengawas Keuangan.
   c. Konstitusi '50 terdiri dari: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung. Dewan Pengawas Keuangan.

Mengenai status anggota MPR sesuai dengan ketentuan UUD '45 hanya disebutkan adanya wakil-wakil daerah dalam MPR dan merupakan anggota MPR yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. MPR sesuai dengan ketentuan UUD '45 berfungsi sebagai lembaga legislatif tidak pernah terbentuk untuk mensyahkan

---

118 Prof.Mr.Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta. 1960, hal. 34.

UUD 1945, sehingga pada tahun 1959, dibentuk MPR (Sementara) dimaksudkan sampai terselenggaranya pemilihan umum.

Konstituante hasil pemilihan umum 1955 gagal dalam tugasnya, karena tidak pernah mencapai kesepakatan suara. Karena tidak dapat menghasilkan suatu keputusan, lembaga ini dibubarkan Presiden.[118] Sesuai dengan ketentuan UUD '45, anggota MPR merupakan gabungan anggota-anggota DPR ditambah wakil-wakil daerah dan golongan yang ditetapkan oleh undang-undang serta bertugas membuat undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Pada ketentuan konstitusi RIS dan UUD '50 tugas ini dilaksanakan oleh badan konstituante. Berbeda dengan konstitusi RIS, yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota-anggota DPR dan Senat (wakil-wakil daerah), maka anggota-anggota Konstituante berdasarkan UUD '50 dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sementara itu sesuai dengan hasil keputusan Konstituante RIS, apabila suatu negara bagian merasa dirugikan, berhak untuk menolaknya. Ketentuan ini termaktub dalam pasal 189.[119] Tentang alat-alat pemerintah lainnya sesuai dengan UUD '45 disebutkan bahwa pemerintahan negara dilaksanakan oleh Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh Kementerian Negara. Dalam konstitusi ini jelas bahwa pemerintahan bersifat presidensiil dimana presiden menjadi kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

Presiden berhak membuat undang-undang dengan persetujuan DPR. Di samping mempunyai kekuasaan membuat peraturan pemerintah, Presiden memegang beberapa kekuasaan lainnya seperti: pimpinan tertinggi Angkatan Perang, memberikan grasi, amnesti, abolisi, serta beberapa kedudukan lainnya dalam fungsinya sebagai Kepala Negara. Sebagai Kepala Negara, Presiden tidak berhak membubarkan DPR. Dalam UUD '50 dimana pemerintahan bersifat parlementer, maka kabinet bertanggungjawab kepada parlemen, bukan kepada Presiden. Presiden tidak aktif dalam pemerintahan sehari-hari. Ia mempunyai hak untuk membubarkan DPR, bila ternyata lembaga tersebut sudah tidak dipercayai rakyat lagi. Kebaikan kabinet yang bersifat presidensiil yalah bahwa dalam melaksanakan program kerjanya dapat bekerja lebih mantap dan dapat bertahan lebih

---

119 Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, 1965, hal. 189.

lama dibandingkan dengan sistim parlementer, dimana pengalaman yang lalu membuktikan kabinet terlalu sering berganti, karena parlemen terlalu cepat memberikan vonis berupa "mosi tidak percaya". tidak jarang pada waktu kabinet sedang melaksanakan suatu program yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seringnya terjadi penggantian kabinet tentu menganggu stabilitas nasional. Mengenai DPR, anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dari hasil pemilihan umum. UUD '45 menetapkan tugas DPR sebagai lembaga legislatif melaksanakan kedaulatan rakyat serta tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Hal ini tercermin dalam pasal 23 UUD '45, konstitusi RIS pasal 120 dan 121. Dalam UUD '50, pasal 69 dan 70 dijelaskan bahwa DPR mempunyai hak mengontrol pemerintah.

Tentang kementerian negara dalam kabinet parlementer nasibnya ditentukan oleh parlemen, sedang dalam alam pemerintahan yang menganut sistim presidensiil, presiden yang mengangkat dan memberhentikan para menteri. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sesuai dengan ketentuan UUD '45 bertugas memberi nasehat kepada pemerintah baik diminta atau tidak. Jumlah anggotanya terbatas dan diangkat oleh Presiden. Dalam konstitusi RIS, senatlah yang berfungsi sebagai penasehat pemerintah.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketiga konstitusi, bertugas menjamin terlaksananya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dewan Pengawas Keuangan (DPK) sesuai dengan ketentuan UUD '45 bertugas mengawasi penggunaan pendapatan negara. Hasil laporannya harus disampaikan kepada DPR. Sebelum MPR dan DPR terbentuk pada masa awal Kemerdekaan, Komite Nasional (suatu badan yang tadinya bertugas membantu Presiden), diserahi tugas legislatif. Badan tersebut bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang hari pertama tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan tiga hal penting, yaitu:

1. mengesahkan Undang-undang Dasar Negara;
2. memilih Presiden dan Wakil Presiden, dimana telah terpilih masing-masing Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta;

3. Terbentuknya Komite Nasional yang merupakan pembantu utama Presiden.

Dalam sidang PPKI hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 telah ditetapkan dibentuknya 12 departemen dan sekaligus ditunjuk para menterinya. Kabinet Presidensiil yang diresmikan pada tanggal 2 September 1945 tidak berlangsung lama. Dengan keluarnya maklumat Presiden No. X bulan November 1945 maka terjadilah perubahan yang fundamentil. Kehidupan politik dengan sistim banyak partai diizinkan. Komite Nasional mengadakan rapat lengkap dan mengusulkan supaya dibentuk suatu kabinet ministeriil. Sebagai perdana menterinya dipilih Sutan Sjahrir. Salah satu departemen yang terdapat pada kabinet pertama adalah Departemen Dalam Negeri. Departemen ini sebenarnya yang menjadi pusat pengaturan administrasi pemerintahan. Seluruh wilayah Indonesia pada mulanya dibagi atas delapan provinsi. Daerah provinsi membawahi beberapa keresidenan. Daerah keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa daerah kabupaten dan kotapraja. Di pusat pemerintahan terdapat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedang di setiap ibukota provinsi didirikan Komite Nasional Daerah (KND). Pada mulanya KND bertugas sebagai pembantu kepala pemerintahan provinsi. yaitu gubernur. Dengan adanya perubahan fungsi KNI menjadi badan legislatif, maka fungsi KND berubah pula menjadi badan legislatif yang dipimpin oleh kepala daerah. Badan ini juga berfungsi sebagai badan exekutif dengan jumlah anggotanya yang terbatas, sebanyak lima orang. Selama periode Perang Kemerdekaan banyak peraturan-peraturan pusat mengenai administrasi pemerintahan daerah tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembentukan provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur tidak dapat dilaksanakan, karena daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda. Sistim pemerintahan disentralisasi yang digariskan dari pusat di beberapa tempat tidak bisa dilaksanakan. Hal tersebut terjadi di Sumatra. Provinsi Sumatra yang semula bersifat administratif dalam perkembangan setelah menjadi daerah otonom, karena luas daerahnya dan sulitnya perhubungan, terpaksa setiap daerah sub-provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur muda.[120] Masalah yang timbul dalam pengaturan pemerintahan karena masih adanya beberapa kota di Indonesia

120 The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, hal. 54.

pada masa itu berstatus otonom. Pembagian wewenang antara pusat dan daerah pada mulanya juga kurang tegas. Banyak hal-hal yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pusat dibebankan kepada daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, dikeluarkan Undang-undang pokok tentang Pemerintahan Daerah dalam bulan Juli 1948. Terjadinya pemberontakan PKI di Madiun dan Aksi Militer Belanda II menyebabkan undang-undang tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan adanya dua macam kekuasaan, yaitu otonomi dan *medebewind*. Undang-undang tersebut memberikan ketentuan tentang cara pengaturan wewenang pusat dan daerah. Ditentukan pula masa pemerintahan Daerah yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Ketua DPR dipilih oleh dan di antara anggota DPRD. Dengan cara ini maka terdapat pemisahan yang tegas, di mana Kepala Daerah tidak lagi merangkap dua jabatan.

Pembentukan pemerintahan militer di Jawa dan Sumatra ditetapkan dalam Sidang Kabinet pada tanggal 18 Desember 1948. Setelah Pengakuan Kedaulatan terjadi perubahan status daerah, seperti misalnya daerah Aceh sejak tahun 1950 dijadikan daerah istimewa.

Pemberotakan-pemberontakan pada tahun 1957, mengakibatkan terjadinya beberapa perobahan berikutnya. Pada waktu ini terdapat 25 provinsi yang lebih dikenal dengan nama Daerah Tingkat Satu. Dalam sistim pemerintahan itu Indonesia pernah pula mengenal apa yang disebut dengan nama Panca Tunggal yang dibentuk untuk menggalang persatuan rakyat dalam masa perjuangan menghadapi pihak luar (Trikora dan Dwikora).

I. Ikhtisar yang menggambarkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, sampai tahun 1965 adalah sebagai berikut:

Pulau	Daerah Tingkat I Provinsi	Daerah Tingkat II Kabupaten	Kotamadya
J a w a	1. Jawa Barat	19	4
	2. Jawa Tengah	29	6
	3. Jawa Timur	29	8
	4 Daerah Istimewa Yogyakarta	4	1
	5 Kotaraya Jakarta	—	—

Pulau		Daerah Tingkat I Provinsi	Daerah Tingkat II Kabupaten	Kotamadya
Sumatra	6	Aceh (Daerah Istimewa)	7	2
	7.	Jambi	5	1
	8.	Lampung	3	1
	9.	Riau	5	1
	10.	Sumatra Barat	8	6
	11.	Sumatra Selatan	11	3
	12.	Sumatra Utara	11	6
Kalimantan	13.	Kalimantan Barat	6	1
	14.	Kalimantan Selatan	9	1
	15.	Kalimantan Tengah	5	1
	16.	Kalimantan Timur	4	--
Nusa Tenggara	17.	Bali	8	—
	18.	Nusa Tenggara	--	
	19.	Nusa Tenggara Timur	12	—
Sulawesi	20.	Sulawesi Selatan	21	2
	21.	Sulawesi Tengah	4	—
	22.	Sulawesi Tenggara	4	2
	23.	Sulawesi Utara	4	2
	24.	Maluku	3	1

Setelah wilayah Irian Jaya berada didalam lingkungan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan wakil Perdana Menteri I/Koordinator Urusan Irian Barat, tanggal 10 Agustus 1965 No. 96/PM/tahun 1965., susunan pemerintahannya adalah sbb.:

Kabupaten Administrasi.	Wilayah Kepala Pemerintahan Setempat.
1. Sukarnapura	1. Sukarnapura.
	2. Nimbora.
	3. Keerom.
	4. Sarmi.
2. Teluk Cenderawasih	5. Memberamo.
	6. Biak – Numfor.
	7. Japen.
	8. Waropen.
3. Irian Jaya bagian Barat	9. Manokwari.
	10. Ransiki.
	11. Wasior.
	12. Sorong.

Perpustakaan
Direktorat Pembinaan dan
Pendidikan Pendidikan
Sejarah dan Nilai Tradisional

Kabupaten Administrasi	Wilayah Kepala Pemerintah Setempat
	13. Raja Empat.
	14. Teminabuan.
	15. Ajamaru.
	16. Bintuni.
4. Fak-fak	17. Fak-fak.
	18. Kaimana.
	19. Mimika.
5. Irian Jaya bagian Selatan	20. Merauke.
	21. M u j u .
	22. Digul Atas.
	23. Mappin.
	24. Asmat.
	25. Lembah Baliem.
6. Pegunungan Jayawijaya.	26. Oksibili.
	27. Bokondoni.
	28. T i e m
7. Paniai.	29. Paniai.
	30. Nabire.
	31. T i g i.
	32. Ilaga.

2. Kehidupan politik.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mengambil keputusan untuk mengadakan persiapan guna mendirikan satu partai tunggal bernama Partai Nasional Indonesia. Akan tetapi usaha mendirikan partai ini kemudian dibatalkan, karena kelompok sosialis takut bahwa partai negara itu akan dikuasai oleh golongan Tan Malaka. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP–KNIP) yang dikuasai kaum sosialis pada tanggal 3 November 1945, Pemerintah mengeluarkan suatu Maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Dengan mengeluarkan Maklumat ini, Pemerintah ingin menimbulkan kesan bahwa di samping bermaksud mendirikan partai-partai politik sebagai suatu unsur dari kehidupan bermasyarakat, Pemerintah juga bermaksud meyakinkan Serikat bahwa negara Republik Indonesia yang baru dibentuk ini adalah suatu negara dengan sistim demokrasi, bukan suatu negara boneka ciptaan Jepang.

Maklumat Pemerintah No. X/1945 yang ditandatangani

Wakil Presiden Mohammad Hatta antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, dengan adanya partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah disusun sebelum melangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari. [121]

Sejak diumumkan Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945, maka berdirilah partai-partai seperti cendawan di musim hujan. Pada tanggal 7 November 1945 muncul Partai Komunis Indonesia (PKI) dibawah pimpinan Mr. Mohammad Jusuf yang kemudian diganti oleh Sardjono. Pada bulan November 1945 ini berturut-turut berdiri partai-partai politik sebagai berikut: Partai Islam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) di bawah pimpinan dr. Sukiman Wirjosandjojo. Pada tanggal 7 November Partai Buruh Indonesia (PBI) dengan Njono sebagai Ketua Umum; Partai Rakyat Jelata (Partai Keristen Indonesia) diketuai oleh Probowinoto; Partai Sosialis Indonesia dibawah pimpinan Amir Syarifuddin didirikan pada tanggal 10 November dan kemudian Partai Rakyat Sosialis di bawah pimpinan Sutan Sjahrir pada tanggal 20 November.

Pada bulan November itu juga di Jakarta oleh beberapa orang dibentuk suatu partai politik dengan nama Serikat Rakyat Indonesia (Serindo). Partai baru ini ketika itu dipimpin oleh S. Mangunsarkoro sebagai ketua dan Osa Maliki sebagai sekretaris. Setelah diadakan perundingan dengan beberapa partai politik yang sama asas dan tujuannya, diantaranya: PNI Pati, Madiun, Palembang dan Sulawesi, Partai Republik Indonesia Madiun dll. dalam kongres Serindo pertama di Kediri (tanggal 29 Januari – 1 Februari 1946) partai-partai tersebut difusikan. Sejak tanggal tersebut berdirilah partai politik baru yaitu Partai Nasional Indonesia, yang oleh para pelopor-pelopornya dipandang sebagai kelahiran PNI kembali. [122] Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) dibentuk tanggal 8 Desember 1945 dan diketuai oleh Kasimo. Partai sosialis didirikan pada tanggal 17 Desember, sebagai gabungan dari Partai Sosialis Indonesia dibawah pimpinan

---

121 Kementerian Penerangan, *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*, Jakarta 1954, hal. 2.

122 Kementerian Penerangan, *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*, Jakarta 1954, hal. 21.

Amir Sjarifuddin dan Partai Rakyat Sosialis dibawah Sutan Sjahrir.

Partai-partai yang didirikan pada akhir tahun 1945 dan parmulaan tahun 1946 itu kemudian melancarkan perjuangan politik, baik dalam KNIP dan Badan Pekerjanya serta di dalam maupun di luar kedua badan tersebut serta di dalam organisasi perjuangan lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya timbul partai-partai lain pula seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Murba, Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan lain-lain.

Untuk memperkuat diri dalam menghadapi politik pemerintah yang tidak disetujui oleh mereka pada permulaan Perang Kemerdekaan, beberapa partai kemudian mengelompokkan diri antara lain: pada tanggal 15 Januari 1946, selain lebih dahulu pada tanggal 4 – 5 Januari 1946 mengadakan pertemuan di Purwokerto, terbentuklah di Solo *Persatuan Perjuangan* dibawah pimpinan Tan Malaka. Dalam Persatuan Perjuangan itu tergabung berbagai Partai politik dan organisasi-organisasi lain sebanyak 140 buah yang tidak mendukung politik kabinet Sjahrir. Pada tanggal 11 Mei 1946 atas anjuran Pemerintah (kabinet Sjahrir) didirikan *Konsentrasi Nasional* yang meliputi berbagai partai/organisasi yang semula menjadi anggota Persatuan Perjuangan tetapi kemudian meninggalkannya. Dalam hubungan dengan Persetujuan Linggarjati selanjutnya terbentuk pada akhir Desember 1946 dua koalisi, yaitu Benteng Republik yang kontra menyerang persetujuan tersebut dengan antara lain Masjumi, PNI dan golongan Tan Malaka sebagai anggota, berhadapan dengan Sayap Kiri yang pro persetujuan Linggarjati, dengan antara lain Partai Sosialis, PBI dan PKI sebagai anggota.

Setelah terjadi pemisahan PSI dari Partai Sosialis dan juga dari Sayap Kiri, sesudah tercapainya persetujuan Renville, terbentuklah FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang menentang Kabinet Hatta yang baru dibentuk. FDR terdiri dari Partai Sosialis, PBI, PKI dan lain-lain. FDR ini kemudian menjelma menjadi PKI–Musso. Pada masa Perang Kemerdekaan partai-partai berjuang melawan Belanda, kecuali PKI yang pada bulan September 1948 berkhianat dengan melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah yang di mulai di Madiun.

Perbedaan sistim partai pada masa Perang Kemerdekaan

dan pada masa 1950 – 1959, yalah bahwa pada jaman Perang Kemerdekaan lahir banyak badan perjuangan. Badan-badan perjuangan ketika itu tidak memusatkan diri kepada politik dalam arti membawa dan memperjuangkan ideologi yang dianut oleh partai. Partai-partai politik itu pada umumnya juga memusatkan kegiatannya kepada perjuangan melawan Belanda yang ketika itu berusaha menyerbu dan meniadakan Republik. Semenjak tahun 1947 badan-badan perjuangan yang lahir pada masa Perang Kemerdekaan itu sebagian anggotanya masuk kedalam TNI dan sebagian lain memasuki atau mendirikan partai politik. Dengan demikian bertambahlah jumlah partai-partai politik yang bertarung dan berusaha untuk duduk dalam pemerintahan. Akibat dari saling rebutan yang demikian, timbullah instabilitas politik.

Setelah rancangan konstitusi Republik Indonesia kesatuan disahkan oleh Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta dan oleh Senat dan DPR RIS di Jakarta, maka dinyatakan pada tanggal 15 Agustus 1950 bahwa Negara Kesatuan RI berdiri kembali pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam Undang-undang Dasar 1950 ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa kedaulatan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR; dan pemerintahan berbentuk parlementer. [123] Sejak tahun 1950 RI menjalankan sistim demokrasi parlementer. Dalam sistim ini kedaulatan rakyat disalurkan kembali melalui partai politik. Jadi partai-partai politik inilah yang memerintah dengan perbandingan kekuasaan dalam parlemen. Antara tahun 1950 – 1959 didalam DPR partai-partai Masyumi dan PNI adalah partai-partai yang terkuat. Dalam waktu lima tahun (1950 – 1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan. Kampanye-kampanye pemilihan umum yang dilancarkan partai-partai telah memperbesar perpecahan di dalam masyarakat. Masing-masing partai mempropagandakan dirinya sebagai yang terbaik sejarahnya maupun simbol-simbolnya dan memburuk-burukkan partai-partai lainnya, terutama partai lawannya.

Hasil dari pemilihan umum ini (29 September untuk Parlemen, 15 Desember 1955 untuk Konstituante), memperlihatkan gambaran luasnya pengaruh masing-masing partai dan separoh dari para pemilih memberikan suaranya kepada partai-partai Islam. Yang menonjol adalah munculnya NU dan PKI sebagai

123 Prof. Mr. Muh. Yamin *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 1960, hal. 55.

Perincian Suara
P . N . I

No.	Daerah Pemilihan	Suara yang didapat	% dari suara daerah	Keluar sebagai Nomor	% dari suara PNI seluruhnya.	Kursi dapat
1.	Jakarta Raya	152.031	19,6	2	1,8	
1.	Jakarta Raya	152.031	19,6	2	1,8	1
2.	Jawa Barat	1.541.927	22,1	2	18,3	11
3.	Jawa Tengah	3.019.568	33,5	1	36,0	19
4.	Jawa Timur	2.251.069	22,8	3	26,8	14
5.	Sumatra Selatan	213.766	14,6	2	2,5	2
6.	Sumatra Tengah	42.558	2,7	5	0,5	
7.	Sumatra Utara	329.657	15,4	2	3,9	3
8.	Nusa Tenggara Barat	464.398	37,1	1	5,5	3
9.	Nusa Tenggara Timur	65.027	5,8	4	0,8	1
10.	Kalimantan Timur	43.067	25.0	2	0,5	—
11.	Kalimantan Barat	64.195	13,6	3	0,7	
12.	Kalimantan Selatan	46.440	5,9	3	0,6	—
13.	Sulawesi Utara/Tengah	102.855	19,1	6	1,2	1
14.	Sulawesi Selatan/Tenggara	46.334	4,2	3	0,5	1
15.	M a l u k u	30.218	9,1	—	0,4	—
	J u m l a h	8.434.653			100,0	57

Perincian Suara
Masyumi

No.	Daerah Pemilihan	Suara yang didapat	% dari suara	Keluar sebagai	% dari suara Masyumi	Kursi didapat
1.	Jakarta Raya	200.460	26,0	1	2,6	2
2.	Jawa Barat	1.844.442	26,4	1	23,6	3
3.	Jawa Tengah	902.387	10,0	14	11,4	6
4.	Jawa Timur	1.109.742	11,2	4	14,0	7
5.	Sumatra Selatan	628.382	43,2	1	8,0	4
6.	Sumatra Tengah	797.692	50,8	1	10,0	6
7.	Sumatra Utara	789.910	36,9	1	9,9	6
8.	Nusatenggara Barat	264.719	21,2	2	3,3	2
9.	Nusatenggara Timur	157.972	14,1	3	2,0	1
10.	Kalimantan Timur	44.347	25,7	1		
11.	Kalimantan Barat	155.173	33,2	1	2,0	1
13.	Sulawesi Utara/Tengah	189.199	25,0	1	2,4	1
14.	Sulawesi Selatan/Tenggara	446.255	40,0	1	5.6	5
15.	M a l u k u	117.440	35,4	1	1,5	1
	J u m l a h	7.903.886			100.0	57

Perincian Suara
N . U .

No.	Daerah Pemilihan	Suara yang didapat	% dari suara daerah	Keluar sebagai Nomor	% darisuara NU se luruhnya.	Kursi didapat
1.	Jakarta Raya	120.667	15,6	3	1,7	1
2.	Jawa Barat	673.552	9,6	4	9,8	5
3.	Jawa Tengah	1.772.306	19,7	3	25,7	11
4.	Jawa Timur	3.370.554	34,1	1	47,5	20
5.	Sumatra Selatan	115.928	7,9	5	1,5	1
6.	Sumatra Tengah	71.959	4,6	4	1,0	–
7.	Sumatra Utara	87.773	4,2	5	1,0	1
8.	Nusatenggara Barat	104.282	8,3	4	1,5	1
9.	Nusatenggara Timur	17.684	1,6	0	0,2	–
10.	Kalimantan Timur	20.795	12,1	3	0,3	–
11.	Kalimantan Barat	37.495	8,1	4	0,5	–
12.	Kalimantan Selatan	380.874	48,6	1	5,4	3
13.	Sulawesi Utara/Tengah	21.61				
12.	Kalimantan Selatan	380.874	48,6	1	5,4	3
13.	Sulawesi Utara/Tengah	21.619	2,9	6	0,3	–
14.	Sulawesi Selatan/Tenggara	159.193	4.4	2	2,3	2
15.	M a l u k u					–
	J u m l a h	6.955.141			100.0	45

Perincian Suara
P . K . I .

No.	Daerah Pemilihan	Suara yang didapat	% dari suara daerah	Keluar sebagai Nomor	% dari suara PKI seluruhnya.	Kursi di dapat
1.	Jakarta Raya	96.363	12,5	4	1,6	1
2.	Jawa Barat	755.634	10,8	3	12,4	5
3.	Jawa Tengah	2.326.108	25,8	2	38,1	15
4.	Jawa Timur	2.299.602	23,3	2	37,7	14
5.	Sumatra Selatan	176.900	12,1	3	2,9	1
6.	Sumatra Tengah	90.513	5,8	3	1,5	1
7.	Sumatra Utara	258.875	12,1	4	4,2	2
8.	Nusatenggara Barat	66.				
8.	Nusatenggara Barat	66.067	5,3	5	1,8	—
9.	Nusatenggara Timur	5,008	0,5	3	0,1	—
10.	Kalimantan Timur	8.209	4,7	6	0,1	—
11.	Kalimantan Barat	8.526	1,8	7	0,2	—
12.	Kalimantan Selatan	17.210	3,2	5	0,3	—
13.	Sulawesi Utara/Tengah	33,204	4,4	5	0,5	—
14.	Sulawesi Selatan/Tenggara	17.831	1,6	9	0,3	—
15.	M a l u k u	4.792	1,4	8	0,1	—
	J u m l a h	6.176.914			100.0	39

partai-partai besar di samping Masyumi dan PNI. Gambaran dari hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: [124]

Setelah pemilihan umum, dibentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II pada tanggal 24 Maret 1956 berdasarkan perimbangan partai-partai dalam parlemen. Kabinet ini juga tak lama karena mendapat oposisi dari daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan daerah. Oposisi yang didukung oleh para panglima daerah kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan separatis. Dengan alasan pembangunan daerah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah mengadakan perdagangan barter. Tindakan daerah-daerah ini mendapat simpati dari partai Masyumi dan PSI. [125]

Dalam peringatan Sumpah Pemuda 1957 Presiden Sukarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara pada waktu itu disebabkan terdapatnya banyak partai-partai politik sehingga merusak persatuan negara. Karena itu ada baiknya partai-partai dibubarkan. Dengan alasan menyelamatkan negara, Presiden Sukarno mengajukan suatu konsepsi yaitu Demokrasi Terpimpin. Konsepsi ini mendapat tantangan yang hebat; sebagai reaksi terhadapnya gerakan-gerakan separatis semakin menjadi-jadi dengan didirikannya Dewan Banteng di Sumatra Tengah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimatan Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Pada bulan Februari 1957, Presiden Sukarno memanggil semua pejabat sipil dan militer serta semua pimpinan partai ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini Presiden Sukarno untuk pertama kalinya mengajukan konsepsinya yang berisi antara lain:

- Dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai ditambah dengan golongan fungsionil.
- Dibentuknya Dewan Nasional (kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung), yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsionil dalam masyarakat. Dewan ini fungsinya memberi nasehat kepada kabinet baik diminta atau tidak. [126]

---

124 Dr. Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta, 1971, hal. 33 – 36.

125 Daniel Lev, *The Transition Guided Democracy in Indonesia*, Ithaca, New York, 1964, hal. 25.

126 Presiden Sukarno, *Menjelamatkan Indonesia*, Jakarta, 1957, hal. 8–12.

Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak konsepsi ini dan berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada Konstituante. Suhu politik semakin hangat. Presiden kemudian mengumumkan keadaan Darurat Perang (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan di daerah-daerah kemudian meluas menjadi pemberontakan PRRI dan Permesta.

Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Presiden Sukarno berpidato yang isinya menganjurkan "untuk kembali kepada Undang-undang dasar 1945". Anjuran Presiden tersebut diberikan setelah Konstituante selama kurang lebih tiga tahun berdebat tanpa berhasil merumuskan sebuah Undang-undang dasar. Juga mengenai anjuran Presiden tersebut Konstituante tidak berhasil memberikan kata-putus dan dengan demikian kuatlah kesan bahwa partai-partai politik sebagai keseluruhan tidak mampu untuk menembus jalan-buntu dengan cara-cara parlementer.

Menanggapi hal itu baik Presiden, Kabinet, Dewan Nasional maupun beberapa partai besar dan pimpinan TNI sama-sama bersepakat untuk segera melaksanakan "kembali kepada Undang-undang Dasar 1945". Langkah tersebut dipandang sebagai jalan untuk sama-sama mengembalikan persatuan nasional. Demikianlah, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang berisi:

1. pembubaran Konstituante.
2. berlakunya kembali UUD 1945 dan
3. tidak berlakunya lagi UUDS. [127]

Tindakan tersebut disusul dengan pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus, yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato tersebut, kemudian terkenal dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol), yang dalam sidang umum MPRS ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan negara. Dengan demikian diperoleh suatu susunan ketatanegaraan dan garis-garis besar haluan negara yang baru, dimana kekuasaan dan peranan partai-partai politik pada waktu itu menjadi jauh berkurang. Dalam waktu singkat kemudian dibentuk kabinet baru (Kabinet Kerja) dengan Presiden Sukarno selaku perdana menteri dan Ir. Djuanda selaku menteri pertama. Disamping itu

---

127 Lihat lampiran 5.

dibentuk pula sebuah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Alasan Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit tersebut adalah karena keadaan negara yang membahayakan persatuan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia serta timbulnya rintangan-rintangan untuk mengadakan pembangunan. Pada mulanya rakyat menaruh harapan dan kepercayaan kepada tindakan-tindakan tegas Presiden Sukarno itu. Namun kenyataan perkembangan keadaan selanjutnya menunjukkan bahwa Republik Indonesia melepaskan diri dari konstelasi extrim yang satu untuk akhirnya terjatuh kepada konstelasi extrim yang lain.

Adapun jalan pikiran Presiden Sukarno pada waktu itu adalah bahwa tidak ada kemungkinan untuk membangun masyarakat adil-makmur dengan sistim demokrasi liberal. Karenanya sistim itu harus diganti dengan demokrasi terpimpin dan dilengkapi juga dengan sistim ekonomi terpimpin. [128]

Demokrasi Terpimpin yang harus merealisasi kesejahteraan menurut Presiden Sukarno, ternyata semakin jauh dari sasaran; malah oleh Presiden Sukarno telah digunakan untuk memupuk kekuasaan pada satu tangan. Akibat lebih jauh dalam pelaksanaannya, yalah telah menimbulkan penyelewengan di segala bidang, baik penyelewengan dari UUD 1945 maupun penyelewengan dalam bidang politik luar negeri, ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain. Pada kenyataannya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, adalah pengambil-alihan oleh Presiden Sukarno daripada seluruh wewenang pemerintahan kedalam tangannya. Rakyat mulai terbuka matanya dan melihat bahwa demokrasi terpimpin adalah diktatur.

Dalam waktu singkat yaitu lebih kurang satu tahun (Juli 1959–September 1960) perombakan atau *retooling* lembaga-lembaga negara oleh Presiden Sukarno sebagaimana dinyatakan dalam "Manipol" hampir selesai dan hanya tinggal *retooling* terhadap orang-orang tertentu. Pembubaran terhadap partai-partai politik yang telah dicanangkan sejak permulaan tahun 1956 sampai saat itu tetap mendapat penentangan dari partai-partai termasuk PNI dan PKI yang paling dekat dengan Presiden Sukarno. Oleh karenanya rencana itu harus ditangguhkan. Na-

---

128 *Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, hal. 22

mun penekanan terhadap golongan-golongan yang tidak menyetujui politiknya tetap dilancarkan terus. [129]

Sekalipun mundur setapak, secara insidentil Presiden Sukarno telah berhasil membubarkan dua partai, yaitu partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tanggal 17 Agustus 1960 . Alasan membubarkan kedua partai politik tersebut yalah karena mereka terlibat dalam pemberontakan PRRI/ Permesta. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 7/1957, partai yang pernah terlibat di dalam pemberontakan, harus dibubarkan.[130] Patut dicatat bahwa Presiden Sukarno tidak membubarkan PKI, meskipun pernah mencetuskan Pemberontakan Madiun pada tahun 1948.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibentuk atas hasil pemilihan umum tahun 1955 tetap menjalankan tugasnya atas dasar UUD 1945 dan menyetujui perombakan yang dilakukan pemerintah, sampai tersusun DPR baru. Kelihatannya anggota DPR lama itu akan terus mengikuti saja policy Presiden Sukarno; akan tetapi diluar dugaan dan perhitungan, anggota DPR lama itu berani menolak Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang dipaksakan oleh Presiden Sukarno. Jadi dengan demikian DPR yang telah diberi "kemurahan hati" Presiden Sukarno untuk meneruskan tugasnya, akhirnya berani menentang kebijaksanaannya. Penolakan anggaran belanja yang diajukan, oleh DPR (lama) tersebut, menimbulkan "marah" Presiden Sukarno. Oleh karenanya lembaga itu telah tiba waktunya untuk menghadapi nasib *retooling*. Maka keluarlah Penetapan Presiden No. 3/1960, yang isinya menyatakan pembubaran DPR hasil Pemilihan Umum 1955.

Tidak lama kemudian, pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Sukarno telah selesai menyusun komposisi DPR baru yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR), yang disusun di istana Tampaksiring, Bali dengan mengundang para ketua tiga partai besar PNI, NU, dan PKI. Pada waktu itu hadir juga Kolonel Wilujo Puspojudo sebagai utusan Angkatan Darat. Dan para anggota DPRGR yang baru itu dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.

---

129 Mr. S.M. Amin, *Indonesia dibawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta, 1967, hal. 40.

130 *Abadi*, 18 Agustus, 1960

Melihat komposisi DPRGR baru itu, maka perbandingan jumlah wakil dari Partai Nasional, Islam dan Komunis adalah 44, 33, 30. Angka-angka itu berubah jika ditinjau dari suara-suara Nasionalis, Komunis dan Islam. Keseluruhannya sehingga menjadi 44 + 50 (yang berasal dari golongan non partai) = 94 untuk golongan Nasionalis: 30 + 51 (yang berasal dari golongan non partai) = 81 untuk golongan Komunis dan 43 + 24 = 67 yang berasal dari golongan Islam. Demikian perbandingan kursi untuk Nasionalis, Islam, Komunis = 65,115 dan 52. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan angka-angka tersebut bahwa dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat lama dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong golongan Nasionalis dan golongan Komunis memperoleh keuntungan masing-masing: 94 – 65 atau 25 kursi dan 81 – 42 atau 39 kursi. Sedang golongan Islam menderita kerugiaan 115 – 67 atau 48 kursi. [131] Dari sini dapat dilihat bahwa golongan Komunis telah memperoleh keuntungan yang paling besar dari Presiden Sukarno.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong ini, yang dibentuk atas dasar penunjukan dari Presiden Sukarno sifat tugasnya menjadi berubah, yaitu meng-ya-kan, bukan lagi tugas membicarakan, menolak atau menerima suatu hal yang diajukan untuk dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dari situlah sebenarnya letak kelemahan pendukung demokrasi di Indonesia dan dari situ pula asal mula penyimpangan kekuasaan Presiden Sukarno. Hal tersebut selanjutnya berjalan lebih jauh dan berkembang menjadi diktatur yang mendapat dukungan penuh dari PKI dan PNI–Ali Surachman yang telah merasa memperoleh suatu kemenangan politik.

Memang sebelumnya pernah ada reaksi-reaksi dari partai-partai yaitu antara lain dari beberapa pemimpin NU dan dari pihak PNI. Beberapa pemimpin NU pernah menyatakan keberatannya terhadap pembubaran DPR lama hasil pemilihan umum dan mengancam akan menarik pencalonan anggota-anggota untuk DPRGR. Akan tetapi karena adanya penambahan jumlah kursi untuk mereka sikapnya berubah, maka hal itu berarti memberi kesempatan kepada Presiden Sukarno. Bagaimanapun juga sikap NU selanjutnya, suatu hal yang patut dicatat adalah

---

131 Mr S.M. Amin, *op.cit.*, hal. 30

keberanian sikap yang telah ditunjukkan oleh pimpinan NU Rois Aam H.W. Hasbullah. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk dengan PKI dalam satu Kabinet. Dengan perkataan lain NU telah menolak kerja sama dengan PKI dan NU menolak Nasakom. [132]

Dari pihak PNI tidak terlihat adanya suatu reaksi terhadap pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan rakyat tahun 1955 dan reaksi terhadap pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Mr. Sartono, anggota pimpinan PNI/ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 1955 hanya menunjukkan dengan sikap dan kata-kata pada rapat terakhir DPR pada tanggal 17 Maret 1960, bahwa ia termasuk golongan yang merasa tidak puas dengan perkembangan keadaan. [133]

Sekalipun dari pihak partai-partai tidak tegas dinyatakan adanya perasaan tidak puas, namun tidak bisa dikatakan bahwa dalam partai-partai terdapat suatu kesatuan pendapat. Tidak adanya kesatuan pendapat tersebut dapat dibuktikan dengan kenyataan adanya beberapa pemimpin dari berbagai partai yang menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama Liga Demokrasi.

Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosjadi dari NU, di dalamnya tergabung beberapa tokoh dari Masyumi, NU, Parkindo, Partai Katholik, Liga Muslimin, PSII dan IPKI. Pada akhir bulan Maret 1960 Liga tersebut pernah mengeluarkan suatu pernyataan yang melahirkan tuntutan, supaya untuk membentuk DPR yang demokratis, hendaknya dicari cara-cara dan jalan yang baik, demokratis dan konstitusionil. Oleh sebab itu hendaknya rencana Pemerintah untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang telah diumumkan tersebut, ditangguhkan. Adapun sebagai alasan dikemukakan a.l.

a. perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPRGR, memperkuat pengaruh dan kedudukan-daripada suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

---

132 *Abadi*, 30 Agustus, 1960.
133 Mr. S.M. Amin, *op.cit*, hal. 192 - 193

b. DPRGR yang demikian, pada hakekatnya adalah DPRGR yang hanya akan meng-ya-kan saja, sehingga tidak dapat menjadi sokoguru negara hukum dan demokrasi yang sehat.
c. pembaharuan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu, adalah bertentangan dengan azas-azas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Perkembangan keadaan selanjutnya memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut tidak memperoleh perhatian dari Presiden Sukarno. Tidak adanya perhatian tersebut nampaknya oleh karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan dasar-dasar "demokrasi terpimpin" yang telah dianut dan dijadikan dasar pokok sistim pemerintahan negara. Presiden Sukarno tidak mau mencabut konsepsi yang telah diumumkannya dan segala gagasannya pada waktu itu berhasil dilaksanakan.

Kegiatan Liga Demokrasi akhirnya terhenti pada saat Presiden Sukarno pulang kembali ke tanah air dari perjalanannya ke luar negeri. Kegiatan Liga tersebut hanya nampak sewaktu Presiden Sukarno berada diluar negeri. Dalam hal ini Perdana Menteri Djuanda, selaku pejabat Persiden selama Presiden berada di luar negeri, bersikap lebih toleran.

Presiden Sukarno setibanya di tanah air segera memerintahkan untuk menindak dengan tegas Liga Demokrasi tersebut, sebagaimana telah diucapkan di Tokyo. Perlu pula disebutkan tentang adanya reaksi terhadap langkah-langkah Presiden Sukarno yang datangnya dari perseorangan terutama mengenai masalah pembubaran DPR, hasil pemilihan umum tahun 1955 dan juga reaksi terhadap pembentukan DPRGR. Reaksi itu antara lain datangnya dari dua orang teman lama Presiden Sukarno, yakni Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo dan dari Mr. Sartono yang selain menjabat sebagai pimpinan PNI juga menjabat sebagai ketua DPR hasil pemilihan umum tahun 1955; reaksi juga datang dari Prawoto Mangkusasmito, tokoh Masyumi, dan Sutomo (Bung Tomo) tokoh Partai Rakyat Indonesia.

Dalam statemen yang ditujukan kepada partainya, Mr. Iskaq menyatakan bahwa mereka yang duduk dalam DPRGR bukanlah sebagai wakil dari PNI; hubungan antara mereka dengan PNI tidak ada lagi, sebab mereka duduk dalam DPRGR itu atas hasil penunjukan. Demikian juga Mr. Sartono berpendapat dan menolak penetapan mereka dalam DPRGR.

Sedang Sutomo mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 22 Juni 1960. Pengaduan yang ditujukan kepada kabinet Sukarno berbunyi antara lain sebagai berikut: "Mengadukan Kabinet yang dipimpin oleh Dr. Ir. Sukarno atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kabinet tersebut atas Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dengan tindakan-tindakan kabinet tersebut membubarkan Parlemen Republik Indonesia hasil pilihan rakyat....." Selanjutnya Sutomo menuduh Kabinet bertindak sewenang-wenang dan mengemukakan beberapa fakta sbb:

a. Paksaan untuk menerima Manipol dan Usdek, tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.
b. Paksaan supaya diadakan kerjasama antara golongan Nasionalis-Agama-Komunis.
c. Paksaan pembongkaran tugu Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur Jakarta.

Prawoto Mangkusasmito memajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta supaya Pengadilan tersebut membatalkan, setidak-tidaknya menyatakan batal karena hukum, keputusan Presiden No. 200/1960 yaitu membubarkan Masyumi.

Presiden Sukarno sebetulnya telah meninggalkan partai-partai politik dengan pernyataannya menjelang pembentukan kabinet baru yakni Kabinet Kerja, bahwa dalam mengadakan pengangkatan menteri-menteri baru tidak akan mengadakan hearing dengan partai-partai.[134] Kabinet Gotong-Royong yang dimaksud itu adalah gotong royong atau kerjasama antar golongan Nasionalis-Islam dan Komunis.[135] Beliau dalam hal ini mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah, terutama karena hal itu ditolak oleh NU. Sebagaimana disebutkan dimuka, NU dengan tegas telah menyatakan tidak dapat bekerja-sama dengan PKI; oleh karena itulah Presiden Sukarno mengambil langkah untuk tidak melakukan hearing dulu dengan partai-partai politik dalam mempersiapkan pengangkatan Menteri–Menteri baru. Dalam keadaan demikianlah PKI-lah yang dapat mengambil suatu keuntungan, karena yang paling dekat dengan Presiden Sukarno.

134 *Pedoman*, 8 Juli 1959.
135 *Abadi*, 18 Agustus 1960

Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPRS dan Ketua DPRGR diangkat menjadi menteri, dan tidak berapa lama kemudian para Panglima Angkatan diangkat pula menjadi Menteri, Menteri/ Panglima AD, AL, AU dan AK. Para Menteri Kabinet Kerja dinyatakan semata-semata sebagai pembantu Presiden, tidak ada pertanggunganjawab politik seorang Menteri.

Demikianlah pengangkatan sebagai menteri terhadap Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, para ketua MPRS dan DPR-GR merupakan perkembangan baru dalam tatanegara kita. Prinsip Trias Politika samasekali ditinggalkan dengan adanya pengangkatan seseorang untuk memegang dua status, seperti diangkat pada lembaga legislatif atau judikatif dengan status exekutif. Dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh oleh Presiden Sukarno dengan sistim demokrasi terpimpin telah banyak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Kenyataan selanjutnya, sistim demokrasi terpimpin ternyata tidak dipergunakan untuk secepat-cepatnya memperbaiki taraf penghidupan rakyat melainkan kemudian disalahgunakan untuk penyelewengan-penyelewengan politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Penyelewengan politik lainnya adalah bahwa Presiden Sukarno telah banyak memberikan kesempatan pada PKI, untuk mengembangkan dirinya, yang sebenarnya partai-partai yang lain telah menaruh keberatan. Dalam hal ini Presiden Sukarno tidak bersedia untuk diyakinkan akan bahaya komunisme, bahkan sebaliknya, beliaulah yang selalu memaksakan kerja sama dengan Komunis dengan segala akibat yang akan dirasakan kemudian.

D. PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI SOSIAL

1. Pendidikan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah RI segera menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Jabatan itu dipegangnya sampai tanggal 14 Nopember 1945, jadi selama kira-kira 3 bulan. Kemudian ia diganti oleh Mr. T.G.S.G. Mulia sebagai Menteri PPK dari tanggal 14 Nopember 1945 hingga 12 Maret 1946, lamanya kira-kira 5 bulan. Ia kemudian diganti oleh Mohammad Sjafei dari tanggal 12 Maret sampai 2 Oktober 1946. Pengganti Menteri Sjafei ialah Mr. Suwandi. Pada masa Mr.

Suwandi menjabat Menteri PPK telah dibentuk Panitya Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia di Yogyakarta, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara, merangkap sebagai anggota. Panitya ini dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pekerja KNIP tanggal 27 Desember 1945 atas pertimbangan Pemerintah, bahwa untuk pembentukan negara dan masyarakat baru, perlu diadakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Dengan adanya panitya ini Pemerintah berharap akan adanya kebulatan faham dengan masyarakat. [136]

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. 60/Bhg Umum, Menteri PPK terhitung mulai tanggal 12 Mei 1946 telah mengesahkan anggota Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang terdiri dari 52 orang anggota. [137] Anggota Panitya tersebut diambil dari semua lapisan dan aliran yang ada dan mencakup semua lapangan dan tingkatan. Panitya ini bertugas meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari usia 3 tahun hingga dewasa, atau dari tingkatan Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi dengan segala macam coraknya.

Soal-soal agama, budi pekerti, budaya, angkatan perang dan soal pendidikan orang dewasa menjadi pembicaraan penting dalam rapat-rapat tersebut. Sebagai pedoman kerja Panitya Menteri Suwandi telah mengambil beberapa keputusan sbb.:

a. Panitya bertugas merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah *(schooltype)*.
b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat.
c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fakultas, dengan disertai daftar-daftar dan keterangan-keterangan yang langsung. [138]

Mengenai masalah konsentrasi rencana pelajaran, perlengkapan sekolah, organisasi dan administrasi, serta pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran, termasuk juga menjadi perhatian Panitya tsb. Mengenai pokok-pokok usaha pengajaran, Panitya mengajukan saran-saran tentang tujuan pendidikan guna penyusunan masyarakat baru, yang memerlukan adanya perubahan

---

136 Prof. Sugarda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta, 1970, hal. 35.

137 *Berita Republik Indonesia*, Th. II, No. 15 – 16, 1 Juli 1946, hal. 145.

138 *Ibid*

pedoman pendidikan serta pengajaran. Menurut pendapat Panitya, paham perseorangan yang hingga saat itu masih berlaku, sebaiknya diganti dengan paham susila dan rasa perikemanusiaan yang tinggi.

Tentang tujuan pendidikan dan pengajaran diarahkan kepada usaha membimbing murid-murid, agar menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggungjawab. Selanjutnya untuk memperkuat potensi rakyat hendaklah diadakan semacam sekolah untuk semua lapisan masyarakat. Mengenai dasar pendidikan sesuai dengan dasar keadilan sosial, maka semua sekolah harus terbuka untuk setiap warga negara. Mengenai metodik yang berlaku di sekolah-sekolah supaya didasarkan pada sistim sekolah-kerja, agar aktivitas yang ditujukan pada pekerjaan dapat berkembang seluas-luasnya. Mengenai corak perguruan disarankan, agar selain dari perguruan biasa, sebaiknya diadakan perguruan untuk orang dewasa, yang dapat memberikan pelajaran pemberantasan butahuruf. Disamping itu juga disarankan agar diadakan perguruan pemimpin masyarakat untuk tiap-tiap lapangan usaha yang penting.

Khusus mengenai pelajaran diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan seksama. Mengenai pengajaran tinggi disarankan supaya diadakan seluas-luasnya. Tenaga pengajarnya bila perlu menggunakan tenaga bangsa asing sebagai gurubesar. Selain itu disarankan agar diusahakan berlakunya pengiriman pelajar-pelajar keluar negeri.

Tentang kewajiban bersekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun. Bidang-bidang pengajaran kejuruan, seperti pertanian, industri, pelayaran dan perikanan diharapkan mendapat perhatian istimewa, sedang pengajaran, kesehatan dan olahraga hendaknya teratur dengan baik, sehingga akan dapat dihasilkan kecerdasan rakyat yang harmonis.

Tentang masalah pembiayaan, Panitya menyarankan agar untuk sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah, sedang untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi agar diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga soal keuangan tidak menjadi halangan bagi pembayar-pembayar yang kurang mampu. [139]

Setelah Pemerintah menerima saran-saran dari Penyelidik

---

139 Sugarda Purbakawatja, *ibid*, hal. 38 – 39.

Pendidikan, oleh Departemen Pengajaran dan Kebudayaan disusun dan ditetapkan struktur sistim pendidikan di Indonesia. Dalam penjelasan pengantar mengenai sistim pendidikan di Indonesia antara lain disebutkan, bahwa tujuan umum pendidikan di Indonesia setelah merdeka sebagaimana telah disebutkan diatas, ialah mendidik anak-anak menjadi warganegara yang berguna, yang kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Pendidikan terbagi atas 4 tingkatan: pendidikan rendah. pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan rendah kepada anak-anak diajarkan dasar-dasar pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Dengan cara ini mereka dapat mulai memahami persoalan di sekitar mereka. Pendidikan lanjutan atas memberikan pendidikan khusus pada kelas terakhir, guna menyiapkan diri memasuki perguruan tinggi.

Sekolah-sekolah industri mendidik tenaga-tenaga spesialis dan mempunyai keakhlian khusus guna memenuhi kebutuhan pemerintah. Mengenai lama pendidikan dilihat dari tingkatannya sebagai berikut:

1. Sekolah Rakyat 6 tahun.
2. Sekolah Lanjutan 3 hingga 6 tahun.
3. Sekolah Industri 3 hingga 6 tahun.
4. Perguruan Tinggi 4 hingga 6 tahun.

Anak-anak akan mulai mengikuti pendidikan sekolah Rakyat pada usia 6 tahun. Kenyataan menunjukkan, bahwa setiap sekolah rakyat setelah kemerdekaan pada akhir tahun ajaran didatangi oleh lebih kurang 2.000 orang calon. Untuk pendidikan lanjutan syaratnya ialah anak harus menyelesaikan pendidikan sekolah rakyat. Pendidikan sekolah lanjutan dibagi menjadi dua bagian: tingkat lanjutan pertama 3 tahun dan tingkat lanjutan atas juga 3 tahun. Mereka dapat melanjutkan pelajaran pada sekolah-sekolah kejuruan. Untuk sekolah kejuruan dagang disamping mata-pelajaran umum para siswa diberi pelajaran mengetik, surat-menyurat, memegang buku (tatabuku), ilmu dagang dan lain-lain. Pendidikan ini merupakan pendidikan kejuruan dagang tingkat pertama. Sekolah kejuruan tingkat

pertama lainnya yaitu sekolah tehnik dan sekolah perindustrian.

Pada awal Kemerdekaan, pendidikan tinggi dibagi atas lima bagian, yaitu: sastra, ilmu alam, tehnik dan kedokteran, serta ekonomi. Pada Fakultas Sastra, matakuliah bahasa diberi tempat terkemuka. Pada Fakultas Ilmu Alam, Fakultas Tehnik dan Kedokteran, Ilmu alam dan mathematika menjadi bahan studi utama, sedang pada fakultas ekonomi, ilmu dagang menjadi subyek bagi dasar pendidikan. Untuk menyiapkan tenaga-tenaga pengajar pendidikan rendah diadakan khusus sekolah guru, yang lama pendidikannya 5 tahun, dengan syarat penerimaan menjadi siswa: telah memiliki ijazah Sekolah Rakyat; atau pendidikan sekolah guru 2 tahun, bagi yang telah memiliki ijazah sekolah lanjutan pertama. Untuk menjadi pengajar, mereka harus berusia paling sedikit 18 tahun. Untuk menyiapkan tenaga pendidik bagi sekolah lanjutan pertama dibuka Kursus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama. Kursus ini merupakan pendidikan lanjutan bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan guru sekolah rendah dan telah memiliki masakerja praktek mengajar 2 tahun. Lama kursus 3 tahun, dimana diajarkan matapelajaran: 1. mathematika, 2. ilmu tubuh manusia, 3. ilmu kimia, 4. sastra (termasuk pelajaran bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman), 5. ilmu bumi dan sejarah, 6. tatabuku, 7. ekonomi, 8. zoologi dan botani.

Semua matapelajaran tersebut diberikan selama mengikuti kursus 3 tahun: Matapelajaran menggambar, olahraga dan pekerjaan tangan (prakarya) diberikan pada tahun keII; pendidikan praktis tentang ilmu jiwa merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tersebut. Kursus diadakan pada petang hari, karena pada pagi hari para siswa bertugas sebagai guru. Mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut menerima diploma A, yang berarti telah mempunyai wewenang untuk mengajar di sekolah lanjutan pertama. Bagi mereka yang memiliki diploma A diberi kesempatan lagi untuk mencapai diploma B. Pemilik diploma B ini diberi wewenang untuk mengajar pada sekolah menengah tinggi (atas). Bagi mereka yang memiliki ijazah perguruan tinggi dan berhasrat mengajar, diberikan kwalifikasi mengajar seperti pemilik diploma B.

Pendidikan teknik diberikan pada sekolah teknik pertama dan sekolah teknik menengah. Kedua sekolah ini merupakan

cabang dari -sekolah-sekolah perindustrian. Pendidikan pada sekolah teknik pertama lamanya 3 tahun. Para siswa harus berijazah sekolah dasar. Pendidikan sekolah teknik menengah lamanya 3 tahun. Siswanya ialah mereka yang telah berijazah sekolah lanjutan pertama. Matapelajaran yang diberikan bersifat praktis dan teoritis. Dengan terselenggaranya pendidikan ini dimaksudkan untuk menyiapkan industriawan-industriawan. Pelajar sekolah teknik menengah diberi juga kesempatan untuk mengambil pengkhususan mempelajari masalah-masalah perkapalan, tambang, kimia dan lain-lain.

Menyinggung mengenai masalah butahuruf pada masa awal kemerdekaan, oleh para pengamat pendidikan pada waktu itu dikemukakan, bahwa butahuruf hanya akan berhasil diatasi bila ada rencana yang terkoordinasi oleh Pemerintah. Rencana koordinasi yang dimaksud yaitu kerjasama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial. Mengenai masalah tenaga guru dan materi lainnya para pengamat pendidikan pada waktu itu menyarankan, agar pemerintah yang mengadakan.

Pada awal Kemerdekaan jumlah penduduk di Jawa yang berusia 16 s/d 25 tahun ada 8 juta jiwa. Dari jumlah ini 70% masih butahuruf. Hal ini berarti, bahwa penduduk yang butahuruf di Jawa jumlahnya antara 5 dan 6 juta jiwa. Tugas untuk mengatasi ini dapat dilaksanakan, bila ada kerjasama dengan seluruh masyarakat. Untuk itu diadakan pendidikan para guru dalam usaha mengurangi butahuruf.

Oleh para pengamat pendidikan pada waktu itu dikemukakan juga, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, untuk mengurangi butahuruf dengan cara yang lebih cepat, kepada murid dari bermacam-macam tingkatan sekolah hendaknya ditekankan bahwa pengaruh dunia sangat besar terhadap kita. Juga matapelajaran sejarah dan budaya tanahairnya disarankan supaya diresapkan kepada para siswa. Untuk melenyapkan butahuruf secara periodik disarankan oleh mereka agar juga diterbitkan majalah.[140]

Selanjutnya berhubung sangat dibutuhkannya ahli-ahli teknik untuk pembangunan negara, atas perintah Kementerian Pengajaran pada tanggal 1 Maret 1946 Sekolah Teknik yang dahulu ada di Bandung dibuka kembali di Yogyakarta. Untuk sementara waktu yang akan dimulai pelajarannya hanya bagian

---

140 *Voice of Free Indonesia*, HIPI, 1945 – 1946.

tinggi saja. Sebagai Ketua Panitya Pembukaan sekolah ditunjuk Ir.A.H.O. Tambunan. Sebagai Dekan atau Ketua Fakultas Sekolah Teknik Tinggi (STT)-sebagai diketahui ialah Prof. Ir. R. Roosseno Surjohadikusumo. [141]

Selanjutnya berdasarkan putusan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 September 1946, mulai 1 Oktober 1946 urusan pengajaran pertanian dipindahkan pada Kementerian Kemakmuran. Sekolah pertanian yang dipindahkan wewenangnya ini ialah sekolah-sekolah pertanian yang diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kébudayaan. Sekolah-sekolah pertanian yang diurus oleh pemerintah daerah statusnya tetap.

Pada pendidikan sekolah rendah, berdasarkan putusan Kementerian PP & K tanggal 3 September 1946, guna memperluas sekolah pertama menjadi sekolah rakyat (sekolah dasar) dimulai pada awal tahun ajaran 1946 – 1947 dengan menambahkan kelas IV pada beberapa Sekolah Pertama. Juga diputuskan mengubah nama Sekolah Pertama yang mendapat tambahan kelas IV itu menjadi Sekolah Rakyat. [142]

Sementara itu pada tahun 1946 Departemen PP & K telah mengemukakan suatu gagasan untuk membentuk kelas masyarakat. Adapun dasar pertimbangan yang diberikan karena pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Dianjurkan hendaknya sekolah mempunyai pandangan yang obyektif, yang ditujukan kepada lapangan hidup murid-murid dan kemudian baru diajukan dalam lapangan masyarakat yang luas. Pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk menyelenggarakan kelas masyarakat itu karena: 1. pengajaran yang lama bercorak mati, tidak hidup, 2. pengajaran itu sendiri tidak dinamis, 3. hubungan antara sekolah dan rumahtangga orangtua murid tidak erat, 4. pengajaran yang diberikan "diktatorial", 5. pengajaran kurang praktis, 6. murid-murid terlampau pasif.

Mengenai usaha-usaha yang perlu dijalankan, a.l. dikemukakan saran-saran: mempraktiskan pengajaran, menghidupkan pelajaran-pelajaran dan memperkuat otoaktivitas pada murid-murid. Kelas masyarakat itu sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu kelas-kelas masyarakat: pertanian, perdagangan, kerajinan

---

141 *Berita Republik Indonesia*, Th. II No. 7, 15 Februari 1946, hal. 60.

142 *Berita Repoeblik Indonesia*, Th. II No. 22 – 23, 1 – 15 Oktober 1946, hal. 266 – 267.

dan kewanitaan. Kelas masyarakat itu terutama menerima murid-murid yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan. Lamanya pengajaran ditetapkan 1 tahun. Selama setahun itu diusahakan membentuk jiwa si anak agar dapat langsung bekerja di masyarakat. Dengan mengadakan kelas masyarakat itu diharapkan akan timbul golongan "pertengahan" dan golongan "produsen" yang kukuh. Sebagaimana diketahui keadaan kedua golongan itu di tanahair kita masih lemah keadaannya, lebih-lebih golongan pertengahan. Berdasarkan catatan yang ada waktu itu diketahui jumlah murid tamatan sekolah rakyat (sekolah dasar) 1944/1945 yang tidak melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan ada 81.050 orang.

Menilik pada angka tersebut, maka direncanakan akan di buka paling sedikit 1000 buah kelas masyarakat. Untuk menyelenggarakan sekolah masyarakat itu perlu diperoleh kata sepakat dari Kementeriaan-kementeriaan Perdagangan dan Perindustrian, Pertanian dan Persediaan serta Kementerian Pekerjaan Umum.[143]

Tentang sifat ujian penghabisan sekolah lanjutan tahun pelajaran 1945 – 1946 penilaiannya tidak didasarkan semata-mata atas angka-angka yang diperoleh dalam kelas yang tertinggi. Yang dimaksudkan dengan sekolah lanjutan disini, yaitu: sekolah lanjutan tingkat pertama atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Tehnik Menengah (STM), Sekolah Tehnik Pertama (STP), Sekolah Guru Menengah (SGM), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Pertanian Menengah (SPM), Sekolah Dagang Menengah (SDM), sedangkan yang termasuk dalam kelompok sekolah lanjutan tingkat tinggi ialah: Sekolah Menengah Tinggi (SMT), Sekolah Menengah Tinggi Tehnik (SMTT), Sekolah Pertanian Menengah Tinggi (SPMT), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), Sekolah Guru Tinggi (SGT).

Untuk keperluan ujian, bagi tiap-tiap sekolah lanjutan, oleh Kepala Pemerintah Daerah (Keresidenan, Daerah Istimewa, Kota) dibentuk panitya ujian penghabisan yang terdiri atas Kepala Sekolah sebagai Ketua, seorang guru yang ditunjuk olehnya sebagai penulis, guru-guru yang memberikan pelajaran di kelas tertinggi dan beberapa orang dari luar sebagai anggota.

Mengenai masalah perguruan tinggi dibahas dalam Kon-

---

143 "Oeraian tentang Kelas Masyarakat", *Pewarta* No. 1; Th. I, 15 Juni 1946, hal. 10 – 18.

perensi Perguruan Tinggi yang untuk pertama kali dilangsungkan dari tanggal 25 April s/d 1 Mei 1947, dihadiri oleh 220 orang wakil. Menurut kesimpulan Konperensi itu, salah satu hal yang menghalangi kemajuan perguruan tinggi ialah: karena tidak terkumpul dalam satu Kementerian. ada yang masuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Kemakmuran, juga ada yang menjadi milik partikelir. Kerjasama antara pelbagai perguruan tinggi sulit sekali karenanya. Konperensi menyarankan kepada pemerintah agar beberapa perguruan tinggi disatukan, sehingga diharapkan akan terdapat susunan guru dan alat-alat yang lebih memuaskan. Dari fihak partikelir yang menyelenggarakan perguruan tinggi malahan merasa tidak berkeberatan melepaskan sifat keistimewaannya, apabila hal itu dianggap perlu. Beberapa pembicara dalam Konperensi itu ternyata berpendapat bahwa usaha untuk menyatukan semua perguruan tinggi dalam satu balai perguruan tinggi yang baik, disatu tempat saja banyak keberatannya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan mahasiswa yang ada, sudah bekerja, sehingga tidak dapat berpindah ke tempat lain. Juga masalah pemondokan yang sulit dan keadaan politis yang belum stabil merupakan faktor-faktor penghambat. Konperensi itu telah mencetuskan 2 hal penting. tentang azas dan tujuan perguruan tinggi, yaitu:

1. mewujudkan pusat kebudayaan dan ilmu-ilmu pengetahuan.
2. mendidik orang-orang yang memerlukan pendidikan tinggi guna masyarakat dan negara.

Konperensi juga telah mengusulkan kepada pemerintah tentang pembagian ilmu-ilmu dalam tiga bagian yaitu ilmu alam *(natuurwetenschappen)* yang melingkupi ilmu teknik, fisika. pasti, kedokteran, biologi; kedua "ilmu kebudian" yang melingkupi sastra, filsafat, agama. dan lain-lain, dan ketiga; ilmu sosial yang melingkupi ekonomi, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya atas dasar pembagian itu disusun balai perguruan tinggi atau universitas. Diusulkan pula oleh Konperensi itu supaya diberikan gelar kepada mereka yang telah menamatkan ujian sarjana (doktoral) bagian Ilmu Alam dengan SA, sedang bagi dokter gelar itu akan berupa SAD (Sarjana Ilmu2 Alam Dokter). Bagi yang telah menamatkan ujian doktoral bagian ilmu kebudian akan diberi gelar SB (Sarjana Ilmu Kebudian), sedang bagi mereka

yang telah menempuh ujian Sarjana Ilmu Sosial akan bergelar S.S. (Sarjana Ilmu Sosial).[144]

Perguruan tinggi yang didirikan pada masa awal Kemerdekaan adalah antara lain: Sekolah Tinggi Teknik didirikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 1946. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1946 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gajah Mada diresmikan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada terdiri atas fakulteit Hukum dan fakulteit Kesusasteraan, bertempat di Pagelaran, Yogyakarta.[145]

Selanjutnya berdasarkan keputusan Kepala Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 25 September 1946 telah dibuka Fakulteit Hukum dan Kesusasteraan Darurat di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di kota Malang. Selanjutnya Perguruan Tinggi Kedokteran bagian II dibuka tanggal 4 Maret 1946, di Solo dan bagian I pada tanggal 5 Maret 1946 di Klaten. Fakulteit Farmasi dibuka pada tanggal 27 September 1946 di Klaten. Semua itu tergabung dalam Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, yang terpusat di Klaten dan ber "kampus" di Rumah Sakit Tegalyasa, Klaten. Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan dibuka oleh Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia di Bogor pada bulan November 1946. Dengan meletusnya Aksi Militer Belanda pada bulan Juli 1947, maka perguruan tinggi tersebut dipindahkan ke Klaten, sama halnya dengan perguruan tinggi yang didirikan di Malang, sebagian juga mengungsi ke Klaten dan Yogyakarta.[146]

Peristiwa yang penting adalah pelepasan 90 orang mahasiswa tingkat tertinggi dari Faculteit Kedokteran ke dalam masyarakat oleh Ketua Balai Perguruan Tinggi RI pada bulan November 1945. Para dokter tersebut diberi status Team Dokter Darurat, sesuai dengan kebutuhan Revolusi atas permintaan Menteri Kesehatan RI dr. Leimena.

Sementara itu pemerintah pendudukan Belanda dalam tahun 1947 telah mendirikan *Universiteit van Indonesia*, sebagai gabungan dari perguruan tinggi yang didirikan sebelum tahun 1942, yang berpusat di Jakarta, yang terdiri dari faculteit-

144 "Konperensi Perguruan Tinggi", *Pembangunan*, No. I, Th. II, 10 April 1947, hal. 49 – 50.

145 Istilah "fakulteit", "universiteit" kemudian diubah menjadi fakultit serta universitit, dan kemudian lagi menjadi fakultas dan universitas.

146 *Berita Republik Indonesia*, Th. II, No. 22–23, 1 – 15 Oktober 1946, hal. 226 – 227.

faculteit Hukum, Kedokteran, Ekonomi dan Sastra. Di Bogor: Faculteit Pertanian dan Kedokteran Hewan, di Bandung Teknik, kemudian diperluas lagi dengan Perguruan-perguruan Tinggi di Surabaya (Kedokteran Gigi) dan di Makasar (Ekonomi). Universitas Gajah Mada (Negeri) diresmikan berdirinya pada tanggal 19 Desember 1949 berkedudukan di Yogyakarta, terdiri dari 6 Faculteit.[147]

Selanjutnya setelah diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintah RI pada tahun 1950, maka oleh Menteri Pendidikan RI pada waktu itu, yaitu dr. Abu Hanifah, disusun suatu konsepsi pendidikan yang menitikberatkan spesialisasi. Menurut Menteri Abu Hanifah pada waktu itu, bangsa Indonesia amat terbelakang dalam pengetahuan teknik, yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Pengetahuan umum dianggapnya penting, tetapi pengetahuan teknik mendapat prioritas utama, karena dianggap dapat membawa kunci kemajuan. Dalam garisbesarnya konsepsinya mencakup hal-hal sebagai berikut: Pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 : 1. Tiap-tiap 3 sekolah umum mulai dari bawah ke atas diadakan 1 sekolah teknik. Yang diterima di sekolah teknik yalah anak-anak tamatan Sekolah Rakyat. Sebagai lanjutannya yalah Sekolah Teknik Menengah (3 tahun) dan Sekolah Teknik Atas, juga 3 tahun. Sekolah teknik harus mempunyai rencana pelajaran yang lengkap, sehingga bila seorang murid telah tamat dari Sekolah Teknik Menengah atau Sekolah Teknik Atas sanggup mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya: *opzichter* seperti pada masa penjajahan Belanda.[148]

Disamping itu, karena Indonesia berupa negara kepulauan maka di beberapa kota diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi dan Akademi Research Laut. Kota-kota yang dimaksudkan itu adalah Surabaya, Makasar, Ambon, Manado, Padang dan Palembang. Tenaga-tenaga pengajarnya diminta dari luar negeri. Yang bersedia mengirim, adalah Inggris, Amerika, Belanda dan Perancis. Disamping itu dikirimkan keluar negeri mahasiswa-mahasiswa yang I.Q.nya tinggi dan termasuk mahasiswa teladan tahun-tahun pertama di Indonesia.

---

147 Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1965, hal. 9 – 12.

148 "Peratoeran tentang, penoetoepan peladjaran di sekolah2 pada achir tahun pelajaran 1945 – 1946 dan Oedjian" *Pewarta*, No. 1, th. I, 15 Juli 1946, hal. 4 – 5.

Selain itu Sekolah Tinggi Pertanian mendapat tempat yang pantas, karena sifat masyarakat kita yang masih agraris. Direncanakan pada waktu itu supaya di Sumatra Barat dekat Payakumbuh diadakan filial dari Bogor yang sama derajatnya. Hanya kemudian rencana serta konsepsi tersebut hilang sama sekali setelah Kabinet Hatta berhenti.

Oleh Menteri Abu Hanifah juga direncanakan "kota universiter" seperti di Paris untuk kota-kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bukittinggi. Pembiayaan akan diambilkan dari anggaran belanja negara. dimana pendidikan mendapat bahagian 15%. Disamping itu juga diusulkan kepada pemerintah tambahan 1% pajak pada pembayar pajak diseluruh Indonesia, untuk perbaikan kesejahteraan guru. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Exakta lainnya mendapat juga perhatian. Direncanakan pula untuk mendirikan semacam *akademie voor wetenschappen*. [149]

Sistim pendidikan diadakan dengan titikberat desentralisasi. Ini berarti bahwa dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama menjadi urusan daerah (provinsi) dengan supervisi pusat, terutama dalam perencanaan pelajaran. Sekolah Menengah Atas menjadi kewajiban pusat, baik mengenai masalah keuangan, maupun mengenai matapelajaran. Untuk sekolah-sekolah dibawah tanggung-jawab provinsi atau daerah dapat dimintakan subsidi sebesar 40% dari anggaran belanja. Selebihnya menjadi tanggungan daerah. Guru-guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pusat. Tiap-tiap provinsi atau daerah harus mempunyai satu universitas negeri, dimana para lektor dan gurubesarnya harus mempunyai kwalifikasi Negara. Selanjutnya juga dihidupkan kompetisi sehat untuk memiliki perguruan-perguruan yang tinggi nilainya. Sebagai konsekwensinya tentunya daerah-daerah lebih diberikan bahagiannya daripada penghasilannya setahun terhitung devisa. Daerah-daerah yang miskin dapat dipertimbangkan mendapat lebih banyak bantuan dari daerah-daerah yang kaya. [150]

Dalam pada itu dalam rangka konsolidasi terhadap universitas-universitas Negara, dikeluarkanlah Undang-undang Darurat

---

149 Prof. Dr. Abu Hanifah, "Pembangunan Negara dan Pendidikan Bangsa", *Kompas*, 21 November 1972 hal. IV, IX.

150 Prof. Dr. Abu Hanifah, "Pembangunan Negara dan Pendidikan Bangsa", *Kompas*, 22 November 1972, hal. IV, IX.

No. 7 tahun 1950, yang mewajibkan kepada Menteri PP&K Republik Indonesia Serikat jika perlu mengambil tindakan dari peraturan yang berlaku (dari *Hoger Onderwijs Ordonantie 1946" Stbl. 1947 No. 47* dan *Universiteitsreglement 1946" Stbl. 1947 No. 170)* dll.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 tersebut, maka pada tanggal 2 Pebruari 1950 Ir. Surachman diangkat sebagai Presiden (Rektor) Universiteit Indonesia, yaitu gabungan dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta dengan "Universiteit van Indonesia" dengan semua cabang-cabangnya. Termasuk wilayah universitas ini antara lain: fakultas-fakultas exakta nasional pemerintah yang ada di Bogor, Bandung, Surabaya dan Makasar. Selanjutnya selama periode zaman liberal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 yang mulai berlaku tanggal 10 Nopember 1954 ditambah lagi dengan sebuah universitas negeri di Jawa, yaitu Universitas Airlangga di Surabaya, yang terdiri dari fakultas-fakultas: 1. Kedokteran, serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya (berasal dari Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Surabaya), 2. Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya (berasal dari Cabang Bagian Hukum, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada), 3. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang dan 4. Fakultas Ekonomi di Surabaya.

Perluasan universitas-universitas di luar Jawa direalisasi dengan dikeluarkannya: Peraturan Pemerintah No. 23, 1 September 1956 yang menetapkan berdirinya Universitas Hasanuddin di Makasar, serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 yang menetapkan berdirinya Universitas Andalas di Bukittinggi.

Kemudian berturut-turut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1957 terhitung mulai tanggal 1 September 1957 di Bandung didirikan Universitas Pajajaran, serta dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1950 tanggal 1 September 1957 didirikan Universitas Sumatra Utara di Medan. [151]

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak tahun 1959 dibawah Menteri PP dan K Prijono disusun suatu rencana konsepsi pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama. Konsepsi

---

151 Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, hal. 15 – 16.

yang terdiri atas 7 ketentuan itu menurut Menteri dalam rangka usaha membuktikan kepada masyarakat bahwa lapangan pendidikan dapat membawa jiwa baru, serta dapat pula menyelaraskan diri dengan program Kabinet Kerja. Adapun yang dimaksudkan dengan konsepsi Sapta Usaha Tama itu meliputi usaha-usaha: 1. penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen PP dan K, 2. meningkatkan seni dan olahraga, 3. mengharuskan "usaha halaman", 4. mengharuskan penabungan, 5. mewajibkan usaha-usaha koperasi, 6. mengadakan kelas masyarakat, 7. membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. [152]

Sejak tahun 1962 sistim pendidikan untuk SMP dan SMA mengalami perubahan dengan dihasilkannya perumusan-perumusan terakhir Rencana Pelajaran bagi kedua jenis sekolah tersebut. Rencana pelajaran bagi SMP Gaya Baru ini dijalankan mulai 1 Agustus 1962, dengan menghapus bagian A dan B, sehingga semua pelajaran mendapat pelajaran yang sama, sehingga rasa kurang pada murid-murid bagian A untuk selanjutnya ditiadakan. Dalam Rencana Pelajaran baru itu dimasukkan dua matapelajaran baru yaitu Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan masuknya matapelajaran itu diharapkan para pelajar yang karena sebab-sebab tertentu tidak melanjutkan pelajarannya, akan memperoleh bekal untuk terjun ke masyarakat. Rencana pelajaran ini adalah wujud instruksi Menteri PD dan K Prof. Prijono mengenai Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana dalam masa Demokrasi Terpimpin. Matapelajaran yang diberikan tergabung dalam: *A. kelompok dasar*. yang memberikan pelajaran: civics (kewarganegaraan). bahasa Indonesia, sejarah kebangsaan, ilmu bumi Indonesia, pendidikan agama/budi pekerti, pendidikan jasmani/kesehatan. *B. kelompok cipta*, yaitu kelompok matapelajaran yang bertujuan memberikan dasar-dasar pengetahuan, sehingga akhirnya dapat mewujudkan tenaga-tenaga kejuruan yang ahli dan berjiwa Revolusi 1945. *C. kelompok rasa/karya*, bertujuan membiasakan anakdidik memenuhi tuntutan sosialisme Indonesia, supaya mereka cinta akan kerja, sehingga diharapkan akan membawa rasa persatuan dan rasa cinta pada keindahan. *D. kelompok krida* yang memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan sistim Pancawardhana, serta memberikan kesempat-

---

152 Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan, No. 1, 17 Agustus 1959.

an pada pelajar untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan di dalam dirinya sendiri dan selanjutnya untuk mengembangkan karya yang berguna baginya di kemudian hari dalam menghadapi kehidupan di dalam masyarakat.[153]

Mengenai sistim pendidikan di SMA, berdasarkan hasil rapat kerja direktur SMA negeri dan swasta seluruh Indonessia di Bandung tgl 25 April 1962 – 2 Mei 1962, oleh pimpinan Departemen PD dan K telah disahkan rencana pelajaran dan pendidikan SMA Gaya Baru. Struktur SMA Gaya Baru itu mempunyai satu jenis kelas I, empat jenis kelas II (Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan Alam), empat jenis kelas III (Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan Ilmu Alam).

Selanjutnya dalam ketentuan itu disebutkan bahwa tidak dibenarkan suatu SMA hanya mempunyai satu, dua atau tiga "jenis" (kelompok khusus) kelas II dan kelas III. Di kelas I setiap pelajar diberi kesempatan untuk lebih mengenal minat dan bakatnya, dengan jalan menjelajahi semua jenis matapelajaran yang ada di SMA, disertai dengan bimbingan dan penyuluhan yang teliti dari para guru maupun orang tua.

Selanjutnya dengan menggunakan Peraturan Kenaikan Kelas dan bahan-bahan catatan dalam kartu pribadi setiap murid, para pelajar disalurkan ke kelas II kelompok khusus: Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Kemudian setelah pelajar-pelajar duduk di kelas II, maka barulah persiapan-persiapan yang lebih intensif diberikan dalam kelompok khusus yang diutamakan di kelas II ybs., sehingga setiap pelajar pada akhir kelas III benar-benar siap untuk melanjutkan pelajarannya, ke lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan pokok dari pendidikan dan pengajaran di SMA Gaya Baru adalah untuk mempersiapkan para pelajar secara ilmiah untuk perguruan yang lebih tinggi.[154]

Mengenai penyelenggaraan tatatertib dilingkungan Departemen PP dan K yang dimaksudkan diatas agar terselenggara disiplin di setiap sekolah dan memberikan pengertian tentang hari-hari nasional, termasuk disiplin dan cara memberikan peng-

---

153 Urusan Pendidikan SMP, Jawatan Pendidikan Umum Dep. PD dan K. *Rencana Peladjaran dan Pendidikan SMP Gaja Baru*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1964, hal. 6 – 7.

154 Urusan Pendidikan SMA, Jawatan Pendidikan Umum Dep. PD dan K, *Rencana Peladjaran dan Pendidikan SMA Gaja Baru*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1964, hal. 8 – 11.

hormatan pada hari-hari tersebut. Selain penekanan disiplin kepada murid, terhadap para pendidiknya dikenakan ketentuan-ketentuan disiplin. Selanjutnya guna menjaga wibawa ketentuan-ketentuan diatas, diadakan sanksi atas pelanggaran, baik bagi murid maupun bagi guru. Bagi murid sanksi itu dapat berupa: teguran, pemberian peringatan keras, atau larangan mengikuti pelajaran untuk waktu yang ditentukan. Sanksi yang diambil harus diberitahukan kepada orangtua murid. Bagi guru-guru yang melanggar ketentuan tersebut diambil tindakan-tindakan administratif. [155]

Tentang penyelenggaraan seni dan olahraga [156] ditentukan antara lain tentang kewajiban menyanyikan 6 lagu nasional yang telah ditetapkan, selain lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kecuali itu ditentukan tentang cara menyanyikan menurut jiwa dan iramanya yang ditentukan oleh penciptanya. Tentang kegiatan olahraga dibebankan kepada Jawatan Pendidikan Masyarakat. Dua cabang olahraga, yaitu sepakbola dan bola volley merupakan olahraga yang harus dikembangkan. Untuk menimbulkan gairah, maka secara temporer diadakan pertandingan-pertandingan dengan pemberian hadiah piala bergilir.

Yang dimaksudkan dengan Usaha Halaman (UH) ialah usaha yang dapat dilakukan di halaman sekolah atau rumah, yang hasilnya dapat merupakan bantuan "sandang-pangan". Semua sekolah dan kursus tingkat dasar dan menengah, baik yang pemerintah maupun swasta diharuskan mengikuti usaha halaman tersebut. Dalam melaksanakan pekerjaan itu setiap murid diwajibkan melanjutkan usaha halaman tersebut di rumahnya masing-masing. Sebagai pengawas ditentukan kepala sekolah, dibantu oleh guru-guru, yang meneliti apakah murid-murid melaksanakan usaha halaman di rumahnya masing-masing. Apabila ternyata, bahwa murid-murid tidak melaksanakan kewajiban itu, kepala sekolah serta guru-guru dapat menjatuhkan sanksi, berupa teguran, memberikan angka kurang untuk kerajinan murid, sedang sanksi bagi guru-guru berupa pemindahan atau penangguhan kenaikan gaji atau pangkat. Terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak menjalankan anjuran itu akan dikena-

---

155 Instruksi Penyelenggaraan Tata-tertib Dilingkungan Departemen PPK, 1 Oktober 1959.

156 Instruksi Penjelenggaraan Kegiatan Seni dan Olahraga Di Lingkungan Departemen PPK.

kan sanksi, seperti pencabutan bantuan atau larangan mengikuti ujian negara bagi murid-muridnya.[157] Instansi yang memberikan dorongan untuk usaha tersebut adalah Jawatan Pendidikan Masyarakat, bersama eselon bawahannya.

Mengenai gerakan menabung bagi setiap murid antara lain dijelaskan, bahwa penabungan dilakukan pada Bank Tabungan Pos, Kantor Pos atau Kantor Pos Pembantu. Cara penabungan itu diatur oleh Departemen PP dan K bersama-sama dengan direksi Bank Tabungan Pos. Jumlah uang yang ditabung harus disesuaikan dengan kemampuan orangtua atau wali murid, sehingga tidak boleh merupakan beban yang berat.[158]

Penyelenggaraan koperasi sekolah harus dimulai dengan uang pangkal dari anak-anak sendiri dan pengurusnya adalah murid-murid dari sekolah yang bersangkutan. Kepala sekolah dan guru-guru bertindak sebagai penasehat dan pengawas.[159]

Penyelenggaraan kelas masyarakat dimaksudkan untuk mempersiapkan para lulusan sekolah rakyat memperoleh kecakapan/ketrampilan, sehingga dapat berdiri sendiri. Bantuan didapat dari instansi-instansi di lingkungan Departemen P dan K, terutama dari Jawatan Pendidikan Umum, yang berupa bantuan tehnis dan bantuan tenaga pengajar. Kelas masjarakat memberikan pelajaran dalam waktu 2 tahun, yang meliputi pelajaran-pelajaran pengetahuan umum, yang disesuaikan dengan keperluan pelajarannya dan masyarakat, misalnya: pelajaran tentang koperasi, bahasa Indonesia (surat-menyurat), membuat laporan rapat dan sebagainya.[160] Kegiatan regu kerja dilakukan dengan menyelenggarakan "hari krida", atau hari untuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan budaya, seni, olahraga atau permainan lainnya pada tiap-tiap hari Sabtu.[161]

Untuk memperbaiki sistim pendidikan yang dianggap oleh pemerintah pada waktu itu masih terlalu intelektualistis dan masih bersifat sistim pendidikan kolonial, maka pada tahun 1960 pemerintah telah mencetuskan konsepsi pendidikan "Panca-wardhana" atau Lima (pokok) Perkembangan, yang mencakup aspek-aspek:

157 *Ibid.*
158 Instruksi Penjelenggaraan Kewajiban Menabung oleh murid sekolah di lingkungan Departemen PP & K.
159 Instruksi Penjelenggaraan Koperasi Sekolah di Lingkungan Departemen P & K.
160 Instruksi Penjelenggaraan Kelas Masjarakat: di Lingkungan Departemen P & K.
161 Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan No. 2, 17 Agustus 1961.

1. Perkembangan cinta bangsa dan tanahair dan masalah moral nasional.
2. Perkembangan inteligensi.
3. Perkembangan emosionil-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin.
4. Perkembangan keprigelan (kerajinan tangan).
5. Perkembangan jasmani.

Untuk memberikan pengertian tentang perkembangan cinta bangsa, maka oleh Departemen P & K telah dikeluarkan buku kewarganegaraan (civics). Juga ilmu bumi nasional diberikan supaya dapat menimbulkan rasa cinta pada bangsa dan tanahair. Perkembangan kedua dilaksanakan dengan memakai alat-alat klasik, seperti: menulis, membaca, berhitung, dan lain-lain. Mengenai perkembangan ketiga diusahakan dengan cara mempelajari sastra, nyanyian dan mempelajari cabang seni, seperti melukis, menari, memukul gamelan, dan lain-lain. Perkembangan keempat diusahakan dengan pelajaran pekerjaantangan, bercocok-tanam di halaman sekolah. Perkembangan kelima yalah perkembangan jasmani, diberikan dengan mengajarkan ilmu kesehatan dan olahraga. [162]

Sementara itu khusus di lingkungan perguruantinggi selama periode Demokrasi Terpimpin itu haluan negara Manifesto Politik RI (Manipol) dijadikan haluan perguruan tinggi, yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan "retooling". Selanjutnya bagi perguruantinggi juga telah ditetapkan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pada itu telah digariskan doktrin di bidang pendidikan, pengajaran dan penelitian, antara lain bahwa bukanlah ilmu dan penelitian semata-mata demi kepentingan ilmu dan penelitian akan tetapi ilmu dan penelitian demi kemanfaatan budaya, kehidupan masyarakat. Mengenai fungsi perguruantinggi ditentukan tidak akan "mencetak" sarjana-sarjana texbookthinker, melainkan sarjana yang memiliki kematangan intelektuil, serta mampu berfikir secara kritis dan memiliki daya kreasi. Selama periode 1962/1963 telah dilaksanakan studi terpimpin, dimana pelaksanaannya disesuaikan pada keadaan setempat. [163]

162 Surat Keputusan Menteri PP&K tentang Pendidikan Pantjawardhana, 10 Oktober 1960.

163 Surat Keputusan Menteri PP&K tentang Pendidikan Pantjawardhana, 10 Oktober 1960.

Konsepsi pembentukan perguruantinggi di daerah-daerah tingkat I, ditetapkan dalam ketetapan-ketetapan Dewan Perancang Nasional (Depernas), dimana diusahakan untuk mendirikan universitas negeri di setiap daerah tingkat I. [164]

Selanjutnya dalam masa Orde Baru dibawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri diajukan suatu konsepsi Sekolah Pembangunan. Sekolah pembangunan bukan hanya sekolah yang telah ada ditambah dengan ketrampilan, akan tetapi berlainan dengan sistim sekolah yang ada sekarang, baik mengenai tujuannya, sistimnya, ataupun metodenya. Anak-anak mulai dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan atau lingkungan kerja, agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Sebab jika tidak dikenalkan, mereka tidak akan dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kerja yang terbuka, meskipun mereka telah mengikuti pendidikan di sekolah selama 12 tahun, karena tidak dikenalkan kepada cara bagaimana mereka mengetahui jenis dan lingkungan kerja, bagaimana bisa menyesuaikan diri dan bagaimana dapat mengatur bakatnya pada lingkungan kerja tersebut. Dalam melaksanakan konsepsi itu, maka anak-anak diberi pengertian akan dirinya sejak pertama-tama mereka dari rumah, di sekolah dan di dalam masyarakat.. dimana mereka merupakan bagian dan anggota masyarakat. Sekolah Pembangunan merupakan perwujudan dari prinsip, bahwa pendidikan harus relevan dengan kenyataan-kenyataan hidup dan masyarakat. Selanjutnya penggantian sistim yang dianggap telah usang dan yang konvensionil dengan sistim baru itu memerlukan waktu dan tahapan-tahapan. Konsepsi itu sendiri sedikit atau banyak dipengaruhi oleh terjadinya perombakan sistim pendidikan di beberapa negara, baik di Asia, maupun di Amerika. Perombakan-perombakan sistim pendidikan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut umumnya untuk memecahkan masalah antara jumlah lulusan sekolah dengan lapangan kerja. Mengenai sebab-sebab mengapa kita mengadakan sekolah-pembangunan, oleh Menteri Mashuri dikemukakan bahwa pengertian pendidikan saat ini sudah berubah, tujuannya tidak seperti kita pikirkan selama ini, bahwa pendidikan hanya mengejar ijazah dan gelar saja, tetapi bertujuan untuk memberikan kemampuan

---

164 Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, hal. 16–20.

hidup kepada anak-anak kita, agar dapat lebih banyak yang dihasilkan. Sekolah pembangunan selain memberikan pelajaran kepada anak didiknya, juga kepada masyarakat, baik ia akan terus melanjutkan studinya, maupun hanya ingin mendapatkan studi menurut kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Misalnya anak-anak di desa, yang pada waktu ini mengerjakan sawahnya, karena membantu orangtuanya, maka kesempatan yang dimilikinya adalah diantara waktu mengerjakan sawah. Kepada mereka ini perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tidak kontinu, menurut kesempatannya. Kepada mereka diberikan paket-paket pendidikan, misalnya untuk 3 atau 4 bulan, untuk satu tahun dan seterusnya. Selanjutnya pada waktu senggang mereka dapat mengambil kursus yang kemudian dapat langsung dimanfaatkan untuk bekal hidupnya.

Dalam melaksanakan pengajaran, guru berkewajiban untuk selalu me*relevan*kan tiap-tiap matapelajaran yang diberikan berdasarkan kenyataan dan kebutuhan lingkungannya. Sebagai misal dikemukakan pelajaran ilmu pasti atau matematika yang dikaitkan dengan membuat konstruksi bangunan. Dalam usaha mengkonkritkan konsepsi sekolah pembangunan telah diadakan seminar dan lokakarya sekolah pembangunan yang antara lain menghasilkan pemikiran bahwa penyebaran dan pengembangan sekolah tersebut tidak menggunakan *approach* sekolah, melainkan dengan sistim teritorial, berdasarkan wilayah-wilayah gerak pendidikan yang setingkat dengan kabupaten. Di desa-desa dibentuk wilayah-wilayah desa. Perbedaan antara sekolah-sekolah swasta dan negeri akan ditiadakan. Kemungkinannya ialah bahwa dalam suatu wilayah pendidikan ada beberapa rayon. Dalam satu rayon misalnya terdapat 5 sekolah dasar bawah (5 tahun), yang 3 Negeri, 1 swasta dan 1 lagi madrasah. Setelah selesai menuntut pelajaran, mereka ditampung oleh satu sekolah dasar lengkap (8 tahun), apakah mereka berasal dari sekolah negeri, swasta ataupun madrasah. Selanjutnya dari sekolah dasar lengkap akan ditampung oleh sekolah pembangunan yang berasal dari swasta, madrasah atau negeri. [165]

165 Pidato pengarahan Menteri P & K Mashuri pada pembukaan Rapat Kerja Inspektorat Jendral Departemen P & K tgl. 22 Januari 1973 dengan judul: "Anak-anak harus diperkenalkan dengan jenis dan lingkungan kerja", *Bulletin Departemen Pendidikan & Kebudayaan*, No. 107, Tahun III, 29 Januari 1973, hal. 1, 2, 8.

Mengenai masalah penyelenggaraan sekolah-sekolah asing, pada tahun 1957 pemerintah telah mengambil tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Departemen Pengajaran dan pihak Penguasa Perang Pusat. Yang dimaksud dengan asing-yalah sekolah partikelir yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan pelajaran-pelajaran asing. Sejak Indonesia merdeka, jumlah sekolah asing bukan makin berkurang, melainkan makin bertambah. Pada masa perjuangan ada gejala-gejala, bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak saja berusaha menahan anak-anak Indonesia yang terdapat di dalamnya, bahkan menjalankan usaha untuk menarik lebih banyak anak-anak itu ke dalam lingkungannya. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen PP dan K, dapatlah dikumpulkan angka-angka statistik mengenai sekolah-sekolah asing tersebut, sebagai berikut:

Tahun	Jumlah sekolah asing	Jumlah guru sekolah asing	Jumlah murid sekolah asing
1939/'40	26	73	3062
1952/'53	1371	8349	254730
1956/'54	1861	13441	415565

Berdasarkan angka-angka yang tercantum di atas maka sebagai pegangan dapatlah dikatakan bahwa pada pertengahan tahun 1957 di Indonesia terdapat lebih kurang. 2.000 sekolah asing dengan lebih kurang 14.000 guru dan lebih kurang 425.000 murid. Daripada angka-angka itu, terdapat 60% – 70% daripada jumlah lebih-kurang 425.000 murid sekolah-sekolah asing itu yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang di dalam sekolah-sekolah asing itu dengan sendirinya menerima pendidikan asing. Dengan demikian mereka disiapkan untuk menjadi orang-orang Indonesia yang bersikap asing. Pada pertengahan tahun 1957 sekolah asing antara lain terdiri atas lebih kurang 1.800 sekolah Cina dan 125 sekolah Belanda yang dilihat dari sudut kewaspadaan nasional, waktu itu dinilai mempunyai aspek khusus. Pertama karena bangsa Belanda belum bersikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia. Kedua, karena timbulnya sengketa politik di negara Cina yang telah meluas pula ke masyarakat Cina penduduk Indonesia. Berdasarkan pertimbangan Pemerintah waktu

itu, ketegangan-ketegangan itu dapat merugikan kepentingan Negara RI; karenanya Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah merembetnya persoalan orang Cina itu ke Indonesia. Tentang pengawasan pengajaran asing tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer tanggal 6 November 1957 No. 989/PMT tahun 1957. Pengawasan itu berlangsung s/d tanggal 17 April 1958. [166]

2. *Perkembangan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sejak kemerdekaan*

Masalah ejaan bahasa Indonesia pertama-tama menyangkut bidang tatabunyi atau fonologi. Hal ini secara tidak langsung juga berhubungan dengan tatabentuk atau morfologi, yaitu penulisan satuan morfologi, seperti katadasar, kataulang, katajadian dan katatugas. Di samping itu juga menyangkut tandabaca, yang secara tidak langsung menyangkut bidang tatakalimat atau sintaxis. Ejaan bahasa Indonesia terutama mempersoalkan pertimbangan satuan bunyi dengan huruf. [167]

Bahasa Indonesia sendiri mengalami perkembangannya karena beberapa faktor, yaitu: adanya semangat kebangsaan Indonesia yang telah melampui kedaerahan dan kesukuan. Hal lain juga karena telah adanya kitab Logat Melayu, karangan van Ophuyzen, sejak tahun 1901, yang digunakan di sekolah-sekolah yang menganjurkan bahasa Melayu. Faktor lainnya adalah adanya *Commissie voor de Volkslectuur* sejak tahun 1908, yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Hal ini disebabkan adanya perkembangan di bidang sastra, khususnya dengan lahirnya "Poejangga Baroe".

Faktor-faktor diatas telah mendasari terpenuhinya fungsi bahasa tersebut sebagai bahasa suku, yang telah memperkuat sikap masyarakat Indonesia terhadapnya. Adanya larangan menggunakan bahasa Belanda di jaman Jepang telah memberikan peluang bagi bahasa Indonesia dalam bidang-bidang administrasi, pendidikan, komunikasi-massa, penterjemahan buku-buku pelajaran ke dalam bahasa Indonesia, serta perkembangan pesat di

166 Departemen Pengudjaran dan Kebudajaan, Penguasa Perang Pusat, *Pengawasan Pengadjaran Asing*, hal. 14, 15, 28, 29.

167 Djakc. Kentjono, "Penjempurnaan Edjaan bahasa Indonesia", *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia Sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*, Jakarta, 1967, hal. 69 – 81.

bidang sastra Indonesia membuktikan hal tersebut. Timbulnya usaha-usaha kodifikasi tatabahasa, penyelenggaraan kata-kata baru dan peristilahan telah memberikan kerangka petunjuk kepada para penutur, sehingga kesadaran akan normapun akhirnya bertambah besar.

Pada awal jaman Kemerdekaan bahasa Indonesia sudah memenuhi fungsi dan menerima sikap yang diperlukan sebagai bahasa baku. Contohnya: teks Proklamasi ditulis dalam bahasa Indonesia.[168] Pemerintah memegang peranan penting dalam usaha-usaha memajukan bahasa Indonesia. Sejak tahun 1947, usaha kodifikasi diteruskan oleh Menteri PP dan K di masa itu, Mr. R. Suwandi. Menteri PP dan K [169] pada waktu itu bermaksud menyederhanakan ejaan Van Ophuysen. Oleh Menteri didirikan sebuah panitya, yang diberi tugas:

1. Menetapkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia.
2. Menetapkan tatabahasa Indonesia;
3. Menyusun kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada dalam bahasa Indonesia untuk keperluan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.

Hasil panitya ini ialah lahirnya Ejaan Republik, yang biasa disebut "Ejaan Suwandi".[170]

Kebutuhan akan adanya pembakuan bahasa Indonesia disebabkan adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beraneka bahasa *(pluri-lingual)*. Dalam usaha untuk mengadakan pembakuan bahasa Indonesia ternyata bahwa faktor bahasa asing dan bahasa daerah harus diperhitungkan. Disamping bahasa Indonesia, bahasa asingpun dianggap penting. Selanjutnya kita sendiri merasakan bagaimana kuatnya kedudukan bahasa daerah, yang jumlahnya kira-kira ada 200 buah.

Dalam menghadapi hal tersebut pembakuan merupakan salahsatu segi dari politik bahasa. Politik bahasa adalah kebijaksanaan di dalam menentukan pilihan terhadap satu atau lebih dari suatu bahasa dan bagaimana menggunakannya, serta mengembangkannya demi kepentingan suatu masyarakat atau negara.

---

168 B.H. Hoed; "Pembakuan Bahasa Indonesia", *Kompas*, 29 Juni 1972, hal. III, IX.

169 Lembaga Bahasa Nasional, *Bahasa dan Kesusastraan*, Seri khusus, No. 9/1972, hal. 76.

170 Berdasarkan Keputusan Menteri P.P. & K. No. 264/Bh. 4, 19 Maret 1947, diakui sebagai ejaan baru.

Sudah menjadi suatu kenyataan, bahwa sejak lahirnya Negara RI, pelbagai seminar dan diskusi diadakan untuk membahas pelbagai masalah dalam bidang bahasa Indonesia. Disamping itu, secara terpisah para ahli bahasa Indonesia, Perancis dan Jerman telah mengadakan "workshop" mengenai masalah-masalah yang timbul. Selain itu juga pernah diadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah bahasa daerah, seperti bahasa Jawa dan bahasa sunda. [171]

Gagasan untuk menyempurnakan ejaan baru Indonesia timbul lagi pada waktu diadakan kongres bahasa Indonesia di Medan antara tanggal 28 Oktober 1954 s/d 2 Nopember 1954. Kongres itu antara lain mengambil keputusan, supaya penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan yang diatur oleh pemerintah, yang bertugas untuk menyusun suatu ejaan praktis bagi bahasa Indonesia. Sebagai realisasi keputusan Kongres Bahasa Indonesia tersebut, Pemerintah membentuk Panitya Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia dengan surat keputusan Menteri PP dan K No. 448/S. tgl. 19 Djuli 1956. Panitya tersebut mula-mula dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono, kemudian oleh E. Katoppo. Panitya pembahasan menghasilkan Konsep Pembaharuan. Hal ini merupakan satu langkah maju dalam aturan bahasa nasional kita.

Dalam pada itu pada bulan September 1956 diadakan kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang ketiga di Johor. Dalam Kongres tersebut timbul hasrat untuk-menyatukan ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Hasil-hasil Kongres itu dipergunakan juga oleh Panitya Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia sebagai bahan pertimbangan.

Pada tanggal 17 April 1957 diadakan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu, yang masing-masing diwakili oleh Perdana Menteri Dato Abdul Razak bin Dato Hussein dan untuk RI oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda. Sebagai tindakan selanjutnya, pada tanggal 4 sampai 7 Desember 1959 di Jakarta diadakan sidang bersama antara Panitya Pelaksana Kerjasama Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia, yang diketuai oleh Prof. Dr. Slamet Muljana dengan Jawatan Kuasa Ejaan Rumi Baharu Persekutuan Tanah Melayu, yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. Sidang bersama itu

171 B.H. Hoed, "Pembakuan Bahasa Indonesia", *Kompas*, 29 Djuni 1972, hal. IX.

menghasilkan Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia (Melindo), yang pada tahun 1961 diterbitkan oleh Departemen PPK Republik Indonesia. Dalam Pengumuman Bersama tersebut dinyatakan, bahwa ke dua pemerintah akan meresmikan Ejaan Melindo itu selambat-lambatnya pada bulan Januari 1962. Akan tetapi keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan, karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya. Konsep isinya pernah diajukan oleh Samsuri dalam majalah *Medan Ilmu Pengetahuan* Th. I, No. 4, 1950, yang selanjutnya disebut Konsep Samsuri. Konsep lainnya yaitu yang dihasilkan oleh Panitya Ejaan, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada Agustus 1966, yang selanjutnya disebut Konsep Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan (LBK). Keempat konsep itu mencoba mengadakan inventarisasi fonem.

Kesamaan fonem ditemukan dari keempat konsepsi tersebut, yaitu: p, b, t, d, c, j, k, g, m, n, j, s, h, w, y, r, I, i, e, a dan u. Konsep pembaharuan memasukkan f sebagai fonem tambahan berarti membuat ketentuan lain. Konsep Melindo menyebut f dalam rangka ujud tanda fonem konsumen, sedangkan konsep Samsuri dalam denah konsensusnya menyebutkan f, yang kemudian disusul oleh beberapa contoh pemikirannya, dan diperjelas dalam hubungannya dengan v. Tetapi kadang-kadang tanda fonem tersebut diapit oleh tanda kurung, yang menandakan bahwa pengarangnya berpendirian bahwa fonem f tidak termasuk dalam sistim fonem Indonesia. Konsep LBK menempatkan fonem f dalam tatakonsonan Indonesia.

Mengenai v dari keempat konsep hanya konsep pembaharuan yang menyebut v sebagai fonem tambahan media v pada abjad Indonesia. Khusus mengenai z konsep Pembaharuan dan Melindo memasukkan z sebagai fonem tambahan. Konsep Samsuri tidak memasukkan z kedalam tatafonemnya, sedangkan konsep LBK jelas memasukkan.

Tentang s, dalam konsep Samsuri tidak terdapat fonem tersebut, sedang konsep pembaharuan dan Melindo menyetujui penggunaan s ini sebagai fonem tambahan. LBK memasukkan s kedalam tatafonem Indonesia, disertai alasan secara deskriptif bunyi yang mewakili /s/ itu banyak kedapatan. Demikian antara lain mengenai masalah fonem-fonem dari keempat konsepsi yang disebutkan disini. [172]

172 Djoko Kentjono, "Penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia", *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia Sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*, hal. 69 – 81.

Kongres Bahasa Indonesia yang pertama tahun 1938 di Surakarta memutuskan perlunya segera mengadakan suatu lembaga dan suatu fakultas bahasa Indonesia, guna menentukan istilah-istilah ilmu.[173] Pada jaman Jepang tanggal 20 Oktober 1942 [174] oleh Kantor Pengajaran Balatentara Jepang didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia yang terdiri dari 3 bagian, dengan seksi ketiga yang menyelenggarakan kata-kata istilah, dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, yang terbagi atas beberapa seksi kecil. Pada tanggal 30 April 1945 Komisi Bahasa tersebut ditutup, dan telah menghasilkan 7.000 istilah baru.

Komisi bahasa yang baru, dibentuk pada tanggal 18 Juni 1947. Pembentukan istilah dilanjutkan oleh Komisi Istilah dari Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia (hingga sekarang). Dalam kongres bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, khusus mengenai masalah istilah ditentukan, bahwa istilah-istilah yang telah biasa dipakai hingga saat ini tetap diakui, sedang istilah yang telah disiarkan oleh Komisi Istilah supaya disaring dengan cara berpegang pada pengertian keseluruhannya, dan tidak hanya merupakan penterjemahan kata-kata bagiannya, sedang semua istilah internasional dalam lapangan ilmiah dan budaya diterima dengan diselaraskan terhadap bahasa Indonesia, itupun bila dipandang perlu dan tidak merusak pengertiannya. Selanjutnya untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia hendaknya diambil kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa yang serumpun.[175] Pada-akhirnya Pemerintah menetapkan berlakunya sebuah ejaan yang disempurnakan (EYD) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1972.

Kisah sastra Indonesia setelah merdeka adalah sebagai berikut: bersamaan dengan datangnya Jepang pada tahun 1942, terjadilah dua perkembangan yang mempengaruhi sastra Indonesia modern. Pertama bahasa Indonesia (sebagai wahana bagi sastra Indonesia) diharuskan oleh Jepang untuk dipakai sebagai bahasa pengantar untuk menggantikan bahasa Belanda. Kedua terhentinya terbitan *Pujangga Baru* dan tampilnya Chairil Anwar

---

173 Alisjahbana, "Sedjarah Tumbuhnya Bahasa Indonesia", *Pembinaan Bahasa Indonesia*, No. 6 Th. III, 1955 hal. 172.

174 *Pembinaan Bahasa Indonesia*, isi Kongres Bahasa Indonesia, Medan, 1954, hal. 69 – 70.

175 Harimurti Kridalaksana, "Pembentukan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Indonesia", *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Tiermin Manusia Indonesia Baru*, hal. 82 – 83.

dan kawan-kawan yang telah mencanangkan fase baru dalam sastra Indonesia. [176]

Pada jaman Kemerdekaan keadaan sastra makin berkembang. Para sastrawan mencari bentuk dari pelbagai budaya. Studi sastra dunia lebih dipergiat, sehingga para sastrawan dunia mulai mempengaruhi para pengarang Indonesia. Berlainan dengan sastrawan generasi sebelumnya yang orientasinya pada umumnya terbatas kepada sastra Belanda dan India, maka sastrawan sejak Kemerdekaan orientasinya meliputi seluruh dunia. Dengan demikian horison mereka menjadi lebih luas. Akibat daripada orientasi yang luas itu yalah adanya heterogenitas aliran di dalam sastra Indonesia.

Mengenai perkembangan sastra Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan dapat dikemukakan, bahwa dengan terpecahnya Republik menjadi daerah kekuasaan RI yang biasa disebut daerah pedalaman di satu pihak dan daerah pendudukan di lain pihak, timbullah perbedaan perkembangan para sastrawan di masing-masing daerah. Di pedalaman nada patriotisme lebih tegas terdengar. Bahkan sebagian sastrawan untuk sementara menggunakan penanya dengan senapan. Di kota pendudukan lebih terdengar semboyan "universalisme" atau "humanisme universil" [177] Suatu hal yang bukannya tidak dipergunakan oleh pihak Belanda untuk memperlemah semangat perlawanan orang Indonesia terhadap mereka.

Mengenai istilah Angkatan '45, sejak semula orang Indonesia sendiri sesungguhnya telah membahasnya, tetapi tidak pernah mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan bagi semua fihak. Sebenarnya istilah angkatan '45 pertama kali merupakan nama retrospektif sifatnya, yaitu nama yang hanya digunakan setelah Chairil Anwar menghasilkan sebagian daripada karya-karyanya.

Menurut Yassin, [178] istilah Angkatan '45 pertama kali digunakan oleh Rosihan Anwar dalam majalah *Siasat*, tanggal 9 Januari 1949. Istilah itu telah digunakan pula oleh Hazil Tanzil dalam *Pujangga Baru*, keluaran bulan November 1948, akan tetapi karena bulan itu terlambat terbitnya, sehingga diduga mungkin artikel Rosihan Anwar yang terbit lebih dulu. Jassin

176 Emmanuel Subangun, "Rapat Seniman-2 Sastra se-Indonesia di TIM tanggal 9 dan 10 Desember 1972", *Kompas*, 9 Desember 1972, hal. IV, IX.

177 Lihat *Siasat*, 22 September 1950.

178 Jassin, *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei*, Djakarta, 1955, hal. 189.

mengatakan, bahwa para penulis yang mulai memperkenalkan dirinya sepanjang tahun-tahun itu telah dikenal lebih dulu dengan pelbagai nama lain, sebelum istilah Angkatan '45 terkenal. Dalam artikelnya tentang Angkatan ini yang diberi judul "Rasa hidup Baru", dikemukakan sejumlah ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membedakan angkatan revolusi tahun 1945 dari Pujangga Baru. [179] Dalam menilai sastrawan Indonesia Angkatan '45 dan Angkatan Pujangga Baru, dinyatakan bahwa keduanya merupakan hasil pendidikan dan pengajaran kolonial Belanda. Mereka menentang Belanda sebagai penjajah, tetapi zat-zat yang mengalir dalam alam pikiran dan pendidikan mereka adalah hasil tanaman Belanda juga. Demikianlah dalam melihat sastrawan dari kedua angkatan tersebut, orang mau tak mau senantiasa melihat bayangan Angkatan '80 di negeri Belanda pada Angkatan Pujangga Baru. Demikian juga dalam membicarakan Angkatan '45, orang selalu tidak lupa menyangkutkan ingatannya kepada Angkatan sesudah Perang Dunia Pertama di negeri Belanda. Menurut Ajip Rosidi bukanlah hal yang kebetulan bahwa Chairil Anwar terpengaruh oleh Marsman, Slauerhoff dan Du Perron. [180]

Istilah Angkatan Terbaru sebenarnya muncul pertama kalinya pada Simposium Sastra dan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Sebelum Ajip Rosidi yang telah mempergunakan istilah tersebut, Nugroho Notosusanto sebagai Ketua Simposium terlebih dulu telah memperkenalkan istilah tersebut. Sebenarnya beberapa tahun sebelumnya Nugroho Notosusanto sudah melihat adanya perbedaan pada karya pengarang sebayanya dengan para pengarang yang oleh para penelaah sastra dinamakan Angkatan '45.

Dalam masalah periodisasi, Nugroho Notosusanto dalam ceramahnya di Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 26 Januari 1963 membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa "masa sesudah atau sejak 1950 merupakan periode baru dalam sejarah Sastra Indonesia". Antara lain dikatakannya sebagai berikut: Sastra-

179 *Ibid*, hal. 126 – 127.

180 Ajip Rosidi, "Sumbangan Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia kepada perkembangan Kesusastraan Indonesia", (Prasaran Simposium Sastra, Pekan Kesenian Mahasiswa Kedua di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960), dalam kumpulan tulisan Ajip Rosidi, *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir ?* Bharata, Jakarta, 1964, hal. 29 – 39.

wan-Sastrawan yang tampil kemuka dalam periode '50 tidak lagi berat-sebelah pada Belanda atau Eropa Barat: jangkauan orientasinya benar-benar meliputi seluruh dunia. Memang diakuinya bahwa sebagian besar dari mereka tidak lagi menguasai bahasa Belanda. Medium mereka untuk mengenali karya-karya luar negeri adalah bahasa Inggris. Mereka mulai berkembang tatkala negeri kita mulai dibanjiri buku-buku *"paperbacks"* yang relatif murah dari Amerika serta buku-buku lebih murah lagi terbitan Pustaka Bahasa Asing dari Moskwa dan Peking. Gairah untuk belajar dari sastrawan terkemuka diluar lingkungannya diimbangi dengan penghargaan mereka yang wajar kepada sastrawan-sastrawan Indonesia sendiri, yang mereka jadikan guru-guru mereka yang pertama. Demikianlah penyair-penyair periode '50 belajar azas-azas persajakan dari Chairil Anwar atau Sitor Situmorang, dan tidak lagi dari Marsman atau Slauerhoff. [181]

Sedang bagi pengarang-pengarang cerita pendek, maka yang menjadi guru mereka yang pertama adalah Pramoedya Ananta Toer atau Idrus, dan bukan Ilya Ehrenburg atau Hemingway. Unsur persajakan, mereka gali dari bahasa-bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia menjadi semakin kaya. [182]

Sementara itu Jassin dalam eseinya tahun 1951 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan kehidupan "Angkatan '45", ia sampai pada pendapat bahwa perbedaan antara para pengarang Angkatan Pujangga Baru dengan para pengarang Angkatan '45 tidak mengabdi kepada sesuatu isme, tetapi mengabdi kepada kemanusiaan, yaitu segala yang baik dari semua isme. Mereka tidak berpikir dalam istilah-istilah, tetapi hidup dari pusat pribadi manusia.

Dengan tidak menyebut dirinya nasionalis, atas dasar perasaan kemanusiaan mereka berdiri dipihak bangsanya, dengan tidak menyebut diri sosialis mereka menghendaki keadilan serta kesejahteraan sosial serta gaya expresi yang mendarah-daging, universil-nasionalis, revolusioner dalam sikap hidup dan visi. [183]

Khusus tentang masalah periodisasi, Nugroho Notosusanto

---

181 Ajip Rosidi, *Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah bahasa Indonesia*, Bandung, 1969, hal. 6, 7, dsb. Periksa juga tentang Angkatan Terbaru: A. Teeuw, *Modern Indonesia Literature*, The Hague, 1967, hal. 227 – 231.

182 *BASIS* (Majalah Kebudayaan), No. 7, tahun XII, April 1963, hal. 199 – 210.

183 Brosur Angkatan '45, Jajasan Dharma, 1951, periksa juga, H.B. Jassin, *Kesusastraan Indonesia Modern Dalam Kritik dan Esei*, Gunung Agung, Jakarta, Cetakan II, 1957, hal. 7 – 23.

mengemukakan periodisasi sejarah Sastra Indonesia sebagai berikut: Menurut pendapatnya keseluruhan Sastra Indonesia dapat dibagi atas dua bagian:

I. Sastra Melayu Lama.
II. Sastra Indonesia Modern.

Sastra Indonesia Modern dibagi atas dua masa yaitu :

I. Masa Kebangkitan (kurang lebih 1920 – 1945).
II. Masa Perkembangan (1945 – sekarang).

Masa Kebangkitan terdiri atas tiga periode :

1. Periode '20.
2. Periode '33.
3. Periode '42.

Sedang Masa Perkembangan dibagi dua periode:

1. Periode '45.
2. Periode '50.

Menurut Ajip Rosidi periodisasi itu lebih dapat diterima daripada semua periodisasi lain yang pernah dicoba orang tentang Sejarah Sastra Indonesia. Hanya saja ia menganggap pembagian seluruh sastra Indonesia menjadi dua bagian yaitu "Sastra Melayu Lama" dan "Sastra Indonesia Modern" tidaklah tepat. Nugroho Notosusanto dalam ceramahnya mengemukakan azas nasionalisme sebagai dasar seluruh periodisasi dalam sejarah sastra Indonesia. Karena itu dikemukakannya bahwa untuk bagian pertama sebaiknya jangan disebut Sastra Melayu lama, melainkan Sastra Indonesia Klasik yang tidak hanya melipuri karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa (daerah) Melayu saja, melainkan dalam semua bahasa daerah yang terdapat diseluruh kepulauan Nusantara, sehingga namanyapun lebih tepat disebut sebagai Sastra Nusantara Klasik. Dengan ini termasuk didalamnya Sastra Jawa, Sundá, Bali, Aceh, Makasar, Bugis dan lain-lain.

Periode setelah 1945 bukanlah 1950, melainkan tahun 1953. Tahun 1950 para pengarang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh periode berikutnya kebanyakan belum muncul. Meskipun ada baru satu atau dua saja. Pada tahun 1950 gelanggang sastra Indonesia masih mendapat ciri yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengarangnyapun kebanyakan berasal dari tokoh-tokoh sastra periode sebelumnya. Tahun 1953 terbit Majalah

Kisah yang mendapat perhatian serta memberi kesempatan yang besar kepada para pengarang yang muda-muda. Kemudian terbitlah majalah *Prosa, Seni, Tjerita*, ruang kebudayaan "Genta" dalam majalah *Merdeka* dan lain-lain. Sementara itu dalam redaksi majalah-majalah kebudayaan *Indonesia, Budaya, Kompas*, lampiran kebudayaan "Gelanggang", dalam Warta Sepekan *Siasat*, mingguan *Mimbar Indonesia* dan lain-lain terjadi perubahan redaksi atau policy redaksionil.

Para pengarang yang muda-muda pada tahun 1950 belum berarti. Karya-karya sastra baru muncul dan mendapat tempat yang menonjol justeru setelah terbitnya media berupa majalah-majalah dan ruangan-ruangan budaya yang telah disebutkan diatas. Dalam jangka waktu tahun 1953 hingga sekarang, Ajip Rosidi menempatkan pula satu periode lagi, karena adanya perbedaan-perbedaan yang khas, meskipun secara garisbesar barangkali tidak kelebihan. Sejak tahun 1961, ketika sistim demokrasi terpimpin sudah mulai menekankan kekuasaannya, timbullah suasana baru dalam sastra kita, yaitu semacam semangat perlawanan. [184]

Yang nampak jelas perbedaannya dengan yang lain adalah pengarang-pengarang komunis. Mereka mempergunakan sastra sebagai alat untuk memperjuangkan komunisme. Diantara para tokohnya terdapat antara lain: Njoto, Bakri Siregar, HR. Bandaharo, Bachtiar Siagian, A.S. Dharta (dengan nama-nama lain Yogaswara, Klara Akustia, Kelana Asmara, Rodji), M.S. Ashar dan kemudian juga Rifai Apin dan Pramoedya Ananta Toer. Mereka tergabung dalam organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dibina oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mengenai masalah daerah dalam sastra Indonesia dapat dikemukakan bahwa karena sifatnya, bahasa Indonesia mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas daripada bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Dengan bebas bahasa Indonesia mengambil serta memasukkan unsur-unsur yang dapat digunakannya dari segala bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Sedangkan bahasa daerah tidak mempunyai kemungkinan seluas itu serta tidak mempunyai kebebasan seleluasa

---

184 A. Teeuw, *Sastra Baru Indonesia*, hal. 138; Bujung Saleh, "Latar Belakang Kemasyarakatan Kesusastraan Indonesia", *Bahasa dan Budaya*, 2 Mei 1954, hal. 9; Periksa juga: Prof. Dr. A. Teeuw, *Pokok dan Tokoh*, Djakarta, 1958, hal. 22 - 23 dsb. jilid. I.

itu, karena sudah memiliki suatu tradisi dalam pemakaiannya; sebaliknya sifat-sifat bahasa daerah mempunyai suatu hal yang lebih menguntungkan daripada bahasa Indonesia. Bahasa daerah mempunyai lingkungan masyarakat tertentu yang menggunakannya dalam hidup sehari-hari, sedang bahasa Indonesia pemakaiannya terbatas pada lingkungan-lingkungan resmi dalam pertemuan-pertemuan resmi. Penggunaan bahasa daerah dilakukan dalam lingkungan terbatas, misalnya dalam keluarga-keluarga yang hidup dalam kota besar yang bersifat nasional. Selain itu karena keadaan bahasanya, sastra daerahpun lebih mempunyai akar serta lingkungan apresiasi yang lebih konkrit daripada sastra Indonesia yang terbatas dalam lingkungan tertentu. Selain itu pada umumnya sastra daerah mempunyai sastra klasik. Dari sastra klasik tersebut, dapat digali kekayaan-kekayaan kejiwaan, filsafat, watak serta lingkungan peradaban yang sudah terbentuk dalam tradisi. Beberapa sastrawan yang menulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan tulisan-tulisannya menunjukkan gejala bahwa yang menjadi tempat mereka berpijak adalah sastra daerahnya masing-masing. Sastra Melayu bukanlah menjadi milik seluruh sastrawan Indonesia, melainkan hanya terbatas pada para sastrawan yang berasal dari lingkungan daerah Melayu saja. Bukti nyata tampak, misalnya pada Amir Hamzah yang memang berasal dari lingkungan masyarakat yang memiliki Sastra Melayu klasik. Para sastrawan yang berakar pada sastra daerahnya masing-masing, seperti misalnya Ajip Rosidi, Rusman Sutiasumarga, Ramadhan K.H. berakar pada sastra Sunda. Sedang W.S. Rendra, Kirdjomuljo serta Soeripman berakar pada sastra Jawa. Selain itu ada juga sastrawan yang mencari akarnya pada tradisi Eropa yang diakuinya sebagai sastra dunia.

3. Perkembangan Seni.

Dalam tulisannya di majalah-majalah tahun 1953 almarhum Trisno Sumardjo mengemukakan peranan Persagi (Persatuan Akhli-Akhli Gambar Indonesia) yang didirikan di Jakarta pada tahun 1937. Menurut Sumardjo, meskipun yang bersangkutan bukan merupakan tokoh utama Persagi tetapi sedikit banyak mengalami masa itu, mengatakan bahwa menjadi pelukis dalam masyarakat kolonial serta semi-feodal berarti meletakkan diri di

luar tatahidup yang lazim, apalagi yang terhormat dalam pandangan khalayak. Menjadi pelukis praktis berarti pemberontakan terhadap impian keluarga "baik-baik" (menurut ukuran masyarakat kolonial)."[185] Karena itu bukanlah suatu hal yang ganjil bila para seniman bekas anggota Persagi mendukung secara spontan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Majalah *Seniman* yang diterbitkan dalam tahun 1947 di Surakarta menampilkan kombinasi antara semangat kerakyatan serta hasrat untuk hadir dalam kancah internasional. Masa kemerdekaan sebenarnya merupakan taraf ketiga bagi perkembangan senirupa di Indonesia. Pada masa itu mulai timbul kesadaran membentuk negara sendiri yang merdeka serta membangun rasa tanggungjawab dan percaya pada diri sendiri diantara para seniman. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Dalam tahun-tahun pertama, kesadaran hendak membela hak-hak azasi manusia ditekankan pada kaum muda. Kesadaran ini ditampung juga oleh para seniman sebagai manusia perasa yang menyatakan intuisinya dalam karya lukisan. Kadang-kadang cara penyampaian intuisinya kurang tepat, disebabkan pengetahuannya yang jauh dari cukup dengan hanya sempat terpupuk sedikit demi sedikit. Aspek sosial dari cara perkembangan demikian itu, tentu saja menunjukkan situasi yang lain sekali dari apa yang terjadi di Eropa atau Amerika. Disana calon-calon seniman secara teratur mendapat pelajaran tehnik, ilmu serta latihan. Di Indonesia hanya sedikit sekali jumlah para seniman yang pernah mengecap pendidikan secara baik.

Sebaliknya diantara yang telah berhasil mendapat pendidikan Barat, mereka tidak berhasil menyesuaikan pendidikan Barat yang diperolehnya dengan ciri-ciri ke-Indonesiaan. Akademi Senirupa mula-mula belum ada. Para pelukis mulai menguji diri pada umum, sambil mempelajari tehnik serta kemudian menuntut pengetahuan. Hal ini membawa keuntungan dan cacad. Keuntungannya ialah bahwa dari semula mereka belajar menyatukan diri dengan alam dan manusia di tanahairnya sendiri, menangkap serta mengolah gerak-gerik gejala masyarakat di sekitarnya, sehingga dengan demikian masalah-masalah alam dan manusia yang ada disekeliling telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya mereka lebih banyak merupakan

185 Gunawan Muhammad, "Kesenian dan Lingkungan", *Sinar Harapan*, 6 November 1972, hal. XI (edisi petang)

representant untuk tanahairnya daripada pelukis-pelukis sebangsanya yang berdiri di negeri asing atau oleh orang asing yang ada di sini. Timbulnya keinsafan menemukan hakekat seni dalam kehidupan bebas ini menyebabkan karya-karya mereka segar. Cacad bagi para seniman otodidak kita yaitu kurang dalam cara meneropong serta menilai secara ilmiah. Ilmu dan filsafat masih kurang dijadikan ramuan pembangunan karya seninya. Karena hal itu maka tak jarang ada pelukis yang tadinya berhasil gilang-gemilang karena intuisi dan spontanitas, kemudian menjadi membosankan. Meskipun demikian, dasar-dasar para pelukis "bebas" ini kelihatan jauh lebih baik dari mereka yang akademis. Hal ini disebabkan adanya kejujuran yang membimbing pada kebenaran. [186]

Mengenai masalah seni daerah dapatlah dikemukakan bahwa sebagai akibat meluasnya publikasi dalam pers, banyak orang-orang yang tinggal di daerah-daerah telah membaca atau mendengar perkembangan seni di ibukota negaranya, meskipun mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyaksikannya sendiri. Hal ini tidak mustahil merangsang mencoba hal-hal yang sama. Mengenai penyesuaian tradisionil untuk kehidupan modern hingga saat ini masih berada dalam tingkat percobaan. Seni tradisionil berhubungan erat dengan siklus perkembangan hidup manusia, misalnya, khitanan, perkawinan. Karena itu seni tradisionil bersifat sakral dan bukan bersifat hiburan.

Usaha-usaha untuk memodernkan seni telah merubah fungsi pertunjukan seni. Misalnya saja dalang, sekarang bukanlah guru yang "mengundal", melainkan hanya sebagai orang yang mempunyai keahlian dalam soal pertunjukkan wayang. Adegan-adegan yang simbolis juga berkurang. Dalam mempertunjukkan wayang golek di Sunda, misalnya pesinden yang tadinya kurang berfungsi sekarang mengambil peranan penting, bahkan demikian pentingnya, sehingga pernah ada masanya pesinden lebih tinggi daripada dalang, sejajar dengan wayang. [187]

Khusus perkembangan seni tradisionil menghadapi beberapa problema antara lain karena kurang digalinya dasar-dasar kreativitas yang asli dari seni tradisi oleh seniman-seniman daerah.

186 Trisno Sumardjo, "Kedudukan Senirupa Kita", *Almanak Seni 1957*, Badan Musjawarah Kebudajaan Nasional. Djakarta, 1958, hal. 128 – 130.

187 "Beberapa Pembicaraan Kebudayaan di Surabaya: Kesenian Daerah, Pembangunan Non-Materiil dan Masalah-masalah dalam cerpen," *Kompas*, 23 Juni 1972, hal. VI.

Hal-hal lain disebabkan adanya sikap belum tampak maju dan menggali secara sadar dari para seniman tradisi, serta masih adanya gejala umum diantara para seniman tradisionil yang cenderung bersikap tidak mau menerima yang baru dikenal. [188]

Lembaga tertinggi yang menyelenggarakan pendidikan seni-rupa dibuka pada tahun 1947 oleh Fakultas Tehnik, Universitas Indonesia yang pada tahun 1960 menjadi Institut Tehnologi Bandung dan dibentuk atas gagasan seorang guru Belanda bernama S. Admiraal dengan tujuan untuk mendidik guru-guru yang berwenang mengajar menggambar pada sekolah-sekolah lanjutan. Semenjak pimpinan berada pada tangan S. Soemardja serta dengan bantuan Ries Mulder serta guru-guru Belanda lainnya terdapat pula kesempatan untuk mendalami pengetahuan seni-rupa. [189]

Pertumbuhan senilukis yang telah mulai pada waktu tentara Jepang masih berada di tanah air kita, sekonyong-konyong mendapat kekuatan pendorong pada masa kemerdekaan.

Pada tahun 1946 atas inisiatif Sudjojono, Sumardjo, Sunindyo dan Suradji telah didirikan organisasi Seniman Indonesia Muda (SIM). Pelukis-pelukis lainnya yang tergabung dalam badan ini, atau yang ada hubungannya ialah: Sundoro, Zaini, Nasjah, Moh. Hadi, A. Wakidjan, Ismono, Sudiono, Sudibjo, Surono, Sjahri, Nahar, dan lain-lain. Pada tahun 1947 atas inisiatip pelukis-pelukis Affandi dan Hendra di Yogyakarta telah didirikan Pelukis Rakyat sebagai pecahan dari SIM. [190] Anggota-anggota barunya yang dididik oleh himpunan itu antara lain Rachmat, Batara Lubis, Tarmizi, Amrus. Secara horizontal, pelukis rakyat ini mengalami perkembangan paling banyak, dengan dibantu tokoh-tokoh Pemerintah. Para anggotanya tak hanya berkesempatan menjual banyak lukisan, tapi lapangan mereka diperluas dengan seni patung. Hasil-hasilnya yang dibuat secara apa yang disebut kolektif ialah patung Jenderal Soedirman didepan Gedung Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta, Tugu Muda di Semarang dan patung serta relief-relief di gedung Polisi Militer Jakarta. Kemudian di Yogya pun berdiri Pelukis Indonesia (PI),

188 Muqri Sukoco, Laporan lengkap hasil seminar kesenian di Surakarta, *Abadi*, 16 November 1972, hal. IV.

189 "Menyongsong Seperempat Abad Bagian Senirupa ITB" *Sinar Harapan*, 19 Juni 1972, hal. IX.

190 "Perkembangan Senilukis di Indonesia", Majalah Kebudayaan *Indonesia*, Tahun I, 1949, hal. 593 – 598.

mula-mula dipimpin oleh Sumitro, kemudian diganti oleh Solihin dan Kusnadi. Perkumpulan para pelukis muda ialah Pelukis Indonesia Muda (PIM), terbentuk tahun 1952, diketuai oleh Widayat. Paling awal di Yogya berdiri Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI) dengan ketua Djojongasmoro. Oleh pihak resmi didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) dengan pelukis-pelukis setempat sebagai guru. Akademi dibagi dalam lima bagian: senilukis, senipatung, seniukir, senireklame dan pendidikan guru gambar. Di Solo beberapa pelukis bergabung dalam Himpunan Budaya Surakarta. Di Madiun berdiri Tunas Muda tokoh tokohnya antara lain Sunindyo, Sedyono, Ismono dan lain-lain. Di Jakarta timbul Gabungan Pelukis Indonesia (GPI) dengan ketuanya Sutiksna, anggota-anggotanya: Nashar, Zaini, O. Effendi, Wakidjan, dan lain-lain. Pada tahun 1946 lahir perkumpulan angkatan muda: Matahari, pimpinan Mardian dan Nashar. Di Bandung pernah berdiri Djiwa Mukti pada tahun 1943 dengan tokoh-tokohnya Barli cs., St. Lucas Gilde (Sularko cs) dan golongan-golongan lain. Kecuali itu terbentuk perkumpulan Sanggar Seniman oleh Kartono Yudhokusumo pada tahun 1952 dan Cipta Pancaran Rasa oleh ketuanya Abedy. Pihak pemerintah mendirikan pula Akademi Senirupa di Bandung, dipimpin oleh S. Sumardja. Di Surabaya lahir Prabangkara (Ketua Karyono Js); di Malang berdiri Angkatan Pelukis Muda yang diketuai Widagdo. Di Medan lahir Angkatan Senirupa Indonesia (ASRI) pada tahun 1945 dengan tokoh-tokohnya Ismail Daulay, Tino S. dan lain-lain; di Bukittinggi berdiri organisasi Seniman Muda Indonesia (SEMI) dengan ketuanya Zetka, dengan anggota-anggotanya antara lain: AA. Navis dan lain-lain. Di Sulawesi beberapa pelukis bergabung dalam Wong Ken Weru: di Ubud (Bali) ada gabungan yang beranggotakan Anak Agung Gede Sobrat, Ida Bagus Made dan lain-lain.

Di samping melukis dan mematung, para pelukis juga giat di lapangan-lapangan lain yang sejenis. Banyak diantara mereka membuat poster, ilustrasi dan gambar kulit buku. Di Jakarta Zaini dkk. membuat dekor-dekor sandiwara; O. Effendi membuat design-design seni kerajinan. Di Yogya Surono menghasilkan cukilan kayu paling baik, disamping dia ada Widayat dan Zakariah. Kecuali itu ada percobaan-percobaan menggambari batik. [191]

191 Trisno Sumardjo, "Kedudukan Senirupa Kita", *Almanak Seni 1957*, hal. 132-135.

Mengenai perkembangan senitari, maka pada periode tahun 1945 – 1955 senitari di Indonesia pembaharuannya baru terbatas pada tehnik penyajian, yaitu dengan menyingkat waktu, memeras atau menyingkat cerita dan penyederhanaan. Selama periode 1955 – 1956 mulai tampil kreasi baru. Tetapi kreasi-kreasi itu masih merupakan pengolahan materi-materi atau elemen-elemen tari yang terdapat di Indonesia, baik dari tari klasik maupun tari-tarian rakyat. Kebebasan dalam berkreasi sudah mulai timbul, tetapi masih merupakan kebebasan terbatas. Dan perlu pula diketahui, pengaruh perkembangan politik dan sosial pada waktu itu terasa sekali dalam perkembangan tari. Dominasi komunis mengakibatkan tarian klasik yang dianggap berbau kraton dikesampingkan lalu muncul dimana-mana kreasi tari yang dianggap bertema kerakyatan dan kehidupan sehari-hari seperti tari layang-layang, tari tani, tari tenun, tari nelayan, tari koperasi, dan lain-lain. Perkembangan semacam ini terjadi di-mana-mana di seluruh tanah air. [192]

Pendidikan Konservatori Karawitan didirikan di Surakarta pada tgl. 27 Agustus 1950. Pendiriannya mendapat persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tgl. 17 Juli 1950. Maksud pertama mendirikan Konservatori Karawitan ialah untuk mempertinggi serta memperkembangkan Karawitan. Konservatori ini mempunyai bagian-bagian Perguruan. Pendidikan, Perpustakaan, Museum dan Pergelaran. Dalam lingkungan perguruan disiarkan dan dilatih soal pengetahuan karawitan modern sehingga pada siswanya diharapkan dapat memiliki tehnik menabuh serta mengembangkan bakat seninya. Dalam bagian ini diajarkan tentang niyaga karawitan (instrumentalis dan vokalis), empu karawitan (pengetahuan tentang komponis), guru karawitan dan ahli karawitan (musikoloog). [193]

Selama periode 1942 – 1945 ditemukan lagu-lagu dengan bentuk baru yang berlainan dengan lagu-lagu keroncong asli. Sebenarnya timbulnya bentuk dan corak baru lagu-lagu itu tidak terjadi pada masa Revolusi, tetapi memang telah ada sebelumnya. Jiwa revolusi inilah yang menyebabkan terjadinya perkembang-an-perkembangan dalam penggubahan lagu-lagu. Dengan jiwa revolusi maka timbul kebebasan, menghilangkan rasa rendah dan

192 "Masalah Modernisasi Senitari di Indonesia," *Berita Yudha*, 3 Juli 1972, hal. VII.

193 *Siaran dan Masjarakat Indonesia*, 1950, hal. 36.

memberikan semangat keberanian. Mengenai bentuk lagu-lagu dalam masa revolusi 1945 – 1949 terutama lagu langgam belum meningkat bentuk "lagu" dari langgam ini hanya mewujudkan empat kalimat saja. Disamping itu ada bentuk lain, misalnya; *potpouri*. Beberapa pengarang telah membuat rangkaian dengan lagu-lagu daerah kepulauan Indonesia. Selama itu juga terdapat karangan yang maksudnya menggambarkan riwayat dengan merangkai lagu-lagu baru dan lama, seperti misalnya lagu "Jaya Wijaya". Menurut ritme atau iramanya, dalam lagu-lagu baru dimasa Revolusi 1945 – 1949 dapat dikatakan irama lain daripada sebelumnya. Tentang corak dan tingkatan raras internasional atau lebih bercorak kuat. Disamping itu ada juga pencipta-pencipta lagu yang menciptakan lagu tanpa memakai tingkatan raras internasional, sehingga mewujudkan tingkatan raras pelog. Menurut para ahli musik maka dengan sendirinya rasa ketimuran dapat dengan mudah diterjemahkan. Sayang sekali, bahwa coraknya Barat. Menurut para pengamat dan kritikus pada waktu itu isi dari lagu-lagu yang diterjemahkan dengan rangkaian titiraras telah berbeda dengan pada isi lagu keroncong yang lama. Dilihat dari harmoninya, menurut para kritikus pada waktu itu, mengalami kemajuan. Keroncong asli disusun dengan harmoni sederhana. Dilihat dari segi pengetahuannya para pengamat waktu itu berpendapat bahwa meskipun sebagian seniman kita tidak mendapat pendidikan guru, tetapi baik dan luas. Mengenai musik pengiringnya, sering lagu-lagu langgam disesuaikan bersama orkes yang lengkap. [194]

Mengenai masalah penggubahan lagu-lagu selama masa perjuangan selain muncul penulis-penulis musik Indonesia juga terdapat penulis-penulis lagu keroncong. Lagu-lagu langgam yang telah disebut diatas yang sudah dimulai dekat Kemerdekaan mendapat jalan yang subur setelah Pengakuan Kedaulatan. Kesempatan dan pertumbuhan ini mencapai "puncaknya" pada Sjaiful Bahri dan Iskandar dari RRI Jakarta. Kemajuan-kemajuan ini tidak bisa dilepaskan daripada yang dibawakan oleh penulis-penulis musik Belanda seperti Jos Cleber dan Tom Diessevelt. Mereka ini membawakan aransemen-aransemen daripada lagu-lagu keroncong lama dan langgam. Dalam hal ini Jos Cleber mempunyai orkes besar yang ketika itu bernama Orkes Cosmopolitain. Sesudah perginya penulis-penulis musik Belanda ini, peranan

194 Dr. R.M.T. Padmonagoro, "Seni Suara Indonesia dalam Revolusi," *Siaran dan Masjarakat Indonesia*, 1950, hal. 37.

berpindah pada pemuka-pemuka keroncong di RRI Jakarta. Sjaiful Bahri kemudian menjabat pimpinan Orkes Studio Jakarta dengan anggota lebih dari 50 orang yang mencontoh orkes Jos Cleber. Mulailah Sjaiful Bahri, Iskandar dan Ismail Marzuki menulis aransemen-aransemen untuk OSD (Orkes Studio Djakarta), juga dari lagu-lagu keroncong. Tapi sebetulnya kemajuan dalam arti yang baik berbeda dengan Jos Cleber yang mampu untuk bekerja dengan orkes besar, maka tak demikian dengan Sjaiful dan kawan-kawan. Kemajuan mereka tidak seperti yang diharapkan karena kemampuan teknis untuk mencipta, mengaransir dan memimpin orkes besar, rata-rata belum dipunyai oleh musikus-musikus kita.

Dalam pada itu keadaan didalam negeri setelah selesainya Perang Kemerdekaan, sedang mengalami kekacauan di pelbagai lapangan, dan Pemerintah belum dapat mengatasinya, sehingga masyarakat menjadi sinis maka muncul pula lagu-lagu populer yang merupakan lagu-lagu sindiran yaitu sindiran terhadap keadaan yang kacau, korupsi, dan sebagainya. Orang banyak hendak melampiaskan perasaan jengkelnya pada lagu-lagu seperti "Aku Kepala Jawatan yang tidak korupsi", "Impian semalam". "Lenggak-lenggok", dan lain-lain. Lagu-lagu populer ini memang bersifat spontan dan segar. Sayang bahwa pada suatu ketika timbul peniruan terhadap lagu-lagu tersebut, yang mengutamakan erotik dan malah ada yang sudah dibuat-buat sehingga membosankan untuk mendengarkannya. Juga penggunaan aransemen-aransemen terhadap lagu-lagu populer tersebut oleh orkes seperti OSD menurut para akhli musik makin merusak kesegaran lagu-lagu sindiran tersebut. Disamping itu ada lagu-lagu ciptaan yang menggugah rasa kebangsaan, agitasi, menyatakan keindahan alam; selain itu adapula yang membuat lagu untuk anak-anak.

Tetapi sementara itu lagu-lagu dalam tujuan seninya berjalan dengan suburnya pula. Lagu-lagu ini baru datang terbelakang dengan munculnya lagu-lagu corak Simandjuntak.[195] Dan akhirnya lagu-lagu Amir Pasaribu dan R.A.J. Sudjasmin. Cornel Simanjuntak sebagai produk Revolusi banyak menghasilkan lagu-lagu perjuangan, tapi ada juga lagu-lagunya yang bersifat lyris. Lagu-lagu ini merupakan langkah pertama kelagu-lagu seni, yang diusahakan sendiri oleh penciptanya yang banyak melihat pada pencipta lagu di Eropa seperti Schubert. Selama tahun 1943 – 1945 merupakan tahun-tahun produktif bagi Cornel Siman-

195 "Gema Suara", Majalah Bulanan *Indonesia*, (6 Juni 1950), hal. 354 – 356.

djuntak meskipun pada waktu itu sebagian ciptaannya berbentuk lagu-lagu mars. Diantaranya lagu-lagu ciptaannya antara lain terdapat "Teguh Kukuh Berlapis Baja" (Asia Berpadu), "Sorak-sorak bergembira", "Maju Tak Gentar", "Padamu Pahlawan", "Mars Madjapahit" dan "Mars Pembela Tanah Air". Lagu diatas diciptakan pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang dan menjelang Kemerdekaan. [196] Yang lebih berhasil dalam lagu-lagu seni adalah Amir Pasaribu yang karena studi dan bakat telah melahirkan beberapa kumpulan lagu-lagu seperti yang diterbitkan oleh "Indira": *Suka menyanyi.*

Dalam lapangan musik vokal dengan bentuk-bentuk yang besar, belum ada yang bisa dikemukakan. Berlainan dengan bentuk instrumental yang melihat waktu yang singkat dan keadaan sekarang sudah bisa dibanggakan. Dalam hal ini komponis Amir Pasaribu yang mengambil tempat yang terpenting. Dari tangannya telah lahir beberapa buah sonata untuk piano, variasi-variasi, ciptaan untuk biola dan beberapa buah musik kamar. [197]

Tentang perkembangan senidrama, usaha-usaha mempertinggi derajat serta mutu kesandiwaraan umumnya terutama berpusat pada Serikat Artis Sandiwara. Usaha-usaha badan ini telah menemui jalan buntu disebabkan kegelisahan masyarakat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah politis dan ekonomis. Seringkali kepentingan-kepentingan seni terdesak oleh kepentingan politis, hingga pada masa Revolusi timbul anggapan bahwa seni itu adalah suatu kemewahan dalam jaman perjuangan. Sedang mereka yang harus berjuang melawan segala prasangka ini, masih tetap yang sejak jaman pendudukan Jepang tidak mendapat kesempatan istirahat, hingga dapatlah dimengerti, bahwa daya pendorong yang ada pada merekapun sudah sampai pada batasnya.

Meskipun dalam waktu 3 tahun setelah Kemerdekaan tokoh-tokoh seni diberbagai tempat di Jawa berusaha menggiatkan perkembangan seni nasional, tetapi mengingat keadaan dan kesempatan, mereka belum mendapat sambutan yang layak. Terutama pada seni sandiwara yang pada umumnya memang menjadi kaca masyarakat yang tidak membohong.

---

196 Frans. F. Harahap. "In memoriam Cornel Simandjuntak," *Sinar Harapan*, 13–9–'71, hal. VI.

197 J.A. Dungga. *Studi Pendahuluan Perkembangan Musik Indonesia.*

Selanjutnya setelah Kongres Kebudayaan pada bulan Juni 1949 di Magelang, mulai agak kentara timbulnya suatu politik kebudayaan yang agak pasti. Didirikanlah Institut Cinedrama yang mendapat sokongan penuh dari pemerintah. Tetapi umurnya tidak panjang, karena meletusnya Aksi Militer II telah mengakhiri terlaksananya suatu rencana yang mungkin bagus dan indah.[198]

Mengenai kegiatan Cinematografi di zaman Revolusi, di Yogya didirikan 2 buah perusahaan film yaitu Cinedrama dan Yayasan Hiburan Mataram oleh almarhum Dr. Huyung yang seperti diketahui telah membuat film "Antara Bumi dan Langit", dan kemudian dirobah menjadi "Frieda". Dalam film itu diperkenalkan pemain baru Grace, seorang gadis Indo. Grace dan Nana Mayo kemudian memegang peranan utama dalam film "Olahraga". Sementara itu perusahaan Tionghoa yang ditutup di masa Jepang dibuka kembali. Sesudah itu didirikanlah Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) dibawah pimpinan Usmar Ismail dengan rekan-rekannya Surjosumanto, Djajakusuma, dan lain-lain. Sebelum itu Persari (Persatuan Artis Republik Indonesia) yang berasal dari rombongan sandiwara Pancawarna di zaman Jepang, dibawah pimpinan Djamaluddin Malik telah muncul pula. Pada tahun 1952 timbul lagi disamping kedua studio tersebut Surya Film Trading, Satrya Drama Film dan lain-lain.

Perusahaan-perusahaan film Indonesia tersebut tergabung dalam PPFI (Persatuan Produsen Film Indonesia) milik bangsa Indonesia dan asing, berjumlah lebih kurang 20 buah. Dari jumlah 20 perusahaan ini termasuk PFB (Perusahaan Film Negara). Sedang jumlah perusahaan film milik bangsa Indonesia sendiri mula-mula hanyalah 7 buah: Persari, Perfini, Pahlawan Merdeka Film Coy, Titien Sumarni Motion Picture, Pesfilm (Di Medan), Radial Film dan Rafco. Jumlah semua studio film juga hanya ada 7 buah, yaitu: PFN, Persari, Perfini, Bintang Surabaya, Garuda Film Corp., Tan and Wong Bros Film Coy and Golden Arrow.

Konkurensi yang dihadapi oleh perusahaan film Indonesia (Nasional) tidak sedikit, bukan saja dari pihak perusahaan Cina, tetapi juga dari pihak Perusahaan Film Negara (PFN), sebab instansi tersebut tidak saja mengusahakan pemuatan film doku-

199 Usmar Ismail, "Sandiwara dan Masjarakat", *Majalah Indonesia*, Th. I, Jakarta, 1949, hal. 144 – 148.

menter, akan tetapi juga turut membuat film cerita seperti: "Inspektur Rachman", "Sekuntum Bunga di tepi Danau", dan lain-lain.

Produksi Perfini yang pertama adalah: "The Long March" atau "Darah dan Doa", mengenai perjalanan Divisi Siliwangi disusul oleh: "Enam Jam di Yogya".[199] Dalam perkembangannya kemudian, yaitu disekitar tahun '55-an banyak pengusaha-pengusaha film yang menutup studionya. Timbulnya persaingan berat dari India, serta tak adanya jaminan dari pemerintah dan soal tuntutan PPFI dalam menghadapi persaingan dengan film asing, serta lahirnya "Konsepsi Presiden" yang dipengaruhi oleh golongan Komunis dengan doktrin "politik adalah panglima", telah menimbulkan ketidak-tenteraman perasaan diantara para seniman yang berkecimpung dalam dunia film seperti juga pada seniman lain. Selanjutnya muncullah tokoh-tokoh seniman dari golongan komunis yang mendukung konsepsi Presiden Sukarno dan mendesak agar seluruh kehidupan seni diperpolitikan sesuai dengan garis partai mereka, seperti: Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer dan Kotot Sukardi. Demikianlah maka di dalam tubuh PPFI timbul ketegangan antara para pendukung Konsepsi Presiden dengan golongan yang tidak menyetujui bahwa para artis film harus berpolitik praktis. Akhirnya golongan komunis (Lekra) berhasil mempengaruhi PPFI, sehingga ditengah-tengah kancah pergolakan dunia artis film itu muncullah istilah: "Artis film yang berpolitik". Move yang dilancarkan oleh beberapa artis film yang mendukung "Konsepsi Presiden" telah mempertajam perkembangan antara fihak pengusaha dengan artis film yang tidak berpolitik praktis. Oleh AS Bey, salah seorang anggota Perpefi yang aktif, diusulkan agar diadakan simposium film dengan acara "Artis film dan Politik". Pada tanggal 8 September 1957 diadakanlah symposium film tersebut bertempat di Aula Universitas Indonesia. Para pemrasaran dalam symposium tersebut pada umumnya tidak menyetujui bahwa para artis film harus berpolitik.[200]

Mengenai perkembangan seni bangunan dapat dikemukakan bahwa keadaan bangunan di kota-kota pada umumnya

---

199 "Kegiatan Cinematografi di Indonesia", *Gema Pemuda Al-Irsjad*, No. 6, th. III, September 1956.

200 Hasil symposium Film Pertama dari Persatuan Pers Film Indonesia (PERPEFI): *Artisfilm dan Partai Politik*, Jakarta, Desember 1957.

mengambil tempat tak berketentuan dan tak melaraskan diri dengan keadaan alam. Sekolah-sekolah, kantor-kantor besar, toko, gedung tua, pondok rakyat, berselang-seling sepanjang satu jalan atau dalam satu bagian kota yang seharusnya mempunyai ketentuan pasti. Corak, isi dan rupa yang tak berketentuan. .

Sementara itu keadaan bangunan di kampung-kampung atau di desa-desa yang jauh letaknya dari kota, kebanyakan bangunan-bangunan yang ditemui masih berpegangan kepada corak lama, serta didirikan dengan bahan-bahan yang tak bisa bertahan-lama. Hal ini disebabkan lemahnya ekonomi rakyat. Diantara bangunan-bangunan itu ada yang mengikuti arus bangunan kota, ada juga yang dengan meniru bentuk luarnya saja. Pandangan total dari desa-desa kehilangan perasaan garis keindahan pembentuk rupa, serta ketinggalan beberapa abad dari kemajuan. Selanjutnya ada bangunan pada beberapa daerah yang seolah-olah tak merasa bahwa keadaan sudah meminta patokan-patokan baru, seperti di kepulauan Indonesia yang tak begitu mengenal budaya Barat. Ruang atau tempat masyarakat ini masih mempunyai keindahan bentuk dan isi yang asli. [201]

4. Media Komunikasi Massa

Dengan berdirinya Republik Indonesia, maka kehidupan pers pada awal kemerdekaan berkembang dengan semangat revolusi. Suratkabar-suratkabar yang terbit di daerah Republik aktif ikut serta menghidupkan semangat perjuangan. Dengan terjadinya blokade Belanda, hubungan dengan dunia luar menjadi sulit. Hanya dengan komunikasi radio, maka berita-berita tentang perjuangan memberikan bahan baik bagi pers luar negeri ataupun dalam negeri. Didaerah-daerah pendudukan Belanda, suratkabar-suratkabar berbahasa Indonesia pada umumnya menunjukkan sikap anti Belanda. Dibandingkan dengan kondisi persuratkabaran didaerah Republik, kondisinya lebih baik. Para penerbit suratkabar didaerah pendudukan Belanda menghadapi saingan dengan suratkabar yang disponsori oleh Dinas Penerangan Belanda. Akan tetapi selama masa tersebut jumlah pembaca suratkabar berbahasa Belanda menurun. Hal ini memberikan peluang bagi

---

201 O. Effendi, "Seni Bangunan di Indonesia", *Gema Suasana*, No. 2, Februari , 1948 hal. 99 – 101.

pemasaran suratkabar berbahasa Indonesia. Membaca suratkabar berbahasa Indonesia pada masa itu menunjukkan sikap solidaritas dengan Republik.

Mengenai banyaknya halaman, rata-rata setiap suratkabar terdiri dari empat halaman. Pemasukan iklan sangat kecil jumlahnya. Pada umumnya penerbit perusahaan-perusahaan suratkabar pada masa itu tidak menitikberatkan usahanya mencari keuntungan. Harga suratkabar relatif rendah. Dengan mulai adanya seleksi dari masyarakat terhadap suratkabar, maka para penerbit beserta para pembantunya berusaha meningkatkan mutunya. Dalam kompetisi ini kwalitas pemberitaannya memegang peranan penting. Akibat kompetisi ini maka terjadi suatu suratkabar terpaksa gulung tikar atau muncul suratkabar yang baru lagi.

Di daerah Republik beberapa golongan politik mulai menggunakan suratkabar untuk kepentingan perjuangan golongannya, berita-berita yang ada hubungannya dengan perundingan-perundingan Belanda, keinginan-keinginan pemerintah serta hubungan internasional Indonesia digambarkan lebih tajam.

Ketika Belanda melancarkan aksi militer yang kedua, beberapa bulan setelah terjadinya pemberontakan Madiun, beberapa suratkabar di daerah pendudukan Belanda menghilang dari peredaran sedang sebagian lagi ada yang bekerjasama dengan Belanda. Jumlah suratkabar di Indonesia selama berlangsungnya aksi militer Belanda kedua, berdasarkan laporan UNESCO sampai dengan bulan April 1949, adalah 81 suratkabar dengan jumlah oplahnya 293.000 exemplar sehari. Banyak suratkabar pada masa itu yang mencapai oplahnya 500 exemplar sampai dengan 5.000 exemplar. Rata-rata terbit dengan 4 halaman.

Keadaan persuratkabaran sampai dengan akhir Desember 1948 lebih baik, karena mendapat 124 suratkabar dengan oplahnya 405.000 exemplar.[202] Setelah Pengakuan Kedaulatan persuratkabaran mengalami kemajuan. Dari 75 suratkabar, 45 yang berbahasa Indonesia dengan jumlah opahnya 413.700 exemplar, pada akhir tahun 1949, kemudian bertambah lagi menjadi 166 suratkabar (96 yang berbahasa Indonesia) dengan jumlah oplahnya 1.043.450. Keadaan ini berlangsung sampai dengan akhir tahun 1957. [203]

202 UNESCO, *World Communications* (1951), hal. 86.

203 Lembaga Pers dan Pendapat Umum, *Almanak Pers Indonesia 1954 – 1955*, hal. 36; *Almanak Pers Indonesia 1957*, hal. 50.

Suratkabar yang berbahasa Belanda berjumlah 13 dengan oplahnya 103.500 exemplar. Pada tahun 1957 dengan adanya aksi-aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, suratkabar berbahasa Belanda lenyap dari peredaran. Dalam masa yang sama suratkabar berbahasa Cina ada 17 dengan jumlah oplahnya berkisar di sekitar 84.300 exemplar sampai dengan 129.500 exemplar. Suratkabar berbahasa Inggris dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1957 mencapai oplah 25.000 exemplar.

Pada jaman Demokrasi Liberal dengan adanya sistim pemerintahan parlementer, maka kekuasaan berada di tangan Kabinet. Partai-partai oposisi yang berada di luar pemerintahan dengan menggunakan suratkabarnya melemparkan rasa ketidak-puasannya kepada pemerintah. Sikap sinis publik terhadap pemerintah-dibeberkan oleh suratkabar.[204]

Bagi perkembangan suratkabar selama jaman Liberal yang terpenting yalah diselenggarakannya Seminar Pers di Tugu, Bogor dari tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 1955, yang dihadiri oleh 29 orang peserta dari 12 orang peninjau, terdiri dari wakil-wakil 17 Harian serta wakil-wakil instansi Pemerintah.

Pers daerah kita pada waktu itu masih melakukan konsolidasinya, malahan dalam banyak hal juga masih harus meletakkan dasar-dasarnya. Menurut statistik, Jakarta pada tahun 1955 berpenduduk 2,5 juta orang, mempunyai 24 harian, terbagi menurut bahasanya, yaitu: 14 berbahasa Indonesia, 3 berbahasa Belanda, 2 berbahasa Inggris dan 5 berbahasa Cina. Banjarmasin yang hanya berpenduduk 65.000 orang memiliki 5 buah suratkabar, sedang Medan yang berpenduduk 77.000 orang mempunyai 16 suratkabar, suatu jumlah yang agak banyak selisihnya, bila dibandingkan dengan kota-kota daerah lainnya. Palembang yang berpenduduk 100.000 pada tahun 1955 memiliki 2 suratkabar.

Dengan angka-angka perbandingan di atas tampak bahwa satu tempat tampaknya kebanyakan jumlah suratkabarnya, sedang tempat lain masih kurang. Tetapi semua rata-rata memperlihatkan suatu kedudukan yang belum begitu kuat, bahkan seringkali amat lemah. Masyarakat pembacanya belum luas,- sedang di daerah menjadi rebutan pula dari beberapa suratkabar, sehingga dengan sendirinya sukar dapat memberi suratkabar itu

204 John H. Sullivan, "The Press and Politics in Indonesia", *Journalism Quarterly*, 44, (1967), 102 – 104.

suatu kemungkinan hidup yang layak. Dengan sendirinya pula perusahaan suratkabar daerah merupakan *kleuterbedrijven* (perusahaan kecil) yang pada dasarnya hanya dapat memberi hidup pada staf pegawai yang sangat terbatas.

Dilihat dari segi komersiilnya maka pers daerah memang kurang menguntungkan. Faktor penduduk di suatu kota dimana suratkabar diterbitkan merupakan unsur yang penting. Di kota yang jumlah penduduknya sedikit sudah barang tentu jumlah langganan suratkabar lebih sedikit daripada kota yang penduduknya banyak. Faktor ekonomi dan perdagangan serta taraf kecerdasan penduduk juga mempengaruhi maju-mundurnya suratkabar. Di kota-kota besar yang penduduknya banyak, perdagangan dan perindustrian maju, cukup banyak orang yang membutuhkan suratkabar untuk santapan rohani, sehingga dengan sendirinya oplah suratkabar disitu besar. Begitu pula soal perhubungan dengan daerah-daerah sekitar kota-kota besar tadi, merupakan faktor-faktor yang menentukan perkembangan hidupnya suratkabar yang terbit di kota tadi.

Di mana peredaran surat kabar ke daerah-daerah sekitar kota tadi terhambat, mungkin sebabnya yalah karena kerusakan jalan, kurangnya kendaraan, kesulitan pengangkutan laut dll. maka tidak mungkin suratkabar berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan persurat-kabaran ditahun 50-an di Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan daerah-daerah lainnya yang mengalami kesulitan perhubungan. Disamping faktor perhubungan yang merupakan penghambat maka percetakan pun dapat merupakan penghambat pula.

Di kota-kota dan daerah-daerah yang tidak mempunyai percetakan modern, dimana masih dilakukan handzet dan mesin cetak tua untuk menerbitkan suratkabar, sudah barang tentu hasil/produksinya dilihat dari sudut typografie kalah bagus dibandingkan dengan hasil percetakan modern. Selain itu soal iklan pun merupakan faktor yang menentukan hidup matinya suratkabar. Iklan yang banyak dan besar-besar akan menjamin kehidupan suratkabar, di samping para langganan.

Di kota-kota besar seperti Medan, Bandung, Surabaya, dapat hidup lumayan, dibandingkan dengan suratkabar di kota-kota kecil yang serba kurang segala-galanya. Mengenai kelambatan kemajuan pers daerah, disebabkan karena kebanggaan akan pers

daerahnya sendiri masih kurang terdapat pada daerah masing-masing. Hal lain mungkin juga berpangkal pada sebab lain lagi, karena pers daerah sendiri belum memperlihatkan sifat-sifat yang layak untuk dijadikan kebanggaan bagi daerah yang bersangkutan. Agaknya hal inilah yang menjadikan sebab, mengapa orang daerah dalam soal pers seringkali berkiblat kepada pers ibukota. [205]

Mengenai sifat pers Indonesia, tidak dapat disangkal, adalah suatu pers regional. Artinya, tidak terdapat pemusatan atau konsentrasi surat kabar pada suatu tempat, misalnya di ibukota, akan tetapi tersebarnya tempat-tempat suratkabar diterbitkan adalah merata. Ditiap provinsi terdapat suratkabar, besar ataupun kecil. Dari jumlah 78 buah harian di seluruh Indonesia (menurut keadaan 1 April 1954, lihat daftar Kementeriaan Penerangan, Bagian Soal-soal Pers & Grafika), 15 harian terbit di Jakarta, selebihnya di daerah-daerah, berarti kurang lebih 20%. Keadaan itu dewasa ini masih kurang lebih sama. Pemakaian istilah pers regional itu baru bisa dibenarkan, apabila telah diperiksa perimbangan antara ibukota dan daerah didalam jumlah peredaran dan daerah peredaran suratkabar.

Di Indonesia dapat dilihat, sesuai dengan surat izin pemberian kertas oleh Kementeriaan Penerangan tgl. 1 April 1954, ke 15 harian Ibukota menyatakan oplah total 188.500 sehari, sedang oplah total harian-harian daerah adalah 321.650. Perbandingan ini menunjukkan kelebihan di pihak pers daerah. Mengenai peredarannya, pada umumnya suratkabar yang terbit di ibukota provinsi mempunyai daerah peredaran semata-mata di dalam kota dan di lingkungan provinsi yang bersangkutan. Jarang sekali, kecuali pada satu-dua suratkabar daerah, peredarannya melampaui secara luas batas-batas provinsi atau kotanya. Dari hal-hal ini dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa sifat pers Indonesia adalah pers regional.

Pers ibukota pertama-tama harus melayani keperluan rakyat yang berdiam di Jakarta dan sekitarnya. Pers ibukota umumnya menghidangkan berita-berita yang bersifat nasional. Selanjutnya karena struktur negara kita serta iklim politik dan usaha-usaha perdagangan besar sangat sentralistis sifatnya, artinya segala-gala-

---

205 "Pidato Sambutan Sekretaris Djendral Kementeriaan Penerangan Harjoto Joedoatmodjo pada pembukaan Seminar Pers di Tugu, Bogor tgl. 24 Juli 1955", *Warta dan Masa*, No. 1 s/d 6, (1955/1956), hal. 1, 2.

nya diatur dan ditentukan dari pusat. maka mau tidak mau perhatian rakyat besar sekali terhadap suratkabar Ibukota. Adanya minat pembaca dengan sendirinya dimanfaatkan oleh pers ibukota. Faktor inilah yang menyebabkan suratkabar ibukota masuk ke daerah-daerah. Pemasukan surat kabar ibukota ke daerah-daerah ini dibatasi oleh faktor-faktor geografis serta perhubungan.

Daerah-daerah yang letaknya berdekatan dengan ibukota serta mudah dicapai, merupakan prasarannya. Daerah-daerah di seluruh Jawa dan Sumatra Selatan dapat dicapai dalam satu hari itu juga dari ibukota. Dari kenyataan tersebut tampaklah betapa suratkabar ibukota mendapat pasaran yang subur, terutama suratkabar yang tinggi mutunya.

Pada umumnya pers ibukota mempunyai tenaga-tenaga kewartawanan serta peralatan dan percetakan yang terbaik di dalam negeri kita. Pers daerah mempunyai fungsi melayani keperluan rakyat di lingkungan tempat ia diterbitkan. Kadang-kadang terdapat pula isi pemberitaan belum begitu dipahami oleh pers daerah, sehingga kadang-kadang kita memperoleh kesan seolah-olah hampir tidak terdapat perbedaan antara suratkabar yang terbit di Jakarta dengan yang terbit misalnya di Surabaya. Politik dan kecenderungan pemberitaannya nampaknya sama saja dan sudah barang tentu pers daerah dengan demikian ketinggalan dari pers ibukota. yang duduknya lebih dekat ke pada unggun api. Baru kemudian timbul kesadaran, bahwa pers daerah pertama-tama harus mencerminkan keadaan di daerah itu sendiri. Dengan demikian maka suratkabar daerah mulai membedakan dirinya dengan tegas dari suratkabar Jakarta. [206]

Dalam memberikan kriterium perbedaan pers pusat dengan pers daerah, yang ditentukan adalah tempat terbitnya. Pers pusat terbit di ibukota, sedang pers daerah terbit disuatu ibukota provinsi, atau hanya dalam suatu kota besar saja. Sebenarnya hal ini pun bukan suatu perbedaan, baik pers pusat dan daerah, tidak ada perbedaan esensiil. Tetapi meskipun demikian kita masih menggunakan perkataan pers pusat dan pers daerah. Untuk meng-aksentuasi perbedaannya. maka orang mengatakan bahwa pers daerah itu bersifat kedaerahan, provinsial, *kleinsteeds*, tidak kosmopolitis, dsb. Pers daerah timbul. mungkin karena adanya

206 Rosihan Anwar, "Apakah persaingan antara Pers Ibukota dengan Pers Daerah?" *Warta dan Masa*, No. 1 s/d 6, (1955/1956), hal. 28 – 34.

Perpustakaan
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Pembinaan Kebudayaan
Sejarah dan Nilai Tradisional

kebutuhan dalam masyarakat di daerah. Disini yang dimaksudkan dengan daerah yalah kota tempat terbitnya pers itu dan wilayah sekitarnya, jadi juga daerah pedesaan. Dengan demikian maka dalam pemberitaannya, pers daerah mau tidak mau harus mempertimbangkan dan memperhatikan keinginan-keinginan pembacanya di dalam wilayah penyebarannya yang meliputi dua macam suasana masyarakat, yaitu kota dan pedesaan. Dalam komunikasi dengan dunia ilmu, kadang-kadang timbul masalah, karena kadang-kadang diambil sikap saling menyalahkan. Pada umumnya karyawan-karyawan pers yang menghadapi masalah ini sering menyalahkan dunia ilmu. Beberapa pengamat masalah ini menyatakan bahwa ilmiawan dianggap mempersulit pada karyawan pers, karena mereka sengaja menggunakan bahasa "tinggi-tinggi", serta tidak mau mencoba menjelaskan kegiatan ilmu kepada orang awam tanpa "penuh teori". Sebaliknya jika berbicara dengan ilmiawan, maka petugas-petugas media komunikasi-masalah yang dianggap menjadi pangkal kesulitan-kesulitan. Sebagian para ilmiawan berpendapat bahwa wartawan tidak mau berusaha mengerti tentang ilmu serta hanya mau memberitakan hal-hal yang sensasionil. Meskipun kedua pendapat tersebut sedikit banyaknya ada benarnya, tetapi tidak setajam yang dibayangkan. Sebenarnya masalah seperti ini timbul, karena adanya pertentangan watak yang azasi antara kegiatan-kegiatan dunia peneliti dan dunia mass-media. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada persamaan antara keduanya.

Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh petugas-petugas pers juga dimiliki oleh petugas-petugas ilmu. Keduanya mempunyai tugas pokok, yaitu mencari kebenaran serta melaporkannya. Keduanya harus memiliki sifat-sifat skeptis serta selalu ingin menguji. Perbedaan lain yang tampak dalam cara kerja keduanya, jika peneliti harus berpegang teguh pada prinsip keuletan, maka si wartawan harus lincah. Ia mengumpulkan dan melaporkan fakta untuk umum yang terdiri dari berbagai golongan dan profesi serta tidak dapat mengikatkan dirinya pada metodologi dan kriteria satu bidang tertentu saja. Di samping itu andaikata karyawan media ingin lebih "ilmiah", maka sifat-sifat media massa tidak memberikannya kesempatan untuk mengikuti langkah-langkah si peneliti untuk menyatakan konsep-konsep dan istilah-istilah melalui aplikasi dan perumusan-perumusan. Tentang ciri media massa yang penting disebut disini ialah adanya

pembatasan ruangan dalam media. Ruangan yang sempit, setelah dikurangi sebagian untuk iklan juga, kadang-kadang harus menampung peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dunia. Seorang ilmiawan peneliti tentu akan merasa bahwa karya yang telah menyita waktu dan tenaganya merupakan hal yang penting, sedang bagi penguasa-penguasa media-masa (redaktur) karya tersebut mungkin kurang dihargai, misalnya jika dibandingkan dengan masalah-masalah aktuil tentang kehidupan sehari-hari.

Sementara itu kadang-kadang istilah-istilah yang telah dibatasi secara ketat oleh ilmiawan mungkin diberikan konotasi yang populer. Hal tersebut mungkin bertentangan dengan makna riil yang ditentukan ilmiawan. Kondisi-kondisi yang membatasi arti dari hasil-hasil penelitian mungkin generalisasi secara lebih luas, sedang aspek yang kurang penting dan kecil dalam karya asli mungkin dipertajam dan ditonjolkan lebih kedepan, istilah-istilah mungkin diterjemahkan ke dalam kata sehari-hari yang tidak tepat beserta sinonim-sinonimnya; serta gaya tulisannya mungkin mengandung unsur "human interest". Petugas pers mungkin mengemukakan hal-hal yang bagi sebagian peneliti tidak relevant untuk dikemukakan (seperti riwayat hidup, pribadi peneliti, biaya penelitian serta anekdot-anekdot yang terjadi pada waktu penelitian berlangsung). Adanya rasa tidak puas dari pihak peneliti dan ilmiawan atas perobahan-perobahan akan menjadi sumber keseretan komunikasi antara ilmiawan dan mass-media. [207]

Hal lain yang menjadi masalah karena adanya anggapan umum bahwa pers atau mass-media di tanahair banyak andilnya dalam merusak bahasa Indonesia. Meskipun demikian, tidak sedikit pula bahwa yang beranggapan bahwa pers/mass-media mempunyai pula andilnya di dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dari kedua anggapan yang saling bertentangan ini dapat dilihat kenyataannya, bahwa mass-media mempunyai peranan besar didalam pengembangan bahasa Indonesia. Sementara itu di tahun '50-an orang masih membedakan bahasa Indonesia buku dengan bahasa pers yang belum baik. Pada saat itu kita masih melihat adanya suratkabar atau majalah yang menggunakan bahasa "Cina", menggunakan logat Melayu Cina. [208]

208 D.H. Assegaff. "Mass Media dan Perkembangan Bahasa', *Indonesia Raya*, 7 Desember 1972, hal. VI.

207 Alwi Dahlan, "Komunikasi Mass-Media dan Dunia Ilmu", *Sinar Harapan*, 5 Januari 1971, hal. V, VIII.

Komunikasi lainnya yang vital di negara kita adalah radio. Sejak Proklamasi, penyiaran radio dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan sendirinya corak siaran radio dapat disesuaikan dengan jiwa revolusi pada waktu itu. Pada masa awal Kemerdekaan, radio menjadi saluran penerangan yang terpenting. Semua radio-umum hampir di seluruh pelosok tanahair selalu dikerumuni oleh rakyat ingin mendengar tentang kejadian-kejadian di Indonesia.

Corak daripada siaran pada masa itu banyak menggunakan siaran-siaran "kata-kata yang berat" mengenai politik dan agitasi untuk membakar semangat rakyat. Usaha lain yang dilakukan ialah mematahkan siaran propaganda dari pihak yang memusuhi Republik Indonesia.

Kemudian setelah Pengakuan Kedaulatan, corak siaran radio berubah lagi karena sebelumnya sifat penyiaran menentang siaran-siaran pihak Belanda yang bertentangan dengan cita-cita nasional; setelah tercapainya pengakuan kedaulatan siaran-siaran radio di Indonesia digunakan untuk kepentingan nasional. Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraannya tetapi sedikit demi sedikit segala kesulitan dapat diatasi sehingga penyiaran radio yang dahulu digunakan oleh Belanda dapat digunakan untuk kepentingan Negara. [209]

Mengenai pembagian jenis programa sesuai dengan hasil Konperensi Siaran Dalam Negeri tahun 1950, ada tiga jenis, yaitu: programa umum, programa luar negeri, dan programa tiga. Programa umum adalah siaran-siaran yang dilakukan cabang-cabang dalam bahasa Indonesia serta bersifat populer, menarik, dan mudah diikuti oleh pendengar umum. Programa keluar negeri dilakukan oleh Pusat Jawatan dalam berbagai bahasa asing dan khusus ditujukan ke luar negeri. Dalam programa tiga disiarkan acara-acara yang khusus bersifat kursus-kursus pendidikan rakyat. siaran untuk sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Acara lainnya khusus ditujukan untuk suatu "golongan pendengar", seperti acara untuk para teknisi, musisi dan juga kepada beberapa golongan kecil bangsa asing di dalam negeri.

Kedalam golongan ini dimasukkan siaran yang diselenggarakan dalam bahasa Belanda yang pada saat itu dalam istilah siaran radio biasa disebut programa dua. Selanjutnya mengingat sifat

209 Sumarmadi, "Meninjau corak Siaran Radio", *Radio dan Masjarakat Indonesia*, 1952.

dan maksud siarannya. yaitu dengan hapusnya siaran militer untuk Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1950. maka kemudian diadakan siaran untuk Angkatan Perang yang dimasukkan kedalam jenis programa ketiga. Untuk memperluas acara-acara programa tiga, kemudian ditambah dengan siaran-siaran yang bersifat kursus atau pendidilan dalam berbagai lapangan seperti: senisuara. teknik dan lain-lain. Acara ini dimulai bulan Januari 1951.

Dengan bertambahnya jenis acara siaran programa tiga, maka hal ini berarti akan semakin berkurangnya waktu yang disediakan untuk acara "siaran berat". Setelah mengadakan perbandingan dengan corak siaran luar negeri, kemudian Jawatan Radio memasukkan siaran-siaran yang bersifat *"service"* kepada masyarakat bangsa asing didalam negeri kedalam programa tiga, dalam hal ini termasuk siaran berbahasa Belanda.

Selanjutnya dalam pembagian tugas siaran, pemancar/ stasion-stasion dibagi atas 2 jenis, yaitu: sebagai stasion nasional ditentukan di Jakarta, sedangkan stasion-stasion regional adalah: Bandung (untuk Jawa Barat). Yogyakarta (untuk Jawa Tengah). Surabaya (untuk Jawa Timur). Padang, Medan dan Makasar. Stasion di Palembang dan Banyumas, secara bertahap dijadikan stasion lokal dengan programa regional. Stasion-stasion lainnya terdapat di Semarang, Kotaraja, Pontianak dan Menado. Stasion-stasion *relay* (pemancar pembantu) diadakan di Jawa, yaitu di Medan dan Jember. Stasion nasional bersifat umum dan tidak terikat oleh corak-corak kedaerahan. Dalam siarannya juga diusahakan memasukkan dasar-dasar budaya nasional yang diharapkan dapat membimbing dan mendorong perkembangan budaya.

Stasion-stasion regional wajib memelihara jenis-jenis seni daerah yang masih hidup di kalangan rakyat, serta memenuhi kebutuhan daerahnya di lapangan pendidikan dan penerangan. Oleh Jawatan Radio juga di perhatikan supaya memelihara tenaga yang membantu siaran secara tetap, dengan cara meninggikan honorarium mereka. Dalam hal ini yang dipakai ukuran pokok adalah "bakat seni", sedang untuk tenaga-tenaga yang kreatif di kalangan seniman, diadakan peraturan-peraturan khusus, baik mengenai jumlah honorarium atau syarat-syarat bermain dan sebagainya. Kesukaran-kesukaran akan piringan hitam lagu-lagu

Indonesia diatasi dengan mengadakan rekaman sendiri, baik lagu-lagu Indonesia baru atau lagu-lagu daerah. Usaha-usaha untuk merekam lagu-lagu daerah, misalnya dilakukan dengan merekam orkes-orkes, gamelan-gamelan dan lain-lain di Yogyakarta dan Surakarta.

Khusus bagi bagian perkabaran, selain menyelenggarakan warta berita radio juga menyelenggarakan uraian-uraian, tinjauan dalam dan luar negeri, ikhtisar pers dan secara insidentil menyiarkan warta berita interinsuler dan internasional dalam bahasa Indonesia. Tugas perkabaran regional hanya terbatas menyelenggarakan warta berita regional termasuk berita kota dalam bahasa Indonesia serta menyiarkan ulangan pekabaran yang disiarkan oleh pusat dalam bahasa regionalnya.Demikian juga terjemahan tinjauan dalam dan luar negeri yang disiarkan oleh pusat pekabaran. Penyelenggaraan warta berita dalam bahasa Belanda yang diadakan oleh siaran regional Surabaya dan Makasar sejak akhir tahun 1950 dihapuskan. [210]

Dilihat dari perkembangannya dapat dikemukakan disini bahwa setelah Jepang menyerah, tenaga-tenaga Indonesia berhasil merebut kekuasaan *Hosokyoku*, (kantor radio) yang kemudian dilanjutkan siarannya dengan sebutan: Radio Republik Indonesia, dimulai pada tanggal 11 September 1954. [211] Sebagai stasion radio yang pertama di Jawa terdapat 8 buah stasion bekas *Hosokyoku*, yakni: di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya dan Malang.

Pada masa perjuangan, disamping RRI, kita mengenal juga Radio Pemberontakan di Jawa Timur, yaitu di kota Surabaya dan Malang, Radio Pemberontakan di Solo, Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer di Yogyakarta, Radio Perjuangan di Semarang, Radio Indonesia Raya di Yogya. [212]

Pada masa Perang Kemerdekaan belum dapat dibangun RRI, dalam arti yang sebenarnya. Meskipun demikian stasion-stasion RRI masih tetap mempertahankan diri, baik di Sumatra maupun di Jawa. Yogyakarta menjadi stasion pusat menggantikan Studio Jakarta sejak tahun 1946. Dengan adanya agresi Belanda, maka

210 Reporter Radio Konferensi Siaran Dalam Negeri tgl. 10 s/d 13 Desember 1950. *Siaran dan Masjarakat Indonesia*, 1951, hal. 30 – 21.

211 Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio.

212 Kementerian Penerangan, Jawatan Radio Republik Indonesia, *Sedjarah Radio di Indonesia*, Jakarta, 1955, hal. 227.

penyiaran berita dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah dari kampung ke kampung. Pada waktu itu RRI memiliki 12 studio di Jawa, antara lain: di Purwakarta, Magelang, Wonosobo (dari Purwokerto), Mojokerto (dari Surabaya) kemudian pindah ke Kediri, Blitar (dari Malang) dan Tawangmangu.

Sejak Aksi Militer Belanda II lenyaplah semua studio tersebut diatas, akan tetapi siaran-siaran darurat tetap dilaksanakan, baik dari pegunungan-pegunungan di Sumatra maupun di Jawa. Statsion-stasion di daerah pegunungan pada masa gerilya itu antara lain: di Jawa berada di Jawa Timur (Gunung Wilis), Jawa Tengah (Balong-Wonosari, Lawu), Jawa Barat, di Sumatra berada di Bukit Barisan.

Setelah ada gencatan senjata, barulah RRI bekerja agak tenang. Selanjutnya mulai tahun 1950 diadakan rencana 5 tahun dimana diusahakan penambahan-penambahan studio, penyempurnaan alat-alat pemancar. Perubahan studio-studio di rasakan amat perlu dan dalam waktu singkat di beberapa tempat harus dilakukan secepat-cepatnya. Jakarta sebagai studio pusat Jawatan harus menggunakan pemancar-pemancar yang berkekuatan 100 kw. sampai paling sedikit 1 kw. untuk keperluan siaran-siaran dengan studio lainnya. [213]

Dalam pelaksanaan rencana 5 tahun yang disusun pada tahun 1950 bersama-sama dengan Jawatan PTT dan memerlukan anggaran belanja yang besar, dikuatirkan akan menemui banyak kesukaran mengingat keadaan keuangan negara; maka pembelian-pembelian seperti dicantumkan dalam rencana tersebut perlu dipecah menjadi dua gelombang:

a. dari anggaran Pemerintah sendiri,
b. dari pinjaman Exim Bank.

Karena dalam tahun 1950 itu pembelian pemancar radio (juga untuk RRI), masih dilakukan oleh Jawatan PTT, maka jalannya usaha pembelian pemancar untuk tahun itu kurang lancar, hingga dalam tahun 1950 tidak ada satu pemancar yang dibeli. Juga penyelesaian pembelian pemancar melalui Exim Bank yang rencananya diserahkan kepada PTT tidak mencapai sesuatu hasil.

Baru dalam tahun 1951 berkat perubahan cara pembelian, yaitu semua pembelian pemancar untuk RRI dapat dilakukan oleh Kementerian Penerangan sendiri, maka dapatlah dibeli dua

213 *Siaran Kementerian Penerangan*, I, No. 6, 12 September 1956, hal. 8 – 12.

pemancar yang kuat. Pada pertengahan tahun 1951, dibeli pemancar Philips dari 50 kw. dan 1 pemancar RCA dari 7½ kw. Mungkin karena kesukaran keuangan, dalam tahun 1952 juga tidak dapat dibeli pemancar-pemancar baru. Anggaran Belanja untuk keperluan itu baru diotorisasi pada akhir tahun 1952, sehingga pembeliannya baru dapat dilakukan pada permulaan tahun 1953. Hasil pembelian yang pertama telah tiba di Indonesia pada bulan April 1953, yaitu tiga buah pemancar RCA dari 7½ kw. dan lima buah pemancar Gastes dari 1 kw.

Hasil kedua yang meliputi jumlah yang lebih besar tiba di Indonesia pada akhir bulan Oktober 1953, yaitu tiga pemancar dari 25 kw., tujuh pemancar dari 10 kw., tiga pemancar dari 5 kw. dan lima pemancar dari 1 kw., semuanya bikinan pabrik Gaster, Amerika. Dengan hasil ini 70% dari rencana 5 tahun telah terlaksana. Yang 30% diharapkan dapat dilaksanakan dari rencana pembelian melalui pinjaman Exim Bank atau anggaran belanja Pemerintah tahun 1954, yaitu untuk pembelian: dua pemancar dari 50 kw., dua pemancar dari 5 kw., dan lima pemancar dari 1 kw. seharga $ 100.000.

Dalam penyusunan rencana 5 tahun itu, kecuali anggaran untuk pemancar, agregat diesel, dan lain-lain alat pemancar, juga telah dicantumkan anggaran untuk pembangunan gedung-gedung pemancar yang sangat diperlukan oleh pemancar-pemancar dari kekuatan 5 kw. keatas. Pertama: Pemancar-pemancar dari kekuatan 5 kw. keatas tidak mungkin ditempatkan diruangan dekat studio, karena akan mengganggu siaran-siaran di studio. Kedua: pemancar-pemancar besar itu memerlukan gedung-gedung yang khusus yang memenuhi syarat keamanan pemancar-pemancar itu. Oleh karena itu perlu dibangun gedung-gedung baru untuk pemancar-pemancar yang besar, yang dapat menjamin keamanan secukupnya kepada pemancar, supaya tidak lekas rusak. Tetapi karena anggaran belanja untuk pembangunan gedung-gedung pemancar dimasukkan dalam anggaran belanja Jawatan Gedung-gedung Negeri, maka pembangunan gedung-gedung pemancar untuk RRI sangat lambat. Ini mungkin disebabkan karena tidak dilihat kepentingan tehnis dari keperluan itu, maka sejak tahun 1950 baru dapat dibangun sebuah gedung pemancar di Kebayoran, Jakarta serta dalam tahun 1952 untuk pemancar 50 kw. yang telah dibeli tahun 1951, sebuah gedung pemancar di Yogyakarta pada akhir tahun 1952, yang pemancarnya (7½ kw) sudah

datang pada tahun 1951 dan kemudian di otorisasi pembangunan pemancar di Medan untuk pemancar 7½ kw., yang telah datang dalam bulan April.

Kelambatan pembangunan gedung-gedung di Jakarta dan Yogyakarta tersebut memberikan pengalaman, kecuali kerugian finansiil (pemancar-pemancar yang telah dibeli tidak dipakai merupakan modal mati) juga diderita kerugian politis dan psykologis (karena mengurangi tersebarnya bahan penerangan). [214]

Mengenai media komunikasi lainnya yang paling mutakhir di tanahair kita yaitu televisi. Selama masa perkembangannya dalam 10 tahun (1962 – 1972), tampaknya televisi telah dapat merebut kedudukan yang penting dalam dunia periklanan. TVRI yang baru berusia sepuluh tahun tidak lagi berjalan dalam keadaan merugi dan diberi subsidi, akan tetapi sebaliknya telah dapat menghidupi dirinya sendiri. [215]

Penyusunan berita melalui TV tunduk pada disiplin jurnalistik. Hanya dalam beberapa hal antara jurnalistik pers dan "jurnalistik elektronik", khususnya televisi, ada perbedaan, meskipun tidak prinsipiil. Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi "manusia sebagai pembaca" dan "manusia sebagai pendengar". Jika fungsinya sebagai pembaca suratkabar, majalah dan lain-lain harus aktif mengetahui berita, ia dapat memilih bahan atau berita mana yang disukai dan yang tidak, maka "golongan pendengar", seperti pendengar radio, TV dan lain-lain hanya bersifat mengetahui berita. Dalam hal ini tidak dapat memilih mana bahan atau berita yang disukai dan yang tidak. Guna mencapai kesempurnaan, maka jurnalistik TV harus "cepat meninggalkan kesan", karena apa yang didengar dan dilihat umumnya tidak akan diulangi.

Mengenai pengaruh siaran TV-RI pada masyarakat, efek positifnya dapat dikemukakan antara lain: bila acara penerangan disajikan dengan gambar-gambar, menjadi lebih hidup, sehingga menjadi sangat efektif. Bagi para artis, bila mereka muncul di layar TV-RI dengan penilaian baik, maka mereka dapat berkembang selanjutnya dengan cepat. Dengan siaran televisi, maka perkembangan teknologi, seperti penjajagan antariksa, pertanian dan lain-lain dapat tersiar dengan jelas. Pengaruh negatif bagi

214 Jawatan Radio Republik Indonesia, *Op. cit.* hal. 230 – 231.
215 D. Assegaff, "10 tahun TVRI," *Indonesia Raya*, 28 September 1972, hal. IV.

masyarakat antara lain yalah bahwa ada kemungkinan ditirunya hal-hal yang tidak baik dalam acara televisi secara lebih mudah seperti dalam film dan drama. [216]

E. HUBUNGAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

1. Situasi dunia setelah Perang Dunia II

Perang Dunia II mula-mula pecah di Eropa pada tahun 1939 dan meluas ke kawasan Asia-Pasifik ketika Jepang dalam bulan Desember 1941 menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawai. Bagian Perang Dunia II ini dikenal dengan sebutan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya.

Dalam Perang Pasifik, angkatan perang Amerika Serikat di bawah Jenderal MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menggulung angkatan perang Jepang kembali ke negaranya. Sementara itu Laksamana Lord Louis Mountbatten menyerbu Burma dari barat dan bergerak ke Asia Tenggara. Dari Saipan dan Okinawa angkatan udara Amerika Serikat membom kota-kota Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hirosyima dan kota Nagasaki. Pada tanggal 8 Agustus 1945 Uni Sovyet menyatakan perang terhadap Jepang dan terus menyerbu Mancuria dan Korea sampai pada garis lintang 38 derajat. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat.

Beberapa bulan sebelum berakhirnya Perang, wewenang dan tugas untuk menduduki wilayah Indonesia bagian barat diserahkan kepada Komando Asia Tenggara (South East Asia Command) dengan Laksamana Lord Louis Mountbatten sebagai panglimanya. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur mulai Kalimantan dipasrahkan kepada angkatan perang Australia.

Demikian Perang Pasifik dan seluruh Perang Dunia II berakhir dengan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Serikat.

Perundingan-perundingan perdamaian sebelum perang berakhir, sudah diadakan oleh tiga negara: Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia, yang diwakili oleh Roosevelt, Churchill, dan Stalin

---

216 Pengaruh-pengaruh Siaran TV pada Masyarakat, *Televisi di Indonesia* (TVRI 1962 – 1972), Agustus 1972, hal. 58 – 59.

untuk meletakkan dasar sementara bagi rencana berikutnya. yaitu Konferensi Teheran (28 November 1943 – 12 Januari 1944). Konferensi Teheran tersebut menghasilkan, antara lain: penyesuaian dan penyatuan daya-upaya militer untuk menghancurkan kekuatan angkatan perang Jerman, dan mengusahakan kerjasama dan mengikutsertakan semua negara-2, baik negara besar maupun negara kecil untuk menegakkan perdamaian. Pada konferensi Yalta (4 – 11 Februari 1945) soal-soal politiklah yang menjadi pokok pembicaraan, karena tidak lama lagi diperkirakan Jerman akan kalah dan menyerah. Semakin mendekat akhir perang, maka semakin terang terlihat perselisihan antara Amerika-Serikat dan Inggris di satu pihak, dan Uni Sovyet dilain pihak. Mereka berselisih pendapat tentang nasib negara-negara yang kalah perang, mengenai komposisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai cara mengambil keputusan dalam Dewan Keamanan, mengenai perwalian dll. Konferensi San Fransisco (25 April 1945), dihadiri oleh 50 negara termasuk 26 negara yang membuat suatu pernyataan tanggal 1 – 2 Januari 1942. Mereka antara lain membahas mengenai rencana pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, rencana Piagam Mahkamah Pengadilan Tinggi, dll. Tidak berapa lama kemudian disusul dengan serentetan perjanjian perdamaian dengan pihak yang kalah perang: untuk Jerman ditetapkan dalam Konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1948, untuk Jepang diadakan di Tokyo pada tanggal 2 September 1945, untuk Italia diadakan di Paris pada tahun 1947.

Perang Dunia II adalah perang terbesar dan terdahsyat hingga saat ini dan telah membawa perobahan-perobahan situasi internasional, antara lain:

1. Di Eropa, sistim kenegaraan yang lama seperti pada masa Perang Dunia I telah mengalami perobahan. Perancis telah kehilangan kedudukannya sebagai negara kuat di daratan Eropa. Inggris tidak lagi sanggup memaksakan kehendaknya untuk keseimbangan diantara negara-negara Eropa lainnya.
2. Kekuasaan dunia beralih dari Eropa ke Amerika Serikat dan Uni Sovyet, yang kemudian merupakan dua kekuatan raksasa di dunia, meskipun mempunyai sistim sosial dan bentuk pemerintahan yang berlainan.

3. Penemuan senjata baru yang merobah samasekali strategi militer.
4. Rasa dan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme yang kuat kini merata di Asia-Afrika. Rakyat yang dijajah menuntut untuk menentukan nasib sendiri dan bentuk pemerintahan sendiri serta menuntut lenyapnya kolonialisme untuk mendapatkan kemajuan politik dan ekonomi.

Pengertian yang disepakati sewaktu perang dalam masa 7 tahun itu segera lenyap, tatkala Uni Sovyet setelah perang berakhir dengan kekuatan militernya segera meluaskan pengaruhnya, terutama di Eropa Timur. Perpecahan yang memisahkan negara-negara Barat (blok kapitalis) dibawah Amerika-Serikat dengan blok komunis dibawah Uni Sovyet, segera meningkat menjadi perang dingin. Sehingga pada masa-masa itu dan seterusnya perang dingin dilakukan di berbagai bidang dan lapangan, baik politik, ekonomi, budaya maupun propaganda. Kedua kekuatan blok raksasa itu berlomba di bidang militer, khususnya persenjataan nuklir, berlomba menguasai dan mempengaruhi negara-negara di Asia-Afrika agar menjadi pengikut atau berada dibawah pengaruhnya. Dan dalam pada itu Amerika Serikat mencampuri urusan di Eropa semenjak dinyatakannya doktrin Truman.

Balance of power policy mengakibatkan terbentuknya politik aliansi, sehingga dibentuk NATO. Baik NATO maupun CENTO dimaksudkan oleh blok Amerika Serikat untuk membendung expansi komunis Uni Sovyet, dan kemudian RRC, di Eropa dan Asia-Pasifik. Uni Sovyet mensponsori terbentuknya pemerintah komunis di Eropa Timur (Bulgaria, Hongaria, Cekoslowakia, Rumania) dan di Asia (RRC, Korea Utara, Viet Nam Utara dan lain-lain) serta Pakta Warsawa (1955). Moskow adalah pusat gerakan komunis di seluruh dunia ketika itu. Kemudian terjadi perpecahan antara Uni Sovyet dengan RRC. Sebelumnya Yugoslavia dibawah Tito menempuh jalan sendiri meskipun sama-sama menuju ke komunisme. Dengan demikian timbullah apa yang dikenal dengan sebutan polisentrisme di dunia komunis.

Perang Dunia II merusak ekonomi dunia, kecuali Amerika Serikat yang muncul dari Perang Dunia II sebagai negara terkuat dan terkaya, yang tidak mengalami kerusakan seperti sekutu-sekutunya Inggris, Perancis dan Uni Sovyet. Kekuatannya praktis

utuh dan hal itu di expresikan dalam hampir semua bidang seperti bidang-bidang industri dan tehnologi, bidang militer termasuk persenjataan nuklir, dan lain-lain.

Amerika Serikat menyadari bahwa negara-negara di Eropa dan benua lainnya yang rusak akibat perang itu akan mudah dikuasai oleh Uni Sovyet melalui partai-partai komunis setempat. Untuk mencegah hal itu Amerika-Serikat melancarkan serangkaian tindakan yang dituangkan dalam suatu rencana bantuan untuk pembangunan kembali negeri-negeri itu yang dituangkan kedalam Rencana Marshall (1947) untuk Eropa dan *Point Four* Doktrin Truman mengenai bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara berkembang terutama di Asia. Inggris dengan Colombo Plan-nya yaitu kerjasama di bidang ekonomi dan budaya, juga membantu usaha-usaha Amerika-Serikat ini. Sedangkan untuk lapangan sosial didirikan *United Nations Relief. Administration (UNRA).*

Liga Bangsa-Bangsa telah gagal untuk memelihara perdamaian, karena itulah pada tahun 1945 digantikan oleh organisasi baru *United Nations Organisation* (UNO), yang dibentuk secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945, setelah piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai disahkan.

Demikianlah pentas bagi hubungan luar negeri Republik Indonesia.

2. *Politik bebas-aktif Republik Indonesia dalam prinsip*

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyebutkan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.[217]. Rumusan itu merupakan sumber utama bagi politik luar negeri RI.

Sejak dari dulu, selagi bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan kerajaan Belanda, cita-cita bangsa

---

[217] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi RI*, Jakarta, 1960, hal. 189.

Indonesia tidak terbatas kepada mencapai kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dengan tegas mengatakan: Indonesia merdeka dan berdaulat hanyalah merupakan sarana, suatu alat untuk mencapai susunan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam mengejar dan melaksanakan cita-cita nasional itu, perlu adanya kerjasama dan hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa lain dalam suasana perdamaian dunia. Demikian juga dengan organisasi PBB sebagai pusat hubungan internasional. perlu digalang hubungan yang baik. Hal-hal itulah merupakan titiktolak politik luar negeri Indonesia.

Tujuan pokok politik luar negeri Indonesia antara lain adalah:

1. Mempertahankan kemerdekaanbangsa dan menjaga keselamatan negara,
2. Memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu sampai sekarang ini tidak ada atau belum dapat menghasilkan sendiri, misalnya: barang-barang untuk modal (kapital), barang-barang obat-obatan dan sebagainya.
3. Perdamaian internasional: karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun, dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Persaudaraan antara semua bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila. yang menjadi dasar filsafat Negara Indonesia.

Maka untuk mencapai tujuan disebut diatas, Republik Indonesia menyebutkan pokok-pokok politiknya, antara lain:

1. Politik damai.
2. Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar harga-menghargai dengan tiada mencampuri soal struktur dan bentuk pemerintah negara masing-masing. Terutama mengadakan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia pada masa yang lampau.
3. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menyusun perdamaian yang kekal.

4. Berusaha dalam PBB untuk mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa yang sampai sekarang negerinya masih dalam penjajahan bangsa lain. Karena dengan tiada kemerdekaan. maka persaudaraan dan perdamaian internasional tidak akan tercapai. [218]

Sudah kita ketahui bahwa konfigurasi politik dunia sesudah Perang Dunia II ditandai oleh munculnya dua kekuatan raksasa dunia yang saling bertentangan, yakni Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kedua kekuatan raksasa itu masing-masing mempunyai sistim dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Kedua kekuatan itu saling bertentangan dan berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kekuatannya secara politis maupun militer meliputi pengembangan senjata nuklir.

Situasi pertentangan itu disebut perang dingin. Masing-masing pihak menuntut supaya semua negara di dunia ini menjatuhkan pilihannya kepada salahsatu blok itu. Tidak "pro" sudah dianggap "anti" sedangkan sikap netral dikutuk.

Republik Indonesia bukan penganut politik luar negeri netral, karena menolak untuk mengkaitkan dirinya kepada negara atau kekuatan manapun, betapapun besarnya. Politik dan sikap Indonesia teguh dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertentangan itu Indonesia tidak mau memilih salah-satu pihak. Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional, sebab itu politiknya di tegaskan dengan sebutan "politik bebas". Sering pula politik ini diperjelas dengan menambahkan kata "aktif", jadi "politik bebas aktif". Dengan aktif dimaksudkan, bahwa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB. Politik itu sedapat mungkin diusahakan agar mendapat bantuan dan dukungan sebanyak-mungkin dari negara-negara yang menjadi anggota PBB. [219] Contoh konkrit dalam hal ini antara lain adalah usaha yang dijalankan Indonesia bersama-sama negara-negara Arab dan Asia lainnya untuk menghentikan perang Korea; Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Indonesia, Konferensi Non-Alignment. Kontingen Garuda I, II, III, IV, V, dan sebagainya.

---

218 Mohammad Hatta, *Dasar-dasar Politik Luar Negeri RI*, Jakarta, 1953, hal. 6–8.
219 Mohammad Hatta, *Op.cit.*, hal. 14.

Situasi perang dingin seperti disebut diatas, memang sedikit banyak membawa pengaruh terhadap perjuangan bangsa-bangsa untuk memerdekan dirinya. Bangsa Indonesia yang sedang melakukan perang kemerdekaan (1945 – 1949) tidak luput dari tarikan-tarikan kedua blok tersebut.

Pada waktu Republik Indonesia sedang melakukan perang kemerdekaan terhadap Belanda, terjadi pertentangan politik di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga membahayakan kehidupan negara Republik Indonesia. Karena FDR/PKI menentang kebijaksanaan politik pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini mereka mengatakan".....bahwa pertentangan yang ada di dunia ini adalah antara blok Amerika Serikat dengan blok Uni Sovyet, jadi revolusi Indonesia adalah bagian dari pada revolusi dunia, maka Indonesia haruslah berada dipihak Rusia, barulah benar"[220]

Demikianlah Kabinet Hatta menjelaskan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) pada bulan September 1948 mengenai *subject policy* antara lain sebagai berikut: ".....pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus dianut atau diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri *(independent)*. Politik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang dihadapi. Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negeri itu sendiri."[221]

Demikianlah tidak ada alasan bagi Indonesia untuk memilih antara dua blok yang besar itu. Indonesia memilih jalannya sendiri, yang disebut politik bebas-aktif, daripada bermusuhan dengan salahsatu blok, yang hanya merugikan kepada kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Indonesia lebih suka bersahabat dengan segala bangsa atas dasar harga-menghargai, perbedaan sistim sosial dan ideologi jangan hendaknya menjadi penghalang untuk saling menghargai demi kepentingan bersama. Maka

---

220 A.H. Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional dibidang Bersenjata*, Jakarta, 1964, hal. 125; lihat: Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism a history*, New York, 1963, hal. 88 – 89.

221 A.H. Nasution, *Op. cit.* hal. 126; Arnold C. Brackman, *Op.cit.*, hal. 88, Mohammad Hatta, *Op.cit.*, hal. 16.

dengan demikian, jelaslah dasar politik luar negeri yang pertama diletakkan oleh pemerintah RI pada tahun 1948, selagi bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dan memperjuangkan kemerdekaan terhadap kerajaan Nederland.

Keterangan Kabinet Natsir kepada Parlemen pada bulan September 1952,[222] juga meninjau politik luar negeri dari segi pertentangan antara Amerika-Serikat dengan Uni Sovyet; antara lain disebutkan: "Antara dua kekuasaan yang telah timbul, telah muncul persaingan atas dasar pertentangan ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua belah pihak sedang mencari dan mendapatkan kawan atau sekutu, membentuk golongan atau blok: blok Barat dan balok Timur. Dengan demikian pertentangan paham dan haluan makin meluas dan mendalam, sehingga menimbulkan keadaan perang dingin dan dikuatirkan sewaktu-waktu akan menyebabkan perang di daerah-daerah perbatasan antara dua pengaruh kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas. Dan dalam menjalankan politik yang bebas itu kepentingan rakyatlah yang menjadi pedomannya, disamping itu pemerintah akan berusaha untuk membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa jadi politik oportunis yang hanya didasarkan perhitungan laba-rugi dan tidak berdasarkan cita-cita luhur."[223]

Keterangan Kabinet Sukiman kepada Parlemen pada bulan Mei 1951 mengatakan, antara lain; Politik luar negeri RI tetap berdasarkan Pancasila, pandangan hidup bangsa yang menghendaki perdamaian dunia. Pemerintah akan memelihara hubungan persahabatan dengan setiap negara dan bangsa yang menganggap Indonesia sebagai negara dan bangsa sahabat, berdasarkan harga-menghargai, hormat-menghormati. Berhubung dengan adanya ketegangan politik, yaitu antara blok Uni Sovyet dan blok Amerika Serikat maka pemerintah Indonesia tidak akan menambah ketegangan itu dengan turut campur dalam perang dingin yang merajalela antara dua blok itu. Atas pendirian dimuka, maka Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-

---

222 Sejak bulan Agustus 1950 sampai tgl. 4 Juli 1959, Negara Republik Indonesia berada dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

223 Mohammad Hatta, *op.cit.*, hal. 17; Departemen Luarnegeri, *Dua Puluh Tahun Departemen Luar Negeri dst.*, hal. 59–60.

Bangsa (PBB) tentu menggunakan forum PBB tersebut untuk membela cita-cita perdamaian dunia. [224]

Kabinet Wilopo menerangkan kepada Parlemen pada bulan Mei 1952, antara lain: ".....asal mulanya pemerintah menyatakan sikap bebas dalam perhubungan luar negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan adanya dua aliran bertentangan dalam kalangan internasional yang mewujudkan dua blok: yaitu blok Barat dengan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya dan Blok Timur dengan teman-temannya. Republik Indonesia bersifat bebas dengan makna:

a. tidak memilih salah satu pihak untuk selamanya dengan mengikat diri kepada salahsatu daripada dua blok dalam pertentangan itu, dan
b. tidak mengikat diri untuk selamanya; akan tidak campur atau akan bersikap netral dalam tiap-tiap peristiwa yang terbit daripada pertentangan antara dua blok itu tadi.

Sebaliknya kemudian oleh karena keterangan sikap yang semata-mata bersifat negatif itu ternyata menimbulkan salahpaham atau sedikit keraguan-keraguan dalam kalangan aliran-aliran politik kepartian dalam negara ataupun pada pihak dua blok yang bertentangan itu atau salahsatunya. Dalam sesuatu soal atau peristiwa yang timbul yang mengenai pertentangan antara dua blok itu Republik Indonesia tetap mendasarkan sikapnya kepada politik bebas-aktif, dengan mengingat:

a. paham tentang niat dan tujuannya sebagai anggota yang ikhlas, setia dan bersungguh-sungguh daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
b. pandangannya tentang kepentingan negara dan bangsanya yang berpengaruh besar pada jangka masa dekat ataupun masa jauh." [225]

Dalam pada itu jelas bahwa politik luar negeri itu tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor subyektif, sesuai dengan keinginan satu negara, atau perasaan simpati atau antipati daripada para negarawan serta pemimpin-pemimpin sesuatu negara. [226] Faktor-faktor obyektif turut serta menentukan

---

224 Mohammad Hatta, *op.cit.*, hal. 18 – 19.
225 Mohammad Hatta, *op.cit.*, hal. 20.
226 Contoh dalam hal ini, politik pemerintahan Sukarno, Jaman Demokrasi Terpimpin (1960 – 1965), politik konfrontasi dan mercusuar. *Indonesia II*, dst. hal. 37 – 76.

corak politik luar negeri itu. Karena itulah sering terjadi, bahwa haluan politik luar negeri sesuatu bangsa, berlainan dengan politik dalam negerinya dan tidak tergantung kepada ideologi sesuatu partai atau golongan yang pada suatu waktu memegang kekuasaan. Politik bebas aktif adalah merupakan *subject policy* dalam arti bersumber dan berakar pada hak-memilih-sikap yang ditentukan oleh kepentingan bangsa sendiri.

Republik Indonesia menggandengkan politik bebas-aktifnya dengan politik bertetangga baik *(good neighbour policy)*. Politik bertetangga baik sering ditonjolkan terutama oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo dalam bulan Januari 1953 tatkala melaksanakan hubungan dan konsultasi dengan negara-negara tetangga seperti dengan India, Pakistan, Birma, Sri Langka, yang sama pandangannya mengenai politik internasional, terutama mengenai perang dingin, misalnya: usaha untuk menghentikan perang di Korea. Menurut mereka perang dingin itu sangat ditakutkan oleh umat manusia. Alat perang yang semakin hebat dan dahsyat yang sanggup memusnahkan daerah yang luas beserta penduduknya dalam sekejap mata, makin menebalkan keyakinan dalam hati bangsa-bangsa, akan mutlak perlunya perdamaian dan harus dicegahnya perang. Keyakinan inilah yang menjadi pegangan bagi Indonesia, untuk berjuang bagi perdamaian, sehingga tidak memilih salah satu pihak diantara kedua raksasa itu. [227]

Pada waktu kunjungannya ke India(1954). Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam pidatonya yang memberi warna kepada pelaksanaan politik bebas-aktif itu, antara lain menyebutkan: politik persahabatan Indonesia tidaklah untuk kepentingan Asia umumnya. Kerjasama dan sama-hidup, *cooperation* dan *co-existence* yalah isi dan makna politik Indonesia terhadap luar. [228]

Sebagai hasil daripada hubungan-hubungan bilateral tersebut makin kokohlah pandangan yang sama mengenai kepentingan yang sama. Misalnya pembangunan ekonomi, pembangunan politik, kerjasama di bidang ekonomi dan lain-lain. Dan dengan semangat demikianlah terselenggara Konferensi Asia-Afrika.

Dalam periode 1965, bangsa Indonesia telah mengalami dan menyaksikan sendiri betapa politik luar negeri dan diplomasi itu sama sekali tidak menuju sasaran yang sudah ditetapkan, bahkan

---

227 Mohammad Hatta, *op.cit*, hal 11

228 Mr. Muhammad Yamin, *Pembentukan dan Pembubaran Uni*, Jakarta, 1955, hal. 63

menyimpang jauh-jauh, kalaupun tidak dapat dikatakan menyeleweng. Pelaksanaan politik luarnegeri tidak mencerminkan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD '45

Karena telah jelas adanya pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi yang tidak mencerminkan kepentingan nasional, seperti disebut diatas, maka Sidang Umum ke-IV Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, pada bulan Juni-Juli 1966 mengoreksi dan sekaligus mengeluarkan suatu rumusan kesatuan-tafsir tentang politik luar negeri guna menghindarkan terjadinya lagi penyelewengan dalam bidang politik luar negeri. Rumusan itu berjudul: Penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik bebas aktif dalam Ketetapan No. XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966.[229] Disamping itu ada juga diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam Nota: No. I/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang politik luar negeri berdasarkan Pancasila.

3. Politik bebas-aktif dalam praktek.

Di dalam rangka menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia, prinsip politik bebas-aktif dipegang teguh didalam praktek. Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan, Pemerintah RI merintis hubungan dengan luar negeri. Secara formil hubungan itu dilakukan pada tingkat bilateral antara RI dan Belanda. Hubungan itu menjadi berkembang sesudah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut campur. memainkan peranan yang menentukan bagi Perjuangan Kemerdekaan. PBB yang secara resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 merupakan suatu bentuk daripada organisasi internasional baru yang bertugas untuk mengatur kehidupan internasional. PBB adalah pusat untuk menyelaraskan aksi dan semua bangsa didunia. Keterlibatan PBB untuk membahas masalah RI, dimulai dengan usul Wakil Republik Sosialis Ukraina pada 21 Januari 1946. PBB diminta untuk campurtangan, karena ternyata tentara Inggris yang bertugas di Indonesia telah menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan

229 *Hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke IV*, Jakarta, 1971, hal 19–22.

Internasional Dewan Keamanan diminta untuk menoentuk panitya penyelidik. Usul ini belum dapat diputuskan oleh PBB. namun Perjuangan Kemerdekaan Indonesia telah membuka mata dunia dan menembus tembok forum PBB. Ketika perjuangan diplomasi meningkat kepada suatu pengakuan *de facto* terhadap RI atas Jawa dan Sumatra oleh Belanda, didalam persetujuan Linggajati 25 Maret 1947, RI mulai mendapat perhatian internasional. Ketegangan-ketegangan baru timbul, karena perbedaan tafsir mengenai isi persetujuan itu. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri, dan melakukan agresi dengan aksi militernya pada tanggal 21 Juli 1947. Sementara itu timbul reaksi dari seluruh dunia. Masalah Indonesia dimasukkan ke dalam acara sidang Dewan Keamanan pada 31 Juli 1947. Australia mengusulkan bahwa atas dasar pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia. Aksi militer yang dilakukan terhadap RI oleh Belanda itu merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian. Kedudukan Republik Indonesia semakin kuat dan dunia luar mulai mengakui Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan sejak itu organisasi internasional tersebut memberikan jasa-jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda.

Dalam sidang Dewan Keamanan tanggal 1 Agustus 1947 dikeluarkan satu seruan kepada kedua belah pihak yang sedang bermusuhan (Indonesia-Belanda) untuk segera menghentikan tembak-menembak; menyelesaikan pertikaiannya dengan cara pewasitan *(arbitrage)* atau dengan cara-cara damai yang lain dan melaporkan tentang hasil-hasil penyelesaian itu kepada Dewan Keamanan. Demikianlah pada tanggal 4 Agustus 1947 berlaku *cease-fire* dan kemudian meningkat kepada perundingan.[230] Suatu teks resmi keputusan Dewan Keamanan yang disampaikan kepada Republik Indonesia berbunyi: "supaya membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di Indonesia; pembentukan suatu komisi yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu penyelesaian pertikaian Indonesia dengan Belanda."[231] Sehubungan dengan itu Duta Keliling Republik Indonesia, Sutan Sjahrir diminta oleh sidang Dewan Keamanan untuk berbicara di muka sidang Dewan Keamanan untuk menjelaskan perjuangan

---

230 *Detik dan peristiwa*, hal. 29., dst.

231 *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, hal. 77., dst.

rakyat Indonesia dan perihal politik penjajahan Belanda dan ia meminta kepada Dewan Keamanan untuk membentuk suatu badan arbitrage yang tidak memihak. [232]

Dewan Keamanan kemudian menawarkan suatu komisi jasa-jasa baik sebagai suatu kompromi. kemudian terkenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Team KTN itu mula-mula terdiri atas dua anggota komisi. tiap pihak menunjuk satu, dan anggota ketiga diangkat oleh kedua anggota yang sudah ditunjuk. Pemerintah Republik Indonesia meminta Australia sebagai wakilnya. pemerintah Kerajaan Belanda meminta Belgia sebagai wakilnya. sedang kedua negara tersebut memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Selanjutnya pemerintah Australia mengangkat Richard C. Kirby, hakim dari Mahkamah Arbitrage dari Persemakmuran Australia sebagai wakil untuk duduk dalam komisi itu. Pemerintah Belgia mengangkat Paul van Zeeland. bekas Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. sebagai wakil untuk duduk dalam komisi tersebut. Pemerintah Amerika Serikat mengangkat Dr. Frank B. Graham. seorang pendidik yang terkenal, pada waktu itu rektor dari Universitas North Carolina. [233] Bahwa negara-negara yang ditunjuk sebagai komisi menerima pengangkatan itu dengan sungguh-sungguh dibuktikan dengan orang-orang yang ditunjuk sebagai wakilnya. mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan berkaliber besar.

KTN dapat bekerja secara efektif setelah para anggotanya datang di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. Sejak dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan tanggal 1 November 1947, maka tugas KTN bukan lagi hanya di bidang politik saja. tetapi juga di bidang militer.

Kontak pendahuluan yang diadakan oleh KTN kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa itu memperlihatkan. bahwa kedua belah pihak tak mungkin dipertemukan di salahsatu daerah kekuasaannya masing-masing, karena Indonesia maupun Belanda menginginkan diadakannya pertemuan itu di daerah kekuasaannya. Karena itu kedua belah pihak akhirnya menerima baik tawaran pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan kapal *Renville* sebagai tempat perundingan netral.

---

232 *Ibid.*

233 Mohammad Roem, *Bunga Rampai dari sejarah*, Jakarta 1972 hal. 75

Sementara menunggu tibanya kapal *Renville*. maka KTN mulai usahanya untuk memecahkan pertikaian dibidang militer, yang menyangkut daerah demarkasi dan gencatan senjata. Pihak Belanda menginginkan agar lebih dahulu menyetujui pemecahan pertikaian militer daripada penyelesaian masalah politik. Sebaliknya pihak Indonesia menghendaki kedua masalah itu, yaitu masalah militer dan politik, diselesaikan secara bersama-sama, sebab justru kekuatan tentara Republik Indonesia dan gerilya rakyatnya adalah menjadi tulang-punggung perjuangan politik Republik Indonesia. Pihak Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya asal pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia mendapat penyelesaian yang wajar.

Pihak Belanda menginginkan dihentikannya perlawanan rakyat lebih dahulu, dan baru kemudian merundingkan keinginan politik Republik Indonesia. Akhirnya setelah melalui beberapa kompromi kedua belah pihak setuju membentuk suatu komisi bersama baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Secara resmi perundingan baru dimulai tanggal 8 Desember 1947 di kapal *Renville*. Dengan melalui prosedur yang sulit, KTN berunding secara informil dan melakukan desakan-desakan secara halus terhadap kedua belah pihak. Maka menjelang Natal 1947 KTN mengajukan kepada kedua belah pihak Pesan Natal atau *"Christmas Message"* berisi dua hal pokok: pertama: *immediate standfast and cease fire* (berdiri tegak di tempat dan penghentian tembak-menembak dengan segera); kedua: pengulangan kembali pokok dasar dari perjanjian Linggajati.

Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948, naskah Persetujuan Renvile ditandatangani, yang antara lain berisi: "persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda; dan enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik".[234] Keputusan persetujuan Renville mengalami nasib yang sama dengan persetujuan Linggajati. Belanda melakukan aksi militernya yang ke II pada 19 Desember 1948. KTN melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Belanda nyata-nyata melakukan pelanggaran ketentuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan bersidang pada 22 Desember 1948, dan menghasilkan resolusi: mendesak supaya permusuhan segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditawan segera dibebas-

---

234 *Ibid.*, hal. 33. (lihat lampiran 2).

kan. KTN ditugaskan untuk menjadi pengawas pelaksanaan resolusi itu.

Pada waktu dewan Keamanan bersidang lagi pada tanggal 7 Januari 1949, maka nampak sekali bahwa perasaan umum terhadap pihak Belanda makin lama makin memburuk. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, tanggal 23 Januari 1949 yang atas nama Konferensi Asia di New Delhi menuntut dipulihkannya Republik Indonesia, ditariknya mundur tentara Belanda, diserahkannya kedaulatan kepada rakyat Indonesia dan diperluasnya wewenang KTN. Konferensi New Delhi ini diprakarsai oleh Perdana Menteri India dan dihadiri oleh wakil-wakil negara-negara Afganistan, Australia, Burma, Sri Langka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Suriah dan Yaman sebagai peserta; dan wakil dari negara-negara Cina, Nepal, Selandia-Baru dan Muangthai sebagai peninjau.

Para peserta Konferensi New Delhi merupakan suatu "*substantial proportion*" dari PBB, maka sudah logis bila Dewan Keamanan memberikan perhatian yang wajar kepada tuntutan konferensi New Delhi ini. Demikianlah suara dari 16 negara Afrika, Asia, Arab dan Australia berkumandang di Dewan Keamanan, sehingga pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan menerima suatu resolusi antara lain berbunyi sebagai berikut:

a. Segera melakukan gencatan senjata, dan b. Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dikembalikan ke Yogyakarta.

Resolusi itu untuk pertama kalinya menentukan dengan jelas garis-garis dan jangka waktu penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda ke pihak Indonesia, dan meluaskan wewenang KTN yang namanya dirobah menjadi *United Nations Commission for Indonesia (UNCI)*. Oleh karena Republik Indonesia dengan jujur menjalankan politik damai berunding untuk menyelesaikan soal-soal Indonesia atas prinsip Indonesia Merdeka dan siap berperang hanya untuk membela diri apabila diserang, maka perjuangan Republik Indonesia mendapat simpati dunia internasional di forum PBB. Hubungan luarnegeri dirintis sejak Perang Kemerdekaan itu berkembang sesudah pengakuan kedaulatan 1950. Kabinet RIS di bawah perdana menteri Hatta, dilaksanakan hubungan luarnegeri khususnya dengan negara-Asia dan

negara Barat. Karena kepentingan ekonomi dan pembangunan Indonesia masih memandang kepada Eropa. Pasaran hasilbumi Indonesia masih berpusat di Nederland. dan Eropa Barat pada umumnya. Untuk kepentingan yang sama pemerintah mengirim Djuanda untuk mencari bantuan Amerika Serikat, yang tidak mengikat. Cara ini diteruskan oleh Kabinet penggantinya yaitu Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951). Kabinet Sukiman. (April 1951 – Februari 1952) pengganti Kabinet Natsir. melakukan kebijaksanaan yang menyimpang dari politik bebas aktif. Pada bulan Januari 1952 Menteri Luarnegeri Subardjo mengadakan pertukaran Surat dengan Dutabesar Amerika Serikat Merle Chochran. Tujuannya untuk mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dalam bentuk bantuan militer. ekonomi dan teknik didalam ikatan *Mutual Security Act* (MSA). Sekalipun masih didalam tingkat pertukaran surat. kejadian ini menarik reaksi dari semua pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengajukan interpelasi atas kebijaksanaan politik luarnegeri, yang menyangkut MSA. Pemerintah dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia kedalam , *periferi*. dalam sistim pertahanan blok barat. DPR menolak meratifisir. Kabinet Sukiman jatuh dan digantikan oleh Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953). Dasar hubungan dengan AS yang ditempuh oleh Kabinet Sukiman diteruskan. sesuai dengan kebiasaan internasional, "perjanjian" Subardjo-Chochran dirubah dengan bentuk lain yang tidak menyimpang dari batas kerjasama antar bangsa. Isi perjanjian dirubah dan terbatas pada bantuan ekonomi dan teknik. [235] Bagi pemerintah selanjutnya kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kabinet Sukiman merupakan peristiwa yang menentukan batas kanan pelaksanaan politik bebas aktif demi kepentingan nasional.

Perkembangan baru daripada pelaksanaan politik bebas aktif ini terjadi pada masa Kabinet Ali (Juli 1953 – Juli 1955). Kabinet Ali tidak lagi mengarahkan hubungannya ke barat, tetapi mendekatkan diri dengan negara Asia-Afrika dan negara-negara blok sosialis. Ali telah merintis offensif diplomatik bebas aktif. Offensif diplomatik diwujudkan dengan menggalang solidaritas negara di Asia dan Afrika yang bertujuan untuk menghapuskan kolonialisme dan untuk meredakan ketegangan dunia yang

235 Departemen Luar Negeri, *Duapuluh tahun Departemen Luarnegeri RI*, hal. 232.

diumumkan oleh Pemerintah perang melawan situasi kedua negara Aksasa Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Indonesia kemudian berhasil mengundang negara Asia-Afrika dalam konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Bagi bangsa Asia-Afrika konferensi A.A merupakan titik kulminasi daripada solidaritas dikalangannya. Konferensi memulai suatu kerjasama baru dan pemberian dukungan lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. Khusus bagi Indonesia konferensi memberi dukungan utama bagi pembebasan wilayah Irian Jaya. Oleh Kabinet Ali II (sesudah pemilihan umum) melaksanakan hubungan dengan negara blok sosialis. Dengan Uni Sovyet pada bulan Maret 1954 dibuka hubungan diplomatik. Berdasarkan atas prinsip politik bebas aktif itu sesudah pemilihan umum 1955, Presiden melaksanakan muhibah kenegara blok barat (Mei-Juli 1956) dan blok timur (Agustus-Oktober 1956).[236] Kunjungan ini diartikan sebagai penegasan daripada pelaksanaan politik bebas aktif. Walaupun RI dan negara sosialis menganut sistim politik dan ideologi yang berlainan, perbedaan ini tidak menutup pandangan-pandangan yang sama pada pelbagai masalah. Titik pertemuan dituangkan didalam *joint statement* (pernyataan bersama.).[237] Pernyataan bersama RI–Uni Sovyet yang dikeluarkan di Moskow pada tanggal 11 September 1956, mengundang pula reaksi pelbagai pihak . DPR dan Presiden menganggap bahwa pernyataan bersama ini telah melampui batas kiri dari sifat politik bebas aktif. Pemerintah dalam menjawab reaksi-reaksi itu menyatakan bahwa pemerintah selalu waspada dan senantiasa menjaga diri dari sifat-sifat penghidupan asing dan merusak. Politik luarnegeri tetap dalam rel bebas aktif. Karena itu pernyataan bersama tersebut masih jauh dari batas kiri politik bebas aktif RI. Pernyataan bersama yang menyangkut masalah perlucutan senjata, pakta militer, senjata atom, adalah sejiwa dengan Dasasila Bandung.[238] Pada masa demokrasi terpimpin diplomasi Indonesia sangat tergantung pada Presiden Sukarno. Politik yang dianut adalah konfrontasi terhadap negara-negara Barat yang dikwalifikasi sebagai Neo-Kolonialis/Imperialis (Nekolim). Dasar politik ini mewarnai pelaksanaan politik bebas aktif.

---

236 Departemen Luarnegeri, *ibid*, hal. 233.

237 Roeslan Abdulgani, *Mendajung dalam Taufan*, Jakarta, 1956, hal. 122.

238 Roeslan Abdulgani, *op.cit.* hal 30 – 32. Departemen Luarnegeri, *op. cit.*, hal. 234.

Diplomasi menjadi diplomasi ofensif frontal; sehubungan dengan ditetapkannya Manipol sebagai haluan negara, dan perjuangan pembebasan wilayah Irian Jaya. Hubungan dengan negara blok Barat merenggang karena mereka bersikap pasif terhadap tuntutan bangsa Indonesia atas wilayah Irian Jaya. Sebaliknya hubungan dengan negara blok sosialis semakin erat. Hubungan diperoleh berkat kesanggupan Uni Sovyet dan negeri-negeri blok sosialis lainnya memberikan kredit untuk pembelian senjata.

Sesudah kita berhasil mengembalikan wilayah Irian Jaya pada 1963, Pemerintah tetap melaksanakan politik konfrontasi dengan Nekolim. Konfrontasi terus dilakukan terhadap pembentukan negara federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dilakukan oleh Inggris, dianggap membahayakan kedudukan Republik Indonesia. Politik konfrontasi anti nekolim, mendapat bentuk baru. Presiden berpendapat ketegangan didunia akibat daripada dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu antara kekuatan Nefos (*New Emerging Forces*) dengan Oldefos (*Old Established Forces*). Republik Indonesia yang berusaha menggalang solidaritas NEFO, mendapat dukungan sepenuhnya dari RRC. Demikian pula politik konfrontasi terhadap Malaysia. [239]

Peranan Indonesia didalam kelompok *non alignment* dimulai pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Beograd pada bulan September 1961. Presiden RI menyatakan bahwa setiap bangsa harus mengembangkan ideologi nasionalnya, hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain..[240] Pada konferensi Tingkat Tinggi KTT negara-negara *non alignment* kedua di Kairo (Oktober 1964) Indonesia mengemukakan bahwa non alignment adalah tindakan yang menitik-beratkan kepada security, keamanan dari bangsa yang berjuang untuk kemajuan dan untuk kemerdekaan. Kemudian dilontarkan gagasan konferensi A-A ke II dan *Conference of the New Emerging Forces.* (CONEFO). Sebagai landasan untuk mencapai sasaran itu Presiden Sukarno menyatakan adanya poros Jakarta Phnom-Penh,. Hanoi-Peking dan Pyong Yang. Poros, ini disebut poros anti imperialisme dan anti kolonialisme.[241] Politik luarnegeri dengan sistim poros-porosan hakekatnya mempersempit ruang gerak RI di forum inter-

---

239 Departemen Luarnegeri, *op.cit* hal. 151.

240 Departement of Foreign Affairs of Republic Indonesia, *Indonesia 1962*, Jakarta, 1962, hal. 156.

241 Departemen Luarnegeri, *Op.cit.*, hal. 273 – 274.

nasional, dan penyimpangan dari prinsip dasar politik yang bebas aktif, serta memasukkan Indonesia kedalam strategi politik RRC. Sebagai puncaknya adalah pernyataan keluar dari PBB secara sepihak pada bulan Januari 1963. Tindakan tersebut merupakan pertanda bahwa politik luarnegeri bebas aktif telah ditinggalkan oleh Pemerintah RI, dan cenderung berpihak kepada RRC. Politik luar negeri yang cenderung ke RRC ini berakhir sesudah gagalnya percobaan kudeta, G.30.S./PKI. Pemerintah Orde Baru meninjau kembali pelaksanaan politik luarnegeri Orde lama. Adapun ciri-ciri politik bebas aktif Orde Baru adalah:

1. mengutamakan pencapaian tujuan nasional.
2. meninggalkan sikap politik anti kolonialisme dan anti imperialisme yang dipakai sebagai pemanis, tetapi mengutamakan pertimbangan praktis dan nyata.
3. tanpa meninggalkan sikap solidaritas internasional, politik luarnegeri Orde Baru lebih memusatkan kepada suatu pola kerjasama regional yang nyata, dan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masa kini dengan jumlah keanggotaan yang tidak terlalu luas.

Penegasan ini telah menghilangkan kesimpangsiuran pelaksanaan politik bebas-aktif RI dalam menghadapi pelbagai masalah dunia.

F. PERTAHANAN – KEAMANAN NASIONAL DAN DWI-FUNGSI ABRI

1. Pertahanan-Keamanan Nasional Indonesia

Konsepsi mengenai Pertahanan-Keamanan Nasional (Hankamnas) di Indonesia berkembang berdasarkan pengalaman sendiri Bangsa Indonesia sejak tercapainya Kemerdekaan. Terutama sekali pengalaman selama Perang Kemerdekaan 1945 – 1949 merupakam sumber bagi pemikiran-pemikiran mengenai sistim pertahanan-keamanan yang tepat bagi kondisi-kondisi Indonesia. Berdasarkan pengalaman selama Perang Kemerdekaan itu dan juga pengalaman selama operasi-operasi keamanan dalam negeri, timbul keyakinan bahwa hakekat Hankamnas adalah perlawanan rakyat semesta. Hal itu berarti, bahwa seluruh rakyatlah yang melaksanakan pertahanan-keamanan itu dan bukan hanya Ang-

katan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), meskipun ABRI memang merupakan inti daripada Hankamnas. Karena Hankamnas bersifat perlawanan rakyat semesta, maka dapatlah disebutkan Hankam Rakyat Semesta (Hankamrata).

Tujuan Hankamnas adalah mengamankan seluruh hak-milik nasional, bukan hanya mengamankan unsur-unsur fisik daripada hak-milik nasional itu, melainkan juga semua nilai yang telah mendapat kesepakatan seluruh Rakyat Indonesia, maupun unsur-unsur lainnya:

1. Kemerdekaan Nasional berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Pancasila sebagai Azas Nasional dan dasar filsafat Negara.
3. Tujuan Nasional, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (untuk) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Konstitusi yang sah, dalam hal ini UUD 1945.
5. Semua hasil perjuangan nasional selama ini pada bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam.
6. Integritas Negara dan keutuhan wilayah Negara dari Sabang sampai Merauke.

Karena missi daripada Hankamnas adalah mengamankan seluruh hak milik nasional dari pelbagai ancaman, maka perluiah diketahui hakekat ancaman itu. Adapun ancaman terhadap hak-milik nasional yang dapat diketahui adalah pertama kekuatan-kekuatan desintegratif dari dalam yang dengan jalan melakukan subversi atau pemberontakan ingin membawahkan Kemerdekaan Nasional kepada kekuasaan negara lain atau suatu kekuatan internasional, yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar filsafat Negara yang menjadi sumber integrasi nasional dan ketahanan nasional selama ini, ingin menghambat perjuangan untuk mencapai Tujuan Nasional, ingin menyelewengkan konstitusi yang sah, yakni UUD 1945, dan ingin melenyapkan hasil perjuangan nasional selama ini maupun ingin mengurangi integritas Negara serta keutuhan wilayah Negara. Subversi dan pemberontakan dapat mengakibatkan penderitaan rakyat dan makan

korban harta dan bahkan jiwa dari pada Rakyat seperti yang pula telah dialami dengan jelas selama timbulnya pemberontakan PKI di Madiun. pemberontakan-pemberontakan separatis maupun pemberontakan-pemberontakan DI/TII.

Ancaman dapat pula datang dari luar baik berupa infiltrasi dan subversi maupun berupa invasi. Infiltrasi dan subversi dapat dilakukan pada bidang ekonomi dan dapat pula pada bidang sosial-budaya. Invasi yang bersifat fisik adalah ancaman yang dengan mudah dapat dirasakan.

Ancaman ancaman itu masih terasa besar intensitasnya, justru karena kondisi nasional yang belum menguntungkan. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia belum memiliki kekuatan nasional yang kokoh dan stabil seperti negara-negara industri Barat atau Jepang. Setiap gejolak sosial, betapapun kecil, sudah dapat merusak stabilitas nasional, apalagi pemberontakan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Pertarungan politik yang tajam, kegoncangan ekonomi pada bidang harga atau persediaan bahan, dan kepincangan-kepincangan pada bidang sosial-budaya (kesejahteraan yang tidak merata, kesukuan, persaingan agama dan bentrokan rasial, dls) dapat menggoyahkan sendi-sendi masyarakat dan Negara. Karena itulah Hankamnas di Indonesia (seperti juga di negara-negara berkembang lainnya) lebih peka daripada Hankamnas di negara-negara industri yang telah berkembang.

Kondisi-kondisi internasionalpun jauh daripada mantap, sehingga mempengaruhi kondisi-kondisi nasional. Sehabis Perang Dunia II, dunia mengalami konstelasi politik internasional bipolèr dengan adanya dua blok ideologi yang berhadap-hadapan dengan persenjataan nuklir. Konstelasi itu kemudian bergeser menjadi konstelasi polisentris dengn pecahnya masing-masing blok atas unsur-unsur yang lebih kecil. Baik blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat maupun blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet pecah atas kelompok-kelompok negara atau negara-negara individuil yang saling bersaingan. Telah timbul pula kelompok negara Asia-Afrika maupun kelompok negara *non-aligned* yang sejak semula berorientasi non-blok. Kini timbul kecenderungan untuk mengadakan pengelompokan-pengelompokan regional seperti pengelompokan negara-negara Asia Tenggara, pengelompokan negara Eropa Barat, beberapa pengelompokan negara di

Afrika, dls. Namun nampak pula, bahwa kepentingan-kepentingan nasional setiap bangsa dapat sangat menonjol, sehingga dapat menimbulkan sengketa yang mengatasi solidaritas kelompok regional.

Perlulah pula ditinjau hakekat sengketa dalam rangka mengenali Hankamnas Indonesia. Adapun sumber sengketa dapat berupa hal-hal yang sedikit-banyak bersifat konstan dan historis-kontinu seperti soal tapalbatas, soal minoritas berbahasa lain atau beragama lain yang sama dengan bahasa atau agama negara tetangga, maupun hal-hal yang lebih bersifat variabel seperti pergantian rezim dan ideologi pada suatu negara maupun pergeseran kepentingan. Adapun spektrum daripada bentuk-bentuk sengketa, terbentang antara penggunaan segala kekuatan nasional selain kekerasan militer pada satu ujung (yang sering disebut perang dingin) dan bentuk penggunaan kekerasan militer dan bukan militer secara tidak terbatas, yang disebut perang umum pada ujung lainnya. Ditengah-tengah spektrum ini terdapat bentuk yang disebut perang terbatas.

Sesuai dengan faktor-faktor tersebut, maka sifat politik Hankamnas adalah defensif-aktif dan dalam lingkungan-nasional diarahkan kepada:

1. mengamankan konsolidasi Republik Indonesia sebagai modal pokok perjuangan nasional dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional;
2. menyusun dan mengembangkan kekuatan Hankamnas yang mampu menanggulangi ancaman dalam segala bentuk dan manifestasinya dan dari manapun datangnya.

Dalam forum internasional, politik Hankamnas diarahkan kepada:

1. mengadakan kerjasama regional dan mewujudkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara;
2. mengusahakan adanya peredaan ketegangan internasional.

Selanjutnya pelaksanaan Hankamnas dilakukan dengan pola operasi pertahanan dan pola operasi keamanan dalam negeri, sedangkan pelaksanaan pola-pola operasi itu pada dasarnya dilakukan secara gabungan dengan menggunakan sistim-senjata

teknologi dan sistim-senjata sosial secara serasi. Sarana untuk melaksanakan pola-pola operasi itu adalah organisasi jenis tugas-pokok atau *mission-type organization*. Berarti bahwa operasi-operasi tidak lagi dilakukan oleh masing-masing angkatan secara terpisah di bawah pengendalian angkatan masing-masing melainkan dilakukan oleh unsur-unsur dari pelbagai angkatan yang beroperasi sebagai satu keseluruhan dibawah satu komando.[242]

2. *Dwifungsi ABRI*

Seperti juga konsepsi mengenai Hankamnas, konsepsi mengenai ABRI bersumber kepada sejarah, khususnya sejarah ABRI selama Perang Kemerdekaan. Menurut kenyataan sejarah, ABRI lahir di tengah-tengah perjuangan untuk mempertahankan Kemerdekaan Nasional kuranglebih 1½ bulan sesudah Proklamasi. Anggota-anggota ABRI yang awal adalah pejuang-pejuang yang secara spontan tampil kemuka untuk menegakkan dan mempertahankan Republik Indonesia serta Kemerdekaan Nasional. Mula-mula mereka berwadahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR), badan-badan perjuangan maupun pelbagai barisan angkatan muda polisi. Pada tanggal 5 Oktober 1945 secara resmi dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan angkatan perang reguler Republik Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Tentara Republik Indonesia (TRI) dan mempunyai unsur-unsur darat, laut dan udara. Para anggota TRI tetap merasa dirinya pejuang, meskipun sejak tanggal 5 Oktober 1945 mereka juga mempunyai status prajurit. Komandan-komandan mereka duduk di dalam komite nasional di daerahnya masing-masing dan tidak hanya ikut memperbincangkan dan menguras soal-soal Hankam saja, melainkan juga soal-soal politik, ekonomi dan sosial-budaya. Juga pada taraf nasional Panglima Besar Jenderal Soedirman ikut serta dan jika perlu mengambil prakarsa didalam pembahasan dan pemecahan masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Pada bulan Juli 1947, TRI bersama dengan pelbagai badanperjuangan dilebur menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sudah jelas bahwa anggota-anggota TNI ex-badan per

---

242 *Catur Darma Eka Karma, Doktrin Pertahanan-Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Jakarta, 1967.

juangan, tetap menganggap dirinya pejuang. meskipun kini mereka juga mempunyai status prajurit dengan segala atributnya. Dengan demikian TNI menjadi wadah perjuangan bagi pemuda-pemuda pejuang yang mula-mula tampil kemuka pada tahun 1945 dan karenanya kemudian bernama generasi 1945. Ketika tentara kolonial Belanda untuk kedua kalinya menyerbu Republik Indonesia dan berhasil menduduki ibukota Yogyakarta dan menawan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tidak menyingkir, TNI dibawah pimpinan Panglima Besar Soedirman melancarkan perang gerilya beserta seluruh Rakyat. Di seluruh medan gerilya dibentuk pemerintah militer yang menyatukan unsur-unsur militer dan unsur-unsur pamong praja sipil.[243] Maka secara wajar diyakinilah hakekat TNI sebagai Tentara Nasional, Tentara Pejuang dan Tentara Rakyat. Karena baik dalam bidang Hankam maupun pada bidang sosial-politik yang penuh pergolakan itu TNI tetap berexistensi sebagai satu keseluruhan, keluarlah ucapan Panglima Besar Soedirman dalam masa-masa kritis itu bahwa "TNI adalah satu-satunya hak-milik nasional yang masih tetap utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus menghadapi segala macam tantangan dan perubahan-perubahan." [244]

Juga pemuda-pemuda yang berjuang dengan wadah kepolisian memperlihatkan ciri-ciri watak yang lain dengan polisi profesionil di negara-negara Barat. Kebanyakan anggota awal kepolisian adalah bekas anggota *Keisatsutai* dan *Tokubetsu Keisatsutai* (Polisi dan Polisi Istimewa dari pemerintah penduduk-an militer Jepang). Sesuai dengan anggapan-anggapan Barat bahwa polisi adalah *"non-combatant"*, berlainan dengan Tentara Peta dan *heiho*, kedua kesatuan polisi itu tidak dilucuti oleh Jepang setelah mereka berkapitulasi dengan Serikat. Akan tetapi pemuda-pemuda anggota *Keisatsutai* dan *Tokubetsu Keisatsutai* itu menganggap dirinya pejuang kemerdekaan, sehingga senjata yang ada di tangannya mereka pergunakan untuk mempertahankan Kemerdekaan. Pada tahun 1969 Angkatan Perang atau TNI dipersatukan dengan Polisi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

---

243 Nugroho Notosusanto, *The Effect of the Guerilla on Armed Forces and Society*, 1974.

244 *Himpunan Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman*, 1968.

Setelah selesainya Perang Kemerdekaan timbullah serangkaian peristiwa di dalam tubuh masing-masing Angkatan dan Polisi yang dapat diinterpretasikan sebagai pertarungan antara golongan yang ingin memelihara kepribadian 1945 TNI dan Polisi, yang meliputi sifat pejuang dan sifat prajurit profesionil, dan golongan yang ingin memasukkan pengaruh politik dari luar ke dalam tubuh masing-masing Angkatan dan Polisi. Dapat kita sebutkan Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa 27 Juni 1955 di dalam tubuh TNI–AD, peristiwa KMU Suyono (14 Desember 1955) di dalam tubuh TNI–AU dan pelbagai peristiwa intern Polisi. Pada jaman demokrasi liberal angin dari Barat bertiup dengan kencangnya, dan golongan pemelihara kepribadian 1945 berada di pihak yang terdesak. Tetapi lambatlaun, sejalan dengan kegagalan sistim demokrasi parlementer Barat, dan timbulnya kemacetan nasional dan instabilitas politik serta goyahnya keamanan dalam negeri dengan timbulnya serangkaian pemberontakan, golongan yang berkepribadian 1945 mulai kuat. Masyarakat mulai menyadari, bahwa suatu Angkatan Perang dan Polisi yang lemah dari dalam karena menjadi obyek perebutan pengaruh golongan-golongan politik dari luar, pada akhirnya merugikan Bangsa dan Negara juga. Hal itu jelas sekali setelah beberapa panglima daerah dapat dipengaruhi oleh kaum politik dari beberapa partai dan golongan untuk mencetuskan pemberontakan PRRI/Permesta yang hampir-hampir menimbulkan desintegrasi Bangsa dan Negara Indonesia serta mengundang intervensi asing. [245]

Ketika Konstituante dan DPR hasil pemilihan umum pertama tidak berhasil membawa perubahan didalam situasi politik dalam negeri, masyarakat menjadi yakin, bahwa sistim demokrasi liberal a'la Eropa Barat tidak sesuai dengan kondisi-kondisi nyata di Indonesia. Dalam suasana kesal dengan sistim demokrasi liberal itu Presiden Sukarno tampil kemuka pada bulan Februari 1957 dengan konsepsinya supaya bangsa Indonesia melaksanakan sistim politik yang lain, yakni sistim Demokrasi Terpimpin. Konsepsi Presiden itu meliputi pula gagasan untuk menyalurkan perwakilan rakyat tidak saja melalui partai-partai politik, melainkan juga golongan-golongan fungsionil, termasuk ABRI. Karena mengira bahwa Presiden Sukarno dapat membawa angin baru kedalam dunia politik Indonesia dewasa itu dan juga karena setuju dengan

---

245 Departemen Pertahanan-Keamanan, *Dharma Pusaka 45*, 1972, hal. 11.

gagasan adanya golongan-golongan fungsionil, tokoh-tokoh TNI dan Polisi mendukung gagasan tersebut. Dan ketika Konstituante, setelah hampir tiga tahun bersidang tak berkeputusan, belum juga berhasil merumuskan sebuah undang-undang dasar baru, maka pimpinan TNI-AD mengusulkan kepada Presiden supaya UUD 1945 diperlakukan kembali. Gagasan itu memperoleh dukungan luas, juga di kalangan partai-partai, sehingga akhirnya Presiden Sukarno menyarankan "kembali ke UUD '45" kepada Konstituante. Sekali lagi Konstituante tidak berhasil mencapai kata sepakat. Maka akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUDS dan bubarnya Konstituante

Seperti juga Pemilihan Umum pertama pada tahun 1955, sistim Demokrasi Terpimpin itu menimbulkan harapan-harapan di kalangan masyarakat. Tetapi tak lama kemudian ternyata, bahwa Presiden Sukarno tidak secara murni melaksanakan UUD 1945. Dengan banyak dipengaruhi oleh PKI, Presiden Sukarno selangkah demi selangkah menegakkan diktatur perseorangan dan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya, sehingga keadaan Negara dan masyarakat menjadi tegang dan ricuh, dan pembangunan yang terbengkelai pada jaman Demokrasi Liberal, . tetap terbengkelai pada jaman Demokrasi Terpimpin. Usaha memecah-belah ABRI tetap berjalan terus; didalam tubuh masing2 angkatan diusahakan membina agen-agen oleh pelbagai kekuatan politik dari luarnya. Khususnya PKI berusaha keras untuk membina kader-kadernya di kalangan perwira-perwira, mulai dari yang terendah sampai kepada panglima angkatannya sendiri. Tugas itu dilaksanakan oleh sebuah biro khusus yang langsung dipegang oleh ketua partai D.N. Aidit. Disamping usaha memecah-belah tubuh masing-masing angkatan, juga diusahakan untuk mengadu-domba satu angkatan dengan angkatan lainnya sehingga timbul persaingan tidak sehat yang mengarah kepada permusuhan antara angkatan dengan angkatan.

Namun dapat dikonstatasi juga, bahwa karena tersusunnya sistim pendidikan berjenjang dan sistim pembinaan karier yang teratur (dengan *tour of duty* dan *tour of area*) ditambah pula dengan sukses dan pengalaman bersama dalam pelbagai gerakan operasi militer (GOM) terhadap serangkaian gangguan keamanan

dalam negeri maupun dalam rangka konfrontasi (APRA, RMS, Andi Azis, DI/TII Jawa Barat, DI/TII Jawa Tengah, DI/TII Aceh, gerombolan Ibnu Hajar di Kalimantan, gerombolan Kahar Muzakkar, PRRI/Permesta, Trikora, Dwikora) semangat integrasi semakin berkembang dengan wajar, baik semangat integrasi intra-angkatan maupun semangat integrasi antar-angkatan. [246]

Iklim yang menguntungkan integrasi ini yang didasarkan atas kepribadian ABRI 1945 yang sekaligus meliputi sifat pejuang dan prajurit profesionil. kemudian akan sangat berguna ketika akhirnya tiba suatu masa tatkala peranan ABRI menjadi terkemuka didalam kehidupan Bangsa dan Negara. sehingga tidak lagi menjadi obyek yang rawan bagi perebutan pengaruh politik dari luar dirinya. Dengan terjadinya percobaan kudeta G30S/PKI yang gagal. seluruh ABRI menjadi terbuka matanya akan akibat daripada perpecahan intra-angkatan dan antar-angkatan serta disusupinya tubuh ABRI oleh oknum-oknum yang menjadi agen kekuatan politik dari luar. Berlandaskan tekad, bahwa pembunuhan Lubang Buaya tidak boleh terjadi lagi, segenap pimpinan ABRI mengambil langkah-langkah yang kongkrit dan berencana untuk setahap demi setahap mengkokohkan integrasi ABRI. Dan cita-cita yang telah didambakan sejak tahun 1945 itu akhirnya tercapai pada jaman Orde Baru. Adalah juga didalam jaman Orde Baru kelak, bahwa dua sifat, sifat pejuang dan sifat prajurit profesionil didalam Kepribadian 1945 ABRI itu dirumuskan secara konsepsionil dengan sebutan Dwifungsi ABRI.

---

246 Nugroho Notosusanto, *Armed Forces and Society in Indonesia: Past, Present, Future*, 1974, hal. 23 – 24.

Lampiran – I

PERSETUDJUAN LINGGARDJATI

Delegasi-2 Belanda dan Indonesia dalam rapat pada hari ini telah mendapat kata sepakat tentang persetudjuan dibawah ini, hal mana terbukti dari pemarapan naskah jang tersebut dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia masing2 berlipat tiga.

Pemerintah Belanda
dalam hal ini berwakilkan Komisi-Djenderal,

dan

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia oleh karena mengandung keinginan yang ichlas hendak menetapkan perhubungan jang baik antara kedua bangsa Belanda dan Indonesia. dengan mengadakan tjara dan bentuk dengan suka-rela jang merupakan djaminan sebaik-baiknja bagi kemadjuan jang bagus serta dengan masa datang. dan jang membukakan djalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar jang baru menetapkan mupakat seperti berikut. dengan ketentuan akan mengandjurkan persetudjuan ini selekas-lekasnja untuk memperoleh kebenaran daripada madjelis perwakilan rakjatnja masing-masing.

Patsal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa. Madura dan Sumatera.

Adapun daerah-daerah jang dididuduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja-bersama antara kedua belah pihak akan dimasukan pula didalam atau kedalam Daerah Republik.

Untuk menjelenggarakan jang demikian itu. dengan segera akan dimulai melakukan tindakan jang perlu-perlu. supaja selambatnja pada waktu jang disebutkan dalam pasal 12. termasuknja daerah-daerah jang tersebut itu telah selesai.

Patsal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menjelenggarakan segera berdirinja sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, jang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Patsal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnja dengan ketentuan, bahwa, djika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusjawaratkan dengan lain-lain bagian daerah pun djuga, menjatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwudjudkan sematjam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Keradjaan Belanda.

Patsal 4

(1) Adapun negara-negara jang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia Borneo dan Timur-Besar, jaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah untuk menjatakan kehendaknja, menurut aturan demokratis, supaja kedudukannja dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan tjara lain.

(2) Dengan tidak menjalahi ketentuan didalam pasal tadi dan didalam ajat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu-negerinja.

Patsal 5

(1) Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, jang akan didirikan daripada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain jang akan termasuk kelak dalam negara Indonesia Serikat itu, jang wakil-wakil itu ditudjukan dengan djalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ajat jang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang tjara turut-tjampurnja dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia oleh daerah-daerah jang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk jang tidak ada atau tidak tjukup perwakilan-nja segala itu dengan mengingat tanggung-djawab dari para Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Patsal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharaan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia akan bekerdja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia. jang dengan terbentuknja itu Keradjaan Belanda jang meliputi Negeri Belanda. Hindia-Belanda. Suriname dan Curaçao ditukar sifatnja mendjadi persetudjuan itu, jang terdiri pada satu pihak dari pada Keradjaan Belanda. jang meliputi Negeri Belanda Suriname dan Curracao dan pada pihak lainnja daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Jang tersebut diatas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian berkenaan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curaçao satu dengan lainnya.

Patsal 7

(1) Untuk membela-pemeliharaan kepentingan-kepentingan jang tersebut didalam pasal diatas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat: mungkin djuga oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat negara-negara itu.

(3) Adapun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerdja-bersama dalam hal perhubungan luar-negeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan. serta djuga hal-hal ekonomi dan kebudajaan.

Patsal 8

Diputjuk Perserikatan Belanda Indonesia itu duduk Radja Belanda.

Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Radja.

Patsal 9

Untuk membela-peliharaan kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda dan kepentingan-kepentingan Keradjaan Belanda di Indonesia maka pemerintah masing-masingnja kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Patsal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung djuga ketentuan-ketentuan tentang:

a). pertanggungan hak-hak kedua belah pihak jang satu terhadap jang lain dan djaminan-djaminan kepastian kedua belah pihak penetapi kewadjiban2 jang satu kepada jang lain;

b). hal kewarga-negaraan untuk warga-negara Belanda dan warga-negara Indonesia masing-masing didaerah lainnja.

c). aturan tjara bagaimana menjelesaikannja apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat ditjapai mupakat;

d). aturan tjara bagaimana dan dengan sjarat-sjarat apa alat-alat kelengkapan Keradjaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang tjukup mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri;

e). pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, jang dimaksudkan djuga oleh piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Patsal 11

(1) Anggar-anggar itu akan direntjanakan kelak oleh suatu permusjawaratan antara wakil-wakil Keradjaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat jang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar-anggar ini terus berlaku, setelah dibenarkan oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat kedua belah pihak masing-masingnja.

Patsal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaja berwudjudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.

Patsal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindak an-tindakan, agar supaja setelah terbentuknja Persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah menjadi Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Patsal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menurut dipulihkan hak-hak mereka jang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, jang lagi berada didalam daerah kekuasaannja de facto. Sebuah Panitya bersama akan dibentuk untuk menjelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Patsal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia-sehingga susunan-nja dan tjara bekerdjanja seboleh-bolehnja sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk-susunan menurut hukum negara, jang ditekankan itu maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan supaja dengan segera dilakukan aturan-

aturan undang-undang akan supaja, sementara menantikan berwudjudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Keradjaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Patsal 16

Dengan segera setelah persetudjuan ini mendjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan bala-tentaranja masing-masing.

Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang sampai seberapa dan lambat-tjepatnja melakukan pengurangan itu; demikian djuga tentang kerdja-bersama dalam hal keterangan.

Patsal 17

(1) Untuk kerdja-bersama jang dimaksudkan dalam persetudjuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia hendak diwudjudkan sebuah badan jang terdiri daripada delegasi-delegasi jang ditudjukan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing2nja dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetudjuan ini, jang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi jang tersebut itu, maka menjerahkan keputusan kepada arbitrage.

Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, jang diangkat dengan semupakat antara dua pihak delegasi itu djika tidak berhasil semupakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan International.

Patsal penutup

Persetudjuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia.

Kedua-duanja naskah itu sama kekuatannja.

Djakarta, 15 November 1946

(Disalin dari *Lukisan Revolusi Rakjat Indonesia, 1945 – 1949*, hal. 385 – 387).

Lampiran–2

PERSETUDJUAN RENVILLE :

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan
Pemerintah Republik Indonesia
Persetudjuan gentjatan-sendjata antara Pemerintah Belanda dan
Ditanda-tangani pada pertemuan jang ke-empat
pada tanggal 17 Djanuari 1948

Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia jang dalam persetudjuan ini disebut para pihak, bersama ini menjetudjui seperti berikut:

1. Bahwa suatu perintah tinggal tetap (stand fast) dan menghentikan tembak-menembak (cease-fire) akan dikeluarkan oleh kedua pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditanda-tangani persetudjuan ini dan akan berlaku sepenuhnja didalam empatpuluh delapan djam. Perintah itu berlaku untuk pasukan-pasukan kedua pihak disepandjang garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam Proklamasi Pemerintah Hindia-Belanda pada 29 Agustus 1947, jang akan dinamakan garis statusquo, dan didaerah-daerah seperti jang dimaksud dalam ajat jang berikut.
2. Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan dibentuk daerah-daerah jang akan dikosongkan oleh tentara (demilitarized-zones), pada umumnja sesuai dengan garis statusquo tersebut diatas; daerah-daerah itu pada pokoknja mengenai daerah-daerah diantara garis statusquo, dan disatu pihak garis kedudukan Belanda jang terkemuka dan, dilain pihak garis kedudukan Republik jang terkemuka lebarnja rata-rata daerah-daerah itu kira-kira bersamaan.

3. Bahwa dalam mengadakan daerah-daerah jang dikosongkan tentara itu sekali-kali tidak mengurangi hak-hak tuntutan-tuntutan atau kedudukan para pihak menurut resolusi-resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus serta 1 Nopember 1947.

4. Bahwa setelah diterima apa jang tersebut diatas oleh kedua pihak, Komisi Tiga Negara bersedia untuk memperbantukan kepada kedua pihak pembantu-pembantu militernja jang akan dipertanggung-djawabkan, terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah salah satu peristiwa memerlukan penjelidikan dari pembesar-pembesar jang lebih titinggi dari satu atau kedua pihak.

5. Bahwa, sebelum ada penjelesaian politik, tanggung djawab atas pemeliharaan hukum serta ketertiban dan keamanan djiwa dan harta benda didalam daerah-daerah jang akan dikosongkan oleh tentara itu tinggal tetap ditangan pasukan-pasukan polisi sipil dari masing-masing pihak. (Perkataan polisi sipil berarti pula pemakaian buat sementara orang-orang militer sebagai polisi sipil, tetapi pasukan-pasukan polisi itu adalah dibawah perintah sipil). Pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan bersedia untuk memberi nasehat kepada pembesar-pembesar jang bersangkutan dari kedua pihak dan untuk membantu dalam pekerdjaan-pekerdjaan lain jang dianggap perlu, kalau diminta. Antara lain, mereka harus:

a) mengumpulkan pembesar-pembesar polisi jang disediakan oleh tiap-tiap pihak dalam daerahnja jang dikosongkan oleh tentara itu untuk mengikuti pembantu-pembantu militer dalam pekerdjaannja dan perondaannja didalam daerah jang dikosongkan oleh tentara. Pembesar-pembesar polisi dari satu pihak tidak boleh meronda didalam atau melalui daerah jang dikosongkan oleh tentara lain pihak kalau tidak disertai oleh seorang pembantu militer Komisi Tiga Negara dan seorang pembesar polisi dari lain pihak.

b) memperbaiki perhubungan kerdja-sama antara pasukan-pasukan polisi kedua pihak.

6. Bahwa perdagangan dan perhubungan antara semua daerah diperbolehkan sedapat mungkin; larangan-larangan jang dianggap perlu akan disetudjui oleh kedua pihak dengan bantuan Komisi Tiga Negara dan wakil-wakilnja kalau perlu.

7. Bahwa persetudjuan ini mengandung pula pokok-pokok jang berikut jang pada azasnya telah disetudjui oleh kedua pihak.

a) Melarang sabotage, intimidasi, dan balas-dendam serta perbuatan-perbuatan yang bersifat sedemikian pula terhadap orang-orang, golongan-golongan dan harta-benda, termasuk djuga pengrusak harta-benda apapun djuga dan jang dimiliki siapapun djuga, serta menggunakan segala tenaga jang ada padanja untuk mentjapai maksud itu.
b) Mentjegah pidato-pidato radio atau propaganda apapun djuga jang bermaksud menghasut atau menjesatkan pikiran tentara dan penduduk.
c) Mengadakan pidato-pidato radio serta mengambil lain-lain tindakan untuk memberi penerangan kepada semua tentara dan penduduk tentang keadaan jang genting dan tentang perlunja untuk tundak kepada apa jang dimaksud dalam sub a) dan b)
d) Kesempatan sepenuhnja untuk menjelidiki harus diberikan kepada pembantu-pembantu militer atau sipil jang diperbantukan kepada Komisi Tiga Negara.
e) Menghentikan dengan segera penerbitan komunike gerakan harian atau lain-lain keterangan tentang tindakan-tindakan militer, ketjuali kalau sebelumnja ada persetudjuan jang tertulis dari kedua pihak, selain dari pada pengumuman mingguan daftar orang-orang (mentjatat nama-nama, nomor dan alamat) jang telah terbunuh atau tewas dari luka-luka jang diderita dalam pertempuran.
f) Menerima azas untuk melepaskan tawanan-tawanan dari masing-masing pihak dan memulai perundingan-perundingan dengan maksud untuk melaksanakannya setjara tepat dan tjepat, pada azasnja penglepasan ini tidak memandang djumlahnja tawanan-tawanan jang dipegang oleh salah satu pihak.

8. Bahwa pada penerimaan jang tertulis diatas pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan segera mengadakan penjelidikan untuk menentukan apakah dan dimana teristimewa di Djawa-Barat, pasukan-pasukan tentara Republik masih melandjutkan perlawanan dibelakang kedudukan-kedudukan garis terkemuka dari pasukan-pasukan Belanda.

Kalau penjelidikan membenarkan adanja pasukan-pasukan sedemikian, maka pasukan-pasukan itu harus diundurkan selekas mungkin dan sebaik-baiknja didalam 21 hari, sebagai tertjantum dalam pasal jang berikut.

9. Semua pasukan-pasukan dari masing-masing pihak didaerah manapun djuga jang telah disetudjui untuk dikosongkan oleh tentara atau didaerah mana pun disebelah daerah pihak lain jang dikosongkan oleh tentara, akan pindah dengan aman kedaerahnja sendiri jang dikosongkan oleh tentara dengan membawa semua sendjata dan perlengkapan militer dibawah pengawasan pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara. Kedua belah pihak berusaha memudahkan pemindahan setjara tjepat dan damai dari pasukan-pasukan jang bersangkutan.
10. Persetudjuan ini dianggap berlaku, ketjuali djika salah satu pihak memberi-tahukan kepada Komisi Tiga Negara dan kepada pihak lain, bahwa dia berpendapat gentjatan perang ini tidak ditaati oleh lain pihak, dan oleh karenanya persetudjuan ini harus dibatalkan.

Atas nama Pemerintah Keradjaan Belanda	Atas nama Pemerintah Republik Indonesia
Raden Abdoelkadir Wdjojoatmodjo	*Mr. Amir Sjarifuddin,*
(Ketua Delegasi)	(Ketua Delegasi).

Tanda-tanda-tangan jang diatas dibubuhkan pada tanggal 17 Djanuari 1948, diatas kapal U.S.S. *Renville*, dan disaksikan oleh wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia dan sekretaris Komisi Tiga Negara, jang tanda-tangannja dibubuhkan disini sebagai saksi-saksi.

Ketua	:	Mr. Justice Richard Kirby (Australia)
Wakil-wakil	:	Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
		Dr. Frank Graham (Amerika Serikat).
Sekretaris	:	Mr. T.G. Narayanan.

L a m p i r a n I

Pendjelasan tentang persetudjuan

1. Mengenai ajat 1 dari persetudjuan tadi. berarti bahwa kedua pihak harus berusaha dengan segera dan dengan semua alat jang ada padanja untuk melaksanakan semua pokok-pokok persetudjuan gentjatan sendjata: berarti pula bahwa. djika salah satu pihak menemui kesulitan-kesulitan istimewa. dalam melaksanakan sepenuh-penuhnja kewadjiban jang diberikan kepadanja oleh persetudjuan gentjatan sendjata dalam beberapa hari jang ditetapkan. sesudah diberitahukan kepada lain pihak, pembatasan waktu empatpuluh delapan (48) djam jang ditetapkan dalam pasal pertama dari usul-usul akan diperpandjang sampai paling lama duabelas (12) hari.
2. Mengenai ajat 2 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa djika sebagai diharapkan. persetudjuan gentjatan sendjata lambat laun dilaksanakan dan keadaan umum terus menerus mendjadi baik, daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara akan diperbesar lagi. Soal memperbesarkan daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara. atas permintaan salah satu pihak. akan dipertimbangkan segera oleh pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara. jang bertindak sesuai dengan maksud ajat 5. akan memberi nasehat kepada pembesar-pembesar jang bersangkutan.
3. Mengenai ajat 4 dari persetudjuan tadi. berarti bahwa pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara, dalam mendjalankan ajat 4 dari persetudjuan gentjatan sendjata akan mendapat segala kesempatan untuk menetapkan apakah sesuatu peristiwa memerlukan pemeriksaan oleh pembesar-pembesar jang lebih tinggi dari salah satu pihak atau kedua pihak, dalam hal mana mereka pada waktu itu djuga dengan sendirinja akan menjampaikan soal itu kepada penjuruhnja, jaitu Komisi Tiga Negara. jang bersedia untuk membantu dalam menjelesaikan perbedaan-perbedaan faham antara kedua pihak, jang mengenai gentjatan perang.

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Prinsip-prinsip jang merupakan dasar jang telah disetudjui untuk melakukan perundingan politik disetudjui dalam pertemuan ke-empat tanggal 17 Djanuari 1948

Komisi Tiga Negara telah mendapat keterangan dari delegasi Keradjaan Belanda dan dari delegasi Republik Indonesia, bahwa, karena persetudjuan gentjatan-sendjata telah ditanda-tangani, Pemerintah mereka menerima prinsip dibawah ini atas dasar mana perundingan-perundingan politik akan dilakukan:

1. Bahwa bantuan Komisi Tiga Negara supaja dilandjutkan dalam pelaksanaan dan penanda-tanganan suatu persetudjuan untuk penjelesaian perselisihan politik dipulau Djawa, Sumatera dan Madura, berdasarkan prinsip-prinsip didalam Persetudjuan Linggadjati.
2. Diinsjafi, bahwa masing-masing pihak tidak berhak menghalang-halangi kemerdekaan pernjataan gerakan-gerakan rakjat kearah organisasi politik jang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Persetudjuan-Linggadjati. Diinsjafi djuga, bahwa masing-masing pihak akan mendjamin kemerdekaan berkumpul, berbitjara dan mengeluarkan pengumuman setiap waktu, asal sadja dalam djaminan ini terkandung arti membenarkan berlakunja kekerasan dan perbuatan pembalasan.
3. Diinsjafi, bahwa putusan-putusan mengenai perubahan dalam pemerintahan daerah hanja dapat didjalankan dengan persetudjuan penuh dan merdeka dari penduduk daerah-daerah tersebut dan apabila keamanan dan kebebasan daripada-paksaan bagi penduduk sudah terdjamin.
4. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetudjuan politik supaja dibuat aturan-aturan untuk berangsur-angsur mengurangi pasukan-pasukan bersendjata dari kedua pihak.
5. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetudjuan gentjatan-sendjata setjepat mungkin aktiviteit ekonomi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan dihidupkan kembali dengan

kerdja-sama antara kedua pihak: dalam pada itu diingat djuga kepentingan bagian-bagian lainnja jang merupakan Indonesia.

6. Bahwa aturan-aturan diadakan agar terdapat waktu jang lajak, jaitu tidak kurang dari enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun setelah penanda-tanganan persetudjuan: dalam waktu itu akan berlaku perundingan serta pertimbangan-pertimbangan jang bebas dari paksaan dan merdeka mengenai soal-soal jang penting. Pada achir waktu itu akan dilakukan pemilihan-merdeka supaja rakjat menentukan sendiri tentang perhubungan-politiknja dengan Negara Indonesia Serikat.
7. Bahwa suatu badan pembuat undang-undang dasar akan dipilih selaras dengan djalan jang demokratis guna merentjanakan suatu undang-undang dasar bagi Negara Indonesia Serikat.
8. Diinsjafi, bahwa djika sesudah penanda-tanganan persetudjuan sebagai tersebut dalam pasal 1. salah satu pihak minta kepada Serikat Bangsa-Bangsa untuk mengadakan suatu badan guna menindjau keadaan sewaktu-waktu hingga kedaulatan dipindahkan dari pemerintah Nederland kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak jang lain akan mempertimbangkan permintaan itu dengan saksama.
9. Kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Indonesia.
10. Kerdja-sama antara bangsa-bangsa Nederland dan Indonesia.
11. Suatu negara berdaulat atas dasar federal dengan suatu undang-undang dasar jang akan tertjapai dengan djalan demokratis.
12. Suatu uni antara Negara Indonesia Serikat dan lain-lain bahagian Keradjaan Nederland dibawah radja Nederland.

Disetudjui untuk pemerintah
Keradjaan Nederland
(tt) *Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo*
(Ketua Delegasi).

Disetudjui untuk pemerintah
Republik Indonesia
(tt) *Mr. Amir Sjarifuddin*
(Ketua Delegasi).

Wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia, dan sekretaris Komisi, jang tanda-tangannja dibubuhkan disini pada tanggal 17 Djanuari 1948 di kapal U.S.S. Renville menjadi saksi bahwa prinsip-prinsip tersebut di atas, disetudjui sebagai dasar untuk perundingan-perundingan politik jang akan dilakukan.

Ketua : (tt) Mr. Jus.tice Richard C. Kirby (Australia).
Wakil-wakil : (tt) Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
: (tt) Dr. Frank P. Graham (Amerika).
Sekretaris : (tt) Mr. T.G. Narayanan.

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Enam prinsip tambahan untuk
Perundingan guna mentjapai penjelesaian politik Dikemukakan oleh Komisi Tiga Negara dalam pertemuan keempat pada tanggal 17 Djanuari 1948

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa diantara lain-lain prinsip jang berikut ini merupakan dasar perundingan-perundingan untuk mentjapai penjelesaian politik.

1. Kedaulatan diseluruh Hindia Belanda ada dan tetap ada pada keradjaan Nederland sampai, setelah suatu masa perantaraan jang ditentukan, keradjaan Nederland memindahkan kedaulatannja kepada Negara Indonesia Serikat.
   Sebelum berachir masa perantaraan tersebut, Kekeradjaan Nederland dapat memindahkan hak-hak, kewadjiban-kewadjiban dan pertanggungan-djawab jang lajak kepada suatu pemerintah federal sementara dari daerah-daerah Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu. Negara Indonesia Serikat, apabila ini sudah dibentuk, akan merupakan suatu

negara jang berdaulat dan merdeka sebagai partner jang sedjadjar dengan keradjaan Nederland, dalam Uni Nederland-Indonesia dengan radja Nederland sebagai kepala. Status Republik Indonesia adalah status suatu negara didalam Negara Indonesia Serikat.

2. Dalam pemerintah federal sementara, jang diadakan sebelum pengesahan undang-undang-dasar Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu, semua negara akan diberi perwakilan jang lajak.

3. Sebelum pembubaran Komisi Tiga Negara, salah satu pihak dapat minta supaja bantuan Komisi itu diteruskan guna menolong dalam penjelesaian perselisihan antara kedua pihak jang berhubungan dengan persetudjuan politik dan jang mungkin timbul selama masa perantaraan itu. Pihak jang lain tidak akan memadjukan keberatan terhadap permintaan itu; permintaan tersebut akan dikemukakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa supaja mendapat perhatian Dewan itu, oleh pemerintah Nederland.

4. Dalam waktu tidak kurang enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun sesudah penanda-tanganan persetudjuan ini akan dilakukan suatu pemungutan suara rakjat untuk menentukan apakah penduduk-penduduk dari berbagai daerah di Djawa, Sumatera dan Madura menghendaki supaja daerahnja merupakan bahagian Republik Indonesia atau bahagian negara lain dalam Negara Indonesia Serikat; pemungutan suara rakjat itu akan dilakukan dengan peninjauan Komisi Tiga Negara, jaitu kalau satu pihak, selaras dengan procedure jang tertera dalam pasal 3 diatas, minta djasa Komisi dalam kedudukannja sebagai Committee of Good Offices. Kedua pihak dapat djuga bersetudju mengambil djalan jang lain daripada pemungutan suara guna mendapat kepastian tentang-kehendak penduduk-penduduk.

5. Sesudah terdapat gambaran (susunan) negara-negara itu dengan djalan selaras dengan procedure sebagai termaktub pada pasal 4 diatas, suatu badan pembuat undang-undang-dasar akan dibentuk dengan djalan demokratis guna merantjang suatu undang-undang-dasar bagi Negara Indonesia Serikat. Perwakilan berbagai negara dalam badan tersebut akan seimbang dengan besarnja djumlah penduduk.

6. Djika sesuatu negara memutuskan tidak akan mengesahkan undang-undang dasar itu dan berkehendak, selaras dengan prinsip pasal-pasal 3 dan 4 Persetudjuan Linggadjati, untuk merundingkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat dan dengan keradjaan Nederland, maka kedua pihak masing-masing tidak akan mengemukakan keberatannja.

Keterangan Red.: 6 Prinsip Politik K.T.N. ini ditanda tangani pada tanggal 19/1-1948.

"Usul Natal" Komisi Tiga Negara

Dalam pidatonja sesudah penanda-tanganan persetudjuan gentjatan-senjaga dan prinsip-prinsip politik pada tanggal 17 Djanuari 1948, Ketua Delegasi Republik Indonesia Mr. Amir Sjarrifuddin menjatakan keketjewaannja, bahwa "Usul-usul mengenai gentjatan-sendjata jang dikemukakan oleh Komisi pada waktu-waktu jang lalu, jang telah diterima oleh Republik, dianggap tidak dapat diterima oleh pihak Belanda".

Meskipun tidak dikatakannja, bolehlah dianggap, bahwa keketjewaan Mr. Amir terutama didasarkan pada tidak diterimanja "Usul Natal" Komisi Tiga Negara.

Apa isi usul ini sebenarnja tak pernah diumumkan dengan resmi, tetapi telah botjor pula kepada pers, terutama disiarkan oleh "United Press" dan kantor-kantor berita asing serta "Antara".

"Usul Natal" Komisi Tiga Negara, sebagai jang tersiar disana-sini dalam pers, dapat kita simpulkan dalam beberapa pokok jang terpenting:

mengenai gentjatan-sendjata: disitu disebut-sebut pula "garis demarkasi tanggal 29 Agustus", tetapi tidak dinamakannya "garis statusquo", artinja hanja disebutnja berkenaan dengan keadaan sekarang dan untuk sementara diperlukannja sebagian besar mendjalankan gentjatan-sendjata; demiliterisasi harus dilakukan didaerah sebelah-menjebelah garis tersebut, dan disebut-sebut pula bahwa pasukan-pasukan Belanda harus mundur sampai kedudukan tanggal 20 Djuli, jaitu kedudukan sehari sebelum perang kolonial dimulai; djumlah tentara harus lambat laun dikurangi, pengosongan "pockets" tidak disebut.

mengenai politik: dasar-dasar Linggadjati dikemukakan, didalamnja termasuk pula pembentukan Negara Indonesia Serikat; pemerintahan sipil harus segera dikembalikan pada kedudukan dan keadaannja sebelum perang kolonial.

Beberapa tjatatan

Berkenaan dengan penolakan "Usul-Natal" Komisi Tiga Negara oleh pihak Belanda tersebut, perlu ditjatat, bahwa kewadjiban pertanggungan djawab dan kemungkinan-kemungkinan bagi Komisi tersebut adalah terbatas pada "good-offices" sadja, karena tidak mempunyai kekuasaan sebagai arbiter. Kewadjibannja hanja terbatas pada menerima usul-usul dari kedua pihak, menjampaikan usul pihak jang satu kepada pihak lainnja djika dipandang perlu, mengemukakan sugesti-sugesti sendiri, menghubungkan kedua pihak dan memberi laporan-laporan, diantaranja pembantu-pembantu militer, jang bisa melakukan penindjauan dan membantu kedua pihak dalam usaha mentjapai penjelesaian.

Beberapa tjatatan lainnya :

20 Djuli 1974 djam 24.00 malam permulaan perang - kolonial.

Achir Djuli soal Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan oleh Australia dan India.

1 Agustus dalam sidang ke-173 Dewan Keamanan diputuskan:"..... minta kepada kedua belah pihak supaja dengan segera menghentikan permusuhan dengan djalan arbitrage atau dengan djalan damai lainnja".

4 Agustus pihak Republik baru menerima putusan tersebut. (via Belanda) dan perintah penghentian tembak-menembak diutjapkan.

7 Agustus usul arbitrage Pilipina ditolak. Djuga usul arbitrage Australia dan Polandia jang diutjapkan kemudian tidak diterima. Rusia dan Polandia atjap kali mengusulkan penarikan tentara Belanda, tetapi ditolak.

25 Agustus resolusi (usul Rusia) membentuk komisi-11-negara jang diterima dengan 7 suara pro, 2 suara contra dan 2

blanko. di-veto oleh Perantjis. Usul Amerika untuk membentuk komisi "good-offices" diterima dengan 8 suara pro. 3 blanko.

8 Oktober Komisi Tiga Negara untuk pertama kalinja bersidang di New York.

27 Oktober Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia.

Lampiran 3

STATEMEN RUM – ROYEN

I. STATEMENT DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

(Diutjapkan oleh Mr. Moh. Rum)

Sebagai Ketua Delegasi Republik saja diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menjatakan kesanggupan mereka sendiri (persoonlijk), sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Djanuari 1949 dan petundjuk-petundjuknja tertanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tertjapainja:

1. pengeluaran perintah kepada pengikut-pengikut Republik jang bersendjata untuk menghentikan perang gerilja;
2. kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan, dan
3. turut serta pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempertjepat penjerahan kedaulatan jang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Sarekat. dengan tidak bersjarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaja politik demikian diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnja setelah dipulihkan di Jogjakarta.

II STATEMENT DELEGASI BELANDA

(Diutjapkan oleh Dr. van Royen)

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menjatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan jang baru sadja diutjapkan oleh Mr. Rum, ia menjetudjui kembalinja Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Delegasi Belanda selandjutnja menjetudjui pembentukan satu panitya-bersama atau lebih dibawah auspices UNCI dengan maksud:

a. mengadakan penjelidikan dan persiapan jang perlu sebelum kembalinja Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta.
b. mempeladjari dan memberi nasehat tentang tindakan-tindakan jang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilja dan kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan.

Pemerintah Belanda setudju bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan djabatannja jang sepatutnja dalam satu daerah jang meliputi Karesidenan Jogjakarta dan bahwa ini adalah satu langkah jang dilakukan sesuai dengan maksud petundjuk-petundjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.

Lampiran 4

KOMUNIKE BERSAMA
KONPERENSI ASIA – AFRIKA
JANG TELAH DIADAKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 18 S/D 24 APRIL 1955.

Konperensi negara2 Asia-Afrika telah berkumpul atas undangan para perdana menteri Burma, Sailan, India, Indonesia dan Pakistan di Bandung dari tanggal 18 hingga 24 April dan dikundjungi, ketjuali oleh kelima negara penjelenggara ini, djuga oleh negara2:

1. Afghanistan
2. Kambodja
3. Rep. Rakjat Tiongkok.
4. Mesir
5. Ethiopia
6. Pantai Emas
7. Iran
8. Irak
9. Djepang
10. Jordania
11. Laos
12. Libanon
13. Liberia
14. Libia
15. Nepal
16. Pilipina
17. Saudi Arabia
18. Sudan
19. Suriah
20. Muang Thai
21. Turki
22. Republik Demokrasi Vietnam (Utara)
23. Negara Vietnam (Sel.)
24. Yaman

Konperensi Asia-Afrika telah menindjau soal2 jang mengenai kepentingan bersama negara2 Asia dan Afrika dan telah merundingkan tjara2 bagaimana rakjat negara2 ini dapat bekerdja-sama dengan lebih erat dilapangan ekonomi, kebudajaan dan politik.

A. KERDJA-SAMA EKONOMI.

1. Konperensi Asia-Afrika mengakui mendesaknja keperluan untuk memadjukan perkembangan ekonomi didaerah Asia dan Afrika. Diantara negara2 peserta terdapat keinginan umum untuk bekerdja-sama dalam lapangan ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan nasional masing2.

Usul2 mengenai kerdja-sama dalam lapangan ekonomi diantara negara2 peserta sendiri tidaklah menutup keinginan atau kebutuhan akan kerdja-sama dengan negara2 jang terletak diluar daerah ini, termasuk penanaman modal asing.

Selanjutnja diakui, bahwa bantuan jang diterima oleh beberapa negara peserta konperensi jang tertentu dari luar daerah ini, melalui peraturan2 internasional telah memberi sumbangan jang besar bagi pelaksanaan rentjana pembangunan mereka.

2. Negara2 peserta konperensi menyetudjui untuk saling memberikan bantuan tehnik, sebanjak mungkin jang dapat dilaksanakan dalam bentuk tenaga2 ahli, pelatih2, usaha2 perintis dan perlengkapan2 bagi keperluan demonstrasi; untuk saling tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman, pendirian lembaga2 nasional dan, bila mungkin, lembaga2 regional untuk latihan dan penjelidikan bagi penjebaran pengetahuan dan ketjakapan teknik, dengan bekerdja-sama dengan badan2 internasional jang ada.

3. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan: dibentuknja dengan segera suatu Dana Istimewa PBB untuk Perkembangan Ekonomi; supaja Bank Internasional untuk Pembangunan dan Kemadjuan (International Bank for Reconstruction and Development) menjediakan alokasi dari sebagian terbesar dari kekajaannja untuk negara2 Asia dan Afrika; dibentuknja dengan segera suatu Kerdja-sama Keuangan internasional jang usaha2nja hendaknja meliputi tertjapainja penanaman modal dengan tjara jang adil; dan dorongan bagi diperluasnja usaha-usaha bersama diantara negara-negara Asia-Afrika jang dapat membawa keuntungan bagi kepentingan mereka bersama.

4. Konperensi Asia-Afrika mengakui perlunja diadakan usaha2 untuk menstabilisasikan perdagangan barang2 didaerahnja. Prinsip untuk memperluas lingkungan perdagangan dan perdagangan multilateral telah diterima oleh konperensi. Tetapi diakui pula, bahwa beberapa negara akan terpaksa mendjalankan perdagangan bilateral berhubung dengan keadaan ekonominja.

5. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan diambilnja tindakan kolektif oleh negara2 peserta untuk mentjapai stabilisasi harga2 internasional dan permintaan barang2 keperluan pertama dengan djalan perdjandjian2 bilateral dan multilateral, dan agar selama dapat didjalankan serta memang diinginkan hendaknja mereka mengambil sikap jang sama mengenai soal2 ini dalam Panitia Penasihat Tetap P.B.B. untuk Perdagangan Barang2 Internasional (United Nations Permanent Advisory Commission and International Commodity Trade) dan lain2 forum internasional.

6. Konperensi Asia-Afrika selandjutnja mengandjurkan supaja: negara2 Asia-Afrika merubah perdagangan ekspornja dengan mengolah bahan2 mentahnja sendiri – selama ekonomis dapat dipertanggungdjawabkan-sebelum mengekspornja: perdagangan intra-regional hendaknja diadjukan dan pertukaran delegasi2 dagang dan rombongan2 kaum pengusaha diberi dorongan: pertukaran keterangan2 dan tjontoh2 hendaknja diandjur2kan dengan maksud, supaja perdagangan intra-regional dapat diperluas: fasilitet2 jang biasa bagi perdagangan transito hendaknja diberikan kepada negara2 jang letaknja dilingkungi oleh negara2 lain.

7. Konperensi Asia-Afrika menganggap soal2 perkapalan penting sekali dan menjatakan penjesalannja, bahwa maskapai2 pelajaran se-waktu2 merubah tarif pengangkutannja jang menjatakan kerap kali merugikan negara2 peserta. Konperensi mengandjurkan, supaja soal ini dipeladjari dan sesudah ini supaja diadakan tindakan bersama untuk memaksa maskapai2 perkapalan jang bersangkutan mengambil sikap jang lebih pantas. Telah disarankan, supaja dipeladjari pengangkutan dengan kereta api bagi perdagangan transito.

8. Konperensi Asia-Afrika menjetudjui untuk memberikan dorongan bagi pembentukan bank2 dan perseroan2 pertanggungan (insurance companies) nasional dan regional .

9. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa pertukaran keterangan2 mengenai hal2 jang berhubungan dengan semuanja itu, seperti misalnja jang mengenai transfer keuntungan padjak, mungkin akan dapat membawa kepada suatu perumusan politik bersama.

10. Konperensi Asia-Afrika menegaskan pentingnja arti perkembangan penggunaan tenaga nuclear untuk keperluan2 damai bagi negara2 Asia-Afrika. Konperensi menjambut dengan gembira inisiatif negara2 jang terutama bersangkutan untuk menjediakan keterangan2 mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan2 damai; mendesak segera dibentuknja suatu Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency) dimana negara2 Asia harus mempunjai wakil2 jang tjukup, terutama dalam kekuasaan eksekutip dari pada badan ini, dan mengandjurkan kepada pemerintah negara2 Asia dan Afrika untuk mempergunakan se-baik2-nja kesempatan untuk mendapat latihan dan fasilitet2 lainnja mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan2 damai jang ditawarkan oleh negara2 jang menjokong rentjana sematjam ini.

11. Konperensi Asia-Afrika menjetudjui ditundjuknja pendjabat2 penghubung di negara2 peserta oleh masing2 pemerintah negara ini untuk pertukaran keterangan2 dan pendapat2 mengenai hal2 jang dapat memberi keuntungan bersama. Konperensi mengandjurkan, supaja negara2 peserta mempergunakan se-baik2-nja kesempatan jang diberikan oleh organisasi2 internasional jang telah ada dan mengandjurkan kepada negara2 jang belum mendjadi anggota organisasi2 sematjam ini, tetapi berhak untuk diterima sebagai anggota, supaja berusaha mendapatkan keanggotaannja.

12. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan diadakannja perundingan2 pendahuluan antara negara2 peserta dalam forum2 internasional dengan maksud sebanjak mungkin menarik keuntungan bagi kepentingan ekonomi bersama mereka. Tetapi ini bukannja dimaksudkan untuk membentuk suatu blok regional.

B. KERDJA - SAMA KEBUDAJAAN.

1. Konperensi Asia-Afrika jakin, bahwa diantara usaha2 jang terpenting untuk memadjukan saling mengerti diantara bangsa2, jalan usaha memadjukan kerdjasama kebudajaan. Asia dan Afrika adalah tempat lahirnja agama2 dan kebudajaan2 jang besar jang telah memperkaja kebudajaan2 dan peradaban2 lain dan dalam proces itu telah mendjadi makin kaja pula. Dengan begitu maka kebudajaan2 Asia dan Afrika mempunjai dasar2 rochani jang

universil. Tetapi negara2 Asia dan Afrika telah terputus selama abad2 jang lalu.

Bangsa2 Asia dan Afrika sekarang berkehendak dengan sungguh2 untuk membaharui hubungan2 kebudajaan mereka jang lama dan memperkembangkan hubungan2 baru dalam hubungan dunia modern sekarang ini. Semua negara peserta konperensi menjatakan kehendak mereka untuk bekerdja jang lebih erat dalam lapangan kebudajaan.

2. Konperensi Asia-Afrika memperhatikan kenjataan, bahwa adanja kolonialisme dibanjak bagian dari pada Asia dan Afrika, dalam bentuk apapun djuga, tidak hanja menghalang-halangi kerdjasama kebudajaan, tetapi djuga menindas kebudajaan nasional dari rakjat. Beberapa negara2 pendjadjah telah mengabaikan kepada rakjat negara2 djadjahannja hak2 dasar mereka dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan, jang meng-halang2i perkembangan kepribadian mereka dan djuga mentjegah adanja hubungan kebudajaan dengan bangsa2 Asia dan Afrika lainnja. Hal ini terutama njata dalam hal Tunisia, Aldjazair dan Marokko, dimana hak dasar rakjatnja untuk mempeladjari bahasa dan kebudajaan mereka sendiri telah ditindas. Discriminasi sematjam ini telah didjalankan pula terhadap bangsa2 Afrika dan bangsa2 kulit berwarna dibeberapa bagian benua Afrika. Konperensi merasa, bahwa tindakan2 ini merupakan pelanggaran hak2 dasar manusia, meng-halang2i berkembangnja kebudajaan didaerah ini dan pula meng-halang2i kerdjasama kebudajaan dalam lapangan internasional jang lebih luas. Konperensi dengan ini mengutuk pelanggaran hak2 dasar manusia dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan dibeberapa daerah di Asia dan Afrika dan bentuk2 lain dari penindasan kebudajaan. Konperensi terutama mengutuk racialisme sebagai alat untuk melakukan penindasan dalam lapangan kebudajaan.

3. Dalam pandangannja mengenai pengembangan kerdjasama kebudajaan diantara negara2 Asia dan Afrika sama sekali bukanlah maksud konperensi untuk mengetjualikan atau menjaingi golongan bangsa2 dan peradaban serta kebudajaan lain. Sesuai dengan tradisi toleransi dan universalitet negara2 Asia dan Afrika, konperensi berpendapat, bahwa kerdjasama kebudajaan antara mereka haruslah diperkembangkan dalam hubungan kerdjasama sedunia jang lebih luas.

Berdampingan dengan pengembangan kerdjasama kebudajaan antara bangsa2 Asia dan Afrika negara2 Asia-Afrika berkehendak pula mengembangkan hubungan kebudajaan mereka dengan negara2 lain. Hal ini mereka anggap akan dapat memperkaja kebudajaan mereka sendiri dan memberikan sumbangan bagi tertjapainja perdamaian dunia dan saling pengertian.

4. Masih banjak negara2 di Asia dan Afrika jang belum dapat memperkembangkan dirinja dalam lapangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan tehnik. Konperensi mengandjurkan, supaja negara2 di Asia dan Afrika jang dalam hal ini telah lebih beruntung, memberikan fasilitet2 bagi masuknja mahasiswa2 dan orang2 jang hendak mengikuti latihan dari negara2 tersebut diatas tadi kedalam badan2 pendidikan mereka. Fasilitet2 sematjam itu hendaknja diberikan pula kepada penduduk bangsa Asia dan Afrika jang pada dewasa ini dilanggar haknja untuk mendapatkan kesempatan menerima pendidikan jang lebih tinggi.

5. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa usaha2 memadjukan kerdjasama kebudajaan antara negara2 Asia dan Afrika hendaknja ditudjukan kepada:

1. mendapat pengetahuan tentang negara2 satu sama lain.
2. pertukaran kebudajaan dan
3. pertukaran keterangan2.

6. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa dalam tingkatan sekarang ini hasil2 terbaik dalam kerdjasama kebudajaan akan dapat diperoleh dengan mengadakan perdjandjian2 bilateral untuk memenuhi andjuran2 konperensi, dan dengan tindakan masing2 negara sendiri dimana mungkin dan dapat.

C. HAK2 MANUSIA DAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI.

1. Konperensi Asia-Afrika menjatakan sokongannja jang sepenuhnja kepada prinsip2 dasar Hak2 Manusia seperti jang tertjantum dalam piagam P.B.B. dan memperhatikan Pernjataan tentang Hak2 Manusia (Universal Declaration of Human Rights) sebagai dasar umum bagi seluruh rakjat. Konperensi menjatakan sokongan sepenuhnja kepada prinsip untuk menentukan nasib sendiri, seperti termuat dalam piagam P.B.B. dan memperhatikan resolusi P.B.B. mengenai hak2 rakjat dan bangsa2 untuk menen-

tukan nasib sendiri, jang merupakan sjarat pertama untuk dapat menikmati hak2 dasar manusia seluruhnja.

2. Konperensi Asia-Afrika menjesalkan politik dan tindakan mem-beda2kan dan diskriminasi jang merupakan dasar pemerintahan dan hubungan2 diantara manusia2 di-daerah2 luas di Afrika dan lain2 bagian dunia. Tindakan sematjam itu tidak hanja suatu pelanggaran besar terhadap hak2 manusia, tetapi djuga terhadap nilai2 dasar peradaban dan martabat manusia.

Konperensi menjatakan simpatinja jang besar dan sokongan kepada sikap gagah berani dari para korban2 diskriminasi bangsa2, terutama kepada sikap penduduk bangsa Afrika, India dan Pakistan di Afrika Selatan; Konperensi menghargai mereka semua jang menjokong soal mereka itu; menguatkan kebulatan tekad bangsa2 Asia dan Afrika untuk menghapuskan setiap bekas rasialisme jang mungkin masih ada dalam negerinja, dan berdjandji mempergunakan seluruh pengaruh moralnja untuk mendjaga djangan sampai djatuh korban2 kedjahatan jang sama jang hendak mereka hapuskan dalam perdjoangan mereka.

D. MASALAH BANGSA2 JANG BELUM MERDEKA.

1. Konperensi Asia-Afrika telah membitjarakan masalah bangsa2 jang belum merdeka, kolonialisme dan keburukan2 jang timbul dari pendjadjahan serta pemerasan bangsa2 oleh kekuasaan asing.

Konperensi menjetudjui untuk:

a. menjatakan, bahwa kolonialisme dalam bentuknja jang bagaimanapun djuga adalah suatu kedjahatan jang harus segera diachiri;
b. menegaskan, bahwa didjadjahnja serta diperasnja bangsa2 oleh kekuasaan asing merupakan pelanggaran hak2 dasar manusia, bertentangan dengan piagam P.B.B. dan merupakan penghalang bagi tertjapainja perdamaian dan kerdjasama sedunia;
c. menjatakan bantuannja kepada perdjoangan untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan bagi semua bangsa2 tersebut dan,
d. menjerukan kepada negara2 jang bersangkutan, supaja memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada bangsa2 tadi.

2. Mengingat belum tertjapainja penjelesaian keadaan di Afrika Utara dan masih tetap belum diberikannja hak menentukan nasib sendiri kepada bangsa2 di Afrika Utara, konperensi Asia-Afrika menjatakan bantuannja kepada hak rakjat Aldjazair, Marokko dan Tunisia untuk menentukan sendiri dan mendesak kepada Pemerintah Perantjis untuk menjelesaikan soal ini se-tjepat2nja dengan tidak di-tunda2 lagi.

E. SOAL2 LAIN.

1. Mengingat adanja ketegangan di Timur Tengah jang disebabkan karena keadaan di Palestina dan adanja bahaja bagi perdamaian dunia jang dirupakan oleh ketegangan ini, konperensi Asia-Afrika menjatakan sokongannja kepada hak bangsa2 Arab atas Palestina dan menjerukan dilaksanakannja resolusi PBB mengenai Palestina dan ditjapainja suatu penjelesaian dengan djalan damai dari pada masalah Palestina.

2. Dalam hubungan sikap jang telah dinjatakannja mengenai penghapusan kolonialisme, konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Indonesia dalam persoalan Irian Barat jang didasarkan pada persetudjuan jang telah ditjapai antara Indonesia dan Belanda mengenai soal ini.

Konperensi Asia-Afrika mendesak pemerintah Belanda untuk setjepat mungkin memulai lagi perundingan2, untuk menepati kewadjiban2 mereka seperti jang ditentukan dalam persetudjuan tersebut diatas tadi dan menjatakan harapannja, supaja P.B.B. mau membantu pihak2 jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian perselisihan ini dengan djalan damai.

3. Konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Yaman dalam persoalan Aden dan bagian2 Selatan dari pada Yaman jang dikenal sebagai daerah2 protektorat, serta mendesak pihak2 jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian masalah ini dengan djalan damai.

F. MEMADJUKAN PERDAMAIAN DAN KERDJASAMA DI-DUNIA

1. Memperhatikan kenjataan, bahwa masih ada beberapa negara jang belum diterima mendjadi anggota P.B.B., Konperensi

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Asia-Afrika jang beranggapan, bahwa untuk kerdjasama jang efektif dalam usaha mentjapai perdamaian dunia keanggotaan dari P.B.B. haruslah bersifat universil menjerukan kepada Dewan Keamanan untuk menjokong diterimanja semua negara2 itu jang, menurut sjarat2 jang ditentukan dalam piagam P.B.B., berhak untuk diterima sebagai anggota. Menurut pendapat konperensi Asia-Afrika, negara2 berikut ini diantara negara2 peserta konperensi, jaitu: Kambodja, Sailan, Djepang, Jordania, Laos, Libia, Nepal, Vietnam jang Bersatu, (United Vietnam) berhak pula untuk diterima mendjadi anggota.

Konperensi mempertimbangkan, bahwa perwakilan dari pada negara2 jang terletak dalam daerah Asia-Afrika dalam Dewan Keamanan, berdasarkan perwakilan menurut pembagian jang sesuai dengan letak geografis daerah2, adalah tidak tjukup. Konperensi menjatakan pendapatnja, bahwa mengenai keanggotaan jang tidak tetap dari Dewan Keamanan, negara2 Asia-Afrika, jang menurut persetudjuan jang ditjapai di London dalam 1946 tidak mendapat hak untuk dipilih, hendaknja diberi kesempatan untuk memberikan djasa2nja dalam Dewan Keamanan, supaja mereka dapat memberikan sumbangan jang efektif bagi usaha mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia.

2. Konperensi Asia-Afrika, setelah mempeladjari keadaan jang berbahaja berhubung dengan adanja ketegangan internasional dan bahaja dunia, dimana kekuatan penghantjur dari segala matjam sendjata, termasuk sendjata2 nuclear dan thermo-nuclear, tentunja akan dipergunakan, meminta perhatian dari seluruh bangsa2 bagi akibat2 jang dahsjat jang akan terdjadi apabila peperangan sematjam itu petjah.

Konperensi beranggapan, bahwa perlutjutan sendjata dan pelarangan produksi, pertjobaan dan penggunaan sendjata2 nuclear dan thermo-nuclear adalah suatu keharusan untuk menjelamatkan manusia dan peradaban dari ketakutan dan kemungkinan akan kehantjuran seluruhnja. Konperensi merasa, bahwa bangsa2 Asia dan Afrika jang berkumpul dalam konperensi ini berkewadjiban terhadap kemanusiaan dan peradaban untuk menjatakan sokongan mereka bagi perlutjutan sendjata dan pelarangan sendjata2 tersebut tadi, dan untuk menjerukan kepada negara2 jang terutama bersangkutan serta kepada pendapat umum didunia untuk diadakannja perlutjutan sendjata dan pelarangan sematjam itu.

Konperensi berpendapat, bahwa pengawasan internasional yang efektif haruslah diadakan dan dipertahankan untuk mendjamin ditepatinja perlutjutan sendjata dan pelarangan tadi dan bahwa untuk keperluan ini haruslah diambil tindakan2 jang segera dan tegas.

Dengan tudjuan untuk mentjapai dilarangnja sama sekali pembuatan sendjata-sendjata nuclear dan thermo-nuclear, konperensi menjerukan kepada semua negara-negara jang bersangkuta, untuk menghentikan pertjobaan-pertjobaan dengan sendjata-sendjata sematjam itu.

G. PERNJATAAN MENGENAI USAHA MEMADJUKAN PERDAMAIAN DAN KERDJASAMA DI DUNIA.

Konperensi Asia-Afrika memikirkan dengan rasa chawatir soal perdamaian dan kerdjasama sedunia. Konperensi melihat dengan rasa chawatir adanja ketegangan2 internasional dewasa ini dengan antjaman bahaja petjahnja perang dunia dimana dipergunakan sendjata2 atom. Masalah perdamaian mempunjai sangkut-paut jang rapat dengan masalah keamanan internasional.

Dalam hubungan ini semua negara2 didunia hendaknja bekerdja-sama, terutama melalui P.B.B., dalam usaha mentjapai pengurangan persendjataan dan penghapusan sendjata2 nuclear dibawah pengawasan internasional. Dengan djalan ini perdamaian dunia akan dapat ditjapai dan tenaga nuclear akan dapat dipergunakan se-mata2 untuk keperluan damai.

Ini akan dapat memenuhi kebutuhan2 terutama dari Asia dan Afrika, sebab kebutuhan mereka jang mendesak jalan kemadjuan sosial dan tingkat hidup jang lebih baik dalam kemerdekaan jang lebih luas.

Kemerdekaan dan perdamaian saling bergantungan. Hak untuk menentukan nasib sendiri harus dapat diketjap oleh semua bangsa2 dan kebebasan serta kemerdekaan haruslah diberikan dengan setjepat mungkin, kepada mereka jang belum merdeka. Sesungguhnja, semua bangsa2 haruslah mendapat haknja untuk memilih sendiri dengan bebas sistim politik, ekonomi atau tjara hidup jang mana jang akan dianutnja, jang sesuai dengan tudjuan2 dan prinsip2 jang termuat dalam piagam P.B.B.

Dengan bebas dari perasaan tjuriga dan takut, dan dengan saling mempertjajai dan menundjukkan goodwill, semua bangsa didunia hendaknja mendjalankan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian sebagai tetangga jang baik, dan mendjalankan kerdjasama dalam suasana persahabatan atas dasar prinsip2 berikut ini:

1). Menghormati hak2 dasar manusia dan tudjuan2 serta azas2 jang termuat dalam piagam P.B.B.
2). Menghormati kedaulatan dan integritet teritorial semua bangsa2.
3). Mengakui persamaan semua suku2 bangsa dan persamaan semua bangsa2 besar maupun ketjil.
4). Tidak melakukan intervensi atau tjampur tangan dalam soal2 dalam negeri negara lain.
5). Menghormati hak tiap2 bangsa untuk mempertahankan diri sendiri setjara sendirian atau setjara kolektif, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
6). (a) Tidak mempergunakan peraturan2 dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan chusus dari salah satu dari negara2 besar.
    (b). Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7). Tidak melakukan tindakan2 atau antjaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap intergritet territorial atau kemerdekaan politik sesuatu negara.
8). Menjelesaikan segala perselisihan2 internasional dengan djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase atau penjelesaian hakim, atau pun lain2 tjara damai lagi menurut pilihan pihak2 jang bersangkutan, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
9). Memadjukan kepentingan bersama dan kerdja-sama.
10). Menghormati hukum dan kewadjiban2 internasional.

Konperensi Asia-Afrika menjatakan kejakinannja, bahwa kerdja-sama setjara persahabatan jang sesuai dengan prinsip2 ini, akan dapat memberikan sumbangan jang efektif kepada usaha mempertahankan dan memadjukan perdamaian dan keamanan internasional, sedangkan kerdja-sama dalam lapangan ekonomi, sosial dan kebudajaan akan dapat memberikan sumbangan bagi tertjapainja kemakmuran bersama.

H. PENUTUP.

Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan supaja kelima negara penjelenggara mempertimbangkan diadakannja pertemuan berikutnja dari pada konperensi ini, dengan meminta pendapat negara2 peserta lainnja.

Bandung, 24 April 1955.

Lampiran – 5

DEKRIT KEMBALI KEPADA UUD 1945

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanja.

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementarajang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

SOEKARNO

BIBLIOGRAFI

BUKU–BUKU

Adam Malik, *Riwayat dan perdjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, Widjaja, Jakarta 1962

Adam Malik, *Politik dan Ekonomi*, Departemen Perdagangan, Jakarta 1966

Adams, Cindy, *Soekarno, An autobiography as told to Cindy Adams*, Bob Merills. New York, 1965

Ahmad Soebardjo Djojoadisoerjo, Mr, *Lahirnja Republik Indonesia*, Kinta, Jakarta, 1972

Ajip Rosidi, *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Binatjipta, Bandung, 1969

Alfian, Dr *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakjat*, Leknas, Jakarta 1971

Amin, Mr S.M., *Indonesia dibawah rezim demokrasi terpimpin*, Tintamas Jakarta, 1967

Anne Marie The, *Darah tersimbah di Djawa Barat. Gerakan Operasi Militer V, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata*, Jakarta 1965

Anspach, Ralp, The Problem of a plural Economy and its effects on Indonesia's Economy, Ann Arbor, 1963 (dissertasi)

Ali Wardhana, *Monetary Problems of an Underdeveloped Economy, with special Reference to Indonesia*, Ann Arbor 1962 (dissertasi)

Arocan SH, Dj.L, *Deklarasi Ekonomi dengan peraturan-peraturan, Pelaksanaannya dan Peraturan Ekonomi Irian Barat*, Gunung Agung Jakarta, 1963

Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII, Penjelesaian peristiwa Atjeh*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta 1965

Atoeran-Atoeran tentang Djawa Seinendan, Djawa Seinendan, Jakarta, 1945

Azis, M.A., *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1955

Benda, Harry J, *The Crescent and the Rising Sun, Indonesia Islam under the Japanese Occupation 1942 - - 1945*, W. van Hoeve, The Hague, 1958

Benda Harry J. *Japanese Military Administration in Indonesia*, Southeast Asia Studies Yale University, 1965

Biro Perantjang Nasional, *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun 1956 -- 1960*, Biro Perantjang Nasional, Jakarta, 1960

Brackman, Arnold C. *Indonesian Communism a history*, Frederick A. Praeger New York, 1963

Budiardjo, Miriam S. *Evolution toward Parliamentary Government in Indonesia; Parties and Parliament*, Georgetown 1955

Bung Hatta mengabdi pada tjita-tjita perdjuangan bangsa, Panitya Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, Jakarta 1972

Brugmans, Prof DR I.I., *et al*, *Nederlands Indië onder de Japanse bezetting. Gegevens en Documenten over de Jaren 1942 – 1945*, Franeker 1960

Daska Prijadi, *Gerakan Operasi Militer II, Penumpasan APRA Westerling Bandung, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta 1965*

Departemen Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Jakarta 1963 Department of Foreign Affairs, *Indonesia 1962*, Jakarta 1963

Departemen Pertahanan Keamanan, *Tjatur Darma Eka Karma, Doktrin Pertahanan Keamanan dan Doktrin Perdjuangan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia*, Jakarta, 1967

Departemen Pertahanan Keamanan, *Darma Pusaka 45*, Jakarta 1972

Departemen Luarnegeri, *Duapuluh lima tahun Departemen Luarnegeri*, Jakarta 1971

Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta 1965

Departemen Penerangan, *Buku Ringkasan Pembangunan Semesta*, Jakarta, 1961

Departemen Penerangan, *Amanat dan penjelasan Presiden RI tentang tindakan-tindakan Pemerintah dibidang Keuangan dan Ekonomi*, Jakarta, 1959

Departemen Penerangan, *Pidato Pertanggungan jawab Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 12 Maret 1973*, Jakarta 1973

Emil Salim, *Masalah Stabilisasi Ekonomi* Fakultas Ekonomi UI. Jakarta 1971

Eisbree, Willard H. *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements* 1940 to 1945, Harvard University Press, Cambridge (Mass), 1953

Gandasubrata, S.M., *An Account of the Japanese occupation of Banjumas* Residency, Java, March 1942 to August 1945, Cornell University Ithaca; 1953

Geertz, Clifford, *The religion of Java*, The Free Press of Glencoe, London 1964 Gunseikanbu,

Gunseikanbu, *Orang Indonesia terkemoeka di poelau Djawa*, Gunseikanbu Jakarta 1943

Gunseikanbu, *Boekoe Pengoempoelan Oendang-oendang disoesoen dengan peroebahan dan tambahan sampai penghabisan boelan 6 tahoen Sjoowa 19 (2604)* Jakarta, 1944

Harahap, Parada, *Serba sedikit tentang Pers*, Jakarta, 1952

Harahap, Parada, *Saat Bersedjarah*, Gapura, Jakarta, 1951

Harahap, Zainabun, *Operasi-operasi militer menumpas Kahar Muzakkar*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta 1965

Henry Pratt Fairchild Ph.D. LLD (ed). *Dictionary of Sociology*, Philosophical Library, New York

Herbert Feith, *The decline Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornell University Press; Ithaca 1962

Herbert Feith, *The Indonesia Election of 1955.s*, Cornell University Press Ithaca, 1957

Higgins. Benjamin, *Indonesia's Economy Stabilization and Development*, W.W. Norton, New York 1968.

Hoogenband, C. van, Schotborgh, Kolonel van het KNIL, *Nederlandsch Indië contra Japan*, 's Gravenhage 1961

Iskandar, N, *Masalah populasi dalam rangka Pembangunan dan Lingkungan*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1972

Ismail Suny SH, MCL, Prof DR, *Pertanggungan djawab Presiden menurut Konstisusi-konstitusi Indonesia*, (Prasaran pada diskusi ilmiah Fakultas Hukum UI).Jakarta 1972

Jassin, H.B, Kesusasteraan Indonesia dimasa Djepang, Gunung Agung Jakarta, 1969

Jassin, H.B, *Kesusasteraan Indonesia modern dalam kritik dan esei*, Gunung Agung, Jakarta, 1955

Jaspan, M.A, *Social stratification and social mobility in Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta 1961

Kahin, George Mc Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca 1969

Kanahele, George S, The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence. A thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for Degree of Doctor of Philosophy, 1967 (diss)

Kementerian Penerangan. Djawatan Radio Republik Indonesia, *Sedjarah Radio di Indonesia*, Pertjetakan Seno, N.V. Jakarta, 1955

Kementerian Penerangan, *Kepartaian dan Parlementaria di Indonesia*, Jakarta 1954

Kementerian Penerangan, *Exim Bank*, Jakarta 1952

Kementerian Penerangan, *Subversive activities in Indonesia. The Jungschlager and Schmidt affairs*, Jakarta 1953

Kementerian Penerangan, *Keterangan Pemerintah tentang*

Kementerian Penerangan, *Keterangan Pemerintah tentang Peristiwa pengeluaran Schmidt*, Jakarta 1953

Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, Jakarta, 1953

Kementerian Penerangan RI, *Lukisan Revolusi Rakjat Indonesia*, Yogyakarta 1949

Keyfitz, Dr Nathan, Widjojo Nitisastro, *Soal penduduk dan pembangunan Indonesia, Pembangunan, Jakarta, 1955*

Kementerian Penerangan, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia*, Jakarta, 1957

Legge, J.D., *Indonesia*, New Jersey, 1964

Legge, J.D., *Soekarno a political Biography*, London, 1972

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, *Beberapa masalah penduduk di Indonesia*, Jakarta, 1971 (stencil)

Lembaga Bahasa Nasional, *Bahasa dan Kesusasteraan* (seri Chusus No.9/1972) Jakarta, 1972

Leirissa, R.Z., *Bukan disiplin Kadaver melainkan disiplin berdjiwa*, Gerakan *operasi-operasi militer terhadap Permesta*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta, 1965

Lev, Daniel, *The transition to guided Democracy in Indonesia*, Cornell University Press. Ithaca, 1964

Markas Besar Angkatan Darat, Himpunan Instruksi Pemerintah Militer dari Panglima Tentara dan Territorium Djawa, 1948 - 1949, Jakarta tanpa tahun (stencil)

Meek, John Paul. *The government and Economic Develeopment in Indonesia*, Ann Arbor 1956 (dissertasi)

——— *Menudju ke Ekonomi Marhaenis*, Yogyakarta, 1959s.

———*Menjeladjah Tracee baru. Kebangkitan Semangat 66*. Universitas Indonesia. Jakarta, 1966

Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Djambatan, Jakarta, 1967

Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1954

Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tintamas, Jakarta, 1969

Mohammad Hatta, *Dasar-dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1953

Mook Dr H.J. van, Indonesië, Nederland en de Wereld, Vorkink,- Bandung, 1949

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Prapantja, Jakarta, 1962

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan Jakarta, 1953

Nasution, A.H. *Sedjarah Perdjuangan nasional dibidang Bersendjata*, Mega Bookstore, Jakarta, 1964

Nasution, Djenderal A.H., *Tentara Nasional Indonesia II*, Seruling Masa Jakarta, 1968

Nasution, Djenderal A.H, *Kekaryaan ABRI*, Seruling Masa, Jakarta, 1972

Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan tentara Peta Blitar melawan Djepang* 14 Februari 1945, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1968

Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *The Coup Attempt of the September 30th Movement*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1968

Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi jang otentik dan Rumusan Puntjasila jang otentik*, Pusat Sedjarah ABRI, Jakarta, 1971

Nugroho Notosusanto, *The effects of Guerrilla on Armed Forces and Society*, Centre for Armed Forces History, Jakarta, 1974

Nugroho Notosusanto, *Armed Forces and Society in Indonesia, Past, Present and Future,* Centre for Armed Forces History, Jakarta, 1974

Nugroho Notosusanto, *The Peta Army in Indonesia, 1943–1945,* Centre for Armed Forces History, Jakarta, 1971

Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam,* Lembaga Sedjarah Hankam, Jakarta 1968

Ong Hok Ham, *Sapta Marga berkumandang di Sumatra; operasi-operasi menumpas pemberontakan PRRI,* Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta 1965

Osman Raliby, *Sedjarah Hari Pahlawan,* Tintamas, Jakarta, 1952

Paauw, Douglas S, *Financing Economic Development; the Indonesia Case,* The Free Press, Glencoe, 1959

Palmer, Leslie, *Indonesia and the Dutch,* Oxford University Press, London 1962

Pringgodigdo, Prof Mr. A.G., *Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942,* Jajasan Fonds Universitit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1952

Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, *40 Hari Kegagalan G.30.S,* Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta, 1965

———*Pembinaan Bahasa Indonesia,* Kongres Bahasa Indonesia, Medan 1959

Peratoeran-peratoeran Himpoenan Kebaktian Rakjat, Jakarta, 1944

Quispel, Lt ter Zee K.M.R., *Nederlandsch Indie in den tweede Wereld Oorlog,* London, 1945

Redmana, Hans R, *Beberapa Persoalan Penduduk di Indonesia,* LIPI, Jakarta 1970

Regeering Voorlichting Dienst, *Indonesia's Toekomst,* Batavia, 1946

Rochmani Santoso, *Bom waktu kolonialis Belanda meledak di Makassar,* Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta 1965

Roeslan Abdulgani, *25 tahun Indonesia – PBB,* Gunung Agung, Jakarta, 1971

Sidik Kertapati. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Pembaruan, 1964

Simatupang, Djenderal Major T.B.. *Laporan dari Banaran*, Pembangunan, Jakarta 1960

Soediro, *Pengalaman saja sekitar 17 Agustus 1945*, Idayu, Jakarta, 1972

Soedjito Sosrodihardjo, SH, M.A., Prof, *Perubahan struktur Masjarakat di Djawa, suatu analisa*, Fakultas Sosial Politik Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968

Soe Hok Gie, *Kisah Penumpasan RMS, Gerakan operasi Militer IV*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Jakarta, 1965

Soedradjat Djiwandono, J, *Masalah-masalah Ekonomi-Keuangan dan Pembangunan* Leknas, Jakarta, 1970

Soemitro Djojohadikoesoemo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, Pembangunan Jakarta, 1953

Soemitro Djojohadikoesoemo, Prof Dr, *Ekonomi Pembangunan*, Pembangunan Jakarta, 1955

Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa soal Keoeangan*, Poestaka Rakyat, Jakarta, 1947

Soekarno, Presiden, *Menjelamatkan Indonesia*, Kementerian Penerangan, Jakarta 1957

Soekarno, Presiden, *Res Publica, sekali lagi Res publica*, Departemen Penerangan, Jakarta, 1959

Sukarno, Presiden, *Susunlah konstitusi jang benar-benar konstitusi Res Publica*, Kementerian Penerangan, Jakarta, 1959

Susanto Tirtoprodjo SH, Drs, *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1963

Sugarda Purbakawatja, Prof, *Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, 1970

Sutan Sjahrir, *Out of exile*, New York 1949

Sutter, John O, *Indonesianisasi*, Cornell University, Ithaca, 1962

Takdir Alisjahbana, Sutan, *Dari Perdjuangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1957

Tan Goan Po, Drs, *Faktor-faktor strategis dalam kebidjaksanaan ekonomi ditinjau dari sudut pembangunan*, Pembangunan, Jakarta, 1955

Taylor, Alastair, M, *Indonesian Independence and the United Nations*, Stevens dan Sons, London, 1960

Teeuw. Prof Dr A. *Pokok dan Tokoh*, Pembangunan, Jakarta, 1958

The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1966

Urusan Pendidikan SMP, Jawatan Pendidikan Umum Dep. P.D. dan K. *Rentjana Peladjaran dan Pendidikan SMP Gaja Baru*, Balai Pustaka, Jakarta, 1964

Urusan Pendidikan SMA, Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.D. dan K.. *Rentjana peladjaran dan Pendidikan SMA Gaja Baru*, Balai Pustaka. Jakarta, 1964

Weerd, K.A. de *The Japanese occupation of Netherlands Indies. 1946*

Wertheim, W.F., *Indonesian Society in transition*, W van Hoeve, 's Gravenhage, 1959

Widjojo Nitisastro, *Hakekat dan konsekwensi Ketetapan MPRS di bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan*, Leknas, Jakarta, 1966

ARTIKEL–ARTIKEL

Abu Hanifah, "Pembangunan Negara dan Pendidikan Bangsa" *Kompas*, 21 Nopember 1972

Alwi Dahlan, "Komunikasi Mass-media dan Dunia Ilmu", *Sinar Harapan*, 5 Januari 1971

Andjar Asmara, "Sandiwara dimasa datang" *Mimbar Indonesia*, No.2, 23 Nopember 1947

Assegaf, D.H., "Mass media dan perkembangan bahasa" *Indonesia Raya*, Desember 1972

Assegaff, D.H, "10 tahun TVRI", *Indonesia Raya*, 28 September 1972

Anderson, Ben, "The problem of rice", *Indonesia* II, Oktober 1966

"Dasar Pokok Rantjangan ekonomi Indonesia", *Mimbar Indonesia*, No.2 Th I, 22 Nopember 1947s,

"Djatoehnja Soebang". Tentara Belanda menjerang doea kali tapi tak berhasil" *Asia Raya*, 28 Mei 1942

Davis, Ir F.J.H.,"Beknopt overzicht van den huidigen toestand der industrie in Nederlands Indie", *Economische Weekblad*, No.1 Th XII, 11 Februari 1946

Djoko Kentjono, "Penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia," Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai tjermin manusia Indonesia baru,

Djoko Kentjono, "Penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia," *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai tjermin manusia Indonesia baru*, Jakarta 1967

Djuanda, Ir, "Ekonomi Nasional". *Mimbar Indonesia*, No. 32. Th IV. 12 Agustus 1950

Dungga, J,A., "Studie pendahuluan dan perkembangan musik Indonesia," *Almanak Seni 1957.*

Effendi, O, "Seni bangunan di Indonesia," *Gema Suasana*, No.2, Februari 1948

"Gema suara" Madjalah Kebudajaan *Indonesia*, 6 Juni 1950

Gunawan Mohammad, "Kesenian dan Lingkungan," *Sinar Harapan*, 6 Nopember 1971

Hoed, B.H., "Pembakuan bahasa Indonesia", *Kompas*, 29 Juni 1972

Harimurti Kridaleksana, "Pembentukan Istilah Ilmiah dalam bahasa Indonesia" *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai tjermin manusia Indonesia baru*, Jakarta, 1967

Harahap, Frans, "In memoriam Cornel Simandjuntak," *Sinar Harapan*, 13 September 1971

Iskandar, Dr N, "Transmigrasi dan pemanfaatan Natural dan Human Resources" *Arti dan Peranan Transmigrasi di Indonesia dalam pembangunan dan Hankamnas.* Hasil Seminar Transmigrasi 1970, Jakarta 1971

"Kegiatan Cinematografi di Indonesia", *Gema Pemuda al Irsjad* No.6 Th III. September 1956

"Konferensi Perguruan Tinggi," *Pembangunan*, No.1. th II, 10 April 1947

Koentjaraningrat. R.M., The Javanese of south central Java" dalam G.P., Murdock (ed), *Social structure of Southeast Asia*, Chicago, 1960

Loekman Hakim, Mr, "Keadaan keuangan pada waktu sekarang dan djalan keluar untuk mengatasinja", *Menudju ekonomi Marhaenis*, Yogyakarta

"Masalah modernisasi senitari di Indonesia," *Berita Yudha*, 3 Juli 1972

Muqri Sukoco. "Laporan lengkap hasil seminar kesenian di Surakarta" *Abadi*, 16 Nopember 1972

"Menjongsong seperempat abad bagian Senirupa ITB", *Sinar Harapan*, 19 Juni 1972

"Oeraian tentang kelas masjarakat," *Pewarta*, No.1 Th I, 15 Juni 1946

Prillwitz, Ir, "De onderneming-landbouw tijden de Japanse bezetting," *Economische Weekblad*, No.1, th XII. Maret 1946

"Rentjana Produksi Tiga Tahun" (Plan Kasimo)" *Buku Penjongsong Konferensi Ekonomi antar Indonesia di Jogjakarta, 2 -8 Desember 1949*, Semarang 1949

"The resignation of Natsir Cabinet," *Indonesia Affairs*, Vol.I, No.3, March 1951

Rodenburgh, Mr.G.. "De suiker industrie op Java tijden de Japanse bezetting, *Economische Weekblad*, No.5 th XII. 13 April 1946

Rosihan Anwar, "Apakah persaingan antara pers ibukota dan pers daerah?", *Warta dan Masa*, No.1 - 6, tahun 1955- 1956

Tan Goan Tiong, Drs, "Beberapa akibat inflasi di Indonesia", *Mendjeladjah Tracee baru*, Jakarta 1966

Thayeb, Mr Moh,"Blokade Ekonomi," *Minbar Indonesia*, No.1, th II, 3 Januari 1947

Trisno Soemardjo, "Kedudukan Senirupa kita", *Almanak Seni 1957*, Jakarta 1958

Soebagio Resodipoero, "Bergerak ke Ekonomi Marhaenis," *Menudju ke Ekonomi Marhaenis*, Yogyakarta, 1959

Soebandi Resosoedarmo SH, "Perundang-undangan transmigrasi," *Arti dan Peranan Transmigrasi di Indonesia dalam Pembangunan dan Hankamnas,"* Hasil seminar transmigrasi 1970, Jakarta 1971

Sumitro Djojohadikusumo, "Beberapa Pemikiran mengenai kebidjaksanaan dibidang Perdagangan", *Prisma*, No.6 Oktober 1972

Soewarno, "Persatuan Tenaga Ekonomi", *Buku Penjongsong konferensi Ekonomi antar Indonesia di Jogjakarta, 2 8 Desember 1949*, Tanah Air, Semarang 1949

Sosrohadikoesoemo, Ir. "Kedoedoekan goela di Djawa", *Berita Perekonomian*, No.1, th I, 15 Mei 1946

Sri Edi Swasono, Dr, "Transmigrasi dalam perpektif pembangunan", *Arti dan peranan Transmigrasi dalam Pembangunan dan Hankamnas*. Hasil seminar transmigrasi. Jakarta 1971

Sri Edi Swasono, "Proteksi atau penyuluhan untuk pengusaha pribumi", *Indonesia Raya*, 28--29 Mei 1973

Suharso, "Urbanisasi di Indonesia," sebuah analisa kedjadian," *Prisma*, No.7 Desember 1972

Sullivan, John H., "The press and Politics in Indonesia" *Journalism Quarterly*, No.44, 1967

Subangun, Emanuel, "Rapat seniman-seniman sastra se Indonesia di TIM" *Kompas*, 9 Desember 1973

Usmar Ismail, "Sandiwara dan Masjarakat" *Madjalah Indonesia*, th X, 1949

Widjojo Nitisastro, "Rentjana Pembangunan Lima Tahun", *Administrasi Negara*, No. th X, Nopember 1970

MAJALAH–MAJALAH DAN PENERBITAN–PENERBITAN RESMI

Almanak Seni 1957, Badan Musjawarah Kebudajaan Nasional, Jakarta

Almanak Pers Indonesia 1957, Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Jakarta 1958

Almanak Pers Indonesia 1954--1955, ibid, Jakarta, 1956

Bahtera, (1947) Banjarmasin

Berita Perekonomian (1945–1946) Jakarta,

Berita Repoeblik Indonesia (1945–1946)

Bulletin Departemen P dan K, (1973), Jakarta

Djawa Baroe, Djawa Shimbunkai, (1943–1945) Jakarta

Gema Pemuda al Irsjad (1950), Jakarta

Indonesia, madjalah kebudajaan (1949), Jakarta

Indonesia Merdeka, (1945) Jakarta

Indonesia Affairs, (1951), Jakarta

Kan Po (Berita Pemerintah) (1942–1945), Jakarta

Makmoer, Madjalah Ekonomi (1945–1946), Jakarta

Mimbar Indonesia, (1947–1950), Jakarta

Pandji Poestaka (1942 1943). Jakarta
Prisma (1972 1973). Jakarta
Resimen Tentara Perdjuangan (1947). Garut
Soeara MIAI. (1942 1943). Jakarta
Siasat. Warta Sepekan. (1950). Jakarta
Siaran dan Masjarakat Indonesia (1950). Jakarta
Tentara Keamanan Rakjat (1946) Yogyakarta
Warta dan Masa (1955 1956) Jakarta
World Communication (1951) Unesco
Voice of Free Indonesia. HIPI (1945 1946) Jakarta

SURATKABAR-- SURATKABAR
Abadi. (1972) Jakarta
Antara. (1946–1950) Jakarta, Yogyakarta
Asia Raya (1942 1945). Jakarta
Berita Yudha. (1972). Jakarta.
Evening News (1945). Jakarta
Harian Rakjat (1959), Jakarta
Independent. (1945) Jakarta
Kompas. (1970--1973). Jakarta
Kedaulatan Rakjat (1945 1948). Yogyakarta
Lasjkar (1945--1946) Surakarta
Min Puo (1946--1947) Jogjakarta
Nasional (1945–1948) Yogyakarta
Pemandangan (1942). Jakarta
Semangat Merdeka (1945) Kutaraja (Banda Aceh)
Sinar Harapan. (1972) Jakarta
Soeara Moeda (1945). Surakarta
Soeloch Merdeka. (1946--1948) Medan
Soeara Merdeka (1945 --1948) Tasikmalaya
Suluh Indonesia (1959). Jakarta
Tjahaja. (1942 1945). Bandung

Direktorat Pembinaan
Sejarah dan